



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 menjadi:

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Data dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- c. Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003



Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2024
Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

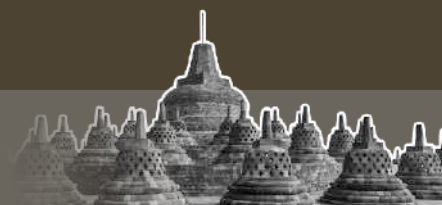


BUKU 1

**“Jawa Tengah
yang Semakin Sejahtera
dan Lestari”**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2 Kondisi Demografi	II-9
2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah	II-17
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-17
2.3.2 PDRB Per Kapita.....	II-24
2.3.3 Inflasi	II-27
2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson	II-28
2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah	II-30
2.3.6 Investasi	II-31
2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan	II-36
2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah	II-48
2.3.9 Perdagangan	II-52
2.3.10 Perindustrian.....	II-55
2.3.11 Pariwisata.....	II-57
2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-58
2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	II-69
2.3.14 Perhubungan	II-74
2.3.15 Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa.	II-84
2.4 Sumber Daya Manusia	II-87
2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-87
2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	II-88
2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-89
2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender	II-91
2.4.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-92
2.4.6 Indeks Pembangunan Olahraga	II-94
2.4.7 Pendidikan.....	II-95
2.4.8 Kesehatan.....	II-100
2.4.9 Kesejahteraan Sosial.....	II-108
2.4.10 Tenaga Kerja	II-112
2.4.11 Pemberdayaan Perempuan dan Anak	II-120
2.4.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-124
2.4.13 Kepemudaan dan Olahraga	II-126
2.4.14 Perpustakaan	II-128
2.4.15 Transmigrasi.....	II-131

2.5	Konsisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan .	II-131
2.5.1	Daya Dukung dan Daya Tampung	II-132
2.5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-134
2.5.3	Perubahan Iklim	II-135
2.5.4	Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	II-138
2.5.5	Rehabilitasi Lahan Kritis, Konservasi dan Perlindungan Hutan ...	II-144
2.5.6	Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan..	II-148
2.5.7	Pertambangan	II-151
2.5.8	Penataan Ruang	II-153
2.5.9	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-161
2.5.10	Penanggulangan Bencana	II-171
2.6	Kondisi Tata Kelola Pemerintahan.....	II-195
2.6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-195
2.6.2	Pelayanan Publik	II-197
2.6.3	Demokrasi	II-198
2.6.4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	II-198
2.6.5	Penelitian dan Pengembangan.....	II-208
2.6.6	Kearsipan	II-211
2.6.7	Akuntabilitas Kinerja	II-212
2.6.8	Manajemen ASN	II-213
2.6.9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-215
2.6.10	Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II-219
2.6.11	Perencanaan	II-223
2.6.12	Pengawasan.....	II-223
2.7	Kondusivitas Daerah	II-232
2.8	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2023	II-234
2.9	Permasalahan Pembangunan	II-235
2.9.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-235
2.9.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-238
2.9.3	Isu Strategis Daerah	II-249
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Dinamika Perekonomian Global	III-1
3.1.2	Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional.....	III-2
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	III-3
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-6
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
3.2.4	Sumber Pendanaan Lainnya	III-20
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-2
4.2.1	Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-2

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA..... V-1

5.1 Arah Kebijakan Umum..... v-1

5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah v-1

5.3 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah..... v-3

5.4 Arah Per Wilayah Pengembangan v-4

5.4.1 Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur V-4

5.4.2 Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti..... V-8

5.4.3 Wilayah Pengembangan (WP) Banglor..... V-12

5.4.4 Wilayah Pengembangan (WP) Galangmanggung..... V-15

5.4.5 Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar..... V-19

5.4.6 Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo..... V-21

5.4.7 Wilayah Pengembangan (WP) Subosukowonosraten..... V-24

5.4.8 Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang..... V-29

5.4.9 Wilayah Pengembangan (WP) Petanglong..... V-33

5.4.10 Wilayah Pengembangan (WP) Cibalingmas..... V-37

5.4.11 Arah Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi..... V-40

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1

6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025..... VI-1

6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-2

6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayan Dasar..... VI-2

6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar VI-7

6.2.3 Urusan Pilihan..... VI-16

6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... VI-23

6.2.5 Unsur Penunjang Pemerintahan..... VI-25

6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... VI-27

6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum..... VI-27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VII-1

7.1 Indikator Kinerja Utama..... VII-1

7.2 Indikator Kinerja Daerah..... VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah	II-3
Tabel	2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019	II-3
Tabel	2.3 Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah	II-8
Tabel	2.4 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2019-2023	II-9
Tabel	2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2019-2023	II-10
Tabel	2.6 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-11
Tabel	2.7 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-13
Tabel	2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-14
Tabel	2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-17
Tabel	2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 (%)	II-24
Tabel	2.11 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)	II-27
Tabel	2.12 Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2023	II-33
Tabel	2.13 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2023 ...	II-33
Tabel	2.14 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah	II-43
Tabel	2.15 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	II-44
Tabel	2.16 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah	II-46
Tabel	2.17 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-49
Tabel	2.18 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	II-50
Tabel	2.19 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..	II-50
Tabel	2.20 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2023 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	II-51
Tabel	2.21 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-53
Tabel	2.22 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)	II-54
Tabel	2.23 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)	II-54
Tabel	2.24 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)	II-55
Tabel	2.25 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-55

Tabel	2.26	Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023.....	II-56
Tabel	2.27	Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-57
Tabel	2.28	Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	II-57
Tabel	2.29	Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-57
Tabel	2.30	Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-58
Tabel	2.31	Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-59
Tabel	2.32	Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-60
Tabel	2.33	Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..	II-60
Tabel	2.34	Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022.....	II-61
Tabel	2.35	Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023	II-62
Tabel	2.36	Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022	II-62
Tabel	2.37	Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022	II-63
Tabel	2.38	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah	II-66
Tabel	2.39	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023	II-66
Tabel	2.40	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023	II-66
Tabel	2.41	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2023.....	II-67
Tabel	2.42	Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumbernya.....	II-68
Tabel	2.43	Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	II-68
Tabel	2.44	Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis.....	II-68
Tabel	2.45	Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-69
Tabel	2.46	Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-70
Tabel	2.47	Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-71
Tabel	2.48	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023	II-71
Tabel	2.49	Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 melalui APBD Provinsi	II-73
Tabel	2.50	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-73
Tabel	2.51	Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-74

Tabel	2.52	Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 -2023.....	II-75
Tabel	2.53	Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-75
Tabel	2.54	Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2019 - 2023..	II-76
Tabel	2.55	Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2019 – 2023 ..	II-76
Tabel	2.56	Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2023.....	II-77
Tabel	2.57	Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2019 – 2023	II-78
Tabel	2.58	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2019 – 2023.....	II-78
Tabel	2.59	Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2019 – 2023....	II-79
Tabel	2.60	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023.....	II-79
Tabel	2.61	Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2019 – 2023	II-80
Tabel	2.62	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2022 - 2023	II-80
Tabel	2.63	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2023	II-81
Tabel	2.64	Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2023	II-81
Tabel	2.65	Perlindungan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-81
Tabel	2.66	Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-82
Tabel	2.67	Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2023 ...	II-82
Tabel	2.68	Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2017 – 2023	II-83
Tabel	2.69	Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2023.....	II-83
Tabel	2.70	Rekapitulasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2023.....	II-84
Tabel	2.71	Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2023	II-84
Tabel	2.72	Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2023.....	II-85
Tabel	2.73	Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Lanjut Usia terlantar Tahun 2019-2023.....	II-86
Tabel	2.74	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021 ..	II-86
Tabel	2.75	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-90
Tabel	2.76	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-91
Tabel	2.77	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (%).....	II-92
Tabel	2.78	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 (%)	II-92
Tabel	2.79	Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%).....	II-94
Tabel	2.80	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022	II-94

Tabel 2.81	Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-96
Tabel 2.82	Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022	II-97
Tabel 2.83	Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2022.....	II-97
Tabel 2.84	Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-98
Tabel 2.85	Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2.86	Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023 ..	II-100
Tabel 2.87	Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022	II-100
Tabel 2.88	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	II-101
Tabel 2.89	Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023.....	II-101
Tabel 2.90	Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-106
Tabel 2.91	Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-108
Tabel 2.92	Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023.....	II-109
Tabel 2.93	Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-110
Tabel 2.94	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%).....	II-110
Tabel 2.95	Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-111
Tabel 2.96	Kondisi PSKS Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.97	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..	II-112
Tabel 2.98	Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-113
Tabel 2.99	Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II-113
Tabel 2.100	Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021.....	II-114
Tabel 2.101	Keterserapan Bansos Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II-115
Tabel 2.102	Data KUBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II-116
Tabel 2.103	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-120
Tabel 2.104	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-121
Tabel 2.105	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%).....	II-121
Tabel 2.106	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-121
Tabel 2.107	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-122

Tabel 2.108	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-122
Tabel 2.109	Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-123
Tabel 2.110	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2023	II-123
Tabel 2.111	Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-124
Tabel 2.112	Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023	II-124
Tabel 2.113	Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2019-2023	II-125
Tabel 2.114	Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	II-126
Tabel 2.115	Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2019-2023	II-127
Tabel 2.116	Perkembangan Tri Bina 2019-2023	II-127
Tabel 2.117	Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023	II-129
Tabel 2.118	Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional	II-130
Tabel 2.119	Capaian Sport Development Index Tahun 2021-2022	II-130
Tabel 2.120	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Orang)	II-131
Tabel 2.121	Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-131
Tabel 2.122	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023	II-132
Tabel 2.123	Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-133
Tabel 2.124	Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2022	II-138
Tabel 2.125	Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2022	II-139
Tabel 2.126	Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-140
Tabel 2.127	Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-142
Tabel 2.128	Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023	II-143
Tabel 2.129	Rekapitulasi Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Proper Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023	II-144
Tabel 2.130	Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023	II-145
Tabel 2.131	Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2.132	Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-147
Tabel 2.133	Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-147
Tabel 2.134	Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-147

Tabel 2.135	Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2019–2023	II-148
Tabel 2.136	Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-149
Tabel 2.137	Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-149
Tabel 2.138	Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2019–2023	II-150
Tabel 2.139	Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-151
Tabel 2.140	Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023.....	II-152
Tabel 2.141	Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah Per 19 Januari 2024	II-153
Tabel 2.142	Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Per 19 Januari 2024 terdapat 3 Perda RDTR dan 33 Perkada RDTR	II-156
Tabel 2.143	Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	II-158
Tabel 2.144	Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2023	II-159
Tabel 2.145	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-162
Tabel 2.146	Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-163
Tabel 2.147	Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	II-167
Tabel 2.148	Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-189
Tabel 2.149	Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023	II-190
Tabel 2.150	Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-190
Tabel 2.151	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-191
Tabel 2.152	Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-192
Tabel 2.153	Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2022.....	II-192
Tabel 2.154	Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-193
Tabel 2.155	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2019 – 2023	II-193
Tabel 2.156	Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-194
Tabel 2.157	Catatan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023.....	II-195
Tabel 2.158	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-196
Tabel 2.159	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu Tahun 2021 - 2023	II-205

Tabel 2.160	Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Tahun 2019-2023.....	II-208
Tabel 2.161	Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023.....	II-209
Tabel 2.162	Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-210
Tabel 2.163	Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-210
Tabel 2.164	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023.....	II-211
Tabel 2.165	Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-211
Tabel 2.166	Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-212
Tabel 2.167	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-212
Tabel 2.168	PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar Tahun 2019-2023	II-213
Tabel 2.169	Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2023	II-214
Tabel 2.170	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023.....	II-218
Tabel 2.171	Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-219
Tabel 2.172	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 ..	II-219
Tabel 2.173	Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-223
Tabel 2.174	Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-224
Tabel 2.175	Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	II-225
Tabel 2.176	Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	II-225
Tabel 2.177	Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa Tengah Tahun 2022	II-226
Tabel 2.178	Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-226
Tabel 2.179	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-233
Tabel 2.180	Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023	II-235
Tabel 2.181	Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Tahun 2025	II-250
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 ...	III-4
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023	III-7
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 (%).....	III-8
Tabel 3.4	Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ...	III-9
Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	III-10

Tabel	3.6	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023	III-11
Tabel	3.7	Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	III-12
Tabel	3.8	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	III-15
Tabel	3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023	III-15
Tabel	3.10	Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	III-16
Tabel	3.11	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	III-16
Tabel	3.12	Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	III-17
Tabel	3.13	Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	III-18
Tabel	3.14	Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	III-19
Tabel	3.15	Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	III-20
Tabel	3.16	Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2023	III-21
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	IV-2
Tabel	4.2	Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025	IV-12
Tabel	4.3	Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2025	IV-15
Tabel	4.4	Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-136
Tabel	4.5	Keselarasan Target Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Target Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Dalam RKP Tahun 2025	IV-136
Tabel	4.6	Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-136
Tabel	5.1	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2023	V-5
Tabel	5.2	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2025	V-7
Tabel	5.3	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekuti Tahun 2023	V-9
Tabel	5.4	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2025	V-11
Tabel	5.5	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2023	V-13
Tabel	5.6	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2025	V-13
Tabel	5.7	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Gelangmanggung Tahun 2023	V-16

Tabel	5.8	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Gelangmanggung Tahun 2025.....	V-18
Tabel	5.9	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wonobanjar Tahun 2023	V-21
Tabel	5.10	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wonobanjar Tahun 2025.....	V-21
Tabel	5.11	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Keburejo Tahun 2023.....	V-23
Tabel	5.12	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Keburejo Tahun 2025.....	V-24
Tabel	5.13	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2023	V-26
Tabel	5.14	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2025	V-29
Tabel	5.15	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2023.....	V-31
Tabel	5.16	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2025.....	V-33
Tabel	5.17	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022.....	V-35
Tabel	5.18	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2025.....	V-37
Tabel	5.19	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Cibanglimas Tahun 2023	V-39
Tabel	5.20	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Cibalingmas Tahun 2025	V-40
Tabel	6.1	Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	VI-1
Tabel	6.2	Rencana Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ...	VI-27
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	VII-1
Tabel	7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	VII-2
Tabel	7.3	Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Rakortek Pembangunan Tahun 2024.....	VII-9
Tabel	7.4	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang Selaras Dengan Sasaran Pembangunan.....	VII-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antardokumen	I-6
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar 2.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	II-15
Gambar 2.3	Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023.....	II-16
Gambar 2.4	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-16
Gambar 2.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023	II-19
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Per Triwulan Tahun 2017-2023 (Persen).....	II-19
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2023 (persen)	II-20
Gambar 2.8	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2023 (%)	II-21
Gambar 2.9	Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)..	II-22
Gambar 2.10	Kontribusi Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (%)	II-22
Gambar 2.11	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (%)	II-23
Gambar 2.12	Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen).....	II-25
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2023.....	II-25
Gambar 2.14	PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2023	II-26
Gambar 2.15	PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022	II-28
Gambar 2.16	Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Januari 2024 (%).....	II-28
Gambar 2.17	Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023.....	II-20
Gambar 2.18	Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	II-30
Gambar 2.19	Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.....	II-30
Gambar 2.20	Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021	II-32
Gambar 2.21	Nilai PMTB Jawa Tengah 2013 – 2022.....	II-34
Gambar 2.22	Kontribusi PMTB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013 – 2022.....	II-35
Gambar 2.23	Kontribusi PMTB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013 – 2022.....	II-35
Gambar 2.24	Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013 – 2022	II-36
Gambar 2.25	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	II-37
Gambar 2.26	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-38

Gambar 2.27	Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022	II-39
Gambar 2.28	Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar Tahun 2018-2022	II-39
Gambar 2.29	Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022...	II-40
Gambar 2.30	Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun (2019-2023)	II-40
Gambar 2.31	Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2019-2023	II-41
Gambar 2.32	Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun (2019-2023).....	II-42
Gambar 2.33	Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-43
Gambar 2.34	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (2019-2023)	II-44
Gambar 2.35	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2023)	II-47
Gambar 2.36	Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022	II-48
Gambar 2.37	Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2023)	II-48
Gambar 2.38	Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%)	II-66
Gambar 2.39	Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2017 - 2022	II-68
Gambar 2.40	Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah	II-76
Gambar 2.41	Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah	II-78
Gambar 2.42	Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah.....	II-79
Gambar 2.43	Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-87
Gambar 2.44	IPM Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-89
Gambar 2.45	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021	II-89
Gambar 2.46	IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022	II-91
Gambar 2.47	APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023	II-98
Gambar 2.48	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (%)	II-102
Gambar 2.49	Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023.....	II-103
Gambar 2.50	Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2019-2023	II-104
Gambar 2.51	Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2019-2023	II-104
Gambar 2.52	Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2019-2023	II-105
Gambar 2.53	Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022	II-106
Gambar 2.54	Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021	II-107
Gambar 2.55	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2023 (Februari-Agustus) (%)	II-117

Gambar 2.56	Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-117
Gambar 2.57	Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2023	II-118
Gambar 2.58	Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022	II-118
Gambar 2.59	TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%)	II-119
Gambar 2.60	Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (%)	II-119
Gambar 2.61	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)	II-120
Gambar 2.62	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah)	II-120
Gambar 2.63	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020	II-133
Gambar 2.64	Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah	II-136
Gambar 2.65	Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-136
Gambar 2.66	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023	II-137
Gambar 2.67	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018–2023	II-137
Gambar 2.68	Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-138
Gambar 2.69	Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021	II-139
Gambar 2.70	Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022	II-140
Gambar 2.71	Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022	II-176
Gambar 2.72	Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah	II-130
Gambar 2.73	Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY	II-16
Gambar 2.74	Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 (GWh)	II-161
Gambar 2.75	Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 (Unit)	II-162
Gambar 2.76	Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah	II-164
Gambar 2.77	Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Provinsi Jawa Tengah	II-164
Gambar 2.78	Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah	II-165
Gambar 2.79	Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023	II-166
Gambar 2.80	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah	II-168
Gambar 2.81	Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak	II-168
Gambar 2.82	Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang	II-169
Gambar 2.83	Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah	II-170
Gambar 2.84	Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah	II-171
Gambar 2.85	Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah	II-172
Gambar 2.86	Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Provinsi Jawa Tengah	II-173

Gambar 2.87 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah.....	II-174
Gambar 2.88 Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah	II-175
Gambar 2.89 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah	II-176
Gambar 2.90 Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah	II-177
Gambar 2.91 Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah	II-178
Gambar 2.92 Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah.....	II-179
Gambar 2.93 Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah.....	II-180
Gambar 2.94 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah	II-181
Gambar 2.95 Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.....	II-182
Gambar 2.96 Peta Bahaya likuifaksi Provinsi Jawa Tengah	II-183
Gambar 2.97 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng	II-183
Gambar 2.98 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu.....	II-184
Gambar 2.99 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi	II-185
Gambar 2.100Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu	II-185
Gambar 2.101Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet	II-186
Gambar 2.102Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing	II-183
Gambar 2.103Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro	II-187
Gambar 2.104Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran.....	II-188
Gambar 2.105Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah.....	II-191
Gambar2.106 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah	II-194
Gambar2.107 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-196
Gambar2.108 Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	II-197
Gambar2.109 Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023	II-198
Gambar2.110 Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah .	II-199
Gambar2.111 Topologi Jaringan Perangkat Daerah.....	II-199
Gambar2.112 Topologi Jaringan Metro Kab/Kota.....	II-200
Gambar2.113 Aplikasi Terintegrasi Single Sign On Provinsi Jawa Tengah	II-200
Gambar2.114 Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektorial	II-203
Gambar2.115 Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022	II-204
Gambar2.116 Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-214
Gambar2.117 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)	II-215
Gambar2.118 Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-216
Gambar2.119 Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-219
Gambar2.120 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-220
Gambar2.121 Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2023	II-221
Gambar2.122 Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah.....	II-233
Gambar 4.1 Gambaran Keselarasan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, dan Prioritas Daerah Tahun 2025	IV-12
Gambar 4.2 Gambaran Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dengan Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025	IV-14

Gambar 4.3	Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah (PB Backlog).....	IV-145
Gambar 4.4	Pembangunan Baru Relokasi di Provinsi Jawa Tengah (PB Relokasi)	IV-145
Gambar 4.5	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah (PB Bencana)	IV-147
Gambar 4.6	Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022	IV-148
Gambar 4.7	Perkembangan Alokasi Bantuan Keuangan Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	IV-149
Gambar 4.8	Platform Lapak BUMDES pada Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah.....	IV-150
Gambar 5.1	Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah.....	V-2
Gambar 5.2	Pembagian Wilayah Pengebangan Provinsi Jawa Tengah	V-3
Gambar 5.3	Nilai PDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur Tahun 2023	V-5
Gambar 5.4	Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur	V-9
Gambar 5.5	Nilai PDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Jekutibanglor Tahun 2023	V-10
Gambar 5.6	Arah Pengembangan Wilayah Jekuti	V-12
Gambar 5.7	Arah Pengembangan Wilayah Banglor.....	V-15
Gambar 5.8	Nilai PDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2023	V-17
Gambar 5.9	Arah Pengembangan Wilayah Galangmanggung	V-20
Gambar 5.10	Arah Pengembangan Wilayah Keburejo	V-26
Gambar 5.11	Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Subosukowonosraten.....	V-27
Gambar 5.12	Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten	V-31
Gambar 5.13	Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Bregasmalang Tahun 2023	V-32
Gambar 5.14	Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang	V-35
Gambar 5.15	Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Petanglong Tahun 2023 .	V-36
Gambar 5.16	Arah Pengembangan Wilayah Petanglong	V-38
Gambar 5.17	Arah Pengembangan Wilayah Petanglong	V-42

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan

turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 juga memperhatikan proyeksi dalam RKPD Tahun 2024. RKPD Tahun 2025 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Terdapat 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Jawa Tengah di Tahun 2025 yang meliputi: Menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial budaya, keamanan dan ketertiban; Penuntasan pengentasan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), penurunan angka pengangguran dan *stunting*; Pemantapan ketahanan pangan, energi dan air; Perkuatan pengembangan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, dan Pendidikan (vokasi); Peningkatan kualitas layanan dan promosi Kesehatan masyarakat; Pengembangan investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing UMKM; Pengembangan ekonomi sirkuler dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; Penanganan dampak perubahan iklim dan

ketahanan bencana (kekeringan, polusi, krahutla, banjir, rob dan tanah longsor); Meningkatkan pengawasan internal ASN, peningkatan layanan publik dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota pasca Pilkada serentak.

RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2025 meliputi: 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, 5) ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dengan implementasi kebijakan kewilayahan serta sarana dan prasarana, yang didukung dengan kerangka implementasi berupa kaidah pelaksanaan (kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan investasi, serta kerangka pengendalian dan evaluasi). Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2025 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan

4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2025; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

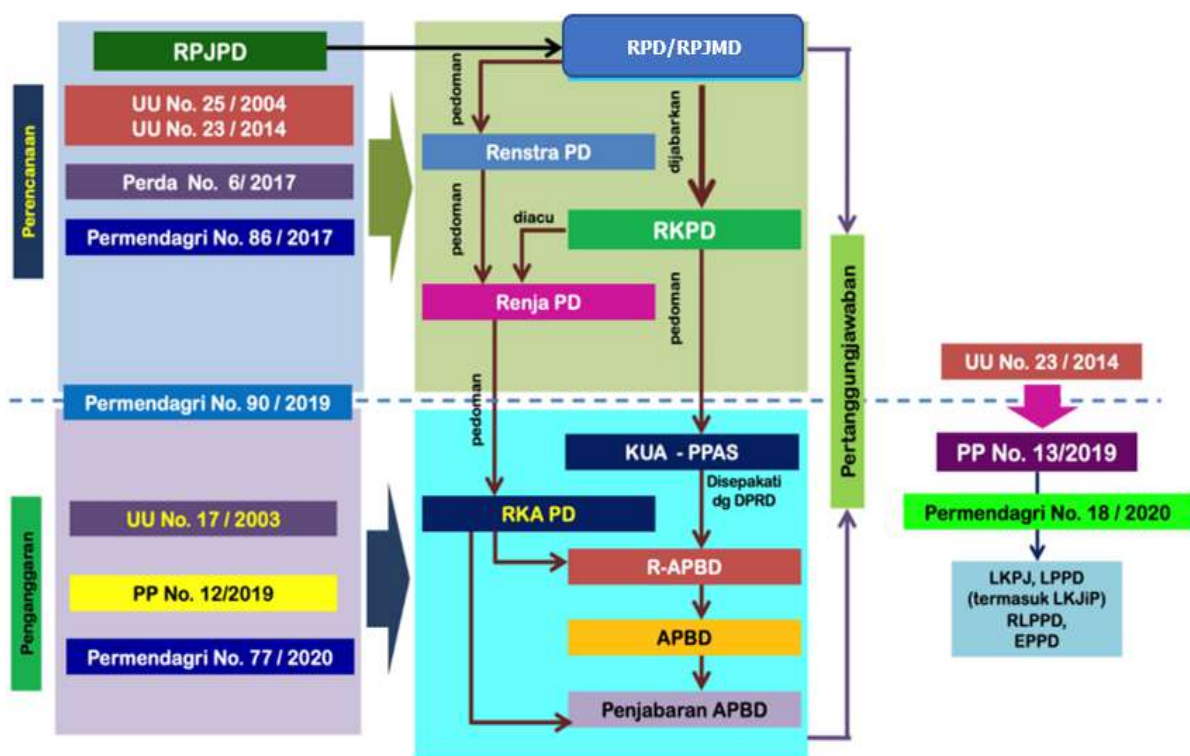
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Hubungan Antardokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.



Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I**, dokumen RKPD Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2023 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2023; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dalam RPD, 10 (sepuluh) program prioritas, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah.

- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2025.
- BAB VIII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari:
 - 1) Capaian Indikator Kinerja Utama;
 - 2) Capaian Indikator Kinerja Daerah;
 - 3) Capaian Indikator Kinerja Program.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika*, *Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, Batuapung, *Trass*, *Diatome*, *Marmer*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit*, *Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Kondisi Hidrologi

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Citanduy (Jabar, Jateng), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km²) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km²). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km ²)
Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
	Jratun Seluna	9.576,01
	Bengawan Solo	19.778,00
	Progo Opak Serang	3.238,89
	Serayu Bogowonto	7.344,61
	Citanduy	4.450,44
Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
	Bodri Kuto	1.647,40
Kabupaten/Kota	Wiso Gelis	654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Kondisi Klimatologi

Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22,00C sampai dengan 35,20C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

f. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.438.683,70 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan. Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Cagar Alam	2.770,02	0,08
2	Danau	16.731,58	0,49
3	Hutan Lindung	86.866,17	2,53
4	Hutan Produksi Terbatas	181.439,19	5,28
5	Hutan Produksi Tetap	366.459,45	10,66
6	Industri	10.547,83	0,31
7	Kebun	638.419,21	18,58
8	Lahan Terbuka	5.179,25	0,15
9	Mangrove	2.894,14	0,08
10	Pasir Darat	178,62	0,01
11	Permukiman	558.687,35	16,26
12	Sawah	1.181.758,99	34,39
13	Semak	30.941,91	0,90
14	Suaka Margasatwa	102,48	0,00
15	Sungai	23.718,78	0,69

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
16	Taman Hutan Raya	2.318	0,01
17	Taman Nasional	11.888,17	0,35
18	Taman Nasional Laut	183,65	0,01
19	Taman Wisata Alam	216,39	0,01
20	Tambak	56.925,79	1,66
21	Tegalan	260.456,73	7,58
	TOTAL	3.438.683,70	100,00

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, potensi dan karakter wilayahnya dibagi atas 8 (delapan) wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomangung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Potensi keseluruhan terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas ±995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.

d) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).

e) Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ± 24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

- 1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
- 2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing-Dieng, Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
- 2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condroidimuka;
- 3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marginal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; Borobudur–Dieng; Semarang–Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora; Semarang–Ambarawa–Salatiga; Batang–Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes; Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara; dan Cilacap–Kebumen–Purworejo.

j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
- 2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2. Kawasan Lindung

Target rencana Kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ±114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ±59.918 hektar, meliputi:

- 1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ±23.583 hektar;
- 2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ±8.786 hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
- 3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ±24.618,2 hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;
- 4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

- 1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
- 2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan.

e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

- 1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.

Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
A	Konservasi Wilayah I Pati		
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
4	Cagar Alam Gunung Celing	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
B	Konservasi Wilayah II Surakarta		
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggungan	Kabupaten Sragen	103,9
C	Konservasi Wilayah III Cilacap		
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
D.	Konservasi Wilayah IV Pemalang		
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
	Jumlah		2.923.3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

- 2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ±12.135 hektar, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ±6.410 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ±5.725 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ±111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- 3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I berada di Berjo – Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas ± 2.318 Hektar, dan Kebun

Raya Baturaden di Kabupaten Banyumas seluas ±150 hektar.

- 4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang;
- 5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
- 6) Daerah pantai berhutan bakau seluas ±10.718,51 hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2023 sebanyak 37.540.962 jiwa, naik sebesar 2,9 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2019 yaitu sebesar 34.552.331. Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah serta Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan per tahun (%)	Rasio jenis kelamin
2019	34.552.331	0,76	98,49
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07
2023	37.540.962	1,01	101,03

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2021-2023.

Pada periode tahun 2019-2022, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05

persen terdapat di 2 (dua) kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)
Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Cilacap	1.718.824	1.944.857	1.963.824	1.988.622	2.007.829
Kab Banyumas	1.685.078	1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573
Kab Purbalingga	929.403	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333
Kab Banjarnegara	918.715	1.017.767	1.026.866	1.038.718	1.047.226
Kab Kebumen	1.192.013	1.350.438	1.361.913	1.376.825	1.397.555
Kab Purworejo	714.816	769.880	773.588	778.257	788.265
Kab Wonosobo	786.703	879.124	886.613	896.346	909.664
Kab Magelang	1.284.627	1.299.859	1.305.512	1.312.573	1.330.656
Kab Boyolali	980.086	1.062.713	1.070.247	1.079.952	1.090.129
Kab Klaten	1.169.330	1.260.506	1.267.272	1.275.850	1.284.386
Kab Sukoharjo	887.484	907.587	911.603	916.627	932.680
Kab Wonogiri	954.646	1.043.177	1.049.292	1.057.087	1.051.085
Kab Karanganyar	882.473	931.963	938.808	947.642	955.116
Kab Sragen	886.196	976.951	983.641	992.243	997.485
Kab Grobogan	1.371.423	1.453.526	1.460.873	1.470.150	1.492.891
Kab Blora	860.957	884.333	886.147	888.224	901.621
Kab Rembang	635.294	645.333	647.766	650.770	660.166
Kab Pati	1.253.363	1.324.188	1.330.983	1.339.572	1.359.364
Kab Kudus	867.154	849.184	852.443	856.472	874.632
Kab Jepara	1.252.090	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.221.086
Kab Demak	1.157.421	1.203.956	1.212.377	1.223.217	1.240.510
Kab Semarang	1.049.002	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648
Kab Temanggung	768.405	790.174	794.403	799.764	808.446
Kab Kendal	966.313	1.018.505	1.025.020	1.033.367	1.052.826
Kab Batang	764.970	801.718	807.005	813.791	828.883
Kab Pekalongan	893.290	968.821	976.504	986.455	1.007.384
Kab Pemalang	1.296.559	1.471.489	1.484.209	1.500.754	1.523.622
Kab Tegal	1.433.464	1.596.996	1.608.611	1.623.595	1.654.836
Kab Brebes	1.800.142	1.978.759	1.992.685	2.010.617	2.043.077
Kota Magelang	121.555	121.526	121.610	121.675	122.150
Kota Surakarta	517.045	522.364	522.728	523.008	526.870

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	193.231	192.322	193.525	195.065	198.920
Kota Semarang	1.806.319	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743
Kota Pekalongan	305.505	307.150	308.310	309.742	317.524
Kota Tegal	248.635	273.825	275.781	278.299	282.781
Jawa Tengah	34.552.531	36.516.035	36.742.501	37.032.410	37.540.962

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 2.6.
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

Tahun	Jawa Tengah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan					
		Banyumas	Kedu	Surakarta	Pekalongan	Pati	Semarang
2019	1.053	1.018	929	1.099	1.203	860	1.209
2020	1.113	1.112	994	1.174	1.320	863	1.214
2021	1.120	1.122	1.000	1.180	1.329	866	1.221
2022	1.129	1.134	1.008	1.189	1.342	870	1.228
2023	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023).

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km² diikuti eks-Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km², sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km². Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km².

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2019-2023, angka beban ketergantungan di Jawa Tengah fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 53,71 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 53 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65 persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen, terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.7.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan (%)
2019	7.839.940	23.636.420	3.076.170	46,18
2020	8.190.778	24.506.691	2.818.566	43,15
2021	8.148.545	25.619.556	2.924.400	43,42
2022	8.123.792	25.768.441	3.140.177	53,71
2023	8.125.741	25.672.387	3.742.834	46,24

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 – 2019 menurun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 11,79 pada Maret 2021. Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah setelah tahun 2021 juga

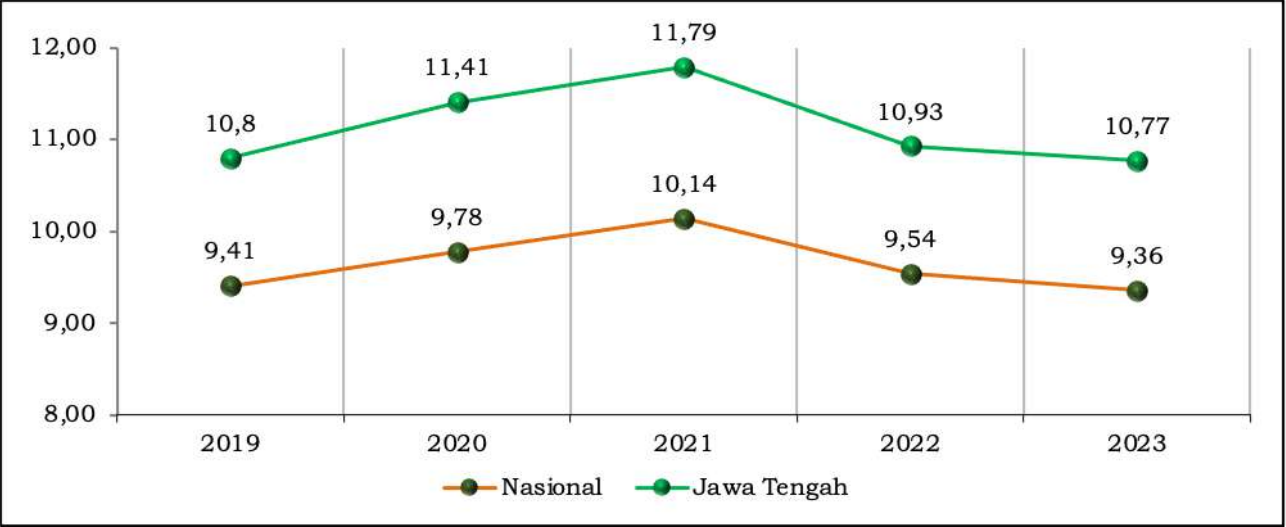
mengalami penurunan dari 10,93 persen pada Maret 2022 menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 39,94 ribu orang dari 3.831,44 ribu orang (Maret 2022) menjadi 3.791,50 ribu orang (Maret 2023). Periode Maret 2022 - Maret 2023, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 9,92% menjadi 9,78% namun secara absolut jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 3,41 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,04% menjadi 11,87% atau berkurang sebanyak 43,36 ribu orang.

Tabel 2.8.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2019	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
2020	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
2021	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
2022	1.818.25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret (Angka kemiskinan periode September 2023 tidak rilis).

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional

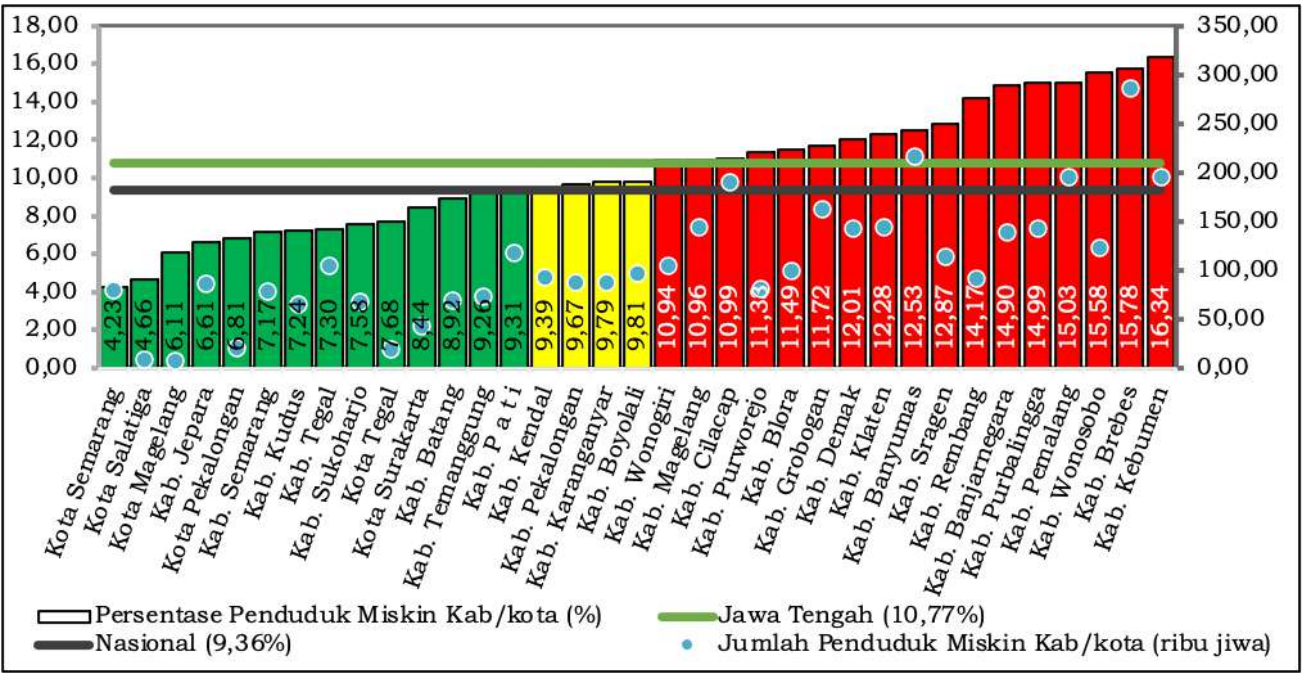


Sumber: BPS, Rilis Periode Maret 2023.

Gambar 2.2.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019 – 2023

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2023 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Wonogiri, Magelang, Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Kendal, Pekalongan, Karanganyar dan Boyolali;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kab. Batang, Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali, Kab. Wonogiri, Kab. Magelang, Kab. Cilacap, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Banyumas, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Wonosobo, Kab. Brebes dan Kab. Kebumen

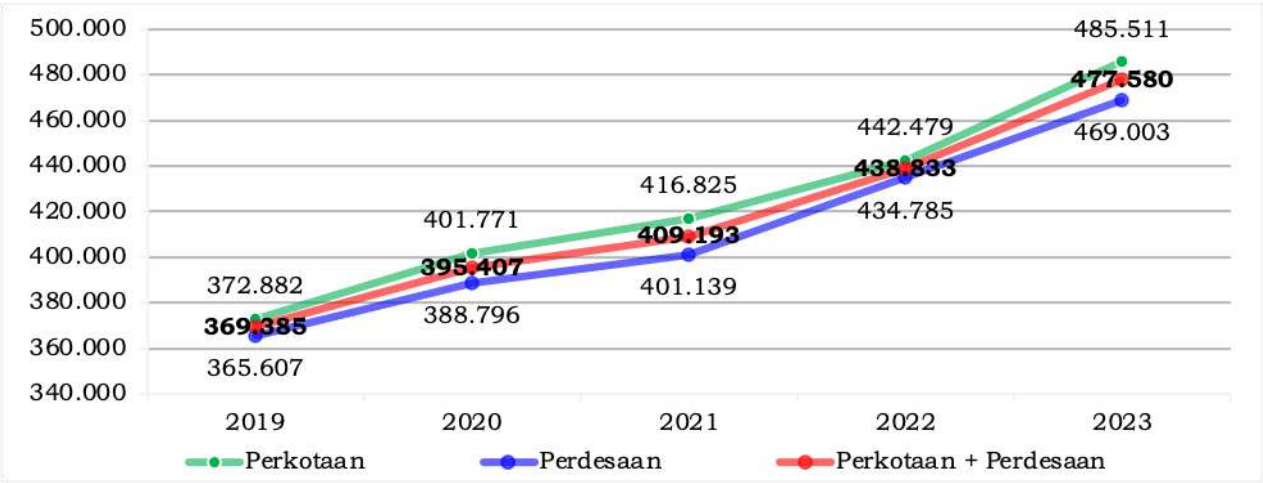


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.3.
Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode Maret 2023 sebesar Rp477.580 per kapita per bulan, meningkat 8,83 persen dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar Rp438.833 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode Maret 2023 sebesar Rp485.511 per kapita per bulan atau naik 9,73 persen dari kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp442.479 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di pedesaan periode Maret 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 7,87 persen menjadi sebesar Rp469.003 per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar Rp434.785 per kapita per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret

Gambar 2.4.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 – 2020 meningkat dari 1,527 menjadi 1,720 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 1,911 pada tahun 2021, namun menurun menjadi 1,771 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan pedesaan, nilai P1 periode Maret 2023 di pedesaan sebesar 1,835 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (1,673). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 – 2020 meningkat dari 0,299 menjadi 0,342 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 0,450 pada tahun 2021, namun menurun menjadi 0,416 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan pedesaan, nilai P2 pada periode Maret 2023 di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode Maret 2023, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,410 naik 0,043 poin dibandingkan Maret 2022. Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah pedesaan mencapai sebesar 0,420 turun 0,050 poin dibandingkan Maret 2022.

Tabel 2.9.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2019	1,318	1,747	1,527	0,269	0,331	0,299
2020	1,526	1,924	1,720	0,311	0,376	0,342
2021	1,684	2,154	1,911	0,395	0,508	0,450
2022	1,564	1,997	1,771	0,367	0,470	0,416
2023	1,673	1,835	1,749	0,410	0,420	0,415

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Riilis Periode Maret

2.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

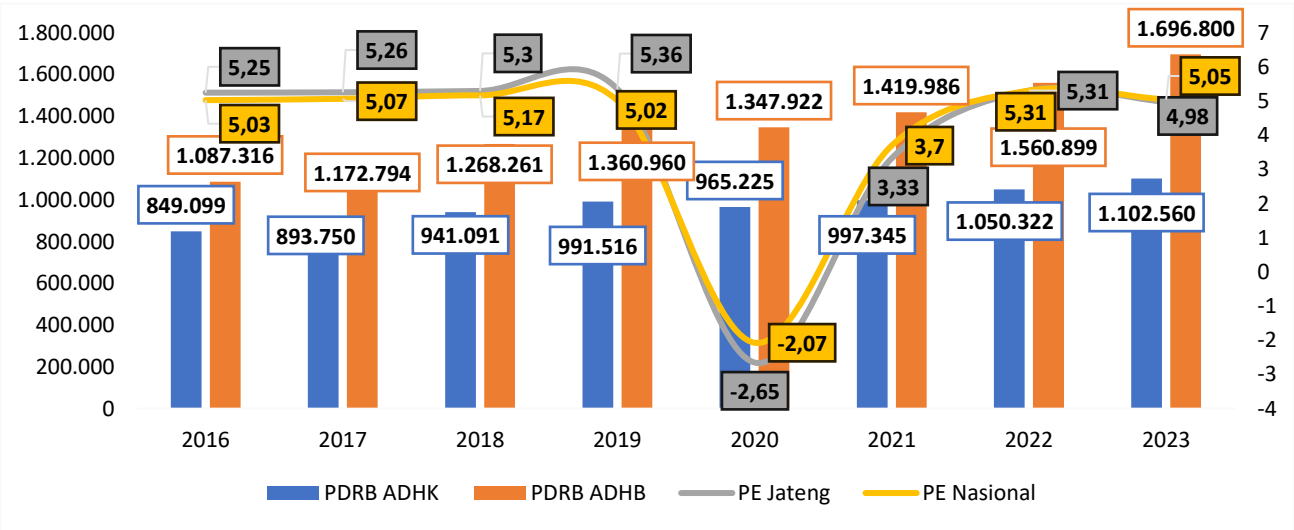
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun sebesar minus 2,65 persen, penurunan juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2021 dan 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat.

Capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen Tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen (*c-to-c*) lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen (*c-to-c*).

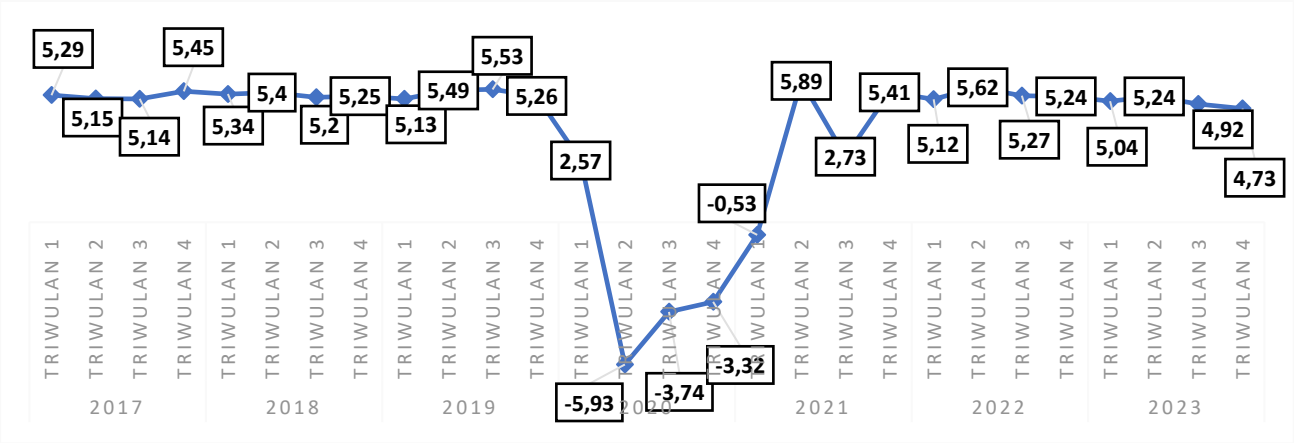
PDRB ADHK maupun ADHB Jawa Tengah dari tahun 2016-2023 memiliki tren yang positif selalu mengalami kenaikan. Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 sebesar Rp997.345 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp965.225 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK kembali meningkat mencapai sebesar Rp1.050.322 miliar. Selanjutnya, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.419.986 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.347.922 miliar. Pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar Rp1.560.899 miliar. Tahun 2023 PDRB ADHK Jawa Tengah sebesar Rp1.102.560 miliar, sementara berdasarkan ADHB sebesar Rp1.696.800 miliar.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023

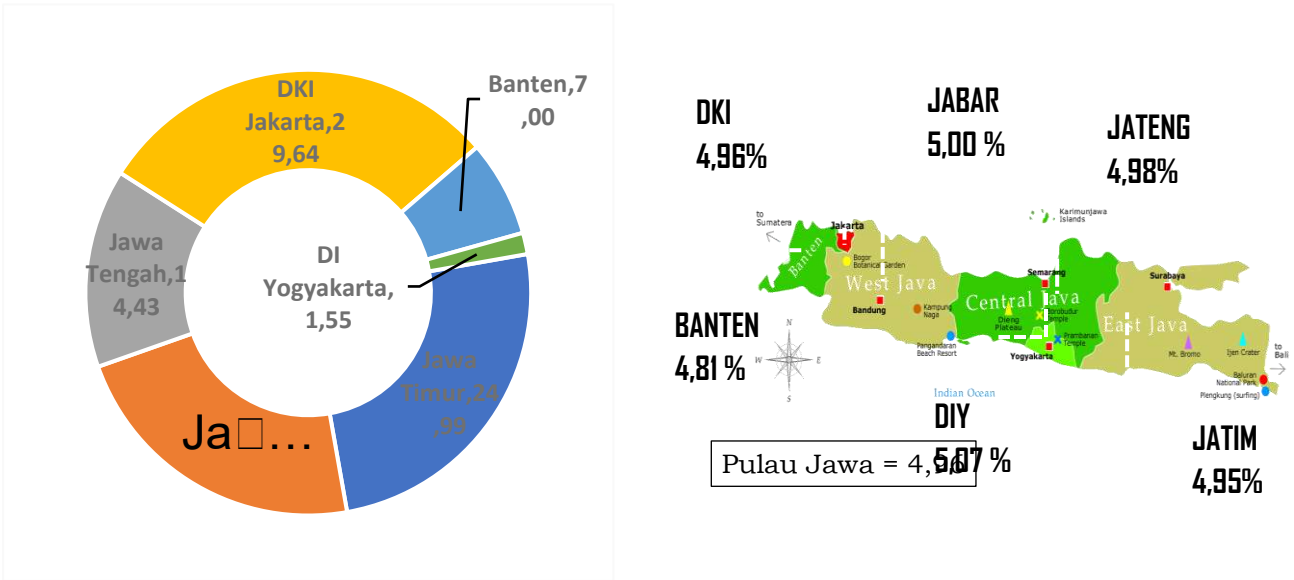
Pertumbuhan ekonomi dilihat secara *year on year (yoy)* yang mana memperbandingkan pertumbuhan PDRB tahun sekarang (t) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (t-1) sering disebut dengan istilah laju pertumbuhan PDRB dalam setahun. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ke IV-2023 tumbuh sebesar 4,73 persen, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,92 persen. Gambaran lebih detail terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sempat resesi dengan pertumbuhan negatif selama lebih dari dua triwulan berturut-turut yaitu pada triwulan II-2020 sampai dengan triwulan I-2021 karena pandemi Covid-19 dan kemudian mulai bangkit pada triwulan II-2021 sampai triwulan IV-2023 meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif tersebut mengidentifikasi pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.6.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-o-y) Per-Triwulan Tahun 2017-2023 (%)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-pulau jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 secara *c-to-c* rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Barat. Jawa Tengah tumbuh 4,98 persen (*c-to-c*) sementara Provinsi DIY tumbuh 5,07 persen dan Provinsi Jawa Barat tumbuh 5,00 persen. Sementara Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pertumbuhan terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,81 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,49 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupun pulau jawa setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.



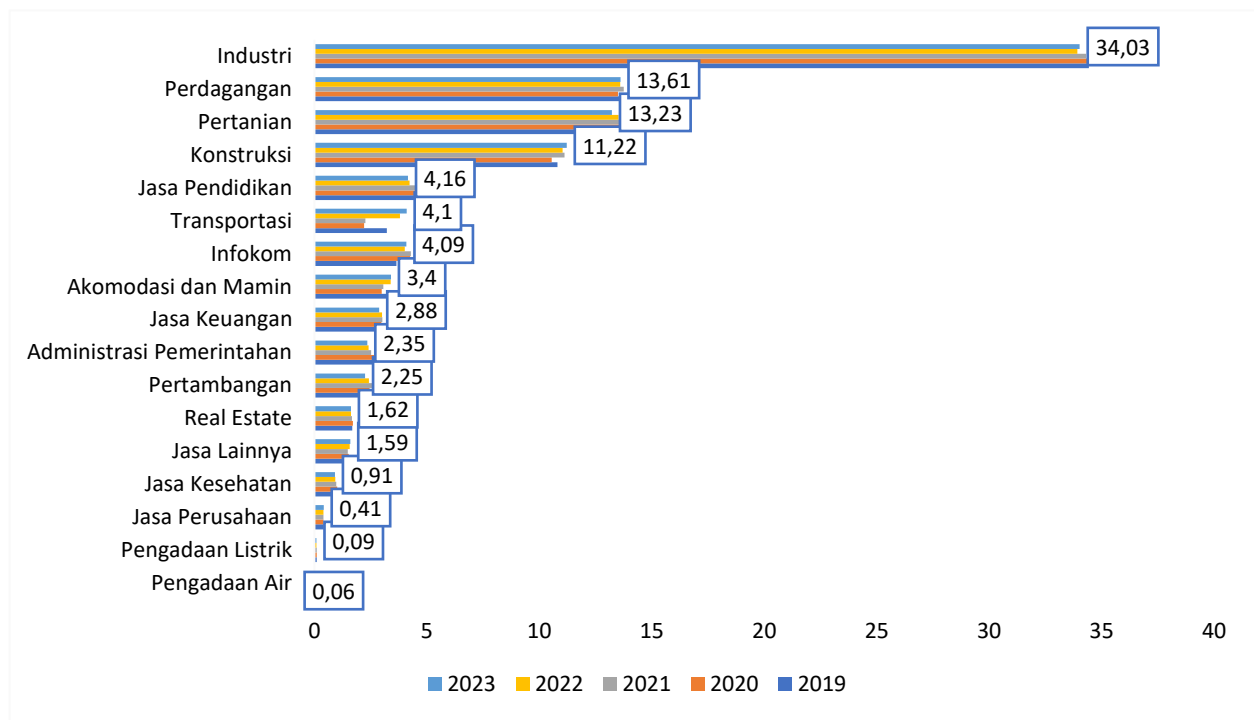
Sumber: BPS, diolah, 2024

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Tahun 2023 (%)

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu

diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

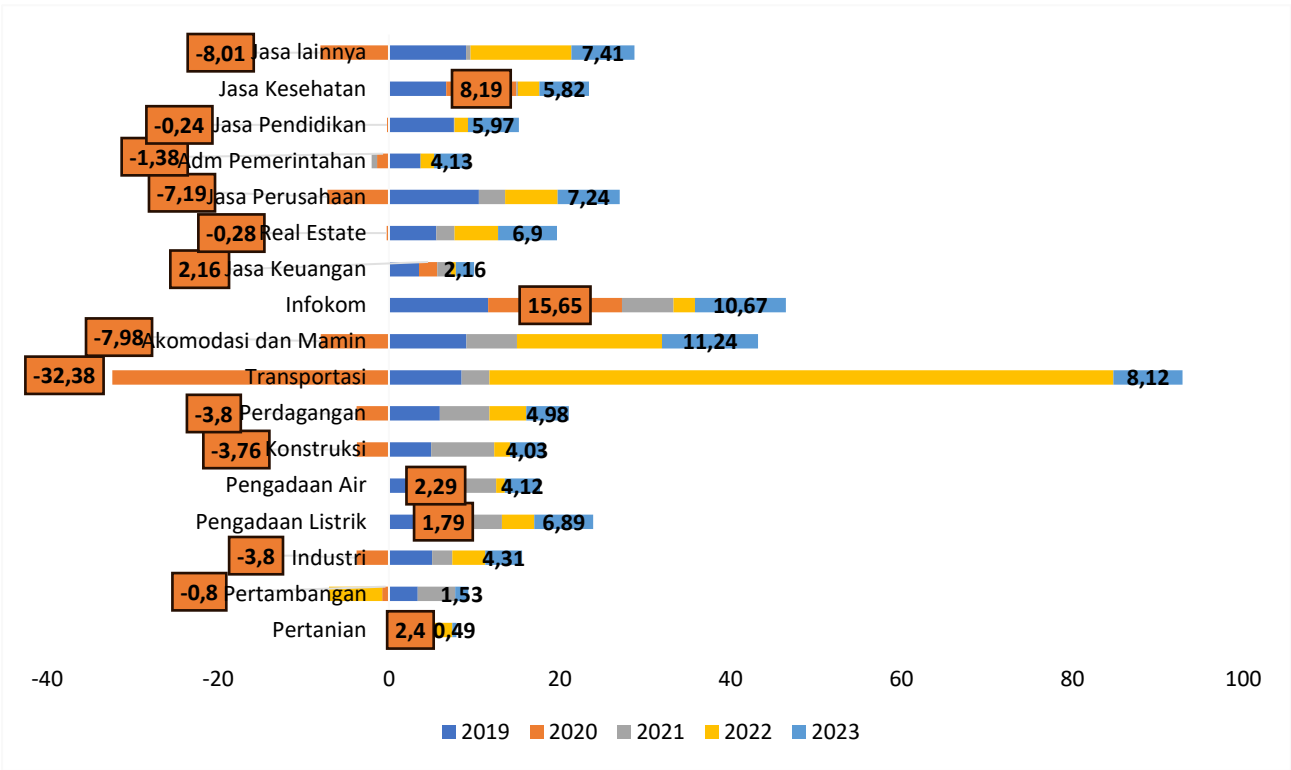
Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 34,03 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,61 persen, dan Pertanian yang memiliki kontribusi 13,23 persen. Lapangan usaha pertanian selama 3 tahun berturut-turut kontribusinya selalu mengalami penurunan, pada tahun 2021 Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,86 persen dan menurun di tahun 2022 menjadi 13,53 persen.



Sumber: BPS Jateng, 2024.

Gambar 2.8.
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 (%)

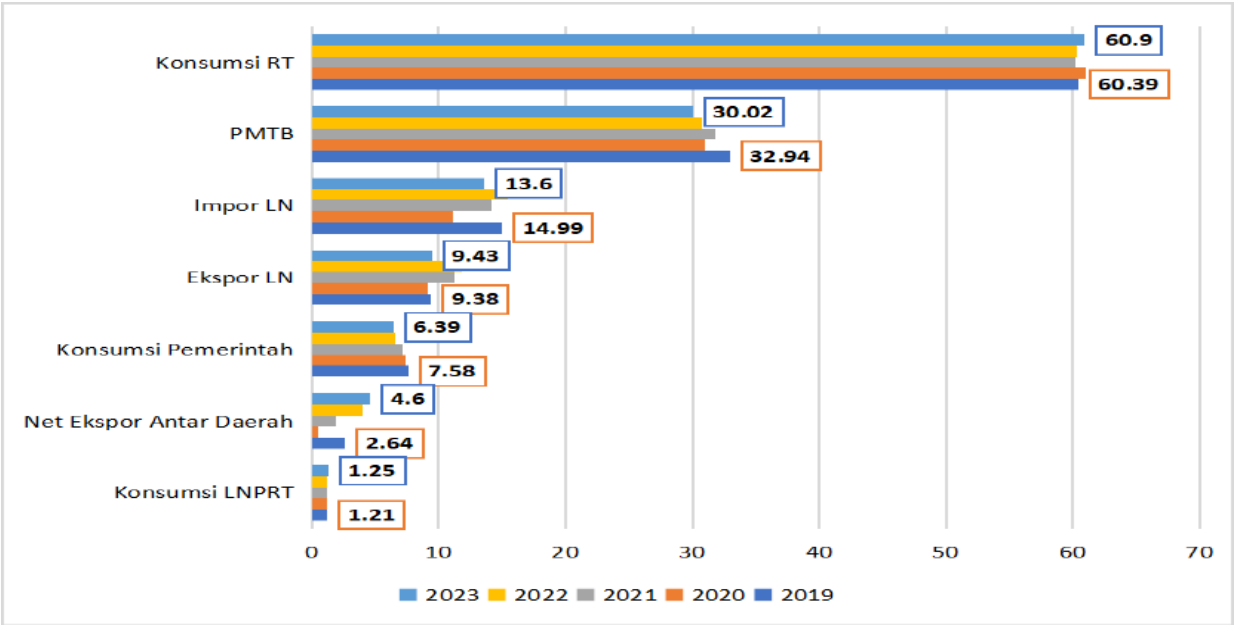
Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023 adalah Penyediaan Akomodasi Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,24 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 10,67 persen dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,12 persen. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pariwisata semakin meningkat. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,31 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,98 persen dan Pertanian tumbuh melambat sebesar 0,49 persen.



Sumber: BPS Jateng, 2024.

Gambar 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

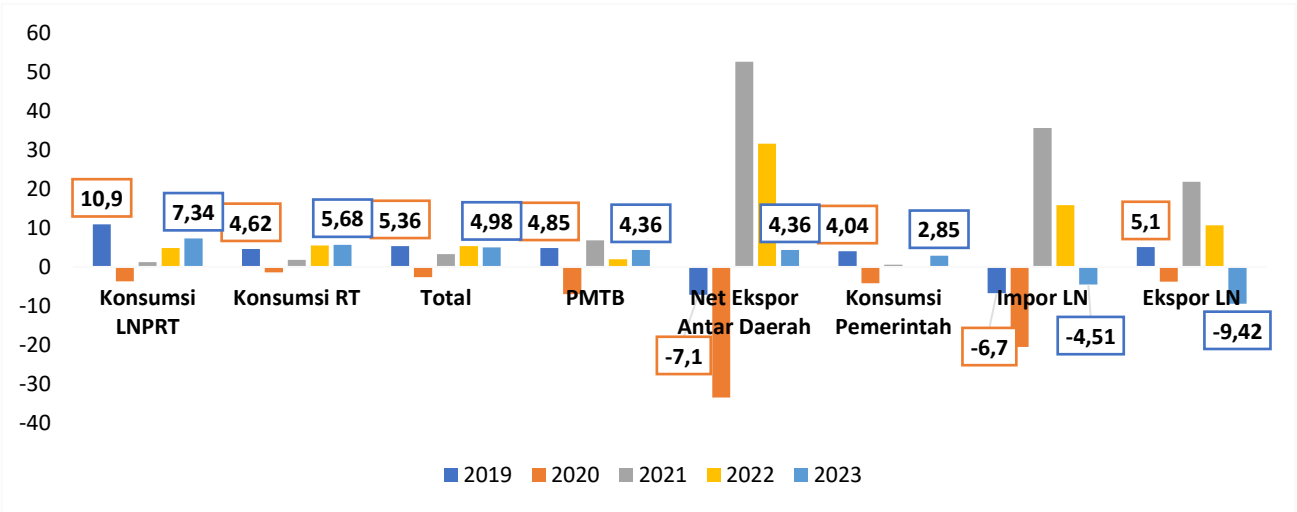
Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada, pada tahun 2023 struktur ekonomi di dominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 60,90 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) memiliki kontribusi sebesar 37,28 persen, sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang memiliki kontribusi sebesar 30,02 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga selama tiga tahun berturut-turut selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2021 sebesar 60,17 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 60,28 persen.



Sumber: BPS Jateng, 2024.

Gambar 2.10.
Kontribusi Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (%)

Pada tahun 2023 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) sebesar 7,34 persen seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik menjelang pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,68 persen, disusul oleh Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 4,36 persen. Pada tahun 2023 semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan.



Sumber: BPS Jateng, 2024

Gambar 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

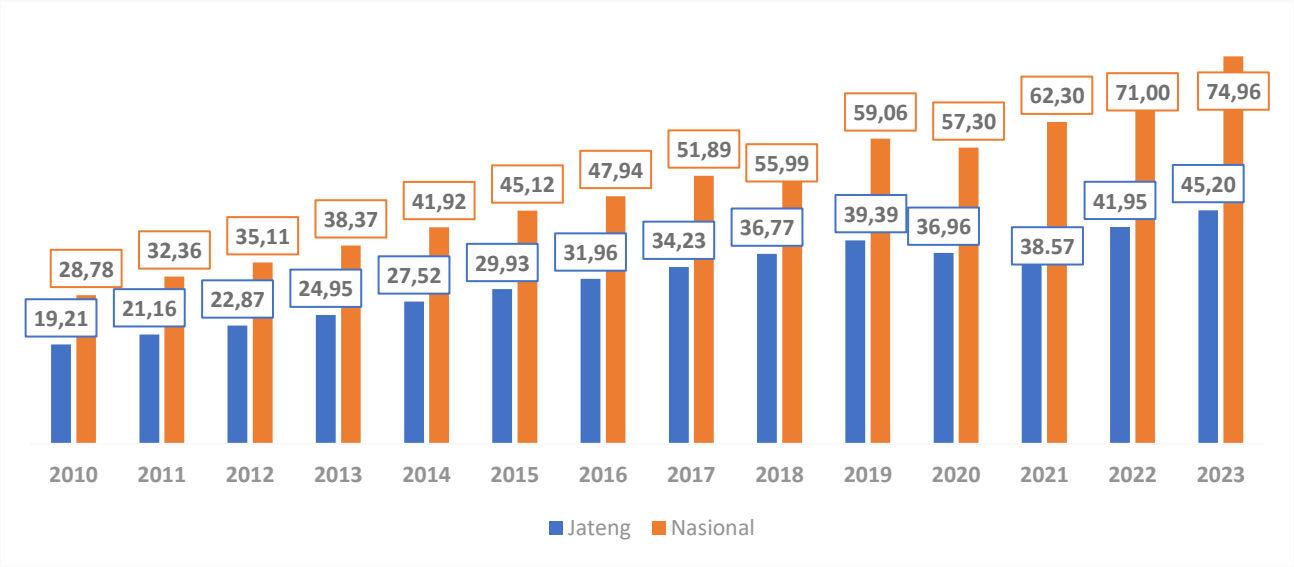
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020,

kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 ditengah pelambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuh positif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang (tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora (tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87 persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

Tabel 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (%)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	2.27	-10.28	2.15	5.13	5.34
2	Kabupaten Banyumas	6.32	-1.65	4.00	5.86	5.40
3	Kabupaten Purbalingga	5.64	-1.18	3.19	5.41	4.51
4	Kabupaten Banjarnegara	5.6	-1.32	3.26	5.29	4.98
5	Kabupaten Kebumen	5.52	-1.45	3.71	5.79	5.66
6	Kabupaten Purworejo	5.44	-1.61	3.31	5.36	5.07
7	Kabupaten Wonosobo	5.57	-1.64	3.68	5.02	4.30
8	Kabupaten Magelang	5.3	-1.67	3.48	5.46	5.04
9	Kabupaten Boyolali	5.96	-1.20	4.63	6.33	5.63
10	Kabupaten Klaten	5.48	-1.17	3.82	5.90	5.70
11	Kabupaten Sukoharjo	5.92	-1.70	3.82	5.61	5.06
12	Kabupaten Wonogiri	5.14	-1.41	3.35	5.63	4.98
13	Kabupaten Karanganyar	5.76	-1.87	3.57	5.87	5.53
14	Kabupaten Sragen	5.9	-1.81	3.75	5.76	5.23
15	Kabupaten Grobogan	5.37	-1.57	3.78	5.98	4.98
16	Kabupaten Blora	4.05	-4.56	3.68	2.68	3.10
17	Kabupaten Rembang	5.2	-1.49	3.85	5.55	5.20
18	Kabupaten Pati	5.81	-1.16	3.38	5.56	5.02
19	Kabupaten Kudus	3.09	-3.11	-1.54	2.23	2.19
20	Kabupaten Jepara	6.02	-1.92	4.63	5.95	5.17
21	Kabupaten Demak	5.36	-0.23	2.62	5.25	5.01
22	Kabupaten Semarang	5.39	-2.67	3.63	5.31	4.74
23	Kabupaten Temanggung	5.05	-2.13	3.34	5.2	5.00
24	Kabupaten Kendal	5.71	-1.51	3.89	5.69	5.56
25	Kabupaten Batang	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53
26	Kabupaten Pekalongan	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14
27	Kabupaten Pemalang	5.8	-0.61	4.28	5.08	4.14

menjadi sebesar Rp36,96 juta, turun sebesar 6,15 persen dari sebelum Pandemi yaitu Tahun 2019. Pada Tahun 2021 sudah mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dan mobilitas masyarakat sebesar 38,65 juta rupiah kemudian naik Kembali di Tahun 2023 sebesar Rp45,20 juta. Jika dibandingkan dengan Nasional, PDRB Per kapita Jawa Tengah masih dibawahnya, namun selalu menunjukkan tren yang membaik atau naik

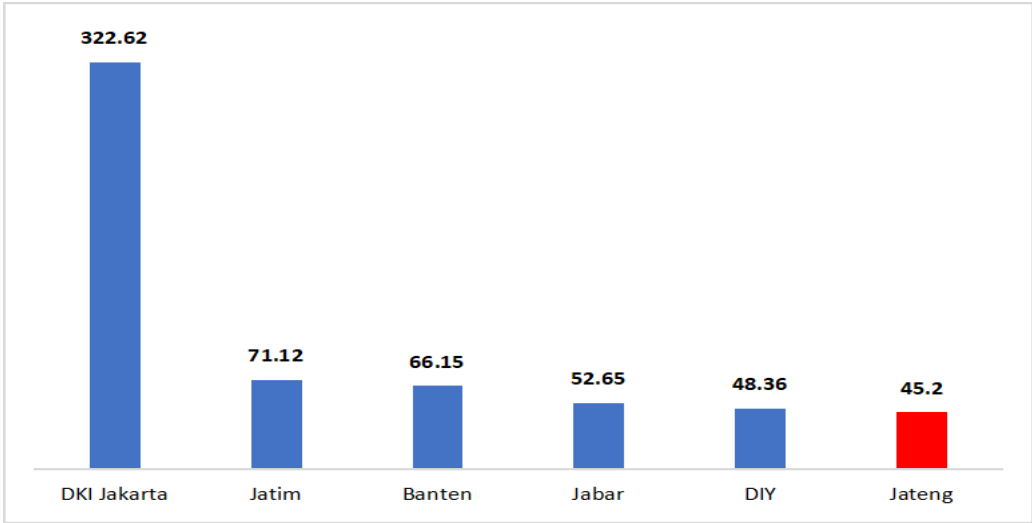


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.13.

PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2023

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2023 berada di urutan terakhir atau ke enam. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp322,62 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp71,12 juta) dan Provinsi Banten (Rp66,15 juta).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.14.

PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2023

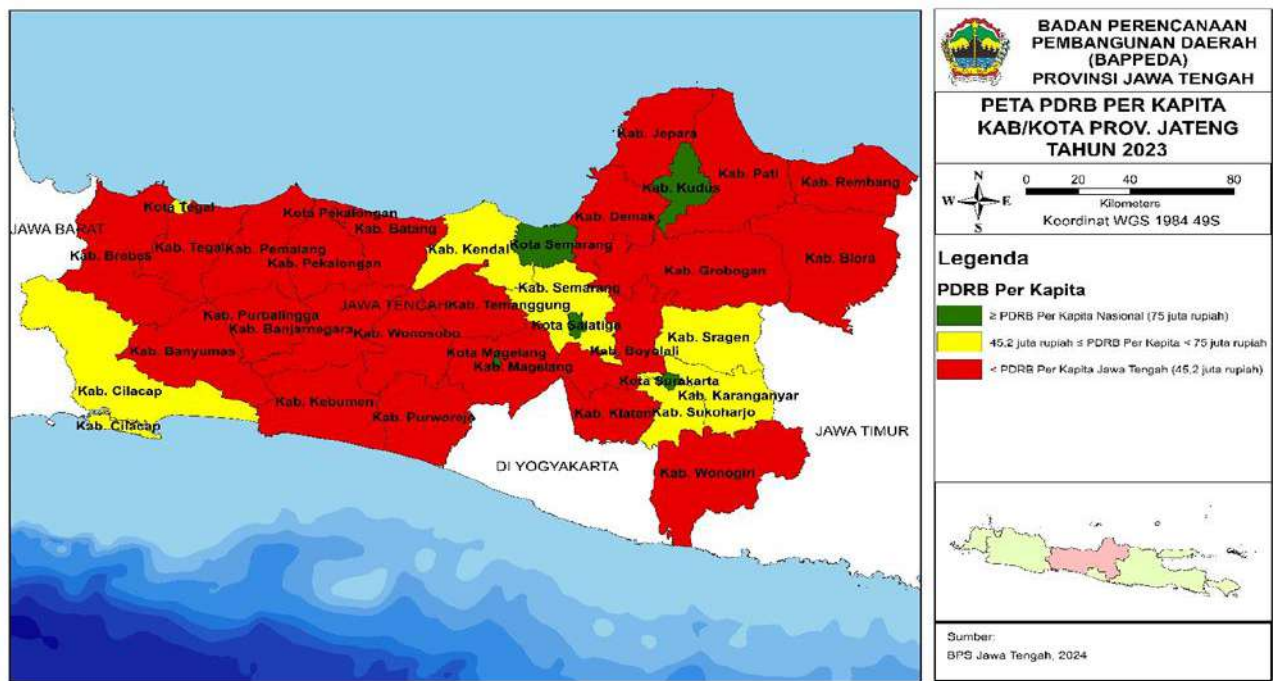
Sebaran PDRB per kapita per kabupaten/kota se- Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.11.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	66.39	53.92	55.74	60.88	65.95
2	Kabupaten Banyumas	32.02	30.28	31.79	34.71	37.6
3	Kabupaten Purbalingga	26.81	25.2	26.23	28.35	30.39
4	Kabupaten Banjarnegara	23.51	21.38	22.26	24.11	25.96
5	Kabupaten Kebumen	23.44	20.8	21.69	23.63	25.59
6	Kabupaten Purworejo	26.1	24.26	25.31	27.33	29.42
7	Kabupaten Wonosobo	23.91	21.49	22.38	24.02	25.65
8	Kabupaten Magelang	25.3	25.01	26.12	28.37	30.57
9	Kabupaten Boyolali	33.33	30.83	32.61	35.91	39.2
10	Kabupaten Klaten	34.01	31.74	33.37	36.52	39.92
11	Kabupaten Sukoharjo	41.63	40.7	42.65	46.32	49.88
12	Kabupaten Wonogiri	30.42	28.01	29.28	32.15	35.15
13	Kabupaten Karanganyar	41.94	39.82	41.62	45.45	49.42
14	Kabupaten Sragen	42.7	38.83	40.81	44.69	48.69
15	Kabupaten Grobogan	19.89	18.79	19.67	21.51	23.28
16	Kabupaten Blora	30.16	27.16	30.32	34.59	35.22
17	Kabupaten Rembang	29.82	29.39	30.91	33.76	36.55
18	Kabupaten Pati	34.34	32.74	34.12	37.19	40.29
19	Kabupaten Kudus	127.52	129.14	126.95	132.34	138.7
20	Kabupaten Jepara	24.14	25.49	26.78	28.96	31.14
21	Kabupaten Demak	22.62	22.1	22.77	24.64	26.62
22	Kabupaten Semarang	47.3	46.67	48.79	52.87	56.71
23	Kabupaten Temanggung	28.17	27.33	28.46	30.84	33.29
24	Kabupaten Kendal	44.03	41.9	43.94	47.73	51.63
25	Kabupaten Batang	28.22	27.02	28.57	31.06	33.64
26	Kabupaten Pekalongan	25.59	23.6	24.44	26.08	27.91
27	Kabupaten Pemalang	19.65	17.6	18.46	19.88	21.24
28	Kabupaten Tegal	24.57	22.15	23.14	24.95	26.85
29	Kabupaten Brebes	25.65	23.83	24.52	26.59	28.19
30	Kota Magelang	72.45	71.7	75.49	82.66	89.91
31	Kota Surakarta	92.83	91.17	96.11	106.26	114.8
32	Kota Salatiga	68.89	69.14	72.17	78.26	84.32
33	Kota Semarang	105.93	114.19	123.04	135.33	146.87
34	Kota Pekalongan	35.59	35.36	36.95	40.12	43.29
35	Kota Tegal	61.47	55.72	57.95	63.22	67.76
	Provinsi Jawa Tengah	39.39	36.96	38.57	41.95	45.20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita diatas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.45,20 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita diatas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 146,87 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 138,70 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 114,80 Juta). Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.45,20 juta).



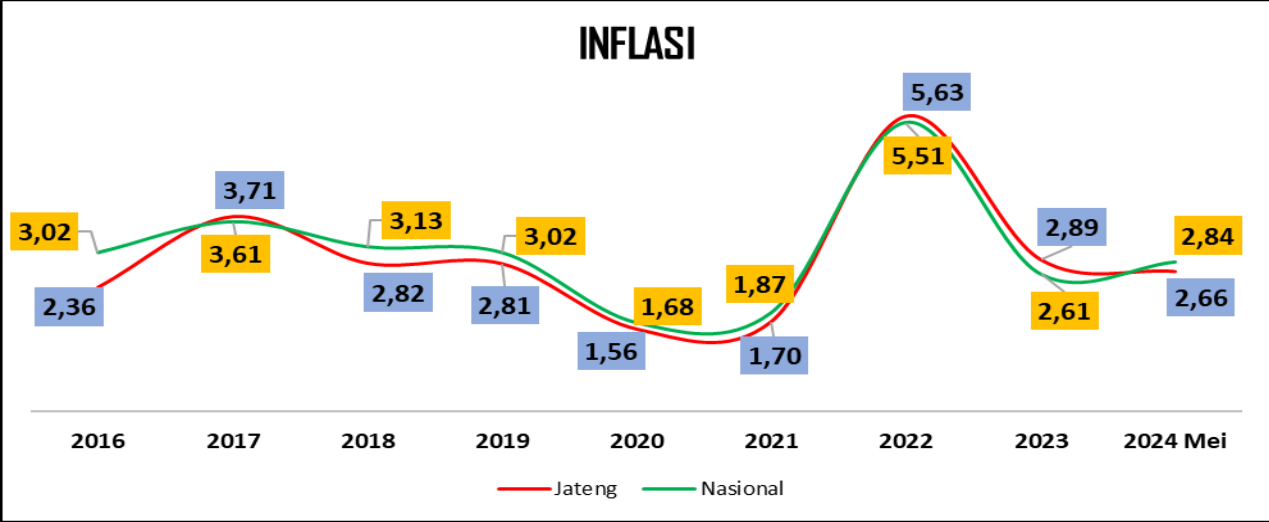
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 2.15.

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023

2.3.3 Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 2,89, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2023 adalah kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tarif kereta api, minyak goreng, dan emas perhiasan, sedangkan penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga daging ayam ras, buncis, beras, cumi-cumi, dan ikan bandeng/ikan bolu.



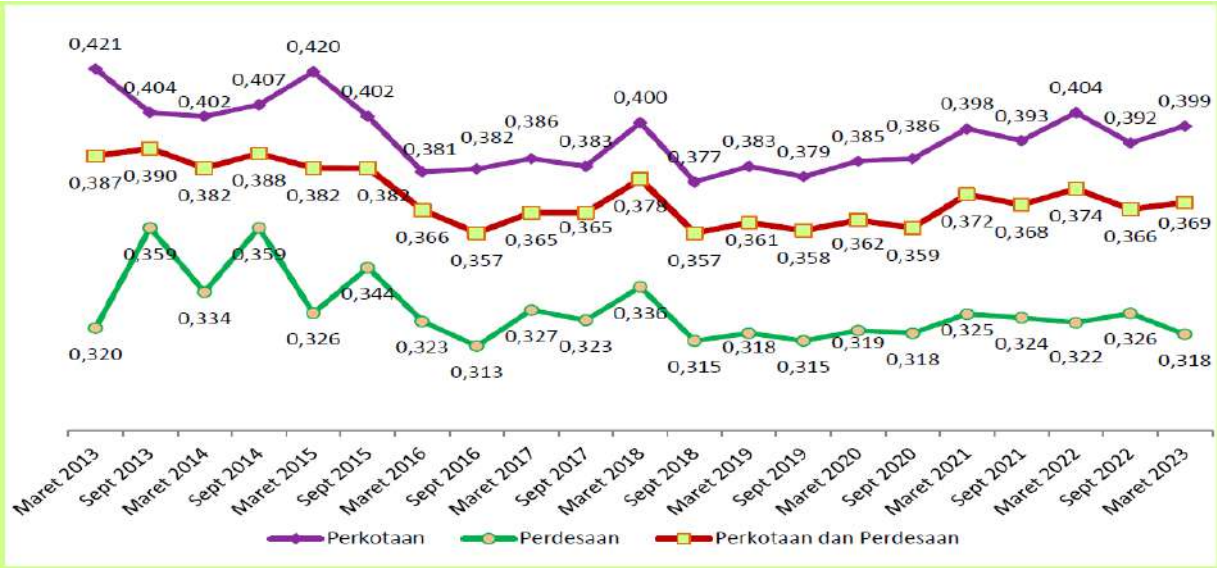
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.16.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – Januari 2024 (%)

2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka *gini ratio* pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.

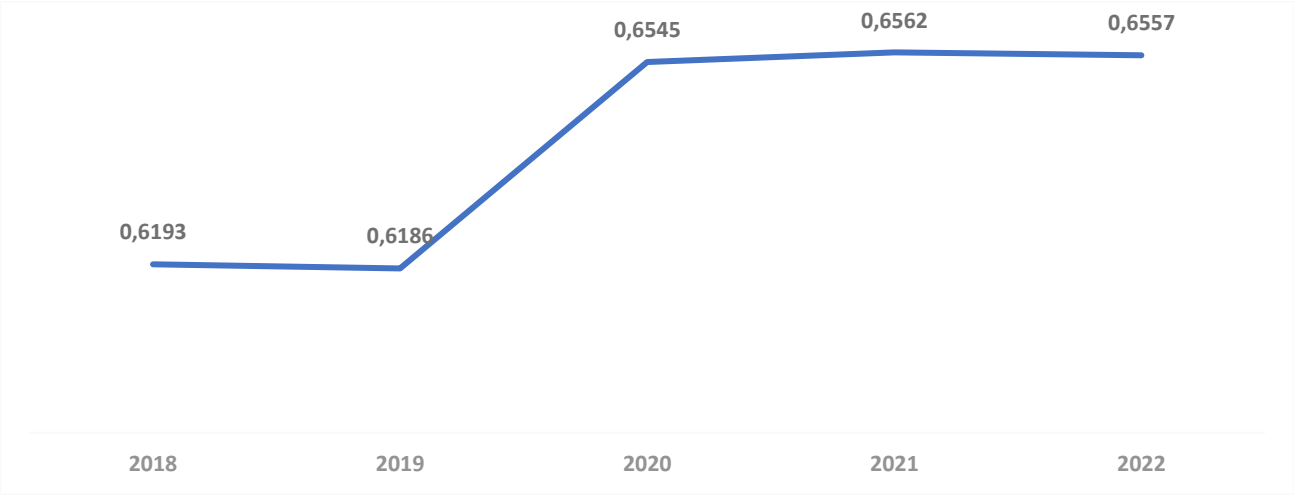
Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,399 mengalami kenaikan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada September 2022 yang sebesar 0,392. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada Maret 2023 sebesar 0,318 mengalami penurunan sebesar 0,018 point dibandingkan rasio gini September 2022 yang sebesar 0,326. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.17.
Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023

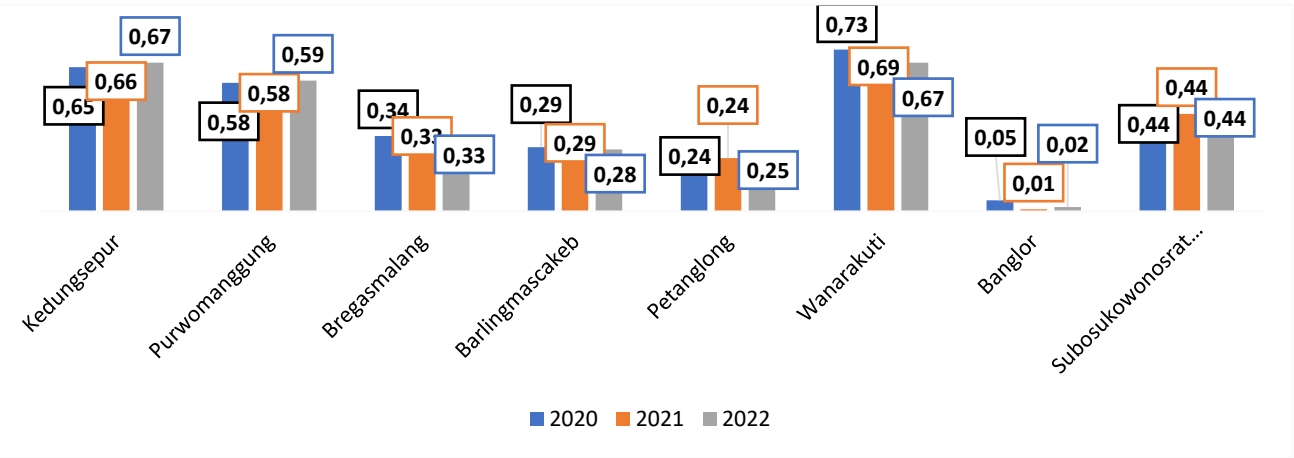
Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah dianggap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2022 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6557 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,6562 namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 yang sebesar 0,6186.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.18.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomanggung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata.

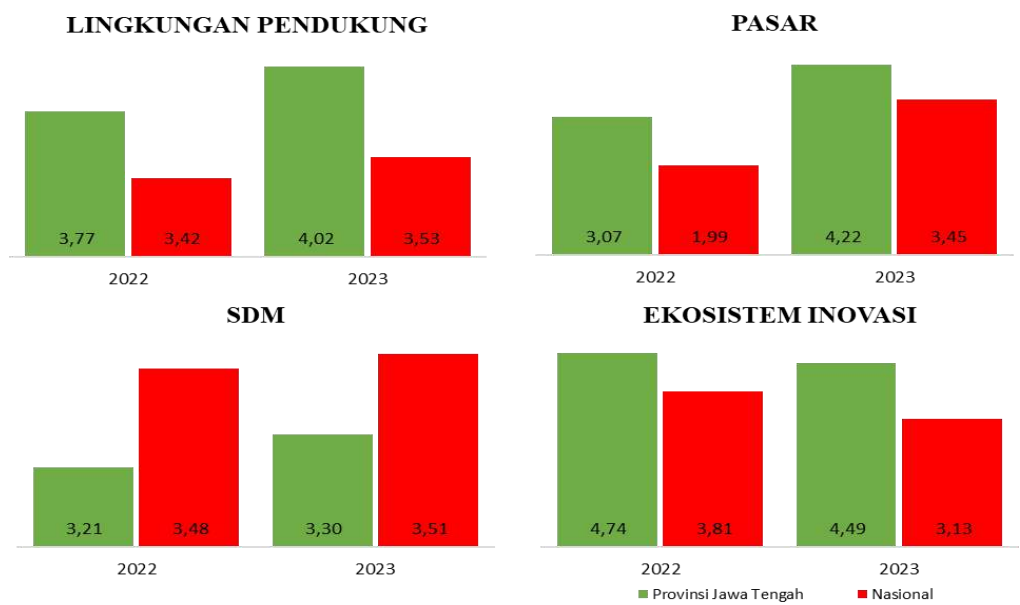


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.19.
Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat komponen pembentuk, yaitu ekosistem inovasi, pasar sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Terdapat 12 pilar dan 64 indikator yang merepresentasikan ke empat komponen pembentuk tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, capaian IDSD Jawa Tengah pada tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 7,16 persen. Skor IDSD Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 3,89, meningkat 0,26 poin dari tahun 2022 sebesar 3,63.

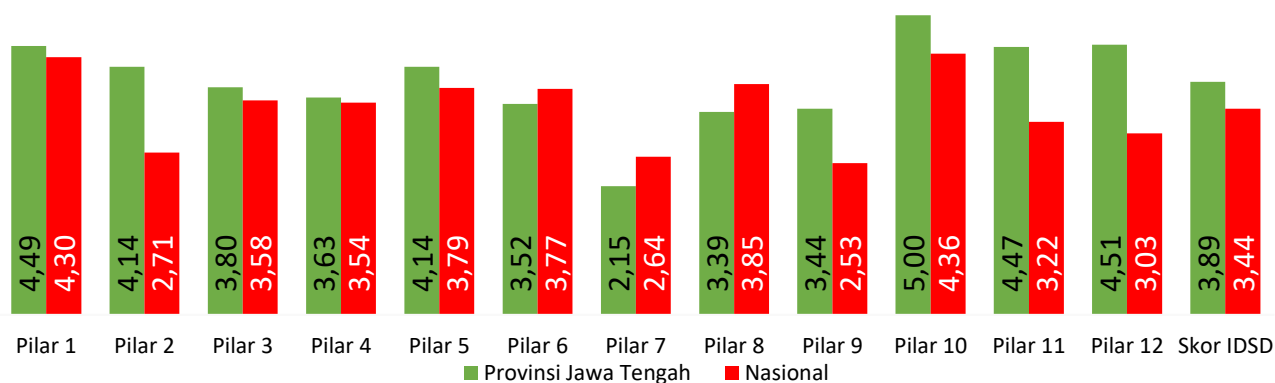


Sumber : BRIN, 2024.

Gambar 2.20.
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 dan 2023

Dari ke empat komponen pembentuk IDSD, komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia mengalami peningkatan, sedangkan komponen ekosistem inovasi mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi karena terdapat penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis. Sementara itu, pada komponen pasar juga tumbuh cukup tajam pada tahun 2023 yang disebabkan karena penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 9 dan pilar 10.

Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian Jawa Tengah tahun 2023 pada komponen lingkungan pendukung, komponen pasar dan komponen ekosistem inovasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Dari ke empat komponen pembentuk IDSD, 2 komponen mampu tumbuh lebih tinggi dari angka nasional yaitu komponen lingkungan pendukung (6,43 persen) dan komponen SDM (2,72 persen), meski komponen SDM memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Sementara pada komponen pasar, pertumbuhan Jawa Tengah (37,68 persen) cenderung lebih rendah dibandingkan angka Nasional (73,55 persen).

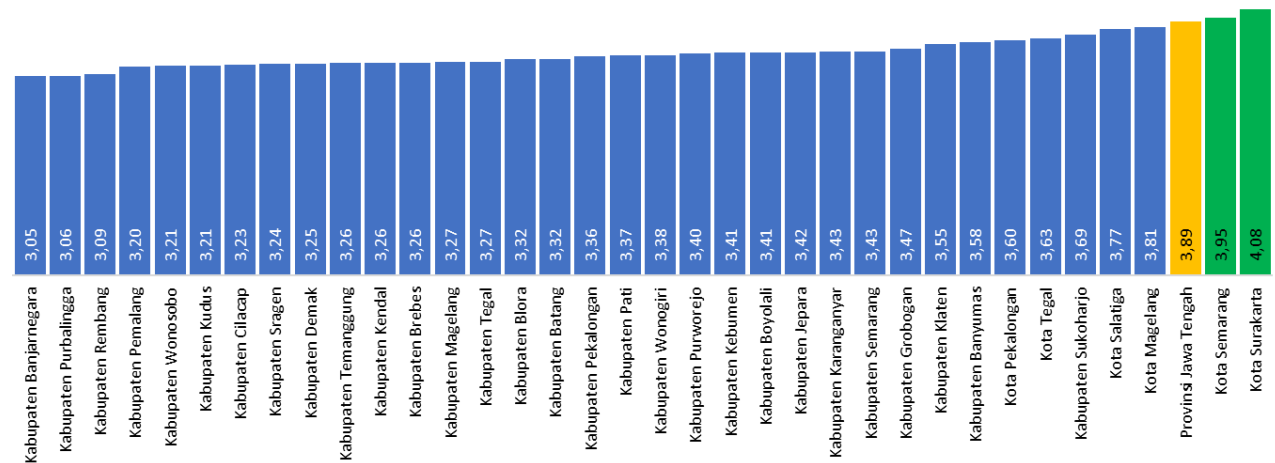


Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.21.
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2023

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun berdasarkan pertumbuhannya terdapat 21 Kabupaten/Kota yang mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan IDSD provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang tumbuh lebih rendah dari angka pertumbuhan provinsi.

Sepuluh Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan skor IDSD tertinggi antara lain, Kabupaten Pekalongan (15,46 persen), Kota Pekalongan (14,65 persen), Kabupaten Grobogan (12,30 persen), Kabupaten Wonosobo (12,24 persen), Kabupaten Kebumen (11,80 persen), Kabupaten Batang (11,78 persen), Kabupaten Temanggung (11,64 persen), Kabupaten Purworejo (11,11 persen), Kabupaten Demak (10,92 persen) dan Kota Salatiga (10,88 persen). Sementara itu, Kota Surakarta dan Kota Semarang meski memiliki skor IDSD lebih tinggi dari skor provinsi namun ke dua kota tersebut termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan IDSD terendah, yaitu 1,75 persen dan -5,05 persen.



Sumber : BRIN, 2024

Gambar 2.22.
Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

2.3.6 Investasi

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I – IV Tahun 2023 realisasi investasi Jawa Tengah 2023 didominasi oleh Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai 32,98 triliun rupiah dari total realisasi investasi sebesar 77,02 triliun rupiah. Total realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 12,59 persen dibanding tahun 2022 yang sebesar 68,41 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi investasi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) (non LKPM) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sektor ini sebesar 20,90 triliun rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang nilainya 9,52 triliun rupiah. Perkembangan realisasi nilai investasi secara detil sebagaimana pada tabel 2.12.

Dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek PMDN di tahun 2023 jauh lebih besar dibanding PMA yakni 36.048 proyek dibanding 7.032 proyek. Total investasi 43.080 proyek tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 280.643 orang dengan rincian PMDN sebanyak 158.391 tenaga kerja dan PMA menyerap 122.252 tenaga kerja.

Tabel 2.12.
Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2023

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				
	PMA	PMDN		Jumlah	Pertumbuhan (%)
		LKPM	Non-LKPM		
2016	14,113	24,070	-	38,183	46,63
2017	31,673	19,866	-	51,539	34,98
2018	31,794	27,474	-	59,269	15,00
2019	40,859	18,655	-	59,503	0,39
2020	19,63	30,61	5,83	56,70	-5,80
2021	21,4	31,31	7,08	59,79	6,56
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	4,4
2023	23,14	32,98	20,90	77,02	12,59

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan *tenant* di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sebagaimana Tabel 2.13, dua kawasan industri terbesar di Jawa Tengah tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Jawa Tengah.

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan promosi investasi yang fokus pada sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan negara tujuan prioritas dengan meningkatkan kerja sama antara stakeholder terkait dan terobosan inovasi digitalisasi promosi.

Tabel 2.13.
Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2023

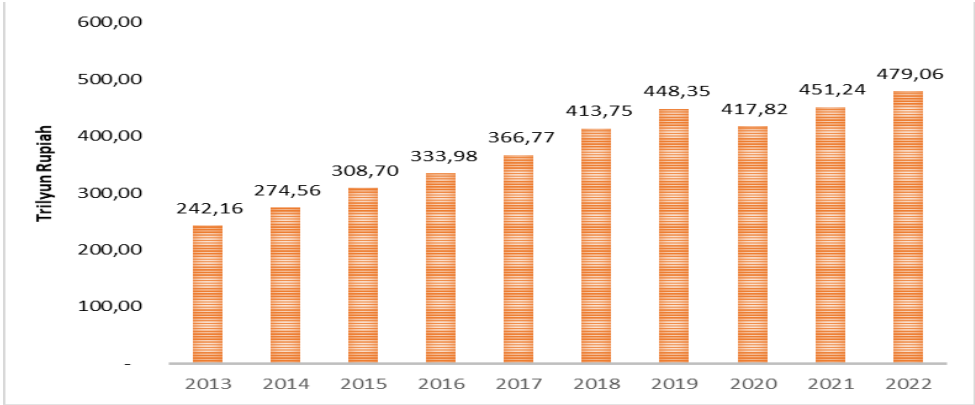
No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1.	Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus)	PT. Kawasan Industri Kendal	1.000 Ha	± 40% lahan (sudah dipergunakan dan terjual)	± 60% lahan	94
2.	Grand Batang City	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	4.300 Ha (Fase I: 450 Ha; Cluster I: 3100 Ha)	183 Ha	61,7 Ha	13
3.	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	43 Ha	150 Ha	5
4.	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	50 Ha	250 Ha	6
5.	Aviarna Industrial Estate	PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara	462 Ha (Tahap I 64 Ha)	6 Ha	456 Ha	2
6.	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	250 Ha	109,4 Ha	56,8 Ha	121
7.	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	72,56 Ha	39,44 Ha (area yang tersedia); 2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam 1 hamparan	52
8.	Kawasan Industri Cilacap	PT. Cilacap Segara Artha	82 Ha	-	-	-

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Mengacu pada *System of National Accounts* (SNA), besarnya penanaman modal yang direalisasikan di suatu wilayah pada suatu tahun tertentu sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. Oleh karena itu untuk melihat kontribusi investasi pada ekonomi Jawa Tengah secara lebih akurat dapat digambarkan melalui indikator PMTB. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya.

Sejak tahun 2013, PMTB Jawa Tengah menunjukkan tren realisasi yang terus meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 kemudian di tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat bahkan lebih tinggi dari nilai pra-pandemi. Tren pertumbuhan investasi di Jawa Tengah ini didorong antara lain oleh realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jawa Tengah serta peningkatan impor barang modal untuk pembelian mesin oleh industri. Selain itu peningkatan investasi juga didorong oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menarik investasi antara lain melalui kegiatan *Central*

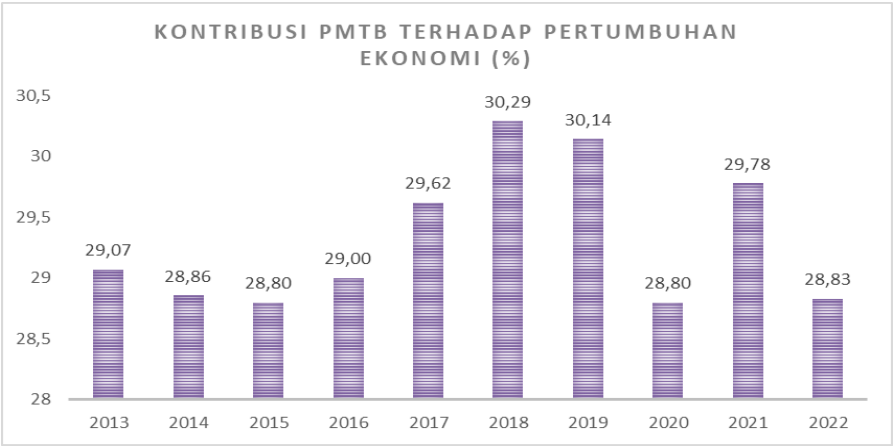
Java Investment Business Forum (CJIBF), business meeting, pengawalan investasi, pelayanan perijinan, serta fasilitasi kemitraan usaha menengah besar dan usaha menengah kecil.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

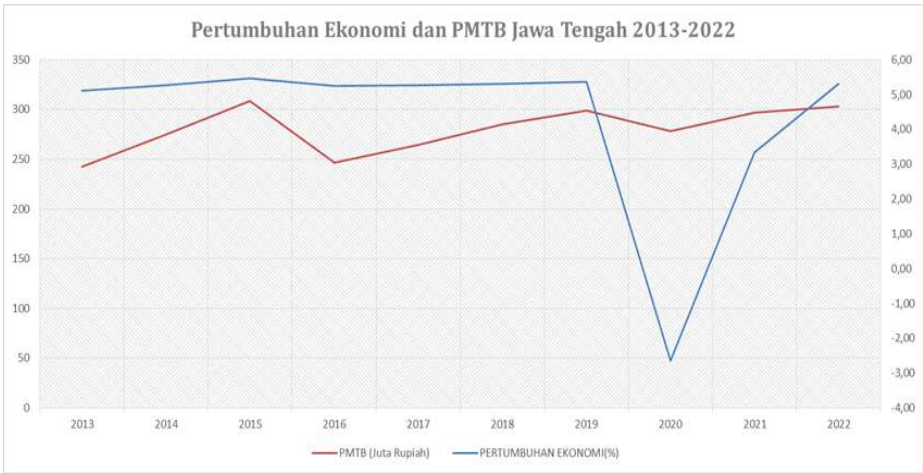
Gambar 2.23.
Nilai PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022

Pada periode tahun 2013 – 2022, PMTB berkontribusi cukup stabil terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah berkisar 28% hingga 30% (Gambar 2.23). Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penanaman modal Jawa Tengah Tahun 2011-2022 saling memiliki keterkaitan. Gambar 2.24 menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PMTB di Jawa Tengah tahun 2013-2022 yang bergerak searah. Pertumbuhan penanaman modal yang terkoreksi di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif hingga -2,65%. Meskipun ada faktor lain, namun PMTB juga menjadi indikator yang mencerminkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di daerah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.24.
Kontribusi PMTB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.25.

Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022

Efisiensi investasi di suatu daerah menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang dicerminkan dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah, apakah bersifat *capital intensive* atau *labour intensive*.

ICOR dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai ICOR, pertumbuhan ekonomi semakin rendah dan sebaliknya. Gambar 2.26 menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2013 – 2022, nilai ICOR Jawa Tengah berkisar di *range* 5 hingga 6 yang berlawanan arah dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan ICOR yang cukup signifikan hingga mencapai 9,37 di tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19. Nilai ini kembali mengalami perbaikan pada Tahun 2022 sebesar 5,72.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.26.

Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025. Berdasarkan RUPM ini, kegiatan penanaman modal tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya, dan industri transportasi. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Selain itu, untuk menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

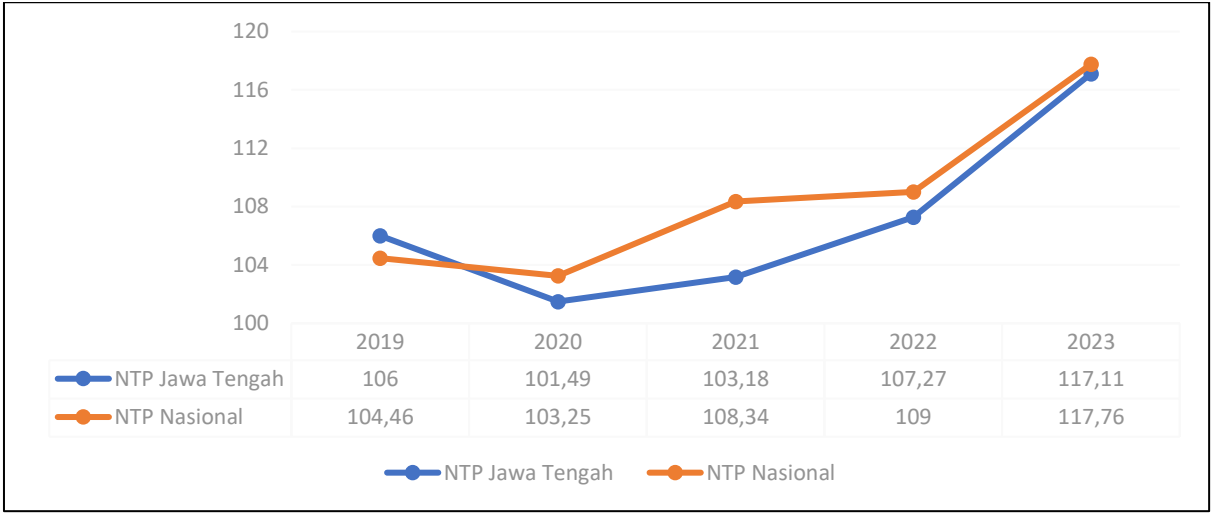
Pada aspek teknis, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai macam inovasi melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur *digital signature*, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi *Central Java Investment Platform (CJIP)*. Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hingga awal tahun 2024, telah beroperasi 33 MPP di 33 Kabupaten/Kota.

2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan

a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dan untuk membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukkan daya tukar dari harga pokok produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin tinggi tingkat kemampuan/daya beli petani.

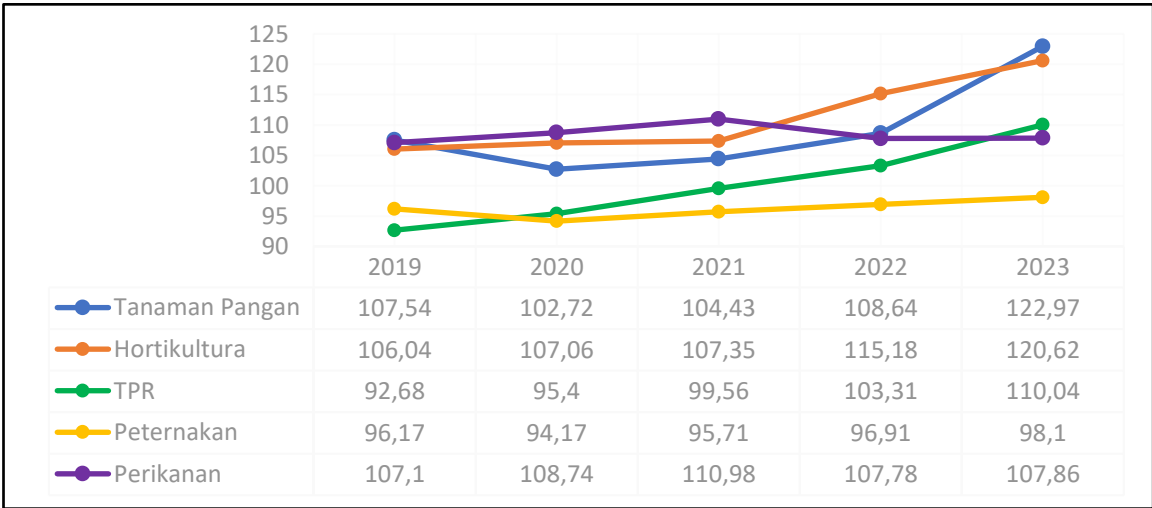
Pada kurun waktu tahun 2019-2023 perhitungan dan rilis NTP dibandingkan dengan Tahun dasar 2019, NTP per Bulan Desember terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,49, namun kembali meningkat dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 117,76. NTP pada tahun 2023 merupakan NTP tertinggi selama 5 tahun terakhir.



Sumber: BPS, 2023.
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.27.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019 – 2023

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2019-2023, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan cenderung mengalami tren yang meningkat, walaupun pada tahun 2020 beberapa sub sektor sempat mengalami penurunan. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor perikanan memiliki tren yang menurun walaupun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak signifikan. Selain itu, sub sektor peternakan masih berada pada angka di bawah 100 yang menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima peternak lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar.



Sumber: BPS, 2023
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.28.
Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

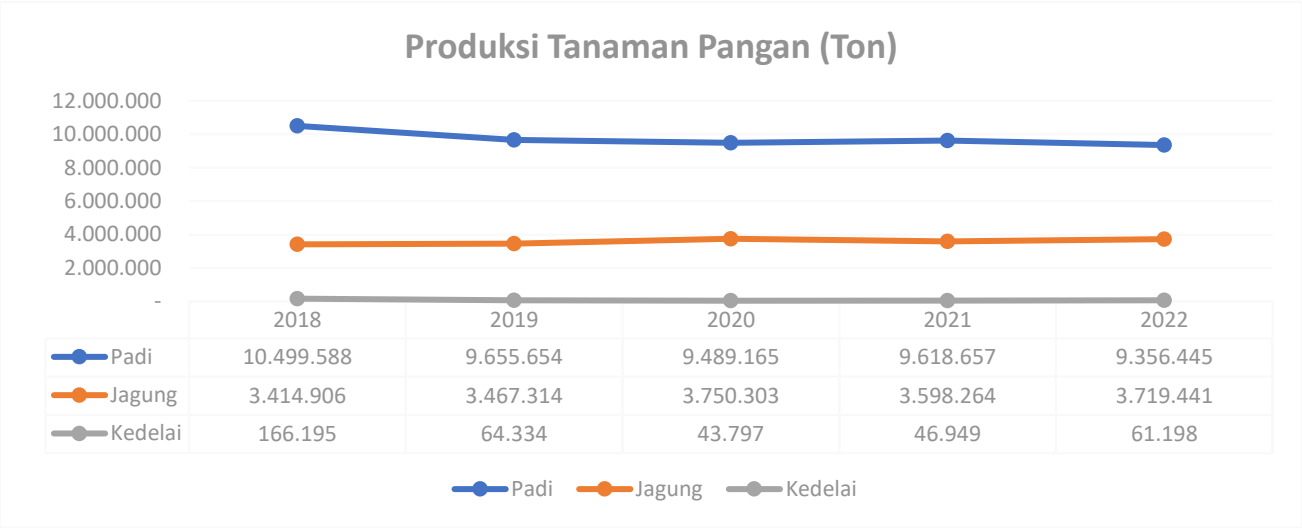
b. Produksi Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan sebagai basis penunpu pangan di Jawa Tengah. Hal tersebut didukung dengan Jawa Tengah sebagai penghasil

padi terbesar ketiga di Pulau Jawa.Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sangat fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah. Selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

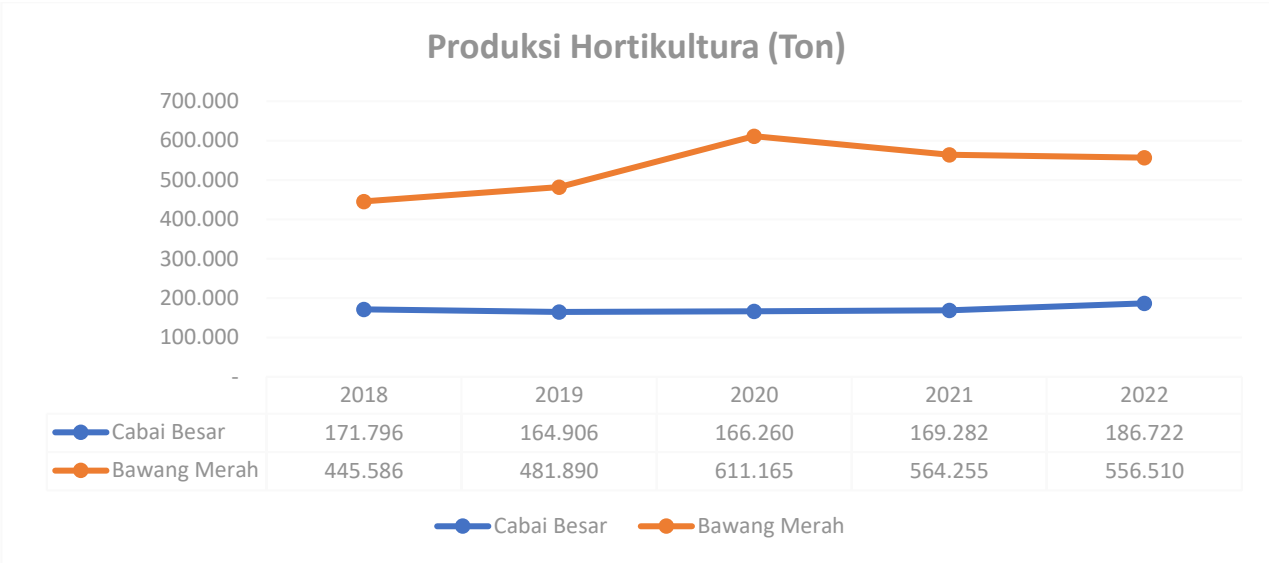
Pada periode tahun 2018-2020 komoditas padi mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan menurunnya luas tanam kedelai yang semakin menurun dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022.

Gambar 2.29.
Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

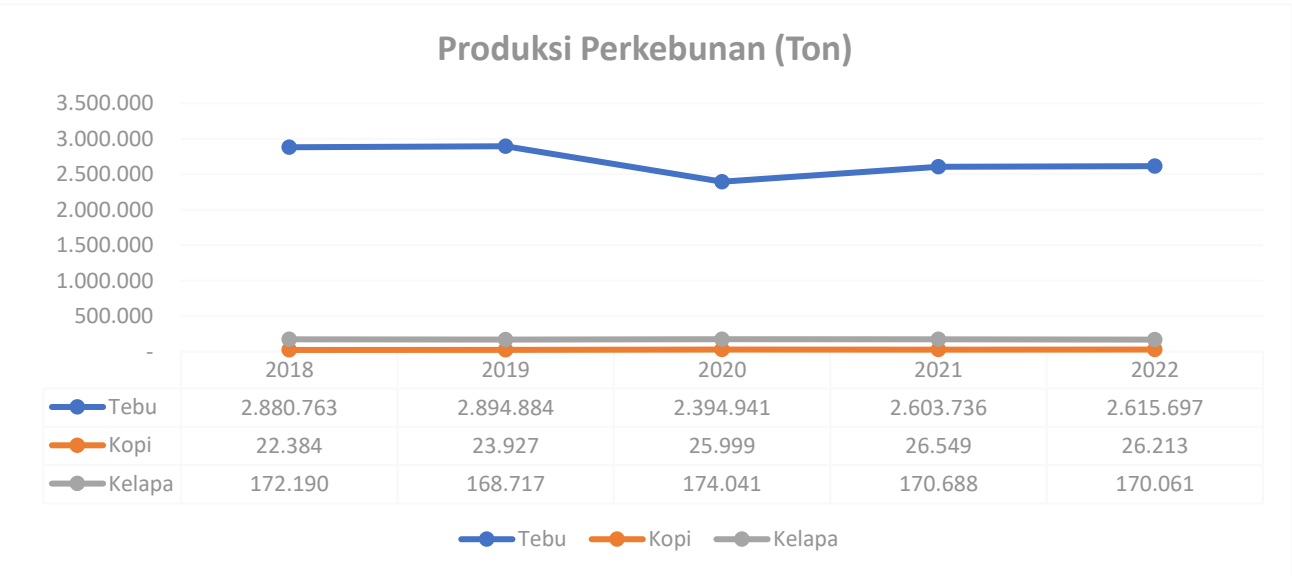
Untuk sektor hortikultura, Komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi bawang merah pada Tahun 2020 sebesar 611,165 Ton, sedangkan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2022 sebesar 186,722 Ton. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi di Jawa Tengah.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022.

Gambar 2.30.
Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar
Tahun 2018-2022

Sementara itu, komoditas utama tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami fluktuasi dengan produksi tertinggi pada 2019 sebesar 2.894.884 Ton, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 26.549 Ton dan produksi kelapa tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 174.041 Ton.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.31.
Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022

c. Produksi Peternakan

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah terutama ternak sapi potong dan kambing di Jawa Tengah mengalami tren yang fluktuatif pada kurun waktu Tahun 2018-2022. Pada komoditas sapi potong, jumlah populasi terus mengalami peningkatan hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan populasi tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 1.873.206 ekor. Pada komoditas kambing, perkembangan populasi memiliki tren fluktuatif dengan populasi

tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 3.937.013 ekor. Penurunan jumlah populasi hewan ternak pada tahun 2022 disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia. Selain itu, usaha di sektor peternakan belum sepenuhnya pulih setelah mewabahnya PMK yang berimbas pada penurunan jumlah populasi ternak.



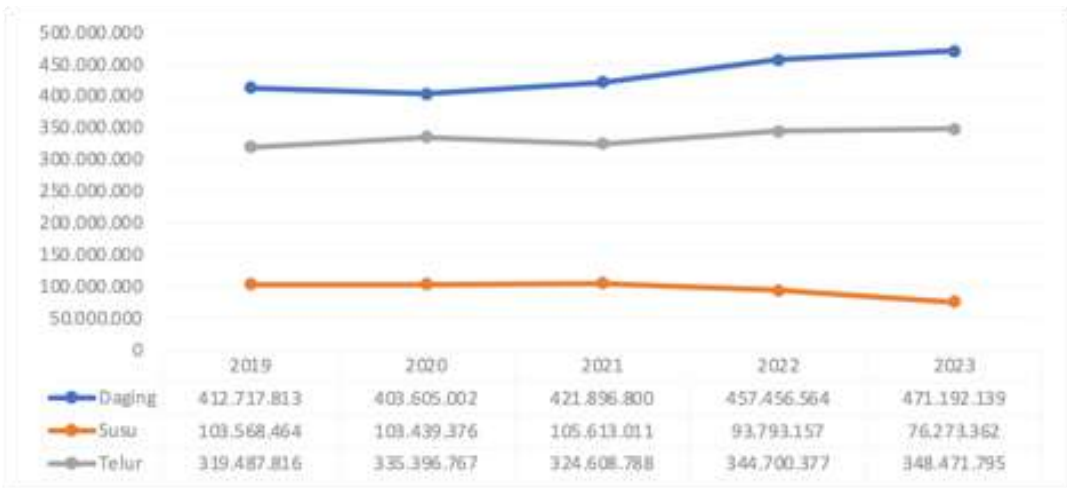
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.32.

Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun (2019-2023)

Produksi hasil peternakan pada daging, susu, dan telur di Jawa Tengah relatif juga mengalami peningkatan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 471.192.139 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 348.471.795 Kg.

Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualitas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Gambar 2.33.

Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2019-2023)

d. Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), melalui tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan; (2) Keterjangkauan; dan (3) Pemanfaatan. Kurun waktu 2019-2023 IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan trend meningkat, terbaik kedua secara Nasional dengan angka Tahun 2023 sebesar 84,80 (Gambar 2.34)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024.

Gambar 2.34.
Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah
Tahun (2019-2023)

Aspek ketersediaan pangan digambarkan melalui angka ketersediaan energi, protein dan lemak, yaitu ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah mencapai angka ketersediaan energi sebesar 4,021 kkal/hari dengan ketersediaan protein 90,23 gram/hari dan lemak sebesar 73,71 gram/hari.

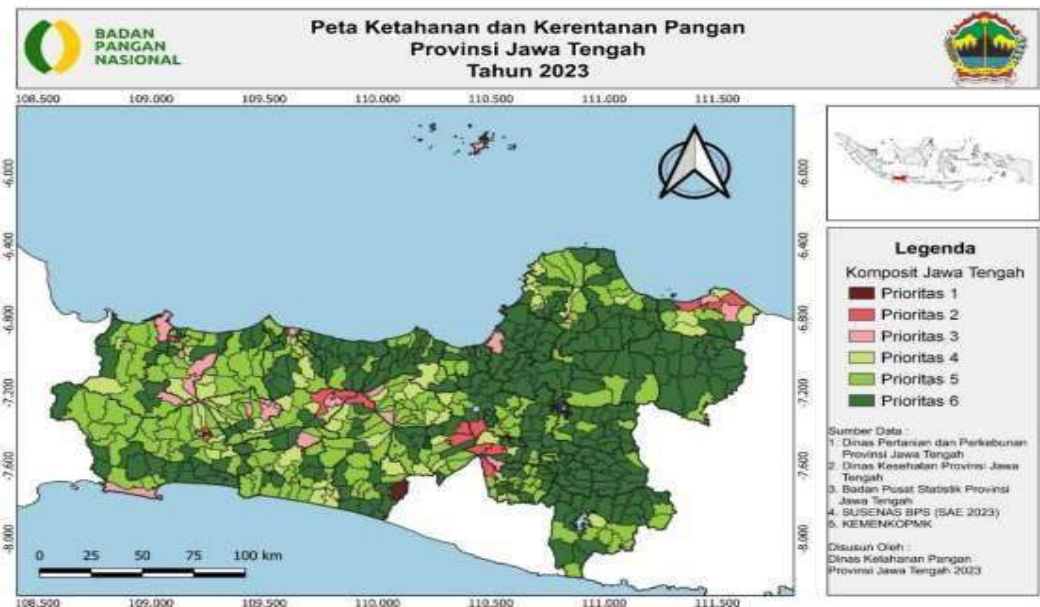
Tabel 2.14.
Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak
Provinsi Jawa Tengah

Tahun Penyusunan	ATAP	Energi (kkal/hari)			Protein (gram/hari)			Lemak (gram/hari)		
		Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew
2017	2016	4,055	3,925	130	109.03	97.84	11.19	62	55.24	6.76
2018	2017	4,027	3,886	141	114.46	98.77	15.69	60.88	52.92	7.96
2019	2018	3,730	3,605	125	87.83	75.45	12.38	76.24	68.38	7.86
2020	2019	3,732	3,604	128	87.97	74.69	13.27	40.41	32.75	7.65
2021	2020	3,736	3,607	129	98.17	84.51	13.66	56.38	48.74	7.63
2022	2021	3,797	3,680	118	95.98	83.82	11.75	57.99	50.82	7.17
2023	2022	4,021	3,904	117	90,23	78,35	11,88	73,71	66,52	7,19

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan peta FSVA diukur pada prioritas 1 sampai 6. Pada tahun 2023, dari total 576

kecamatan terdapat 20 kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3), 15 kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) dan 2 kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1). Kecamatan dengan prioritas 1, 2 dan 3 merupakan prioritas lokasi penanganan kerentanan dan ketahanan pangan di Jawa Tengah (Gambar 2.35)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.35.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pemanfaatan pangan individu dapat dilihat dari keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah masih harus mengupayakan peningkatan konsumsi pangan umbi-umbian dan pangan hewani yang masih dibawah standar, meskipun pada Tahun 2023 Skor PPH mencapai 94,2. Disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani.

Tabel 2.15.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,1	0,9	0,9	1,1	1,2
3	Pangan Hewani	24,0	20,0	20,4	21,0	22,9	22,5
4	Minyak & lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	6,4	6,1	6,3	8,0	8,2
7	Gula	2,5	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9
8	Sayur & buah	30,0	29,5	27,1	26,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	89,6	87,1	86,7	94,4	94,2
Skor PPH Nasional		100,0	90,8	87,9	87,2	92,9	94,1

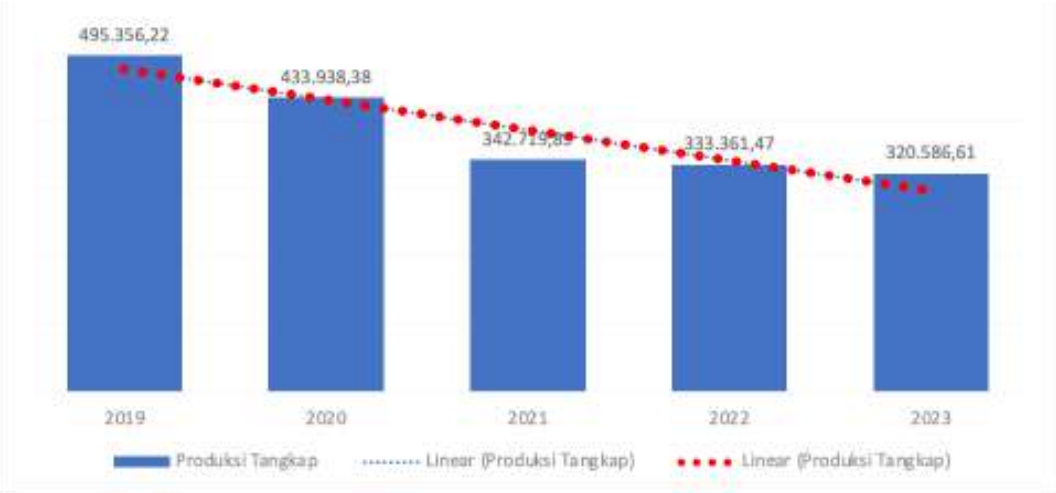
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2023.

e. Produksi Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah, selain itu juga diarahkan untuk menginisiasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. Pembangunan Ekonomi Biru ditopang oleh tiga pilar antara lain pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada pilar ekonomi didukung oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata berbasis kelautan; pilar lingkungan didukung oleh kualitas sumber daya, konservasi laut, dan energi terbarukan; serta pilar sosial didukung oleh ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan yang berkurang. Sedangkan pada Pembangunan Ekonomi Hijau, aspek perikanan budidaya menjadi salah satu faktor pembangunnya.

Di sisi lain, terkait aspek ketahanan pangan, sektor kelautan dan perikanan ditopang oleh perikanan tangkap dan budidaya; pengelolaan kawasan pesisir termasuk di dalamnya pergarman; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada perikanan tangkap produksi perikanan tangkap menunjukkan penurunan dari tahun 2019-2023, hal ini disebabkan karena: (1) terjadi penurunan potensi sumber daya ikan di laut Jawa (WPP-712) sebesar 387.854 ton atau berkurang 36,14% sesuai dengan hasil kajian pada Komnas Kajiskan 2021 yang dicantumkan didalam Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022; (2) Adanya transisi perijinan dari OSS 1.1 ke OSS RBA yang menyebabkan beberapa persyaratan izin kapal belum terakomodasi sehingga kapal tidak bisa melaut; (3) Diberlakukannya kebijakan penangkapan terukur dimana ikan hasil tangkapan didata sesuai zona penangkapan, sementara sebagian besar kapal-kapal Jawa Tengah beroperasi di luar Laut Jawa WPP 712; (4) Kenaikan Harga BBM industri dan Perbekalan Kapal; dan (5) Diberlakukannya kebijakan migrasi kapal perikanan izin daerah yang beroperasi diatas 12 mil menjadi izin pusat mengakibatkan kapal perikanan yang masih dalam proses perpanjangan izin tidak dapat melaut. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.36.
Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah

sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan breakwater (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

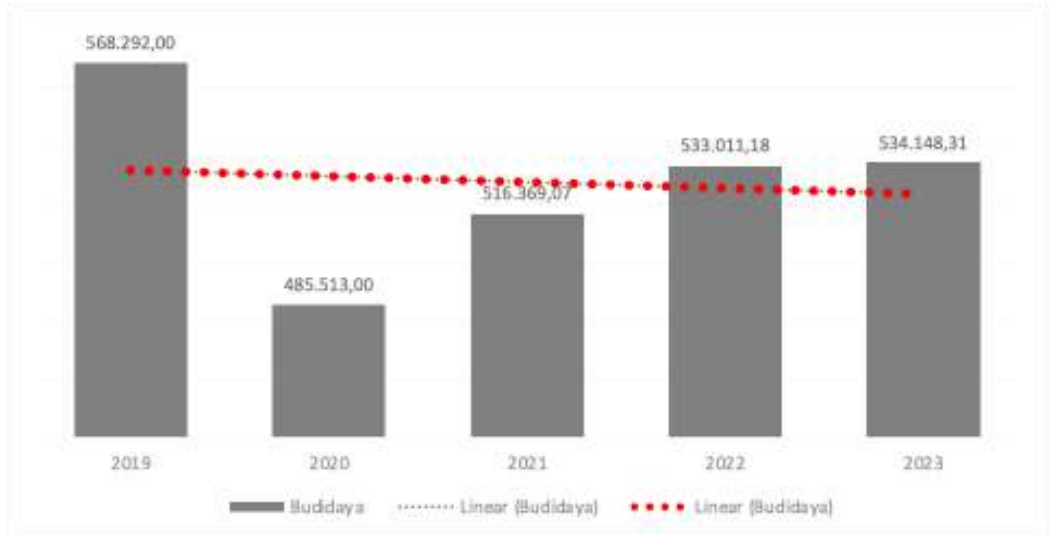
Tabel 2.16.
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah

KRITERIA TEKNIS :		PPP Tegalsari	PPP Karimunjawa	PPP Tasikagung	PPP Bajomulyo	PPP Morodemak	PPP Tawang	PPP Klidanglor	PPP Wonokerto	PPP Asemdayong	PPP Larangan	PPP Lohgending
<i>Fasilitas</i>	<i>Standar</i>											
Tambat labuh Kapal	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT
Panjang Dermaga	≥ 100 m	694 m	160 m	2400 m	693 m	400 m	450 m	300 m	450 m	215 m	130 m	414 m
Kedalaman Kolam	Min >2 m	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai
Daya tampung	30 Unit Kapal/Total 300 GT	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal
Lahan	5 Ha	16.3 Ha	16,4 Ha	9,659 Ha	6,36 Ha	3,9 Ha	0,7 Ha	50 Ha	0,8 Ha	2,2 Ha	5,1 Ha	18,7 Ha
PENUNJANG :												
Hasil Perikanan	rata-rata 5 Ton/Hari	169 Ton	5,2 Ton	19,2 Ton	87 Ton	13 Ton	1,5 Ton	51 Ton	0,5 Ton	29 Ton	2,8 Ton	0,9 Ton
Terdapat Industri Pengolahan Ikan	Perusahaan / UPI mikro	27	5	220	10	127	Ada	62	Ada	95	Ada	Ada
Industri Penunjang Lainnya	perusahaan	478	1	2	19	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KETERANGAN :												
Jumlah Kapal		335	358	359	318	46	759	153	421	253	138	83
< 10 GT		1	351	0	0	0	700	0	332	227	109	83
10-30 GT		54	7	155	34	46	59	114	89	26	29	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sehubungan dengan risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).

Sektor produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

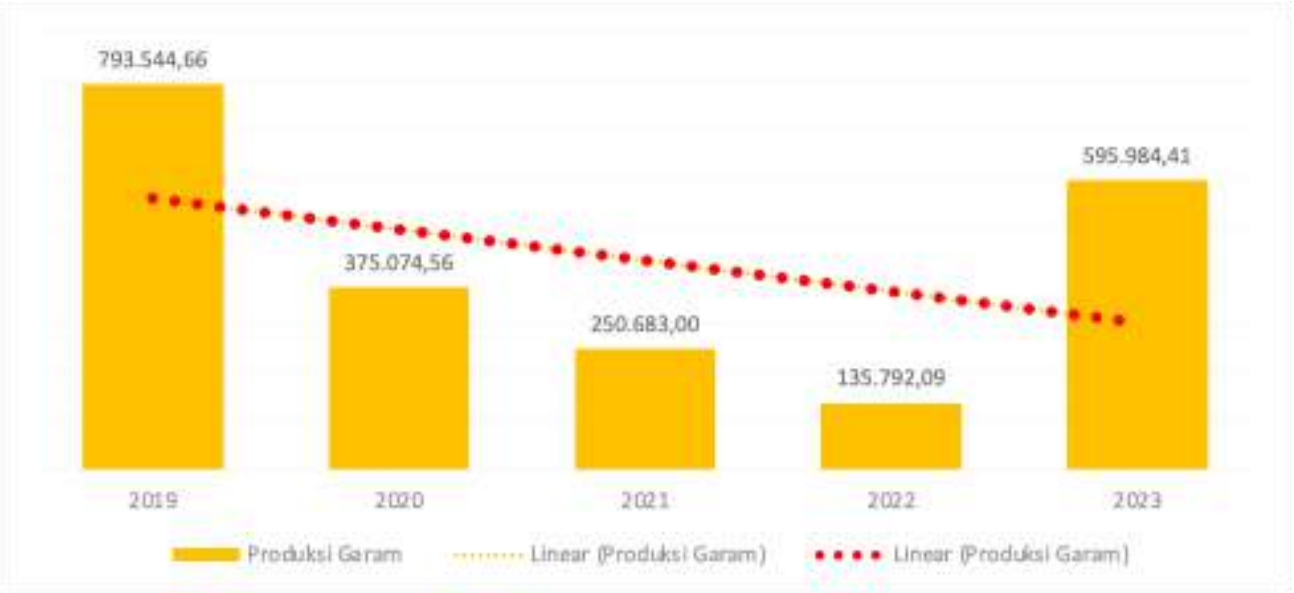
Gambar 2.37.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (*Great Grand Parent Stock*), kelas GPS (*Grand Parent Stock*) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang

perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam mengalami penurunan disebabkan karena musim kemarau basah cukup lama, namun mengalami peningkatan di tahun 2023 disebabkan oleh kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh *El Nino* sehingga musim panas lebih dominan. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.38.
Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2018 – 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.39.
Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis,

dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 22.274 unit maka pada tahun 2020 turun menjadi 19.477 unit, hal tersebut disebabkan adanya pengesahan status pembubaran dan pencabutan status badan hukum koperasi dari lembaran berita negara sebagai dampak dari kebijakan percepatan pembubaran koperasi oleh Kementerian Koperasi UKM RI dalam rangka mewujudkan Koperasi modern. Adapun setelah tahun 2020 jumlah koperasi mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2023 menjadi 21.276 unit hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan kemudahan dalam membentuk koperasi melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun jumlah koperasi mengalami kenaikan tetapi tingkat keaktifan cenderung menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2019 persentase koperasi aktif sebesar 84,22% dan pada tahun 2023 persentase koperasi aktif sebesar 48,22%. Hal tersebut sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023
1.	Jumlah Koperasi	22.274	19.447	20.777	21.018	21.276
2.	Jumlah Koperasi aktif	18.759	13.090	10.770	10.327	10.621
3.	Prosentase Kopereasi Aktif (%)	84,22	67,35	48,16	49,13	48,22

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 sebesar 25,33 persen sedangkan pada tahun 2023 sebesar 27,18 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18.

Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP)	13.101	12.774	12.903	13.166	13.218
2.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya	454	128	222	375	390
3.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit)	115	30	29	89	106
4.	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%)	25,33	23,44	13,06	23,73	27,18

Sumber: Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 161.458 unit pada tahun 2019 menjadi 187.746 unit pada tahun 2023. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.312.400 orang pada tahun 2019 menjadi sebanyak 1.352.136 orang pada tahun 2023. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar 38,158 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 39,221 miliar rupiah pada tahun 2023. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar 67,550 miliar pada tahun 2019 menjadi 69,381 miliar pada tahun 2023. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.

Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UMKM Binaan	UMKM	161,458	167,391	173,431	180,579	187.746
	– Produksi/Non Pertanian	UMKM	55,275	57,527	60,449	65,063	70.519
	– Pertanian	UMKM	26,833	27,653	28,284	28,400	28.483
	– Perdagangan	UMKM	59,836	62,083	63,965	65,979	67.098
	– Jasa	UMKM	19,514	20,128	20,733	21,137	21.646
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1,312,400	1,298,007	1,311,015	1,330,343	1.352.136
3	Asset	Rp. Milyar	38,158	38,353	38,521	38,898	39.221
4	Omzet	Rp. Milyar	67,550	67,087	68,242	68,581	69.381

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023.

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2019-2023 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2023 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
1	KAB. CILACAP	41,355	960,285,860,282	49,966	1,394,346,710,619	67,017	2,129,737,861,185	71,016	2,624,919,833,453	52.614	1.840.190.849.426
2	KAB. BANYUMAS	55,115	1,282,747,263,690	62,067	1,722,310,316,244	81,032	2,592,038,105,781	84,593	3,076,948,656,311	60.395	2.111.050.542.451
3	KAB. PURBALINGGA	25,654	602,714,584,855	27,689	803,732,756,908	40,839	1,299,152,047,779	40,276	1,442,972,839,914	32.626	1.058.008.932.917
4	KAB. BANJARNEGARA	29,766	632,705,263,546	36,186	899,705,181,588	42,432	1,251,222,195,514	44,733	1,521,610,585,804	29.647	1.003.269.757.964
5	KAB. KEBUMEN	25,513	573,708,207,067	34,149	952,579,273,357	42,936	1,388,686,443,433	41,576	1,645,011,183,407	32.372	1.233.727.118.960
6	KAB. PURWOREJO	21,332	408,576,873,790	28,451	698,850,237,182	35,719	1,027,427,376,945	36,796	1,332,611,684,888	24.644	959.659.862.318
7	KAB. WONOSOBO	23,057	515,131,370,783	29,502	786,462,223,780	32,089	1,087,479,988,575	34,258	1,335,876,474,453	24.735	963.015.421.204
8	KAB. MAGELANG	32,030	732,548,594,861	40,950	1,097,838,191,734	46,039	1,460,713,188,234	49,489	1,867,082,199,837	33.043	1.272.358.457.628
9	KAB. BOYOLALI	31,959	828,780,579,519	37,366	1,112,557,697,460	45,996	1,606,818,765,940	49,694	2,077,453,794,156	32.841	1.480.605.654.608
10	KAB. KLATEN	37,544	982,285,115,877	51,196	1,444,646,931,716	61,939	2,121,148,190,896	63,467	2,681,277,315,450	38.966	1.830.230.807.851
11	KAB. SUKOHARJO	25,087	706,836,957,302	34,744	1,081,776,881,390	42,854	1,582,353,275,797	41,976	1,920,002,945,800	29.850	1.464.647.494.075
12	KAB. WONOGIRI	25,496	685,671,001,093	35,877	1,087,998,374,407	46,919	1,590,755,342,861	49,380	2,044,594,999,547	26.632	1.187.220.565.189
13	KAB. KARANGANYAR	27,911	722,856,807,398	35,901	1,088,590,422,286	43,330	1,569,531,753,495	44,436	2,053,690,544,527	28.001	1.442.136.910.636
14	KAB. SRAGEN	34,534	899,981,114,268	40,635	1,300,547,042,229	52,677	2,013,289,872,710	54,400	2,541,688,588,633	33.726	1.672.257.577.725
15	KAB. GROBOGAN	49,175	979,056,006,113	67,026	1,542,288,553,779	82,266	2,405,075,535,917	89,416	3,173,851,980,803	54.037	2.088.427.262.757
16	KAB. BLORA	57,549	1,210,374,601,719	73,654	1,699,912,069,917	75,130	2,104,246,917,986	76,514	2,611,075,351,064	41.764	1.592.526.050.133
17	KAB. REMBANG	25,223	544,814,780,697	28,769	699,336,336,217	32,345	1,010,725,024,881	36,240	1,369,369,188,553	27.307	1.015.201.535.982
18	KAB. PATI	66,826	1,486,154,011,274	79,555	2,249,691,305,260	80,544	2,797,359,822,366	83,493	3,631,451,274,447	60.426	2.562.022.051.348
19	KAB. KUDUS	23,425	589,874,956,352	26,887	780,606,313,383	29,209	1,061,448,572,509	32,328	1,436,607,198,786	24.712	1.060.003.420.780
20	KAB. JEPARA	35,160	740,258,155,922	36,752	954,019,977,024	46,850	1,474,838,409,206	50,478	1,976,896,899,818	44.487	1.601.310.865.169
21	KAB. DEMAK	32,212	769,213,338,424	36,477	1,020,473,479,231	42,974	1,527,633,391,898	48,849	2,037,771,456,030	33.056	1.483.481.605.841
22	KAB. SEMARANG	30,419	765,945,740,676	41,340	1,098,366,277,769	44,383	1,651,074,085,410	46,723	2,095,318,514,959	35.194	1.578.501.891.832
23	KAB. TEMANGGUNG	23,732	522,430,931,880	32,682	812,940,656,417	37,125	1,149,057,568,683	40,697	1,449,775,849,161	30.305	1.143.186.858.793
24	KAB. KENDAL	27,899	652,804,255,069	39,596	999,378,230,464	42,382	1,403,642,495,261	44,397	1,722,038,355,016	27.483	1.174.300.275.683

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
25	KAB. BATANG	21,407	443,649,337,912	24,481	661,257,570,763	32,120	1,066,373,925,602	37,065	1,353,706,515,946	22.069	867.802.657.859
26	KAB. PEKALONGAN	18,725	378,276,899,231	24,150	629,124,933,039	31,580	981,476,531,591	35,577	1,222,824,400,202	23.116	784.239.646.945
27	KAB. PEMALANG	36,203	739,922,402,326	48,814	1,164,357,376,954	62,162	1,773,175,921,199	65,552	2,157,929,858,009	50.393	1.560.358.775.470
28	KAB. TEGAL	47,475	1,021,705,034,995	56,474	1,432,849,120,987	73,900	2,057,898,435,824	77,384	2,450,206,822,298	45.317	1.442.753.480.818
29	KAB. BREBES	75,573	1,417,876,938,238	86,856	1,956,644,782,697	93,977	2,558,951,345,370	102,660	3,080,273,062,920	66.398	1.898.270.289.270
30	KOTA MAGELANG	3,417	79,949,600,586	4,993	130,892,399,071	4,793	159,603,112,815	4,827	216,101,106,000	3.129	136.664.736.790
31	KOTA SURAKARTA	13,086	391,251,167,491	19,305	593,619,780,111	30,071	1,047,482,051,404	27,952	1,290,010,839,228	18.082	857.645.792.443
32	KOTA SALATIGA	4,771	128,492,192,604	5,926	179,309,053,998	5,676	220,769,639,245	6,110	320,100,400,000	4.213	228.617.475.000
33	KOTA SEMARANG	21,371	695,195,395,549	31,861	1,070,732,933,645	37,328	1,702,978,989,436	42.230	2,430,847,721,262	27.294	1.756.872.111.550
34	KOTA PEKALONGAN	6,464	150,943,612,600	7,247	224,298,605,237	10,143	323,354,337,497	11,052	386,682,529,242	8.870	272.832.250.604
35	KOTA TEGAL	7,676	229,764,739,800	7,889	262,776,282,173	9,515	360,062,578,224	10,930	464,287,866,282	5.847	218.073.616.271

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023.

2.3.9 Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar 195.399.044,07 rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,75 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai total PDRB (Miliar Rp)	1.360.960,13	1.347.922,69	1.420.799,91	1.560.899,02	1.696.795, 42
2	Nilai Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01	230.872,97
3	Kontribusi (%)	13,74	13,48	13,75	13,60	13,61

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19. Nilai ekspor tahun 2018 tercatat sebesar US\$8.260,18 juta, menurun menjadi sebesar US\$8.088,33 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US\$11.777,91 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah.

Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2018 tercatat sebesar US\$8.091,62 juta, menurun menjadi sebesar US\$7.704,24 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US\$11.210,92 juta. Namun, untuk nilai ekspor migas Jawa Tengah selama lima tahun terakhir tetap meningkat dan tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Nilai ekspor migas Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar US\$168,55 juta, meningkat menjadi US\$566,99 juta pada tahun 2022.

Komoditas utama golongan barang yang memiliki peran terbesar pada ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah komoditas pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) yang tercatat sebesar US\$2.470,91 juta atau 22,04 persen dari nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah. Komoditas berikutnya adalah pakaian dan aksesorisnya (rajutan) sebesar US\$1.450,72 juta (12,94 persen), komoditas alas kaki sebesar US\$1.283,83 juta (11,45 persen), dan komoditas kayu dan barang dari kayu sebesar US\$1.130,20 juta (10,08 persen). Nilai komoditas tersebut meningkat dari nilai pada tahun 2021. Perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.22.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor	8.516,70	8.088,30	10.733,44	11.777,91	10.229,18
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92	9.868,62

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2018-2022 cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2018-2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Nilai impor Jawa Tengah tahun 2018-2020 tercatat sebesar US\$14.779,38 juta menurun menjadi US\$8.719,80 juta, kemudian meningkat menjadi US\$15.013,61 juta pada tahun 2022. Nilai impor migas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US\$7.435,63 juta, meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 yang sebesar US\$4.440,52 juta.

Demikian juga untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar US\$7.577,98 juta, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar US\$7.341,27 juta. Komoditas impor nonmigas terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya yang pada tahun 2022 tercatat sebesar US\$810,13 juta atau sebesar 10,69 persen dari total nilai impor Jawa Tengah. Komoditas selanjutnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar US\$699,49 juta (9,23 persen), serta plastik dan barang dari plastik sebesar US\$657,03 juta (8,67 persen). Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 2.23.
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Impor	12.567,62	8.719,80	11.781,79	15.013,61	n/a
- Migas	3.906,03	2.154,76	4.440,52	7.435,63	n/a
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	7.341,27	7.577,98	n/a

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami defisit, di mana selama tahun 2018-2020 mengalami penurunan defisit, namun kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US\$6.519,20 juta, menurun pada tahun 2020 sebesar US\$631,5 juta. Pada tahun 2021 defisit kembali meningkat menjadi US\$1.048,35 juta, dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi US\$3.235,70 juta. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2022 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US\$6.868,64 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US\$3.632,94 juta.

Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (Juta US\$)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor	8.516,70	8.088,30	10.733,44	11.777,91	10.229,18
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92	9.868,62
Impor	12.567,62	8.719,80	11.781,79	15.013,61	14.497,42
- Migas	3.906,03	2.154,76	4.440,56	7.435,63	7.036,06
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	7.341,23	7.577,98	7.461,36
Surplus/Defisit	(4.050,92)	(631,5)	(1.048,35)	(3.235,70)	(4.268,24)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitas penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 260 sertifikat untuk lima jenis barang, meningkat menjadi 2.019 sertifikat untuk tujuh jenis barang pada tahun 2022.

Tabel 2.25.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang
Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	2.437	1.767	1.925	2.019	n/a
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	5 jenis barang	7 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 unit yaitu di 3 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.26.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	8	4	1	0	n/a
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota	5 di 4 Kab/Kota	n/a
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)	0 kasus (-)	n/a
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	3.512	2.741	1.228	305	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

2.3.10 Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487,44 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1,42 miliar rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.362.457.380,57	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.157.316.832,47	1.696.795.419,3
2	Nilai Sektor Industri (Juta Rp)	468.992.159,77	464.609.134,06	487.445.099,28	392.749.654,42	577.429.037,01
3	Kontribusi (%)	34,41	34,47	34,31	33.94	34.03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Industri besar dari 1.584 unit usaha pada tahun 2019 menjadi 2.982 unit usaha pada tahun 2022. Untuk jumlah IKM di tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. IKM di tahun 2021 sebanyak 912.421 unit usaha meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 327.110 unit usaha.

Tabel 2.28.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Jenis Industri	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Besar	1.584	1.591	2.417	2.982	n/a
2	Kecil dan Menengah	327.110	327.200	912.421	204.608	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri meubel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 19 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.29.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis industri	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah klaster logam, mesin, tekstil	6	6	6	6	n/a
2	jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka	7	7	7	7	n/a
3	Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan	6	6	6	7	n/a
	Jumlah klaster industri	19	19	19	20	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 (tiga) lembaga industri meliputi Pokja Industri pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Mitra Praja Utama.

2.3.11 Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

No	Indikator	Capaian
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	n/a
2	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	3,40 %
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	11,24%
4	Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan nusantara (Rp/Orang) (2022)	Rp4,184,389,-
5	Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan mancanegara	\$ 670
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	442.302 orang
7	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	53.442.804 orang
8	Daya Tarik Wisata (DTW)	1393 (DTW Alam 693, DTW Budaya 232 dan DTW Buatan 468)
9	Jumlah Desa Wisata	776 Desa Wisata
10	PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (2022)	23,840,445,620,-
11	Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	935 orang
12	Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	480 orang

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 3,29% (2022) menjadi 3,40% (2023), Jumlah kunjungan wisatawan 53.885.106 orang yang terdiri dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 442.302 orang dan Wisatawan Nusantara 53.442.804 orang adapun kontribusi PDRB sektor ekonomi kreatif sebesar 23,840,445,620,-.

2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 32.208,85 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

- 1. Kewenangan provinsi sebesar 7,58 persen;
- 2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 86,56 persen;
- 3. Kewenangan Nasional sebesar 5,86 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2023 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1098,786 km atau 45,03 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi permukaan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31.
Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)	
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
	Km	%	km	%	km	%	Km	%		
Nasional	979,17	51,88	850,95	45,09	56,67	3,00	0,50	0,03	1.887,29	
Provinsi	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12	
Kabupaten/ Kota	15.468,09	55,48	6.789,90	24,35	2.687,33	9,64	2.936,13	10,53	27.881,44	
Jumlah Jateng	18.163,30	56,39	8.128,64	25,24	2.868,32	8,91	3.048,60	9,47	32.208,85	
Jalan Tol	330,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71	

Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 dengan total panjang Jalan Provinsi 2.404,74 km (sesuai SK Gubernur No. 620/2 tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah) mengalami penurunan hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 dapat diperbaiki dengan kondisi mantap 92,49% (terdiri dari kondisi baik 83,60 % dan kondisi sedang 8,89 %), namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 90,88%. Hal ini disebabkan oleh telah terlampauinya usia layanan ruas-ruas jalan sehingga kondisinya menurun.

Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah No. 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, total panjang Jalan

Provinsi mengalami perubahan menjadi 2.440,12 km karena adanya *upgrade* ruas-ruas Jalan Kabupaten yang strategis dan disesuaikan dengan fungsi jalan. Penanganan jalan-jalan Kabupaten yang berubah status menjadi Jalan Provinsi baru dimulai pada tahun 2024. Kondisi permukaan Jalan Provinsi mantap tahun 2023 dengan total panjang jalan sesuai update adalah 90,33% dengan rincian seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi								Panjang Jalan Provinsi
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
2019	1.946,86	80,96	234,01	9,73	223,87	9,31	0,000	0,00	2.404,74
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00	2.404,74
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2.404,74
2023	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2023								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	677,45	72,17	123,61	13,17	50,00	5,33	87,59	9,33	938,65
2	Banyumas	665,429	50,590	285,412	21,699	206,427	15,694	158,079	12,018	1.315,347
3	Batang	400,57	74,12	49,93	9,24	51,69	9,56	38,26	7,08	540,45
4	Blora	433,225	47,277	128,297	14,001	91,098	9,941	263,730	28,780	916,350
5	Boyolali	498,002	73,89	61,393	9,11	52,610	7,81	61,995	9,20	674,000
6	Brebes	271,879	22,47	413,769	34,19	197,005	16,28	327,540	27,07	1.210,19
7	Cilacap	785,320	61,00	178,315	13,85	128,577	9,99	195,163	15,16	1.287,375
8	Demak	536,45	58,98	276,43	30,39	49,45	5,44	47,25	5,19	909,58
9	Grobogan	578,667	61,40	229,210	24,32	58,362	6,19	76,150	8,08	942,389
10	Jepara	370,98	43,44	376,01	44,03	94,78	11,10	12,26	1,43	854,03
11	Karanganyar	360,17	41,34	363,50	41,72	89,51	10,27	58,16	6,67	871,34
12	Kebumen	479,75	47,17	276,71	27,20	142,94	14,05	117,75	11,58	1.017,15
13	Kendal	388,93	49,69	261,61	33,42	64,65	8,26	67,53	8,63	782,71
14	Klaten	489,08	67,85	172,62	23,95	53,47	7,42	5,68	0,79	720,85
15	Kudus	409,34	70,53	121,44	20,92	29,78	5,13	19,85	3,42	580,42
16	Magelang	726,38	71,17	185,38	18,16	77,30	7,57	31,60	3,10	1.020,66
17	Pati	875,90	69,72	135,45	10,78	102,64	8,17	142,30	11,33	1.256,285
18	Pekalongan	288,992	41,41	232,135	33,26	79,455	11,38	97,314	13,94	697,896
19	Pemalang	454,09	59,30	77,57	10,13	75,98	9,92	158,09	20,65	765,72

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2023								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
20	Purbalingga	443,98	46,61	306,94	32,22	52,41	5,50	149,27	15,67	952,60
21	Purworejo	146,22	19,30	331,57	43,76	163,84	21,62	116,16	15,33	757,79
22	Rembang	320,16	53,88	101,53	17,09	65,01	10,94	107,50	18,09	594,20
23	Semarang	476,69	64,98	165,10	22,50	58,03	7,91	33,80	4,61	733,62
24	Sragen	619,51	60,72	220,02	21,57	78,95	7,74	101,77	9,98	1.020,25
25	Sukoharjo	300,92	49,53	243,11	40,01	56,29	9,26	7,26	1,19	607,57
26	Tegal	525,61	62,04	129,66	15,30	103,27	12,19	88,73	10,47	847,27
27	Temanggung	474,138	72,89	105,834	16,27	47,535	7,31	22,969	3,53	650,476
28	Wonogiri	1194,67	81,20	112,09	7,62	111,52	7,58	52,91	3,60	1.471,19
29	Wonosobo	288,672	28,89	352,301	35,26	142,054	14,22	216,249	21,64	999,276
30	Kota Magelang	74,61	59,81	31,93	25,60	16,40	13,15	1,80	1,45	124,73
31	Kota Pekalongan	125,18	81,60	4,69	3,06	9,86	6,43	13,68	8,92	153,41
32	Kota Salatiga	240,42	71,24	86,62	25,67	7,37	2,18	3,07	0,91	337,47
33	Kota Semarang	304,998	36,314	476,143	56,690	23,588	2,808	35,172	4,188	839,901
34	Kota Surakarta	106,61	45,81	96,89	41,63	27,93	12,00	1,30	0,56	232,73
35	Kota Tegal	135,11	52,45	76,70	29,78	27,57	10,70	18,20	7,06	257,57
	JUMLAH	15.468,09	55,48	6.789,90	24,35	2.687,33	9,64	2.936,13	10,53	27.881,44

Sumber: DPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, 2023.

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2023, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.098,786 km. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 2.203,83 km atau mencapai 90,32 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Tabel 2.34.

Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2023

No.	Lebar Perke- rasan Jalan	Panjang (km)	Persen- tase (%)	Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				Panjang (km)	Persen- tase (%)	Panjang (km)	Persen- tase (%)	Panjang (km)	Persen- tase (%)	Panjang (km)	Persen- tase (%)
1	≥7 m	1098,79	45,03	792,90	32,49%	222,78	9,13%	47,73	1,96%	35,38	1,45%
2	<7 m	1341,33	54,97	923,14	37,90%	465,01	10,86%	76,59	3,14%	76,59	3,14%
Total		2.440,12	100	1716,04	70,33%	487,79	19,99%	124,32	5,09%	111,97	4,59%

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023.

b. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2023 sebesar 91,40 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 88,27 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 38,75 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 36,93 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2023 sebesar 48,78 persen, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 48,82 persen dikarenakan jumlah pembangunan baru jaringan perpipaan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, selain itu juga dikarenakan adanya ketidakberfungsian beberapa jaringan perpipaan SPAM perdesaan akibat menurunnya debit sumber air baku.

Cakupan akses air limbah domestik layak pada tahun 2023 sebesar 92,14 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 90,38 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2023 sebesar 9,91 persen sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 9,94 persen dikarenakan terjadinya kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan pembangunan baru tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah direncanakan 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria. Sedangkan dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik, diinisiasi penyediaan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa IPLT Regional di Jawa Tengah.

Tabel 2.35.
Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses Air Minum						
	Layak	79.35	81.77	85,11	86,87	88,27	91,40
	Aman	22,66	26,7	32,24	34,06	36,93	38,75
	Jaringan Perpipaan	36,8	39,08	43,74	44,37	48,82	48,78
2	Akses Air Limbah Domestik						
	Layak	82,04	89,57	90,72	88,67	90,38	92,14
	Aman	-	-	10,69	10,75	9,94	9,91

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah domestik yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.

Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kab/Kota	Akses Air Minum (%)			Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2023)			Jaringan Perpipaan Non PDAM (Pamsimas)		
		Layak	Aman	Perpipa-an	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Kinerja	Jumlah Sambungan Runah	Jumlah SPAM Fungsi Sebagian	Jumlah SPAM Tidak Fungsi
1	Cilacap	91,23	23,28	31,99	899,80	630,20	Sehat	21.854	16	0
2	Banyumas	77,56	32,38	32,38	916,05	151,43	Sehat	55.551	4	6
3	Purbalingga	95,99	47,02	41,28	603,16	289,83	Sehat	42.838	0	1
4	Banjarnegara	96,76	26,30	27,13	99,84	33,16	Kurang Sehat	35.520	2	2
5	Kebumen	97,29	18,41	19,05	339,42	105,58	Sehat	27.252	3	2
6	Purworejo	97,97	37,26	29,19	240,93	143,07	Sehat	32.220	2	4
7	Wonosobo	93,77	50,88	95,06	750,27	395,02	Sehat	28.392	0	0
8	Magelang	92,49	16,86	41,98	880,99	216,51	Sehat	29.497	7	0
9	Boyolali	96,44	38,96	53,48	397,00	296,50	Sehat	45.215	0	0
10	Klaten	93,38	33,13	33,13	555,90	18,00	Sehat	22.620	1	7
11	Sukoharjo	93,22	14,90	28,87	373,16	119,84	Sehat	21.717	0	0
12	Wonogiri	92,67	26,67	43,07	325,49	242,27	Sehat	36.132	3	0
13	Karanganyar	98,80	30,75	76,90	659,00	12,00	Sehat	33.869	3	1
14	Sragen	88,24	20,55	44,12	893,62	151,27	Sehat	55.990	0	0
15	Grobogan	87,93	25,99	25,99	291,00	17,00	Sehat	26.914	0	10
16	Blora	94,00	9,50	25,00	248,00	36,00	Sehat	26.729	0	6
17	Rembang	92,45	41,67	35,94	234,08	53,42	Sehat	23.347	7	5
18	Pati	82,65	35,81	67,82	399,32	75,38	Sehat	43.242	6	7
19	Kudus	98,51	23,90	35,15	501,20	241,50	Sehat	17.199	0	4
20	Jepara	98,06	20,50	20,50	622,00	195,50	Cukup Sehat	18.882	0	0
21	Demak	87,64	41,47	81,42	510,00	114,00	Sehat	34.377	4	6
22	Semarang	99,13	40,62	41,43	493,14	96,40	Sehat	58.867	1	0
23	Temanggung	95,75	18,19	77,52	456,99	152,01	Sehat	35.215	0	0
24	Kendal	95,58	76,82	56,07	688,54	157,66	Sehat	52.681	0	0
25	Batang	87,39	40,40	47,00	547,15	46,85	Sehat	35.619	1	1
26	Pekalongan	85,00	56,03	56,03	299,19	47,81	Sehat	38.857	0	0
27	Pemalang	90,05	41,26	44,95	583,00	273,00	Sehat	37.348	7	5
28	Tegal	80,68	35,71	35,71	414,17	19,42	Sehat	24.050	3	5
29	Brebes	100,00	21,00	21,00	476,08	19,29	Sehat	31.813	0	6
30	Kota Magelang	98,32	88,21	91,26	630,51	11,73	Sehat	-	0	0
31	Kota Surakarta	96,95	60,08	60,70	774,71	191,29	Sehat	-	0	0
32	Kota Salatiga	98,00	91,00	91,00	351,79	186,25	Sehat	-	0	0
33	Kota Semarang	81,83	64,00	81,83	3.446,29	1.213,00	Sehat	25.670	0	3
34	Kota Pekalongan	86,89	86,89	86,89	330,00	150,00	Sehat	13.710	3	1
35	Kota Tegal	61,23	60,22	52,00	335,57	56,81	Sehat	-	0	0
	Jawa Tengah	91,40	38,75	48,78	20.567,36	6.159,00	Sehat	1.033.187	73	82

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 2.37.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
1	Cilacap	92	1,46	IPLT Tritih Lor Desa Tritih Lor Kec. Jeruk Legi	Beroperasi	1
2	Banyumas	92	1,40	IPLT Gunung Tugel Desa Kedungrandu Kec. Patikraja	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	30
3	Purbalingga	94	belum ada IPLT	-		2
4	Banjarnegara	85,12	belum ada IPLT	-		2
5	Kebumen	93	3,09	IPLT Kaligending Desa Kaligending Kec. Karang Sambung	Beroperasi	14
				IPLT Semali Desa Semali Kec. Sempor	Beroperasi	
6	Purworejo	95,32	20	IPLT Gunung Tumpeng Desa Jetis Kec. Loano	Tidak Dioperasikan	17
7	Wonosobo	71,61	1,69	IPLT Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Selomerto	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	n/a
8	Magelang	91,65	belum ada IPLT	-		12
9	Boyolali	98,3	29,21	IPLT Winong Desa Jelok Kec. Boyolali	Tidak Dioperasikan	32
10	Klaten	100	1,42	IPLT Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah	Beroperasi	50
11	Sukoharjo	95,95	2,31	IPLT Mojorejo Desa Mojorejo Kec. Bendosari	Beroperasi	10
12	Wonogiri	99,86	0,79	IPLT Ngadirojo Desa Kerjo Lor Kec. Ngadirojo	Beroperasi	33
13	Karanganyar	99,38	3,30	IPLT Mojogedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	Beroperasi	30
14	Sragen	85,19	2,20	IPLT Tanggan Desa Tanggan Kec. Gesi		20
15	Grobogan	77,76	22,24	IPLT Ngembak Desa Ngembak Kec. Purwodadi	Beroperasi	n/a
16	Blora	95,7	1,45	IPLT Temurejo Desa Temurejo Kec. Blora	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	20
17	Rembang	96,67	1,06	IPLT Landoh Desa Landoh Kec. Sulang	Tidak beroperasi	21
18	Pati	100	15,85	IPLT Sukoharjo Desa Sukoharjo Kec. Margorejo	Beroperasi	22
19	Kudus	96,8	2,61	IPLT Tanjungrejo Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo	Beroperasi	50
20	Jepara	78,92	3,60	IPLT Bandengan Desa Bandengan Kec. Jepara	Beroperasi	95
21	Demak	100	4,10	IPLT Kalikondang Desa Kalikondang Kec. Demak	Beroperasi	6
22	Semarang	97,47	0,72	-		39
23	Temanggung	94,39	5,22	IPLT Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	Beroperasi	n/a
24	Kendal	85,81	belum ada IPLT	-		13

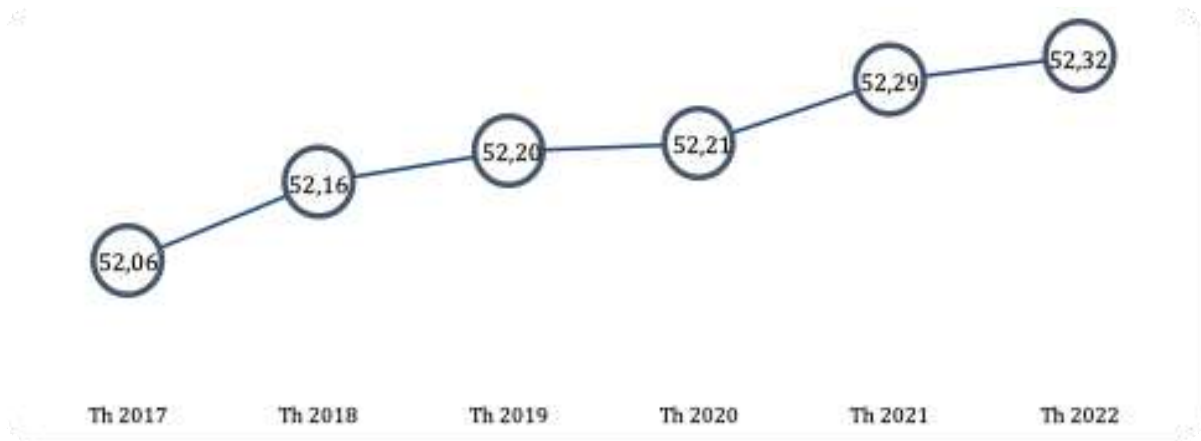
No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
25	Batang	87	5,00	IPLT Randu Kuning Desa Tegalsari Kec. Kandeman	Beroperasi	4
26	Pekalongan	95,92	62,00	IPLT Kab. Pekalongan Desa Bener Kec. Wiradesa	Beroperasi	4
27	Pemalang	78,87	52,93	IPLT Pegongsoran Desa Pegongsoran Kec. Pemalang	Beroperasi	3
28	Tegal	99,93	0,00	IPLT Kedungjati Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah	Beroperasi	n/a
29	Brebes	84,08	1,25	-		1
30	Kota Magelang	98,81	14,22	IPLT Dumpoh Kel. Tegalrejo Kec. Magelang Utara	Beroperasi	21
31	Kota Surakarta	97,81	61,52	IPLT Putri Cempo Kel. Mojosongo Kec. Jebres	Beroperasi	50
32	Kota Salatiga	98	12,00	IPLT Ngronggo Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo	Beroperasi	n/a
33	Kota Semarang	92,75	2,99	IPLT Tambak Lorok Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk	Beroperasi	1
34	Kota Pekalongan	99,08	8,95	IPLT Degayu Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara	Beroperasi	50
35	Kota Tegal	75,83	2,32	IPLT Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat	Beroperasi	8

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

c. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2023 tercatat 52,36 persen (692,56 km dari 1.323,67 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 52,32 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.40.
Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2022 (%)

Kebutuhan air irigasi rata-rata pertahun sebesar 19.636.378.014 m³/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung.

Tabel 2.38.

Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	37
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.546

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2016-2022 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan.

Tabel 2.39.

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	(Ha)
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865
2019	4.941	6	66.723	77	15.201	17	0	0	86.865
2020	4.333	5	67.178	77	15.354	18	0	0	86.865
2021	4.333	5	67.513	78	15.019	17	0	0	86.865
2022	4.333	5	67.595	78	14.937	17	0	0	86.865
2023	4.170	5	67.930	78	14.765	17	0	0	86.865

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari sisi pengelolaan irigasi, pengukuran menggunakan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) dapat menunjukkan efektifitas fungsi irigasi yang dikelola. Pada tahun 2017 IKSI jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada angka 74,55, namun pada akhir tahun 2023 menurun pada angka 68,87.

Tabel 2.40.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi
Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023

Tahun	IKSI Kewenangan Provinsi	Satuan
2017	74,55	angka
2018	73,81	angka
2019	73,95	angka

Tahun	IKSI Kewenangan Provinsi	Satuan
2020	74,32	angka
2021	75,95	angka
2022	68,27	angka
2023	68,87	angka

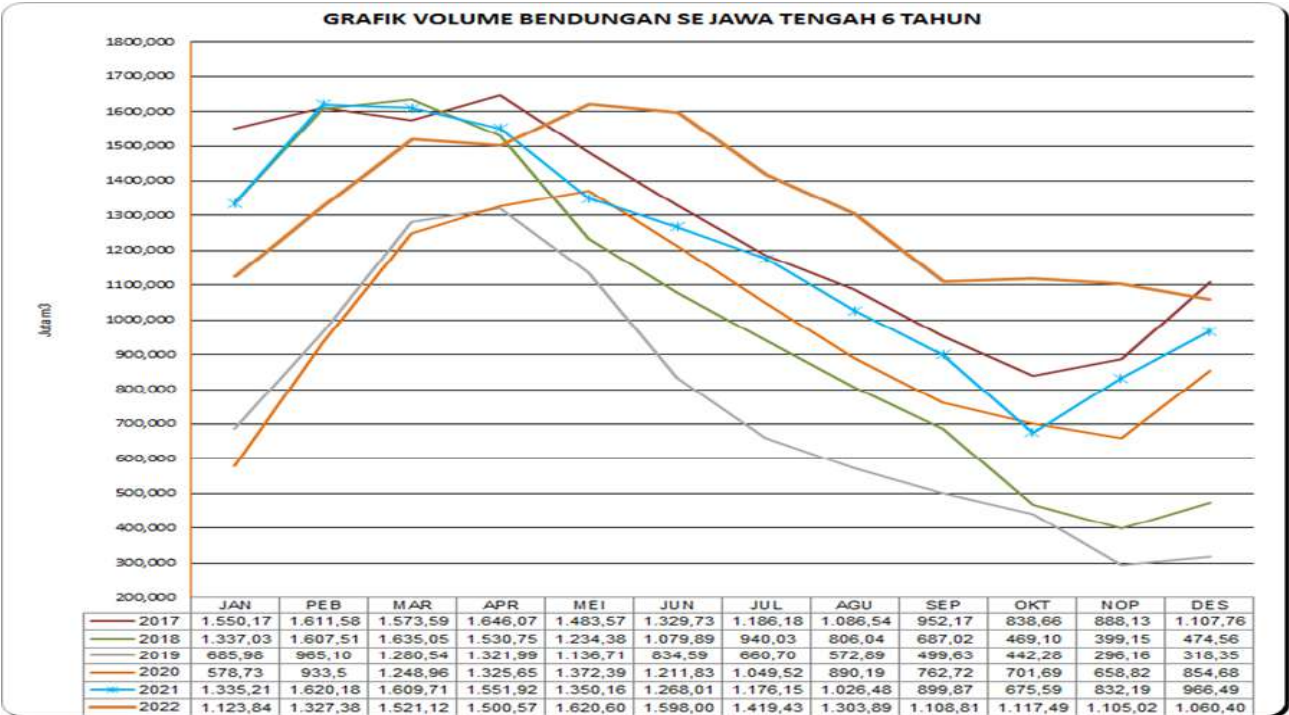
Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari 58,5 persen menjadi menjadi 62,5 persen di tahun 2023.

Tabel 2.41.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	745,02	750,25	755,35	760,33	760,33	770,08	774,99
Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	435,84	456,83	466,78	466,78	467,62	477,45	484,4
Ketersediaan Air Baku (%)	58,5	60,89	61,8	61,39	61,50	62	62,5

Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.41.
Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m³)
Tahun 2017 – 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu

melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan. Program 1000 embung ini diinisiasi pada tahun 2016 dan pada tahun 2023 sudah melebihi target. Tercatat sudah ada 1.162 embung yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan air baku masyarakat. se-Jawa Tengah.

Tabel 2.42.
Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumbernya

No	Instansi/Lembaga	Sumber Pendanaan	Embung (Lokasi)	Long Storage (Lokasi)	Jumlah (Lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BBWS)	APBN	142	3	145
2.	Pemerintah Pusat (BNPB)	APBN	2	-	2
3.	Dinas PUSDATARU	APBD	76	17	93
4.	Distanbun	APBD	4	-	4
		APBN	512	-	512
5.	DLHK	DAK	390	-	390
6.	Pemkab (Bankeu)	APBD	13	-	13
7.	CSR/TJSLP	Hibah	3	-	3
TOTAL			1.142	20	1.162

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023.

d. Jasa Konstruksi

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2022 mencapai 2.702 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 2.312 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2022 sejumlah 1.260 orang bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 1.000 orang.

Tabel 2.43.
Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.080	750	1.138	2.312	2.702	n/a
2	Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event / pameran}	4	4	0	1	4	n/a
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb),	2.038	2.798	3.288	1.000	1.260	n/a

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

Tabel 2.44.
Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora	2019	51
BGMD Kota + Kab Pekalongan	2021	36
BGMD Kab, Pemalang	2021	27
BGMD Kab, Brebes	2022	32
BGMD Kota + Kab Tegal	2022	43
TOTAL		189

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 8 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.45.
Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Renovasi
1	DKI Jakarta	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Banjarnegara	24	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Banyumas	45	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Batang	19	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Blora	23	353	27	313	13	0	0	0
6	Kab. Boyolali	36	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Brebes	32	405	0	365	26	9	0	5
8	Kab. Cilacap	37	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Demak	21	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Grobogan	20	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Jepara	29	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Karanganyar	26	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Kebumen	32	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Kendal	29	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Klaten	34	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Magelang	14	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Pekalongan	16	166	0	156	8	2	0	0
18	Kota Salatiga	15	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Semarang	110	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Surakarta	37	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Tegal	15	118	21	95	2	0	0	0
22	Kab. Kudus	18	-	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Magelang	21	-	-	-	-	-	-	-
24	Kab. Pati	27	-	-	-	-	-	-	-
25	Kab. Pekalongan	20	325	0	319	1	5	0	0
26	Kab. Pemalang	27	361	1	349	7	4	1	0
27	Kab. Purbalingga	25	-	-	-	-	-	-	-
28	Kab. Purworejo	34	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Rembang	28	407	26	378	3	0	0	0
30	Kab. Semarang	42	-	-	-	-	-	-	-
31	Kab. Sragen	31	-	-	-	-	-	-	-
32	Kab. Sukoharjo	29	-	-	-	-	-	-	-
33	Kab. Tegal	28	369	43	308	10	5	3	0
34	Kab. Temanggung	24	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Renovasi
35	Kab. Wonogiri	37	-	-	-	-	-	-	-
36	Kab. Wonosobo	24	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.030	2.504	118	2.283	70	25	4	5

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

Asumsi jumlah rumah dan rumah layak huni dihitung berdasarkan data status kepemilikan rumah yang dirilis oleh BPS. Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III pada akhir tahun 2023 asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.753.432 unit rumah dengan jumlah rumah layak huninya sebesar 68,68 % atau sebanyak 6.012.396 unit rumah.

Tabel 2.46.

Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Cilacap	438.181	243.760
Banyumas	444.305	288.265
Purbalingga	229.028	129.355
Banjarnegara	234.143	81.224
Kebumen	307.796	219.828
Purworejo	187.300	128.170
Wonosobo	207.950	98.901
Magelang	336.145	250.025
Boyolali	264.484	199.183
Klaten	310.271	288.459
Sukoharjo	218.675	198.973
Wonogiri	254.457	223.668
Karanganyar	222.284	204.391
Sragen	245.387	192.702
Grobogan	386.315	189.681
Blora	235.920	130.275
Rembang	172.027	129.812
Pati	357.713	285.491
Kudus	213.705	176.414
Jepara	318.595	175.896

Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Demak	307.323	220.904
Semarang	283.187	201.120
Temanggung	199.456	115.186
Kendal	255.416	164.283
Batang	193.241	104.157
Pekalongan	203.725	152.753
Pemalang	283.336	196.862
Tegal	300.446	228.970
Brebes	442.400	288.091
Kota Magelang	25.860	19.695
Kota Surakarta	104.561	78.045
Kota Salatiga	50.336	42.670
Kota Semarang	417.525	278.948
Kota Pekalongan	55.270	45.277
Kota Tegal	46.669	40.962
Prov. Jawa Tengah	8.753.432	6.012.396

Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tegah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.47.
Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	Asosiasi Perumahan	CSR & Swadaya	
2019	1.279	-	-	11.483	-	12.762
2020	25	205	-	30.193	-	30.423
2021	220	186	-	30.595	5.799	36.800
2022	2.201	326	143	24.709	224	27.603
2023	221	900	151	57.364	3.842	62.478
Total	3.946	1.617	294	154.344	9.865	170.066

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022.

a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Jawa Tengah dari berbagai sumber pembiayaan dapat dilihat pada tabel dan tabel berikut.

Tabel 2.48.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019–2023

Tahun	Sumber Pembiayaan				Verivali lapangan	JUMLAH TOTAL SESUAI LKPJ
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2019	36.725	23.208	26.651	15.986	-	102.570
2020	48.809	10.298	12.855	3.268	-	75.230
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	397.572	454.451
2022	35.771	11.487	12.714	2.659	231.279 (Cat. Data)	293.910
2023	26.542	16.592	12.229	2.610	372.771	430.744
Total	180.470	72.878	75.819	26.116	1.001.622	1.356.905

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.

Intervensi stimulan Peningkatan kualitas RTLH dari berbagai sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), BAZNAS dan lain-lain sampai dengan tahun 2023 pada data PBDT Tahun 2015 adalah sebanyak 1.071.002 unit. Sisa RTLH berdasarkan PBDT sebanyak 511.022 unit. Selain data PBDT setiap tahun terdapat penambahan RTLH melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan tahun 2023 sebanyak 998.916 unit. Angka tersebut telah diintervensi dari berbagai sumber anggaran sebanyak 509.629 unit, sehingga sisa RTLH dari DTKS tersebut sebanyak 489.287 unit. Jadi total sisa RTLH yang belum tertangani (PBDT dan DTKS) sebanyak 1.000.309 unit. Penanganan RTLH dari berbagai sumber anggaran juga dilakukan diluar PBDT dan DTKS, dengan penanganan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 68.006 unit. Sehingga total RTLH yang terintervensi dari berbagai sumber anggaran sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.749.336 unit.

Penanganan RTLH dilakukan dengan dua cara yaitu bantuan stimulan material dan usulan atas kondisi rumah berdasar data yang masuk. Total bantuan stimulan RTLH dari sumber anggaran APBN sampai dengan 2023 sebanyak 180.470 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 26.542 unit. Total bantuan stimulan RTLH dari sumber anggaran APBD Provinsi sampai dengan 2023 sebanyak 72.878 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 16.592 unit. Total penanganan RTLH dari sumber anggaran APBD Kabupaten/ Kota sampai dengan 2023 sebanyak 75.819 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 12.229 unit. Total penanganan RTLH dari sumber anggaran CSR/BAZNAS/ Lainnya sampai dengan 2023 sebanyak 26.116 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 2.610 unit. Total penanganan RTLH dari verivali lapangan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebanyak 1.001.622 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 372.771 unit.

b. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan. Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023 melalui APBD Provinsi

No	JENIS PENANGANAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	PK Bencana	150	105	118	51	345
2	PB Bencana	0	11	23	19	122
	Jumlah	150	116	141	70	467

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.

c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Hasil verifikasi dan validasi Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh melalui SK Bupati/Walikota sampai dengan 31 Desember 2023 total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 12.322,25 Ha yang terdiri dari baselineRPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 3.004,59 Ha dan pembaruan SK sampai dengan akhir tahun 2023 seluas 9.317,66 Ha. Adapun penanganan kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2023 tercatat seluas 5.479,30 Hayang terdiri dari lokasi baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 2.717,40 Ha dan lokasi penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 2.761,90Ha. Dengan demikian total sisa kawasan permukiman kumuh tahun 2023 seluas 6.842,95 Ha, yang terdiri dari sisa baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 287,18 Ha dan sisa dari penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 6.555,77 Ha.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penanganan kawasan Permukiman Kumuh luasan 10-15 Ha.Pada Tahun 2023 telah dilakukan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 120,20 Ha pada luasan kumuh 10-15 Ha. Total capaian kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 seluas 2.717,40 Ha, dengan luasan 10-15 Ha seluas 442 Ha.

Tabel 2.50.

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Kewenangan Penanganan	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Pada Tahun (Ha)					Total Penanganan s.d Tahun 2023 (Ha)	Sisa Kawasan Kumuh 2023 (Ha)	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Kumulatif s.d 2023
		2019	2020	2021	2022	2023				
Kab/ Kota (< 10 Ha)	629,01	226,46	181,21	75,39	36,36	85,47	604,89	24,12	13,59%	96,17%
Provinsi (10-15 Ha)	474,66	200,06	35,54	58,42	27,78	120,20	442,00	32,66	25,32%	93,12%
Pusat (> 15 Ha)	1.900,92	350,58	750,33	363,45	127,91	78,24	1.670,51	230,40	4,12%	87,88%
	3.004,59	777,1	967,08	497,26	192,05	283,91	2.717,40	287,18	9,45%	90,44%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51.

Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Sisa Luasan 2023			Total
		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	59,10	59,10
2	Kab. Banyumas	21,32	10,30	30,13	61,74
3	Kab. Purbalingga	60,30	48,91	184,39	293,60
4	Kab. Banjarnegara	83,51	85,47	288,70	457,68
5	Kab. Kebumen	150,93	122,05	36,71	309,70
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,87
7	Kab. Wonosobo	69,21	120,72	607,12	797,05
8	Kab. Magelang	116,86	74,66	53,26	244,78
9	Kab. Boyolali	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	23,34	37,86	84,56	145,75
11	Kab. Sukoharjo	462,21	66,59	91,26	620,06
12	Kab. Wonogiri	0,00	22,76	36,09	58,85
13	Kab. Karanganyar	71,09	10,38	17,34	98,81
14	Kab. Sragen	12,48	3,94	39,39	55,81
15	Kab. Grobogan	32,65	0,00	70,64	103,29
16	Kab. Blora	37,08	12,16	276,48	325,72
17	Kab. Rembang	66,73	81,04	107,03	254,80
18	Kab. Pati	31,22	70,85	26,58	128,65
19	Kab. Kudus	25,77	0,00	60,23	86,01
20	Kab. Jepara	43,80	0,00	20,76	64,56
21	Kab. Demak	3,27	46,23	100,27	149,76
22	Kab. Semarang	34,20	10,28	269,27	313,75
23	Kab. Temanggung	3,87	23,91	93,60	121,38
24	Kab. Kendal	11,89	8,32	28,76	48,97
25	Kab. Batang	16,88	2,98	52,45	72,31
26	Kab. Pekalongan	28,16	36,29	224,67	289,12
27	Kab. Pemalang	0,00	0,00	220,82	220,82
28	Kab. Tegal	29,91	19,64	168,51	218,06
29	Kab. Brebes	333,03	10,72	126,57	470,32

No	Kabupaten/Kota	Sisa Luasan 2023			Total
		<10	10-15	>15	
30	Kota Magelang	8,79	5,67	0,00	14,46
31	Kota Surakarta	10,12	0,00	54,69	64,80
32	Kota Salatiga	10,95	8,85	1,10	20,90
33	Kota Semarang	103,37	77,09	150,19	330,65
34	Kota Pekalongan	10,16	13,08	204,31	227,55
35	Kota Tegal	3,09	0,00	69,47	72,56
Jumlah		1.920,45	1.036,31	3.886,18	6.842,95

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Tabel 2.52.

Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Jumlah Bidang
1	Cilacap	Maos	Kalijaran	70	70
			Panisihan	40	40
			Glempang	110	110
			Karangrena	30	30
2	Blora	Kunduran	Cungkup	100	100
			Botoreco	100	100
3	Wonosobo	Mojotengah	Pungangan	100	100
		Kertek	Sudungdewo	100	100
Total				650	650

2.3.14 Perhubungan

Kualitas pelayanan transportasi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 diukur dari Indeks Pelayanan Transportasi yang memperhitungkan aspek **konektivitas** jaringan transportasi (Rasio Konektivitas Provinsi), tingkat **keselamatan** transportasi (Rasio Kecelakaan per 1 Juta Keberangkatan) dan kualitas pelayanan **angkutan umum** (*On Time Performance*). Perkembangan kualitas pelayanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.53.

Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2023

No	Uraian	Satuan	Provinsi		Nasional	
			2022	2023	2022	2023
	INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI		5,767	5.997	-	-
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,299	0,373	0,696	0,763
a.	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Angka	0,283	0,340	-	-
b.	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Angka	0,389	0,501	-	-
c.	Rasio Konektivitas Trans. Laut dan ASDP	Angka	0,230	0,310	-	-
2.	Rasio Kecelakaan Bus AKDP (1 Juta Keberangkatan)	Angka	16,906	16,698	19,936	17,64
3.	On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi	Angka	82,21	84,19	74,146	72,592
a.	OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	%	86,60	88,20	-	-
b.	OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru	%	90,00	90,39	-	-
c.	OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru	%	70,00	74,00	-	-
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		79,75	80,13	93,32	106,403
1.	Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B	Angka	77,67	79,17	-	-
2.	Pelayanan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	Angka	81,75	80,75	-	-
3.	Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) dan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Angka	82,79	82,56	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Konektivitas jaringan transportasi terdiri dari : Angkutan Darat (terminal, trayek angkutan umum, halte Trans Jateng); Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut; Angkutan Udara, Perkeretaapian dan Angkutan Aglomerasi Kawasan Perkotaan.

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah Tahun 2023 masih didominasi oleh Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.54.
Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Jumlah Terminal dan Kewenangannya	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terminal tipe A (Pusat)	17	19	19	19	19
2.	Terminal tipe B (Provinsi)	24	24	24	24	24
3.	Terminal tipe C (Kabupaten/Kota)	178	178	178	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		118	219	221	221	221

Sumber: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Kab./Kota, 2024.

Persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan mendasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2023 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan tipe B di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.42.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Jumlah kendaraan masuk ke terminal tipe B semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir, dan masih didominasi oleh bis besar yang merupakan armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan juga Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Tabel 2.55.
Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2019 - 2023

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bis Besar	479.583	202.640	149.252	271.242	264.998
2.	Bis Sedang	139.951	71.036	57.057	77.349	76.828
3.	Bis Kecil	73.979	64.756	34.883	58.901	56.000
4.	Mobil Penumpang Umum	45.521	39.846	21.365	45.254	48.280
5.	Total	739.034	378.278	262.557	452.746	446.106

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

b) Trayek Angkutan Umum

Jumlah armada angkutan umum mengalami penurunan dari dari tahun ke tahun, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.56.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	272	272	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	4.666	4.666	3.093	2.754	2.754
4.	Jumlah bus (unit)	12.737	12.737	12.737	10.825	6.881
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang terlayani koridor Trans Jateng untuk memudahkan penumpang naik dan turun. Pemenuhan kebutuhan halte Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal, masih ada 36,70% yang belum terbangun.

Tabel 2.57.
Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2023

Koridor Trans Jateng	Inventarisasi Halte			
	Kebutuhan	Terbangun		Belum Terbangun*
		Aset Pemprov	Aset Kab/Kota/Swasta	
Kota Semarang – Bawen	94	40	52	2
Purwokerto – Purbalingga	62	60	2	0
Kota Semarang – Weleri	53	40	13	0
Kab. Magelang – Kutoarjo	49	38	0	11
Surakarta – Sumberlawang	85	17	5	63
Kota Semarang – Grobogan	69	20	0	49
Surakarta – Wonogiri	122	12	41	69
Total	534	226	112	196

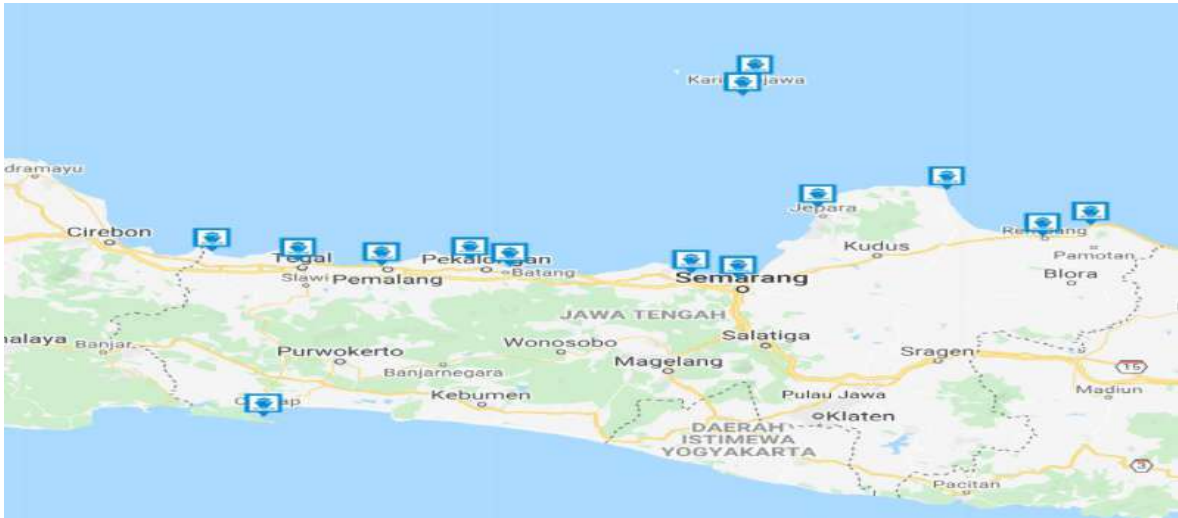
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT.

d) Perhubungan Laut

Terdapat 14 Pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8

Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legon Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, sampai dengan akhir tahun 2023 proses penlimpahan aset belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.43.

Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali.

e) Aktivitas Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. KMC Kartini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jepara yang usianya sudah tua (16 tahun) sehingga kinerjanya sudah tidak optimal. Saat ini terdapat beberapa kapal yang melayani penyeberangan ke Karimunjawa. Mendasarkan pertimbangan dimaksud, KMC Kartini dalam proses penghapusan aset. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang berminat untuk menerima aset kapal dimaksud. Adapun kinerja dari pelayanan ASDP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58.

Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai	75.679	72.962	98.173	98.293	50.943
2.	Penumpang KMC. Kartini I (orang)	2.725	0	0	0	0
3.	Penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	102.684	98.998	112.378	118.599	153.348
4.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang)	off	off	off	off	Off

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

f) Perhubungan Udara

Terdapat 3 bandara komersial operasional yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis operasional yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora. Bandara Ngloram Blora pada Tahun 2023

mulai digunakan sebagai *feeder* jamaah umroh. Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.59.

Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bandara	6	6	6	6	6
2	Bandara Ahmad Yani					
	Penumpang domestik (orang)	3.678.104	1.342.341	884.970	1.618.109	2.100.836
	Penumpang internas. (orang)	228.700	35.728	9	77	4.867
	Barang domestik (kg)	15.788.447	9.157.070	6.763.331	6.222.664	9.797.900
	Barang internasional (kg)	2.086.421	239.699	1.212.031	3.578.079	4.341.238
3	Bandara Adi Soemarmo					
	Penumpang domestik (orang)	1.565.093	516.780	427.536	839.773	1.164.953
	Penumpang internas. (orang)	155.400	17.198	15	33.739	84.698
	Barang domestik (kg)	7.074.726	1.596.685	1.856.723	1.760.287	3.066.899
	Barang internasional (kg)	2.982.541	-	15.158	0	2.180

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

g) Perkeretaapian

Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Tahun 2023, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32%) dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68%). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Jakarta dan Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan diperlukan lanjutan sampai dengan tuntas semua dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.44.

Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Tabel 2.60.

Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penumpang (orang)	24.638.063	8.318.591	4.982.954	6.434.642	21.498.258
2.	Barang terangkut (ton)	2.056.546	1.902.245	2.661.209	2.053.983	2.107.754
3.	Stasiun Kereta (buah)	106	106	115	115	116
4.	Perlntasan KA (unit)	1.168	1.369	1369	1369	1367

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2. Keselamatan Transportasi

Untuk meningkatkan keselamatan dilakukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi diantaranya: Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang; dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2019-2023, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.000 jiwa sehingga rata-rata setiap hari terdapat 12 orang yang meninggal dunia di jalan. Pada tahun 2023, dari 54,206 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebesar 0,69 persen atau 372 kendaraan merupakan mobil bus (AKAP, AKDP, Angkutan Kota/Pedesaan, Pariwisata).

Tabel 2.61.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Laka	Kejadian	25.962	21.396	22.521	30.730	31,425
2.	Korban MD	Jiwa	4.141	3.508	3.750	4.409	4,302
3.	Tingkat Fatalitas/ 100.000 penduduk	Angka	12,14	9,61	10,21	11,91	11,62
4.	Korban Luka Berat	Orang	96	48	77	77	60
5.	Korban Luka Ringan	Orang	30.555	24.495	25.847	35.869	36,915
6.	Kerugian Materiil	Rp. 000,-	17.858.087	14.746.525	16.836.435	24.819.905	44.763.625.000

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2024.

b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Jalan Provinsi

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan provinsi masih sangat rendah, namun selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62.
Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, <i>Guard-rail</i> , LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	12,18	16,93	25,06	30,03	38,66
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	4,55	4,55	9,09	17,88	45,45
3.	Pemasangan Rambu Jalan (Buah)	600	-	478	245	385
4.	Pemasangan RPPJ (Buah)	60	-	46	-	29
5.	Pemasangan APILL (Unit)	6	-	2	-	2
6.	Pemasangan <i>Guardrail</i> (Beam)	290	30	176	31	116
7.	Pemasangan Marka Jalan (m ¹)	102.000	-	52.444	73.976	108.450
8.	Pemasangan LPJU (Buah)	513	150	174	355	721

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

c) **Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)**

Pada Tahun 2022 di ruas jalan provinsi masih terdapat 86 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani.

Tabel 2.63.
Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2022 - 2023

No.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	2022		2023	
		DRK (Lokasi)	%	DRK (Lokasi)	%
1.	BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang)	18	20,93	18	20,93
2.	BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati)	16	18,60	16	18,60
3.	BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta)	9	10,47	9	10,47
4.	BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang)	14	16,28	14	16,28
5.	BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas)	4	4,65	4	4,65
6.	BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan)	25	29,07	25	29,07
Jumlah		86	100%	86	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

d) **Kendaraan Laik Jalan**

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

Tabel 2.64.
Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2023

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	KBWU yang Diuji	446.658	344.850
2.	KBWU Lulus Uji	436.863	333.487
3.	KBWU Tidak Lulus Uji	9.561	7.817
Jumlah		446.658	344.850

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

e) **Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah**

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan ramp check dilakukan pada 23 Terminal Tipe B dengan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.65.
Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2023

Tahun	Jumlah Kendaraan			Jenis Pelanggaran		
	Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
2022	37.564	28.559	9.005	8.353	0	2.000
2023	21.920	16.971	4.949	4.567	0	382

Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2022

f) **Perlindungan Jalur Kereta Api dengan Jalan**

Terdapat 1.369 titik perlintasan rel kereta api dengan jalan, sebagian besar di jalan kabupaten/kota, sebagian kecil berupa perlintasan tidak sebidang dan

masih banyak yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Perlintasan sebidang di perkotaan berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan dan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.66.

Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel KA		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		Underpass		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	38	2.78%	10	41.67%	6	7.06%	22	5.93%	1	0.11%
2.	Provinsi	25	1.83%	1	4.17%	0	0.00%	24	6.47%	1	0.11%
3.	Kab/Kota	1304	95.39%	13	54.17%	79	92.94%	325	87.60%	887	99.78%
Jumlah		1.369	100	24	100	85	100	371	100	889	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

g) Fasilitas Penyeberangan Sungai

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (kewenangan pemerintah provinsi).

Tabel 2.67.

Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	Permanen (2023)	Ada (2019)
		Desa Tegalsari (Kendal)	Permanen (2023)	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	Ada (2021)
		Desa Jatipurwo (Kendal)	Permanen (2023)	Ada (2021)
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	Ada (2022)
		Desa Bojong (Kab. Tegal)	Non Permanen	Ada (2022)
4.	Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Ds Randusangawetan (Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Ada (2023)
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
		Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

3. Pelayanan Angkutan Umum

Upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya: peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum saat *peak season* (lebaran, natal dan tahun baru).

a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng, kondisi Tahun 2023 telah terdapat pelayanan di 7 (tujuh) koridor sehingga dari kebutuhan masih terdapat kekurangan 7 (tujuh) koridor.

Tabel 2.68.

Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2023

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Purwodadi (Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri (Op. 8 Agustus 2023)
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap & Kebumen)	9. Sukoharjo – Klaten
		10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung	11. Purwokerto – Wangon
		12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target 2030 = 32 persen). Pengguna transportasi umum diharapkan selalu meningkat seiring dengan peningkatan penumpang Trans Jateng.

Tabel 2.69.

Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2017 – 2023

No	Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)						Total 2017-2023
		2017 – 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Kedungsepur							
1.	T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	2.611.014	2.117.390	1.054.091	1.136.921	1.686.921	1.954.632	10.560.969
2.	T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022)	-	178.943	592.411	682.477	1.235.294	1.479.581	4.168.706
3.	T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)	-	-	-	133.380	774.188	925.977	1.833.545
	Barlingmascakeb							
4.	Purwokerto – Purba lingga (Agus. 2018)	351.896	1.141.126	613.804	673.120	1.261.351	1.344.065	5.385.362
	Subosukowonosraten							
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	55.442	327.786	676.153	810.218	1.869.599
6.	Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)	-	-	-	-	-	471.794	471.794
	Purwomanggung							
7.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	106.124	485.848	872.555	1.047.738	2.512.265
Total 7 Koridor		2.962.910	3.437.459	2.421.872	3.439.532	6.506.462	8.034.005	26.802.240

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada

indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Hasil survey Kepuasan Masyarakat terkait perpindahan moda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.70.
Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2023

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)		
		2021	2022	2023
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06	44,66
2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81	50,14
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21	50,29
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84	44,57
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16	55,03
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15	56,80
7.	Solo – Sukoharjo – Wonogiri	-	-	-
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		46,39	48,16	50,12

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Kinerja Trans Jateng pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari efektivitas anggaran (proporsi biaya operasional per penumpang) sebesar Rp. 13.187,- lebih efisien dibanding Tahun 2019 (sebelum pandemi). Hal yang sama untuk proporsional antara pendapatan dan biaya operasional sudah lebih tinggi (25,583%) dibandingkan Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar 25,42%.

Tabel 2.71.
Rekapitulasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2023

Tahun	Total Operasional (Rp. 000,-)	Total Pendapatan (Rp. 000,-)	Proporsi Pendapatan & Operasional (%)	Jumlah Penumpang Terlayani (orang)	Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang (Rp/penumpang)
1	2	3	$4=(3:2)\times100\%$	5	$6 = 3 : 5$
2018	28.000.000	6.621.215	23,647	2.238.590	12.508,-
2019	45.904.608	11.668.972	25,420	3.437.459	13.354,-
2020	64.111.322	8.722.194	13,605	2.419.549	26.497,-
2021	90.982.851	12.549.852	13,794	3.439.532	26.452,-
2022	93.761.160	22.405.562	23,685	6.506.462	14.410,-
2023	105.942.854	27.454.138	25,583	8.034.005	13.187,-
Total	428.702.795	89.421.933	20,731	26.075.597	16.441,-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan lain dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain.

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (*mode shifting*) dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan

menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Manfaat layanan Trans Jateng yang dapat dikapitasikan dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagai mana tabel berikut.

Tabel 2.72.
Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1.	Total Biaya Operasional Trans Jateng			
	a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	Rp.000,-	72.935.587	82.982.804
	b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew)	Rp.000,-	19.166.873	21.127.030
	c. Biaya Prasarana (Shelter, dll)	Rp.000,-	1.658.700	1.833.500
	d. Total Biaya (1a+1b+1c)	Rp.000,-	93.761.160	105.942.854
2.	Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng			
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.000,-	22.405.562	27.454.138
	b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan	Rp.000,-	36.763.473	45.880.510
	c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM	Rp.000,-	12.825.370	14.861.343
	d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c)	Rp.000,-	71.994.406	88.195.991
3.	Proporsi Anggaran & Manfaat (2d:1d)x100%	%	76,78	83,2

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) yang belum dikapitasikan diantaranya: penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

b) Angkutan Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Saat lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan angkutan pada masa lalu lintas tinggi (*peak season*) yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Setelah pandemi terdapat lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Tabel 2.73.
Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2023

No	Jumlah Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lebaran	16.329.328	NA	7.851.683	24.343.824	30.474.683
a.	Angkutan Umum	8.179.814	NA	5.295.715	15.477.634	17.895.047
b.	Pribadi	8.149.514	NA	2.555.968	8.866.190	12.579.636
2.	Nataru	11.482.975	NA	15.653.528	16.978.216	17.072.434
a.	Angkutan Umum	3.660.441	NA	11.446.488	9.986.033	11.803.434
b.	Pribadi	7.822.534	NA	4.207.039	6.992.183	5.269.000
Total		27.812.303	NA	23.505.211	41.322.039	47.547.137

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.3.15 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret

perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021. Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

Tabel 2.74.
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Lanjut Usia terlantar Tahun 2019-2023

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	BUMDesa	4.215	5.539	6.776	n/a	n/a
2	Pasar desa	1.349	1.671	1.671	n/a	n/a
3	UED-SP	1.029	1.029	1.029	n/a	n/a
3	UP2K-PKK	22.326	22.326	22.326	n/a	n/a

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

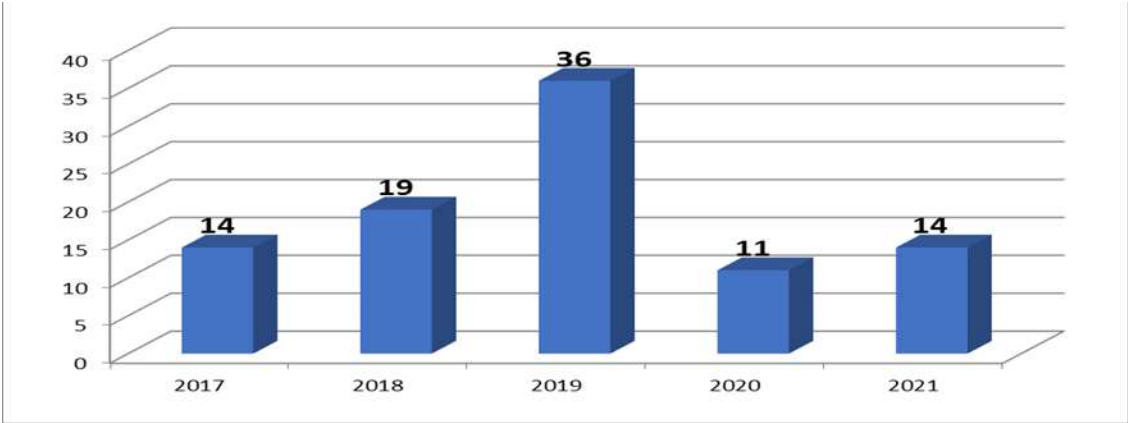
Tabel 2.75.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021

NO	KABUPATEN	JML DESA	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUMLAH	2021 BARU	% progres input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
1	Banjarnegara	266	103	67	1	-	171	-	100	0,00%
2	Banyumas	301	120	153	23	3	299	30	100	10,03%
3	Batang	239	132	68	7	1	208	86	100	41,35%
4	Blora	271	131	101	10	3	245	40	100	16,33%
5	Boyolali	261	84	96	16	4	200	66	100	33,00%
6	Brebes	292	116	161	14	1	292	10	100	3,42%
7	Cilacap	269	59	179	27	4	269	18	100	6,69%
8	Demak	243	111	67	7	-	185	69	100	37,30%
9	Grobogan	273	163	99	7	4	273	11	100	4,03%
10	Jepara	184	81	93	10	-	184	-	100	0,00%
11	Karanganyar	162	80	65	8	1	154	37	100	24,03%
12	Kebumen	449	78	275	44	5	402	13	100	3,23%
13	Kendal	266	124	91	6	1	222	75	100	33,78%
14	Klaten	391	157	177	34	12	380	49	100	12,89%
15	Kudus	123	41	3	1	-	45	13	100	28,89%
16	Magelang	367	137	167	23	6	333	144	100	43,24%

NO	KABUPATEN	JML DESA	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEM BANG	MAJU	JUMLAH	2021 BARU	% progres input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
17	Pati	401	222	172	5	2	401	-	100	0,00%
18	Pekalongan	272	91	85	8	7	191	56	100	29,32%
19	Pemalang	211	106	93	9	3	211	-	100	0,00%
20	Purbalingga	224	98	75	25	4	202	49	100	24,26%
21	Purworejo	469	152	240	20	5	417	43	100	10,31%
22	Rembang	287	144	69	8	5	226	90	100	39,82%
23	Semarang	208	51	107	15	1	174	44	100	25,29%
24	Sragen	196	110	80	1	1	192	4	100	2,08%
25	Sukoharjo	150	45	77	3	-	125	55	100	44,00%
26	Tegal	281	63	97	18	4	182	83	100	45,60%
27	Temanggung	266	43	150	11	1	205	-	100	0,00%
28	Wonogiri	251	97	122	6	-	225	80	100	35,56%
29	Wonosobo	236	114	44	3	2	163	72	100	44,17%
	JUMLAH	7.809	3.053	3.273	370	80	6.776	1.237	100	0,18355608

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang. Pembangunan di desa dilaksanakan dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan.



Gambar 2.45.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

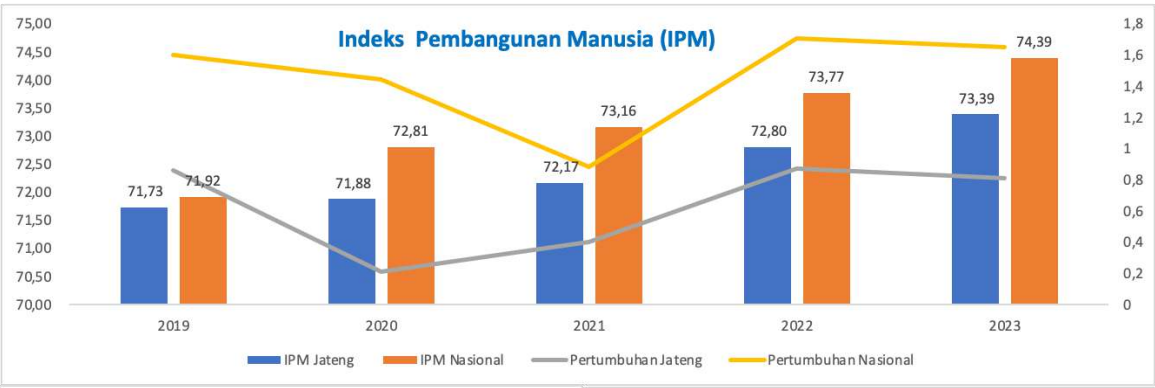
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan

komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022 baik nasional maupun Jawa Tengah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, HLS Jawa Tengah dan nasional menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan mulai tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan mengalami peningkatan, sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.46.
IPM Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023

2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih, agama, moral, budaya dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat, sehingga terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Terkait dengan pembangunan keluarga telah dirilis indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN yang merupakan indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Capaian Ibangga Jawa Tengah periode 2021 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 56,1 menjadi 63,07 dan masuk pada kategori berkembang. Angka Ibangga Jawa Tengah juga lebih baik dari nasional yang senada dengan Jawa Tengah mengalami perkembangan meningkat yaitu dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 61,43 di tahun 2023.



Sumber: BKKBN, 2023

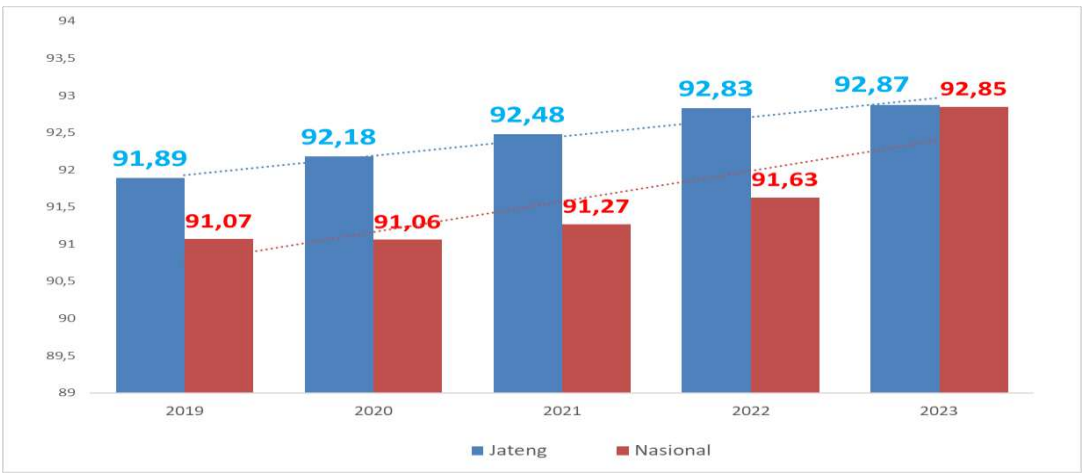
Gambar 2.47.

Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023

2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2019-2023 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.48.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2023, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu

tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk di reduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2023 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,62 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,95 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023, HLS perempuan adalah 13,03 tahun dan laki-laki sebesar 12,76 tahun, peningkatan HLS antara laki-laki dan perempuan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sama yaitu sebesar 0,04 dibanding tahun 2022 mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2023 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,42 tahun, sedangkan perempuan 7,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Capaian tahun 2023 untuk Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan gap yang kian meningkat dimana selisih RLS antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya (tahun 2022) 0,76 kini menjadi 0,8. Sementara itu dari sisi pertumbuhan, sektor perempuan (0,07) lebih rendah dibanding laki-laki (0,11). Oleh sebab itu penting untuk mendorong kaum perempuan untuk sekolah lebih tinggi.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,513 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 16,102 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, perdagangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

Tabel 2.76.
Perkembangan Komponen IPG 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah

Komponen IPG	2019	2020	2021	2022	2023
RLS Laki-Laki	8,06	8,16	8,17	8,31	8,42
RLS Perempuan	7,03	7,24	7,34	7,55	7,62
HLS Laki-Laki	12,69	12,70	12,71	12,72	12,76
HLS Perempuan	12,66	12,79	12,93	12,99	13,03
AHH laki-Laki	72,33	72,51	72,61	72,71	72,95
AHH Perempuan	76,16	76,3	76,42	76,53	76,62

Komponen IPG	2019	2020	2021	2022	2023
PENGELUARAN PER KAPITA laki-Laki	15,279	15,031	15,253	15,606	16,102
PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan	9,895	9,274	9,805	10,098	10,513

Sumber: BPS, 2024

2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Tengah sejak tahun 2018-2022 mengalami tren menurun yaitu dari 0,389 menjadi 0,371. Tren penurunan ini memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Tengah semakin mengecil atau kesetaraan gender yang semakin membaik, namun upaya mereduksi ketimpangan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Dilihat dari indicator pembentuk dimensi IKG terdapat beberapa indicator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk.

Pada **dimensi kesehatan reproduksi** terdapat dua indictor pembentuk yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF membaik dari 0,066 pada tahun 2018 menjadi 0,042 pada tahun 2022, sedangkan MHPK20 memburuk dari 0,222 di tahun 2018 menjadi 0,264 di tahun 2022. Dimensi ini memberikan sinyal bagi Jawa Tengah untuk terus berupaya meningkatkan layanan akses Kesehatan bagi ibu hamil melahirkan, disisi lain juga pencegahan pernikahan dini penting untuk terus dilakukan guna mereduksi persalinan beresiko diusia dini.

Dimensi pemberdayaan dibentuk dua indicator yaitu presentase keterwakilan dilegislatif dan presentase pendidikan SMA ke atas. Keterwakilan legislatif perempuan cukup rendah dibanding laki-laki dan mengalami tren yang menurun yaitu dari 22% di tahun 2018 menjadi 20% ditahun 2022, sedangkan Pendidikan SMA ke atas tercatat perempuan hanya berkontribusi 23,21% di tahun 2018 meningkat 5,58% menjadi 28,79% di tahun 2022. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 4,79% sehingga ke depan memberikan harapan bagi Perempuan untuk mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki dalam pendidikan.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama kurun waktu 2018-2022 TPAK perempuan dan laki-laki semakin meningkat. TPAK perempuan pada tahun 2018 sebesar 56,43 persen menjadi 58,31 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 1,88 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 81,59 persen menjadi 83,74 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 2,15 persen. Nilai TPAK perempuan dan laki-laki sama-sama meningkat, namun peningkatan TPAK perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki membuat kesempatan memasuki pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi belum setara.

Tabel 2.77.
Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2018-2022

Komponen IKG		2018	2019	2020	2021	2022
Dimensi Kesehatan Reproduksi						
Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitasi kesehatan (MTF)		0,066	0,04	0,041	0,042	0,042
Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20)		0,222	0,259	0,254	0,267	0,264
Dimensi Pemberdayaan						
Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	laki-laki	29,35	30,94	32,85	32,26	34,14
	perempuan	23,21	23,94	26,97	26,82	28,79
Persentase anggota legislatif	laki-laki	78	80,83	81,2	81,67	80
	perempuan	22	19,17	18,8	18,33	20
Dimensi Ekonomi						
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	laki-laki	81,59	82,78	81,68	81,94	83,74
	perempuan	56,43	55,35	57,54	57,58	58,31

2.4.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Cov-19. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2023

Dimensi IPK	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi Budaya	37,67	44,45	37,17	25,96	44,00	45,11
Pendidikan	69,71	71,46	72,64	71,21	73,56	73,50
Ketahanan Sosial Budaya	79,57	80,30	80,97	72,37	74,02	75,61
Warisan Budaya	55,16	51,95	45,58	50,12	52,31	53,13
Ekspresi Budaya	44,70	45,45	43,69	34,79	41,59	46,35
Budaya Literasi	51,64	56,67	59,90	50,00	53,36	56,63
Gender	60,05	58,95	58,57	58,28	58,88	59,61
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah	60,05	60,94	59,12	55,24	59,43	60,89
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	53,74	55,91	54,65	51,9	55,13	57,13

Sumber: Kemendikbud, 2024

Beberapa dimensi pembentuk IPK Jawa Tengah mengalami penurunan kinerja atau pertumbuhan yang lebih rendah, seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya dan budaya literasi, meskipun secara absolut ke-6 dimensi tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain dimensi pembentuk IPK, beberapa indikator pada masing-masing dimensi juga mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan cukup tajam pada indikator persentase satuan

pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau seni budaya sebesar -2,73%, yang merupakan pembentuk dimensi pendidikan. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan nilai absolut dimensi pendidikan yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Rendahnya capaian dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Hal serupa pada rendahnya capaian dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Meskipun demikian jumlah pelaku atau pendukung seni di Jawa Tengah cukup banyak, mencapai 1.967 kelompok yang terbagi menjadi 7 kelompok jenis seni yaitu Seni Media, Rupa, Film, Sastra, Musik, Teater dan Tari.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (*Goals* 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Data perkembangan OPK yang tersedia di Jawa Tengah dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.79.
Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2023

KABUPATEN/ KOTA	TRAD. LISAN	MANUSKRIP	ADAT ISTIADAT	PERMAINAN RAKYAT	OR TRADISIONAL	PENGETAHUAN TRAD	TEKNOLOGI TRAD	SENI	BAHASA	RITUS	TERCATAT	ICH UNESCO	DITETAPKAN
Provinsi Jawa Tengah	0	1	16	1	6	17	5	9	0	3	58	5	8
Kabupaten Banjarnegara	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Kabupaten Banyumas	2	0	6	0	0	3	0	9	0	3	19	0	7
Kabupaten Batang	4	0	4	0	0	1	2	1	0	2	13	0	0
Kabupaten Blora	10	0	13	0	1	5	4	4	0	0	35	0	2
Kabupaten Boyolali	0	0	10	0	0	0	3	1	0	0	9	0	4
Kabupaten Brebes	11	0	3	4	0	2	1	8	0	1	31	0	4
Kabupaten Cilacap	13	2	18	5	1	3	3	97	6	15	16	0	4
Kabupaten Demak	1	0	5	0	0	4	3	3	0	5	22	0	1
Kabupaten Grobogan	5	0	1	0	0	0	2	1	0	0	10	0	0
Kabupaten Jepara	0	0	5	0	0	1	5	2	0	0	12	0	7
Kabupaten Karanganyar	0	0	6	0	0	1	2	1	0	0	9	0	3
Kabupaten Kebumen	0	0	4	0	0	1	6	4	0	0	15	0	2
Kabupaten Kendal	0	0	8	0	0	1	0	2	0	1	5	0	4
Kabupaten Klaten	0	0	4	0	0	4	4	0	0	0	11	0	4
Kabupaten Kudus	0	0	16	0	0	6	5	5	0	0	26	0	6
Kabupaten Magelang	0	0	15	0	0	4	1	4	0	0	21	0	3
Kota Magelang	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Kabupaten Pati	0	0	10	0	0	3	5	3	0	0	15	0	3
Kabupaten Pekalongan	0	0	4	0	0	5	0	4	1	1	10	0	1
Kota Pekalongan	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0
Kabupaten Pemalang	3	0	7	0	0	7	1	12	1	0	29	0	2
Kabupaten Purbalingga	0	0	4	1	0	2	5	7	0	0	15	0	5
Kabupaten Purworejo	0	0	10	0	0	2	3	7	0	0	18	0	3
Kabupaten Rembang	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	4	0	0
Kota Salatiga	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1
Kabupaten Semarang	1	0	5	2	0	0	0	2	0	0	6	0	1
Kota Semarang	5	0	9	0	0	7	0	6	0	0	23	0	7
Kabupaten Sragen	1	0	4	0	0	0	1	4	0	2	8	0	1
Kabupaten Sukoharjo	0	2	2	0	0	2	1	0	0	0	5	0	3
Kota Surakarta	47	23	28	1	1	44	21	44	0	3	207	0	38
Kabupaten Tegal	2	0	14	1	0	3	6	7	0	0	27	0	2
Kota Tegal	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	5	0	0
Kabupaten Temanggung	4	0	15	0	0	4	2	7	0	0	26	0	1
Kabupaten Wonogiri	0	0	3	0	0	2	1	3	0	0	7	0	2
Kabupaten Wonosobo	1	0	7	0	0	3	0	5	0	2	14	0	6
Total	103	28	274	15	9	143	93	264	8	38	745	5	135

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Cagar Budaya (CB) tidak menjadi bagian dari WBTB, berikut data Cagar Budaya di Jawa Tengah mencapai 1.982 (terdiri dari 665 Benda Cagar Budaya, 830 Bangunan Cagar Budaya, 319 Struktur Cagar Budaya, 142 Situs Cagar Budaya, dan 26 Kawasan Cagar Budaya) serta 9 Objek belum dapat teridentifikasi.

2.4.6 Indeks Pembangunan Olahraga

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter.

Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Sport Development Index (SDI) merupakan metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Terdapat 9 dimensi dalam SDI, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga/ *Sport Development Index* (SDI).

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80.

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022

Tahun	Angka <i>Sport Development Index</i> (SDI) Jawa Tengah
2019	0,55
2020	0,60
2021	0,34
2022	0,37

Sumber: Laporan Nasional *Sport Development Index* (SDI) Kemenpora Tahun 2022

2.4.7 Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Jawa Tengah berdasarkan Rapor Pendidikan-Kemdikbud masih kurang yaitu 72,71 kategori Tuntas Pratama. Semakin tinggi jenjang pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.84.

Tabel 2.81.

Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2023

Tahun	PENDUDUK KELOMPOK UMUR								
	7-12			13-15			16-18		
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi
2018	0,15	99,76	0	0,35	95,79	3,86	0,35	69,02	30,63
2019	0,05	99,77	0,18	0,11	96,11	3,78	0,49	69,65	29,86
2020	0,22	99,73	0,05	0,24	96,37	3,39	0,28	70,14	29,58
2021	0,32	99,66	0,02	0,32	96,84	2,84	0,28	70,80	28,92
2022	0,31	99,58	0,11	0,27	96,77	2,97	0,29	70,82	28,89
2023	0,30	99,57	0,13	0,27	97,08	2,65	0,16	70,87	28,97

Sumber: Susenas, BPS (2023)

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2023 jumlah ATS Usia 7-18 tahun di Jawa Tengah sebesar 552.033 jiwa.

Tabel 2.82.

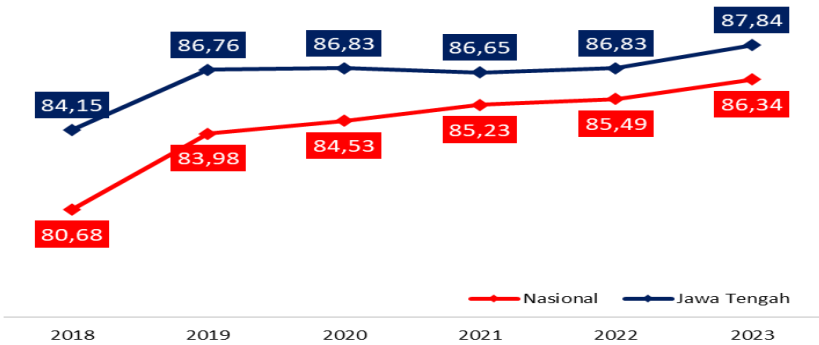
Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

TAHUN	Usia 7-12 th		Usia 13-15 th		Usia 16-18 th		Jumlah ATS Usia 7-18 th
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	
2018	5.031	-	5.814	64.117	6.204	542.899	624.065
2019	1.688	6.075	1.821	62.577	8.253	502.951	583.365
2020	7.909	1.798	4.046	57.157	4.816	508.724	584.449
2021	10.494	656	5.340	47.390	4.715	486.980	555.575
2022	10.110	3.587	4.499	49.485	4.883	486.438	559.002
2023	9.748	4.224	4.478	43.947	2.689	486.948	552.033

Sumber: Susenas, BPS, diolah (2024)

Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan khusus untuk penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yaitu sebesar 23,21% (Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud 2023).

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.APK SMA/SMK/Sederajat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mampu tumbuh hingga 1,16 persen dari tahun 2022. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan APK SMA/SMK/Sederajat Nasional yang hanya tumbuh sebesar 0,99 persen.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.49.

APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota belum merata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.111, dimana APK SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat bervariasi dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh

pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan. Zonasi juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada perkembangan angka APK Kabupaten Pati yang cenderung mengalami peningkatan sementara APK Kabupaten Demak cenderung menurun yang berarti dapat diindikasikan adanya pemerataan antar wilayah. Melalui zonasi ini diharapkan wilayah kota bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit untuk menempuh pendidikan.

Tabel 2.83.

Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	86,76	86,83	86,65	86,83	87,84
Kabupaten Cilacap	91,42	91,73	91,50	91,40	89,79
Kabupaten Banyumas	101,68	100,42	108,66	107,57	93,18
Kabupaten Purbalingga	71,56	71,28	69,89	71,77	80,89
Kabupaten Banjarnegara	71,90	71,37	70,02	68,95	61,98
Kabupaten Kebumen	104,39	103,71	102,46	102,43	96,59
Kabupaten Purworejo	92,67	93,63	95,57	95,41	96,81
Kabupaten Wonosobo	55,20	56,29	57,43	57,08	67,37
Kabupaten Magelang	70,56	70,13	67,70	68,84	82,84
Kabupaten Boyolali	81,37	80,40	79,36	79,22	99,06
Kabupaten Klaten	109,20	108,59	106,85	106,46	100,26
Kabupaten Sukoharjo	81,17	83,41	84,16	83,90	108,18
Kabupaten Wonogiri	90,45	92,36	90,30	89,97	84,10
Kabupaten Karanganyar	77,28	78,20	75,34	81,08	101,63
Kabupaten Sragen	114,62	110,98	108,05	108,20	104,87
Kabupaten Grobogan	93,21	93,60	92,47	91,02	78,21
Kabupaten Blora	86,39	87,30	85,16	85,16	89,76
Kabupaten Rembang	72,99	74,53	71,94	72,85	81,47
Kabupaten Pati	101,67	101,34	102,60	102,10	95,08
Kabupaten Kudus	91,45	90,10	92,16	90,89	95,42
Kabupaten Jepara	87,65	88,00	90,31	90,74	88,91
Kabupaten Demak	106,41	102,70	100,07	96,72	90,88
Kabupaten Semarang	78,44	78,77	80,91	79,91	88,18
Kabupaten Temanggung	77,34	77,59	75,27	76,14	101,33
Kabupaten Kendal	105,77	103,73	106,32	103,84	94,34
Kabupaten Batang	67,57	69,78	72,27	71,24	73,98
Kabupaten Pekalongan	61,24	64,22	62,30	62,30	68,94
Kabupaten Pemalang	75,14	74,18	72,03	73,82	69,10
Kabupaten Tegal	81,00	80,26	78,78	78,76	77,88
Kabupaten Brebes	68,96	70,34	73,73	73,36	77,17
Kota Magelang	89,74	90,07	88,16	89,46	107,97
Kota Surakarta	77,92	81,43	79,62	81,05	95,71
Kota Salatiga	121,91	119,10	118,12	119,89	112,30
Kota Semarang	106,63	104,60	105,01	104,23	102,59
Kota Pekalongan	74,92	78,66	76,12	77,40	84,15
Kota Tegal	83,20	82,32	84,39	84,07	91,78

Sumber: BPS,2024

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan

sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah. Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 89,32% pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

Tabel 2.84.
Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Uraian	Skor Rapor Pendidikan		
	2022	2023	2024
✓ Penyerapan lulusan SMK	38,51	92,53	89,32
✓ Lulusan yang melanjutkan studi	11,58	13,74	14,87
✓ Lulusan yang bekerja	38,51	60,71	53,52
✓ Lulusan yang berwirausaha	27,72	18,07	20,93
✓ Keselarasan bidang kerja	28,90	64,69	44,63
✓ Masa tunggu bekerja/wirausaha	8,92	3,25	3,88

Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.

Kualifikasi guru minimal D4/S1 dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut diperkuat dengan data sebagaimana table 2.112, memperlihatkan bahwa di Jawa Tengah masih terdapat Guru belum memiliki kualifikasi minimal D4/S1 dan paling banyak dijumpai pada jenjang pendidikan khusus.

Tabel 2.85.
Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

Uraian		2018		2019		2020		2021		2022	
		Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1
Kualifikasi Guru	SMA	98,15	1,85	89,50	10,50	97,18	2,82	98,83	1,17	99,05	0,95
	SMK	65,80	34,20	89,46	10,54	96,34	3,66	97,35	2,65	97,59	2,41

Sumber: BPS, 2023

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2022, ruang kelas dengan kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 2,47 persen dan 0,73 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang) pada

tahun yang sama di Jawa Tengah. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

Tabel 2.86.
Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN per JENJANG									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK
Rusak berat	2,14	1,24	1,28	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,73
Rusak ringan/ sedang	46,58	52,55	70,17	69,06	41,59	44,28	42,76	46,90	23,66	27,35
Baik	51,29	46,20	28,55	30,26	58,41	55,72	57,24	53,10	73,87	71,92

Sumber: BPS, 2023

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara nilai numerasi mengalami peningkatan pada tahun yang sama, terkecuali jenjang SMPLB.

Tabel 2.87.
Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2023

Capaian	Jenjang Pendidikan	Skor Literasi	Skor Numerasi	Iklim Keamanan	Iklim Inklusivitas	Iklim Kebinekaan
2021	SMA*	67,18	52,84	76,23	53,73	61,28
	SMK	63,64	51,10	75,11	53,43	61,76
	SDLB	61,63	52,55	83,80	60,35	60,82
	SMPLB	63,68	57,20	81,68	59,62	60,95
	SMALB	59,72	49,94	77,72	59,28	61,26
2022	SMA*	68,79	56,56	70,35	56,98	68,40
	SMK	64,14	53,71	69,00	55,79	67,07
	SDLB	60,61	52,58	78,40	60,45	71,64
	SMPLB	60,21	56,99	72,56	61,93	68,55
	SMALB	56,24	52,26	69,94	60,48	67,31
2023	SMA*	73,82	61,46	71,73	59,29	72,02
	SMK	70,37	59,07	70,80	58,37	72,77
	SDLB	67,87	64,28	75,56	61,59	67,31
	SMPLB	64,91	65,38	72,40	66,74	67,19
	SMALB	61,30	56,74	69,34	62,39	67,70

Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2024

*) merupakan nilai rata-rata dari SMA Umum dan SMA Keagamaan

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur

kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai - nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong – royong, kreativitas, nalar kritis kebinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa. Nilai karakter tertinggi berada pada jenjang SMA dan terendah pada jenjang SD, namun terjadi penurunan nilai karakter pada jenjang SMALB di Tahun 2023.

Transformasi digital menuntut pemahaman dan *skill*/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2024

Gambar 2.50.

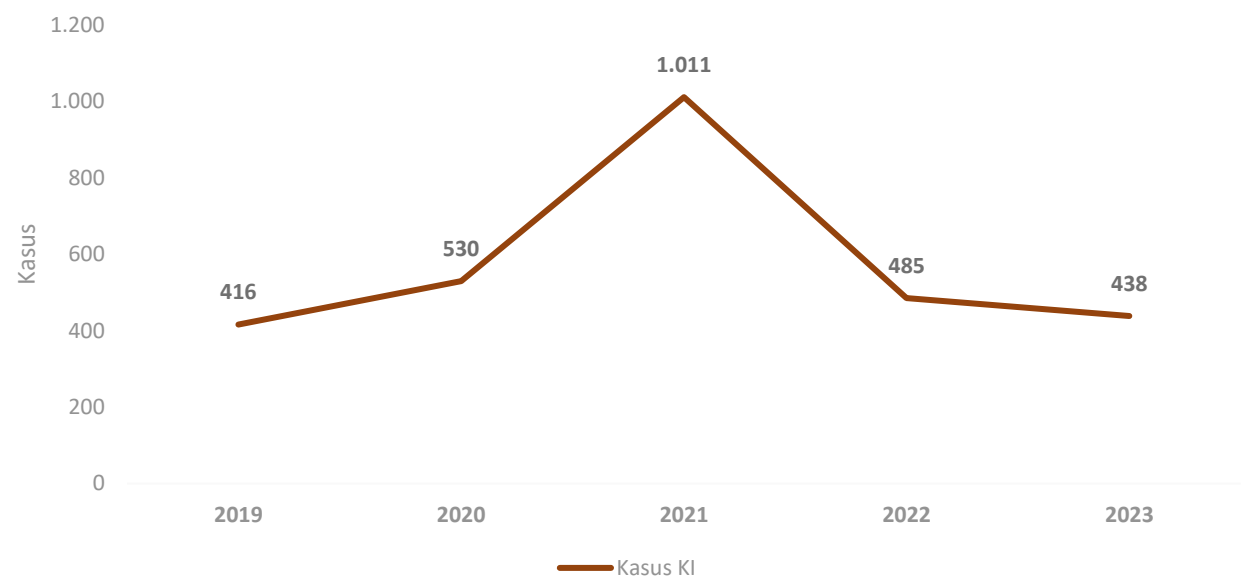
Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2023 (%)

2.4.8 Kesehatan

a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Kondisi capaian Kasus Kematian Ibu di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019 –2023 menunjukkan tren yang baik, namun terjadi kenaikan pada saat pandemi covid 19 pada Tahun 2021, Untuk Capaian Angka kematian ibu mengalami kondisi fluktuatif Tahun 2019 sebesar 76,93 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 88,11 per 100.000 KH. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan pada 2020 dan 2021 menjadi 98,60 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 199 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Berdasarkan data Tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kematian ibu di Jawa Tengah menurun dibanding dengan tahun 2022 sebanyak 485 Kasus menjadi 438 kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 54 Kasus dan terendah di Kota Magelang 0 kasus. Penyebab Kematian ibu di Tahun 2023 yaitu hipertensi, perdarahan, infeksi masa nifas, abortus, jantung, gangguan metabolic,

gangguan darah, gangguan ektropik, CA Vulva Maligna, TBC/Pneumonia, Ca otak , Krisis Tyroid, shock septik, Gg Ginjal, DM on pregnancy 1, Suspect jantung dg obesitas 1, Sirosis Hepatis, Ca mammae, Komplikasi non obstetrik, Nifas post SC Morbili.

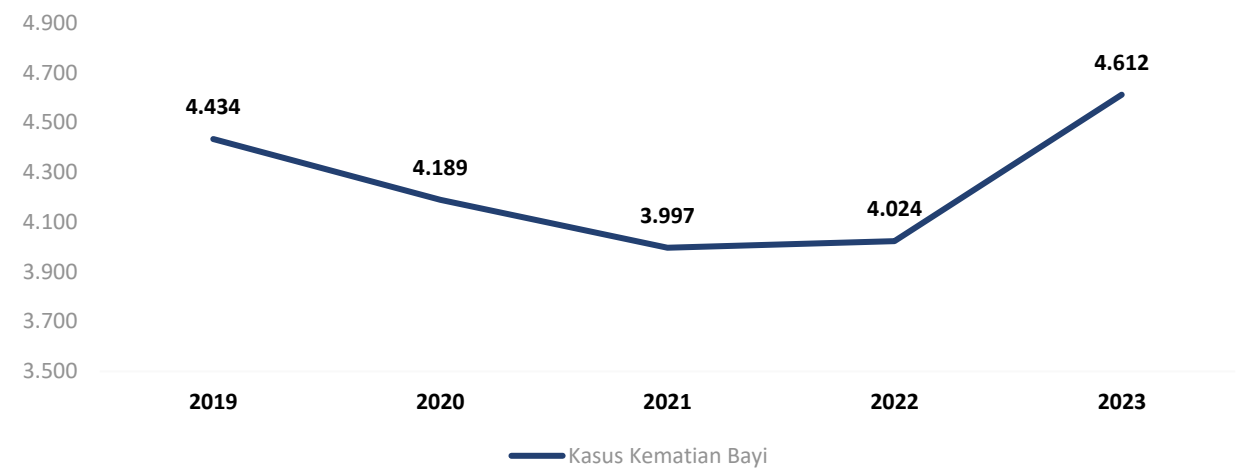


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.51.
Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren membaik dari 8,22 per 1.000 KH pada 2019 menjadi 8,20 per 1.000 KH pada 2023. Berdasarkan Data Tw III 2023 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 3.585 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 239 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 7 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.

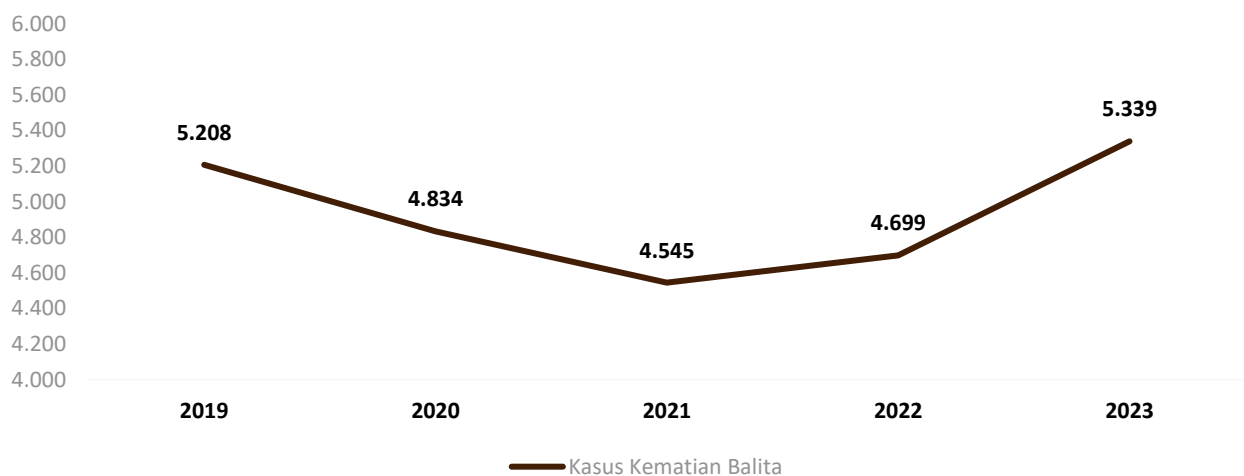
Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif yaitu sebesar 8,22 per 1.000 KH pada tahun 2019 dengan jumlah 4.450 kasus kematian bayi menjadi sebesar 9,28 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2023 yaitu 4.612 kasus. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta banyak ditemukan kasus pneumonia. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah naik dibandingkan tahun 2022 sebanyak 588 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 333 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 7 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.52.
Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2019-2023

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren naik dari 9,63 per 1.000 KH pada 2019 menjadi 10,47 per 1.000 KH pada 2023. Berdasarkan Data 2023 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 5.339 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Tegal sebanyak 430 Kasus dan terendah di Kota Surakarta sebanyak 0 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

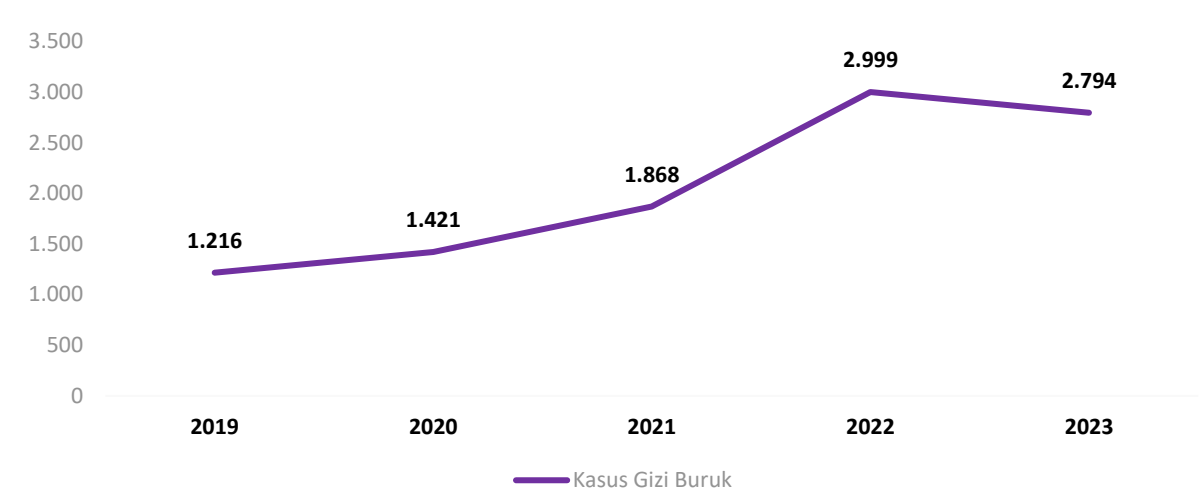
Gambar 2.53.
Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2019-2023

b. Kasus gizi buruk

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan dari 1.216 pada tahun 2019 menjadi 2.794 pada tahun 2022 seperti yang ditunjukan pada gambar 2.4. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orangtua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidak mampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan

kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang.

Gizi buruk cenderung menyerang setelah mereka berusia 12 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadi perhatian karena berbagai penelitian menunjukkan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.54.
Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2019-2023

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (underweight dan wasted). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita underweight dan wasted sebesar 17,1 persen dan 7,7 persen pada 2022. Prevalensi balita stunted turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,8 persen pada 2022. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prvalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikalakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen.

Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

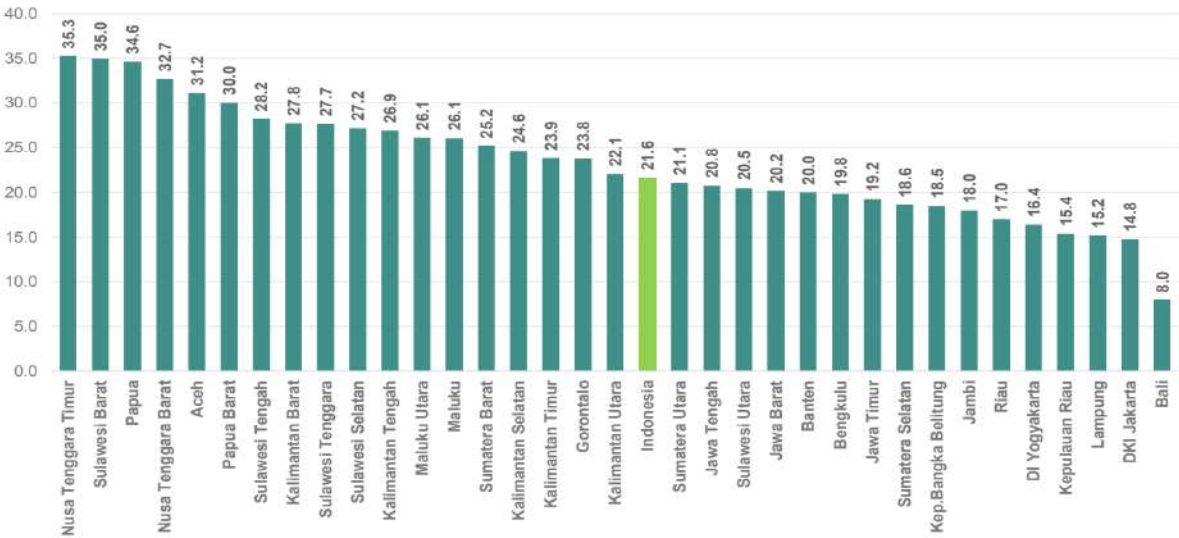
Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Angka prevalensi stunting di Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada target nasional maka perlu upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi di bawah 16 persen dan menjaga angka prevalensi wasting tidak lebih dari 7 persen.

Tabel 2.88.

Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Stunting	Sumber
2019	27,68%	Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas)
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia
2022	21,6% 20,8%	Survey Status Gizi Indonesia
2023		

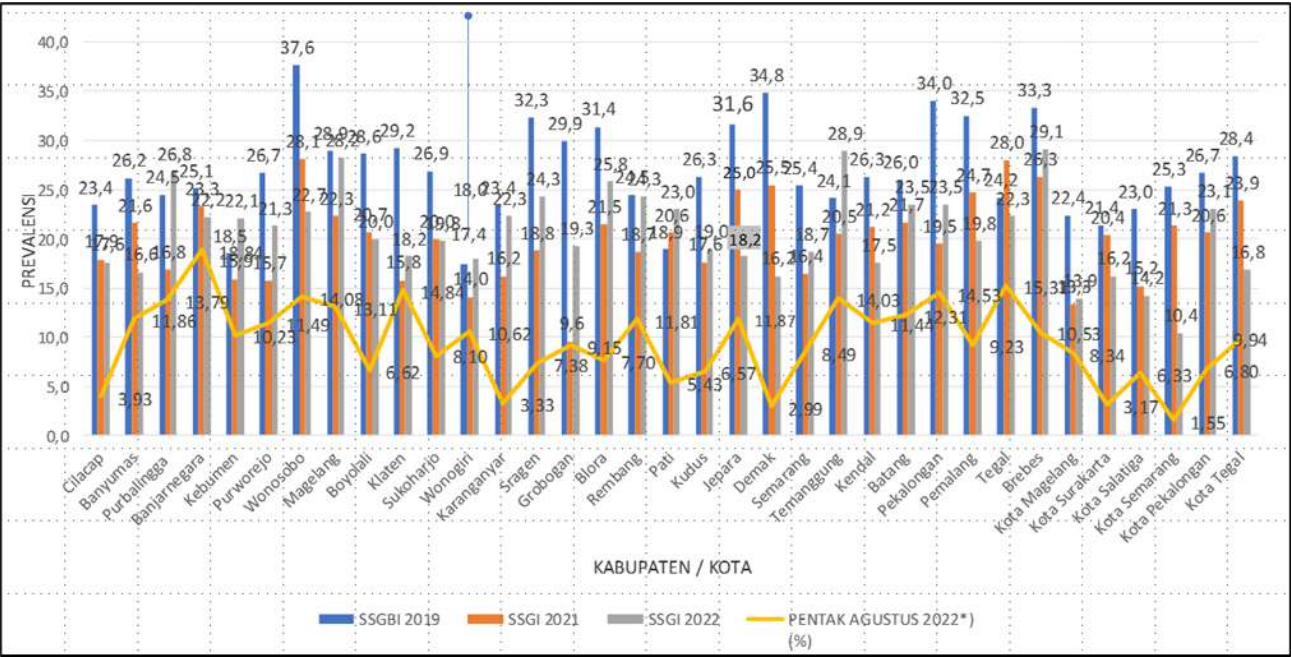
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.55.

Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.56.

Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019, SSGI 2021 dan SSGI 2022

Terjadinya kondisi stunting secara umum dipengaruhi oleh asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi. Status kesehatan berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, serta lingkungan sosial (norma dan pola asuh, pendidikan, lingkungan kerja).

c. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

1) Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yaitu menjadi 17,78 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 33,69 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yaitu dari 2,08 persen pada tahun 2022 menjadi 2,15 persen pada tahun 2023.

Angka Kesakitan Malaria (API) berdasarkan data tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,028 menjadi sebesar 0,02. Jumlah Kasus Malaria di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2023 sebanyak

371 kasus. Kasus Indegionus Malaria Tertinggi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 179 persen menjadi 226 persen pada tahun 2023 ,dengan jumlah penemuan 84.965 kasus TB di Jawa Tengah. namun harapan penanganan TB mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu ditandai dengan naiknya angka keberhasilan pengobatan TB (SR TB) dari tahun 2022 sebesar 84,5 persen menjadi sebesar 87 persen di tahun 2023. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakanakannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek non kesehatan, rumah yang tidak sehat, status gizi masyarakat dan perilaku tidak sehat menjadi pemicu dan pemberat kasus TB.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu masih perlu diwaspadai secara serius, berdasarkan data Tahun 2023 mengalami kenaikan, tercatat kasus HIV naik dari 3.120 kasus di tahun 2022 menjadi 4.464 kasus di tahun 2023. Kasus AIDS juga naik dari1.309 kasus di tahun 2022 menjadi 1.608 kasus di tahun 2023. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanfaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.89.
Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	API Malaria (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS	
						Kasus HIV	Kasus AIDS
2019	26,21	1,4	0,012	210,8	83,93	2.704	2.316
2020	16,30	1,9	0,009	118	84,5	2.749	1.549
2021	12,80	2,71	0,024	116,2	83,5	2.708	835
2022	33,69	2,08	0.028	179	84,5	3.120	1.309
2023	17,73	2,15	0,02	226	87	3.464	1.608

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

2) Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas sik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Berdasarkan Data 2023 menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi mengalami kenaikan sebesar 4.695.927 kasus pada tahun 2022 menjadi 5.032.288 kasus pada tahun 2023. Selain Hipertensi diabetes melitus mengalami tren kenaikan dari 613.524 kasus pada tahun 2022 menjadi 670.252 kasus di tahun 2023. Jumlah Penderita Jantung mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 78.247 menjadi 97.416 di tahun 2023. Namun untuk penderita stroke mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 62.621 menjadi 22.276 di tahun 2023. Penyakit kanker juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 17.292 kasus di tahun 2022 menjadi 14.770 kasus di tahun 2023.

Tabel 2.90.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2019	490.444	2.073.852	13.256
2020	582.559	2.543.732	12.702
2021	467.365	3.329.052	12.886
2022	613.524	4.695.927	17.292
2023	670.252	5.032.288	14.770

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

d. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program *Open Defacation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Pada Tahun 2023 masih terdapat 5 kabupaten/kota yang belum ODF yakni Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Magelang dan Pekalongan. Akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan pada Tahun 2023.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 terus meningkat yaitu sebanyak 3.668 desa/kelurahan ODF di tahun 2018 menjadi 7.710 desa/kelurahan ODF di tahun 2023.

Tabel 2.91.
Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Kelurahan/Desa ODF
1	2019	5.863
2	2020	6.818
3	2021	7.162
4	2022*	7.710
5	2023	8.562

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022.

e. Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka antisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode

2018 sampai 2022. Tahun 2018 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 65,00 persen yang kemudian meningkat menjadi 85,00 persen di tahun 2022. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, Kerjasama dengan universitas dan Lembaga penelitian untuk pengembangan program, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

Tabel 2.92.

**Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (%)**

No	Tahun	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia
1	2019	74,90
2	2020	65,90
3	2021	70,90
4	2022	85,00
5	2023	85,30

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

2.4.9 Kesejahteraan Sosial

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang meningkat jika mendasarkan base line pada tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 PPKS mengalami peningkatan menjadi 4.056.054 jiwa dan 4.654.151 jiwa. Tahun 2022 turun menjadi 4.579.790 jiwa dan tahun 2023 turun kembali menjadi 4.112.263 jiwa. Perkembangan populasi PPKS yang tidak signifikan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sebanding dengan penambahan PPKS baru, baik yang disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun dampak pandemi covid-19 di tahun 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam penanganan PPKS baik melalui layanan panti maupun bantuan sosial yang hanya sebesar 0,47% atau hanya 19.214 penerima manfaat. Tahun 2023 jumlah penanganan PPKS meningkat diangka 325.010 dikarenakan adanya tambahan intervensi berupa BLT DBHCHT dan BLT DID. Diperlukan kolaborasi semua pihak baik Pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, swasta maupun masyarakat sesuai kewenangannya untuk terus bersama-sama memberikan layanan kepada PPKS.

Tabel 2.93.

Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Populasi PPKS (Orang)	Jumlah Penanganan (Orang)	Persentase
1	2019	3.042.030	19.214	0,47
2	2020	4.056.054	19.214	0,47
3	2021	4.654.151	19.214	0,47
4	2022	4.579.790	19.214	0,47
5	2023	4.112.263	325.010	8,03

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2019 sebesar 32.874 PSKS menjadi 26.870 PSKS pada tahun 2023.

Tabel 2.94.
Kondisi PSKS Tahun 2019-2023

No	Jenis	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Karang Taruna (KT)	8.578	8.562	8.562	8.562	4.712
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	902	866	866	866	866
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	16.260	12.540	11.440	11.440	11.377
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	576	576	576	576	576
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	39	38	38	37	38
6	Dunia Usaha	63	63	63	56	58
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1.090	1.123	1.123	1.019	1.345
8	Family Care Unit (FCU)	2	2	2	1	11
9	Sakti Peksos	63	63	63	69	Mulai 2023 sdh tidak ada sakti peksos berubah menjadi pendamping resos yang merupakan gabungan pekos anak, pendamping disabilitas, pendamping LU dan konselor Napsa / peksos adiksi
10	Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional	120	117	117	123	136
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	38	38	38	38	228
12	Penyuluh Sosial Fungsional	0	25	25	46	36
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	710	77	77	77	2.023
14	PPNS	3	3	3	3	1
15	Pelopor Perdamaian	0	230	230	245	230
16	SDM PKH	2.348	5.495	5.495	5026	5097
17	SLRT	11	21	21	21	31
18	Puskesmas	52	306	385	405	116
	Total	32.874	32.165	31.145	30.632	26.870

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.

c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2023 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan *coverage* seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2023.

Tabel 2.95.
Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Penerima layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	3.762 Orang	3.762 Orang	100	18.428.688.000	18.371.996.279	99,69
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.795 Orang	2.795 Orang	100	16.685.252.400	15.673.4141.345	93,94
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	1.685 Orang	1.685 Orang	100	14.964.445.000	14.814.445.076	99,00
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti	810 Orang	810 Orang	100	5.766.601.000	5.635.273.400	97,72
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	145.407 Orang	145.407 Orang	100	2.115.488.000	2.086.409.950	98,63
	Jumlah	154.459 Orang	154.459 Orang	100	57.960.474.400	56.581.539.050	97,62

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, dan layanan SLRT/Puskessos.

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan namun tahun 2023 ada upaya yang berarti untuk melakukan perbaikan sehingga

kondisi bangunan baik meningkat dari 548 di Tahun 2022 menjadi 597 di tahun 2023.

Tabel 2.96.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Panti/ Rumpel	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2019	54	770	572	95	71	32
2	2020	54	789	570	105	70	44
3	2021	54	789	548	110	73	58
4	2022	54	790	548	111	73	58
5	2023	54	n/a	597	133	-	50

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 54 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 35 27 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 65 107, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 36 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 4 orang.

Tabel 2.97.
Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

PEKSOS TERAMPIL		PEKSOS AHLI		PENYSOS AHLI		PERAWAT		DOKTER	
Kondisi	Kebutu han	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan
27	57	107	426	36	104	4	68	1	1

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganann PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan assesment terhadap PPKS hasil penjarangan. Sampai dengan tahun 2023 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

(2) Layanan Puskessos-SLRT

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/ keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun

2023, Puskessos –SLRT tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 100%, sedangkan Puskessos-SLRT tingkat desa/kelurahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 405 Puskessos-SLRT menjadi 1.166. hal ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.

Tabel 2.98.

Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021

Sumber Dana	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan
APBN	64
APBD Prov	127
APBD Kab/Kota	500
Total	1.166

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

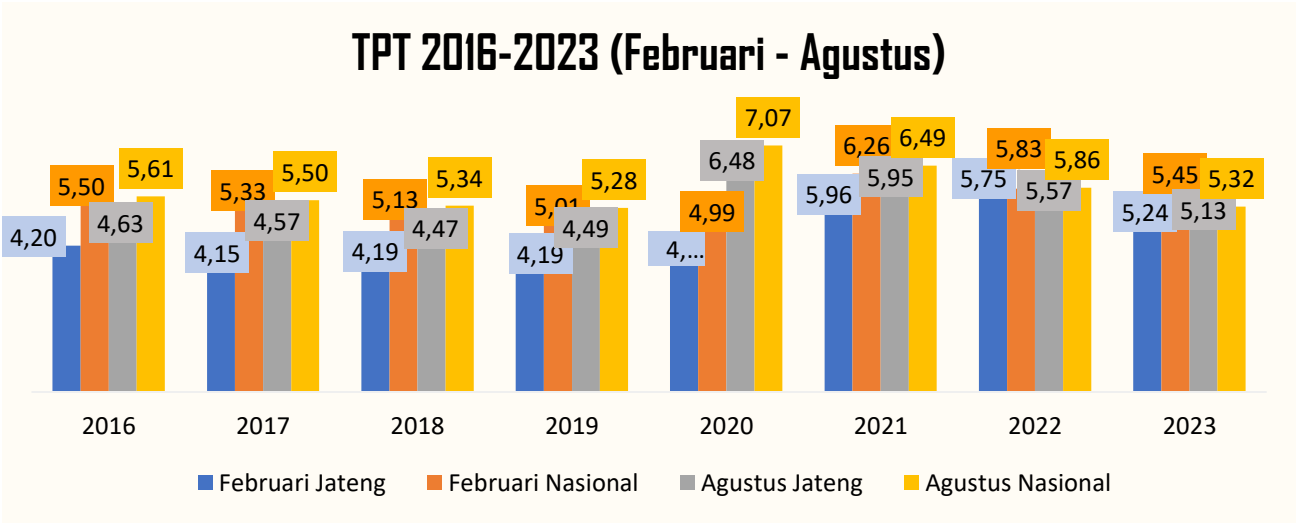
e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi

Upaya penanganan kemiskinan melalui bantuan kepada masyarakat non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan termasuk penurunan angka kemiskian ekstrim. Tahun 2023 telah dilakukan top up indeks KJS dari Rp250.000 menjadi Rp 370.000 per orang per bulan yang harapannya dapat lebih tajam untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Tantangan dari pelaksanaan KJS ini adalah penentuan penerima manfaat yang masih mengikuti pola penganggaran secara regular menyebabkan KJS kurang responsif untuk mengganti penerima manfaat ketika yang bersangkutan meninggal, pindah alamat atau telah menerima bantuan lain dari pemerintah pusat atau kab/kota, sehingga pada tahun 2024 telah diinisiasi KJS dialihkan dari belanja bansos menjadi belanja kepada pihak ke tiga yang harapannya pelaksanaan KJS lebih responsif dan lebih luas menjangkau sasaran penerima manfaat.

Untuk bantuan pengembangan produktif kepada kelompok usaha bersama tahun 2023 telah ditingkatkan cakupannya dari sebelumnya yang hanya 100 sasaran KUBE menjadi 1000 KUBE. Bantuan untuk KUBE ini berupa stimulus modal sebesar Rp20.000.000 per KUBE (20 orang anggota). Tantangan dari pelaksanaan KUBE adalah keberlanjutan usaha dan replikasi ke kelompok lainnya yang perlu untuk terus ditingkatkan.

2.4.10 Tenaga kerja

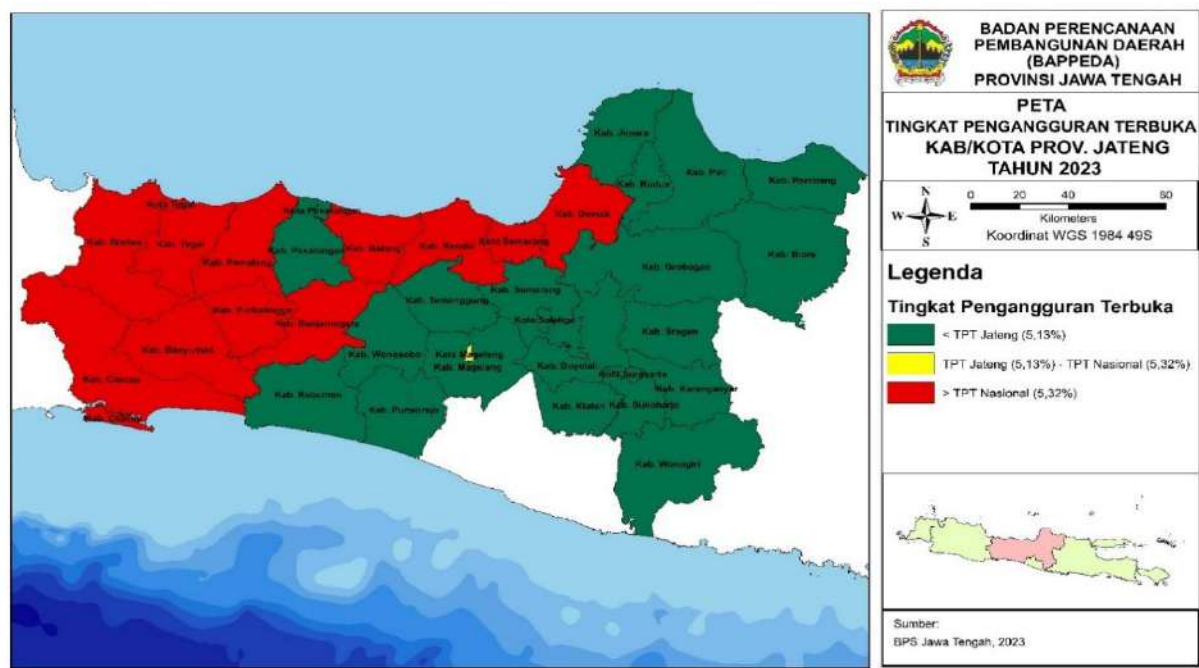
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2023 sebesar 5,13 persen turun sebesar 0,44 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2023 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 5,32 persen turun sebesar 0,54 persen point dibandingkan edngan TPT Nasional bulan Agustus 2022.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.57.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016–2023 (Februari-Agustus) (%)

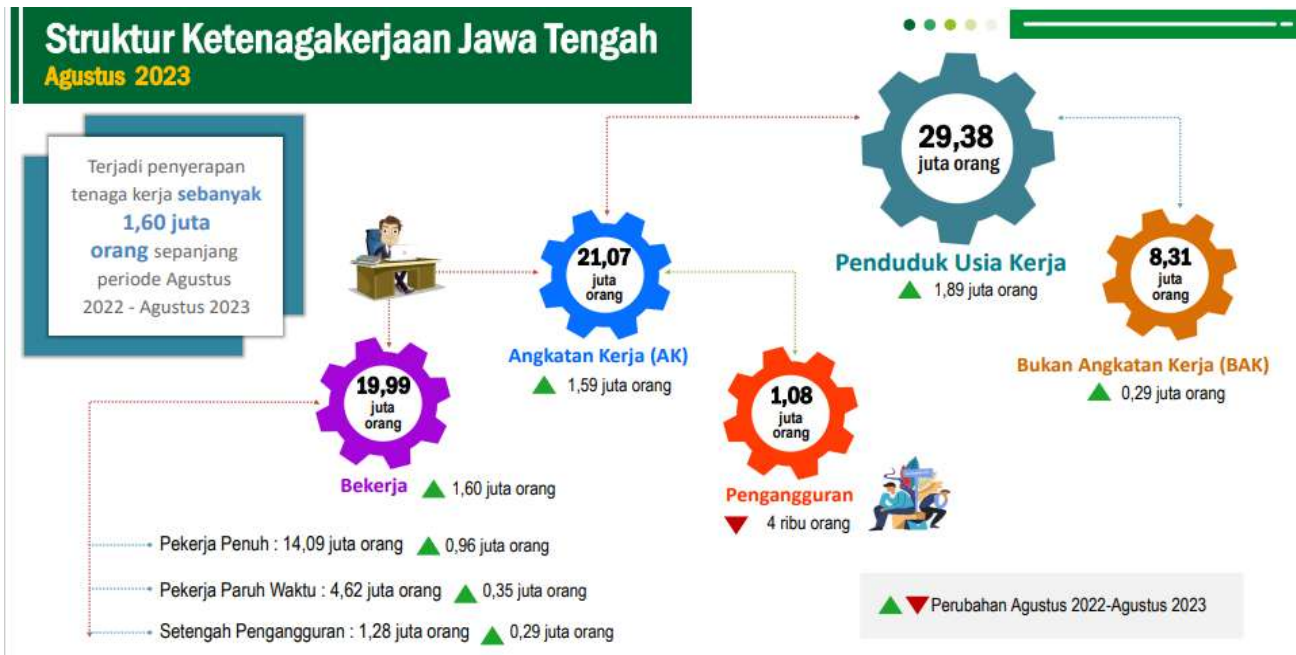
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan nasional atau lebih baik (peta warna hijau), terdapat 1 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan lebih baik dibanding Nasional (peta warna kuning), dan terdapat 12 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional dan Jawa Tengah atau lebih rendah (peta warna merah).



Gambar 2.58.
Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

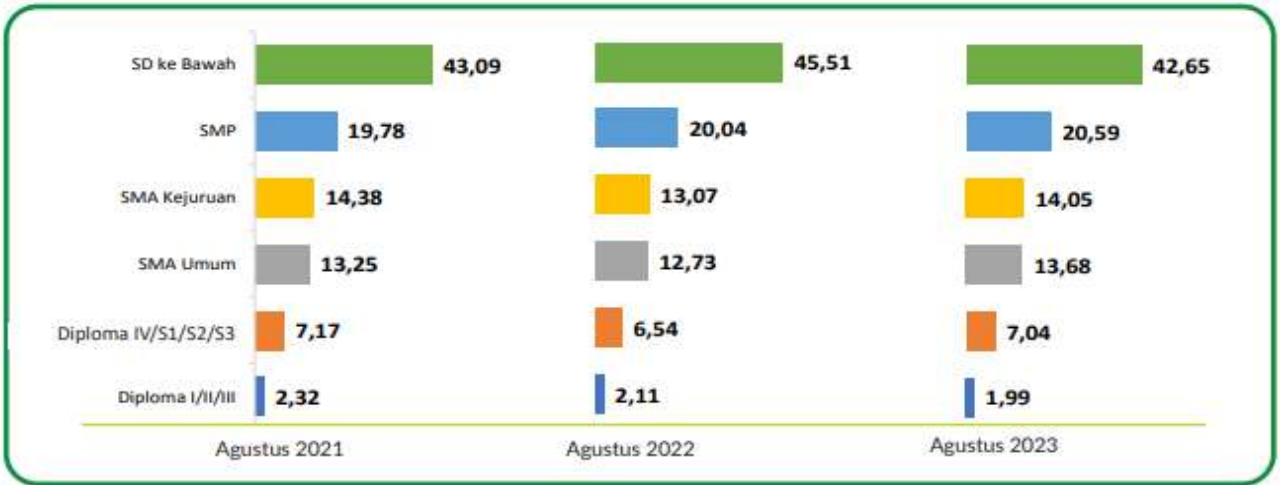
Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai

menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2022 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.59.
Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2023

Dari 36,74 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,38 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,07 juta orang. Dimana sebanyak 19,99 juta orang bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 42,65 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,59 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/ *low skill*.

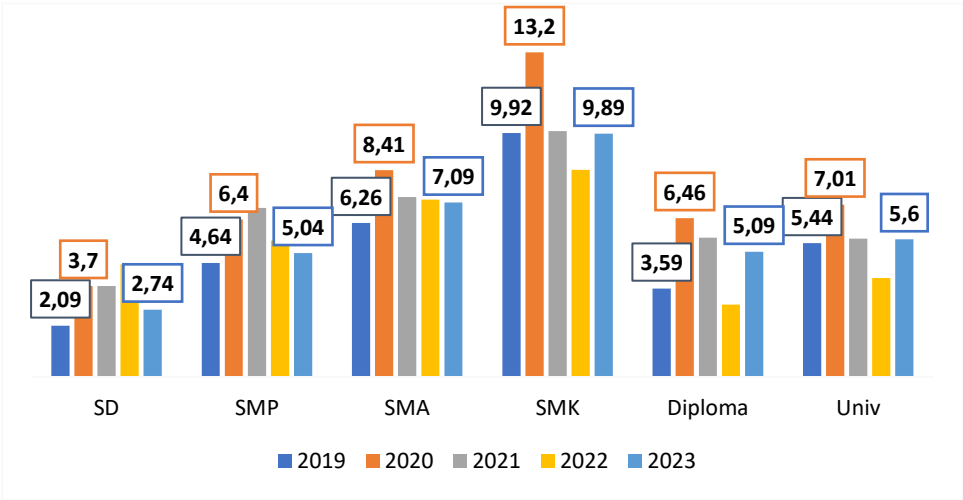


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.60.
Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022

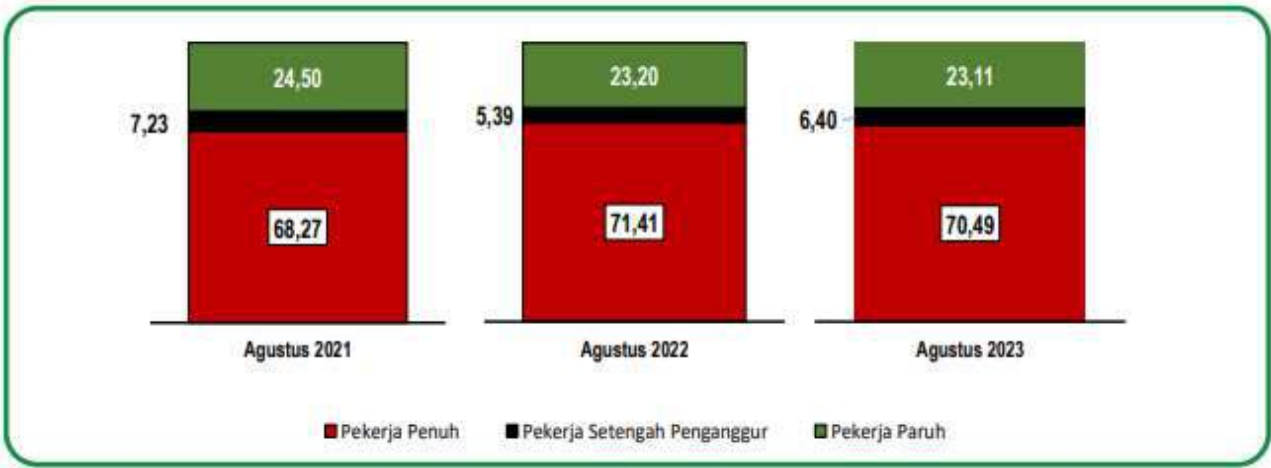
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2023 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,89 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 9,89 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan

sudah siap kerja atau bahkan sudah direkrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Sehingga perlu dicari apa penyebab mendasar dari kondisi itu. Apakah karena ketidakseimbangan antara demand dan supply atau terjadinya asimetri antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. TPT untuk lulusan Diploma dan Universitas juga mengalami kenaikan di tahun 2023. Pada tahun 2022 TPT lulusan Diploma sebesar 2,29 persen kemudian naik menjadi 5,09 persen di tahun 2023. Begitu juga dengan TPT lulusan Universitas dimana pada tahun 2022 sebesar 4,02 persen mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 5,60 persen.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.61.
TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%)



Gambar 2.62.
Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (%)

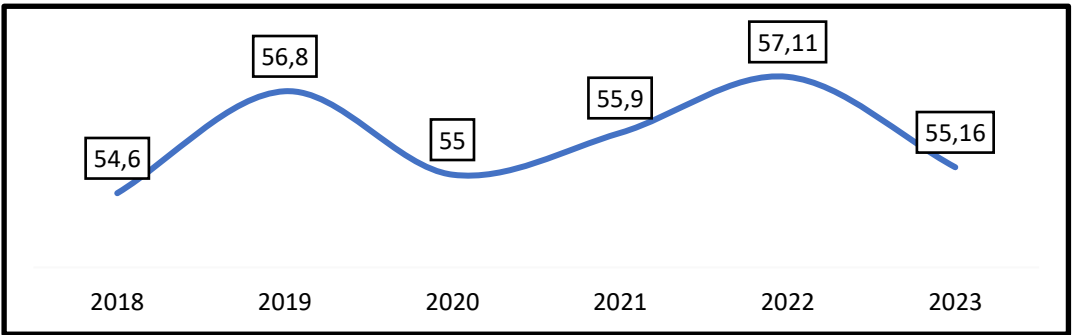
Pada tahun 2023 sebanyak 70,49 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 23,11 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 6,40 persen merupakan setengah pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2022, pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dan 0,09 persen poin. Setengah pengangguran dan pekerja tidak penuh waktu merupakan pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Hal ini perlu menjadi perhatian

karena menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah yang masih rendah.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 55,16 juta rupiah mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022 yang sebesar 57,11 juta rupiah. Penurunan ini bisa disebabkan beberapa hal seperti modal fisik (perlengkapan, perlengkapan dan fasilitas) yang dimiliki pekerja masih kurang memadai, kurangnya penggunaan teknologi atau metode baru untuk menghasilkan output yang lebih banyak, serta kualitas pendidikan dan keterampilan pekerja yang masih rendah.

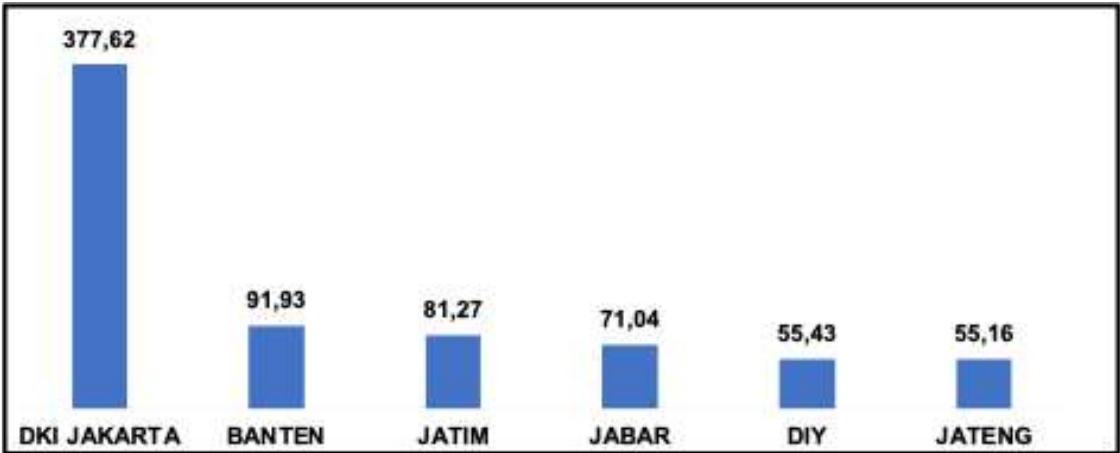
Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2023 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 377,62 Juta Rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Banten sebesar 91,93 Juta Rupiah dan Provinsi Jawa Timur sebesar 81,27 Juta Rupiah, sementara Provinsi Jawa Tengah berada di posisi terakhir setelah Provinsi DIY.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.63.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.64.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah)

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2023 sebesar 68,04% naik 1,45 persen poin dibanding dengan tahun 2021 dan 1,14 persen poin dibanding dengan tahun 2022. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja yang bekerja semakin meningkat, dan menandakan juga semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang penting karena hal itu dapat diartikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja pada pasar kerja dapat dipenuhi.

Tabel 2.99.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1.	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
2.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
3.	2021	17.835.770	27.253.914	65,45
4.	2022	18.390.459	27.490.000	66,90
5.	2023	19.990.000	29.380.000	68,04

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang selalu naik. Pada tahun 2023 TPAK sebsar 71,72% naik sebanyak 0,88 persen poin dibanding dengan TPAK tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang selalu naik menandakan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) di Jawa Tengah yang tersedia semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi semakin naik. TPAK yang tinggi ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas juga agar tidak berdampak negatif terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

Tabel 2.100.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1.	2019	26.610.000	18.421.193	68,85
2.	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
3.	2021	27.250.000	18.963.993	69,58
4.	2022	27.490.000	1□4□4.□□4	70,84
5.	2023	29.380.000	21.070.000	71,72

Sumber: BPS 2022 diolah dari Sakernas.
Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2020 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan perlu dilakukan

upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.101.

Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.644	236.491	71,09

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.102.

Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti
Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	69.866	1.781.754
2	2020	76.196	1.908.465
3	2021	83.511	2.003.518
4	2022	89.016	3.196.431
5	2023	103.666	2.318.493 *)

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang disebabkan dampak pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2023 jumlah pekerja non formal meningkat menjadi 1.441.492.

Tabel 2.103.

Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti
Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	1.378.435
2	2020	892.866
3	2021	310.785

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
4	2022	1.192.763
5	2023	1.441.492 *)

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023. *) Data per Okt 2023

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2023, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 124 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel 2.104.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2019	124	100% terselesaikan
2	2020	96	100% terselesaikan
3	2021	35	100% terselesaikan
4	2022	66	100% terselesaikan
5	2023	124	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang . Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.105.
Jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah <i>NEET</i> (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
2	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
3	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
4	2022	1.101.412	5.388.513 orang	20,44
5	2023	1.185.589	5.648.751 orang	20,98

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.106.
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2019	3.967	579
2	2020	4.230	614
3	2021	4.540	661
4	2022	4.641	661
5	2023	4.6481	662

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.

2.4.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kejadian yang tampak dipermukaan (terlapor) tidak sebanding dengan kejadian sesungguhnya yang diperkirakan jauh lebih tinggi. Adanya budaya malu dan takut melapor karena bisa dianggap aib menjadi kendala di masyarakat sehingga ini perlu terus didorong untuk memberikan penyadaran dan keberanian kepada masyarakat utamanya kaum perempuan dan anak.

Upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik berupa advokasi, sosialisasi maupun pelatihan bagi SDM yang terlibat dalam layanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Upaya ini telah memberikan dampak positif pada penurunan rasio kasus maupun rasio korban kekerasan. Periode 2019-2023, tercatat rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 7,44 di tahun 2023, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 7,78. Demikian juga dengan rasio korban kekerasan perempuan dan anak yang turun dari 8,25 di tahun 2019 menjadi 8,02 di tahun 2023. Sementara itu, Rasio korban kekerasan terhadap perempuan juga mengalami penurunan dari 5,89 di tahun 2019 menjadi 4,64 di tahun 2023, sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak turun dari 12,44 di tahun 2019 menjadi 9,86 di tahun 2023. Angka tersebut meskipun telah mengalami perkembangan yang positif tetap perlu mendapat perhatian serius dimasa mendatang mengingat angkanya yang masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum dilaporkan.

Tabel 2.107.

Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)
2019	7,78	8,25	5,89	12,44
2020	8,49	8,99	5,75	12,15
2021	8,35	8,97	5,11	11,02
2022	7,47	8,10	4,38	10,33
2023	7,44	8,02	4,64	9,86

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA 2024.

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Jawa Tengah secara berturut turut sejak tahun 2021 memperoleh penghargaan kategori tertinggi KLA sebagai pelopor Provinsi Layak Anak. Tentu dengan raihan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan sebanding dengan makin meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan makin membaiknya berbagai persoalan yang melingkupi anak seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, stunting dan lain sebagainya. Pada tataran kabupaten/kota sampai dengan tahun 2023 secara bervariasi sesuai tingkatan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Tercatat di tahun 2023 ada peningkatan jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan kategori Utama yaitu yang sebelumnya hanya Kota Surakarta menjadi bertambah Kota Semarang dan Kabupaten Sragen. Demikian juga dengan jumlah kab/kota yang memperoleh penghargaan madya dan nindya yang mengalami peningkatan. Rincian capaian KLA Tahun 2023 sebagaimana dalam table dibawah ini.

Tabel 2.108.

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023

Pratama	Madya	Nindya	Utama
Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kabupaten Banyumas	Kab. Grobogan, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Blora	Kabupaten Magelang, Kab. Rembang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Pemalang	Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sragen

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak secara paling banyak yang dialami oleh perempuan dewasa adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara pada anak tertinggi adalah kekerasan seksual disusul psikis dan fisik. Jenis kekerasan yang dialami perempuan yang perlu mendapat perhatian dimana angkanya terus meningkat yaitu kekerasan seksual dan trafficking, sedangkan pada anak yang perlu mendapat perhatian antara lain fisik, seksual, penelantaran dan lainnya.

Tabel 2.109.

Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa:					
Fisik	604	484	539	495	481
psikis	438	297	372	405	373
seksual	146	126	145	186	212
penelantaran	203	119	135	117	117
trafficking	1	5	10	2	8
eksploitasi	2	0	7	9	8
lainnya	44	26	47	60	49
Total	1.438	1.057	1.255	1.274	1.248
Jenis kekerasan yang dialami korban anak:					
Fisik	293	205	204	193	217
psikis	312	296	327	361	303
seksual	700	789	807	748	755
penelantaran	85	58	66	84	107
trafficking	8	8	16	7	4
eksploitasi	9	15	9	30	18
lainnya	51	56	72	72	133
Total	1.458	1.427	1.501	1.495	1.537

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ AplikasiSimfoni-PPA 2023.

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data I tahun 2023 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 10.531 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Pemalang (786 kasus) dan terendah di Kota Magelang (16 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2022 yang sebesar 11.366 kasus.

Tabel 2.110.
Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Cilacap	119	498	617
2	Kabupaten Banyumas	101	340	441
3	Kabupaten Purbalingga	69	333	402
4	Kabupaten Banjarnegara	60	507	567
5	Kabupaten Kebumen	33	189	222
6	Kabupaten Purworejo	38	166	204
7	Kabupaten Wonosobo	38	315	353
8	Kabupaten Magelang	79	414	493
9	Kabupaten Boyolali	41	119	160
10	Kabupaten Klaten	75	148	223
11	Kabupaten Sukoharjo	28	79	107
12	Kabupaten Wonogiri	25	115	140
13	Kabupaten Karanganyar	43	157	200
14	Kabupaten Sragen	48	211	259
15	Kabupaten Grobogan	97	677	774
16	Kabupaten Blora	40	378	418
17	Kabupaten Rembang	16	221	237
18	Kabupaten Pati	79	400	479
19	Kabupaten Kudus	41	188	229
20	Kabupaten Jepara	70	421	491
21	Kabupaten Demak	64	326	390
22	Kabupaten Semarang	64	187	251
23	Kabupaten Temanggung	36	267	303
24	Kabupaten Kendal	45	173	218
25	Kabupaten Batang	38	277	315
26	Kabupaten Pekalongan	17	228	245
27	Kabupaten Pemalang	99	687	786
28	Kabupaten Tegal	22	184	206
29	Kabupaten Brebes	44	358	402
30	Kota Magelang	3	13	16
31	Kota Surakarta	26	67	93
32	Kota Salatiga	8	19	27
33	Kota Semarang	42	142	184
34	Kota Pekalongan	9	39	48
35	Kota Tegal	2	29	31
Total		1.659	8.872	10.531

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2023.

Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih

berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian. Data perkawinan anak menunjukkan bahwa tahun 2023 sebesar 10.531 kasus telah mengalami penurunan dibanding tahun 2022 (11.366 kasus), namun angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan data tahun 2019 yang hanya 5.239 kasus. Perlu upaya lebih keras dimasa depan untuk bagaimana melakukan pencegahan kekerasan perkawinan usia dini khususnya memberikan pemahaman dan penyadaran bagi orang tua maupun anak muda mengenai arti penting kehidupan masa depan, kesiapan secara matang untuk menikah, pergaulan positif dan nilai-nilai tradisional yang masih melekat yang memicu/mendorong meningkatnya perkawinan usia dini.

Tabel 2.111.
Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2019	1.513	3.726	5.239
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022	1.850	9.516	11.366
2023	1.659	8.872	10.531

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.

2.4.12 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100% di Jawa Tengah dan pengintegrasian dengan dokumen perencanaan masih belum optimal. Rakapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2023 baru tercatat 21 Kab/kota yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat angka CPR sejak tahun 2019 mengalami tren menurun dari 73,48 menjadi 65,70 di tahun 2023. Namun disisi lain angka TFR justru mengalami penurunan menjadi 2,04 di tahun 2023 dari 2,23 di tahun 2019. Demikian halnya dengan unmetneed juga mengalami tren penurunan dari 13,03 pada tahun 2019 menjadi 8,6 di tahun 2023. Untuk TFR yang makin menurun perlu untuk diwaspadai jangan sampai hal itu terus berlanjut mengingat

TFR yang ideal sangat diperlukan untuk menghasilkan kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang

Tri bina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktifitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan hanya BKR yang mengalami peningkatan di tahun 2023 baik jumlah maupun keaktifannya sedangkan BKB dan BKL mengalami tren sebaliknya. Tri Bina ke depan dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan Tri Bina ini lebih berkembang dan berkualitas agar ketahanan keluarga dapat menjadi barometer Pembangunan masyarakat yang berkarakter.

Tabel 2.112.
Perkembangan Tri Bina 2019-2023

Tahun	BKB			BKR			BKL Jateng		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2019	19.465	11.473	58,94	10.268	6.145	59,85	13.496	7.948	58,89
2020	11.071	10.533	95,14	5.947	5.921	99,56	7.763	7.696	99,14
2021	10.473	10.338	98,71	5.860	5.794	98,87	7.804	7.724	98,97
2022	9.184	9.049	98,53	5.490	5.311	96,74	7.180	7.010	97,63
2023	8.984	8.816	98,13	5.909	5.600	94,77	6.647	6.382	96,01

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2023.

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms *gateway*, dan layanan *online*.

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.13 Kepemudaan dan olahraga

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, *control social*, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 Tahun. Data berdasarkan Statistik Pemuda Jawa Tengah yang dipublikasi terakhir pada November 2023), jumlah pemuda di Jawa Tengah mencapai 7,97 juta jiwa atau sebesar 22,75 persen penduduk Jawa Tengah.

Berbekal kemampuan dan kecakapannya, pemuda mampu menjadi bagian dalam proses pembangunan yang mandiri, kreatif dan berkomitmen. Pemuda memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan di Jawa Tengah, salah satunya pembangunan perekonomian Jawa Tengah. Permasalahan terkait pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan perekonomian di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Jawa Tengah menjelaskan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT Pemuda Jawa Tengah tahun 2019-2022 mengalami perkembangan fluktuatif, TPT Pemuda Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 11,87% membaik mengalami penurunan sejak Tahun 2020 sebesar 14,83% dan Tahun 2021 sebesar 13,23%.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Tingginya jumlah pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan di kalangan Pemuda Jawa Tengah. Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,78 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 58,21. Di sisi lain persentase pemuda yang berusaha sendiri mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar 12,44 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 12,05. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha, dan masih tingginya pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan.

Selain itu pembangunan pemuda juga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang di dalamnya terdapat 5 (lima) domain yaitu

Pendidikan; Kesehatan dan Kesejahteraan; Lapangan dan Kesempatan Kerja; Partisipasi dan Kepemimpinan; Gender dan Diskriminasi. Data terakhir dari KEMENPORA menunjukkan bahwa capaian IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 55,50 Meningkat dibandingkat Tahun 2022 sebesar 53,33. Perkembangan Kepemudaan di Jawa Tengah tergambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113.

Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)	7,79	7,75	7,77	7,97	n/a
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	11,87	14,83	13,23	11,87	n/a
Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan	60,91	54,18	58,21	60,78	n/a
Persentase pemuda yang berusaha sendiri	12,31	11,83	12,05	12,44	n/a
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	54,50	53,67	50,67	53,33	55,50

Sumber: 1. BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2024.

2. KEMENPORA Tahun 2024

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Pelaksanaan kejuaraan PON dan PEPARNAS dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Gelaran kejuaraan tingkat nasional tersebut terakhir dilaksanakan pada Tahun 2021 di Provinsi Papua. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat keperingkat 2 pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 nasional. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2021. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.114.
Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah
pada Kejuaraan Tingkat Nasional

Kejuaraan	Peringkat		
	Tahun 2012	Tahun 2016	Tahun 2021
Pekan Olahraga Nasional (PON)	4	2	6
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	1	2	3

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pada UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur untuk memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. *Sport Development Index* (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. SDI terdiri dari dimensi SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. Capaian SDI Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 0,379 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 0,346. Dimensi pembentuk SDI yang mengalami peningkatan yaitu SDM, ruang terbuka, literasi, kesehatan, perkembangan ekonomi, perkembangan personal. Sedangkan dimensi partisipasi, kebugaran, dan performa mengalami penurunan capaian.

Tabel 2.115.
Capaian *Sport Development Index* Tahun 2021-2022

Tahun	Dimensi <i>Sport Development Index</i>									SDI
	Sumber Daya Manusia	Ruang Terbuka	Literasi	Partisipasi	Kebugaran	Kesehatan	Perkembangan Ekonomi	Perkembangan Personal	Performa	
2021	0,037	0,307	0,535	0,276	0,183	0,414	0,524	0,289	0,547	0,346
2022	0,038	0,472	0,567	0,237	0,164	0,42	0,531	0,462	0,522	0,379

Sumber: KEMENPORA Tahun 2024.

2.4.14 Perpustakaan

Pada awalnya konsep literasi dimaknai hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun konsep ini semakin berkembang dengan cakupan yang lebih luas. Konsep literasi yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini salah satunya adalah literasi informasi yaitu sebuah keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dalam setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi, mampu menemukan informasi yang dibutuhkan, mampu mengevaluasi sumber informasi dan mampu memanfaatkan informasi secara etis dan mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam sebuah informasi (Anjali & Istiqomah, 2021).

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan

dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah terdapat 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan data pengunjung dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.116.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023 (Orang)

NO	Tahun	Pengunjung
1	2019	5.871.814
2	2020	3.160.335
3	2021	3.131.755
4	2022	4.891.435
5	2023*)	6.405.731

Sumber: *) Data 30 kabupaten/kota dan Provinsi.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pengunjung perpustakaan daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah pengunjung yang tertinggi terjadi di tahun 2023. Hal ini salah satunya didorong oleh kebijakan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pasca pandemi Covid-19 yang membuat layanan kunjungan perpustakaan umum daerah kembali dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kembali memanfaatkan koleksi bahan Pustaka yang ada disana. Jumlah koleksi bahan Pustaka berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan di tahun 2023.

Tabel 2.117.
Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Koleksi	2019		2020		2021		2022		2023*)	
		Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks
1	Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling	1.053.825	1.906.840	1.061.697	1.920.846	1.111.585	1.914.474	1.190.688	2.092.799	1.342.661	2.293.506
2	Koleksi e-book	50.085	235.236	75.998	452.112	68.802	516.436	79.949	527.485	96.322	633.197
3	Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus	8.462	16.096	9.165	17.618	10.756	19.665	4.480	6.525	6.337	8.926
	TOTAL	1.112.372	2.158.172	1.146.860	2.390.576	1.184.867	2.437.435	1.275.117	2.626.809	1.445.320	2.935.629

Sumber: *) Data 30 kabupaten/kota dan Provinsi.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi Masyarakat di Jawa Tengah. Tingkat literasi masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) seperti yang tersaji pada Tabel 2.121. Terlihat bahwa nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dari data Tabel 2.119 dan Tabel 2.120 yang menunjukkan peningkatan pengunjung dan jumlah koleksi bahan Pustaka. Penurunan nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dilihat dari menurunnya tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4) yang merupakan representasi dari pemanfaatan perpustakaan. Hal ini menunjukkan perpustakaan yang ada belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 2.118.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2023

Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM)	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)	0,00080	0,00066	0,0033	0,6030
Ketercukupan Koleksi (UPLM 2)	0,06760	0,04780	1,5831	0,3020
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)	0,00000	0,00003	0,0045	0,4078
Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM 4)	0,00050	0,00057	0,3342	0,1956
Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5)	0,00000	0,00006	2,3270	1,000
Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM 6)	0,03380	0,03249	0,2727	1,000
Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	0,03260	0,03160	0,6471	1,000
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,54	11,33	15,62	13,67

Sumber: Perpustnas, 2020-2023.



Sumber: Perpustnas, 2023 (diolah).

Gambar 2.65.
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

2.4.15 Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2016 – 2021, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 13,26 persen menurun menjadi 10,23 persen di tahun 2019, dan sempat terjadi kekosongan penempatan transmigran di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

Tabel 2.119.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2019	2.160	257	221	10,23
2	2020	1.263	0	0	0
3	2021	1.263	10	10	0,79
4	2022	n/a	n/a	n/a	n/a
5	2023	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan

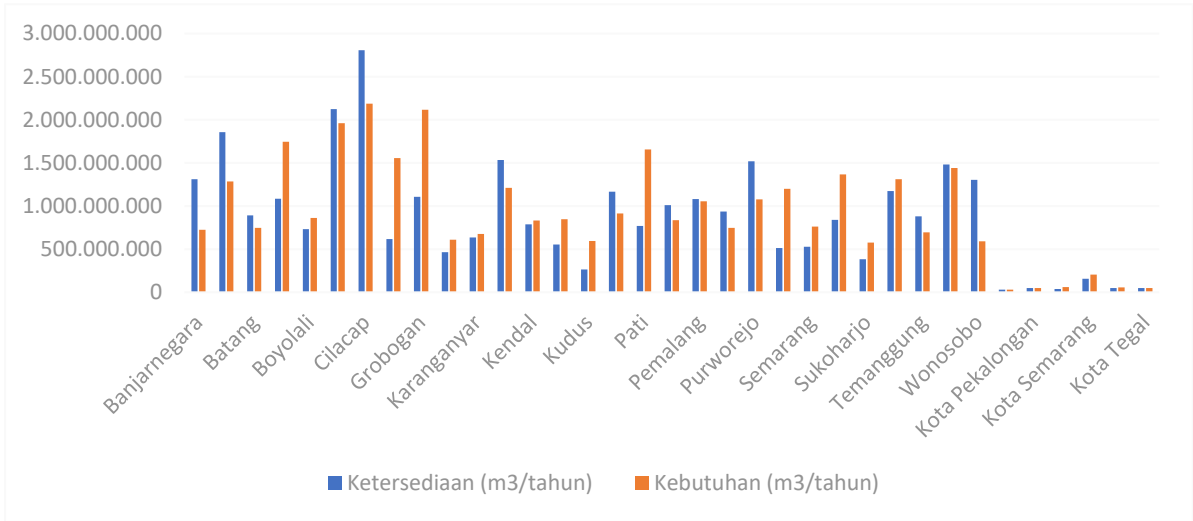
hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penganggulangan bencana. ambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m3/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m3/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55% dan yang belum terlampaui sebesar 52,45% dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m3/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregrat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.



Gambar 2.66.
Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah

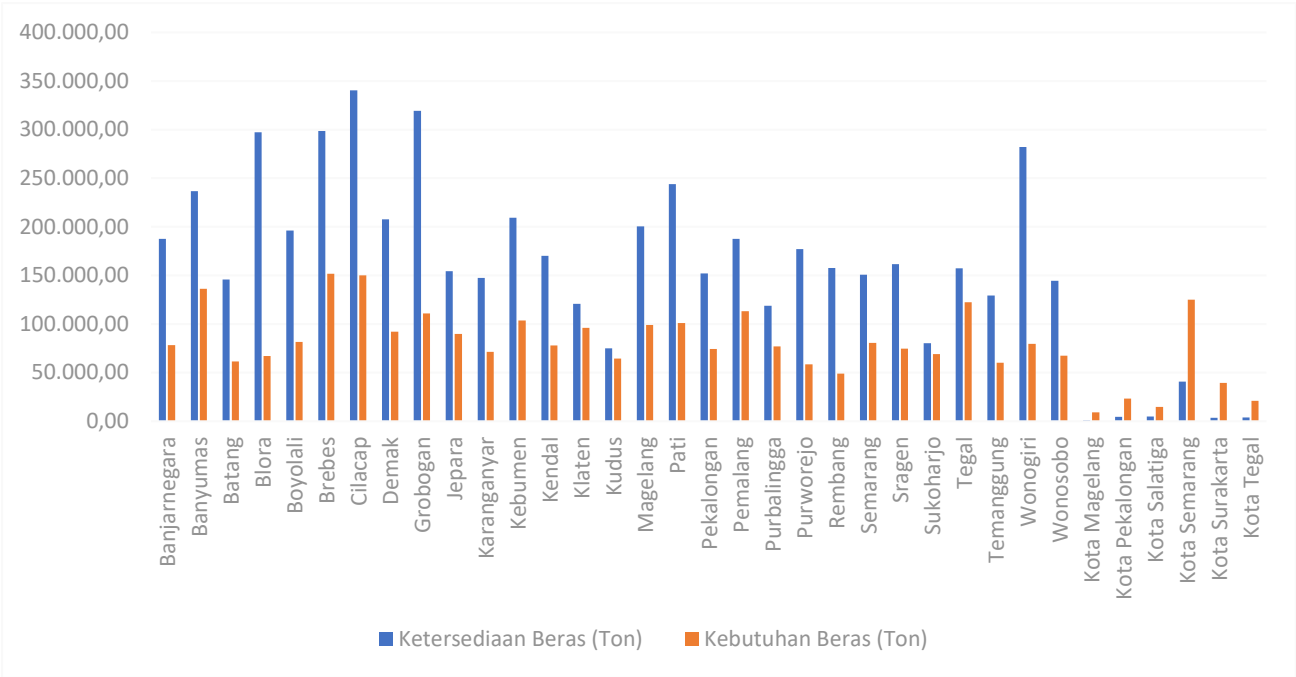


Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.67.
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah diikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38% yang daya dukung pangannya sudah terlampaui dan 88,62% wilayah yang belum terlampaui daya dukung pangannya. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.



Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.68.

Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.69.

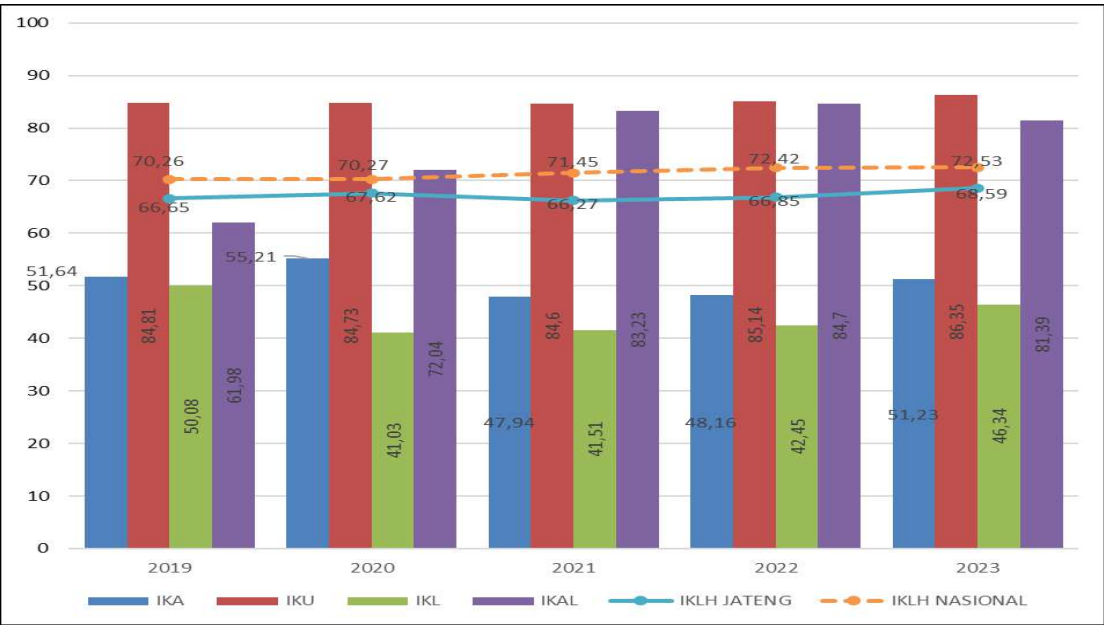
Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah

2.5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2023 sebesar 1,94 poin, dan pada tahun 2023 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 68,59. Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IKLH nasional setiap tahunnya. Mendasarkan pada surat Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH sehingga konversi capaian IKLH Jawa Tengah pada 2023 menjadi 75,34. Hal ini akan menjadi baseline dalam penyusunan target yang berlaku mulai tahun 2025. Capaian komponen IKLH setelah dikonversi dengan metode perhitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- IKA (Indeks Kualitas Air): 68,31
- IKU (Indeks Kualitas Udara): 84,51
- IKL (Indeks Kualitas Lahan): 59,32
- IKAL (Indeks Kualitas Air Laut): 81,39



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

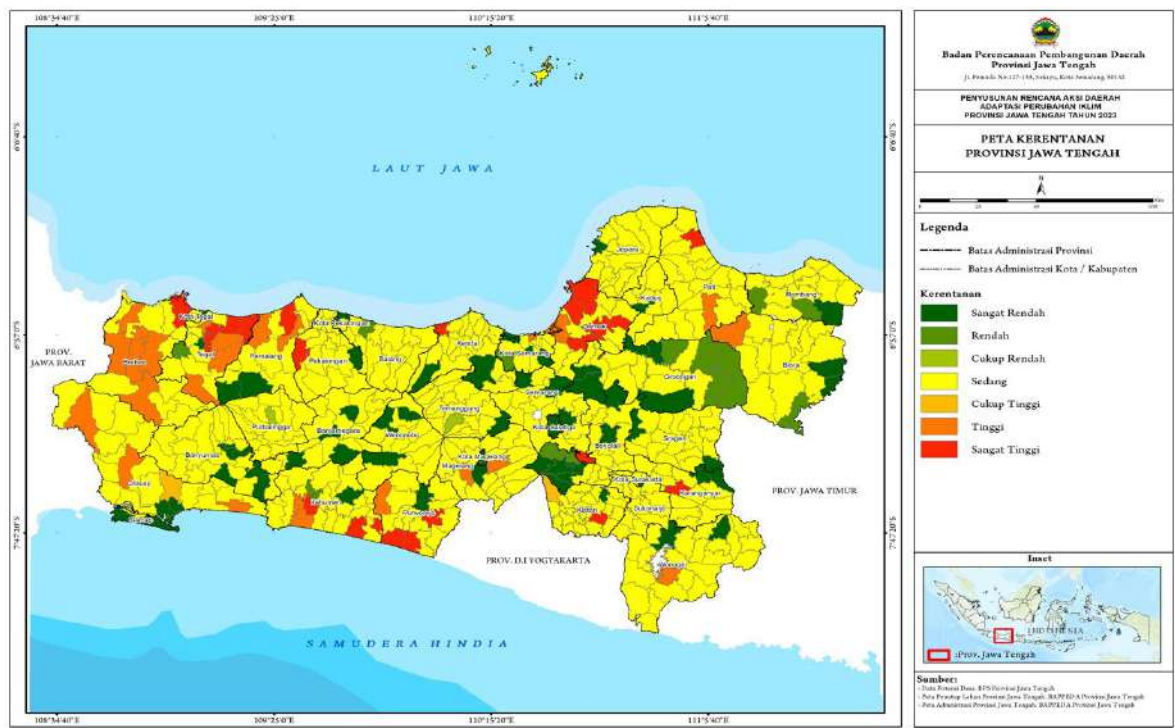
Gambar 2.70.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018–2023

2.5.3.Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukkan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442 kecamatan atau 77%. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan

dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.



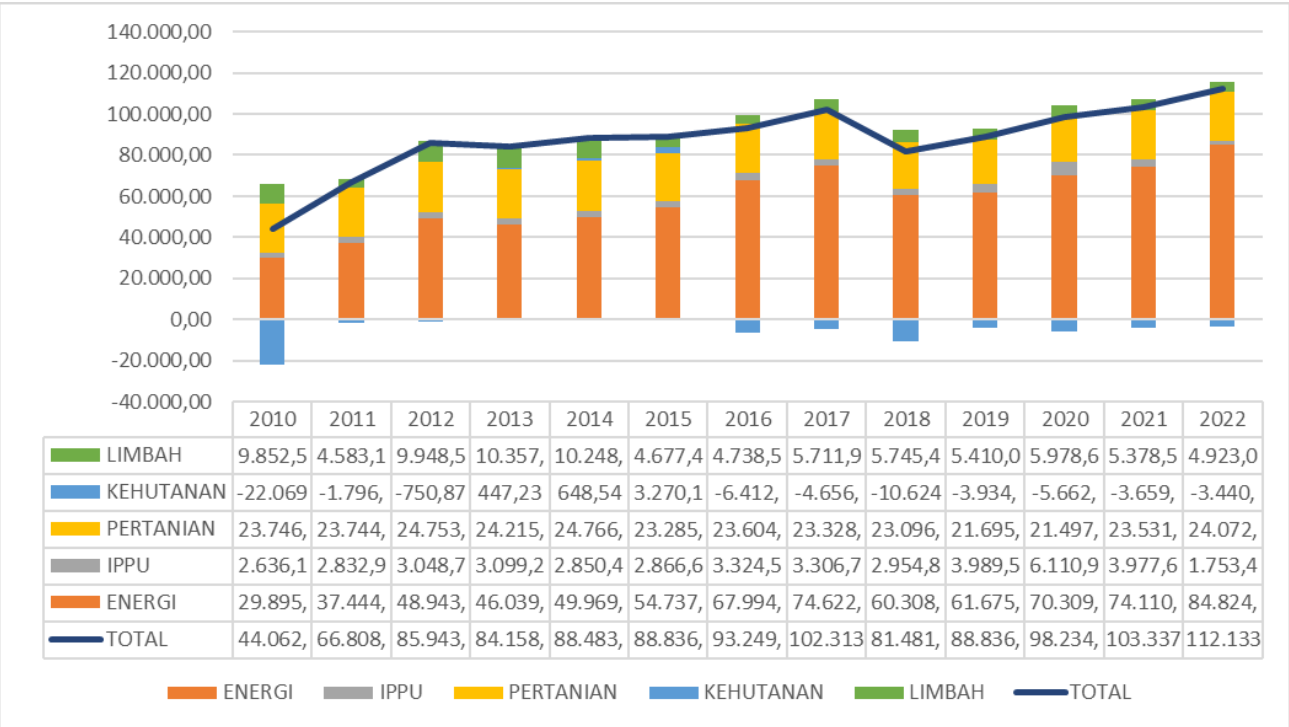
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.71.

Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

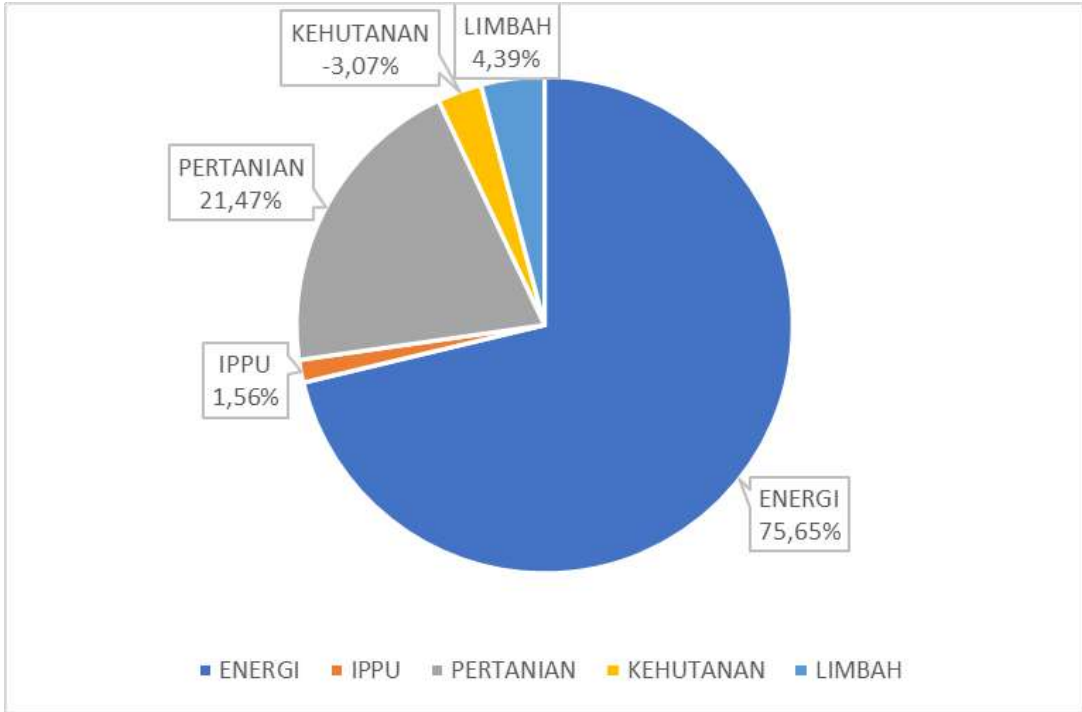
Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 112.133,9 GgCO₂e, meningkat signifikan dari tahun 2010 sebesar 44.062,09 GgCO₂e dengan peningkatan sebesar 68.071,81 GgCO₂e selama kurun waktu 12 tahun. Pada tahun 2022, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 84.824,93 GgCO₂e (75,65% dari total emisi GRK), disusul sektor pertanian sebesar 24.072,82 GgCO₂e (21,46%) dan sektor limbah sebesar 4.923,04 GgCO₂e (4,39%).

Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2022 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 283,74% (dari 29.895,59 GgCO₂e pada tahun 2010 menjadi 84.824,93 GgCO₂e pada tahun 2022). Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat. Pembakaran pada pembangkit listrik menyumbang lebih dari 44%, sedangkan transportasi menyumbang lebih dari 14% dari total emisi GRK di Jawa Tengah. Pada sektor pertanian, emisi GRK didominasi oleh lepasnya gas metan (CH₄) dari budidaya padi dan lepasnya gas N₂O dari pengolahan tanah. Lebih dari 14% total emisi GRK di Jawa Tengah diakibatkan oleh budidaya padi dan 8% akibat lepasnya gas N₂O. Sementara itu, emisi dari sektor limbah didominasi oleh limbah cair domestik yang menyumbang sekitar 3% dari total emisi GRK Jawa Tengah.



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.72.
Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.73.
Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (%)

Secara akumulasi, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 mencapai 11,6 juta ton CO₂eq (status data final). Angka ini merupakan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non Pemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 3.953 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43 ton/milyar. Sementara itu, capaian penurunan pada periode tahun 2021-2023 berdasarkan data yang telah dilaporkan melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan

Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) yaitu sebesar 1.934.671,81 ton CO₂eq.

Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama periode 2021-2023 di antaranya air limbah, blue carbon, energi, industrial process and production use (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. Dari delapan sektor tersebut, penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor persampahan sebesar 419.650,72 ton CO₂eq atau 21,69 persen, sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 405.096,18 ton CO₂eq atau 20,94 persen, dan sektor energi sebesar 366.154,31 ton CO₂eq atau 18,93 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah blue carbon sebesar 16.028,52 ton CO₂eq atau 0,83 persen.

Salah satu upaya dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah Pembangunan Rendah Karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Strategi dan kebijakan di dalam Pembangunan Rendah Karbon merupakan aksi mitigasi yang melibatkan multisektor dan multi pihak. Aksi-aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota dilaporkan ke dalam aplikasi AKSARA Bappenas.

2.5.4.Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran pada tahun 2023 sebesar 3,39. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar sedang yaitu Sungai Palur. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2023 sebesar 81,39. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 86,35.

Tabel 2.120.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Nama Sungai	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
1	Baki	3,66	Cemar Ringan	5,2	Cemar Sedang	4.72	Cemar Ringan	4,09	Cemar Ringan	4,00	Cemar ringan
2	Premulung	4,06	Cemar Ringan	3,5	Cemar Ringan	4.57	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	4,96	Cemar ringan
3	Mungskung	3,01	Cemar Ringan	2,85	Cemar Ringan	3.55	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan	3,43	Cemar ringan
4	Grompol	4,03	Cemar Ringan	5,33	Cemar Sedang	3.84	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan	4,14	Cemar ringan
5	Samin	2,61	Cemar Ringan	5,18	Cemar Sedang	4.35	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan	3,35	Cemar ringan
6	Jlantah	3,36	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	3.16	Cemar Ringan	4,32	Cemar Ringan	3,98	Cemar ringan
7	Palur	4,06	Cemar Ringan	6,12	Cemar Sedang	5.08	Cemar Sedang	4,92	Cemar Ringan	5,15	Cemar sedang
8	Pepe	4,35	Cemar Ringan	3,42	Cemar Ringan	3.12	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan	3,5	Cemar ringan

No	Nama Sungai	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
9	Babon	3,97	Cemar Ringan	6,62	Cemar Sedang	4.03	Cemar Ringan	5,04	Cemar Sedang	3,96	Cemar ringan
10	Bogowonto	3,51	Cemar Ringan	4,02	Cemar Ringan	3.22	Cemar Ringan	2,91	Cemar Ringan	1,95	Cemar ringan
11	Garang	6,53	Cemar Sedang	3,4	Cemar Ringan	2.88	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan	3,27	Cemar ringan
12	Gung	3,51	Cemar Ringan	2,9	Cemar Ringan	3.78	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan	3,48	Cemar ringan
13	Kupang	3,15	Cemar Ringan	3,86	Cemar Ringan	3.30	Cemar Ringan	3,53	Cemar Ringan	3,37	Cemar ringan
14	Luk Ulo	2,94	Cemar Ringan	0,91	Kondisi baik	3.30	Cemar Ringan	2,74	Cemar Ringan	2,85	Cemar ringan
15	Lusi	3,35	Cemar Ringan	3,75	Cemar Ringan	2.95	Cemar Ringan	1,56	Cemar Ringan	2,45	Cemar ringan
16	Pemali	4,66	Cemar Ringan	0,77	Kondisi baik	3.89	Cemar Ringan	3,90	Cemar Ringan	3,72	Cemar ringan
17	Sambong	3,74	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	3.04	Cemar Ringan	2,73	Cemar Ringan	2,84	Cemar ringan
18	Serang	4,66	Cemar Ringan	2,29	Cemar Ringan	2.32	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan	3,15	Cemar ringan
19	Serayu	3,7	Cemar Ringan	2,24	Cemar Ringan	2.89	Cemar Ringan	2,78	Cemar Ringan	3,92	Cemar ringan
20	Tuntang	3,19	Cemar Ringan	3,59	Cemar Ringan	3.09	Cemar Ringan	2,84	Cemar Ringan	3,86	Cemar ringan
21	Wulan	2,13	Cemar Ringan	4	Cemar Ringan	4.89	Cemar Ringan	3,94	Cemar Ringan	2,15	Cemar ringan
22	Bengawan Solo	3,85	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan	1.98	Cemar Ringan	2,46	Cemar Ringan	2,27	Cemar ringan
23	Progo	4,03	Cemar Ringan	2,03	Cemar Ringan	1.94	Cemar Ringan	1,95	Cemar Ringan	1,40	Cemar ringan
24	Citanduy	4,62	Cemar Ringan	1,97	Cemar Ringan	2.14	Cemar Ringan	2,62	Cemar Ringan	1,94	Cemar ringan
25	Cisanggarung	5,28	Cemar Sedang	1,94	Cemar Ringan	2.75	Cemar Ringan	0,61	Baik	1,78	Cemar ringan
26	Danau Rawapening	2,32	Cemar Ringan	2	Cemar Ringan	2,27	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	1,88	Cemar ringan
Nilai IP Jawa Tengah		3,84	Cemar Ringan	3,4	Cemar Ringan	3.39	Cemar Ringan	3,17	Cemar Ringan	3,18	Cemar ringan

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Sedangkan kondisi persampahan di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbulan sampah di Jawa Tengah, pada tahun 2023 telah mencapai 6.338.109,37 ton per tahun atau turun 0,40% persen dibandingkan tahun 2022. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2023 baru mencapai 3.912.331,17 ton per tahun (61,73 persen), dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.321.899,86 (20,86 persen) dan penanganan sampah sebesar 2.590.431,31 (40,87 persen). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di Jawa Tengah. Meski demikian capaian pengolahan sampah yang meliputi komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (material recovery) masih rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022 (SEB Bappenas-Kemendagri).

Tabel 2.121.
Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.604.080,65	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.806	6.338.109,37
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	1.069.308,62	1.175.675,24	1.128.400,92	1.317.993	1.321.899.86
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	2.774.189,20	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.830	2.590.431,31
4	Total Pengelolaan Sampah	3.843.497,82	3.802.116,82	3.536.773	3.908.823	3.912.331,17
Persentase Pengelolaan Sampah (%)		68,58	62,79	57,48	61,42	61,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 2.122.
Data TPA di Jawa Tengah per Tahun 2023

No	TPA	Kabupaten/ Kota	Usia Pakai s.d Tahun	Ketinggian Sampah (Meter)	Keberadaan Lapisan Geomembran	Keberadaan IPAL	Keberfungsian IPAL
1	TPST Tritih Lor	Cilacap	2019	15	Ada	Ada	Berfungsi
2	TPA Malabar	Cilacap	2025	12	Ada	Ada	Tidak fungsi
3	TPA Kunci	Cilacap	2025	7	Ada	Ada	Tidak fungsi
4	TPST BLE	Banyumas	selama nya	Residu habis diolah secara termal	Tidak gunakan landfill	Ada	Berfungsi
5	TPA Kalipancur	Purbalingga	2024	6	Ada	Ada	Berfungsi
6	TPA Winong	Banjarnegara	2030	10	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
7	TPA Kaligending	Kebumen	2030	20	Ada	Ada	Berfungsi
8	TPA Semali	Kebumen	2030	20	Ada	Ada	Berfungsi
9	TPA Jetis	Purworejo	2022	12	Ada	Ada	Berfungsi
10	TPA Wonorejo	Wonosobo	2024	50	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
11	TPA Pasuruhan	Kab. Magelang	2017	25	Ada	Ada	Berfungsi
12	TPA Klegen	Kab. Magelang	2028	5	Ada	Tidak ada	Tidak fungsi
13	TPA Winong	Boyolali	2024	8	Ada	Ada	Berfungsi
14	TPA Troketon	Klaten	2026	10	Ada	Ada	Berfungsi
15	TPA Mojorejo	Sukoharjo	2025	20	Tidak ada	Ada	Berfungsi
16	TPA Ngadirojo	Wonogiri	2026	5	Ada	Ada	Berfungsi
17	TPA Baturetno	Wonogiri	2023	7	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
18	TPA Purwantoro	Wonogiri	2024	3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
19	TPA Slogohimo	Wonogiri	2026	6	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak fungsi
20	TPA Sukosari Jumantono	Karanganyar	2023	10	Ada	Ada	Tidak fungsi

No	TPA	Kabupaten/ Kota	Usia Pakai s.d Tahun	Ketinggian Sampah (Meter)	Keberadaan Lapisan Geomembran	Keberadaan IPAL	Keberfung sian IPAL
21	TPA Tanggan	Sragen	2028	25	Ada	Ada	Berfungsi
22	TPA Ngembak	Grobogan	2030	14,79	Ada	Ada	Berfungsi
23	TPA Temurejo	Blora	2031	4	Ada	Ada	Berfungsi
24	TPA Jambe	Blora	2030	5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
25	TPA Landoh	Rembang	2017	30	Ada	Ada	Tidak fungsi
26	TPA Sukoharjo	Pati	2027	20	Ada	Ada	Berfungsi
27	TPA Tanjungrejo	Kudus	2025	10	Tidak ada	Ada	Berfungsi
28	TPA Bandengan	Jepara	2024	10	Ada	Ada	Berfungsi
29	TPA Krasak	Jepara	2022	4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
30	TPA Karimunjava	Jepara	2024	1,5	Ada	Ada	Berfungsi
31	TPA Berahan Kulon	Demak	2040	7	Ada	Ada	Berfungsi
32	TPA Blondo	Kab. Semarang	2019	40	Ada	Ada	Berfungsi
33	TPA Sanggrahan	Temanggung	2021	25	Ada	Ada	Berfungsi
34	TPA Darupono Baru	Kendal	2027	12	Ada	Ada	Berfungsi
35	TPA Randukuning	Batang	2015	15	Tidak ada	Ada	Berfungsi
36	TPA Degayu	Kota Pekalongan	2015	20	Ada	Ada	Berfungsi
37	TPA Bojonglarang	Kab. Pekalongan	2010	17	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
38	TPA Pegongsoran	Pemalang	2025	10	Ada	Ada	Berfungsi
39	TPA Penujah	Kab. Tegal	2017	4	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
40	TPA Kaliwlingi	Brebes	2050	10	Tidak ada	Ada	Tidak fungsi
41	TPA Kalijurang	Brebes	2050	50	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
42	TPA Banyu Urip	Kota Magelang	2025	15	Ada	Ada	Berfungsi
43	TPA Putri Cempo	Kota Surakarta	2025	20	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi
44	TPA Ngronggo	Kota Salatiga	2026	12	Ada	Ada	Berfungsi
45	TPA Jatibarang	Kota Semarang	2021	15	Ada	Ada	Berfungsi
46	TPA Muarareja	Kota Tegal	2025	5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak fungsi

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa dari 46 TPA, secara teknis terdapat 14 TPA yang telah melebihi usia pakai dan 6 TPA yang usia pakainya habis tahun 2023. Hal ini berarti ada sekitar 43,48% TPA yang usia pakainya habis tahun 2024. Berdasarkan data yang ada 9 dari 46 TPA tidak memiliki IPAL, sedangkan 9 dari 37 IPAL yang ada di TPA tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan pengelolaan air lindi tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap air yang ada di sekitar TPA.

Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini menjadi sorotan tersendiri. Selain karena jumlah timbulan yang semakin meningkat, jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem *open dumping*. Biaya untuk beralih ke sistem *sanitary landfill* dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (teknologi RDF maupun *Waste to Energy*) masih cukup tinggi, sehingga alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* dan masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progress untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED *landfill* (DLHK, 2024), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

Selain timbulan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri. Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1.589.621,42 ton/tahun. Produksi limbah B3 paling besar berasal dari Kabupaten Cilacap karena adanya industri semen, beton dan PLTU Batubara yang berasal dari FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*). Berikut merupakan tabel jumlah timbulan limbah B3 per kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022.



Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.74.
Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup, Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123.
Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023

N o	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Izin	62	69	83	89	236
2	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha dan/ atau kegiatan	35	57	38	63	65
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha dan/ atau kegiatan	27	49	19	47	50
4	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	-	-	6	7	7

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selain itu DLHK Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan dalam program propenas (proper nasional). Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan. Dari 220 perusahaan yang dibina, terdapat 147 perusahaan atau 66,82% dalam kategori taat (Warna Emas, Hijau, Biru, Biru-P). Berikut merupakan data perusahaan yang dibina oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah dalam program propenas (proper nasional).

Tabel 2.124.
Rekapitulasi Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Proper Nasional
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023

Kategori	Jumlah Perusahaan
EMAS	10
HIJAU	11
BIRU	109
BIRU-P	0
MERAH	93
HITAM	0
DITANGGUHKAN	2
JUMLAH	225
TINGKAT KETAATAN	58,30%

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.5.5.Rehabilitasi Lahan Kritis, Konservasi dan Perlindungan Hutan

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan, kondisi ini berkaitan dengan luasnya lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, seluas 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah).

Hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah 1.448.815,61 ha. Lahan kritis tersebut 86 persen berada di lahan masyarakat/tanah (tanah hak), sedangkan 14 persen di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah dilakukan dengan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan *vegetatif* (penanaman bibit) dan sipil teknis (bangunan konservasi tanah dan air). Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan *vegetatif* dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat, sedangkan pendekatan sipil teknis dengan membuat gully plug, dam penahan, dam pengendali, sumur resapan dan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) lainnya. Penanganan lahan kritis secara teknis dilaksanakan dengan melibatkan sumberdaya dan partisipasi para pihak yang ada di Jawa Tengah. Perkembangan penanganan lahan kritis tahun 2019-2023 (pendekatan *vegetatif* dan sipil teknis) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125.
Penanganan Lahan Kritis (Pendekatan Vegetatif / Penanaman) di Jawa Tengah

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Hutan (dalam dan luar kawasan) (ha)	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Lahan Kritis (ha)*	375.733	375.733	375.733	375.733	375.733
Luas lahan kritis yang direhabilitasi per tahun (ha)	23.431	32.389	23.477	21.371	19.052
Persentase rehabilitasi lahan	6,24	8,62	6,24	5,69	5,07

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
kritis per tahun (%)					
Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (akumulatif) ha	23.431	55.820	79.297	100.668	119.720
Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%) (akumulatif)	6,24	14,86	21,1	26,79	31,86

Sumber:
 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.
 2.*) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.

Tabel 2.126.
Penanganan Lahan Kritis (Pendekatan Sipil Teknis/ Penerapan Bangunan Konservasi Tanah dan Air) di Jawa Tengah

Jenis Bangunan KTA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dam Penahan (unit)	156	248	62	118	77
Dam Pengendali (unit)	-	-	-	-	-
Gully Plug (unit)	242	440	262	270	235
Sumur Resapan (unit)	450	522	1.500	840	180
Instalasi Pemanenan Air Hujan - IPAHA (unit)	-	-	-	-	28
JUMLAH	848	1.210	1.824	1.228	520

Sumber/ Keterangan :
 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.
 2.KTA : Konservasi tanah dan air

Lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan negara, yang terkait dengan permasalahan sosial seperti konflik tenurial, terbatasnya akses kelola sumberdaya hutan dilakukan melalui program perhutanan sosial. Untuk mengupayakan kelestarian usaha, kelestarian hasil dan kelestarian lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui *agroforestry* (wanatani).

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung DAS, sehingga rehabilitasi lahan kritis difokuskan pada 18 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya dan 12 DAS prioritas yang perlu dipertahankan daya dukungnya di di Jawa Tengah sesuai Perda Jawa Tengah No.15 tahun 2014 dan Pergub Jawa Tengah No.42 tahun 2015.

Penanganan/ rehabilitasi lahan kritis juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan DAS, seperti forum – forum DAS pada berbagai lokusnya. Selain itu juga diberikan apresiasi kepada desa – desa di Jawa Tengah yang telah melakukan pengelolaan DAS sebagai wujud kontribusi masyarakat dalam mengelola DAS pada level wilayah administratif terkecil dalam bentuk Desa Peduli DAS Lestari. Pada

tahun 2023, telah ditetapkan 14 Desa Peduli DAS Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah (2 Desa Kategori Utama, 5 Desa Kategori Madya, 1 Desa Kategori Pratama, 6 Desa Kategori Rintisan). Penetapan Desa Peduli DAS Lestari melalui rangkaian penapisan dan penilaian berdasarkan kriteria/ ketentuan tertentu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah.

Penanganan lahan juga dilaksanakan di daerah lahan basah/ pesisir melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan berbagai biota. Perkembangan rehabilitasi lahan basah mangrove sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.127.
Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
Luas rehabilitasi mangrove (Ha) (A)	58	19,4	174,12	27	55,7	DLHK*
Luas Penanaman Mangrove (Ha) (B)	19.6	6.4	9	8,89	8,15	DKP**
Luas rehabilitasi mangrove per tahun (ha) (A+B)	77,6	25,8	183,12	35,89	63,85	-
Akumulatif Luas rehabilitasi mangrove (ha)	77,6	103,4	286,52	322,41	386,26	-

Sumber:
1. *) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024
2. **) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Selain rehabilitasi lahan kritis/pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multipihak misalnya melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer, maupun kawasan konservasi/ perlindungan keanekaragaman hayati yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Taman Hutan Raya Mangkunegoro I dan Kebun Raya Baturaden.

Selanjutnya mempertimbangkan UU No.5 tahun 1990, UU No.32 tahun 2009, UU No.23 tahun 2014 dan PP 28 tahun 2011, penggunaan nomenklatur Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagai entitas konservasi berbasis kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multi pihak yang diiniasi oleh daerah disesuaikan menjadi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP)

Cagar Biosfer merupakan kawasan/situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimun Jawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan

kebakaran hutan. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128.

Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luas pencurian pohon (ha)*	22,88	17,41	14,6	91	105,09
Indikasi Luas Karhutla (ha)**	4.782,00	7.516,00	599,00	107,00	9.965,59
Emisi CO ₂ Karhutla (Ton CO ₂ e)**	491.617,00	85.750,00	90.504,00	19.537,00	1.193.013,00

- Sumber :
- *) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.
 - **) www.sipongi.menlhk.go.id (KLHK) / waktu akses 20 mei 2024 pukul 10.16 WIB

Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Tengah berbeda-beda setiap tahun, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pola cuaca. Pada tahun 2023 luasan karhutla mencapai 9.965,59 ha atau terluas pada periode 5 tahun terakhir karena kuatnya pengaruh *el-nino* di tahun 2023. Hal ini sudah diantisipasi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pembuatan infrastruktur pemadaman karhutla seperti misalnya sekat bakar. Karhutla menimbulkan kerugian ekonomi (hilang/ rusaknya potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan) dan ekologi (kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan).

2.5.5.Pemanfaatan hutan dan Kapasitas Pengelolaan Hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

Tabel 2.129.

Produksi Kayu di Jawa Tengah

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat (m ³)	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97	2,149,541.51	2.061.492,71
Produksi Kayu Asal Hutan Negara (m ³)	278.118,06	361.641,11	249.517.67	328,451.67	332.316,00
Total Produksi Kayu (m ³)	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97	2,477,993.17	2.393.808,71

- Sumber:
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (*ecolabel*) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

Tabel 2.130.

Penggunaan Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengguna kawasan hutan (unit)	193	201	203	207	190
Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m ³ berizin (unit)	967	999	1.007	1.026	1061
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (unit)	736	838	894	905	955

Sumber:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Tabel 2.131.

Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Akses kelola Perhutanan Sosial (ha)	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49	93.426,09
Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok)	79	81	90	90	119
Kepala Keluarga yang terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (kk)	17.358	17.508	19.579	19.579	23.327

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Sampai dengan tahun 2023, di Jawa Tengah telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 119 SK untuk 23.327 KK di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 93.426,09 Ha. Pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial maupun skema lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Khusus untuk pengelolaan usaha Perhutanan Sosial dibentuk kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan

Sosial (KUPS). KTH dan KUPS dalam pengelolaan kawasan hutan dibina / didampingi oleh Penyuluh Kehutanan untuk meningkatkan kapasitas kelola kawasan, kelola usaha dan kelola lingkungan. Namun demikian terjadi kecenderungan jumlah Kelompok Tani Hutan meningkat setiap tahun sementara jumlah Penyuluh Kehutanan berkurang.

Tabel 2.132.

Perkembangan Kelembagaan KTH dan SDM Penyuluh Kehutanan di Jawa Tengah

OPD	2019		2020		2021		2022		2023	
	KTH	Penyuluh	KTH	Penyuluh	KTH	Penyuluh	KTH	Penyuluh	KTH	Penyuluh
CDK I	504	58	504	54	504	54	508	53	508	52
CDK II	427	38	427	41	427	41	427	39	428	39
CDK III	465	42	465	39	465	38	477	31	518	26
CDK IV	211	22	211	23	211	23	234	22	251	21
CDK V	276	29	276	29	276	29	257	28	265	26
CDK VI	393	50	393	45	393	45	462	41	528	38
CDK VII	612	44	612	41	612	41	934	39	1.041	38
CDK VIII	380	25	380	27	380	26	233	25	283	24
CDK IX	259	27	259	25	259	24	256	24	308	24
CDK X	434	44	434	42	434	41	436	37	497	34
CDK XI	191	28	191	26	191	25	293	19	313	18
Kantor DLHK	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5
JUMLAH	4152	412	4152	397	4152	392	4517	363	4940	345

Sumber:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Sedangkan kapasitas Penyuluh Kehutanan dan perkembangan kelembagaan KTH dan KUPS sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.133.

Perkembangan Kapasitas Penyuluh, KTH dan KUPS di Jawa Tengah

KATEGORI	JENJANG	2019	2020	2021	2022	2023
Penyuluh	Pemula	n.a	1	-	1	-
	Terampil	n.a	-	5	-	5
	Mahir	n.a	-	26	-	26
	Penyelia	n.a	-	26	-	26
	Pertama	n.a	-	43	-	42
	Muda	n.a	175	-	72	169
	Madya	n.a		21	-	20
	Utama	n.a	-	-	-	-
	JUMLAH	412	397	392	363	345
KTH	Pemula	3.794	3.794	3.794	4.148	4.539
	Madya	349	-	49	-	49
	Utama	-	9	-	9	-
	JUMLAH	4.152	4.152	4.152	4.517	4.940
KUPS	Blue	-	-	-	-	167
	Silver	-	-	-	-	58
	Gold	-	-	-	-	11
	Platinum	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	236

Sumber/ Keterangan :
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.
2. KTH : kelompok tani hutan
3. KUPS : kelompok usaha perhutanan sosial

Pengelolaan kawasan hutan oleh KTH memberikan dampak ekonomi pada tingkat tapak yang diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) merupakan instrumen pengukuran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dalam hal terkait aktifitas ekonomi berbasis lahan hutan. Adanya data NTE KTH menjadi sarana yang strategis untuk menyusun strategi ekonomi yang efektif dalam pengelolaan kehutanan di tingkat tapak, perkembangan NTE KTH di Jawa Tengah dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.134.
Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Jawa Tengah

TAHUN	KTH (unit)	NTE KTH (Rp.)
2022	200	29.625.748.907
2023	563	90.778.196.837

Sumber/ Keterangan :
1. www.simluh.bp2sdm.menlhk.go.id (KLHK)/ waktu akses 6 Mei 2024 pukul 14.30WIB
2. Inisiasi penghitungan NTE KTH dimulai tahun 2022

Peningkatan nilai NTE KTH di Jawa Tengah pada periode 2022 - 2023 salah satunya disebabkan peningkatan partisipasi pencatatan yang dilakukan KTH di Jawa Tengah. Namun demikian pendalaman terhadap komponen penyusun NTE KTH seperti nilai transaksi, volume produksi, permintaan pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, akan dapat menjadi masukan dalam membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas KTH. Selain itu, NTH KTH ini juga merupakan indikasi kinerja pendampingan Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan juga melakukan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang mengelola kawasan hutan yang menjadi objek Perhutanan Sosial. Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS yang menunjukkan proses pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.135.
Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS di Jawa Tengah

TAHUN	KUPS*	KOMODITAS**	JENIS KOMODITAS**	NILAI EKONOMI (Rp)***
2020	1	1	Ekowisata	4.000.000
2021	1	3	HHK Lainnya	34.325.000
2022	4	3	Kayu Putih	304.200.000
2023	29	14	Jagung	123.267.230.000

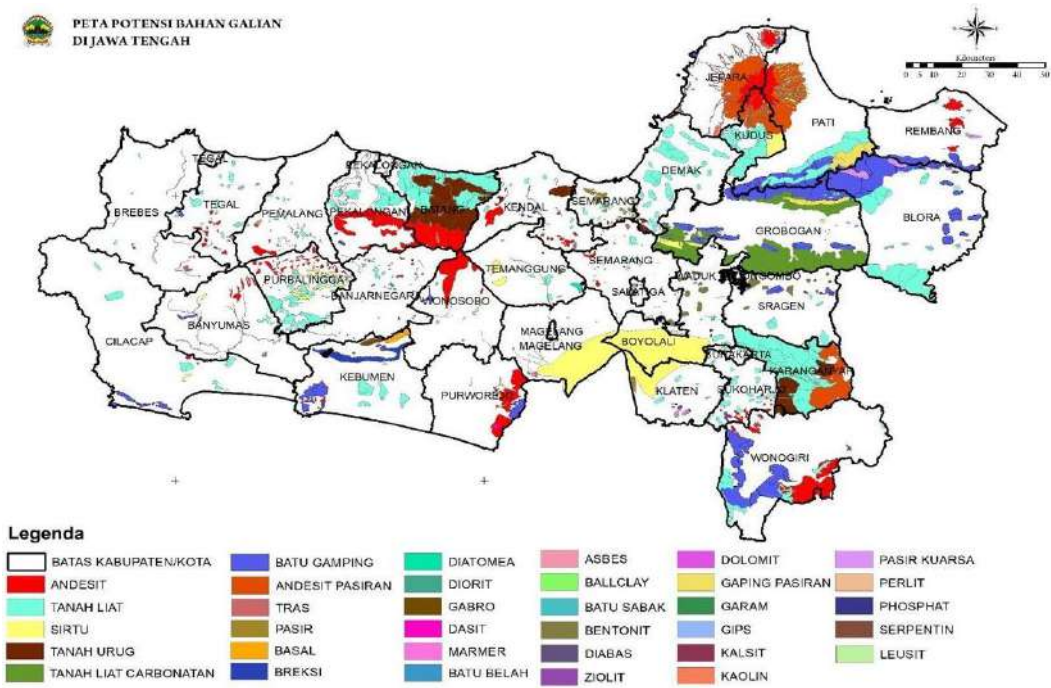
Sumber/ Keterangan :
1. <https://gokups.menlhk.go.id> (KLHK)/ waktu akses tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.37 WIB
2. *)KUPS (dengan hasil produk) yang melakukan pemutakhiran data
3. **)Jenis Komoditas terbanyak
4. ***) Nilai Ekonomi Tertinggi

Nilai Ekonomi KUPS menunjukkan perkembangan aktifitas kelola usaha yang dilakukan oleh KUPS. Pada periode 2020 - 2023 nilai ekonomi KUPS selalu meningkat yang sangat terkait dengan partisipasi pemutakhiran data oleh KUPS

dan dorongan dari pendamping perhutanan sosial, kondisi ini akan semakin meningkat pada masa yang akan datang dengan meningkatnya partisipasi KUPS. Terkait pengelolaan perhutanan sosial, harus dipahami secara komprehensif meliputi pilar kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola lingkungan. Sehingga untuk menilai keberhasilan perhutanan sosial harus mencakup ketiga pilar dimaksud.

2.5.1.Pertambangan

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 kabupaten/kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk Proyek PSN di Jawa Tengah adalah sebesar ± 113 Juta m³. Akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ± 31 Juta m³. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.75.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Tantangan yang di hadapi Provinsi Jawa Tengah terkait urusan pertambangan adalah pertambangan ilegal yang keberadaanya hilang dan timbul. Hilang setelah dilakukan penertiban tetapi muncul lagi di kemudian hari. Aktivitas ilegal *mining* di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui penegakan hukum agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel 2.136.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luas PETI (ha)	133	128	85,98	278,97	134,83
Sidak PETI (obyek)	114	107	89	160	158
Proses Hukum (kasus)	9	8	23	23	1
Lokasi di Kab/Kota	28	26	24	24	24

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara. tetapi dapat diduga melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertiban dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin. Penertiban pertambangan tanpa izin selain dengan cara penegakan hukum tetapi juga diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP).

Aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan masalah lingkungan, sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan kaidah penambangan yang baik. Kaidah penambangan yang baik artinya penambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dengan berlandaskan pada efektifitas dan efesiensi, melaksanakan konservasi, memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta ikut serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kaidah penambangan yang baik dapat diukur melalui persentasi *Good Mining Practice*. Di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 hingga 2022 persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 54,82 persen tahun 2018 menjadi 96,53 persen tahun 2023. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.137.

Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah

Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Total Pemegang IUP	360	355	355	309	317
Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP	306	302	306	275	306
Persentase <i>Good Mining Practice</i> (%)	85,00	85,07	86,20	89,00	96,53

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kedepan penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan);
- 2) Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan);
- 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang;
- 4) Upaya konservasi sumberdaya mineral dan Batubara; dan
- 5) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan.

Lima aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 (lima belas) poin kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepala Teknik Tambang;
- 2) Tanda Batas WIUP;
- 3) Statistik kecelakaan tambang;
- 4) Laporan Kegiatan;
- 5) Kelengkapan sarana pendukung;
- 6) Tenaga teknis;
- 7) Pembayaran pajak mineral;
- 8) Teknik pertambangan;
- 9) Pengolahan lanjutan;
- 10) Konservasi bahan tambang;
- 11) Keselamatan operasional pertambangan;
- 12) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 13) Pengelolaan lingkungan hidup;
- 14) Program pemberdayaan masyarakat/CSR; dan
- 15) Reklamasi dan pascatambang.

2.5.2. Penataan Ruang

Menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementrian Kelautan Perikan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sectoral dan penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut serta pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.138.
Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah
Per 17 April 2024

NO	KABUPATEN	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses	Proses Evaluasi	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
1	Kabupaten Cilacap						Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011-2031(1April2021)
2	Kabupaten Banyumas						Penetapan revisi RTRW Kabupaten Banyumas menggunakan mekanisme melalui permen ATR
3	Kabupaten Purbalingga						Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011-2031(28 Agustus 2020)
4	Kabupaten Banjarnegara						Perda No. 6 Tahun 2023 (19 Oktober 2023)
5	Kabupaten Kebumen						Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen (1 Februari 2024)
6	Kabupaten Purworejo						Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021-2041(30Juli2021)
7	Kabupaten Wonosobo						Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023)
8	Kabupaten Magelang						Evaluasi FPR Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 April 2024

NO	KABUPATEN	Revisi & PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
9	Kabupaten Boyolali						Perda No 8 Th 2019 tentang Perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011–2031.(17 Juli 2019)
10	Kabupaten Klaten						Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab.Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021)
11	Kabupaten Sukoharjo						Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRWSukoharjo 2011–2031.(9 Maret 2018)
12	Kabupaten Wonogiri						Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020-2040
13	Kabupaten Karanganyar						Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013–2032.(27 Agust 2019)
14	Kabupaten Sragen						Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011–2031 tanggal 5 Mei 2020
15	Kabupaten Grobogan						Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 Ditetapkan 17 Des 2021
16	Kabupaten Blora						Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021-2041 tanggal 1 April 2021
17	Kabupaten Rembang						Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 2 tahun 2023 per tgl 10 oktober 2023
18	Kabupaten Pati						Perda 2/2021 tentang Perubahan Atas Perd a5/2011 tentang RTRW Kab Pati 2010-2030 tgl 1 April 2021
19	Kabupaten Kudus						Perda 1/2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tgl 30 Maret 2022
20	Kabupaten Jepara						Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (7 September 2023)
21	Kabupaten Demak						Perda No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab 2020
22	Kabupaten Semarang						Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang

NO	KABUPATEN	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
23	Kabupaten Temanggung						Proses SK Gub
24	Kabupaten Kendal						Perda 1 Th 2020 tentang Perubahan atas Perda 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011–2031 tanggal 22 Mei 2020
25	Kabupaten Batang						Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Batang 2019–2039. (26Des2019)
26	Kabupaten Pekalongan						Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020- 2040 (5 Agustus 2020)
27	Kabupaten Pemalang						Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018–2038 (8 Feb 2018)
28	Kabupaten Tegal						Perda No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tegal Tahun 2023 - 2043 (21 Juli 2023)
29	Kabupaten Brebes						Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019–2039. (23Des2019)
30	Kota Magelang						Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031 (17Juli2020)
31	Kota Surakarta						Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 tanggal 9 Juli 2021
32	Kota Salatiga						Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023- 2043 tgl 12 Juni 2023
33	Kota Semarang						Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011tentang RTRW Kota Semarang 2011- 2031
34	Kota Pekalongan						Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
35	Kota Tegal						Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011–2031 tanggal 24 Feb 2021
	JUMLAH	35	28	7	35	32	32
	%	100	80,00	20,00	100,00	91,43	91,43

Berdasarkan Tabel 2.139 diatas Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan revisi RTRW sebanyak 32, sedangkan 3 RTRW Kabupaten/Kota sedang berproses. Sebanyak 32 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses untuk menjadi Peraturan Daerah dan terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas berproses menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

Tabel 2.139.

**Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Per 19 Januari 2024 terdapat 3 Perda RDTR dan 33 Perkada RDTR**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
1	Kabupaten Banyumas	3	RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto	Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039
			RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas	Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043
			RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja	Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja
2	Kabupaten Batang	3	RDTR Kec Limpung	Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung
			RDTR Kec Tulis	Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 – 2040
			RDTR Gringsing	Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing
3	Kabupaten Boyolali	4	RDTR Kec Sawit	Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021)
			RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo	Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022)
			RDTR Kecamatan Banyudono	Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022
			RDTR Kecamatan Cepogo	Perbup No. 57 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Cepogo Tahun 2023 – 2043 (10 Oktober 2023)
4	Kabupaten Brebes	3	RDTR Kecamatan Losari	Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023)
			RDTR Kecamatan Tanjung	Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung
			RDTR Kecamatan Bulakamba	Perbup No. 26 Tahun 2023 Tentang RDTR Kecamatan Bulakamba
5	Kabupaten Cilacap	2	RDTR Kaw Perkotaan Cilacap	Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
			RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja	Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023)
6	Kabupaten Jepara	1	RDTR Kec Jepara	Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
7	Kabupaten Kendal	2	RDTR Kecamatan Kaliwungu	Perbup No. 62 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu
			RDTR Kecamatan Brangsong	Perbup No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Brangsong
8	Kabupaten Klaten	1	RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan	Perb No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan
9	Kabupaten Pekalongan	1	RDTR Kec Kedungwuni	Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
10	Kabupaten Purbalingga	2	RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga	Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)
			RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari	Perbup Purbalingga No. 70 Tahun 2023 Tentang RDTR Kawasan perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043 (15 Agustus 2023)
11	Kabupaten Purworejo	2	RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo	Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041
			RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport	Perbup No. 106 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan kota Perbatan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043 (18 Desember 2023)
12	Kabupaten Sragen	3	RDTR Perkotaan Sragen	Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)
			RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan	Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023)
			RDTR Gemolong	Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023)
13	Kabupaten Sukoharjo	4	RDTR Kec Sukoharjo	Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 – 2039
			RDTR Kec Kartasura	Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 – 2039
			RDTR Kec Grogol	Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039
			RDTR Kecamatan Nguter dan Bendosari	Perbup Sukoharjo No. 1 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2044 (2 Februari 2024)
14	Kabupaten Wonogiri	2	RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri	Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042
			RDTR Gunungsewu	Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2024 (11 Januari 2024)
15	Kabupaten Demak	1	RDTR Perkotaan Demak	Perbup Demak No. 11 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Demak (22 Maret 2024)
16	Kota Surakarta	1	RDTR Perkotaan Surakarta	Peraturan Wali Kota Surakarta No. 33 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Surakarta Tahun 2023-2043 (20 Desember 2023)
17	Kota Salatiga	1	RDTR Kota Salatiga	Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030
18	KotaTegal	1	RDTR Kota Tegal	Perwal No 52/2023 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Tegal 2023-2043 (31 Mei 2023)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
19	Kota Semarang	1	RDTR Kecamatan Tugu	Peraturan Wali Kota Semarang No. 2 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Tugu Tahun 2023-2043 (5 Januari 2024)
Total	19 Kabupaten/Kota	38 Perda/Perkada RDTR		

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng,

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel 2.140.
Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%
1	Kota Semarang	2.700,68	6,99%	2.700,68	6,99%	2.700,68	6,99%	2.700,68	6,99%
2	Kab. Semarang	756,48	6,73%	756,48	6,73%	382,87	6,31%	382,87	6,31%
3	Kota Salatiga	482,16	8,33%	482,16	8,33%	482,16	8,33%	482,16	8,33%
4	Kab. Kendal	477,62	5,43%	477,62	5,43%	393,82	4,48%	393,82	4,48%
5	Kab. Demak	392,02	5,49%	392,02	5,49%	311,56	4,37%	311,56	4,37%
6	Kab. Grobogan	869,91	11,70%	869,91	11,70%	869,91	11,70%	214,70	7,73%
7	Kab. Pati	615,39	5,66%	615,39	5,66%	352,47	3,88%	352,47	3,88%
8	Kab. Kudus	1.036,77	9,92%	1.036,77	9,92%	1.036,77	9,92%	287,25	2,76%
9	Kab. Jepara	449,05	4,72%	468,35	4,88%	468,35	4,88%	468,35	4,88%
10	Kab. Blora	547,84	12,34%	547,84	12,34%	547,84	12,34%	325,32	2,68%
11	Kab. Rembang	448,48	16,33%	448,48	16,33%	448,48	16,33%	416,94	5,32%
12	Kab. Klaten	611,43	6,17%	611,43	6,17%	547,82	5,58%	547,82	5,58%
13	Kab. Boyolali	114,44	3,20%	195,68	4,96%	195,68	4,96%	195,68	4,96%
14	Kab. Wonogiri	357,85	5,80%	357,85	5,80%	316,59	7,24%	316,59	7,24%
15	Kab. Sukoharjo	998,32	6,15%	998,32	6,15%	177,40	2,59%	177,40	2,59%
16	Kab. Sragen	208,64	2,78%	242	5,57%	242	5,57%	242,00	5,57%
17	Kota Surakarta	583,78	12,35%	583,78	12,35%	583,78	12,35%	583,78	12,35%
18	Kab. Karanganyar	252,65	7,40%	252,65	7,40%	252,65	7,40%	252,65	7,40%
19	Kab. Purworejo	524,41	7,30%	524,41	7,30%	524,41	7,30%	468,70	7,23%
20	Kab. Temanggung	245,45	7,56%	245,45	7,56%	245,45	7,56%	279,82	6,45%
21	Kab. Wonosobo	504,13	14,41%	504,13	14,41%	504,13	14,41%	468,04	5,88%
22	Kab. Kebumen	1.434,68	11,00%	1.434,68	11,00%	1.434,68	11,00%	540,26	3,63%
23	Kab. Magelang	543,62	3,47%	1.055,54	9,30%	1.055,54	9,30%	1.055,54	9,30%
24	Kota Magelang	449,15	24,22%	449,15	24,22%	449,15	24,22%	449,15	24,22%
25	Kab. Banjarnegara	403,23	10,03%	403,23	10,03%	403,23	10,03%	208,80	4,73%
26	Kab. Banyumas	1.178,83	5,79%	1.178,83	5,79%	1.178,83	5,79%	786,95	4,81%
27	Kab. Batang	345,47	7,51%	345,47	7,51%	345,47	7,51%	155,43	4,64%
28	Kab. Brebes	1.185,43	9,62%	1.185,43	9,62%	1.185,43	9,62%	941,56	4,79%
29	Kab. Cilacap	1.677,33	6,48%	1.677,33	6,48%	1.677,33	6,48%	993,02	6,06%
30	Kota Pekalongan	294,91	6,35%	294,91	6,35%	294,91	6,35%	294,91	6,35%
31	Kota Tegal	592,9	15,12%	592,9	15,12%	592,9	15,12%	592,90	15,12%
32	Kab Pekalongan	196,09	3,89%	120,17	4,53%	120,17	4,53%	120,17	4,53%

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%
33	Kab. Pemalang	1.267,67	16,72%	1.267,67	16,72%	1.267,67	16,72%	473,62	3,71%
34	Kab. Purbalingga	164,49	5,89%	164,49	5,89%	164,49	5,89%	164,49	5,89%
35	Kab. Tegal	377,46	5,70%	377,46	5,70%	203,53	6,97%	203,53	6,97%
36	Jumlah Provinsi Jawa Tengah	23.288,76	7,49%	23.858,66	7,91%	21.958,15	7,86%	16.848,93	5,76%

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasn teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penatan ruang pada tahun 2023.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.141.

Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat/Kategori	Peringkat
Kota Semarang	97,5	Baik	1
Kota Tegal	97	Baik	2
Kabupaten Batang	95,5	Baik	3
Kabupaten Pati	95,5	Baik	3
Kabupaten Temanggung	94,67	Baik	4
Kabupaten Sukoharjo	93,38	Baik	5
Kabupaten Brebes	93	Baik	6

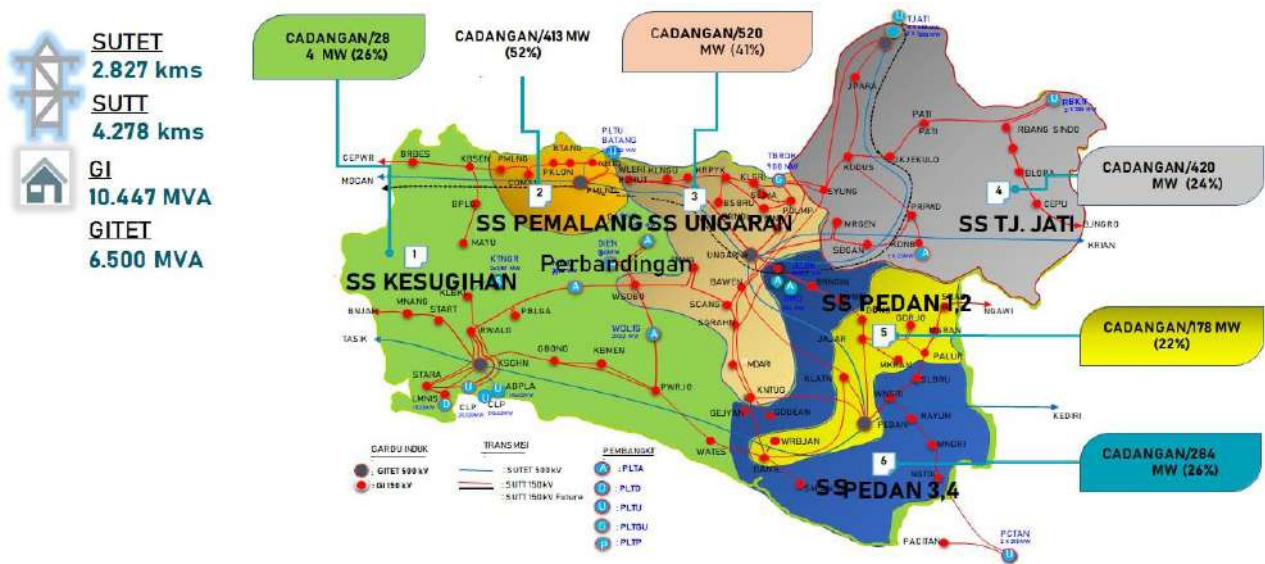
Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat/Kategori	Peringkat
Kota Pekalongan	90,25	Baik	7
Kabupaten Banyumas	89,92	Baik	8
Kota Salatiga	88,32	Baik	9
Kabupaten Jepara	87,27	Baik	10
Kabupaten Klaten	83,13	Baik	11
Kabupaten Rembang	82,42	Baik	12
Kabupaten Purworejo	82,24	Baik	13
Kabupaten Purbalingga	82,13	Baik	14
Kabupaten Cilacap	81,82	Baik	15
Kabupaten Demak	81,25	Baik	16
Kabupaten Blora	80,25	Baik	17
Kabupaten Tegal	79,25	Sedang	18
Kabupaten Pekalongan	77,6	Sedang	19
Kabupaten Boyolali	77,23	Sedang	20
Kabupaten Kebumen	77,17	Sedang	21
Kota Magelang	75,54	Sedang	22
Kota Surakarta	74,38	Sedang	23
Kabupaten Grobogan	71,96	Sedang	24
Kabupaten Sragen	71,08	Sedang	25
Kabupaten Pemalang	70,17	Sedang	26
Kabupaten Kendal	67,54	Sedang	27
Kabupaten Wonosobo	64,54	Sedang	28
Kabupaten Magelang	62,67	Sedang	29
Kabupaten Banjarnegara	61,7	Sedang	30
Kabupaten Wonogiri	58,59	Sedang	31
Kabupaten Semarang	56,46	Sedang	32
Kabupaten Karanganyar	53,88	Sedang	33
Kabupaten Kudus	34,17	Buruk	34

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

2.5.3.Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau berlistrik mandiri (*Isolated*). Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak dengan kapasitas sebesar 2 x 2,2 MW sehingga pada tahun 2016 penduduk di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam. Selain itu berdasarkan nota kesepahaman antara PLN dan Pemkab Jepara tentang pengalihan pengelolaan kelistrikan di Pulau Karimunjawa pada tanggal 21 Juli 2022, pengelolaan kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa telah di ambil alih PLN. Pulau Parang disupply oleh PLTS eksisting sebesar 135,8 KWp dan diesel 350 KVA, melayani pelanggan sebanyak 342KK. Pulau Nyamuk dengan kapasitas PLTS 111KWp dan diesel 100KVA melistriki 177KK serta Pulau Genting disupply oleh

PLTS sebesar 36 KWp dan diesel 30KVA mampu menghidupkan listrik 86 KK. Rencana pada tahun 2023 PLN melalui program *dedieselisasi*, untuk ketiga pulau tersebut akan dilakukan penambahan kapasitas PLTS dengan rincian Pulau Parang sebesar 645KWp, Pulau Nyamuk sebesar 345KWp dan Pulau Genting sebesar 155KWp. Diharapkan setelah dilakukan penambahan kapasitas PLN, maka diesel sudah tidak digunakan lagi dan 3 pulau tersebut menggunakan *green energy*. Karimunjawa diharapkan menuju *Green Tourism* di Jawa Tengah.



Sumber: PLN , 2022

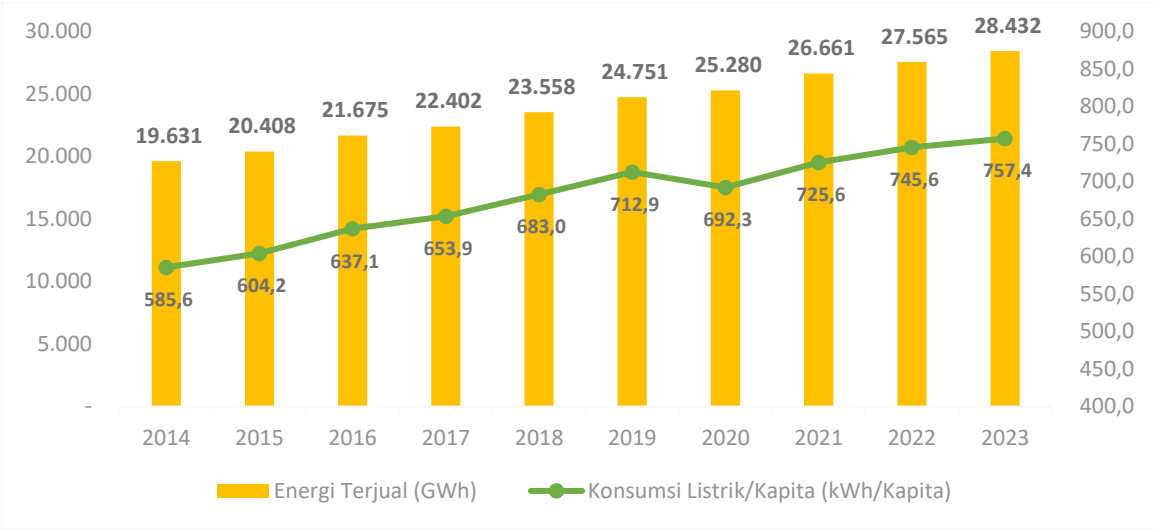
Gambar 2.76.
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY

Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem (SS), antara lain : Subsistem Ungaran 1-2, Subsistem Pedan 1-2, Subsistem Pedan 3-4, SubsistemTanjung Jati, Subsistem Kesugihan, dan Subsistem Pemalang. Beban Puncak Sistem Jateng dan DIY sebesar 4851 MW dengan reserve power sebesar 2621 MW.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah selesai dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Program Listrik 35.000 MW secara nasional. Progress pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- 1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x1000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 1 pada 15 Agustus 2022 dan Unit 2 pada 31 Agustus 2022;
- 2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 dan 6 (2x1.000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 5 pada 17 Maret 2022 dan Unit 6 pada 30 September 2022;
- 3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW): *overall progress* 100 persen sudah tahap *komisioning*; rencana COD pada Februari 2024.

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2014 hingga 2023 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 28.432 GWh pada tahun 2023.



Sumber: Statistik PLN, BPS diolah, 2023

Gambar 2.77.
Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2023 (GWh)

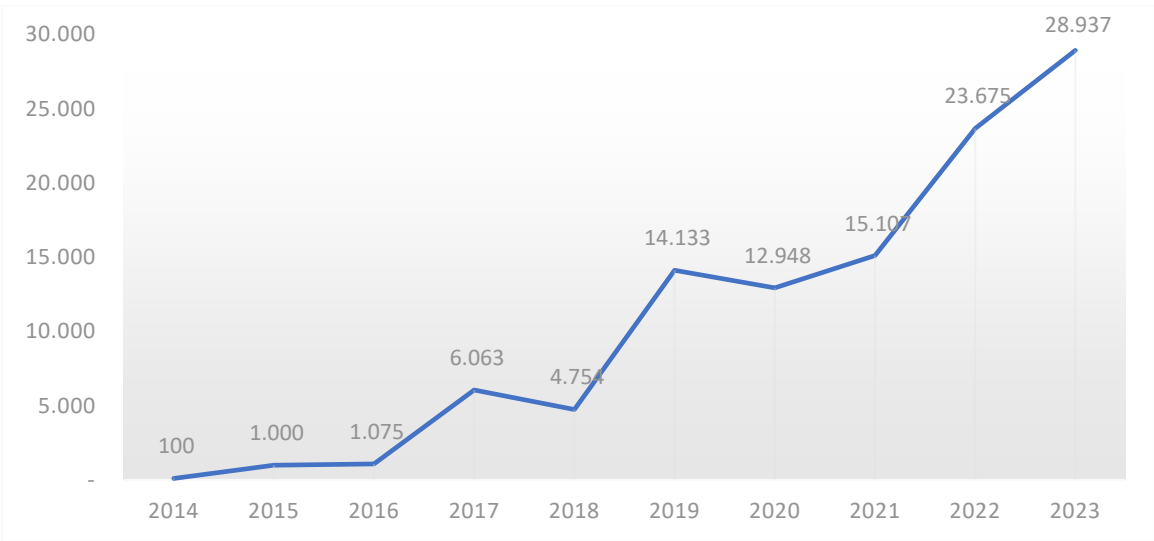
Selain itu peningkatan kebutuhan energi listrik juga terlihat dari Konsumsi listrik per kapita. Selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2023 mengalami trend peningkatan dari 585,6 menjadi 757,4 kWh per Kapita. Konsumsi listrik perkapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Konsumsi Listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Mendorong dan meningkatkan *demand* listrik tidak hanya mendorong pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif tetapi utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2020 telah mencapai 99,99% dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100%. Berdasarkan data RE masih terdapat 0,01 persen KK belum memiliki listrik secara mandiri. KK belum berlistrik tersebut sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis yang telah dimulai sejak Tahun 2014. Jumlah pemasangan sambungan listrik gratis hingga Tahun 2022 sejumlah 78.955 unit rumah tersambung listrik. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142.
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,91	99,99	99,99	99,99	99,99
2.	Sambungan Listrik Gratis kumulatif (Unit)	27.225	40.173	55.280	78.955	107.892

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.



Sumber: PLN, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.78.

Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 (Unit)

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen yaitu menunjukkan bahwa antara daya terpasang sesuai dengan jumlah kebutuhan listrik.

Tabel 2.143.

Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.365	7.203	7.203	9.200	9.200
2	Kebutuhan Listrik (MW)	5.480	5.588	5.720	6.306	6.044
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka)	1,16	1,29	1,26	1,46	1,52

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki *reserve margin*/cadangan sebesar 52%. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park (KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, Jatengland *Industrial Park* Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Tantangan Ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Hal tersebut terlihat dari jumlah persentase penggunaan energi fosil sebesar 84,02 persen pada tahun 2023 yang berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju

energi baru terbarukan ada dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah mentargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak punya *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan.

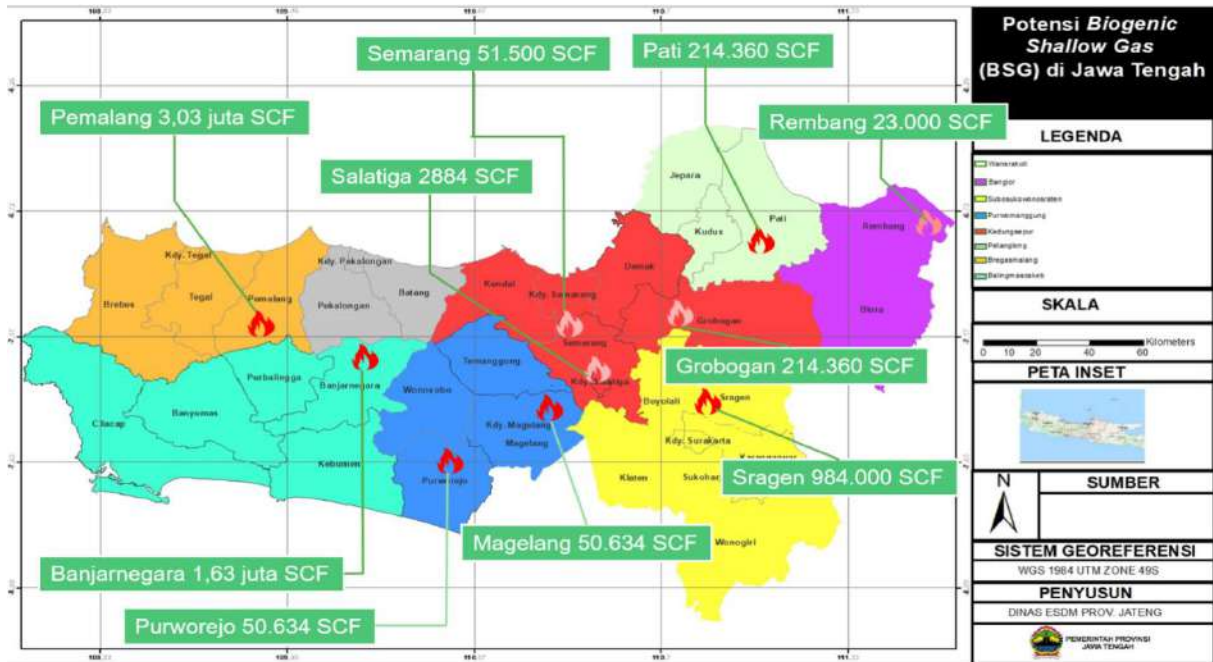
Walaupun penggunaan energi fosil masih relatif tinggi tetapi penggunaan EBT menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi, hingga akhir Tahun 2023 telah mencapai 15,98% dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,01%. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy* (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Peta Potensi EBT di Jateng dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan IESR 2022

Gambar 2.79.
Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah

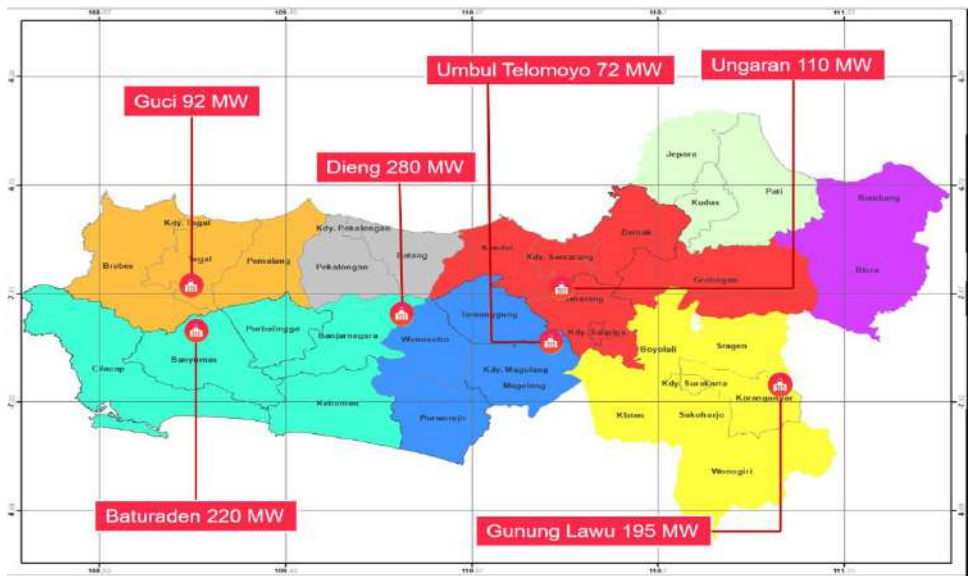
Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Jawa Tengah mencapai 723,07 MWp. Dua Bendungan dengan potensi terbesar adalah Kedung Ombo dan Gajahmungkur. Kedua bendungan tersebut telah masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030 sebagai pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.80.
Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Provinsi Jawa Tengah

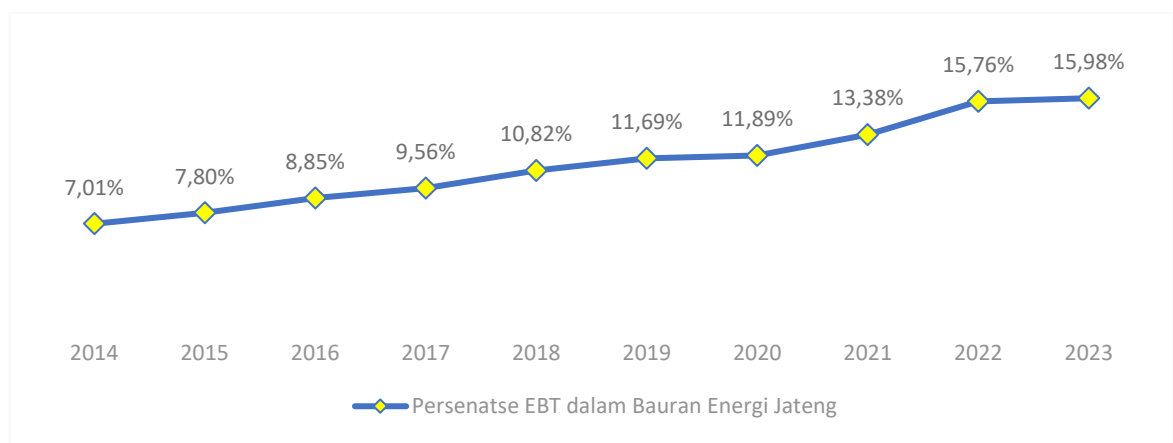
Total potensi BSG yang diketahui di Jawa Tengah adalah sekitar 14,47 juta SCF (*Standart Cubic Feet*). Potensi terbesar terpetakan di Kabupaten Pemalang dengan 3,03 juta SCF dan terendah dideteksi di Kota Salatiga sebesar 2.884 SCF. Potensi lainnya tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan variasi besaran potensi cadangan gas rawa (lihat gambar Peta Potensi BSG). Potensi yang besar dapat menjadikan pergeseran gas rawa sebagai sumber energi primer yang dapat secara langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Bentuk optimalisasi sumber daya gas rawa ini, terlihat pada kegiatan pembangunan infrastruktur instalasi gas rawa (*biogenic shallow gas*) di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini telah tersebar pada 6 titik lokasi di 4 kabupaten dengan jumlah jangkauan sambungan sebanyak 340 sambungan rumah.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Gambar 2.81.
Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah

Jawa Tengah juga memiliki potensi panas bumi cukup besar. Potensi panas bumi yang diperkirakan dapat dikembangkan di Jawa Tengah mencapai 1.981 MW. Potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan di Jawa Tengah sebagai pembangkit adalah di PLTPanas Bumi Dieng dengan kapasitas 70 MW. Baru 3,53 % yang telah termanfaatakan dari total potensi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik berbasis EBT di Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan pemanfaatan EBT ini, maka diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dapat ditekan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan emisi GRK sektor energi dari 24.512 tCO₂e pada tahun 2019 menjadi 123.401 tCO₂e tahun 2023 adalah melalui pembangunan infrastruktur EBT. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2023 sebagai berikut:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.82.
Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2023

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat

dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah. Capaian Desa Mandiri Energi (DME) sampai dengan tahun 2023 sejumlah 2.422 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi maupun Hemat Energi dan Air perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan EBT di desa tersebut.

Pengembangan suatu wilayah dan pembangunan di berbagai sektor akan mempengaruhi keberadaan air tanah dan siklus air tanah. Penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan potensi air tanah semakin berkurang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung menurun secara fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020, sedangkan pada tahun 2023 meningkat.

Tabel 2.144.
Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 - 2023

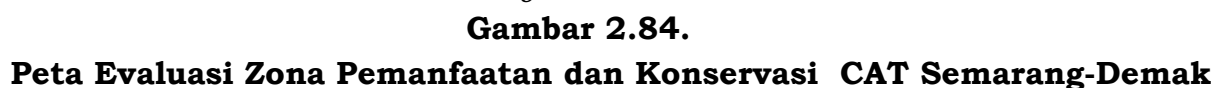
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah potensi aman pengambilan air tanah	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750
Jumlah pengambilan air tanah	263.724.945	269.109.632	228.463.997	223.483.855	218.134.508
Indeks Ketersediaan Air Tanah	3,08	3,05	3,59	3,67	3,76

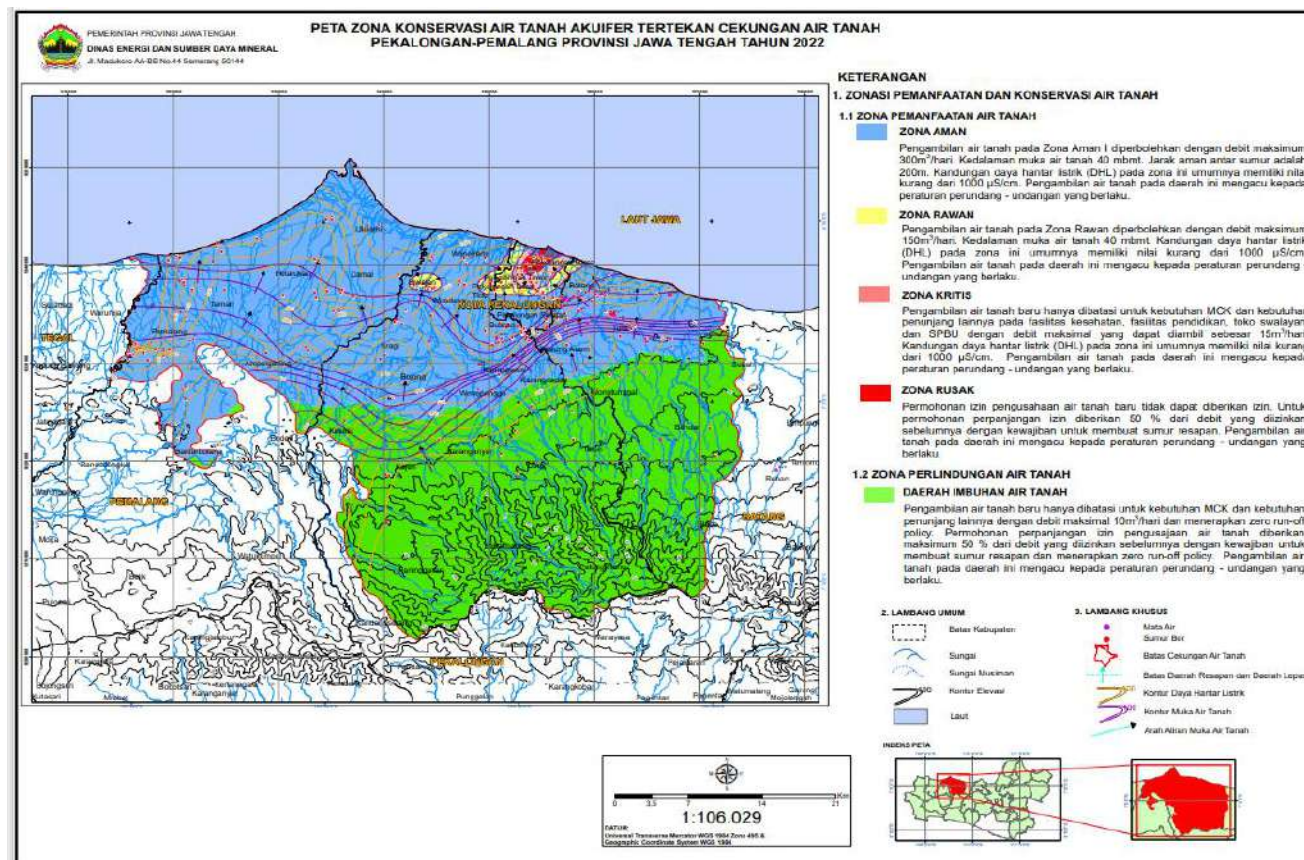
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023

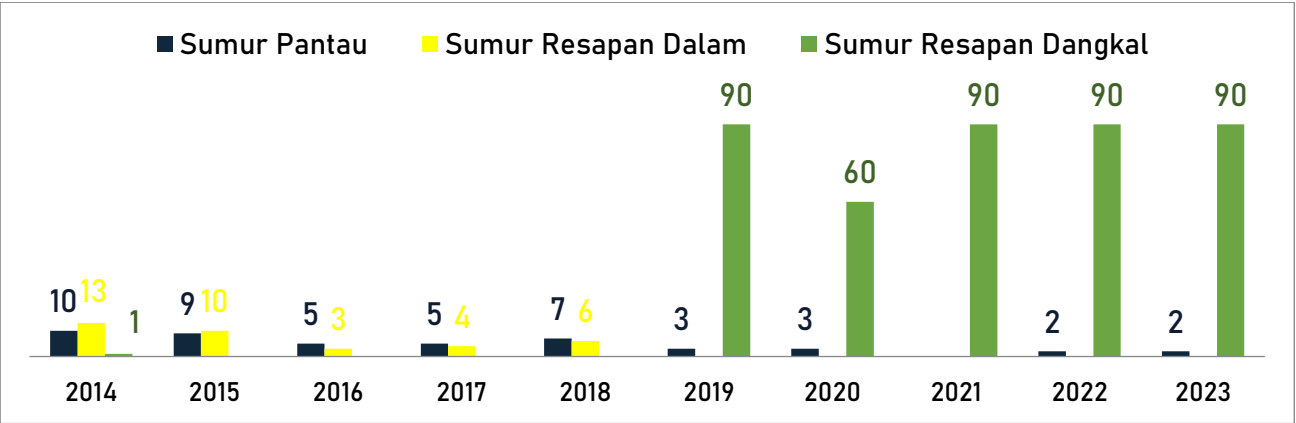
Berdasarkan tabel di atas kecenderungan ketersediaan air tanah meningkat, yang menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku yang bersumber dari air permukaan bisa dikatakan juga meningkat. Pada 25 Cekungan Air Tanah di Jawa Tengah yang berada di CAT dalam Provinsi, 21 CAT telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi, berdasarkan Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah. Zona Konservasi Air Tanah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu zona imbuhan air tanah, zona aman, zona rawan, zona kritis, zona rusak. Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi tahun 2022 Dari 21 CAT yang telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi air tanah, terdapat 3 CAT yang masuk zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. 3 CAT yang terdapat Zona Kritis adalah pada CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan 2 CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- [illegible]

Gambar 2.83.
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah







Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2023

Gambar 2.86.
Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah

2.5.4. Penanggulangan Bencana

1) Wilayah Rawan Bencana

a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendahnya suatu wilayah oleh air yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha. Kawasan berpotensi bahaya banjir dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.87.
Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah

Dalam peta bahaya banjir dapat kita peroleh potensi bahaya banjir dengan cakupan wilayah terluas dalam satuan Hektar. Dari tingkatan bahaya rendah terdapat Kabupaten Cilacap dengan potensi bahaya banjir mencapai luasan 2.384 Ha, tingkatan bahaya sedang adalah Kabupaten grobogan dengan luasan bahaya banjir mencapai 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha. Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat bahaya banjir sedang yaitu Kabupaten Purbalingga, Karanganyar dan Kota Surakarta.

b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang. Kawasan berpotensi bahaya banjir bandang dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

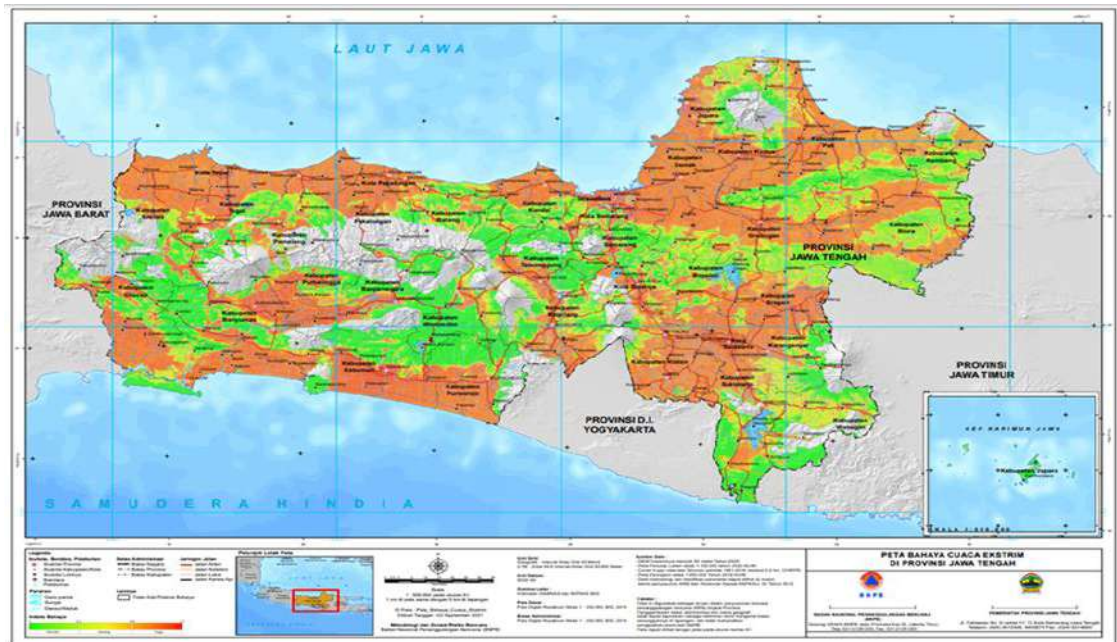
Gambar 2.88.
Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas 32.757 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada peta di bawah menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah seluas 2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 1.510.033 Ha. Kawasan berpotensi bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.89.

Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Kawasan berpotensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.90.

Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari gambar di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Jepara dengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhnya batuan. Gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap

bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempa bumi. Kawasan berpotensi bahaya gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.91.

Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah

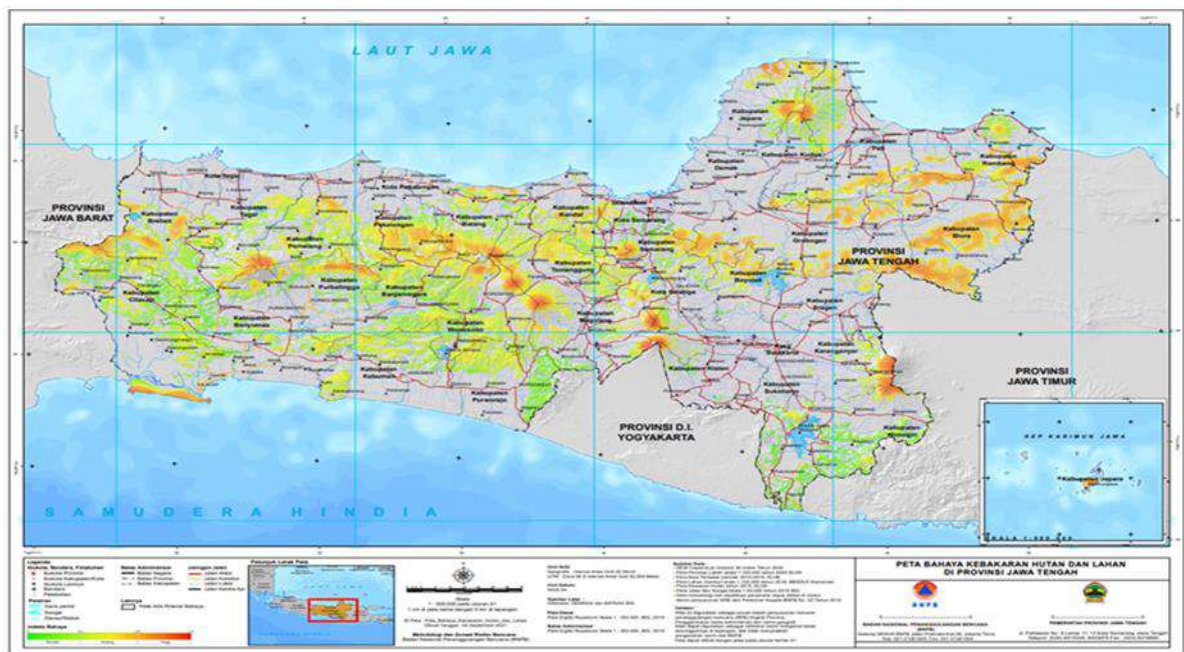
Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya gempa bumi tersebut dirinci

menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan

(karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla. Kawasan berpotensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.92.

Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora, Batang, Boyolali, Karanganyar, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Temanggung, Wonosobo. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 963.331 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan,

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010.

Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Kawasan berpotensi bahaya kekeringan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.93.

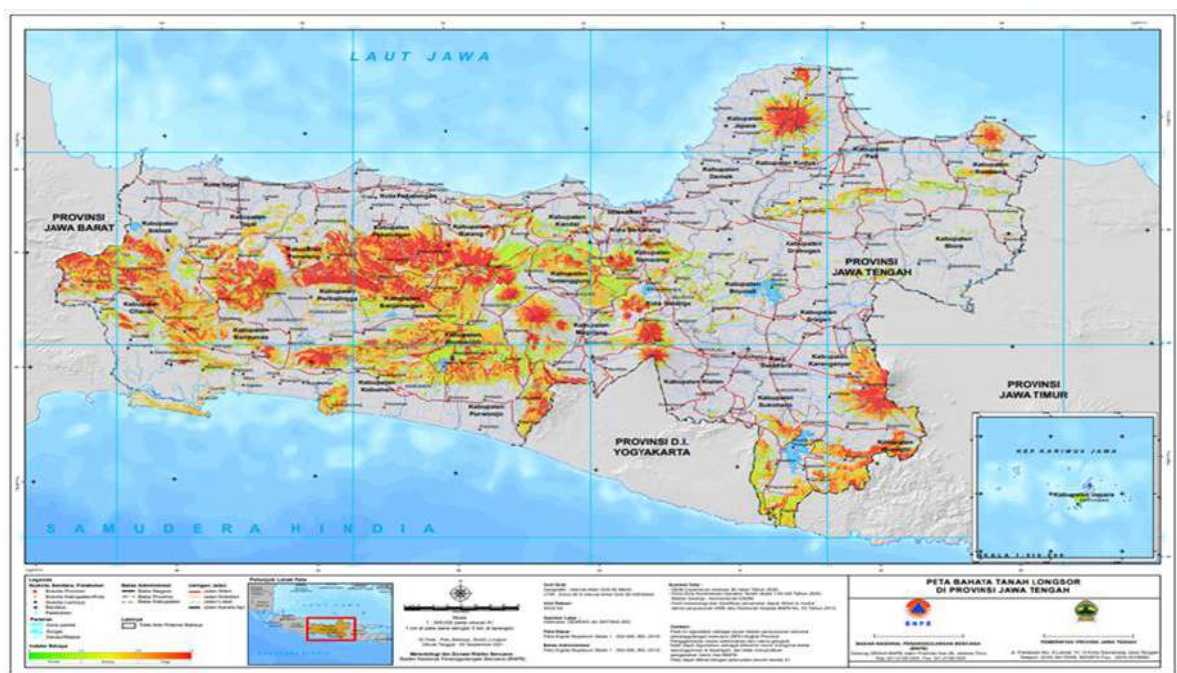
Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas 2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana

tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Kawasan berpotensi bahaya tanah longsor dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.94.

Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 1.020.772 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi *inundasi* (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inondasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kejadian tsunami di Jawa Tengah pada umumnya tidak terjadi secara langsung, namun Jawa Tengah merupakan daerah yang terpengaruh dan terimbas tsunami.

Kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa relatif tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kejadian tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 yang terjadi di daerah Pangandaran dan sekitarnya hingga pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan berpotensi bahaya tsunami di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.95.
Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah

Pantai Selatan Jawa merupakan kawasan yang rawan tsunami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di daerah tersebut bersinggungan langsung dengan jalur lempeng yang sering terjadi gempa bumi. Berdasarkan letak wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah (berbatasan dengan Samudera Indonesia) daerah yang rawan terjadi tsunami, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi

Epidemi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.96.
Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah

Sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kawasan berpotensi bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.97.

Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

1) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

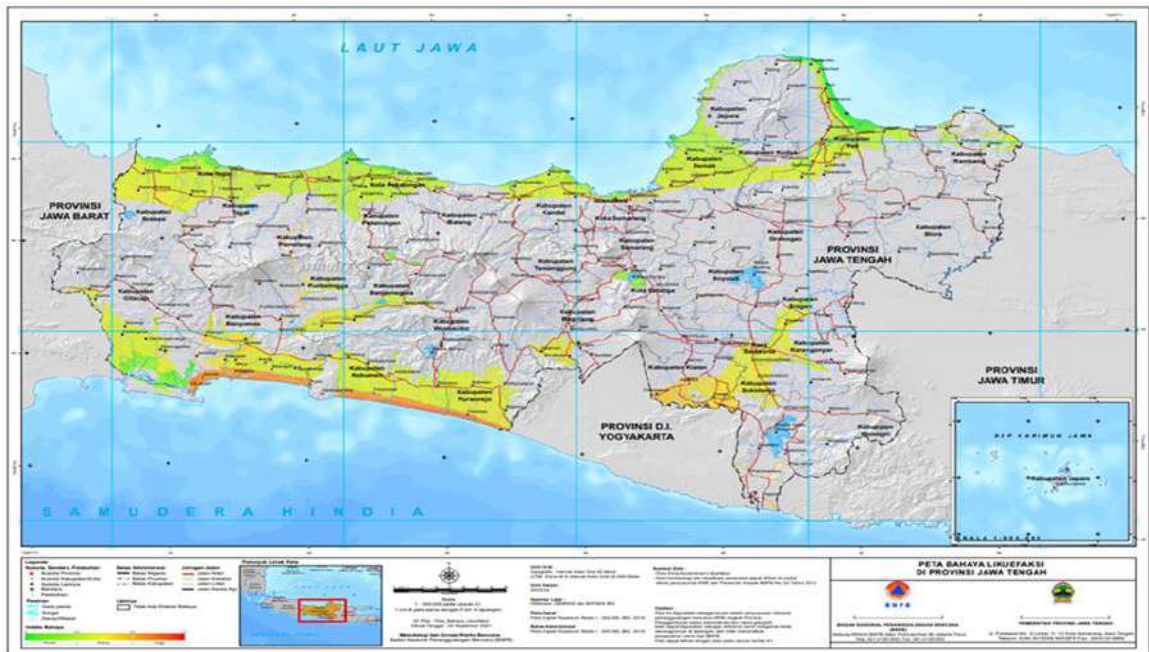
Gambar 2.98.

Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuifaksi

Likuifaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.99.

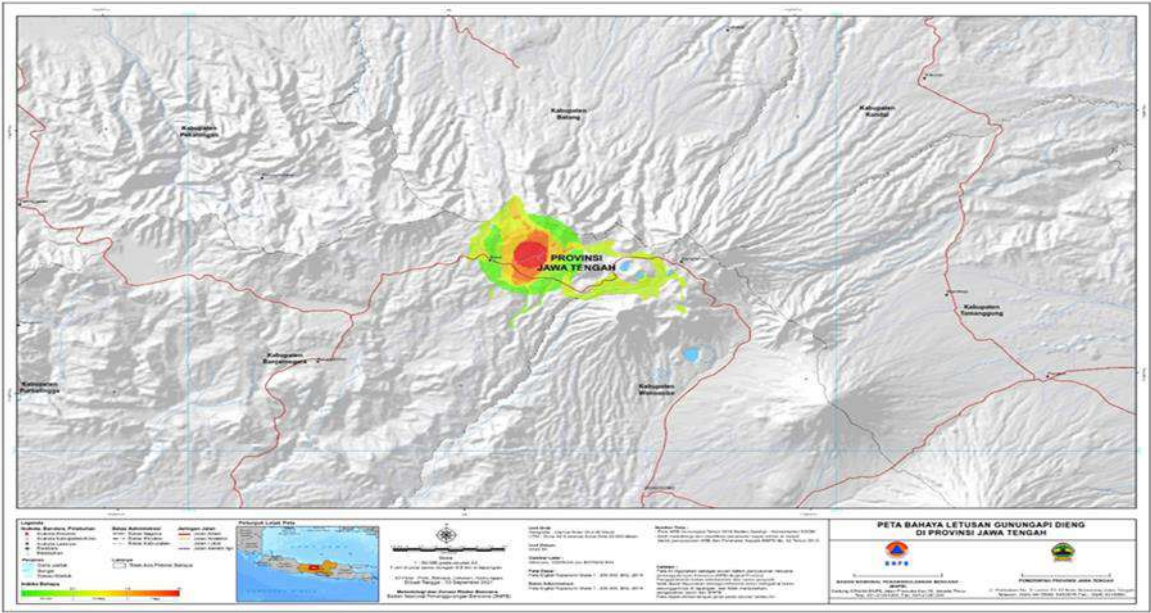
Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah

Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuifaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuifaksi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 729.062 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuifaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuifaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi pada kelas rendah dengan luas 15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas 16.881 Ha adalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi

Gunungapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

- (1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.816 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



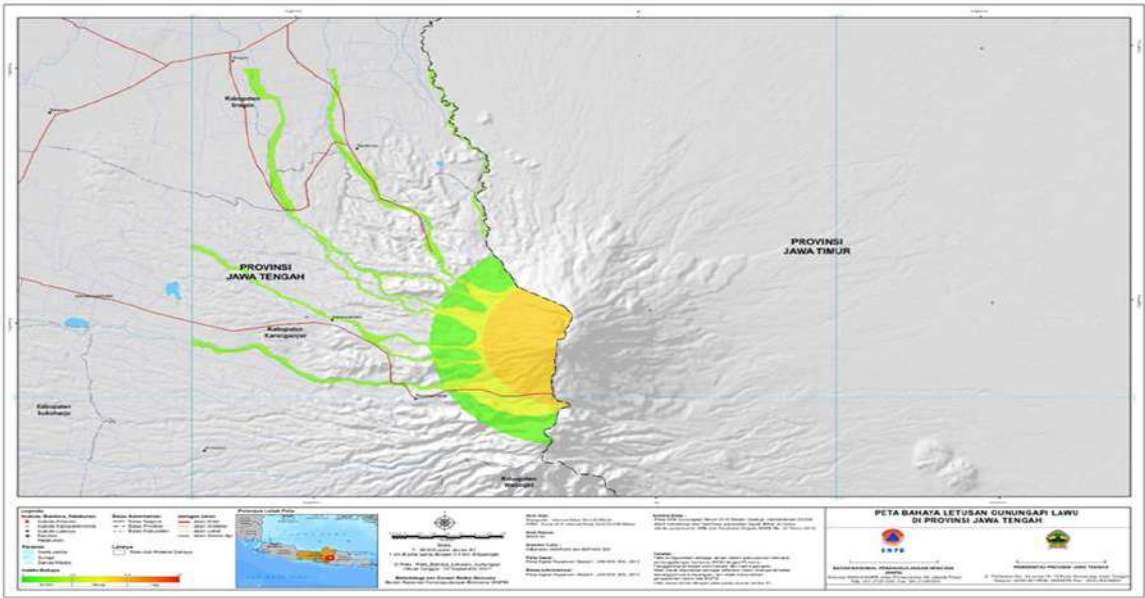
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.100.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng

Luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah seluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah10.116Hadan berada pada kelas Sedang. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



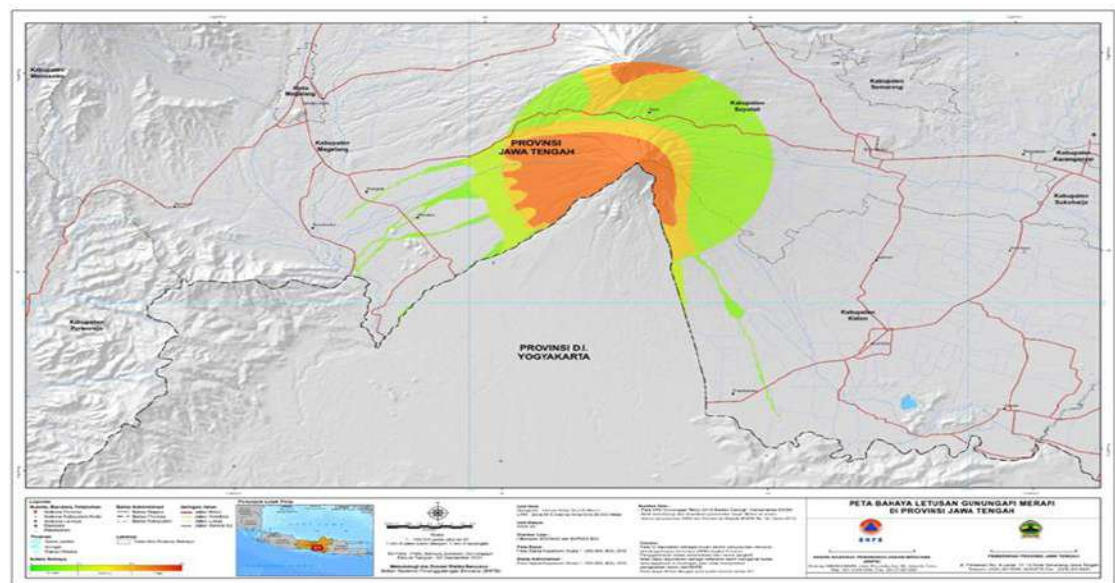
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.101.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas sedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

- (3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



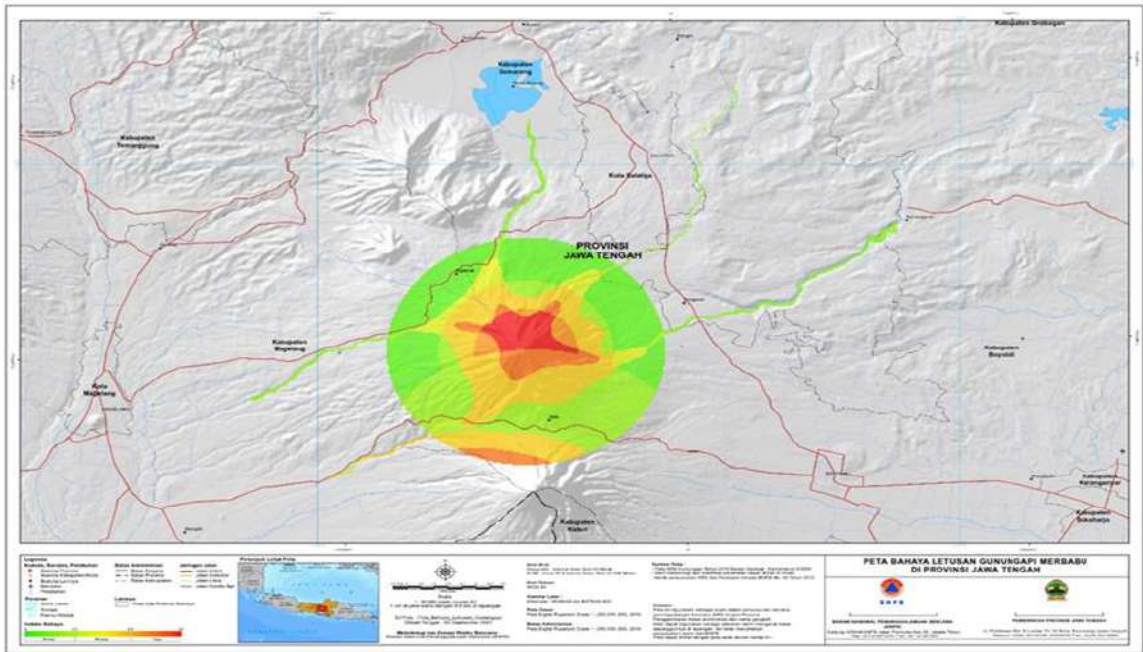
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.102.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi

Berdasarkan peta diatas luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Ha adalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

- (4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 19.819Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

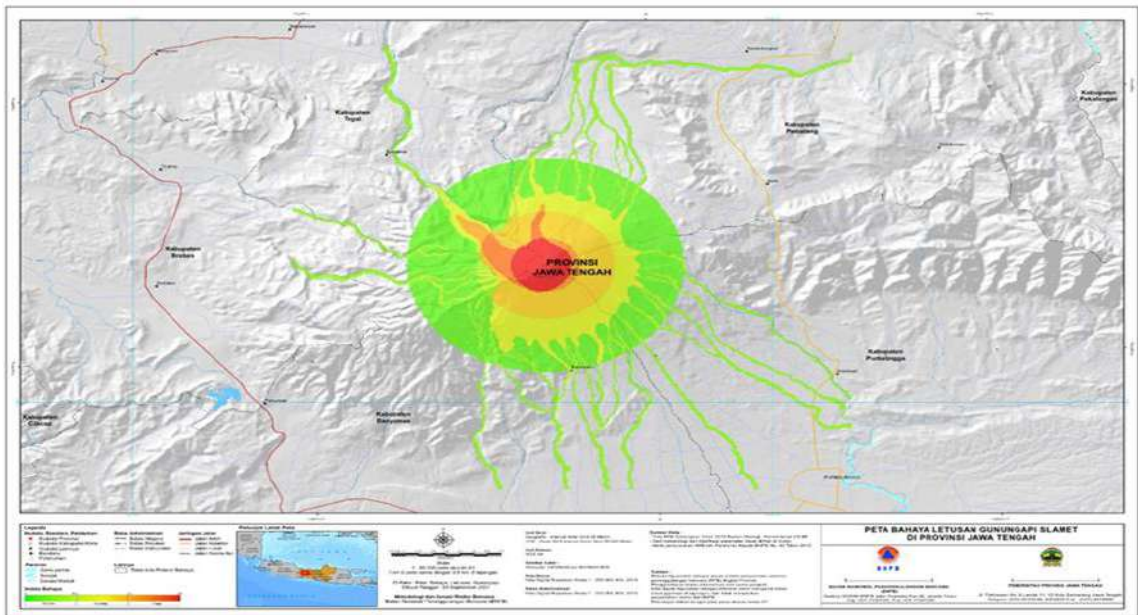


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.103.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 11.474Ha, kelas sedang seluas 5.820 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790 Ha, kelas sedang seluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

- (5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

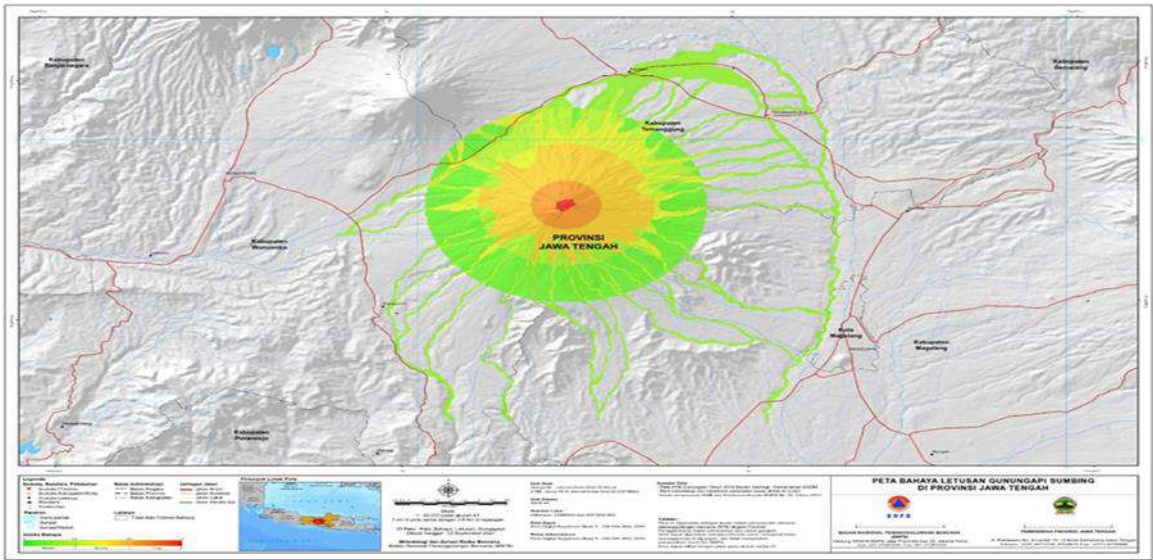


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.104.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet

Berdasarkan peta tersebut luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905 Ha dan kelas sedang seluas 2.533 Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pemasang.

- (6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



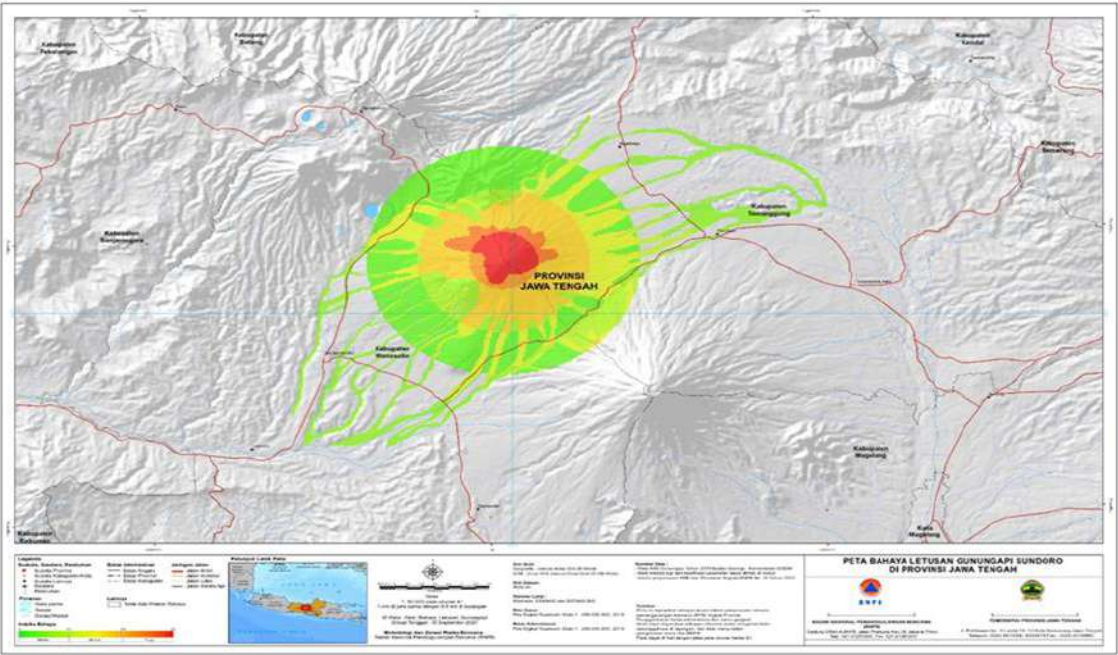
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.105.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing

Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 16.553 Ha, kelas sedang seluas 7.876 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas 6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

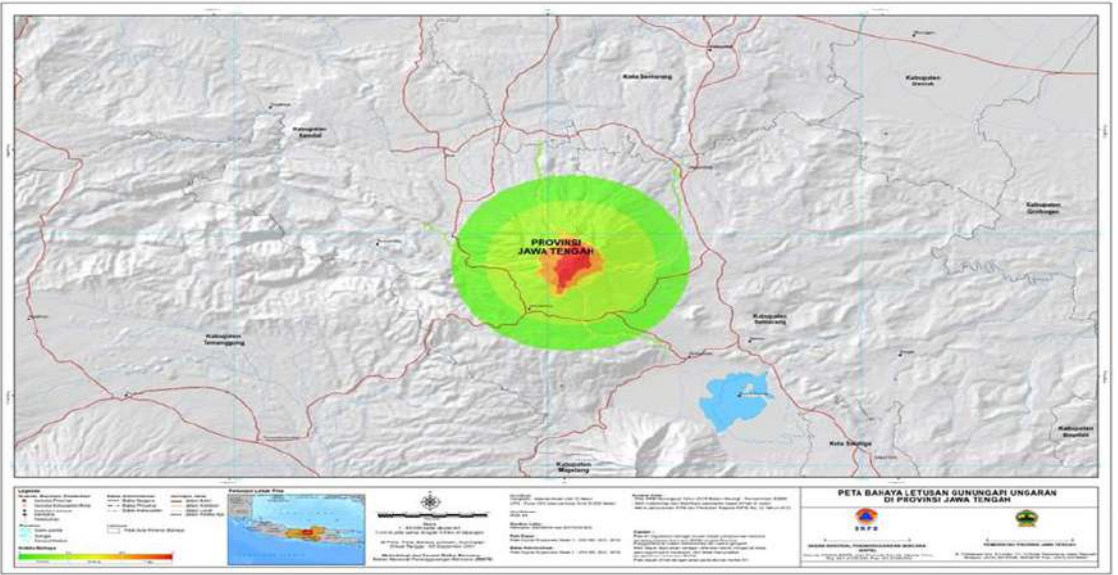
- (7) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.106.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro

- (8) Luas bahaya Letusan Gunungapi Sindoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sindoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas sedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.
- (9) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan seluas 15.404 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.107.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran

Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.145.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Banjarnegara	14	12	12	22	46
2	Banyumas	30	1	9	35	45
3	Batang	14	1	1	24	26
4	Blora	14	7	1	29	37
5	Boyolali	6	-	-	-	0
6	Brebes	17	1	1	22	24
7	Cilacap	55	69	28	179	276
8	Demak	13	10	1	603	614
9	Grobogan	30	1	1	101	103
10	Jepara	31	1	5	109	115
11	Karanganyar	17	6	7	27	40
12	Kebumen	11	-	5	37	42
13	Kendal	14	1	5	30	36
14	Klaten	98	24	12	32	68
15	Kota Magelang	3	-	-	-	-
16	Kota Pekalongan	11	-	1	-	1
17	Kota Salatiga	7	-	4	-	4
18	Kota Semarang	51	28	15	61	104
19	Kota Surakarta	13	-	-	9	9
20	Kota Tegal	10	-	-	-	-
21	Kudus	60		5	1	6
22	Magelang	81	1	5	86	92
23	Pati	16	-	-	3	3
24	Pekalongan	10	-	-	6	6
25	Pemalang	11	-	-	50	50
26	Purbalingga	15	3	9	47	59
27	Purworejo	31	1	-	56	57
28	Rembang	9	1	-	1	2
29	Semarang	53	3	-	1	4
30	Sragen	55	4	-	242	246
31	Sukoharjo	31	1		56	57
32	Tegal	16	4	2	7	13
33	Temanggung	38	17	15	140	172
34	Wonogiri	35	5	58	209	272
35	Wonosobo	18	9	48	223	280
	TOTAL	946	210	257	2.407	2.874

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 2.396 kejadian di tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2023 dengan 2.874 kejadian. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin topan. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.146.
Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019– 2023

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angin topan	706	629	439	671	11□
2	Banjir	171	459	242	374	1□1
3	Gas beracun	0	2	0	0	0
4	Gempa bumi	5	2	5	4	12
5	Kebakaran	718	356	229	312	4□1
6	Kekeringan	30	0	0	0	□4
7	Letusan gn.Api	2	12	5	1	□
8	Tanah longsor	18	387	0	1.010	12□
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	6	3	6	24	2□
Jumlah		1.356	2.870	1.753	2.396	946

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data TW II Tahun 2023.

Pada tahun 2023 jumlah kerugian akibat bencana maupun korban jiwa yang meninggal dunia maupun hilang dan luka - luka menurun secara signifikan dari 234 miliar rupiah di 2022 menjadi 7 miliar rupiah di 2023 serta 8 korban meninggal dunia,1 hilang, 20 luka berat dan 54 luka ringan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tabel 2.147.
Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2019	2.356	39	4	24	175
2020	2.909	32	3	15	91
2021	1.753	34	5	14	73
2022	2.440	22	2	27	100
2023	□4□	□	1	20	□4
Jumlah		166	18	97	563

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Taksiran kerugian pada tahun 2019 hingga 2023 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana kebakaran dengan

kerugian Rp217.955.599.000,- dan kerugian keseluruhan termasuk kebakaran pemukiman ditaksir sebesar Rp345.778.272.000,-.

Tabel 2.148.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Bencana	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	706	15.367.598	NA	5.469.095	437	4.288.779	671	6.267.966	115	1.585.200
2	Banjir	171	2.777.845	NA	32.798.305	242	44.106.000	374	2.367.000	132	412.500
3	Tanah Longsor	718	9.354.277	NA	16.806.207	740	7.098.159	1.010	7.052.281	126	2.473.680
4	Kekeringan	30	0	NA	0	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran	718	55.387.150	NA	18.779.138	229	52.965.785	312	217.955.599	491	690.600
6	Gempa Bumi	5	65.000	NA	0	5	0	4	0	0	1.115.000
7	Letusan Gunung Api	2	0	NA	0	5	0	1	0	0	0
8	Ombak Besar	6	0	NA	0	6	45.000	24	25.000	0	0
9	Lainnya	-	-	NA	0	46	131.687,50	44	581.000	0	0
Jumlah		2.356	82.951.870	2.870	73.582.747	1.753	108.823.410,5	2.440	234.248.846	946	6.276.980

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2023.



Sumber: BNPB, IRBI 2023

Gambar 2.108.
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2023 Provinsi Jawa Tengah pada urutan 5 dengan nilai skor 109.01 dengan kategori sedang.

Tabel 2.149.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Skor	Kategori
1	2019	144,91	Tinggi
2	2020	132,99	Sedang
3	2021	125,73	Sedang
4	2022	115,38	Sedang
5	2023	109,01	Sedang

Sumber: BNPB, IRBI 2022.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 155,35 dan urutan 122 Nasional. Capaian ini menurun signifikan dari capaian di tahun 2022 dengan skor 171,01 dan urutan 68 Nasional. Selain Brebes masih ada 2 Kabupaten lain dengan kelas risiko tinggi di tahun 2023 yaitu Kabupaten Pati dan Pekalongan.

Tabel 2.150.

Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	189.94	171.01	155.35	TINGGI
2	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	171.10	165.53	150.21	TINGGI
3	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	160.19	168.52	149.83	TINGGI
4	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	161.93	154.49	143.13	SEDANG
5	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	148.12	139.78	130.82	SEDANG
6	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	135.11	122.27	129.86	SEDANG
7	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	163.63	144.57	127.62	SEDANG
8	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	131.73	117.89	126.95	SEDANG
9	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	158.93	141.32	126.26	SEDANG
10	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	164.25	140.18	122.82	SEDANG
11	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	138.13	138.13	122.75	SEDANG
12	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	127.36	107.61	121.40	SEDANG
13	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	123.19	113.90	119.58	SEDANG
14	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	121.33	110.38	116.84	SEDANG
15	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	146.38	128.55	115.11	SEDANG
16	Sragen	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	133.75	126.18	114.91	SEDANG
17	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	114.67	102.05	110.78	SEDANG
18	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	130.32	130.32	110.06	SEDANG
19	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	108.03	91.51	102.77	SEDANG
20	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	102.08	SEDANG
21	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	108.63	103.49	99.41	SEDANG
22	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	105.21	103.88	97.71	SEDANG
23	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	124.77	108.91	97.24	SEDANG
24	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	131.66	111.59	97.03	SEDANG
25	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	112.75	103.72	96.93	SEDANG
26	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	105.36	94.56	94.56	SEDANG
27	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	99.24	82.18	94.09	SEDANG
28	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	100.40	97.90	91.74	SEDANG
29	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	119.71	102.40	90.23	SEDANG
30	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	118.89	101.79	89.67	SEDANG
31	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	71.16	77.90	86.49	SEDANG
32	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	90.89	83.98	SEDANG
33	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	102.83	87.55	76.24	SEDANG
34	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	81.29	71.27	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	67.96	57.17	49.50	SEDANG

Sumber: BNPB, IRBI 2023.

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2023, telah terpasang sebanyak 93 unit peralatan EWS dan 417 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.151.
Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2019	15	-	75	230
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347
2022	3	-	89	377
2023	4	-	93	417

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 189 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.152.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2019 – 2023

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2019	18	92 desa
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa
2023	57	189 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dan berperan serta dalam pemulihan pasca bencana melalui pemberian bantuan akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014. Dari 2019 hingga 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya membantu korban bencana meliputi rumah atau tempat

usaha, rumah ibadah dan sarana prasarana yang musnah/terbakar habis atau roboh yang datanya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.153.

Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
1	2019	9	277	34	4.495.000.000
2	2020	7	60	18	1.080.000.000
3	2021	7	206	122	4.310.000.000
4	2022	4	9	120	1.335.000.000
5	2023	5	22	31	480,000,000
	Total	32	574	325	11.700.000.000

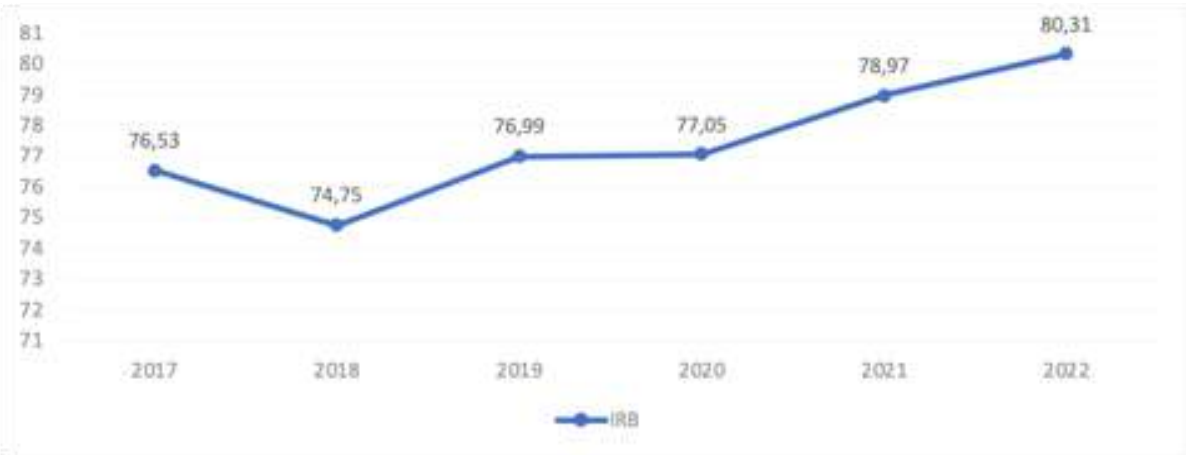
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.6. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan diukur dengan salah satunya adalah indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian pada tahun 2022 mencapai angka 80,31, meningkat 1,34 dari tahun 2021 yang sebesar 78,97. Jika dilihat secara 5 tahun, kinerja Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan *roadmap* nasional.



Sumber: Kemenpan RB, 2023

Gambar 2.109.

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Salah satu komponen yang mendukung capaian reformasi birokrasi adalah hasil antara. Terdapat beberapa hasil antara yang memerlukan perhatian karena tidak mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan pengadaan barang jasa. Hal tersebut mengindikasikan adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola sektor tersebut, baik dalam hal kinerja atau tertib administrasinya.

Tabel 2.154.
Catatan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 - 2023

No	Hasil Antara	2021	2022	2023
1	Kualitas Kebijakan	37,97	35,65	n.a
2	ASN Profesional	51,85	54,56	n.a
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,74	3,34	n.a
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	78,88	65,70	n.a
5	Kualitas Pelayanan Publik	4,48	4,54	n.a
6	Kapabilitas APIP	3	3	n.a
7	Maturitas SPIP	2	3	n.a
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	73,49	93,14	n.a
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	91,31	93,45	n.a
10	Reformasi Hukum	-	76,25	n.a

Sumber: Kemenpan RB, 2023

- Adapun menurut catatan hasil evaluasi dari Kemenpan RB diatas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Jawa Tengah yaitu:
- a. Memperkuat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengawal capaian makro dan menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak;
 - b. Mengoptimalikan digitalisasi reformasi birokrasi dan budaya berAkhlak;
 - c. Menetapkan arah pembangunan reformasi birokrasi ke depan sesuai dengan isu prioritas yang akan diselesaikan;
 - d. Memperkuat komponen hasil antara yang kurang baik;
 - e. Memperkuat performance based budgeting melalui formalisasi dan pengacuan kebijakan TPP;
 - f. Optimalisasi peran Pemerintah Provinsi sebagai pendamping Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implemetnasi reformasi birokrasi berdampak.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang

kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

2.6.2 Pelayanan Publik

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

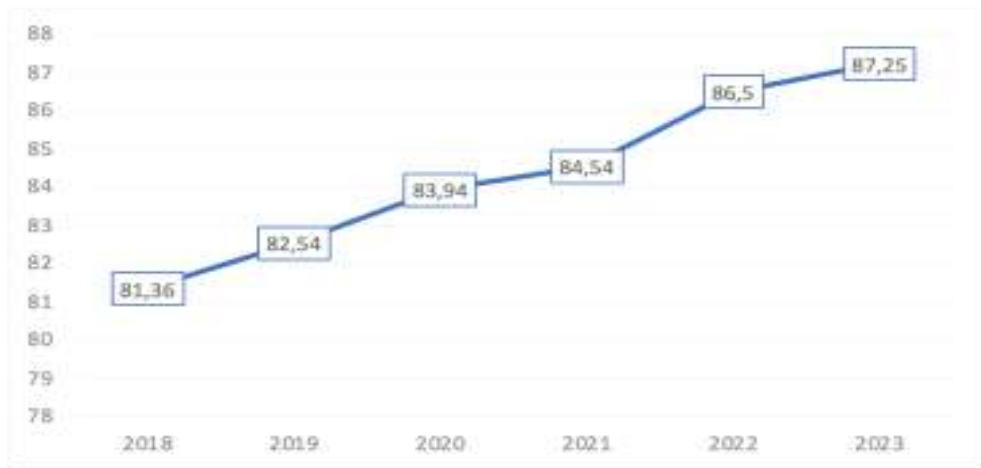
Kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB melalui proses yang disebut Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP). PEKPP dilakukan secara tahunan oleh KemenPAN-RB dengan metode sampling unit pelayanan publik (UPP) yang mewakili sektor pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu PEKPP juga dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sampling yang lebih luas dimaksudkan sebagai sarana pembinaan disamping sarana evaluasi. Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik melalui 6 aspek yaitu 1) aspek kebijakan pelayanan, 2) aspek profesionalisme SDM, 3) aspek sarpras, 4) aspek system informasi pelayanan publik, 5) aspek konsultasi dan pengaduan, dan 6) aspek inovasi.

Capaian kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Jika dilihat perkembangan nilai awal tahun 2018 yang sebesar 4,22 dan nilai akhir 2023 sebesar 4,11, pelayanan publik di Jawa Tengah diketahui memiliki kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Kelemahan tersebut terindikasi terdapat pada sektor pelayanan barang yang dinilai melalui sample Dinas Sosial dengan nilai indeks sebesar 3,65. Hasil penilaian ini menunjukkan perlunya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan strategi dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Tabel 2.155.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

IPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Tengah	4,22	4,46	4,45	4,48	4,54	4,11
OPD sample						
RSUD Provinsi	4,72	4,74	n/a	n/a	n/a	4,66
PTSP Provinsi	4,11	4,3	4,41	4,46	4,56	n/a
Bapenda/Samsat	3,84	4,33	4,49	4,5	4,51	4,01
Dinas Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,65

Selain IPP yang mengukur dari segi *supply* atau penyedia layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk melengkapi informasi dari sisi *demand* atau pengguna. Indeks ini diukut melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 IKM terus mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini menunjukkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik yang terekam melalui SKM menunjukkan peningkatan penerimaan yang positif.



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.110.

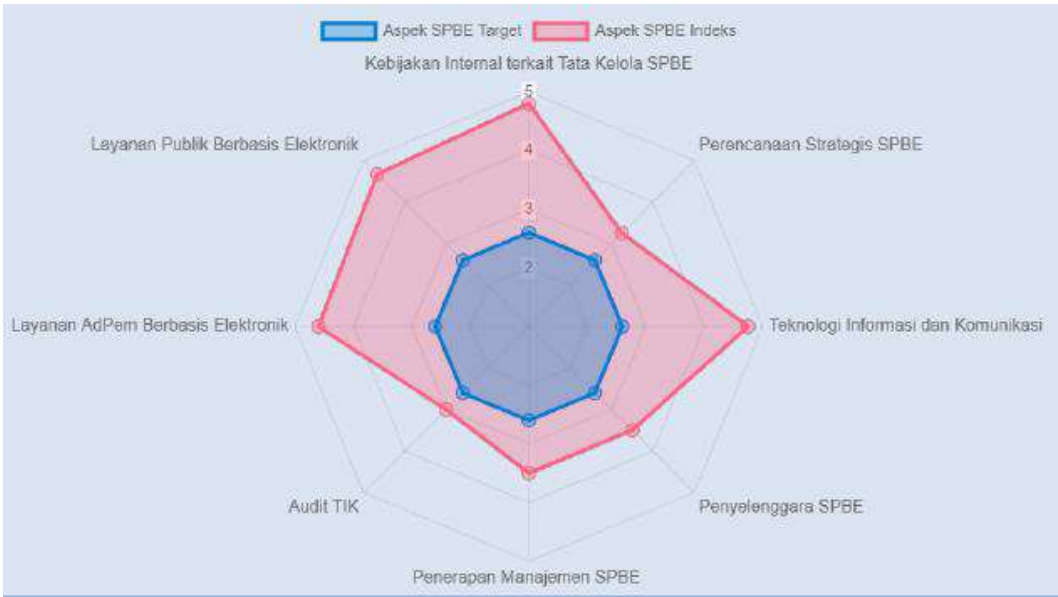
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

2.6.3 Demokrasi

Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, akses masyarakat terhadap informasi publik, serta anti monopoli sumber daya ekonomi

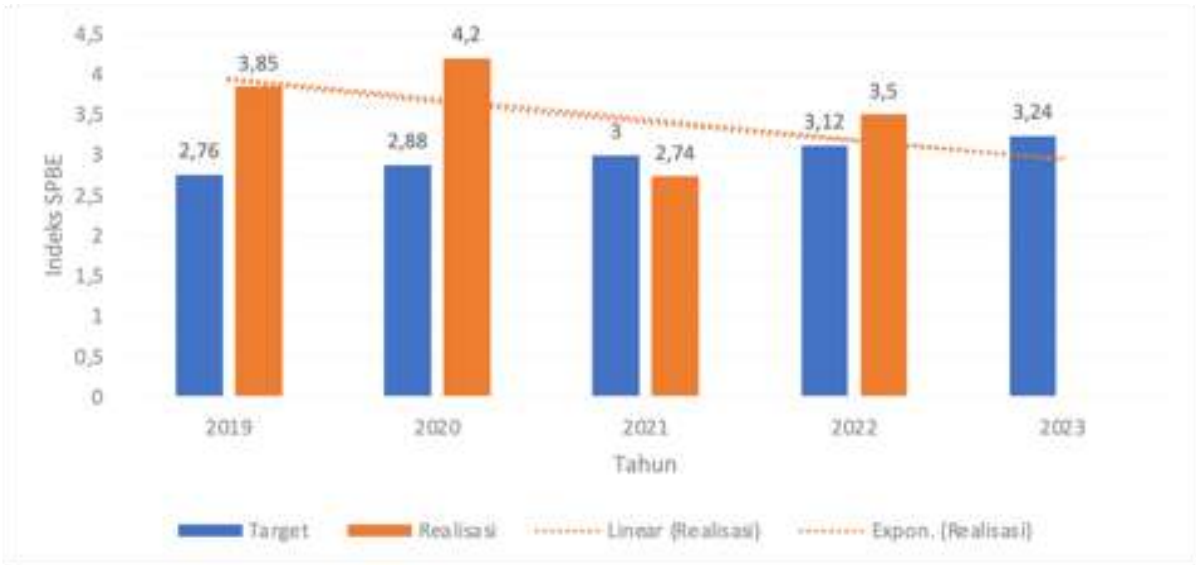
2.6.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*, pengadaan server dan storage; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur diatas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data.



Gambar 2.111.
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Hasilnya, berdasarkan Kepmen PanRB Nomor 13 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2023, capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah telah mencapai predikat memuaskan (4,26) terbaik nasional. Adapun rinciannya untuk domain kebijakan mencapai 4,80, domain tata Kelola mencapai 3,90, domain manajemen mencapai 3,36, dan domain layanan mencapai 4,63. Lebih lanjut pada domain kebijakan SPBE untuk aspek kebijakan internal telah mencapai 4,80; pada domain tatakelola untuk aspek perencanaan strategis telah mencapai 3,25, aspek TIK sebesar 4,75 dan aspek penyelenggaraan sebesar 3,50; domain manajemen untuk aspek penerapan manajemen sebesar 3,50 dan audit TIK sebesar 3,00; serta domain layanan SPBE untuk aspek layanan administrasi pemerintah sebesar 4,60 dan layanan publik sebesar 4,67. Capaian tersebut telah melampaui target indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,24 (predikat sangat baik). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.



Sumber: Diskominfo, 2023.

Gambar 2.112.
Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023

Upaya pemenuhan persyaratan implementasi *e-Government/SPBE* yang baik ternyata berpengaruh pada capaian Indeks SPBE-nya. Gambar 2.98 diatas menunjukkan bahwa, sepanjang 2019-2020 target akhir SPBE sudah terlampaui sejak awal penetapan target RPJMD Tahun 2018-2023. Meskipun pada Tahun 2021 sempat mengalami penurunan drastis karena perubahan metode perhitungan dari PermenPan RB No. 5 Tahun 2018 ke PermenPan RB No. 59 Tahun 2020, pada Tahun 2022 dengan perbaikan persyaratan sebagaimana PermenPan RB yang baru dapat naik lagi dan diperkirakan target akhir Indeks SPBE Tahun 2023 tetap terlampaui.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan SPBE telah dilakukan berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

1) Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilakukan melalui 3 (tiga) layanan yaitu Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Layanan Data Terbuka. Ketiga layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Layanan Pusat Data (*Data Center*)

Dalam upaya meningkatkan layanan SPBE telah diselesaikan pembangunan *Data Center*. Pembangunan data center telah memperbaiki kondisi *Data Center* seperti lokasi *Data Center* dapat dipindah ke lokasi yang aman (seperti rawan banjir, pernah mengalami konsleting listrik dan terganggu/terdapat kegiatan lain dalam satu gedung). Kapasitas juga telah ditingkatkan.



Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.113.

Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah

Meskipun demikian kondisi pusat data saat ini masih perlu ditingkatkan, karena berada dalam tingkatan standard 1 / rated 1, dimana fasilitas pusat data masih belum memiliki *redundancy* seperti belum memiliki *redundancy* jalur power atau kelistrikan, *redundancy* genset, *redundancy* panel listrik, *redundancy* UPS dan belum memiliki tangki penyimpanan BBM harian, mingguan maupun bulanan

b. Layanan Jaringan Intra

Layanan jaringan intra merupakan bagian dari layanan data center sebagaimana diterangkan diatas. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah daerah (Gambar 2.). Pengembangan

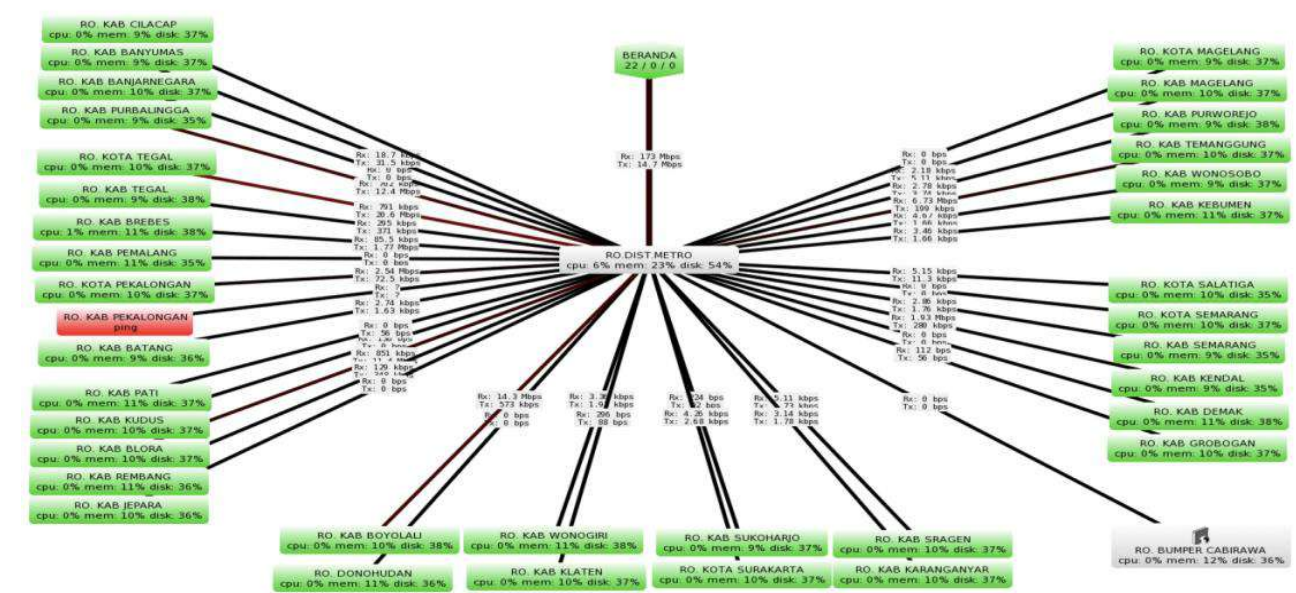
jaringan intra dilakukan seperti dengan pemasangan jaringan *Fiber Optic* untuk menghubungkan antar perangkat daerah dengan data center, pemenuhan kapasitas *bandwidth* internet yang lebih cepat dan aman pada semua OPD.



Sumber: Diskominfo

Gambar 2.114.
Topologi Jaringan Perangkat Daerah

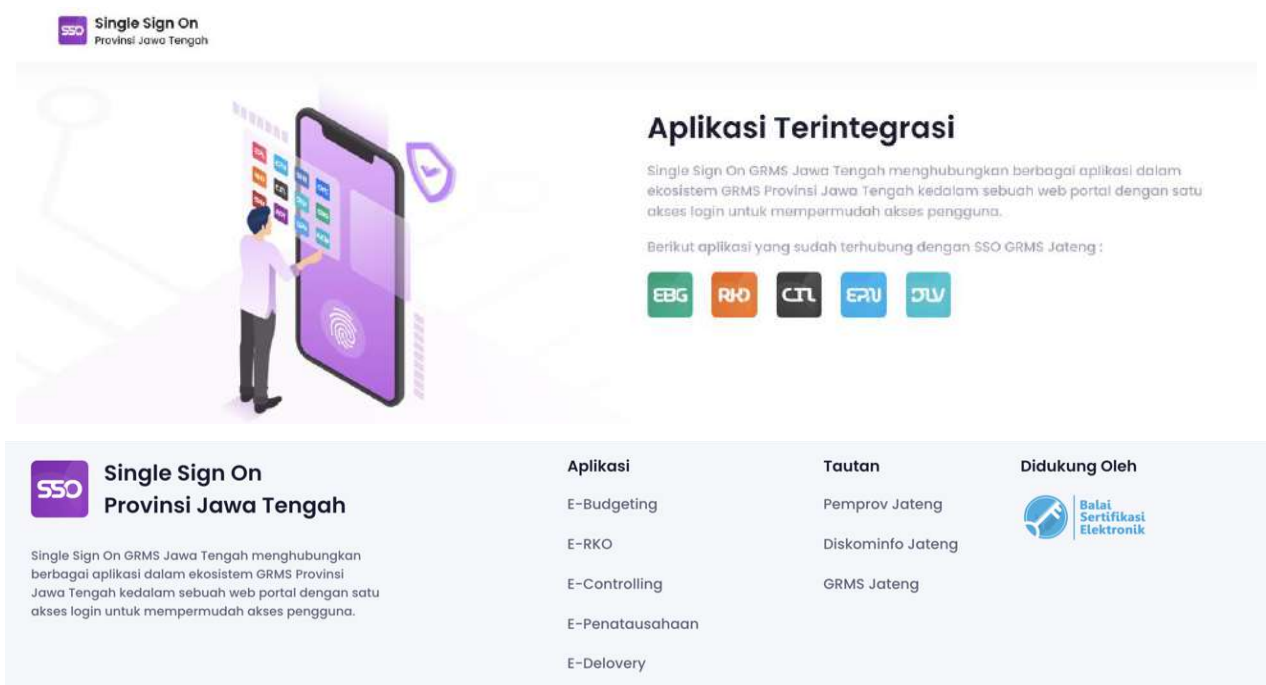
Selanjutnya setelah infrastruktur jaringan intra pemerintah terimplementasi dapat digunakan untuk sarana atau media pengembangan teknologi informasi seperti aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi layanan pemerintah, media *video conference*, media *blow up* berita melalui televisi digital (IPTV), media komunikasi jarak jauh dengan internet (VOIP).



Sumber: Diskominfo

Gambar 2.115.
Topologi Jaringan Metro Kab/Kota

Sampai dengan saat ini, Diskominfo telah menghubungkan jaringan *Fiber Optic* mandiri antar OPD se Provinsi Jawa Tengah, memiliki jaringan Metro yang menghubungkan 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan tentunya jaringan tersebut terintegrasi dengan *data center*, yang juga memiliki DRC (*Disaster Recovery Center*) dengan kapasitas *bandwidth* sebesar 11.800 Mbps.



Sumber: Diskominfo

Gambar 2.116.

Aplikasi Terintegrasi Single Sign On Provinsi Jawa Tengah

Upaya pemenuhan fasilitas sarpras jaringan intra tersebut sesuai dengan Pergub Nomor 15 Tahun 2013. Pergub mengharapkan agar Diskominfo mampu memfasilitasi keterpaduan jaringan komputer intranet. Fasilitasi penyusunan aplikasi juga sesuai atas perubahan pergub diatas dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan Diskominfo untuk melakukan audit terkait usulan sistem informasi / aplikasi / website yang diajukan oleh perangkat daerah. Upaya pengembangan layanan jaringan intra diduga telah berpengaruh pada tingkat kematangan layanannya. Tingkat kematangan level sudah masuk tahap terakhir, yaitu dengan nilai 5. Artinya, pada kematangan kapabilitas layanannya masuk dalam level optimalisasi. Optimalisasi berarti bahwa layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun pada kapabilitas prosesnya masuk pada tahap optimum. Optimum berarti pengaturannya telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Meskipun demikian, masih dijumpai adanya sejumlah permasalahan dalam layanan jaringan intra pemerintah. Permasalahan yang sangat besar dampaknya terhadap pelayanan yaitu *fiber cut* atau putusnya jalur *fiber optic*. Putusnya jalur fiber optic bisa disebabkan karena pekerjaan bangunan/galian oleh pihak eksternal di titik yang dilewati jalur kabel fiber. Permasalahan juga muncul dari jaringan lokal masing masing perangkat daerah, karena peralatan jaringan seperti *router*, *switch*, kabel utp, *accesspoint* belum memenuhi standar yang sesuai, sehingga distribusi *bandwidth* internet tidak terdistribusi dengan maksimal. Belum lagi realitas perangkat daerah masih melakukan belanja internet/sewa internet mandiri karena alasan untuk mempunyai *backup* internet. Sebenarnya bukan hanya sewa internet yang diambil alih pengelolaannya oleh Diskominfo, pengadaan server juga seharusnya dikoordinasikan dengan Diskominfo. Pengkoordinasikan tersebut penting mengingat, agar server dapat didata, terstandarisasi, menjadi satu wadah dan, disinergiskan terlebih, saat ini

Diskominfo sudah selesai membangun *Data Center* dan diresmikan pada awal tahun 2023 dimana *data center* sudah dirancang dan memiliki kapasitas yang besar dalam mengelola file data dan aplikasi Perangkat Daerah. *Server* dan *storage* sebaiknya menyatu dalam *data center*. Dalam upaya men-standar-kan, mensinergiskan dan efisensi anggaran diskominfo perlu mengidentifikasi kebutuhan/distribusi jaringan FO dan *bandwidth* bagi masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dinamika aplikasi Perangkat Daerah juga menunjukkan bahwa, aplikasi di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat diberbagai Perangkat Daerah seperti tingkat keaktifannya, perkembangannya, dan ragam layanannya. Meskipun demikian, dari total 881 aplikasi yang terdaftar yang ada di Perangkat Daerah, 113 aplikasi (13,93 %) posisinya tidak aktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa aplikasi online sudah biasa digunakan Perangkat Daerah tetapi belum semuanya dapat diakses oleh publik. Adapun perkembangannya dari 881 aplikasi sebanyak 380 aplikasi (46,86%) berstatus transaksional, 319 aplikasi (39,33 %) masih bersifat informatif dan sisanya sudah tidak aktif. Secara umum aplikasi yang ada digunakan untuk memperlancar tugas kedinasan. Gambaran diatas menunjukkan bahwa belum semua aplikasi berjalan aktif, belum bersifat transaksional serta belum sinergis dan terintegrasi satu dengan lainnya. Kebanyakan baru untuk layanan kedinasan saja, masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

c. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

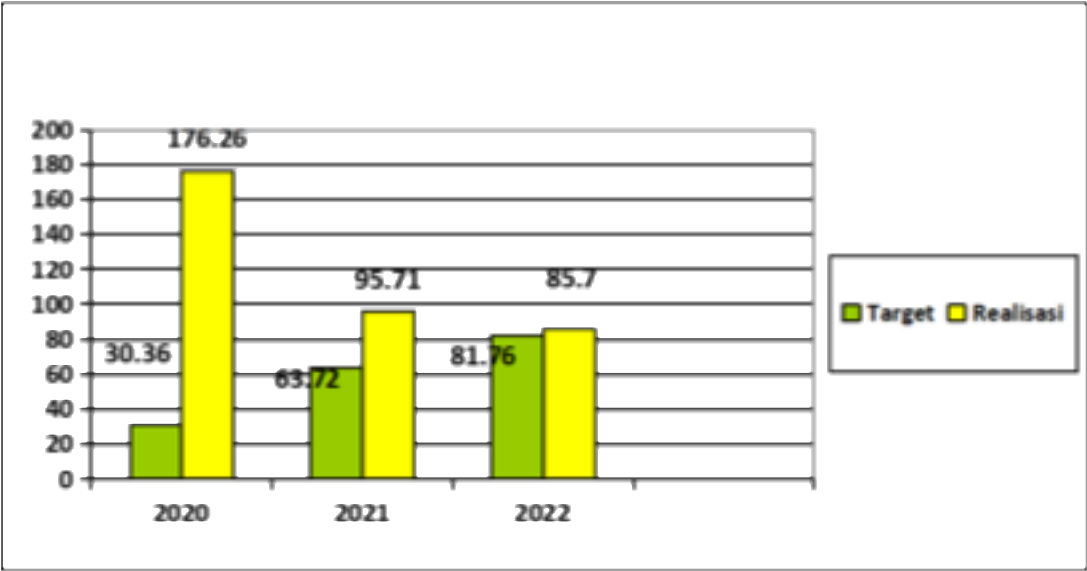
Layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan media *online* seperti *website*, *whatsapp*, *android*, *instagram*, *SMS*, *facebook*, *twitter*, layanan *hotline*, aduan langsung, *youtube* dan aplikasi *Laporgub* sendiri. Total pengaduan pada Tahun 2022 adalah 22.980 aduan. Pengaduan umumnya menyangkut permohonan perbaikan jalan, permohonan Bansos Covid, permohonan informasi vaksinasi Covid, aduan bantuan tidak tepat sasaran dan, permohonan penanggulangan banjir. Adapun aduan masyarakat yang sudah selesai ditindaklanjuti sebesar 65,20% (14.983 aduan), yang berada dalam tahap verifikasi sebesar 21,44% (4.927 aduan), yang masih dalam tahap progress sebesar 8,25% (1.895 aduan) dan yang bukan wewenang sebesar 2,68% (615 aduan).

Masyarakat dapat melihat aduan pada laman *LaporGub!* dan dapat juga mengunggah bukti aduannya ke dalam sistem seperti yang dapat dilihat pada bukti dukung *LaporGub!* Setiap aduan yang masuk ke dalam *LaporGub!*, otomatis akan disampaikan kepada instansi terkait. Setiap progres aduan akan terlihat oleh admin *LaporGub!*, apakah aduan tersebut sudah diverifikasi, proses maupun selesai seperti yang disertakan pada data dukung Indikator Progres Aduan *LaporGub!*. Admin juga dapat mendownload aduan untuk bahan laporan kepada atasan dengan bukti dukung: - Indikator Download Laporan *LaporGub!* - Indikator Tampilan Review Laporan – Indikator REKAP *LaporGub!*. Kemudian sistem *LaporGub!* sudah melakukan Konsolidasi data dengan SP4N LAPOR! Kemenpan-RB, Sehingga aduan *LaporGub!* dapat juga dilihat di aplikasi SP4N LAPOR! milik Kemenpan-RB dengan proses. Aduan memang tidak semua dijawab, terdapat 42 aduan dikembalikan dan 615 aduan di luar wewenang Pemerintah Daerah. Dari laporan implementasi *LaporGub!*, baru terinformasikan secara global bahwa aduan sudah terjawab tetapi tingkat solutifnya belum terinformasikan dalam rekapitulasi aduan *LaporGub!*.

Meskipun demikian tidak semua layanan mendapatkan jawaban yang solutif atau tidak dapat dijawab. Kondisi ini disebabkan karena level kematangan layanannya belum maksimal. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik baru mencapai level 3. Artinya, layanan pengaduan publik melalui LaporGub! Secara kapabilitas layanan SPBE masuk dalam kriteria Transaksi, yaitu dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Secara kapabilitas proses masuk dalam kriteria terstandarisasi, yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah. Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya terstandarisasi. Pada level 3 ini dalam SPBE sudah masuk predikat Baik (2,6-<3,5). Kenaikan level kematangan misalkan sampai level 4 memungkinkan secara kapabilitas layanannya sudah terkolaborasi sehingga bukan hanya terjadi pertukaran informasi tetapi terjadi integrasi layanan dengan SPBE lainnya sehingga, sesuatu yang dianggap bukan tugas dan fungsinya dapat dikoordinasikan segera.

2) Statistik.

Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial, baik berupa *hardware* maupun *software* Pengembangan *Single Data System* (SDS) dalam rangka merealisasikan arsitektur Big Data Jawa Tengah Berdasarkan Roadmap yang telah ditetapkan serta pengembangan Geospasial dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Satu Peta. Dalam rangka mewujudkan *Smart Government* dengan penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional; dan pemanfaatan *Big Data* dan Kecerdasan Artifisial (Data Driven Government); Dampak SDI Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembangunan, konkritnya berupa data prioritas yang akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan bukan hanya katalog data; Data terkini atau *ter-update* akan meningkatkan kualitas program secara tepat sasaran. Dengan program yang tepat sasaran tersebut otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



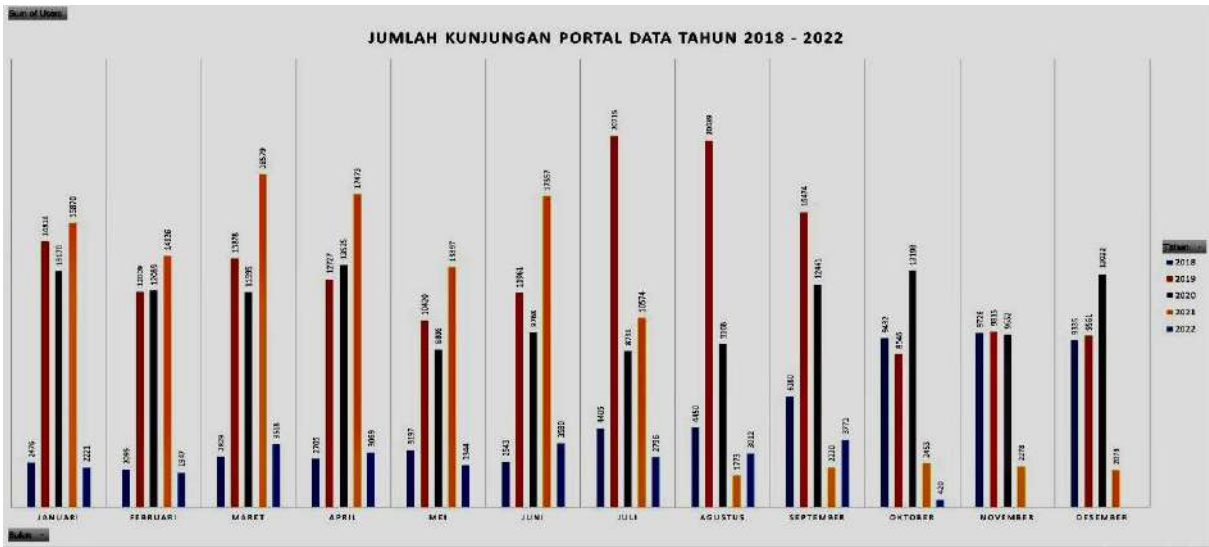
Sumber: LKPJ, 2022

Gambar 2.117.
Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral
Tahun 2020-2023

Dalam pelaksanaan Tahun 2021, capaian laju pemanfaatan data sektoral sebesar 95,71%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (63,72%) mengalami peningkatan sebesar 31,99%. Sedangkan pada tahun 2022 laju pemanfaatan data sektoral mencapai 85,70% yang berarti terdapat kenaikan sebesar 3,94% dibandingkan dengan target pada tahun 2022 di triwulan IV yaitu sebesar 81,76%. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 tersebut melampaui target karena respon positif OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota yang antusias dalam memanfaatkan aplikasi *Single Data System* (SDS) dalam pengiriman data sektoral, sehingga data sektoral yang masuk melebihi target awal.

Hingga saat ini, Diskominfo telah melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Provinsi (SDS). Kegiatan ini berupa Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Melaksanakan Forum Data Satu Data Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui *Single Data System* serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.

Selanjutnya, dalam menjamin keterbukaan informasi publik telah dilakukan difasilitasi melalui aplikasi portal data. Dalam aplikasi portal data, masyarakat umum dapat mengakses data dan informasi Perangkat Daerah dan mendapatkan informasi publik yang diperlukan. Portal data diharapkan menjadi sarana OPD dalam mempublikasikan data dan informasi yang perlu diketahui publik atas sektor pembangunan yang ditangani. Jadi, aplikasi portal data adalah mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID Utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi sektor-sektor publik. Aplikasi portal data diharapkan akan menjadi sarana untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, karena data dari berbagai OPD yang masuk harus melalui tahap pemeriksaan prinsip SDI sebelum dipublikasikan dalam portal data.



Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.118.
Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022

Selain disampaikan fasilitasi publikasi hasil pembangunan satu arah dalam bentuk tayangan berita dalam PPID, urusan statistik juga memfasilitasi dukungan website untuk komunikasi dua arah seperti melalui portal berita pada website jatengprov.go.id. Diskominfo juga mengaktifkan website kominfo jateng untuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan Diskominfo terkait suatu topik pembangunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.106. Terhadap layanan komunikasi dua arah tersebut terdapat hambatan dalam merespon pihak-pihak yang berkomunikasi, tentu membutuhkan spesialisasi siapa pihak yang menangani, kualitas pemahaman substansi topik yang dibahas dan, jaringan komunikasi antar pihak yang memadai.

3) Persandian

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi dengan kriteria CIA (*confidentiality, integrity, availability*) Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini, berdasarkan hasil pelaksanaan dan rekomendasi IT Assessment yang dilakukan oleh BSSN serta kegiatan Penetration Test (Pentes) mandiri dengan memanfaatkan beberapa *tools* pengamanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 terhadap aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil dalam kondisi yang cukup baik meskipun ada beberapa aplikasi yang masih diperlukan penguatan keamanan, layanan seperti SSL, *firewall* dan anti virus juga diharapkan dapat memperkuat keamanan sistem atau aplikasi dari sisi lalu lintas data dan keamanan *workstation* pengguna.

Tabel 2.156.
Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu
Tahun 2021 - 2023

NO	AREA EVALUASI	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Tata Kelola	118	123	123
2	Pengelolaan Risiko	50	67	72
3	Kerangka Kerja	156	159	159
4	Pengelolaan Aset	147	167	167
5	Teknologi dan Keamanan Informasi	87	118	18
Tingkat Kematangan		III	III+	III+
Predikat		CUKUP BAIK (558)	BAIK (634)	BAIK (639)

Sumber : BSSN RI, 2023

Berdasarkan tabel diatas, capaian tingkat kematangan Keamanan Informasi dalam kurun waktu 2020 s.d 2023 menunjukkan kondisi yang semakin

baik, dimana terjadi peningkatan skor tingkat kematangan yang semula 634 pada tingkat III+ (predikat “Baik”) di tahun 2022, dan mengalami peningkatan sebesar 5 poin sehingga capaian menjadi 639 pada tingkat III+ (predikat “Baik”) di tahun 2023. Capaian pada tahun 2023 mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat terbaik Nasional untuk Pengelolaan Keamanan Informasi Sektor Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan bahwa keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terkelola dengan baik pada aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon.

Prestasi dalam pencapaian indeks KAMI masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target maksimal sebesar 645. Peningkatan itu mencakup Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur dan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meningkatnya Keamanan Informasi Dan Pemanfaatan Persandian Daerah yang diukur melalui Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI), yang dinilai menggunakan instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta dilakukan visitasi dan evaluasi langsung dari BSSN, dengan hasil Indeks KAMI di level III+ mencapai target, penilaian terdiri dari 8 unsur penilaian yaitu Tata Kelola, Pengelolaan resiko; Kerangka Kerja Keamanan Informasi; Pengelolaan Aset; Teknologi dan Keamanan Informasi; Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga; Pengamanan layanan Infrastruktur; dan Perlindungan data Pribadi.

Hingga saat ini, pada urusan persandian, telah dilakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan upaya pengamanan informasi. Upaya pengamanan informasi dilakukan melalui assessment aplikasi; layanan *e mail* sanapati, 49 SSL, 520 antivirus bagi 50 OPD, *live streaming* dan, *conference*. Kegiatan-kegiatan ini untuk menjamin keamanan informasi perangkat daerah. Terdapat 45 OPD yang aplikasinya sudah di pentest dan melakukan tindaklanjut atas hasil pentest nya. Sampai saat ini juga secara aktif terus dilakukan peningkatan kualitas keamanan informasi. Upaya peningkatan keamanan informasi seperti sedang dalam tahap pembuatan Pergub SMKI, *Risk Manajemen*, *Arsitektur Keamanan* dan *SOP*.

Upaya pengamanan informasi lebih detil sebagai berikut: dilakukan Digital Forensik dilaksanakan pada alat komunikasi milik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Pada layanan pengelolaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Bidang Persandian dan KI menyediakan aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (MSE) sebagai aplikasi untuk membantu pendaftaran dan pengelolaan Sertifikat elektronik / Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Pejabat / Fungsional hingga staf pelaksana di seluruh OPD Pemprov Jateng dengan basis website dan Aplikasi Mobile. Selain itu Bidang Persandian dan KI juga menyediakan Chatbot “SORE MASE” sebagai layanan helpdesk bagi pemilik TTE yang dapat digunakan bagi pemilik TTE untuk mengecek data yang berkaitan dengan TTE secara realtime dan 24 jam. Hingga saat ini sudah terbit sejumlah 297 TTE; Pengamanan distribusi/pengiriman data atau surat sudah menggunakan email terenkripsi Sanapati baik dari pusat ke provinsi hingga ke kab/kota; Fasilitasi layanan *Video Conference* untuk komunikasi pejabat VVIP seperti Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Layanan publikasi kegiatan yang ada di Pemprov Jateng melalui *Video Live Streaming* pada kanal medsos (*Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok dan Instagram*).

Dalam menjamin keamanan informasi, Provinsi juga sudah membentuk Tim CSIRT atau *Computer Security Incident Response Team* pada Tahun 2020. Tugas Tim CSIRT adalah menerima, meninjau, dan merespon laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Provinsi juga melakukan fasilitasi pembentukan Tim CSIRT di Kabupaten / Kota. Sampai saat ini sudah 11 Kab/Kota telah memiliki Tim CSIRT.

Tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah selalu secara rutin melakukan layanan *penetration testing*, sertifikasi elektronik, kontra penginderaan dan *jamming*. *Pentest / Penetration Testing* dan *IT Security Assement* Mandiri adalah kegiatan pengujian kerentanan aplikasi yang digunakan di lingkup Pemprov Jateng oleh tenaga ahli pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi baik pada saat aplikasi belum dirilis maupun pada saat aplikasi sudah dirilis atau sudah berjalan. Hingga saat ini sudah ada 47 OPD dari total 49 OPD aplikasinya telah di *pentest* dengan status akhir kerentanan LOW; SSL (*security Socket Layer*) adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet, SSL sudah diterapkan pada semua sub domain yang digunakan pada aplikasi yang ada di Pemprov Jateng; Anti virus yang bertujuan untuk mengamankan data yang ada pada computer/desktop dari serangan virus atau malware, sebanyak 31 OPD sudah menerapkan anti virus pada desktop atau perangkat komputer yang digunakan; Pengamanan signal atau (Jamming) dilakukan untuk kegiatan yang menghadirkan pejabat VVIP atau Presiden dan Wakil Presiden serta pada kegiatan tes atau ujian kompetensi; Kontra penginderaan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik dan mendeteksi adanya peralatan *surveillance* (alat sadap), hal ini dilakukan pada kediaman, ruang kerja dan kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Upaya peningkatan keamanan informasi juga dilakukan melalui jalur regulasi, agar langkah-langkahnya lebih tertata dan didukung semua perangkat daerah. Regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan sebagai acuan atau dasar pelaksanaan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Atas capaian pengamanan informasi, Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan pengakuan ISO 27001 pada Tahun 2022 tentang Keamanan Informasi dan *Data Center*.

2.6.5 Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan

perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.157.

**Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian
Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dokumen Penelitian	9	4	2	23	18
2.	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	9	4	2		

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark*, *agro technopark*, *marine science technopark*, digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima

tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.158.

Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Tenant	Program	Sumber Pendanaan
1	2019	6 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
2	2020	1 Tenant	Startup Inovasi Indonesia (SSI)	BRIN
3	2021	40 Tenant	Fasilitasi Lembaga Inkubator	Kemenkop UKM
4	2022	17 tenant	Inwinov Jateng	APBD
5	2023	17 tenant	Inwinov Jateng	APBD

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjangrian inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjangrian inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan

pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjangkaran inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

Tabel 2.159.

Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi	Keterangan
1	2018	201	35 Kabupaten/Kota	• Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota; • Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan; • Penjangkaran Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021.
2	2019	169	35 Kabupaten/Kota	
3	2020	167	34 Kabupaten/Kota	
4	2021	230	35 Kabupaten/Kota	
5	2022	276	34 Kabupaten/Kota	
6	2023	309	35 Kabupaten/Kota	

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

Tabel 2.160.

Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID)	Predikat	Keterangan
1	2019	22.560	Sangat Inovatif	Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100
2	2020	36.357	Sangat Inovatif	
3	2021	62.57	Sangat Inovatif	
4	2022	71.32	Sangat Inovatif	
5	2023	65.40	Sangat Inovatif	

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.6.6 Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.161.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	79,33	Sangat Baik
2	2020	92,08	Sangat Memuaskan
3	2021	91,314	Sangat Memuaskan
4	2022	93,45	Sangat Memuaskan
5	2023	93,99	Sangat Memuaskan

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.162.

Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Jenis Layanan	Tahun (orang)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penelitian atau Mencari Arsip	757	780	209	346	496	1.182
2	Kunjungan atau Wisata Arsip	1.890	2.036	15.001	112	3.206	2.465
3	Magang atau PKL	219	151	103	67	97	260
4	Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan	669	485	206	127	288	494
5	Umum atau lain-lain	3535	594	33	81	338	242
6	Layanan SIKS, Website				11.289	41.718	91
	Jumlah	7.070	4.046	15.552	12.022	46.413	4.734

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

2.6.7 Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-2023 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Komponen SAKIP terdiri atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Semua komponen mengalami kenaikan sehingga nilai SAKIP total juga mengalami kenaikan secara signifikan dari 81,13 di tahun 2022 menjadi 81,92 di tahun 2023 atau naik sebesar 0,79 poin. Hal ini menunjukkan ada perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meski begitu masih terdapat beberapa catatan dari masing-masing komponen yang perlu ditindaklanjuti antara lain, menyempurnakan penjenjangan

kinerja, rebiew identifikasi *cross-cutting* pada pohon kinerja, memastikan penetapan target kinerja OPD yang lebih baik, memastikan penerapan kinerja mempertimbangkan kinerja tahun terkahir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, mendorong komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memanfaatkan e-kinerja, memastikan kembali perumusan kinerja individu melalui SKP, membangun budaya dialog kinerja, dan melakukan inovasi.

Tabel 2.163.
Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,77	26,64	26,66	25,53	25,71
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,50	20,23	20,23	23,63	23,78
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,99	12,08	12,27	12,84	12,93
4.	Evaluasi Internal	10	8,26	7,02	7,21	19,13	19,5
5.	Capaian Kinerja	20	14,04	14,28	14,35	n/a	n/a
	Hasil Nilai SAKIP	100	81,56	80,25	80,72	81,13	81,92
	Predikat		A	A	A	A	A

Sumber: Kemenpan RB, Maret 2023

2.6.8 Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

Tabel 2.164.
Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

NO	Aspek	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	10	37,5	40	40	40
2	Pengadaan	30	38	40	40	40
3	Pengembangan Karier	72,5	55	75	76	75
4	Promosi dan Mutasi	30	20	35	35	35
5	Manajemen Kinerja	50	67,5	70	70	75
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	35	37,5	37,5	37,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	10	16	14	16	14
8	Sistem Informasi	20	20	24	24	24
Skor Nilai		280	289	335,5	337,5	340,5
Indeks Sistem Merit		0,70	0,70	0,81	0,82	0,83

Sumber: KASN, 2023

Capaian Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 dari 0,82 naik menjadi 0,83 dengan skor nilai yang meningkat dari 337,5 menjadi 340,5.

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2023 sebesar 14 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2022 sebesar 16, dikarenakan program perlindungan dan konsistensi pelaksanaan dinilai tidak berprogres dengan baik. Selain itu pada aspek pengembangan karir juga mengalami penurunan 1 poin dibanding tahun 2022 dari 76 menjadi 75 dikarenakan belum ada SKJ pada semua jabatan dan belum tuntasnya analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai serta penyusunan program/strategi pengembangan kompetensi berdasarkan analisis tersebut.

Tabel 2.165.
PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar
Tahun 2019-2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	S1/DIV/PROFESI	13	0	0	10	2	25
2	S2	15	22	16	28	20	101
3	PPDS	5	5	2	7	10	29
4	S3	3	1	3	9	2	18
5	SUB SPESIALIS	2	2	1	4	3	12
	JUMLAH	38	30	22	58	37	185

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 185 orang. 25 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 101 orang untuk jenjang S2, 29 orang untuk PPDS, 18 orang untuk jenjang S3, dan 12 orang untuk Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2% potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku *leading sector* pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.166.
Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2023

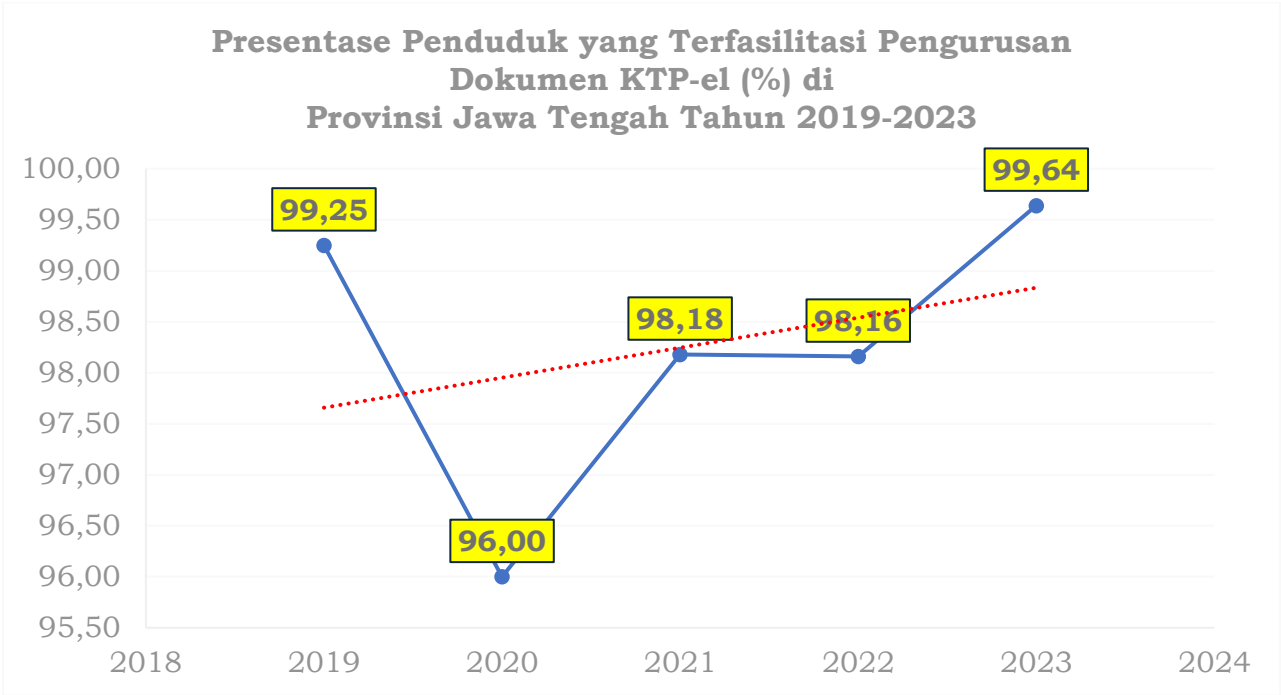
Tahun	Target Peserta (orang)	Realisasi Peserta (orang)
2019	10.110	9.820
2020	2.789	2.763
2021	6.935	6.956
2022	18.932	19.838
2023	31.268	40.910

Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023

Meski telah mengalami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan *gap* kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

2.6.9 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya direpresentasikan melalui capaian kepemilikan KTP-el. Pada Tahun 2019-2023, kepemilikan KTP-el di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Meskipun, penurunan presentase kepemilikan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun sampai dengan tahun 2023 sudah 99,64% penduduk wajib KTP yang sudah terekam KTP-el. Berdasarkan data terget indikator kinerja dalam RPD, pada tahun 2025 ditetapkan target kepemilikan KTP-el Provinsi Jawa Tengah adalah 99%. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah melampaui target tersebut, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi capaian kepemilikan KTP-el melalui perekaman KTP-el, salah satunya adalah dinamika perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Dengan adanya dinamika tersebut, maka Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el perlu meningkatkan kinerja seiring dengan perubahan jumlah penduduk. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja kepemilikan KTP-el diantaranya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi perekaman KTP-el, fasilitasi blangko perekaman KTP-el, percepatan penerbitan KTP-el, dan upaya lainnya. Untuk mengetahui kinerja kepemilikan KTP, maka berikut merupakan grafik presentase penduduk yang terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el mengacu pada data jumlah penduduk dengan usia wajib KTP.



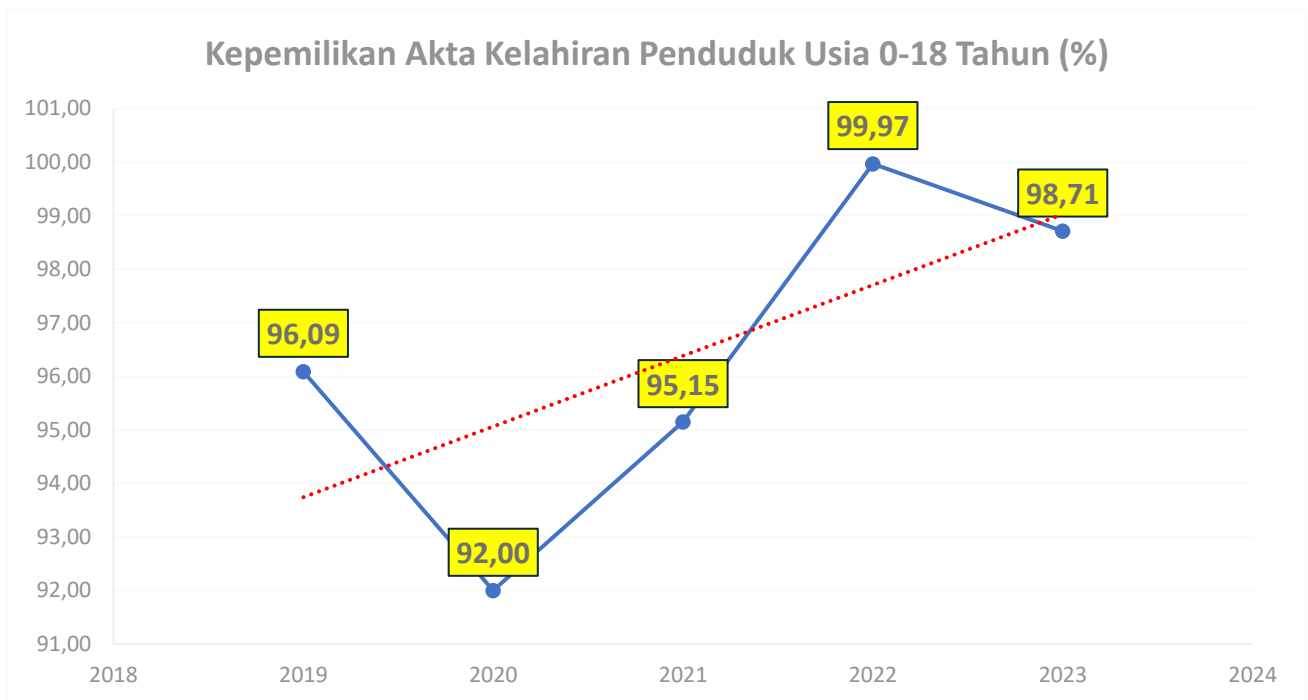
Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.119.

Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

a. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran

Aspek pendukung dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya adalah terkait kepemilikan akta kelahiran. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum yang sah anak sebagai warga negara. Selain itu, akta kelahiran menjadi instrumen kependudukan yang sah bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas Pendidikan, hak atas Kesehatan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas perlindungan sosial. Upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah terus diupayakan di 35 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2023, presentase kepemilikan akta kelahiran adalah 98,71%. Angka tersebut tentunya belum optimal apabila dibandingkan dengan target kepemilikan akta kelahiran pada RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, yaitu 99% di Tahun 2025 dan 100% di Tahun 2026. Berikut merupakan grafik capaian kinerja pada kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.120.
Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan capaian pada rentang Tahun 2022-2023 meski begitu tren dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan meski tidak signifikan. Tren peningkatan tersebut disebabkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online*. Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan yang diantaranya meliputi KTP, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan data kependudukan masyarakat di Jawa Tengah. Penyebarluasan informasi tersebut disampaikan dalam beberapa media baik *online* maupun *offline*.

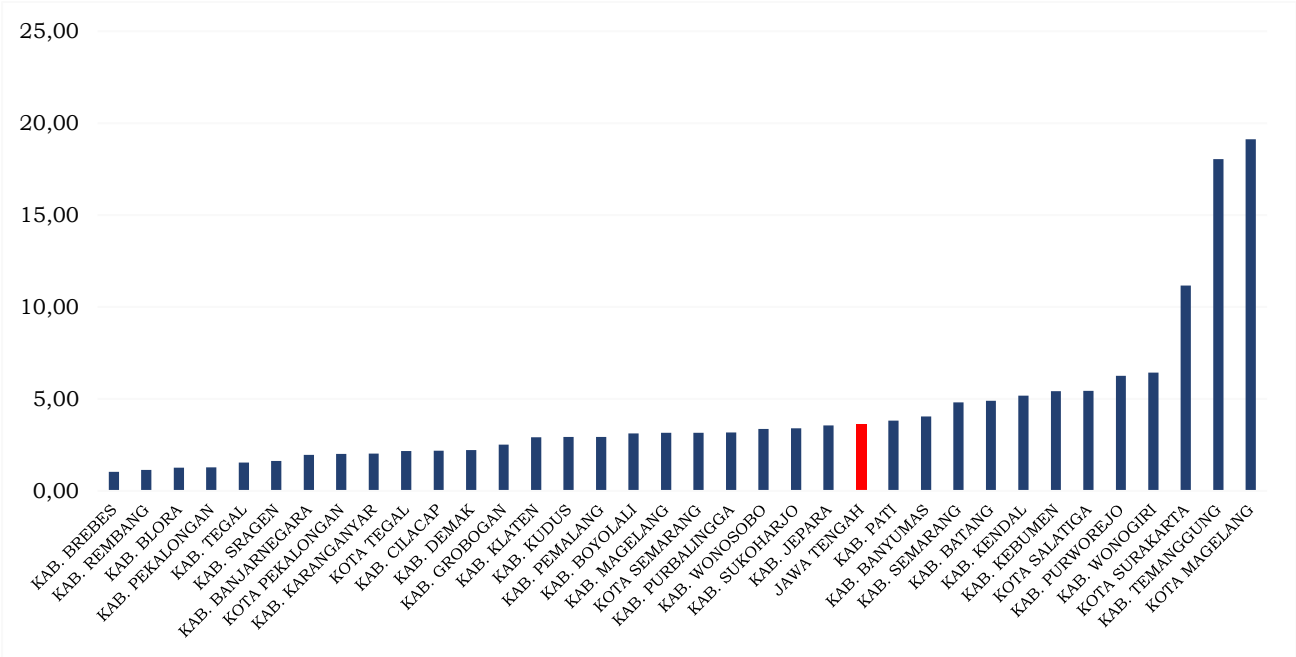
c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik terhadap anak, pemenuhan hak kewarganegaraan anak, peningkatan pendataan anak, dan dasar intervensi perlindungan sosial terhadap anal. Pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak diatur dalam Permendagri Nomro 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sementara itu, kinerja pelayanan terhadap penerbitan KIA di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2023 adalah 64,06. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada spek pelayanan penerbitan KIA, Provinsi Jawa Tengah perlu upaya yang cukup keras agar seluruh anak (usia 0-17) terpenuhi atas hak kepemilikan KIA.

d. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan informasi digital, telah diterbitkan salah satu inovasi dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan secara digital. IKD merupakan program dari

pemerintah Pusat dalam rangka memberikan layanan kependudukan secara praktis dengan basis data terpusat yang dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah langkah startegis, diantaranya adalah: (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung kemanana data, privasi, dan inklusivitas, (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri proaktif dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur yang mendukung implementasi IKD, (3) Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam menerapkan IKD yang inklusif, dan (4) Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kemendagri terus pro aktif dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Dengan adanya IKD diharapkan akses terhadap dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kepentingan dapat terlaksana secara efisien dengan sistem yang terintegrasi. Meski begitu masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi IKD, diantaranya adalah keterbatasan informasi masyarakat, keterbatasan akses internet dan perangkat digital, dan pengoperasian sistem. Pada Tahun 2023, capaian perekaman data kependudukan yang terintegrasi dalam IKD di provinsi Jawa Tengah baru mencapai 3,60%, tentunya perlu upaya keras dalam rangka meningkatkan penggunaan IKD untuk integrasi data kependudukan digital. Berikut merupakan capaian IKD di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Gambar 2.121.
Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

d. Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2023, sebanyak 37 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.6.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran capaian Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.167.

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023

Status Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat tertinggal	6	2	-	-	-
Tertinggal	528	262	147	66	25
Berkembang	5.582	5.565	5.168	4.331	3.321
Maju	1.576	1.841	2.295	3.006	3.648
Mandiri	117	140	199	406	825
Total Desa Terverifikasi	7.809	7.809	7.809	7.809	7.810

Sumber: Dispermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Jawa Tengah. Sedangkan pada Tahun 2023, jumlah desa “mandiri” meningkat menjadi 825 atau 10,56% dari jumlah total desa. Sementara itu desa “maju” berjumlah 3.648 desa, desa “berkembang” adalah 3.321 desa, dan desa tertinggal masih ada 25 desa. Upaya peningkatan kemandirian desa perlu dilaksanakan oleh berbagai pihak yang saling bersinergi dari lintas sektor.

Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes dan Pasar Desa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168.						
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah						
Tahun 2019-2023						
No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	BUMDesa	4.750	5.539	6.776	7.189	6.581
2	Pasar desa	1.349	1.671	1.671	1.671	1.674

Sumber: Dispermasdesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2022 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 4.750 unit di tahun 2018 menjadi 7.189 unit di tahun 2022. Namun justru mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan sumber data yang digunakan dalam rangka penilaian klasifikasi BUMDes di Jawa Tengah sesuai dengan arahan yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

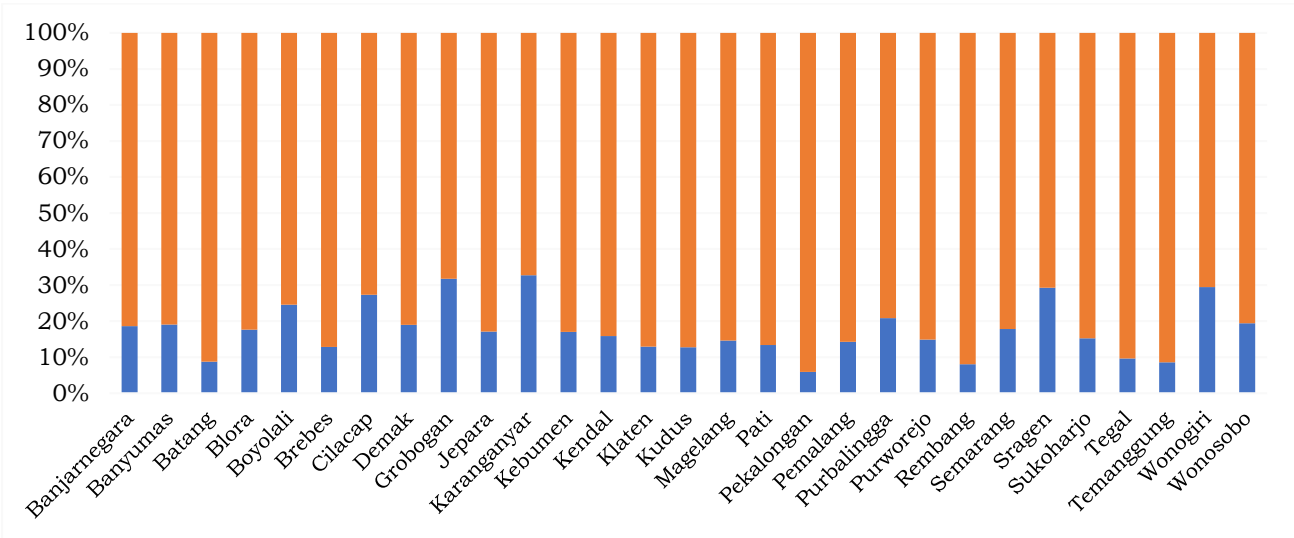
Tabel 2.169.								
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah								
Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023								
NO	KABUPATEN	JML DESA	KLASIFIKASI BUMDES 2024 KEMENTERIAN DESA PDPT RI				TOTAL KLASIFIKASI BUMDES (31 JAN 2024)	PERSEN (%)
			PERINTIS	PEMULA	BER- KEMBANG	MAJU		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Kudus	123	27	42	36	4	109	187.93%
2	Rembang	287	205	48	9	1	263	106.05%
3	Demak	243	165	31	16	2	214	104.90%
4	Sukoharjo	150	81	34	19	1	135	103.05%
5	Purbalingga	224	149	55	19	1	224	102.75%
6	Purworejo	469	303	99	60	2	464	101.53%
7	Batang	239	181	20	8	1	210	100.96%
8	Jepara	184	137	34	12	1	184	100.00%
9	Klaten	391	270	77	34	10	391	100.00%
10	Temanggung	266	178	55	22	0	255	99.22%
11	Karanganyar	162	70	28	53	6	157	98.13%
12	Blora	271	223	26	8	0	257	97.72%
13	Brebes	292	156	80	41	0	277	94.86%
14	Grobogan	273	184	55	16	1	256	93.77%
15	Boyolali	261	159	29	4	1	193	93.69%
16	Wonogiri	251	142	63	30	0	235	93.63%
17	Magelang	367	243	45	19	5	312	90.17%
18	Pekalongan	272	141	41	13	0	195	87.44%
19	Kendal	266	148	43	17	1	209	86.36%
20	Wonosobo	236	125	27	11	3	166	85.13%
21	Banjarnegara	266	141	49	21	3	214	83.27%
22	Tegal	281	113	58	33	3	207	83.13%
23	Kebumen	449	186	108	64	4	362	80.62%

NO	KABUPATEN	JML DESA	KLASIFIKASI BUMDES 2024 KEMENTERIAN DESA PDTT RI				TOTAL KLASIFIKASI BUMDES (31 JAN 2024)	PERSEN (%)
			PERINTIS	PEMULA	BER- KEMBANG	MAJU		
24	Banyumas	301	107	75	46	8	236	78.93%
25	Sragen	196	72	41	32	4	149	76.80%
26	Semarang	208	76	36	27	2	141	73.06%
27	Pemalang	212	102	32	14	2	150	71.09%
28	Cilacap	269	57	67	45	0	169	62.83%
29	Pati	401	162	72	12	1	247	61.60%
	JUMLAH	7810	4303	1470	741	67	6581	89.79%

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2023

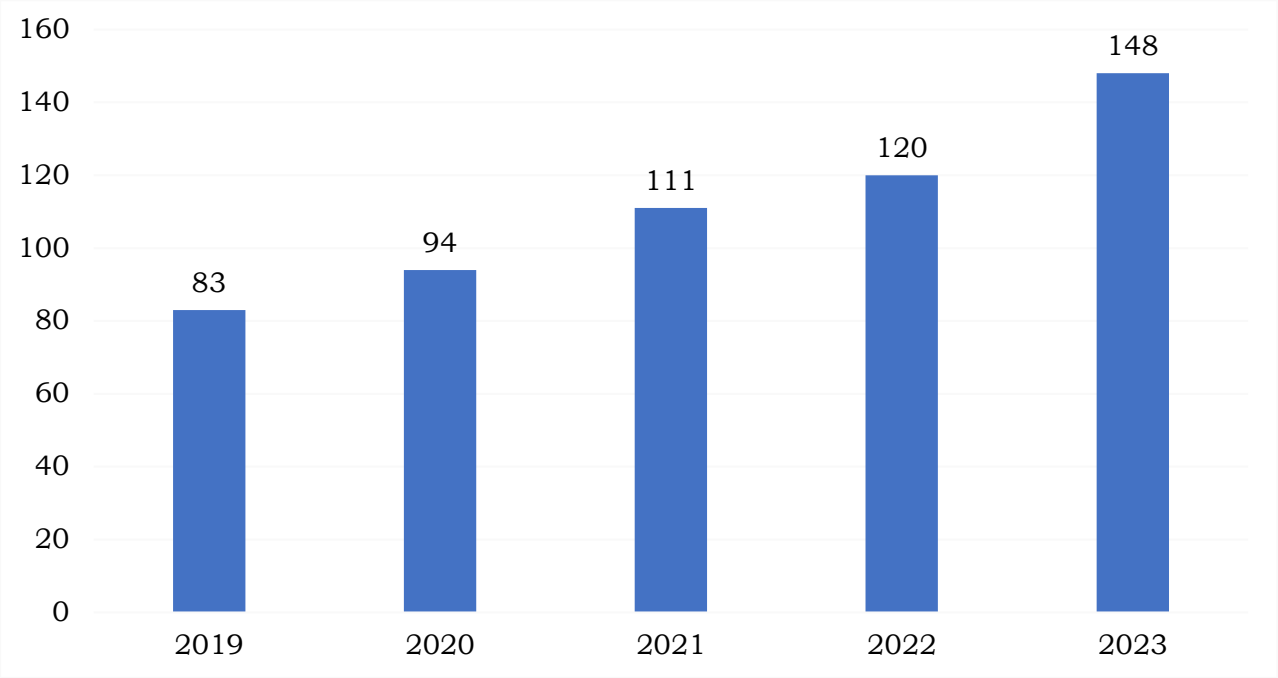
Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, klasifikasi terbagi menjadi empat klasifikasi, yaitu “perintis”, “pemula”, “berkembang”, dan “maju”. Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2023 terdapat 4.303 BUMDes perintis, 1470 BUMDes pemula, 741 BUMDes berkembang, dan 67 BUMDes maju. Angka tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi seluruh BUMDes di Jawa Tengah dikarenakan presentase klasifikasi belum 100%, yaitu masih 89,79% atau 6.581 dari 7.810 desa. Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Selain BUMDES, lembaga perekonomian desa yang juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah Pasar Desa. Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terdapat 1.674 unit pasar yang tersebar di 29 Kabupaten. Kondisi saat ini belum seluruh desa di Jawa Tengah memiliki pasar desa, berikut merupakan presentase keberadaan pasar desa di Jawa Tengah.



Gambar 2.122.
Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

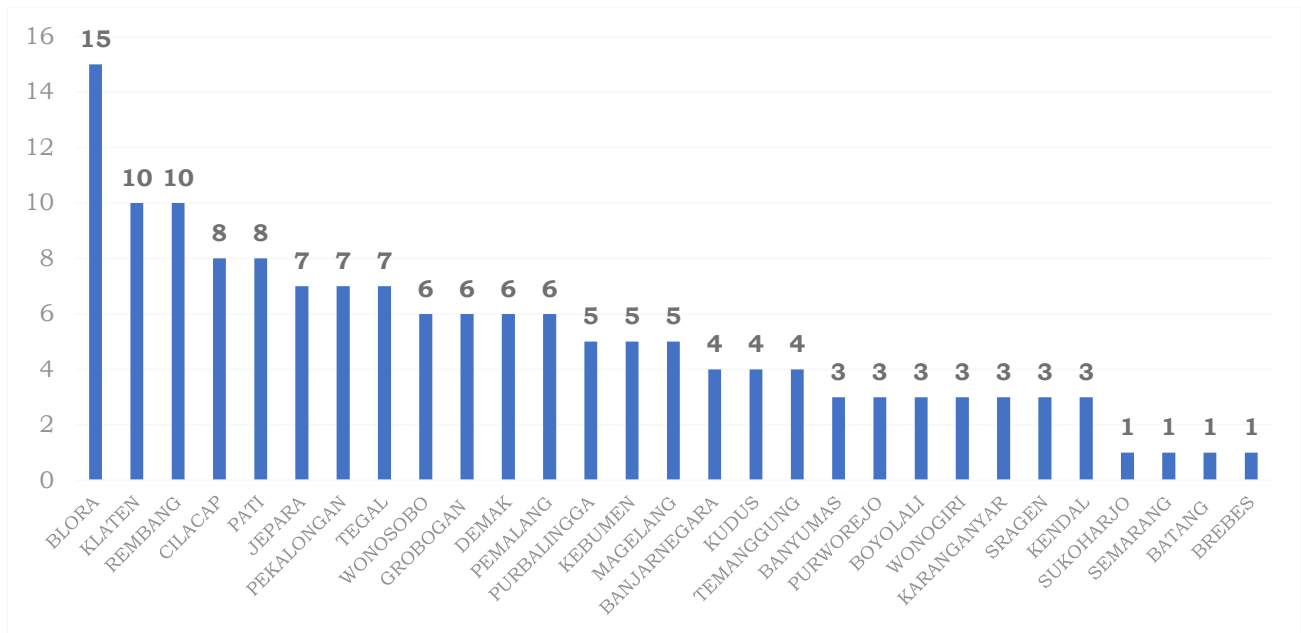
Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk 148 kawasan perdesaan. 148 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.



Sumber: Dispermasdesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Gambar 2.123.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sebanyak 148 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi prioritas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan. Berikut merupakan sebaran jumlah kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2.124.

Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

2.6.11 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

2.6.12 Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan

kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Mendasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dan Renstra PD, kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 2,85	n/a	3,115	3,267	3,464
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2023 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peningkatan dari 2022 sebesar 3,267 menjadi 3,464. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2023 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

2.6.13 Pertanahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2023 terdapat penetapan lokasi aktif sebanyak 7 ijin yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.171.
Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Penetapan Lokasi	Jumlah Bidang	Luas Tanah	No. / Tanggal Terbit SK
1.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah	225	±96.001m2	590/13 30 Maret 2023 (Sutet 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 Section 1 (Ungaran – Ampel) di Prov. Jateng)
2.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	130	±319.838 m2	590/19 7 Juni 2023 (Sisa Tanah Bendungan Bener di Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo Prov. Jateng)
3.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Provinsi Jawa Tengah	266	±12,12 Ha	590/22 25Juli2023 (Sisa Tanah Jalan Tol Trans Jawa Prov. Jateng)
4.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora	345	± 97,24 Ha	590/23 28 Juli 2023 (Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora)
5.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Slinga Tahap II di Kabupaten Purbalingga	154	±7,02 Ha	590/26 21Agustus 2023 (Daerah Irigasi Slinga Tahap II Di Kabupaten Purbalingga)
6.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah	393	±246.483 m2	590/42 18 September 2023 (Sisa Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta)
7.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Di Kabupaten Semarang	103	±71.370 m2	590/43 18 September 2023 (Sisa Tanah Bendungan Jragung di Kab. Semarang)
Jumlah		1.616	411,58 Ha	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

Tabel 2.172.
Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemantauan Penetapan Lokasi	-	400	526	2.217	898	224
2	Penetapan Lokasi	7.414	2.237	5928	2.811	12.433	1.616

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.173.
Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	REALISASI				TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2022)
		2020	2021	2022	2023	
1.	Penetapan Lokasi	5.928 Bidang (493,4437 Ha)	2.811 Bidang (± 858,8916 Ha)	+ 12.433 Bidang (1.223,60 Ha)	1.616 Bidang (411,68 Ha)	25.025 Bidang (3.230,515 Ha)
2.	Reforma Agraria					
	a). Sertifikasi LP2B	200 Bidang	350 Bidang	150 Bidang	650 Bidang	1.450 Bidang
	b). Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD)	15 Bidang	0	63 Bidang	37 Bidang	130 Bidang
	c). Inventarisasi Tanah HP dan HGU	20 Bidang	10 Bidang	30 Bidang	27 Bidang	107 Bidang
	d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria	100 Orang	260 Orang	350 Orang	350 Bidang	1.167 Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam rangka mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif berupa sertipikasi gratis tanah yang yang masuk dalam kawasan LP2B. Melalui program ini diharapkan masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahan serta status lahan yang memiliki kepastian hukum (bersertipikat). Namun hal ini masih perlu dukungan program lainnya yang dapat memberikan insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan keuntungan bagi masyarakat petani yang memiliki lahan dikawasan LP2B. Capaian stimulasi pembuatan sertipikat lahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.174.
Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Jumlah Bidang
1	Cilacap	Maos	Kalijaran	70	70
			Panisihan	40	40
			Glempang	110	110
			Karangrena	30	30
2	Blora	Kunduran	Cungkup	100	100
			Botoreco	100	100
3	Wonosobo	Mojotengah	Pungangan	100	100
		Kertek	Sudungdewo	100	100
Total				650	650

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175.

Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
1	Kabupaten Tegal	Kecamatan Balapulang	Desa Balapulang Kulon	Sebagian besar masyarakat Desa Balapulang Kulon dengan pekerjaan pokok adalah petani, namun belum didukung dengan irigasi teknis dan merupakan sawah tadah hujan dengan irigasi non teknis, sehingga yang diperlukan adalah pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan embung desa (namun sulit terealisasi karena jauh dari sumber mata air) atau pun dengan pembuatan sumur bor. Dalam rangka mengatasi atau memperbaiki jaringan irigasi sawah tersebut Pemerintah Desa Balapulang Kulon telah menginisiasi kerjasama dengan Desa sekitar dan Instansi terkait bail Kabupaten maupun Provinsi, namun sampai saat ini belum terealisasi, hal ini menyebabkan 50% nya lahan sawah gagal terutama yang letaknya jauh dari sumber air. Selain itu menurut warga penggarap hama yang serig menyerang lahan	50 KK	Pelatihan “Pengelolaan Lahan Pertanian Tadah Hujan” dan “Penanggulangan Hama Wereng”

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				pertanian adalah hama wereng.		
2	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sambirejo	Desa Jetis	Permasalahan yang dihadapi di Desa Jetis yaitu terkait masalah pupuk dikarenakan pembelian pupuk sekarang di batasi sehingga tiddak bias mencakupi luas lahan para petani yang mengaki batkan hasil pertanian yang kurang optimal, sebagian kecil warga masyarakat Desa Jetis berinisiatif untuk membuat pengolahan pupuk kandang organik namun harapannya sebagian besar masyarakat desa dapat menerapkan pembuatan pupuk organik untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk warga sendiri. Selain itu, Pemdes Jetis juga mendapatkan keluhan dari petani terkait penyakit tanaman yang menyerang tanaman mereka seperti busuk leher/jamur pada tanaman dan rata – rata pada tanaman padi	50 KK	Pelatihan Penanganan Busuk Leher Pada Tanaman Padi dan Pembuatan Pupuk Organik
3	Kabupaten Grobogan	Kecamatan Tegowanu	Desa Tegowanu Wetan	Permasalahan yang sering di hadapi oleh petani di antaranya kurangnya pasokan pupuk bagi petani meskipun sudah ada beberapa kelompok tani yang sekarang sudah mengembangkan pupuk organik dari sampah daun – daun kering akan tetapi kelompok tani yang sudah berinisiatif membuat pupuk organik namun masih sebagian kecil. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan mempunyai rencana kedepannya desa mereka akan di jadikan obyek wisata terkait tanaman	50 KK	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Mendukung Pertanian Organik

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				organik. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan juga mengharapkan selain pengolahan sampak organik menjadi pupuk di harpakan juga warga masyarakat bias mengolah sampah rumah tangga guna di jadikan obat, pupuk maupun hal hal lainnya, selain itu karena konsep kedepannya akan dijadikan wisata organik pemerintah desa tegowanu wetan masih terkendala terkait serifikasi organiknya		
4	Kabupaten Pati	Kecamatan Gabus	Desa Wuwur	Hasil utama pertanian di Desa Wuwur yaitu padi. Terkait permasalahan yang terdapat di Desa Wuwur yaitu hama tikus serta hama burung. Sementara ini penanganan masih menggunakan setrum/listrik untuk hama tikus serta hama burung hanya secara manual para petani yaitu di usir oleh tangan saja. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wuwur membutuhkan penanganan yang efektif terkait permasalahan hama tikus dan hama burung tersebut.	50 KK	Kegiatan Akses Reform Pelatihan Pemanfatan Burung Hantu (Tyto Alba) sebagai Pengendali Hama Tikus dengan pokok bahsan tata cara pemeliharaan dan pemanfatan burung hantu untuk penanggulangan hama tikus serta penanganan hama tikus untuk meningkatkan perekonomian desa
5	Kabupaten Wonosobo	Kecamatan Kejajar	Desa Sigedang	Potensi yang berada di Desa Sigedang merupakan tanaman kentang, namun selama ini para warga menanam kentang dengan bibit yang di ekspor dari wilayah lain (Jawa Barat). Se jauh ini di Desa Sigedang yaitu belum terlalu banyak warga masyarakat maupun kelompok tani yang berminat untuk melakukan pembuatan bibit kentang sehingga produksi pembibitan kentang masih rendah,	50 KK	Peningkatan Budidaya Bibit Kentang dan Pengembalian Fungsi Lahan Secara Organik

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				padahal telah dilakukan sertifikasi pembibitan kentang. Sehingga secara legalitas bibit kentang sudah dapat di komersilkan maupun di pakai sendiri.		
6	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sambungmacan	Desa Sambung Macan	Desa Sambungmacan memiliki danau kecil yang ditengahnya terdapat pulau kecil, yang merupakan potensi untuk menjadi wisata desa. Dan harapan kedepannya di tengah pulau kecil di danau tersebut akan dikembangkan untuk wisata pertanian organik di Desa Sambungmacan	50 KK	Pelatihan Pertanian Organik untuk Mendukung Wisata Desa
7	Kabupaten Cilacap	Kecamatan Maos	Desa Mernek	Mernek telah memiliki 4 pilar MERNEK JENEK yaitu lingkungan lestari, pertanian, perikanan, & perternakan melimpah, kemandirian ekonomi serta desa aman dan kondusif. Potensi Desa Mernek yang salah satunya yaitu Gapoktan yang aktif memiliki kegiatan rutin dan menjadi salah satu factor untuk mengembangkan wisata Desa organik di Desa Mernek	50 KK	Pelatihan Pengelolaan Lahan Organik Menuju Wisata Desa

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah , 2022

2.7 Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemanan perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga.

Upaya yang telah dilakukan yaitu terkait dengan terselesaikannya seluruh pelanggaran Produk hukum daerah yang terinventarisasi melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda

tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya.

Berbeda dengan penegakan hukum yang ada, secara intensitas atas patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Provinsi Jawa Tengah tiap tahun terus menurun, sehingga kurang dapat menciptakan kondisi yang tentram disebagian daerah. Rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi. Selain itu jumlah Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya masih cukup rendah. Hingga tahun 2023 masih sebanyak 15.382 Linmas yang sudah ditingkatkan kapasitasnya atau sebesar 6,76% dari jumlah linmas tahun 2023.

Tabel 2.176.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Linmas	Peningkatan Kapasitas Linmas
1	2019	230.782	34.490.835	66,91	5.420
2	2020	239.430	36.516.035	66,57	560
3	2021	240.958	36.516.035	65,98	840
4	2022	241.349	37.032.410	65,17	2.488
5	2023	227.415	37.540.962	60,58	6.830

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2022

Mendasarkan atas upaya yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan kinerja dan langkah kongkrit dalam cipta kondisi. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2023, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 16 kasus saja.



Gambar 2.125.

Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinnekaan masyarakat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinnekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Berdasarkan rilis oleh Kementerian Agama, IKUB Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana skors tahun 2022 sebesar 74,28, sedangkan di tahun 2023 sebesar 76,02.

Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya.

Informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2023

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.177.
Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2023 Terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Jumlah Indika- tor	Sangat Tinggi: 91%≤100%		Tinggi : 76 % ≤ 90%		Sedang : 66 % ≤ 75 %		Rendah : 51 % ≤ 65 %		Sangat Rendah : ≤ 50 %	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
I K U	13	10	76,92	3	23,08	0	0	0	0	0	0
I K P P D	194	151	77,84	15	7,73	6	3,09	9	4,64	13	6,70

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023 (hasil analisis)

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 10 indikator Sangat Tinggi dan 3 indikator Tinggi.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 151 indikator Sangat Tinggi, 15 indikator Tinggi, 6 indikator Sedang.

2.9. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah makro yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Berdasarkan data yang ditampilkan dan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 maka permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk diselesaikan pada Tahun 2025. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing untuk Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan.

Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen, turun 0,21 persen dari bulan September 2022. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,36 persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar antara lain merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utamanya bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah akan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah nasional meskipun termasuk dalam kategori tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan Jawa Tengah masih perlu perhatian yang ditunjukkan dari beberapa variabel indeks pemberdayaan gender Jawa Tengah yang masih rendah. Tantangan dalam pembangunan perempuan Jawa Tengah yaitu berupa kemauan atau motivasi, pandangan atau budaya patriarki di masyarakat terhadap perempuan.

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari internalisasi nilai budaya, agama, dan sikap mental masyarakat Jawa Tengah. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kontribusi budaya dalam pembangunan di Jawa Tengah menurun yang

ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Tengah tahun 2021 yang semakin menurun dari tahun 2018.

Selain itu kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja Jawa Tengah belum optimal. Permasalahan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 43,09 persen di tahun 2021. Sementara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang sebesar 5,95 persen justru didominasi oleh penduduk usia kerja lulusan SMK, dan terendah adalah lulusan SD. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk Jawa Tengah semakin meningkat.

3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 sampai dengan triwulan III meningkat positif jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yaitu sebesar 5,36 persen (*c to c*) dimana tahun 2021 sebesar 2,63 persen (*c to c*). Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata), kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukkan dari Rasio Gini Jawa Tengah. Tahun 2022, Rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366 menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,368.

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2021 sebesar 67,48 masuk dalam kategori sedang. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah yang sebesar 125,73 di tahun 2021.

5. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta

kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

6. Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.

Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sebuah daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dinilai cukup kondusif yang ditunjukkan dari indeks ketahanan daerah dengan kategorisasi cukup Tangguh, disertai hal-hal kongkrit yaitu semakin menurunnya angka kejadian konflik. Meskipun demikian, berbagai risiko ancaman kondusivitas daerah di Jawa Tengah perlu dilakukan antisipasi, Dimana saat ini terbukanya informasi tanpa batas (*borderless*) menjadi ancaman nyata dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Jawa Tengah yang ditandai dengan permasalahan antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan;
- b. Akses pemerataan layanan pendidikan belum memadai;
- c. Masih kurangnya mutu pendidikan.

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

- a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;

- b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu;
- c. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan Kesehatan lansia;
- d. Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk;
- e. Masih belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan rujukan melayani 9 prioritas layanan unggulan;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

- a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan. Selain itu terdapat titik rawan longsor pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
- b. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman;
- c. Belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
 - 1) pemanfaatan sumber daya air antara lain kurangnya ketersediaan air, kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
 - 2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
- e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:

- a. Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni;
- b. Keterbatasan ketersediaan lahan yang aman dari bencana dan sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota untuk penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi program pemerintah
- c. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:

- a. Peraturan daerah yang ada tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

- b. Minimnya pemberdayaan satlinmas yang ada di daerah;
 - c. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;
 - d. Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di wilayah rawan bencana;
 - e. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana;
 - f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana;
 - g. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
6. Sosial
- Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:
- a. Rendahnya penanganan PPKS;
 - b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
 - c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

 - a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak bekerja (*Not in Employment, Education or Training*);
 - b. Sarana dan Prasarana pada Balai Latihan Kerja yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan industri saat ini;
 - c. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
 - d. Belum optimalnya kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Belum optimalnya hubungan industrial.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

 - a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
 - b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
 - c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih

mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan

Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.

b. Keterjangkauan

Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.

c. Pemanfaatan

Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

4. Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanian adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanian, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanian di Jawa Tengah;

b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;

c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;

d. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .

e. Belum optimalnya penyelenggaraan Zonasi Nilai Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, disebabkan oleh:

1) Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya;

2) Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dan aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy);

3) Beberapa tekanan lingkungan hidup antara lain perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan (air, lahan, udara),

dan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup; dan

- 4) Meningkatnya Degradasi lahan dan keanekaragaman hayati
- b. Meningkatnya risiko bencana alam dan perubahan iklim
- c. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK
- d. Meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota;
- b. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi swasta;
- c. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian desa ditunjukkan dengan presentase desa mandiri yang masih rendah dan masih adanya desa tertinggal di Jawa Tengah
- b. Pengembangan BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya belum optimal
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- d. Kerjasama kawasan perdesaan skala provinsi masih rendah

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

- a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
- b. Masih rendahnya kepesertaan KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

- a. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, yang ditandai dengan : Belum optimalnya kinerja terminal (menurunnya jumlah kunjungan kendaraan), belum meratanya persebaran dan pemenuhan kebutuhan terminal serta dukungan terminal sebagai simpul perekonomian; Masih kurangnya pemenuhan halte Trans Jateng; Masih belum selesainya rencana reaktivasi rel kereta api oleh Pemerintah

Pusat dan Belum juga selesainya pelimpahan aset pelabuhan pengumpan regional dari Pusat.

- b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, yang ditandai dengan : Tingginya dan semakin meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia serta tingkat fatalitas; Masih rendahnya tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan di ruas provinsi dan upaya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Belum optimalnya penanganan perintasan dengan rel kereta api dan fasilitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota.
- c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan : Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna Trans Jateng seiring dengan peningkatan *load factor* Trans Jateng dan Belum optimalnya integrasi antara Trans Jateng dengan angkutan perkotaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
- b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

12. Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah perlunya mendorong peningkatan realisasi dan persebaran penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:

- a. Belum selarasnya koordinasi antar instansi Kementerian/ Lembaga/ Pemda dalam penyusunan dan implementasi regulasi, khususnya regulasi terkait perizinan dan penanaman modal;
- b. Belum sempurnanya pelayanan perijinan melalui aplikasi *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
- c. Ketersediaan lahan untuk usaha yang sesuai dengan tata ruang masih bermasalah di sebagian wilayah;
- d. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal yang belum sepenuhnya mendukung investasi;

- e. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan DUDI;
- f. Belum ada persamaan persepsi antara masyarakat, pemerintah dan investor terhadap penanaman modal yang berakibat masih kurangnya partisipasi terhadap kehadiran penanaman modal;
- g. Belum optimalnya keberadaan kawasan industri karena harga sewa tanah yang relatif mahal dan kondisi kawasan belum sepenuhnya sesuai dengan kegiatan usaha calon investor.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda dan kebugaran masyarakat, dengan permasalahan antara lain meliputi:

- a. Daya saing pemuda masih rendah;
- b. Prestasi olahraga belum memadai;
- c. Tingkat partisipasi olahraga masih kurang.

14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan.

15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan.

16. Kebudayaan

Permasalahan utama yang masih dihadapi urusan kebudayaan di Jawa Tengah adalah: Belum optimalnya pemajuan kebudayaan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, antara lain: Dari sisi kuantitas dan kualitas, SDM Kebudayaan masih kurang; Inventarisasi dan validitas data kebudayaan masih lemah; serta kurangnya sinergitas antar pemangku kebudayaan; Belum tersedianya ekosistem yang adaptif, kokoh dan tangguh sebagai penopang ketahanan budaya sekaligus pemajuan kebudayaan.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan belum optimalnya digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan,

kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;

- b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

a. Produksi sektor pertanian

Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Kesejahteraan petani dan peternak

Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

- a. Adanya penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis menyebabkan penurunan daya dukung DAS, rusaknya habitat keanekaragaman hayati
- b. Adanya degradasi ekosistem pesisir
- c. Adanya peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan;
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan)
- e. Masih terjadinya ancaman terhadap perlindungan kawasan hutan (kebakaran hutan, pencurian, dan perambahan)

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan yang dihadapi penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan ketahanan energi, pengelolaan air tanah, pemanfaatan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disertai dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi

Persentase pemanfaatan EBT tahun 2023 sebesar 15,98 persen dari total bauran energi di Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini, penggunaan energi fosil mendominasi sebesar 84,02 persen. Efek buruk dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai sumber energi utama adalah sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga berpotensi dapat menyebabkan krisis energi.

b. Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita

Permasalahan konsumsi listrik erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Jika masyarakat pendapatannya bertambah maka pola konsumsi listriknya berpotensi bertambah. Pada sisi *demand*, konsumsi listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Konsumsi listrik di Jawa Tengah sebesar 757,54 kWh/kapita pada 2023, Jawa Timur sebesar 907

kWh/kapita, Jawa Barat sudah mencapai 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif. Tingkat *availability* listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang pada tahun 2023 sebesar 1,52. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki *reserve margin* (cadangan daya) sebesar 52 persen, yang telah terintegrasi dalam sistem transmisi Jawa Madura Bali. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah.

c. Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Masih terdapat komoditas unggulan yang belum mendapatkan perhatian dari masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemanfaatan dari potensi tersebut belum optimal. Rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*Good Mining Practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 317 pemegang Ijin Usaha Pertambangan, dan dari jumlah tersebut yang telah melaksanakan pertambangan yang baik sebesar 96,53 persen pada tahun 2023.

d. Meningkatnya pemanfaatan air tanah

Jumlah pengambilan air tanah di Jawa Tengah cenderung naik secara fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah pengambilan air tanah menunjukkan penurunan. Walaupun demikian, pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) kritis dan rusak. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi laju *land subsidence* di Provinsi Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

7. Perindustrian

Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya

produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.

8. Transmigrasi

Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

E. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya. Di sisi lain, dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

2. Keuangan

Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

- a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
- b. Belum optimalnya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
- c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap penerimaan PAD;
- d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD.

3. Kepegawaian

Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN dalam hal distribusi ASN sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi, serta masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan adalah masih belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah antara lain :

- 1. Potensi radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan teorisme masih tergolong tinggi di beberapa daerah;
- 2. Internalisasi kebhinekaan yang belum optimal;
- 3. Terjadinya degradasi rasa toleran dimasyarakat;
- 4. Masih perlunya pendidikan politik bagi Masyarakat, terkhusus pada pemilih pemula;
- 5. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masih perlu untuk didorong.

2.9.3 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi antara lain analisis isu dari berbagai kebijakan yang ada, *focus group discussion* bersama stakeholder pentahelix, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah baik isu secara global, nasional, maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178.

Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Tahun 2025

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RKP)	Permasalahan Daerah (RPJPD)	Isu Strategis Daerah (RPJPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD)	Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan RPD
1. Kemiskinan	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Masih cukup tingginya angka kemiskinannya	Masih cukup tingginya angka kemiskinannya	Tema: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Tema: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Pangan dan Gizi	2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka	Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka	Prioritas:	Prioritas:
3. Kesehatan	3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan	Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RKP)	Permasalahan Daerah (RPJPD)	Isu Strategis Daerah (RPJPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD)	Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan RPD
				infrastruktur	infrastruktur	berkualitas	
4. Pendidikan	4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh	Ketahanan pangan	4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5. Gender	5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi	Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal	5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
6. Air bersih dan sanitasi	6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan	Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RKP)	Permasalahan Daerah (RPJPD)	Isu Strategis Daerah (RPJPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD)	Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan RPD
				kondusivitas daerah	kondusivitas daerah		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
7. Energi	7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan, penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah	7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja		Belum optimalnya kondusivitas wilayah					Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
9. Infrastruktur		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi					Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RKP)	Permasalahan Daerah (RPJPD)	Isu Strategis Daerah (RPJPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)	Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD)	Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan RPD
							dan makmur
10. Kesenjangan Kota dan Permukiman		Demokrasi substansial					
11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan							
12. Perubahan iklim							
13. Sumberdaya kelautan							
14. Ekosistem daratan							
15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan							
16. Kemitraan global							

Berdasarkan telaah pada tabel diatas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 masih dihadapkan pada isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama isu kemiskinan. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah tahun 2023 periode Maret tercatat sebesar 10,77 persen. Meskipun menurun 0,21 poin jika dibandingkan pada periode September 2022 sebesar 10,98 persen, namun tingkat kemiskinan Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen. Isu lain yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah pendapatan per kapita yang masih rendah. Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Jawa Tengah sebesar 42,15 juta rupiah per kapita lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 71,03 juta rupiah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu daerah pada tahun 2025, ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2023 periode bulan Maret sebesar 0,369 meningkat dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,366. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2025 sebagai berikut.

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Perekonomian daerah Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2023 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,07 persen. Kondisi ini melambat dibandingkan pencapaian secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 (c-to-c) yang sebesar 5,34 persen. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta sebesar 5,00 persen, Jawa Timur 5,02 persen, dan Jawa Barat 4,94 persen. Hal tersebut mengindikasikan, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, dunia usaha, dan didukung peran pemerintah dalam memberikan stimulus lewat belanja pemerintah, berjalan sangat optimal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jawa Tengah tetap tumbuh positif didukung dengan sektor-sektor unggulan daerah Jawa Tengah antara lain sektor pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, UMKM, koperasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif sejalan dengan tingkat inflasi Jawa Tengah pada Desember 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y) lebih baik dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y).

Seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan dari penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah sepanjang Agustus 2022-Agustus 2023 sebanyak 1,60 juta orang, yang berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada periode Agustus 2023 sebesar 5,13 persen menurun 0,44 persen poin dibandingkan periode Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen. Kondisi perekonomian daerah yang membaik juga memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan Desember 2023 sebesar 117,11 tertinggi di Pulau Jawa naik 0,71 persen dibandingkan dengan bulan November 2023 yang sebesar 116,29.

Perekonomian Jawa Tengah yang membaik pada tahun 2023 ke depan akan menghadapi tantangan perekonomian daerah pada tahun 2025. Tantangan tersebut antara lain adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih berdaya saing, dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya. Perekonomian daerah agar tumbuh optimal ke depan didukung dengan upaya meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tantangan lain ke depan adalah inisiasi penerapan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan, serta ekonomi yang semakin merata atau inklusif. Hal tersebut didukung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, penguatan riset dan inovasi juga harus terus didorong agar dapat semakin mengoptimalkan produktivitas perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2025.

Agar ekonomi semakin tumbuh merata, maka kebutuhan akan infrastruktur yang semakin berkualitas dan merata menjadi prasyarat untuk dipenuhi. Penyediaan infrastruktur adalah sebagai akses distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur antara lain dengan penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar

wilayah sesuai dengan arah kebijakan wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.

Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,39 dan masih berada di bawah IPM Nasional yang sebesar 74,39. Isu pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan antara lain berkaitan dengan pendidikan berkualitas yang inklusif terutama pada penyediaan akses, mutu, relevansi, serta partisipasi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) Jawa Tengah yang pada tahun 2023 sebesar 8,01 tahun atau setara kelas 2 SMP, di bawah nasional yang sebesar 8,77 tahun. Sementara harapan lama sekolah (HLS) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 12,85 tahun, juga lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 13,15 tahun. Kondisi RLS dan HLS lebih mengarah pada representasi partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jawa Tengah. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi kualitas pendidikan di Jawa Tengah ditunjukkan dengan skor literasi dan numerasi. Berdasarkan pada rapor pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud, pada kurun waktu 2022 dan 2023 diperoleh rerata capaian terendah literasi berada pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 36,75, tertinggi pada jenjang pendidikan menengah umum (SMA) sebesar 47,15, sedangkan numerasi terendah pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 39,86, tertinggi pada jenjang pendidikan khusus (SMPLB) sebesar 57,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan numerasi lebih baik dibandingkan literasi.

Isu pembangunan SDM lainnya adalah kesehatan untuk semua yang dihadapkan pada ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi). Hal ini ditunjukkan dengan usia harapan hidup (UHH) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 74,69 tahun, lebih baik dari UHH Nasional yang sebesar 73,93 tahun. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Tengah. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 59,43 membaik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 55,24. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang pada tahun 2022 sebesar 58,16

membaik dari tahun 2021 yang sebesar 56,10. Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 92,48 pada tahun 2021 menjadi 92,83 pada tahun 2022, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen HLS laki-laki, RLS perempuan, UHH laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan penurunan dari 8,97 pada 2021 menjadi 7,47 pada tahun 2022, serta angka pernikahan usia anak masih cukup tinggi yaitu 11.366 perkawinan.

Pembangunan SDM juga berkaitan dengan isu perlindungan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Kondisi perlindungan sosial di Jawa Tengah masih dihadapkan belum akuratnya penerima manfaat dan belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi. Tercatat dari total penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,8 juta jiwa hanya sekitar 1,8 juta penduduk atau 47,36 persen yang mendapat jaminan perlindungan sosial karena perlindungan sosial seharusnya dapat menjangkau seluruh penduduk rentan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terdampak.

3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2025. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui terutama daya dukung air yang sudah terlampaui pada tahun 2022. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di tahun 2022 sebesar 67,53 masuk dalam kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas ketahanan iklim. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Potensi risiko bencana ditunjukkan dengan indeks risiko bencana Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencapai 115,38 atau dalam kategori sedang.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025. Tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dalam kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 mencapai angka 81,30 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,79.

Tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administratif, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis

dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme *co-creator* dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2023 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 serta berpotensi masih akan berlangsung di Tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, Israel-Iran, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
3. Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan disertai melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*slower and divergent growth*);
4. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan yield USD mendorong *capital outflow* dari *Emerging Market*;
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geo-economic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem, bencana alam);
9. Digitalisasi dan *Aging Population*.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 3,1 persen (2024) dan 3,2 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,1 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,6 persen (2024) dan 4,1 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,5 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen (2024) dan 5,0 persen (2025).

World Bank (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,4 persen (2024) dan 2,7 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,7 persen (2024) dan 1,6 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen (2024) dan 4,3 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,4 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen (2024) dan 6,5 persen (2025).

Asian Development Bank (ADB) (rilis Desember 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 untuk negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024), negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,3 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,6 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,7 persen (2024) dan 3,0 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,5 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen (2024) dan 1,2 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,7 persen (2024) dan 4,2 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,1 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen (2024) dan 5,2 persen (2025).

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024. Tanda-tanda membaik (*upside risks*) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa risiko (*downside risk*) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo Ekonomi Fragmentasi dan Proteksionisme; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan risiko *debt distress*; (6) *Shock* akibat perubahan iklim.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (*c-to-c*), sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (*c-to-c*). Kemudian pada triwulan II Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05 persen (*y-o-y*) lebih rendah dibandingkan periode yang sama Tahun 2023 sebesar 5,17 persen (*y-o-y*). Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Triwulan II Tahun 2024, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh positif sebesar 4,93% menunjukkan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,43%, Ekspor tumbuh sebesar 8,28% dan pertumbuhan tertinggi didorong oleh Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh sebesar 9,98%. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB menunjukkan tren pertumbuhan positif yaitu industri pengolahan tumbuh 3,95%, pertanian tumbuh 3,25%, perdagangan 4,86%,

konstruksi 7,29%, dan pertambangan 3,17%. Sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17% karena adanya event berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) *Prompt Manufacturing Index* (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga ditengah gejolak perekonomian dunia. Tema Pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah (RKP)) Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko, *game changers* transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, *Super Platform*, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (%)	: 5,1 - 5,5;
2. Inflasi (%)	; 1,5 - 3,5;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	: 5,0 – 4,5;
4. Angka Kemiskinan (%)	: 8,0 - 7,0;
5. Rasio Gini	: 0,379 – 0,382;
6. Indeks Modal Manusia (nilai)	: 0,56;
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	: 38,6.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (*c-to-c*). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (*c-to-c*), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global. Kemudian pada triwulan II 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,92% (*y-on-y*) melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 4,97% (*y-on-y*) dan lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,05 persen (*y-o-y*) akan tapi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,92 persen (*y-o-y*).

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu. Kemudian pada Triwulan II 2024 pertumbuhan tertinggi masih didukung sektor akomodasi makan minum sebesar 11,43 persen karena adanya event berskala regional, nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan. Kemudian pada Triwulan II 2024 pertumbuhan tertinggi masih didukung pengeluaran konsumsi LNRT sebesar 18,76 persen (yoy), diikuti impor barang dan jasa sebesar 12,39 persen (yoy) dan ekspor barang dan jasa sebesar 8,78 persen (yoy).

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,39% pada Februari 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 10,47% pada Maret 2024. Sedangkan Laju inflasi dalam tren yang membaik, tercatat sebesar 1,86% (y-on-y) pada bulan Juli 2024 lebih baik dari capaian bulan Juni 2024 sebesar 2,22% (y-on-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 49,30 – 49,73 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan

dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 – 0,367 di tahun 2025.

Tabel 3.1.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 – 5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	49,30 – 49,73
3	Inflasi	%	1,5 – 3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 – 4,42
5	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00
6	Rasio Gini	Angka	0,362 – 0,367

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs*

dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan adanya dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat, akan tetapi penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 18,23 persen pada tahun 2025 yang disebabkan oleh penurunan PKB sebesar 33,08 persen dan BBNKB sebesar 22,50 persen. Pemberlakuan UU HKPD juga membawa konsekuensi adanya

penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 5,509 triliun rupiah meningkat sebesar 77,36 miliar rupiah (1,42 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar 5,432 triliun rupiah. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2023 sebesar 2,963 triliun rupiah meningkat 77,83 miliar rupiah (2,7 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2022 yang sebesar 2,886 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,667 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 418,83 miliar rupiah (18,63 persen) dibanding penerimaan tahun 2022 sebesar 2,248 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2023 sebesar 17,05 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 1,74 miliar rupiah (9,3 persen) dibanding penerimaan tahun 2022 sebesar 18,80 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 80,50 miliar (2,78 persen) rupiah dari realisasi tahun 2022 sebesar 2,898 triliun rupiah menjadi 2,818 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2023 sebesar 139,32 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 24,17 miliar rupiah (20,99 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2022 sebesar 115,15 miliar rupiah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 638,48 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 91,76 miliar rupiah atau 16,78 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar 546,71 miliar rupiah.

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 7,810 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 8,278 triliun rupiah pada tahun 2023.

3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 – 2022 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 78,29 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 14,13 miliar rupiah (15,30 persen) dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 92,43 miliar rupiah.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	26.633.000.085.963	24.167.935.634.127	25.369.913.414.883
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.695.474.898.162	16.264.618.853.852	17.012.689.279.214
Pajak Daerah	11.718.378.320.505	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351
Retribusi Daerah	91.634.269.205	115.158.014.199	139.364.048.636
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	508.263.876.971	546.717.104.899	638.482.406.528
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.377.197.927.406	2.117.892.583.014	2.258.200.107.699
PENDAPATAN TRANSFER	11.871.796.336.054	7.810.882.578.787	8.278.928.086.424
Dana Bagi Hasil Pajak	1.023.258.872.325	909.711.090.450	923.168.698.355
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	12.586.758.109	18.989.623.430	9.942.824.636
Dana Alokasi Umum	3.432.978.859.000	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500
Dana Alokasi Khusus (fisik)	401.885.567.398	371.734.785.185	425.034.850.842
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.932.375.674.222	3.013.376.489.317	3.275.155.012.091
Dana Insentif Daerah	68.710.605.000	61.352.500.000	87.197.945.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.728.851.747	92.434.201.488	78.296.049.245
Pendapatan Hibah	64.882.003.502	92.161.740.403	77.972.123.308
Lain lain pendapatan	846.848.245	272.461.085	323.925.937

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited.

Selama kurun waktu tahun 2021-2023, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2023 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 67,06 persen, pendapatan transfer sebesar 32,63 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,31 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2023 mencapai 82,91 persen.

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 – 2023 (%)

Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	100%	100%	100%	100%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55,18%	67,30%	67,06%	63.18%
Pajak Daerah	44,00%	55,80%	55.09%	51.63%
Retribusi Daerah	0,34%	0,48%	0.55%	0.46%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,91%	2,26%	2.52%	2.23%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,93%	8,76%	8.90%	8.86%
PENDAPATAN TRANSFER	44,58%	32,32%	32,63%	36.51%
Dana Bagi Hasil Pajak	2,89%	3,76%	3.64%	3.43%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,00%	0,08%	0.04%	0.37%
Dana Alokasi Umum	12,89%	14,22%	14.03%	13.71%
Dana Alokasi Khusus (fisik)	1,51%	1,54%	1.68%	1.58%
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	26,03%	12,47%	12.91%	17.14%
Dana Insentif Daerah	0,26%	0,25%	0.34%	0.28%
Dana Penyesuaian	0,00%	0,00%	-	0.00%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00%	0,00%	-	0.00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,25%	0,38%	0,31%	0.31%
Pendapatan Hibah	0,24%	0,38%	0.31%	0.31%
Lain-Lain Pendapatan	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah ditargetkan naik sebesar 1,462 triliun rupiah menjadi sebesar 26,831 triliun rupiah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,216 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 8,591 triliun rupiah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu berupa Hibah sebesar 22,750 miliar rupiah. Pajak Daerah masih menjadi kontribusi terbesar penyumbang PAD ditargetkan sebesar 15,471 triliun rupiah atau naik sebesar 1,495 triliun rupiah dari realisasi tahun 2023. Retribusi Daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,539 triliun rupiah menjadi sebesar 1,678 triliun rupiah. Kenaikan yang cukup besar tersebut sebagai dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penerimaan atas jasa layanan BLUD menjadi objek Retribusi Jasa Umum, sehingga terdapat penyesuaian pencatatan komponen pendapatan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 49,071 miliar menjadi sebesar 687,553 miliar rupiah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar 379,971 miliar rupiah, karena BLUD berpindah ke Retribusi Daerah.

Tabel 3.4.		
Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024		
NO	URAIAN	TAHUN 2024
1.	PAD	18.216.864.276.000
1.1.	Pajak Daerah	15.471.102.880.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.678.236.270.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	687.553.929.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	379.971.197.000
2.	Pendapatan Transfer	8.591.957.067.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.750.000.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	26.831.571.343.000

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024.

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,80-5,60 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2021-2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,549 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 15,519 triliun rupiah menurun sebesar 2,697 triliun atau 14,81 persen, pendapatan transfer sebesar 8,006 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,47 miliar rupiah. Penurunan proyeksi pendapatan asli daerah dikarenakan mekanisme opsen pajak sebagai konsekuensi pemberlakuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Pendapatan transfer tahun 2025 diproyeksikan menurun 585,57 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 8,591 triliun rupiah. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.5.		
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025		
NO	URAIAN	TAHUN 2025
	PENDAPATAN DAERAH	
1.	PAD	15.519.788.406.000
1.1.	Pajak Daerah	12.650.725.636.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	707.349.144.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000
2.	Pendapatan Transfer	8.006.377.888.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.476.500.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.549.642.794.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2024.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
- b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
- c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (Samsat Corporate, Mitra Putra Bangsa);
- d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (GADIS PANTURA, CHIPS, Lets Activate New Sakpole and Signal (LANS), influencer Jawa Tengah) dan pelaksanaan door to door;
- e. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- f. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIAS) 2025;
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- h. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- i. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- j. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
- k. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- l. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2023 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 93,85 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 907 miliar rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 276 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 610 miliar rupiah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2024 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari, maka penyerapan APBD Tahun 2023 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring mulai dibayarkannya Gaji PPPK (Pendidikan dan Kesehatan) dan kenaikan tambahan penghasilan ASN, kegiatan dalam Belanja Barang dan Jasa dapat berjalan maksimal karena aktivitas masyarakat sudah mulai normal, meningkatnya Belanja Subsidi yang diarahkan pada penanganan inflasi melalui stabilisasi harga, dan penyegaran aset tetap sehingga Belanja Modal mengalami kenaikan. Sedangkan realisasi belanja yang kurang optimal dikarenakan sisa hasil pengadaan seperti sisa pengadaan tanah untuk TPST Regional Magelang, sisa lelang renovasi asrama atlet maupun beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Tabel 3.6.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	25.843.800.193.834	23.950.350.260.348	25.792.831.703.331
BELANJA OPERASI	16.826.577.831.470	13.456.887.671.949	14.839.193.203.154
Belanja Pegawai	5.685.925.255.020	5.902.903.886.767	6.362.330.027.856
Belanja Barang dan Jasa	5.345.399.454.776	5.377.369.153.895	5.742.522.778.584
Belanja Subsidi	90.482.166	4.958.884.836	5.350.753.069
Belanja Hibah	5.728.982.384.318	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760
Belanja Bantuan Sosial	66.180.255.190	78.894.181.648	118.686.467.885
BELANJA MODAL	1.447.620.411.245	1.713.641.630.081	1.835.940.083.456
BELANJA TAK TERDUGA	72.303.305.000	16.545.479.100	740.000.000
BELANJA TRANSFER	7.497.298.646.119	8.763.165.716.275	9.116.958.416.721
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	5.735.553.033.353	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	493.309.827.766	804.934.393.793	653.134.590.053
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.268.435.785.000	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, anggaran Belanja Daerah naik sebesar 2,056 triliun rupiah menjadi sebesar 27,849 triliun rupiah, yang meliputi Belanja Operasi sebesar 16,165 triliun rupiah, Belanja Modal sebesar 1,703 triliun rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 25,158 miliar rupiah, dan Belanja Transfer yaitu berupa Belanja Bagi Hasil sebesar 6,907 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 3,048 triliun rupiah. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 16,165 triliun rupiah, Belanja Barang dan Jasa sebesar 5,765 trliun rupiah, Belanja Subsidi sebesar 1 miliar rupiah, Belanja Hibah sebesar 36,783 miliar rupiah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 1,703 triliun rupiah.

Tabel 3.7.
Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		16.165.486.886.000
1	Belanja Pegawai	7.573.527.979.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.765.363.499.000
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000
4	Belanja Hibah	2.788.812.408.000
5	Belanja Bantuan Sosial	36.783.000.000
BELANJA MODAL		1.703.224.650.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.158.773.000
BELANJA TRANSFER		9.955.407.650.000
1	Belanja Bagi Hasil	6.907.335.038.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.048.072.612.000
JUMLAH BELANJA		27.849.277.959.000

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024.

Komposisi belanja daerah tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan menurun 14,14 persen dari tahun 2024 menjadi sebesar 23,911 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2025 meliputi:
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,

- serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
 - h. Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
 4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
 5. Dukungan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan daerah;
 6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
 7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
 8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk

- mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2025 terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada

Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.8.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		15.389.713.402.000
1	Belanja Pegawai	7.582.145.530.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.560.651.000
3	Belanja Subsidi	9.274.000.000
4	Belanja Hibah	2.428.133.221.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		1.253.873.852.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000
BELANJA TRANSFER		7.243.355.540.000
1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	4.196.561.232.000
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota & Pem Desa	3.046.794.308.000
JUMLAH BELANJA		23.911.942.794.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2021-2023 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 3.9.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	646.492.992.625	1.018.773.865.813	1.330.599.602.535
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	861.492.992.625	1.909.773.865.813	1.330.599.602.535
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	861.376.784.856	1.435.692.146.361	1.236.469.002.535
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	116.207.769	474.081.719.452	94.130.600.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	215.000.000.000	891.000.000.000	-
Pembentukan dana cadangan	200.000.000.000	400.000.000.000	
Penyertaan modal	15.000.000.000	491.000.000.000	

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 audited, 2023 unaudited.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan cukup besar karena adanya pencairan dana cadangan guna mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak.

Tabel 3.10.
Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	1.087.706.616.000
	SiLPA	581.837.216.000
	Pencairan Dana Cadangan	505.869.400.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto Daerah	1.017.706.616.000

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.11.		
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Pembiayaan	432.300.000.000
	SiLPA	432.300.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto Daerah	362.300.000.000

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		15.519.788.406.000
1	Pajak Daerah	12.650.725.636.000
2	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	707.349.144.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000
PENDAPATAN TRANSFER		8.006.377.888.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		23.476.500.000
JUMLAH PENDAPATAN		23.549.642.794.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		15.389.713.402.000
1	Belanja Pegawai	7.582.145.530.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.560.651.000
3	Belanja Subsidi	9.274.000.000
4	Belanja Hibah	2.428.133.221.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		1.253.873.852.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000
BELANJA TRANSFER		7.243.355.540.000
1	Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.046.794.308.000
JUMLAH BELANJA		23.911.942.794.000
SURPLUS/DEFISIT		(362.300.000.000)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		432.300.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000
2	Pencairan dana cadangan	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		70.000.000.000
1	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		362.300.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.13.
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	OPD	PAGU OPD (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
DEKONSENTRASI		96.409.230.000	92.640.454.702	95,9
ATRUBUTIF		1.978.997.000	1.918.357.277	90,66
1	BAPPEDA	297.810.000	280.879.700	85,63
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	235.239.000	235.104.320	99,94
3	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	287.255.000	286.090.646	97,58
4	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.158.693.000	1.116.282.611	88,62
DELEGATIF		94.430.233.000	90.722.097.425	96,02
1	BAPPEDA	1.170.444.000	1.169.068.960	99,88
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	551.296.000	548.924.820	99,57
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.066.101.000	3.826.913.077	94,12
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.416.000.000	4.297.216.850	97,31
5	DINAS KESEHATAN	17.487.195.000	14.940.747.069	85,44
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	1.407.136.000	1.375.341.352	97,74
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	309.546.000	308.477.300	99,65
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.107.246.000	1.935.945.298	91,87
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	57.202.511.000	56.750.532.375	99,11
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.712.758.000	5.568.930.324	97,48
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.234.297.000	8.156.518.339	99,06
TUGAS PEMBANTUAN		307.224.699.000	300.217.962.202	90,98
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	473.200.000	472.977.225	99,95
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.630.000.000	1.547.027.146	94,91
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	82.744.782.000	81.546.797.033	98,55
4	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	94.017.267.000	92.292.536.913	93,68
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	108.002.250.000	104.055.134.949	82,44
6	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	19.959.583.000	19.937.469.651	99,68
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	397.617.000	366.019.285	92,05

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 3.14.
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	NAMA SATKER	DIPA (Rp)	BLOKIR (Rp)
DEKONSENTRASI		66.931.378.000	14.431.527.000
1	BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	1.677.221.000	194.778.000
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH	435.287.000	0
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	3.202.633.000	3.202.633.000
4	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH	4.450.600.000	4.450.600.000
5	DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH	13.331.297.000	1.364.740.000
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	47.355.517.000	1.117.200.000
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	571.103.000	406.765.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	1.657.343.000	1.657.343.000
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	23.137.396.000	2.280.300.000
10	KETAHANAN PANGAN	9.454.965.000	0
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	4.837.107.000	68.210.000
12	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	327.892.000	126.024.000
13	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.706.817.000	121.134.000
TUGAS PEMBANTUAN		208.655.949.000	31.615.490.000
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	63.623.186.000	12.996.125.000
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	19.725.102.000	825.644.000
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.743.332.000	400.721.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	84.778.880.000	0
5	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH	36.258.696.000	17.393.000.000
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH	2.070.000.000	0
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	456.753.000	0

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024.

Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2023 tertinggi pada Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar Rp27.709.278.014 dan terendah pada Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar Rp1.504.857.980. Perusahaan dengan alokasi anggaran terbanyak adalah Bank Jateng sebesar Rp18.639.633.350. Sedangkan perusahaan

dengan alokasi program terbanyak adalah PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap sebanyak 209 program.

Tabel 3.15.

Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bank Jateng	163	18.639.633.350
2	PT Pertamina Patra Niaga	74	15.736.046.050
3	PT Semen Gresik Tbk	122	9.553.592.312
4	PT Bhimasena Power Indonesia	199	7.056.993.632
5	PT Sumber Segara Primadaya – PLTU Cilacap	26	6.766.500.000
6	PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap	209	6.720.272.600
7	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	102	6.379.124.200
8	PT Tirta Investama (AQUA) Klaten	18	5.249.650.000
9	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta	23	4.833.269.059
10	PT Phapros Tbk	131	3.828.319.146
11	PT Sri Rejeki Isman Tbk	44	3.700.815.304
12	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Cilacap	195	3.387.737.200
13	PT Telkom Regional IV Jateng & DIY	107	2.668.505.170
14	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	19	1.889.500.000
15	PT Indonesia Power Unit Pembangkitan (UP) Mrica Banjarnegara	51	1.857.768.007
16	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	63	1.802.434.883
17	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B	6	1.724.593.060
18	PT Nestle Indonesia Pabrik Bandaraya	2	1.480.000.000
19	PT Indonesia Power Semarang PGU	96	1.470.527.987
20	BPR BKK Purwodadi	102	1.315.019.447
21	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	67	1.244.000.000
22	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	18	1.152.630.000
23	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	35	1.135.938.000
24	Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	124	1.105.254.493
25	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	75	932.264.055
26	BPR BKK Purwokerto	162	766.028.100
27	PT Dan Liris	82	727.207.577
28	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	90	693.201.860
29	PT Norojono Tobacco International	60	656.346.429
30	PT Jamkrida Jateng	68	547.726.000
31	BPR BKK Karangmalang	18	406.230.000
32	BPR BKK Demak	85	399.197.370
33	PT Kayu Lapis Indonesia – Kendal	93	393.728.737
34	BPR Surya Yudhakencana	27	306.637.500
35	BPR BKK Blora	33	268.579.150
36	PT Dua Kelinci	173	256.524.980
37	PT Trans Marga Jateng	20	252.513.150
38	BPR BKK Kendal	62	247.529.108
39	BPR BKK Ungaran	72	234.918.400
40	BPR BKK Pati	59	209.746.525

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
41	RS Panti Wilasa Citarum	49	204.115.000
42	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Semarang	4	160.000.000
43	Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (PD CMJT)	19	145.727.000
44	Angkasa Pura Airport	5	134.500.000
45	BPR BKK Kab. Pekalongan	22	130.226.000
46	BPR BKK Tasikmadu	52	127.572.000
47	BPR BKK Temanggung	25	124.505.000
48	BPR BKK Kudus	21	113.178.750
49	BPR BKK Muntilan	34	98.837.000
50	BPR BKK Boyolali	10	93.000.000
51	BPR BKK Tulung	11	51.763.000
52	BPR BKK Banjarharjo	12	31.795.000
53	PT SAS Kreasindo Utama	16	29.319.200
54	BPR BKK Jepara	4	28.000.000
55	BPR BKK Kota Tegal	6	17.929.800
56	BPR BKK Kota Magelang	4	15.991.000
57	PT Pusat Rekeasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah	5	9.500.000
58	RS Panti Waluyo YAKKUM Surakarta	7	8.300.000
59	PT Jateng Petro Energi (JPE)	1	7.500.000
60	Grand Dian Hotel Slawi	3	7.000.000
61	PT Kenlee Indonesia	3	6.700.000
62	PT Intiniaga Tunassejahtera (Wings Group)	8	5.699.998
63	PT BPR BKK Kota Semarang	2	3.392.150
64	BPR BKK Batang	2	3.000.000
65	PT Gopek Cipta Utama	3	2.000.000
TOTAL		3.503	119.556.053.739

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, Per 31 Januari 2024.

Tabel 3.16.
Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2023

No	Bidang Pokja	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	683	27.709.278.014
2	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	333	21.543.993.427
3	Bidang Kesehatan	363	16.119.554.793
4	Bidang Pendidikan	394	11.856.902.284
5	Bidang Infrastruktur	289	10.907.848.796
6	Bidang Keagamaan	455	9.792.605.666
7	Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	144	5.810.307.480
8	Bidang Pendampingan Umum	148	5.386.582.036
9	Bidang Olahraga, Seni, Budaya Dan Pariwisata	455	4.204.589.950
10	Bidang Kedaruratan	198	2.487.087.653
11	Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan	35	2.232.445.660
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	6	1.504.857.980
TOTAL		3503	119.556.053.739

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, per 31 Januari 2024.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Kebijakan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 juga mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045.

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan untuk mencapai **tujuan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”**, yang diukur dengan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, dan angka kemiskinan. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, dibutuhkan adanya keberlanjutan pembangunan. Lestari bermakna sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Tujuan pembangunan daerah tahun 2025 “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” didukung dengan empat **Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025**, meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, dengan target yang telah memperhatikan capaian tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.				
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025				
Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
Tujuan Pembangunan Daerah yaitu Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari				
		PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,30 - 49,73
		Angka Kemiskinan	%	9,66 – 9,00
		Rasio Gini	Angka	0,362 - 0,367
	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan			
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 - 5,60
		Inflasi	%	1,50 - 3,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 - 4,42
		Nilai Tukar Petani	Angka	107,52
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif			
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24 – 62,31
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13
		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68
		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis			
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,50

Sumber: RPD Tahun 2024-2026 (dengan target yang disesuaikan)

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan terutama terkait dengan kelengkapan data, permasalahan beberapa sektor yang belum terakomodir, dan arah kebijakan keuangan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

- a. Netralitas dan profesionalisme serta tanggung jawab seluruh aparat birokrasi pada semua tingkatan dalam menghadapi tahun politik guna melahirkan kualitas berdemokrasi yang lebih kuat, kokoh dan mapan;
- b. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat pedesaan dengan terobosan melakukan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan desa serta sekaligus peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparat desa demi mendukung percepatan dan perbaikan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas;
- c. Sosialisasi terhadap undang-undang, peraturan daerah dan berbagai peraturan gubernur terutama yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi atau terputusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat;
- d. Sosialisasi yang terus menerus dengan target munculnya pemahaman masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah pertanian, pupuk, bibit, permodalan, peternakan, UMKM serta koperasi, mengingat kepentingan ekonomi mayoritas masyarakat desa sangat berkaitan dengan bidang-bidang ini;
- e. Menjaga stabilitas harga dan stok pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan terus melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan modal, penguatan pertumbuhan ekonomi, karang taruna, dan penguatan pariwisata;
- g. Peningkatan prasarana digitalisasi desa serta perbaikan fasilitas desa;
- h. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan di Jawa Tengah;
- i. Pembuatan kebijakan dan inovasi daerah dalam peningkatan kemudahan berusaha di Provinsi Jawa Tengah;
- j. Pemerintah Jawa Tengah melakukan *update* data induk kemiskinan di desa dengan sebaik-baiknya, agar masalah bantuan apapun dari pemerintah (baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang seringkali dianggap tidak tepat sasaran dapat diatasi secara tuntas;
- k. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengeluarkan regulasi agar semua lembaga pendidikan melakukan pembelajaran cara penggunaan *hp android* yang baik dan produktif bagi peningkatan kualitas siswa/siswi;
- l. Perlu disusunnya regulasi terkait terkait dengan:
 - Tata kelola pupuk yang jelas dan berpihak pada rakyat;
 - Pemanfaatan media pembelajaran elektronik;
 - Larangan membuang sampah di sembarang tempat.

2. Aspek Perekonomian

- a. Peningkatan kesejahteraan kaum tani dengan memberikan kemudahan berusaha/berproduksi di bidang pertanian;
- b. Modernisasi sektor pertanian yang dikelola secara kreatif, inovatif dan profesional sehingga bidang ini menjadi lapangan kerja yang menarik ditekuni generasi muda karena menjanjikan peluang serta kesejahteraan

yang terus berkembang sehingga pada saatnya mereka bisa tampil sebagai *entrepreneur*/usahawan di bidang ini;

- c. Pendampingan, pemihakan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk kegiatan dan produk-produk ekonomi kreatif lokal yang menjadi ciri kearifan daerah (kabupaten/kota) wajib terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki produk-produk unggulan ekonomi yang menjadi ciri khasnya;
- d. Pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik terhadap potensi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Pemberian sanksi berupa penghentian izin operasi kepada perusahaan bongkar muat (PBM) dan *trucking* yang angkutan barangnya melebihi tonase, *memblacklist* kontraktor jalan yang kualitas pekerjaannya buruk dan/atau tidak memenuhi standar;
- f. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mendalami masalah praktek jual beli jabatan dan jika terdapat laporan resmi dari masyarakat agar segera di proses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pembagian BOSDa harus ditingkatkan dan disamakan sehingga tidak boleh mendiskriminasi antara sekolah/madrasah, karena hanya bernaung di kementerian yang berbeda;
- b. Adanya insentif/honor terhadap tenaga kependidikan keagamaan (nonformal) ke depan hendaknya terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan cakupan dan nilai nominalnya;
- c. Pemberian bantuan secara signifikan dan terus menerus kepada sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan sangat diperlukan sebagai upaya percepatan untuk meningkatkan kualitas agar sejajar dengan sekolah-sekolah negeri pada khususnya;
- d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan juga meningkatkan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara memadai, dengan meningkatkan kuantitas dan melakukan monitoring penyaluran dana BSM secara tepat sasaran;
- e. Penguatan sarana dan prasarana terhadap Sekolah Luar Biasa, khususnya pemenuhan terhadap rasio guru Sekolah Luar Biasa;
- f. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan program peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih, serta program rumah layak huni untuk masyarakat;
- g. Peningkatan penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS yang membuka akses dan peluang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau;
- h. Bantuan pendidikan lebih diperbesar karena dampak yang dihasilkan sangat baik untuk generasi ke depan;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan di desa-desa;
- j. Peningkatan terhadap kemudahan akses disabilitas pada ruang-ruang publik dan pelayanan masyarakat.

4. Aspek Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan pembangunan yang diarahkan atau lebih dikonsentrasikan pada penguatan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada di wilayah pedesaan, pinggiran dan perbatasan, jalan penghubung antardesa, antarkecamatan, dan antarkabupaten/kota;
- b. Terkait dengan kondisi jalan di Jawa Tengah yang rusak sehingga diperlukan koordinasi penanganan kerusakan jalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Jawa Tengah diharapkan lebih merata di 35 kabupaten/kota dan 7.809 desa, hal ini sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup yang layak;
- d. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat di segala bidang untuk ditingkatkan.

5. Aspek Keuangan Daerah

Fokus utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa terutama pada anggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah khususnya pada alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **tema pembangunan daerah tahun 2025** yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. **Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025** yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Penetapan empat prioritas daerah tahun 2025 konsisten dengan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, dan dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 4.1
Gambaran Konsistensi Tujuan Daerah, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Prioritas Daerah Tahun 2025

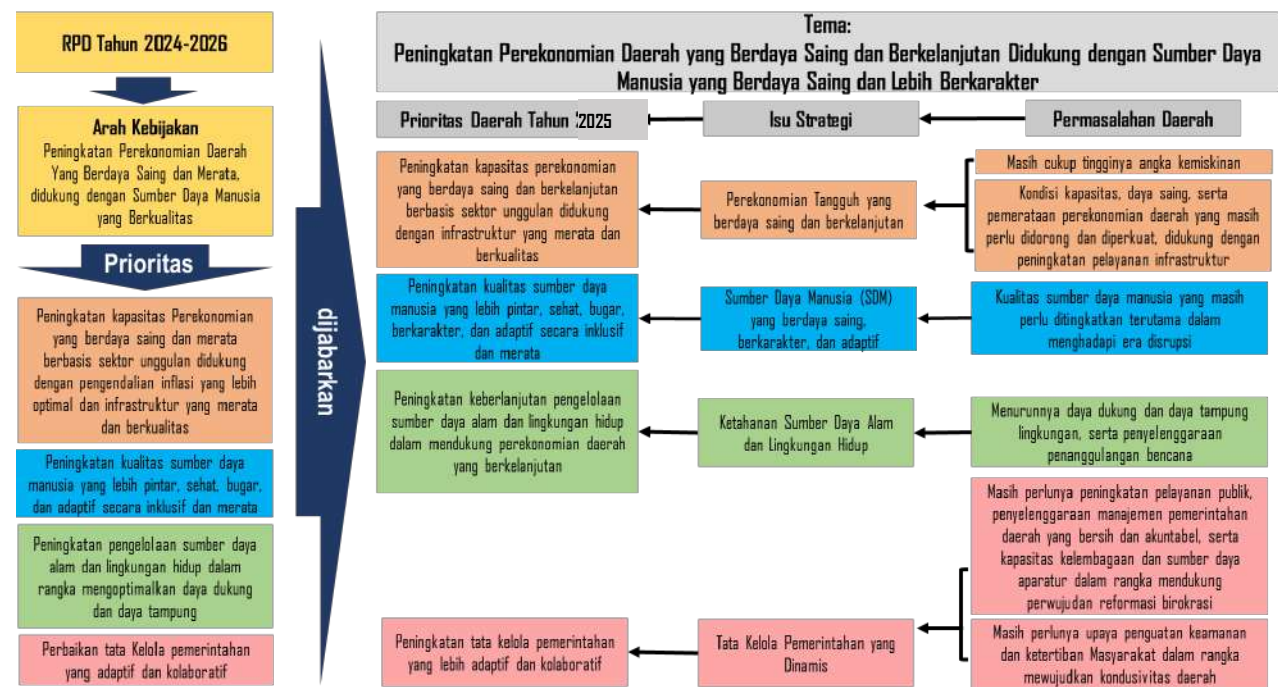
Prioritas daerah tahun 2025 juga konsisten dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah, serta konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Konsistensi tersebut dapat digambarkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025

RPD Tahun 2024-2026	RKPD Tahun 2025		
Arah Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Tema Pembangunan Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		
Prioritas	Prioritas Daerah	Isu Strategis	Permasalahan Daerah
Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	- Masih cukup tingginya angka kemiskinan - Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif	Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi era disrupsi

RPD Tahun 2024-2026	RKPD Tahun 2025		
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana
Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	- Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi - Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 4.2
Gambaran Penjabaran Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 Dalam RKPD Tahun 2025, Serta Gambaran Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, Dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025

Penjabaran prioritas daerah (PD) Jawa Tengah tahun 2025 lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

1. PD 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90 – 5,60
Inflasi	%	1,50 – 3,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81 – 4,42
Nilai Tukar Petani	Angka	107,52

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas*, difokuskan pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
 - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan perumusan kebijakan sebagai bagian dalam penyusunan *roadmap* pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan

dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 67 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp8.039.750.720.000 atau sebesar 33,62 persen dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 17 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

- 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 4) Program Pengembangan Perumahan;
- 5) Program Kawasan Permukiman;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 9) Program Pemberdayaan Sosial;
- 10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 11) Program Rehabilitasi Sosial;
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 13) Program Penanganan Bencana;
- 14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 18) Program Penataan Desa
- 19) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 20) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- 22) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 23) Program Pengelolaan Pelayaran;
- 24) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
- 25) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 26) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- 27) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 28) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 29) Program Pengembangan UMKM;
- 30) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 31) Program Promosi Penanaman Modal;
- 32) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 33) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 34) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 35) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 36) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 37) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 38) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 39) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 40) Program Pemasaran Pariwisata;
- 41) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 42) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 43) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 44) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 45) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- 46) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 47) Program Penyuluhan Pertanian;
- 48) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 49) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 50) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 51) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 52) Program Pengembangan Ekspor;
- 53) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 54) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 55) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 56) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 57) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 58) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 59) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 60) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 61) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 62) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 63) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 64) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 65) Program Hubungan Industrial;
- 66) Program Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
- 67) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Secara rinci penjabaran prioritas daerah ke dalam program prioritas yang disertai indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tertuang dalam tabel 4.3.

2. PD 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,99
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	62,24 – 62,31
Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,13
Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,07

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata*, difokuskan pada:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal,

- budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan *surveilans* berbasis laboratorium; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan prasarana sarana olahraga memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet;
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan;
 - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 26 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp4.338.343.815.000 atau sebesar 18,14 persen dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
- 10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 11) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 13) Program Pembinaan Sejarah;
- 14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 15) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 16) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 21) Program Perlindungan Perempuan;
- 22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 23) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 24) Program Pengendalian Penduduk;
- 25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- 26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Secara rinci penjabaran prioritas daerah ke dalam program prioritas yang disertai indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tertuang dalam tabel 4.3.

3. PD 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,68
Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan*, difokuskan pada:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan prasarana sarana pengolah limbah dan persampahan (percepatan penyelesaian *readiness criteria* TPST regional dan fasilitasi proses pembangunan IPLT regional), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak, serta rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat (termasuk masyarakat miskin) terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan

bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 22 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp129.488.609.000 atau sebesar 0,54 persen dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 11) Program Pengelolaan Persampahan;
- 12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 15) Program Pengelolaan Hutan;
- 16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- 18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 19) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
- 20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;

- 21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
- 22) Program Penanggulangan Bencana.

Secara rinci penjabaran prioritas daerah ke dalam program prioritas yang disertai indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tertuang dalam tabel 4.3.

4. PD 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Prioritas Daerah	Satuan	Target 2025
Indeks Risiko Birokrasi	Angka	83,50

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif*, difokuskan pada:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 41 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp11.404.360.100.000, di dalamnya termasuk pagu indikatif untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebesar Rp10.175.320.587.000. Proporsi pagu indikatif untuk prioritas daerah ini sebesar 47,69 persen (termasuk Program Penunjang) atau 5,14 persen (tanpa Program Penunjang) dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/ lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

- 6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- 8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*;
- 10) Program Pendaftaran Penduduk;
- 11) Program Pencatatan Sipil;
- 12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- 17) Program Pengelolaan Arsip;
- 18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- 19) Program Penataan Organisasi;
- 20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 21) Program Kesejahteraan Rakyat;
- 22) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- 23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
- 26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 31) Program Kepegawaian Daerah;
- 32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 34) Program Pelayanan Penghubung;
- 35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program unggulan daerah tahun 2025. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial budaya, keamanan dan ketertiban

Dalam rangka menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah perlu dilakukan berbagai strategi agar kondusivitas daerah terjaga. Kondusivitas daerah merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung perekonomian daerah yang stabil diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai strategi telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat di antaranya:

- a. pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- b. mobilisasi satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana;
- c. penegakan perda provinsi atau peraturan gubernur;
- d. pembinaan trantibum terdiri dari pembinaan pengamanan obyek vital (pam obvit) serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali);
- e. patroli pengendalian trantibum;
- f. penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
- g. operasi penertiban trantibum (pekat dan cipta kondisi).

Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Pada tahun 2025, pengendalian inflasi juga menjadi salah satu prioritas nasional dan provinsi untuk dilaksanakan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk pengendalian inflasi meliputi antara lain:

- a. intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya;
- b. memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

2. Penuntasan pengentasan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), penurunan angka pengangguran dan *stunting*

Program penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* menjadi program prioritas Jawa Tengah sejak tahun 2024, dan dilanjutkan pada tahun 2025. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah dan mendukung kebijakan nasional dalam penurunan angka kemiskinan. Strategi penuntasan kemiskinan di tahun 2025, meliputi:

- a. Pengurangan beban pengeluaran, diantaranya dengan pemberian Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Beasiswa Siswa Miskin/BSM SMA/SMK/SLB, pemberian seragam siswa miskin, iuran jaminan kesehatan (PBI Jamkes), listrik murah, pemenuhan kebutuhan PPKS, stabilisasi harga, bansos dan hibah, SMA *boarding* dan semi *boarding*, BOSDa (Bantuan Operasional

Sekolah Daerah), BOP (Bantuan Operasioanl Penyelenggaraan Pendidikan), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT);

- b. Meningkatkan pendapatan, diantaranya dengan pelatihan peningkatan ekonomi produktif dan fasilitasi bantuan alat (UMKM, kehutanan, perindustrian, kelautan, dan lainnya), padat karya tunai, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan calon tenaga kerja dan eksmigran, asuransi, akses kredit bagi UMKM, serta insentif pengajar keagamaan;
- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, diantaranya dengan mengurangi ketimpangan utara dan selatan dengan membangun akses peningkatan akses sumber air minum, RTLH dan jamban terintegrasi, pembangunan baru *backlog* (jumlah rumah yang belum tertangani) bencana dan relokasi, serta subsidi harga pangan di desa rawan pangan.

Selanjutnya dalam rangka penurunan angka *stunting*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Penurunan *stunting* pada tahun 2025 difokuskan kembali dengan strategi-strategi yang dikhususkan untuk penanganan *stunting* antara lain:

- 1) Pembinaan dalam peningkatan status dan pengetahuan gizi masyarakat;
- 2) Pembinaan pencegahan *stunting*;
- 3) Peningkatan *surveilans* gizi;
- 4) Penguatan intervensi implementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
- 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan usia sekolah remaja, kesehatan reproduksi, dan disabilitas;
- 6) Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi;
- 7) Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 8) Pelaksanaan advokasi implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
- 9) Pembinaan pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM;
- 10) Layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan;
- 11) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan kawasan mandiri pangan;
- 12) Koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait cakupan keluarga penerima manfaat bantuan tunai bersyarat:
 - a. PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - b. KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan dan lingkup pertanian dalam arti luas;
- 13) Pengawasan produk pangan fortifikasi;
- 14) Pembenahan data dan pengelolaan sistem;
- 15) Implementasi “Strategi Komunikasi, Perubahan Perilaku dan Sosial” pada lokasi prioritas;
- 16) Fasilitasi pengembangan DASHAT (dapur sehat atasi *stunting*) di kampung KB;

- 17) Fasilitasi pembinaan percepatan penurunan *stunting* melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- 18) Pemberian bantuan benih padi inbrida untuk daerah rawan pangan;
- 19) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan;
- 20) Pelatihan tentang Gerakan AKU HATINYA PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) dalam mengatasi *stunting*;
- 21) Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) dan konseling PMBA untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
- 22) *Stakeholder meeting* untuk penyusunan Strategi Komunikasi KPPS.

Program lainnya yang menjadi prioritas untuk dilakukan pada tahun 2025 adalah penurunan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran dalam pelaksanaannya beririsan dengan program prioritas Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan Vokasi, sehingga beberapa kegiatan prioritasnya pun akan saling beririsan, contohnya seperti upaya peningkatan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, serta peningkatan mutu pendidikan vokasi dengan peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kegiatan prioritas lainnya yang sudah dan akan dilaksanakan guna mendukung program ini seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta optimalisasi BLK; pengembangan wirausaha baru; serta program padat karya di berbagai sektor.

3. Pemantapan ketahanan pangan, energi dan air

Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2025 dilakukan melalui beberapa strategi antara lain melalui:

- a. Intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya;
- b. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian;
- c. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah;
- d. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

Selain strategi tersebut, upaya pemantapan ketahanan pangan juga didukung dari sisi hulu dengan mendorong produksi dan produktivitas pertanian agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan dalam rangka pemantapan ketahanan energi dan air di Jawa Tengah antara lain dengan peningkatan ketahanan energi melalui kebijakan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan meningkatkan ketahanan sumber daya air.

4. Perkuatan pengembangan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan (vokasi)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan akan secara konsisten melakukan berbagai program terkait peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan tersebut ditempuh melalui berbagai cara beberapa diantaranya melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaan kerja sama pendidikan, dan penguatan pendidikan karakter. Dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 ini, peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu program prioritas daerah. Strategi yang akan dilakukan guna pencapaiannya antara lain adalah:

- a. Peningkatan kompetensi bagi instruktur/guru, tenaga pendidik dan peserta didik;
- b. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi instruktur/guru, tenaga pendidik dan peserta didik; dan
- c. Pemberian beasiswa.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan memiliki keterampilan serta kompetensi yang lebih baik. Poin penting dalam program ini adalah terintegrasinya kurikulum pendidikan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan terfasilitasinya lulusan pendidikan vokasi dalam rekrutmen tenaga kerja sesuai DUDI. Sinkronisasi kurikulum SMK dengan DUDI dilakukan agar kurikulum pendidikan SMK sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikut strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Tengah tahun 2025:

- a. Kerja sama satuan pendidikan vokasi dengan pelibatan dunia usaha (DUDI);
- b. Penyelarasan kurikulum dengan DUDI;
- c. Pengembangan dan peremajaan sarana dan parasarana (pendidikan vokasi dan pelatihan kerja);
- d. Fasilitasi rekrutmen lulusan pendidikan vokasi, serta berperan dalam menjembatani terwujudnya *link and match* antara SMK dan industri (termasuk kerajinan dan pariwisata).

5. Peningkatan kualitas layanan dan promosi kesehatan masyarakat

Program prioritas ini dilakukan dengan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesehatan untuk semua. Upaya yang dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas layanan guna mencapai akses dan mutu layanan yang terstandar, serta didukung dengan upaya promosi kesehatan masyarakat guna meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat dibidang kesehatan.

6. Pengembangan investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing UMKM

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menjadikan program pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu dari sepuluh program prioritas pada tahun 2025. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Jawa Tengah, dan pada tahun 2025 pariwisata difokuskan pada upaya

peningkatan promosi pariwisata, pengembangan aplikasi layanan pariwisata dan monitoring pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai even pariwisata antara lain even *sport tourism*, kuliner festival, dan *e-sport tournament*.

Selain sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan daya saing sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif karena sektor UMKM juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang menopang perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah juga didorong untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di tiap wilayah kabupaten/kota melalui perwujudan kabupaten/kota kreatif.

Strategi pengembangan pariwisata dan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan pemasaran pariwisata dan UMKM (promosi, sarana pemasaran dan pengembangan pasar);
- b. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi dengan program pelatihan, dan pengembangan keterampilan;
- c. Pengembangan destinasi wisata;
- d. Pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang destinasi wisata;
- e. Fasilitasi bantuan wirausaha;
- f. Inovasi dan pengembangan produk UMKM; dan
- g. Kolaborasi/kerja sama melalui CSR.

7. Pengembangan ekonomi sirkuler dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Pada tahun 2025, pengembangan sistem ekonomi sirkular menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah. Ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular tidak sekedar membahas pengelolaan limbah yang lebih baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, namun juga mencakup efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon.

8. Penanganan dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (kekeringan, polusi, krahutla, banjir, rob dan tanah longsor)

Penanganan dampak perubahan iklim menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak dampak dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah antara lain kekeringan, polusi, serta kebakaran hutan dan lahan akibat perubahan iklim. Peningkatan suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi semakin sering terjadi. Hal tersebut terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Strategi yang akan dilakukan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan dampak perubahan iklim pada tahun 2025 antara lain adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran;
- b. Konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi hutan dan mangrove;

- c. Menurunkan risiko bencana;
- d. Penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim; serta
- e. Meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar masyarakat.

9. Meningkatkan pengawasan internal ASN, peningkatan layanan publik dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan pelayanan publik adalah dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang dinamis. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan satu inovasi pelayanan publik dalam satu tahun.

Reformasi birokrasi di Jawa Tengah diwujudkan melalui penerapan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabel. Dalam proses manajemen menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam bentuk *reviu* atau audit.

Pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi *quality assurance*, asistensi, dan *consulting* pada proses manajemen pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan *fraud* di kemudian hari. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong penerapan manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan, penguatan kapasitas APIP, serta penguatan *saber pungli*. Sedangkan pengawasan terhadap seluruh ASN Jawa Tengah dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi dan edukasi kepada ASN dalam mewujudkan ASN Berakhlak, penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, pelatihan teknis dan kompetensi ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional dan fungsional, dan pengembangan sistem merit.

10. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota pasca Pilkada serentak

Keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota pasca Pilkada serentak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan.

Sinkronisasi dan sinergi akan mendorong lahirnya perencanaan yang terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi yang ditempuh antara lain dengan memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi baik dengan pusat maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya penjabaran dukungan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka perwujudan tema dan prioritas daerah tahun 2025 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas									8.039.750.270.000	
	Pertumbuhan Ekonomi	4,90 - 5,60	%						7.978.440.171.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.457.965.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase akses air minum aman		42,93	%		
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					674.105.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase akses air limbah domestik aman		12,50	%		
						Persentase akses air limbah domestik layak	95,18	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					129.159.390.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor		46,55	%		
					Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap		89,46	%		
					Persentase kondisi jembatan provinsi baik		83,38	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	76,84	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	77,6	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	91,44	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	86,19	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	98,25	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	88,2	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	93,47	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,47	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	90,2	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	63,52	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	90,92	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	92,8	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	91,52	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	93,03	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	89,39	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	69,15	%		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	91,45	%		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	92,04	%		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	49,79	%		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	45,56	%		
						Persentase panjang jalan yang dileger	77,26	%		
						Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	%		
						Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	69,23	%		
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	73,04	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					25.290.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat		20,22	%		
					Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat		41,57	%		
						Persentase rumah layak huni yang disediakan	1,17	%		
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	6,64	%		
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.765.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase penurunan kawasan kumuh		39,78	%		
						Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	13,9	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					480.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase penurunan kawasan kumuh		39,78	%		
						Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	60	%		
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat		20,22	%		
						Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.520.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)		12,60	Angka		
						Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentrman dan ketertiban umum	59,13	%		
						Persentase pengendalian ketentrman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	80,29	%		
						Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	64,54	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					10.721.000.000	Dinas Sosial
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		15,41	%		
						Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,41	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					200.000.000	Dinas Sosial
					Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial		0,11	%		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					72.868.427.000	Dinas Sosial
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial		0,40	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	3,84	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti	0,14	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pelayanan Sosial Mardi Utomo				
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,15	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,16	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,21	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,12	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,12	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,11	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	0,17	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,15	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,17	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,22	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,16	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	0,13	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	0,24	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,08	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,25	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,06	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,22	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	0,13	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,21	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	0,12	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,22	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti	0,07	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pelayanan Sosial Kasih Mesra				
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,07	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	0,08	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,11	%		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,1	%		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					70.447.160.000	Dinas Sosial
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan		2,26	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					pelayanan jaminan sosial					
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial		0,34	%		
						Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100	%		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	82	%		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,04	%		
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3.584.500.000	Dinas Sosial
					Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial		0,11	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					460.000.000	Dinas Sosial
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		15,41	%		
						Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase penanganan kecamatan rawan pangan		6,00	%		
					Skor PPH provinsi		95,20	Skor		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,7	kg/kapita/ tahun		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,7	kg/kapita/ tahun		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					3.930.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase penanganan kecamatan rawan pangan		6,00	%		
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01	%		
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					2.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Skor PPH provinsi		95,20	Skor		
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	82	%		
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	80	%		
				PROGRAM PENATAAN DESA					20.850.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah		7,12	%		
						Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					602.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dan Pencatatan Sipil
					Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah		7,12	%		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	59,32	%		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.540.320.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah		7,12	%		
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	100	%		
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.705.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah		7,12	%		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	13,24	%		
						Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100	%		
						Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					130.646.680.000	Dinas Perhubungan
					On Time Performance layanan transportasi		85,05	%		
					Rasio konektivitas provinsi		0,41	Angka		
					Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan		15,33	Angka		
						Rasio trayek angkutan jalan	0,56	Angka		
						Rasio pemanfaatan terminal	0,229	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,52	Angka		
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,25	Angka		
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,02	Angka		
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,21	Angka		
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,24	Angka		
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,18	Angka		
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,22	Angka		
						Rasio konektivitas perkotaan	0,483	Angka		
						Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,39	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,95	Angka		
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,94	Angka		
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,95	Angka		
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,94	Angka		
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,95	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,95	Angka		
						Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,985	Angka		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,84	Angka		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,84	Angka		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,84	Angka		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,84	Angka		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,84	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,84	Angka		
						Persentase perpindahan moda angkutan umum	53	%		
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	67,34	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					779.100.000	Dinas Perhubungan
					Rasio konektivitas provinsi		0,41	Angka		
					Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan		15,33	Angka		
						Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,38	Angka		
						Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,4	Angka		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					1.099.774.000	Dinas Perhubungan
					Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan		15,33	Angka		
						Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,08	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					1.499.384.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah		0,38	%		
						Persentase koperasi berkualitas	26,74	%		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					734.908.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah		7,39	%		
						Persentase SDM koperasi yang berkualitas	11,5	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.606.604.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah		7,39	%		
						Persentase koperasi provinsi produktif	48,53	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.494.064.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah		7,39	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase usaha mikro mandiri	82,3	%		
						Persentase pertumbuhan wirausaha baru	25	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.578.582.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah		7,39	%		
						Persentase UMKM siap bermitra	23,08	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					560.640.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase realisasi PMA dan PMDN		100	%		
						Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50	%		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.612.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase realisasi PMA dan PMDN		100	%		
						Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	67	%		
						Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.185.806.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Indeks Kepuasan Masyarakat		80,5	%		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	%		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.654.602.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Indeks Kepuasan Masyarakat		91,00	%		
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	91,00	%		
						Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	%		
						Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					561.470.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase realisasi PMA dan PMDN		100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	22,00	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Indeks Kepuasan Masyarakat		91,00	%		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10,00	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					520.062.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi garam		134.640	Ton		
						Persentase produksi garam	2,00	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					9.778.793.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan		952.718	Ton		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63,00	%		
						Persentase produksi perikanan tangkap	5,00	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72,00	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan	72,72	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kepelabuhanan PPP Asemdayong				
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	70	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	71,72	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	72,27	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					14.184.548.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan		952.718	Ton		
						Produksi perikanan budidaya	609000	Ton		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	%		
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	%		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					6.200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah		15.073.629	Rupiah		
						Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	26,67	%		
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.660.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah		15.073.629	Rupiah		
						Jumlah kunjungan wisatawan	54069703	Orang		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					550.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah kabupaten/kota kreatif		1	Kabupaten/ Kota		
						Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	8	Kabupaten/ Kota		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					3.375.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah		15.073.629	Rupiah		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	33,87	%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					66.134.053.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Produksi daging		457.959.903	Kg		
					Produksi susu		94.005.743	Kg		
					Produksi telur		345.079.651	Kg		
					Persentase peningkatan produksi padi		0,2	%		
					Persentase peningkatan produksi jagung		0,2	%		
					Persentase peningkatan produksi kedelai		0,2	%		
					Persentase peningkatan produksi melati		2	%		
					Persentase peningkatan produksi jahe		3	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase peningkatan produksi durian		2,5	%		
					Persentase peningkatan produksi cabe		1,5	%		
					Persentase peningkatan produksi bawang merah		2,5	%		
					Persentase peningkatan produksi tebu		0,01	%		
					Persentase peningkatan produksi kelapa		0,01	%		
					Persentase peningkatan produksi kopi		0,01	%		
						Jumlah populasi ternak potong	3.745.066	(ST)/(AU)		
						Jumlah populasi ternak perah	113.440	(ST)/(AU)		
						Jumlah populasi ternak petelur	247.848	(ST)/(AU)		
						Persentase fasilitasi obat hewan	1	%		
						Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4	Dokumen		
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	%		
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1	%		
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	0,25	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	0,25	%		
						Produksi kedelai	52.762	Ton		
						Produksi jagung	3.583.730	Ton		
						Produksi padi	9.613.469	Ton		
						Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,5	%		
						Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	93	%		
						Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,5	%		
						Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100	%		
						Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3	%		
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85	%		
						Produksi bawang merah	527.875	Ton		
						Produksi cabai	346.115	Ton		
						Produksi durian	153.410	Ton		
						Produksi jahe	35.908	Ton		
						Produksi melati	25.120	Ton		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85	%		
						Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	2	%		
						Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3	%		
						Persentase layanan sertifikasi benih	100	%		
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85	%		
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	%		
						Produksi kopi	26.005	Ton		
						Produksi tebu	2.562.216	Ton		
						Produksi kelapa	167.187	Ton		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.810.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Produksi daging		457.959.903	Kg		
					Produksi susu		94.005.743	Kg		
					Produksi telur		345.079.651	Kg		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase peningkatan produksi padi		0,2	%		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	12	%		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	12	%		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	12	%		
						Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7420274	m		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					37.941.604.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Produksi daging		457.959.903	Kg		
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4	Dokumen		
						Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	7	%		
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4	Dokumen		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4	Dokumen		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					745.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
					Persentase peningkatan produksi padi		0,2	%		
						Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	10	%		
						Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15	%		
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					14.317.982.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Produksi daging		457.959.903	Kg		
					Produksi susu		94.005.743	Kg		
					Produksi telur		345.079.651	Kg		
					Persentase peningkatan produksi padi		0,2	%		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,08	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,62	%		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,29	%		
						Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,5	%		
						Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					2.503.054.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)		57	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	45	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	70	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	70	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	45	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	45	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	45	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	45	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	45	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	70	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	45	%		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	70	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	70	%		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	70	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					633.633.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		4,83	%		
						Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10	%		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8,6	%		
						Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	10	%		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					238.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		4,83	%		
						Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	15	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					55.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		4,83	%		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	65	%		
						Persentase kinerja realisasi pupuk	91	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.334.967.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		4,83	%		
						Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	4,05	%		
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2.786.815.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		4,83	%		
						Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1,05	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	0,1	%		
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	10	%		
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					2.450.180.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		4,83	%		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	15	%		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					10.029.492.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB		3,9	%		
						Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,5	%		
						Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,5	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	4,07	%		
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	85	%		
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,39	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					245.681.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB		3,9	%		
						Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	9	%		
						Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	13	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					250.686.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor		3,9	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					industri dalam PDRB					
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	10	%		
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	6,95	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					7.285.455.540.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun		100	%		
					Persentase realisasi APBD		93,75	%		
					Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan		100	%		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	%		
						Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	%		
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	%		
						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	%		
	Inflasi	1,50 - 3,50	%						45.713.888.000	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					12.873.888.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Angka Kecukupan Energi		3.801	kkal/kapita / hari		
					Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)		10	%		
						Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	Angka		
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,4	Angka		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	55	%		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					32.840.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Inflasi pangan bergejolak		4	%		
						Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	9	%		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,81 - 4,42	%						11.900.281.000	

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					246.740.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah		68,57	%		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	68,57	%		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.664.754.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten		10,15	%		
					Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah		56,5	Juta Rupiah		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	30,59	%		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,6	%		
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,35	%		
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis	3,2	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kompetensi di bidang industri				
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,5	%		
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,22	%		
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,9801	%		
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2.319.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		71,06	%		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	71,05	%		
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,3	%		
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.908.787.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)		91,58	%		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,2	%		
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,77	%		
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	45,54	%		
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69	%		
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					3.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan		80,96	%		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,59	%		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					261.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		71,06	%		
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,71	%		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,71	%		
	Nilai Tukar Petani	107,52	Angka						3.695.930.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					575.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Nilai Tukar Nelayan		105,5	Angka		
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,54	Angka		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					396.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan		110,5	Angka		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,55	Angka		
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.942.120.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Angka Konsumsi Ikan		40,92	kg/kapita/ tahun		
						Jumlah produksi olahan ikan	160.800	Ton		
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					90.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
					NTP Hortikultura		108,49	Angka		
					NTP Tanaman Pangan		105,57	Angka		
					NTP Perkebunan Rakyat		100,97	Angka		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	1,5	%		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	1,5	%		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	1,5	%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					350.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Persentase nilai tambah produk hasil ternak		5	%		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	12	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					341.550.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Persentase nilai tambah produk hasil ternak		5	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	3,5	%		
PD2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata									4.338.343.815.000	
	Indeks Pembangunan Manusia	73,99	Angka						4.285.656.755.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					3.484.266.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMA, SMK dan SLB		83,29	%		
					Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah		67,25	Angka		
					Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th		70,97	Angka		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	78,06	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	32,14	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	75	%		
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	36,86	Angka		
						Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,8	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	56	%		
						Persentase angka putus sekolah SMA	2,28	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	85,17	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	88,14	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,84	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	48,73	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,85	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,5	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	71,25	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,26	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,53	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79,5	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	20	%		
						Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	20	%		
						Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	84,1	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,93	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,9	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	94,23	%		
						APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	80,17	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	93	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	93	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	2,08	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	83	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81,4	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,25	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,3	%		
						Persentase angka putus sekolah SMK	0,024	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,13	%		
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	65	%		
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,6	Angka		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	58,82	%		
						Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	53,49	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,7	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,95	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,9	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,24	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79,2	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	54,6	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,89	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,9	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	76,06	%		
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	13,16	%		
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	15	Angka		
						Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	%		
						Persentase angka putus sekolah SLB	3,2	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,75	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,6	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,84	%		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,84	%		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	%		
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	40,41	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					896.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Nilai karakter siswa sekolah menengah		85,94	Angka		
						Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,71	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	82,27	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,56	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,84	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,77	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,99	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,8	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,53	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,56	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	86,35	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,77	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	89,33	Angka		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,72	Angka		
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMA, SMK dan SLB		83,29	%		
						Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	78,2	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					1.120.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMA, SMK dan SLB		83,29	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	%		
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	16	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	35	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	15	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	94,29	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	25	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	50	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	%		
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	%		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	%		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					404.763.705.000	Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
					Persentase penurunan kasus kematian ibu		2	%		
					Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia		74,28	%		
					Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting		85	%		
					Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa		82	%		
					Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar		51,69	%		
					Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo		98	%		
					Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo		89	%		
					Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta		96,58	%		
						Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	85	%		
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	40	%		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%		
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100	%		
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	85	%		
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	57,14	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	%		
						Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	100	%		
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	85,71	%		
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14	%		
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	71,42	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	42,86	%		
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86	%		
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	42,86	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14	%		
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	71,42	%		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	100	%		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	68,5	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	100	%		
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	74,3	%		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%		
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	74,3	%		
						Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	85	%		
						Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100	%		
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100	%		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2	74,28	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						upaya pelayanan kesehatan lansia				
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.151.000.000	Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar		51,69	%		
					Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo		89	%		
					Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi		98	%		
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98	%		
						Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85	%		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	35	%		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	35	%		
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					300.394.000	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar		51,69	%		
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	80	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.123.626.000	Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
					Persentase penurunan kasus kematian ibu		2	%		
					Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo		98	%		
					Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo		89	%		
					Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi		98	%		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%		
						Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	85,71	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	%		
						Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86	%		
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14	%		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%		
						Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					388.786.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Peringkat nasional pada kejuaraan multievent		3	Peringkat		
						Persentase peningkatan perolehan medali	31,25	%		
						Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	105	Orang		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,24 - 62,31	Angka						49.171.000.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					7.580.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase karya budaya berperingkat nasional		16,89	%		
					Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan		23,44	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani		31,7	%		
						Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	20,78	%		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	26,16	%		
						Persentase cakupan pelestarian seni	100	%		
						Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	52,38	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					22.696.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani		31,7	%		
						Tingkat partisipasi seni tradisi	11,1	%		
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					955.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan		23,44	%		
						Persentase akses literasi sejarah	53,1	%		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.325.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase karya budaya berperingkat nasional		16,89	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan		23,44	%		
						Persentase cagar budaya berperingkat nasional	13,15	%		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	26,73	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					3.750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase karya budaya berperingkat nasional		16,89	%		
						Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,9	%		
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.400.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Nilai tingkat kegemaran membaca		74	Nilai		
						Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	88,89	%		
						Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam kebudayaan gemar membaca	61,54	%		
						Nilai survey kepuasan masyarakat	80	Nilai		
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					240.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi		95,57	Nilai		
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	92,25	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					11.225.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda		11,5	%		
					Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda		38,75	%		
						Jumlah wirausaha muda mandiri	10	Orang		
						Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	75	Orang		
	Indeks Pembangunan Gender	93,13	Angka						1.060.000.000	
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha		35	%		
						Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	65	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha		35	%		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20	%		
	Indeks Pembangunan Keluarga	64,07	Angka						2.456.060.000	

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					977.550.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan		4,2	per 100.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	22	%		
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		73	Angka		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					185.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		73	Angka		
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,86	%		
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					253.510.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		76	Angka		
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,8	per 100.000 penduduk		
						Persentase korban kekerasan anak terlayani	100	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					195.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Total (TFR)		2,12	Angka		
						Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57	%		
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					450.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Total (TFR)		2,12	Angka		
						Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65,99	%		
						Unmetneed	9,9	%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					320.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha		100	%		
						Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32	%		
PD3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan									129.488.609.000	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,68	Angka						125.638.609.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					85.151.387.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
					Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air		62,08	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	62,5	%		
						Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	69,19	%		
						Indeks kinerja sistem irigasi	69,11	Angka		
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,41	%		
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	77,38	Angka		
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,23	%		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%		
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	62,7	Angka		
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	34,8	%		
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan	53,26	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal				
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%		
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,84	Angka		
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	63,64	%		
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,08	%		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%		
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	62,85	Angka		
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50	%		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,36	Angka		
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,35	%		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%		
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65	Angka		
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	76,5	%		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10.461.088.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase akses air minum aman		42,93	%		
						Persentase akses air minum layak	93,94	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.701.793.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
					Persentase keterwujudan penataan ruang		64,07	%		
						Persentase implementasi pemanfaatan ruang	76	%		
						Persentase tertib ruang	48	%		
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	69,29	%		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					434.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks Pencemaran Air		3,35	Angka		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.353.388.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks Pencemaran Air		3,35	Angka		
					Indeks SO2 dan NO2		0,37	Angka		
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	%		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	2,85	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pengujian kualitas air	100	%		
						Persentase pemantauan kualitas udara	100	%		
						Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					745.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks SO2 dan NO2		0,37	Angka		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	2,02	%		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,6	%		
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks Pencemaran Air		3,35	Angka		
						Persentase limbah B3 yang terkelola	80	%		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					564.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks Pencemaran Air		3,35	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100	%		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	%		
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.305.113.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks SO2 dan NO2		0,37	Angka		
						Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	11	%		
						Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	40	%		
						Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25	%		
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks Pencemaran Air		3,35	Angka		
						Persentase pengaduan yang ditangani	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					389.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks SO2 dan NO2		0,37	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase sampah yang tertangani	60	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					1.586.048.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		63	%		
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	4	%		
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2,93	%		
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	7,8	%		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					227.375.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		63	%		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	50	%		
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.756.361.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		63	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	%		
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	%		
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	2	%		
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	%		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	%		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					5.854.089.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Luas tutupan lahan		1.022.457	Ha		
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	45,99	%		
						Persentase lahan kritis tertangani	0,21	%		
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,01	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,02	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,01	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,05	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,02	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,02	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,04	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,03	%		
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	0	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,01	%		
						Persentase peningkatan produksi bibit	-90	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,02	%		
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,03	%		
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					824.768.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Luas tutupan lahan		1.022.457	Ha		
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10	%		
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	60	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	71	Angka		
						Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100	%		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					1.005.832.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Luas tutupan lahan		1.022.457	Ha		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	0,3	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,3	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,2	%		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,3	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					328.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Luas tutupan lahan		1.022.457	Ha		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					2.178.750.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Indeks Ketersediaan Air Tanah		3,63	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,6	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,7	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,5	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,9	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,3	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,2	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,9	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,5	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,7	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,8	%		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	3	%		
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,9	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,7	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					2.381.039.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi		21,32	%		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	91370,61	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	78834,57	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	78666,36	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	39241,43	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	330,4	SBM		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	122,33	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	45,88	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	78758,11	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	61,17	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	39259,78	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	30,58	SBM		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT)	61,17	SBM		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						terbangun di Wilayah Merapi				
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	30,58	SBM		
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					3.141.578.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Tingkat konsumsi tenaga listrik		807	KWh/kapita		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	68,81	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	50,03	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	51,88	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	50,09	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,57	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	49,96	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	49,95	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,66	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,87	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,59	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	52,92	%		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,64	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,21	%		
	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	4,00	%						3.850.000.000	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.850.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya		4,02	%		
					Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa		0,54	Angka		
					Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi		100	%		
						Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12	%		
						Persentase penanganan darurat bencana	100	%		
						Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	11,43	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	10	%		
PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif									11.404.360.100.000	
	Indeks Reformasi Birokrasi	83,50	Angka						11.404.360.100.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.175.320.587.000	Seluruh Perangkat Daerah
					Indeks Kepuasan Masyarakat					
					Indeks Manajemen Risiko					
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	%		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					38.166.603.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar		61,65	%		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	%		
						Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	12,23	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					5.335.641.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
					Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar		61,65	%		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	61,61	%		
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,42	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					570.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Skor kinerja penegakan produk hukum daerah		6,2	Angka		
						Persentase penegakan produk hukum daerah	86,67	%		
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					98.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)		12,6	Angka		
						Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Indeks Kepuasan Masyarakat		88	Angka		
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi	30	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						sistem informasi gender dan anak				
				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					380.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum		100	%		
						Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100	%		
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					570.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria		100	%		
						Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	%		
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					525.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria		100	%		
						Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100	%		
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					220.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah		89	%		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	98	%		
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL					210.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah		89	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	99	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					194.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah		89	%		
						Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	66,67	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					24.459.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya		100	%		
						Nilai keterbukaan informasi publik	33	Angka		
						Nilai survey kepuasan komunikasi publik	81	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					20.107.445.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks Domain Layanan SPBE		3,81	Angka		
					Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,2	Angka		
						Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	74	%		
						Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	47	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					1.210.829.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah		64	%		
						Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	48	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					3.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)		638	Angka		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	50	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					701.598.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi		95,57	Nilai		
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kot a dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	30,26	%		
						Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100	%		
						Persentase peningkatan pengunjung arsip	79	%		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					70.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi		95,57	Nilai		
						Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	20	%		
						Persentase arsip yang diselamatkan	65,92	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.780.528.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah		80	%		
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	70	%		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	88,57	%		
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	91,84	%		
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	78	%		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	17,14	%		
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	69,05	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	92	%		
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	91,01	%		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					3.478.000.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat		90	%		
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	%		
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95	%		
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	%		
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					402.293.148.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan		90	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					kesejahteraan rakyat					
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	83	%		
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	84	%		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	60	%		
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					2.918.000.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat		90	%		
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	97	%		
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	97	%		
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	%		
				PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN					4.775.260.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa		90	%		
						Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	%		
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	%		
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	%		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84	%		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79	%		
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	86	%		
						Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	82	%		
						Persentase nilai kemandirian BLUD	56	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					2.348.489.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa		90	%		
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	91	%		
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	82	%		
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	82	%		
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					2.040.000.000	Sekretariat Daerah
					Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah		80	%		
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,8	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,5	%		
						Persentase realisasi bantuan keuangan	85	%		
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	86	%		
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100	%		
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					380.153.260.000	Sekretariat DPRD
					Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)		76	%		
						Persentase layanan bagian humas	95	%		
						Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95	%		
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					5.900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen		100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					perencanaan sesuai regulasi					
						Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100	%		
						Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100	%		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					7.080.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional		100	%		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100	%		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100	%		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%		
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					5.365.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan		100	%		
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	89,86	%		
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	100	%		
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					38.151.060.000	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah		-6,19	%		
					Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain		3,19	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	-50,2	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	-21,25	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	-26,61	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	-9,37	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	-11,07	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	13,51	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	7,95	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-4,14	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	27,65	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	14,95	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-21,27	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	-14,86	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	-15,51	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	-25,71	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	-13,35	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	14,7	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	22,18	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	-12,98	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	13,64	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	-19,25	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	-3,73	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-27,79	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	4,34	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	-19,2	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	4,69	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-7,4	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	13,17	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	20,16	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	22,97	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	-6,91	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-15	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	24,22	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-19,22	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	-33,21	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	9,37	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-18,43	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	22,26	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	-21,91	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-7,41	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	12,61	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	-6	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-13,05	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	13,93	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	-3,04	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	-19,68	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	23,06	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-8,82	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	-13,13	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	7,36	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	22,23	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-15,84	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	9,48	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	23,1	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	13,37	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-11,67	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	-15,94	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	-10,17	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	-20,88	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	-19,95	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	-23,07	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	-26,44	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	21,86	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-14,54	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-13,52	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	22,05	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	19,39	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	23,49	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	-6,74	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	7,6	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-50,2	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	13,46	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	23,02	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	20,59	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	3,51	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	21,39	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	-22,46	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-18,87	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	-16,11	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	78,96	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-10,5	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	-4,52	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-15,78	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	6,99	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	2,39	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,19	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	21,89	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-9,14	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	31,53	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	-5,76	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	-22,48	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	22,01	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	-20,07	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	24,35	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	13,57	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	21,52	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	13,68	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	2,02	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	15,03	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-17,6	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-14,9	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	13,66	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-16,09	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	12,3	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	-20,99	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-70	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	-23,76	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	-4,53	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	-7,78	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	13,43	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	13,63	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	-15,04	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	23,04	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-24,1	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	-29,99	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	-27,32	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-12,72	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-27,34	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	-12,96	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	20,9	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	-3,72	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	22,29	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	-9,8	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	9,72	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	20,9	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-7,55	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-35,43	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	13,3	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	18,67	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	13,41	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri	21,07	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	18,91	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	15,75	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	12,68	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	13,55	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	13,46	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-3,1	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	22,92	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	-27,87	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-10,91	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-20,02	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-22,6	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	-23,32	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	-0,41	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	-11,69	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	23,37	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	21,93	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	-15,9	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	23,33	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	-20,05	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	13,63	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	22,35	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-16,92	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-13,53	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	21,6	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	-20,67	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	22,53	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	-21,44	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	-21,1401	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	20,46	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	-12,41	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	22,22	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	-28,09	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	-18,37	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	22,35	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	-14,76	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	21,97	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	-33,96	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	-19,7	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	2,58	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	22,59	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	-20,31	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	-8,84	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	-15,64	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	-12,89	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	-6,82	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	5,28	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	32,23	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	14,09	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	11,16	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	22,83	%		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	13,67	%		
						Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100	%		
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	73	%		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	-5,54	%		
						Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	11,08	%		
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					10.157.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
					Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja		357,5	Angka		
					Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi		75,5	Angka		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100	%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100	%		
						Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100	%		
						Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100	%		
						Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	100	%		
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					15.836.640.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi		17,34	%		
					Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi		100	%		
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100	%		
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100	%		
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100	%		
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,5	Angka		
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	%		
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					4.675.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan		100	%		
						Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100	%		
						Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100	%		
						Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100	%		
						Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100	%		
				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					3.992.880.000	Badan Penghubung
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		85	%		
						Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100	%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					6.073.727.000	Inspektorat

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Level Kapabilitas APIP		3	Level		
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	84	%		
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	86	%		
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	86	%		
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	86	%		
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	86	%		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.830.072.000	Inspektorat
					Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah		3	Angka		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	12,24	%		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	12,24	%		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.865.113.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		3,01	Angka		
						Indeks Ideologi Pancasila	3,1	Nilai		
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					50.923.529.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		2,8	Angka		
						IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	76	Nilai		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					127.445.543.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		3,01	Angka		
						Indeks kinerja ormas	77,87	Nilai		

Prioritas Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Target	Satuan	Program Prioritas Daerah						
				Program	Indikator Hasil Program/ Sasaran PD	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					2.844.451.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		3,01	Angka		
						Indeks toleransi	74,3	%		
						Indeks penguatan dampak ekonomi	3,1	%		
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					48.143.947.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		2,8	Angka		
						Indeks kewaspadaan Nasional	73,5	Angka		
TOTAL									23.911.942.794.000	

4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan **tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Target indikator sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 - 5,5 persen;
- b. Inflasi sebesar 1,5 - 3,5 persen;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen;
- d. Angka Kemiskinan sebesar 8,0 - 7,0 persen;
- e. Rasio Gini sebesar 0,379 - 0,382;
- f. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
- g. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6 persen.

Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, sekaligus juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 ditunjukkan dengan **keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, dan targetnya**. Keselarasan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.4.
Keselarasn Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah JawaTengah dan Nasional Tahun 2025

No	RKP Tahun 2025	RKPD Tahun 2025
A	Tema Pembangunan	
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter
B	Prioritas	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PD3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PD2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata

No	RKP Tahun 2025	RKPD Tahun 2025
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	- PD2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata - PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif

Sumber: Bappenas, 2024 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 4.5.
Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 Dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam RKP Tahun 2025

No	Indikator	Target Provinsi Sesuai RKP Tahun 2025	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 – 5,60	4,90 - 5,60
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,81 - 4,42	4,81 - 4,42
3	Rasio Gini	0,362 – 0,367	0,362 – 0,367
4	Indeks Modal Manusia	0,59	0,59
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,00 - 9,66	9,66 – 9,00
6	Intensitas Emisi GRK (%)	0,32	0,32

Sumber: Bappenas, 2024 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 4.6.
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 Dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
	PN1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69 – 85,23	Indeks Demokrasi Indonesia	85,81 – 89,07
	PN2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
1	Asia Power Index (<i>Millitary Capability</i>)	20	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Cukup Tangguh
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	61,54	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	67,5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	74,56
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%)	9,37
5	Indeks Ketahanan Energi	6,77	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	92,20
			Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	806,76
6	Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)	65,18	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	5,20
			Persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi (%)	64,31
7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,46
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,50
9	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00
10	Indeks Ekonomi Hijau	70,80	Indeks Ekonomi Hijau	62,23
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20,00	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	21,32
12	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	17,00

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,482
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,68
15	Persentase Penurunan Emisi GRK		Persentase Penurunan Emisi GRK	
	- Tahunan (%)	32,65	Tahunan (%)	5,65
	- Kumulatif (%)	28,12	Kumulatif (%)	12,35
	PN3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			
1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah nonpertanian pada level provinsi (%)	10,39
2	Rasio kewirausahaan (%)	3,14	Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,21
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,00
4	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,50
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	66,81
5	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10		
6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	12,61
7	Aset Perbankan /PDB (%)	59,50	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	25,29
8	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,10	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43
9	Aset Asuransi/PDB (%)	8,78		
10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	56,7	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	3.700.540,29
11	Total Kredit/PDB (%)	36,1	Total Kredit/PDB (%)	23,20
12	Inklusi Keuangan (%)	90,6	Inklusi Keuangan (%)	92,07

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
	PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas			
1	Hasil Pembelajaran			
	a. Rata-rata nilai PISA		Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i. Membaca	396	- Literasi Membaca (%)	78,31 – 78,49
	ii. Matematika	404	- Numerasi (%)	37,28 – 37,46
	iii. Sains	416	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
			- Literasi Membaca (%)	66,28 – 66,46
			- Numerasi (%)	49,76 – 49,95
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,46	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,73 – 8,74
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,37	Harapan lama sekolah (tahun)	13,07
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,18
3	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,89
4	Tingkat Penguatan Iptek:			
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB)	0,30	Kapabilitas Inovasi	4,80
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global	60		
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,81 – 4,42
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,80

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
7	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,65
8	Kesehatan Ibu dan Anak			
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	111
	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,00
9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	92,00
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,00
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96,36
11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	73,81 – 73,82
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34
	PN5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,9 - 20,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,88 – 34,06
2	Pembentukan Modal Total Bruto (%PDB)	30,1 - 30,2	Pembentukan Modal Total Bruto (% PDRB)	30,19
3	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	21,0 – 21,6	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	10,97
4	Biaya Logistik (%PDB)	13,50		
	PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			
1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15		
2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	39,97

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
3	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	20,00
4	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,41
5	Persentase desa mandiri (%)	4	Persentase desa mandiri (%)	9,10
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	72,80
	PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			
1	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,45	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	1,44
2	Indeks Integritas Nasional	74,52	Indeks Integritas Nasional	80,97
3	Indeks Materi Hukum	0,51	Indeks Reformasi Hukum	79,10
4	Indeks Pelayanan Publik	3,68	Indeks Pelayanan Publik	4,28
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,28
6	Indeks Persepsi Korupsi	38		
7	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65,00
8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70 – 11,20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,38
9	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	Tingkat Inflasi (%)	1,50 – 3,50
	PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,24 – 62,31
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,65 – 79,20
3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137		

Sumber: Bappenas, 2024 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 4.7.
Dukungan Program Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025
Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi		330.885.730.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	38.166.603.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	129.159.390.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.335.641.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	130.646.680.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	779.100.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.099.774.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.499.384.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	734.908.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.606.604.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.494.064.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.578.582.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.200.000.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.660.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	550.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.375.000.000
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		6.308.402.272.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.990.250.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.484.266.030.000

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	896.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.250.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.120.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	404.763.705.000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.151.000.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	300.394.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.123.626.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	246.740.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.664.754.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.319.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.558.963.000
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.500.000.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	977.550.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	135.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	185.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	253.510.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	195.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	450.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	320.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.225.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	388.786.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.400.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	240.000.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.675.000.000

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		56.024.642.000
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.236.000.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.865.113.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.923.529.000
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		20.708.459.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	560.640.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.612.500.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.654.602.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	561.470.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	550.000.000
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	607.333.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	238.250.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	55.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.334.967.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.786.815.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.450.180.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.800.335.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	245.681.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	250.686.000
5	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		480.109.195.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.151.387.000

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.919.053.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	674.105.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.701.793.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.520.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.750.000.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.930.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.300.000.000
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	380.000.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	570.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	525.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	434.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.353.388.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	745.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.305.113.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	389.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.000.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.106.110.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.581.928.000

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.581.048.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.756.361.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.942.120.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	66.224.053.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.160.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	38.283.154.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	745.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	14.317.982.000
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.854.089.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	824.768.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.005.832.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	328.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.178.750.000
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.503.054.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.381.039.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.141.578.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.143.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	127.445.543.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	48.143.947.000
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		189.910.581.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.290.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.765.000.000

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	480.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.721.000.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	72.868.427.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.447.160.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	460.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	349.824.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	20.850.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	602.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.540.320.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.705.000.000
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	261.000.000
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		16.078.297.540.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.205.256.393.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	570.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	12.873.888.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	210.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	194.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.459.750.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	20.107.445.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.210.829.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	701.598.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	70.000.000

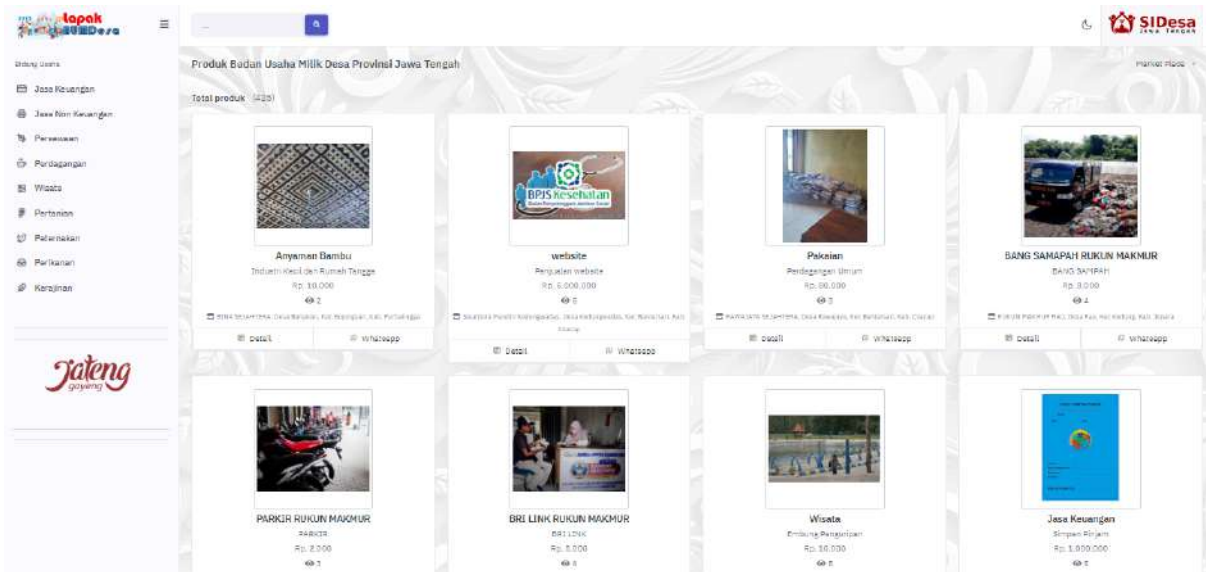
No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.300.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.840.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.229.157.000
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.780.528.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.335.000.000
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.371.724.000
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.682.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	4.775.260.000
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.348.489.000
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.040.000.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	380.153.260.000
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.900.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.080.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.285.455.540.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.365.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	38.151.060.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.157.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.836.640.000
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.992.880.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.830.072.000
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		447.604.375.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.850.000.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	98.000.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.584.500.000

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.580.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.696.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	955.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.325.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.750.000.000
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	400.921.424.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.844.451.000
		TOTAL	23.911.942.794.000

4.2.4. Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2025. Inovasi kebijakan tersebut sebagai berikut.

Lapak BUMDES



Gambar 4.3
Platform Lapak BUMDES pada Sistem Informasi Desa
Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi pembangunan aplikasi LAPAK BUMDES untuk menjawab permasalahan pemasaran bagi Badan Usaha Milik Desa dengan Klasifikasi dasar dan tumbuh sebagai sarana promosi dan penjualan produk barang/jasa. Harapannya ke depan dapat meningkatkan hasil penjualan produk barang/jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa yang pada akhirnya dapat mendukung pengurangan pengangguran dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan aplikasi dimaksud merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Desa (SIDESA) yang ada dengan penambahan fitur untuk LAPAK BUMDES.

Kegiatan pengembangan aplikasi SIDesa Jateng untuk pemasaran digital LAPAK BUMDES ini dimaksudkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Desa Jawa Tengah (SIDesa Jateng).

Tujuan inisiasi LAPAK BUMDES diantaranya adalah untuk penyediaan aplikasi berbasis *web* untuk sarana promosi dan penjualan produk Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan aplikasi SIDesa Jateng dengan penambahan fitur layanan untuk meningkatkan penjualan produk Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan pengembangan aplikasi SIDesa Jateng untuk pemasaran digital LAPAK BUMDES dengan beberapa hal yang menjadi fokus yaitu:

- a. Pencatatan data profil dan status badan hukum BUMDesa Jawa Tengah;
- b. Pengelolaan data dan informasi produk BUMDesa Jawa Tengah dengan tampilan *market place*.

Adapun rincian ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna jasa melalui diskusi teknis;
- b. Rancangan antarmuka aplikasi, dan rancangan informasi yang dihasilkan;
- c. Modulasi prosedur, data, kebutuhan informasi;
- d. Mengaplikasikan pengembangan fitur *profile* BUMDes dan lapak BUMDes pada sistem informasi desa berbasis *website* yang dapat bekerja pada *platform linux* serta *windows operation system*;
- e. Melakukan testing *fitur profile desa* dan lapak bumdes pada aplikasi SIDesa;
- f. Melaksanakan pelatihan dan asistensi seluruh modul serta *software* kepada pengguna dan administrator.

Metodologi dan pendekatan yang dipergunakan dalam pengembangan *fitur* dengan memperhatikan pengalaman pengguna (*experience user*), ketepatan dan kecermatan dalam perhitungan serta proses data. Kegiatan pengembangan *fitur profile* BUMDES dan lapak BUMDES akan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan data dan perancangan objek data yang akan digunakan;
- b. Perancangan kebutuhan data dengan memperhatikan aplikasi-aplikasi *existing*;
- c. Perancangan sistem *frontend* dan *backend* aplikasi;
- d. Pembuatan *Prototype* Aplikasi;
- e. *Application Development and Construction*;
- f. *Data Modelling*;
- g. *Selesai*.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota dengan karakteristik berbeda. Dalam pengembangannya diperlukan analisis pengembangan wilayah sebagai panduan dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Jawa Tengah akan menjadi rujukan dalam arah pembangunan kabupaten/kota dalam konteks pengembangan wilayah Jawa Tengah.

5.1. Arah Kebijakan Umum

Dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam 10 (sepuluh) wilayah pengembangan (WP) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pertimbangan daya saing daerah yang diukur dengan indeks daya saing daerah (IDSD) juga menjadi faktor untuk menentukan arah pembangunan kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2025. Kedua faktor ini diharapkan dapat mendorong pembangunan Jawa Tengah secara optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Selaras dengan hal tersebut, pembangunan kabupaten/kota juga mempedomani aspek-aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/*enabling environment*, aspek SDM/*Human Capital*, dan aspek pasar/*market* yang diukur melalui pemetaan daya saing daerah (PDSD). Tujuan dari penggunaan pemetaan ini adalah memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi internal namun juga melihat secara komprehensif hubungan antara wilayah di Jawa Tengah dalam mewujudkan optimalisasi pembangunan sistem ekonomi wilayah.

5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, pengembangan wilayah Jawa Tengah diimplementasikan dengan pendekatan keterkaitan aspek fisik alam, sosial ekonomi, dan/atau budaya untuk mengoordinasikan pembangunan dan keterpaduan pengembangan. RTRW Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan di Jawa Tengah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dengan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di Jawa Tengah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi.

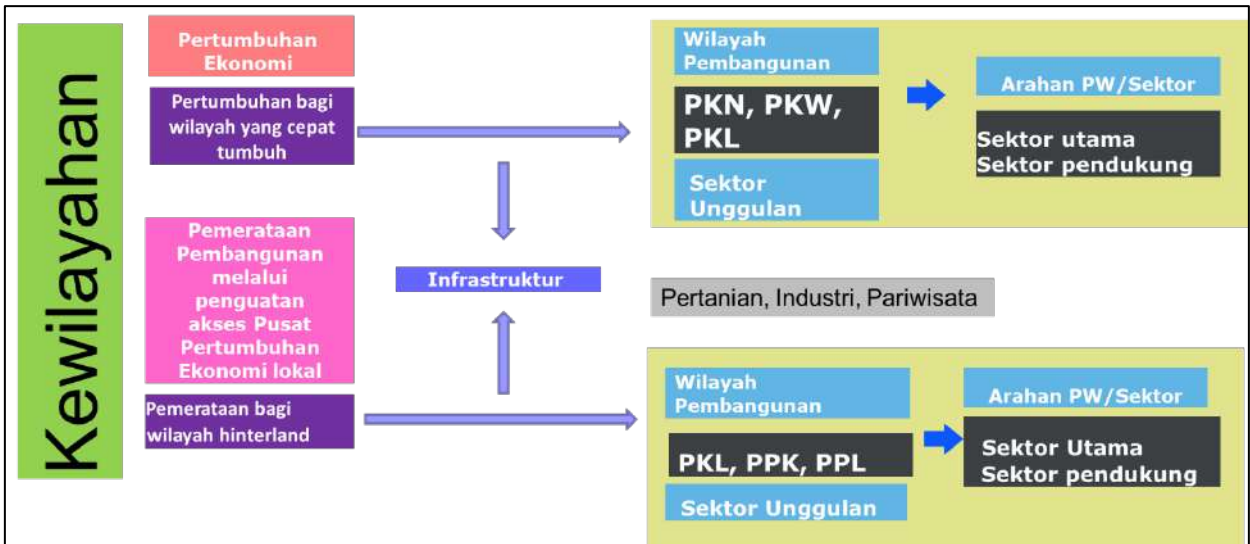
Sementara itu, pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik

masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Dalam upaya pemerataan pembangunan di Jawa Tengah, maka pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antarwilayah maupun di dalam wilayah dengan peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan; peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah; serta peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui strategi seperti ilustrasi pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem pusat pemukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
- c. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
- d. Pemanfaatan kawasan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
- f. Pengembangan kawasan strategis provinsi; dan
- g. Peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.



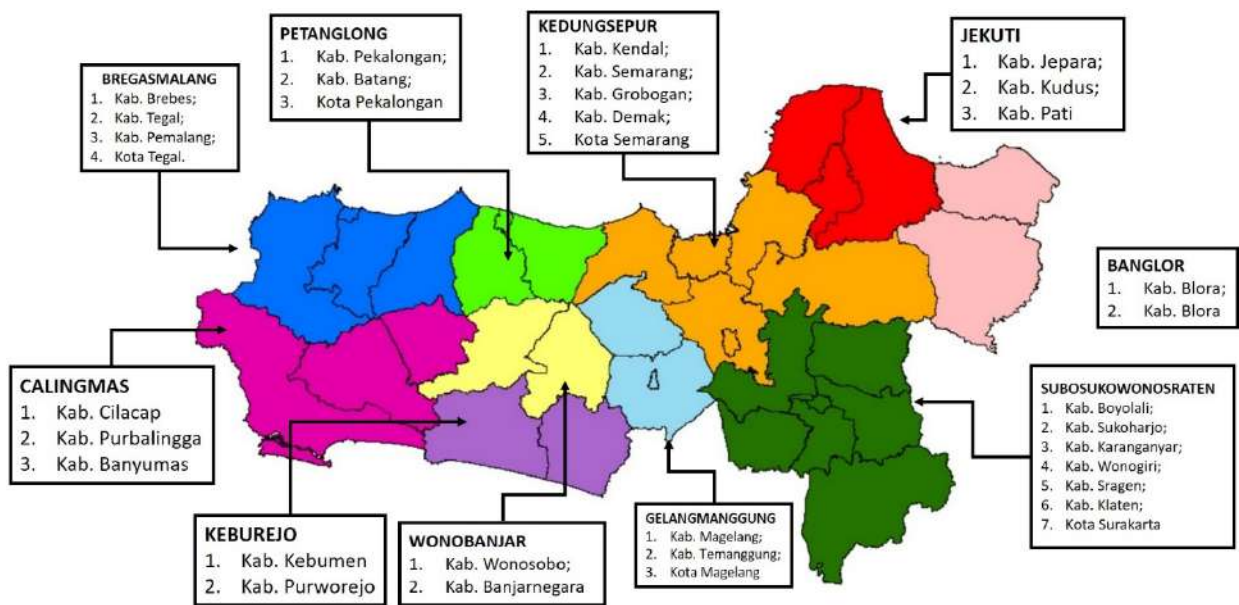
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.1.
Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa

pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Berikut 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. WP Kedungsepur yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga;
2. WP Jekuti yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati;
3. WP Banglor yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
4. WP Gelangmanggung yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang;
5. WP Wonobanjar yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
6. WP Keburejo yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
7. WP Cibalingmas yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
8. WP Subosukawonosraten yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;
9. WP Bregasmalang yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal;
10. WP Petanglong yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.2.
Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

5.3. Arahkan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kondisi umum wilayah yang dikaitkan dengan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, pengembangan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat) koridor yaitu:

1. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan, pengendalian dan rehabilitasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana di sepanjang Koridor Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa;
2. Koridor yang dikembangkan dengan memantapkan pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor Semarang hingga Solo dan Koridor Jepara-Kudus-Rembang;
3. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dengan mitigasi berada pada koridor Utara-Selatan di bagian barat Jawa Tengah di sepanjang Koridor Brebes hingga Cilacap dan koridor Rembang-Blora di bagian timur Jawa Tengah; dan
4. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dan upaya konservasi karena merupakan bagian hulu di Jawa Tengah berada pada koridor wilayah tengah Jawa Tengah.

Empat koridor pembagian tersebut juga dioptimalkan untuk mendorong wilayah yang lambat berkembang serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, sistem perkotaan, dan interaksi antarwilayah.

5.4. Arahan Per Wilayah Pengembangan

Pengembangan 10 (sepuluh) WP bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan.

5.4.1. Wilayah Pengembangan Kedungsepur

Salah satu kegiatan prioritas Pemerintah Pusat adalah mewujudkan kota bertaraf internasional (*global city*). WP Kedungsepur diarahkan untuk mengelola kawasannya secara inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan dengan Kota Semarang sebagai sentral pertumbuhan. Berdasarkan capaian IPM tahun 2023, WP Kedungsepur menunjukkan potensi tinggi dengan capaiannya di atas Jawa Tengah dan nasional. Dalam hal ini terdapat 1 (satu) kabupaten yang masih memerlukan upaya lebih yaitu Kabupaten Grobogan dengan capaian 71,49.

Selain itu, capaian kinerja pembangunan makro lainnya di Kedungsepur yang masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah aspek penanganan pengangguran. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang di bawah TPT provinsi. Disparitas angka kemiskinan di WP Kedungsepur juga memerlukan perhatian, karena terdapat 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak yang angka kemiskinnannya di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata WP. Secara lengkap capaian makro pembangunan di WP Kedungsepur Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Kedungsepur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Grobogan	4,98	11,72	4,02	71,49
2	Kab. Demak	5,01	12,01	5,38	74,07
3	Kab. Semarang	4,74	7,17	4,05	75,13
4	Kab. Kendal	5,56	9,39	5,76	73,86

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
5	Kota Semarang	5,79	4,23	5,99	84,43
6	Kota Salatiga	5,34	4,66	4,57	84,99
Rata-Rata WP		5,24	8,19	4,96	76,56
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Kedungsepur

Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Kedungsepur memiliki nilai rata-rata 3,639. Adanya gap sebesar 3,3 antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Demak pada pilar akses keuangan karena persentase jumlah bank yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha serta persentase pertumbuhan kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada UMKM untuk pengembangan usaha. Pada pilar dinamika bisnis terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah (3,96) diantaranya Kabupaten Kendal (3,25), Kabupaten Demak (3,54), Kota Salatiga (3,33), dan Kabupaten Grobogan (3,67). Pada pilar ketenagakerjaan terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah (4,00) di antaranya Kota Semarang (3,78), Kabupaten Demak (3,22), Kota Salatiga (3,61), dan Kabupaten Grobogan (3,39).



Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.3.
Nilai PDSD Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur Tahun 2023

Interaksi ekonomi wilayah yang terdapat di Kedungsepur terpusat pada interaksi daerah lainnya ke Kota Semarang. Hal ini karena peran Kota Semarang sebagai pusat distribusi konsumsi sektor-sektor unggulan di daerah Kedungsepur. Berdasarkan hal tersebut, interaksi ekonomi wilayah yang terjadi di Kedungsepur masih terpusat di Kota Semarang. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki interaksi ekonomi dengan DKI Jakarta dan Surabaya. Interaksi pelayanan umum wilayah Kedungsepur juga kuat berada pada Kota Semarang. Selain itu interaksi

pelayanan umum dengan wilayah sekitar yang berdekatan juga terjadi. Kabupaten Kendal memiliki interaksi pelayanan umum yang lebih kuat terhadap Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Batang daripada ke Kota Semarang. Berdasarkan komoditas utama yang dihasilkan masing-masing wilayah, komoditas utama Kedungsepur didominasi oleh sektor industri pengolahan utamanya industri pengolahan makanan. Berikut penjabaran komoditas utama di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.

1. Komoditas utama di Kabupaten Kendal berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan berupa makanan;
 - b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi jagung, bawang merah, tebu, kambing, dan bandeng;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran.
2. Komoditas utama di Kota Semarang berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan;
 - b) sektor konstruksi berupa pekerjaan gedung dan bangunan sipil;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor).
3. Komoditas utama di Kabupaten Semarang berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan meliputi industri makanan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan hasil pertanian;
 - b) sektor konstruksi meliputi konstruksi bangunan gedung dan konstruksi bangunan sipil;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meliputi *sparepart* kendaraan bermotor dan logam besi.
4. Komoditas utama di Kota Salatiga berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan berupa industri makanan dan minuman;
 - b) sektor konstruksi;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
5. Komoditas utama di Kabupaten Demak berasal dari:
 - a) sektor industri berupa industri makanan dan minuman (beras);
 - b) sektor pertanian berupa industri 48 makanan dan minuman (beras);
 - c) sektor perdagangan berupa perdagangan selain mobil dan sepeda motor.
6. Komoditas utama di Kabupaten Grobogan berasal dari:
 - a) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi padi, jagung, kedelai;
 - b) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
 - c) sektor industri pengolahan berupa industri makanan.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Kedungsepur

Industri di Kedungsepur diarahkan pengembangannya pada kawasan industri Semarang, Kendal dan Demak berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam. Selain itu, sektor pertanian terus dikembangkan utamanya pada kawasan penyangga disertai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan *urban sprawl*. Dalam rangka peningkatan mobilitas transportasi barang maka perlu upaya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan secara terintegrasi di dalam dan antar kawasan serta mendorong kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling

menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

Pada tahun 2025, pengembangan wilayah Kedungsepur diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Kedungsepur Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Grobogan	4,80-5,80	10,40-10,90	3,90-3,50	72,60
2	Kab. Demak	4.85-5,32	10,39-11,01	5,30-4,40	74,90
3	Kab. Semarang	4,90-5,60	6,21-6,80	3,95-3,70	75,96
4	Kab. Kendal	5,60-5,80	8,53-8,89	5,49-5,19	75,20-76,61
5	Kota Semarang	5,80-6,50	3,74-3,98	5,61-5,31	84,80-85,80
6	Kota Salatiga	5,40-6,10	4,24-4,52	4,49-4,19	85,69

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

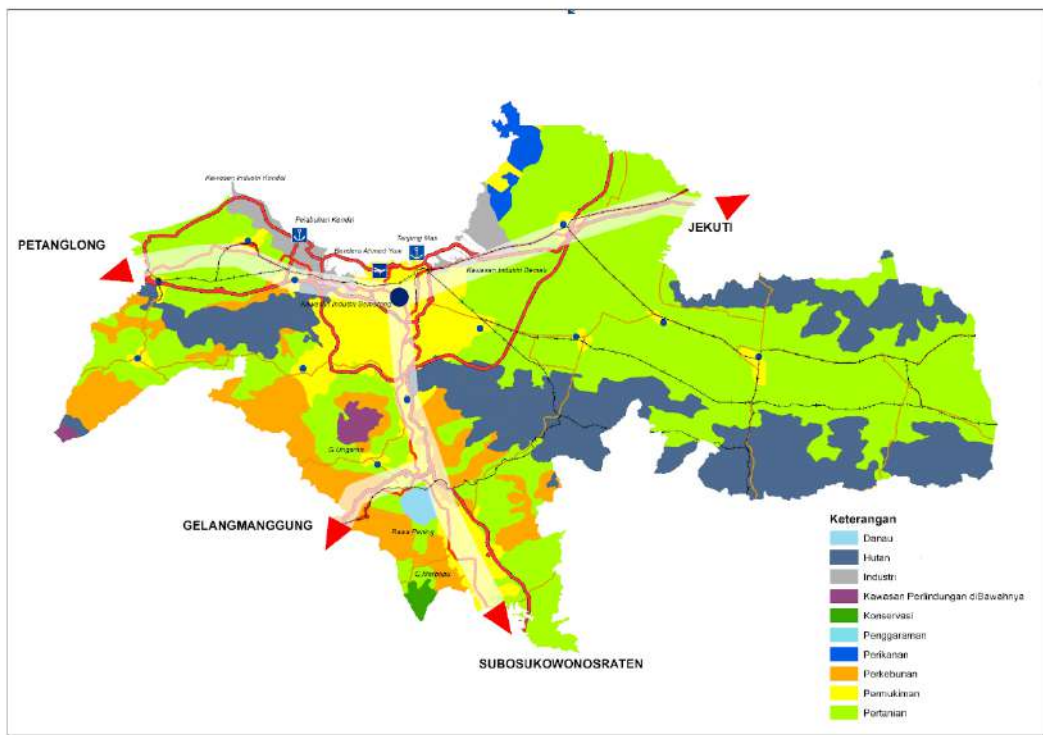
Target indikator makro pembangunan di atas merupakan agregat dalam mendukung capaian ditingkat provinsi yang memerlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Selain mengintegrasikan prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, pada tahun 2025 arah pembangunan wilayah di WP Kedungsepur terdapat beberapa kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang akan diintervensikan di WP Kedungsepur.

Dalam upaya mencapai target-target makro pembangunan daerah, maka dilakukan intervensi dalam mendorong tercapainya indikator makro tersebut di antaranya adalah:

- Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
 - Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi dan integrasi antar moda transportasi;
 - Air minum;
 - Drainase.
- Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;

- c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Kedungsepur untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.4.
Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

5.4.2. Wilayah Pengembangan Jekuti

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, WP Jekuti merupakan bagian dari WP Jekutibanglor bersama dengan WP Banglor. Jekuti

merupakan wilayah pengembangan yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara. Secara umum, WP ini menghadapi permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian, dan sumber daya lingkungan yang menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi makro pembangunan wilayah Jekuti saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekuti Tahun 2023

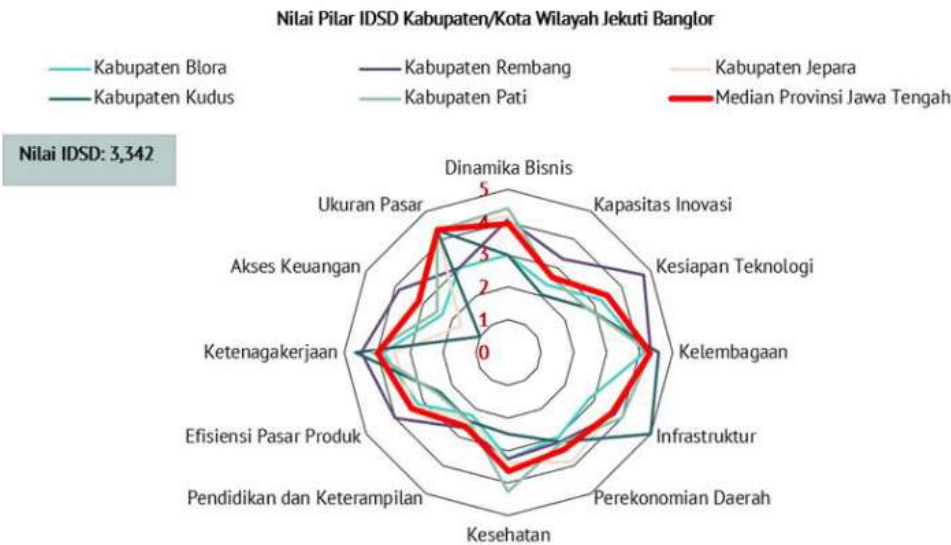
No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Jepara	5,17	6,61	3,35	73,85
2	Kab. Kudus	2,19	7,24	3,25	76,71
3	Kab. Pati	5,02	9,31	4,29	73,59
Rata-Rata WP		4,13	7,72	3,63	74,47
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Lokasi WP Jekuti berada di utara Jawa Tengah dengan potensi yang dapat dioptimalkan adalah perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, penggalian dan pertambangan. Kawasan strategis yang ada di wilayah pengembangan ini adalah Kawasan Industri Rembang; Destinasi Pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya; Kawasan Strategis Pariwisata Rembang–Lasem dan sekitarnya. Kawasan strategis ini dapat dijadikan daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan.

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Jekuti

Penilaian PDSD untuk WP Jekuti dilakukan pada tahun 2023 dimana masih tergabung dalam WP Jekutibanglor. Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Jekutibanglor memiliki nilai rata-rata 3,34.



Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.5.
Nilai PDSD Kabupaten/Kota di WP Jekutibanglor Tahun 2023

Interaksi kewilayahan yang saling melengkapi terjadi di beberapa kabupaten sekitar Kota Semarang dengan menciptakan jaringan ekonomi dan sosial yang kompleks. Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati menunjukkan interaksi yang kuat di antara mereka. Ketiganya juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Kota Semarang, salah satunya di bidang pendidikan. Hal tersebut mencerminkan keberadaan pusat pelayanan pendidikan penting di kawasan ini

Kabupaten Kudus memiliki interaksi yang cukup kuat dengan wilayah di sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Demak dan Grobogan. Kabupaten Demak berperan sebagai penyedia tenaga kerja, memberikan kontribusi penting dalam memperkuat hubungan ekonomi di wilayah ini. Interaksi pelayanan umum juga membentuk pola yang berbeda di antara wilayah-wilayah ini.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Jekuti

Pengembangan wilayah Jekuti tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Jekuti Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Jepara	5,30 – 6,00	5,57-6,10	3,20 – 2,88	74,50
2	Kab. Kudus	2,30 – 3,00	5,75-6,76	3,15 – 2,65	77,22 – 78,02
3	Kab. Pati	5,10 – 5,80	8,37-8,90	4,04 – 3,74	74,69

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

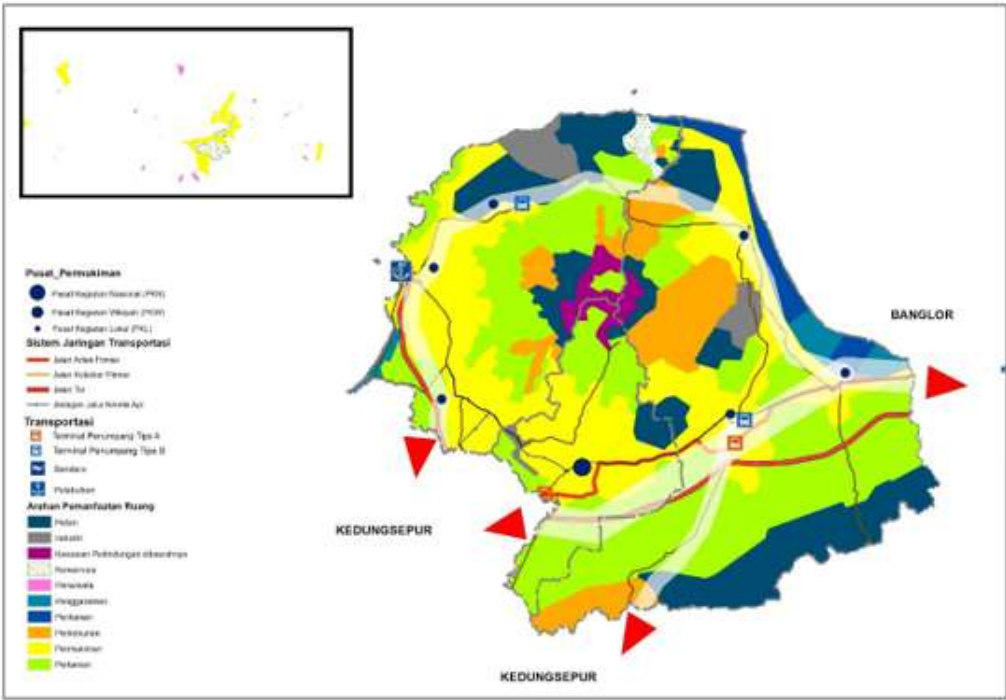
Arah pengembangan WP Jekuti antara lain untuk memadukan pembangunan kawasan perkotaan Kudus-Jepara-Juwana-Pati. Pengembangan pengelolaan industri khususnya kerajinan berada di Kabupaten Jepara, dan industri pengelolaan tapioka berada di Kabupaten Pati. Pengembangan sektor pertanian diupayakan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas disertai dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah di kawasan ini. Sebagai kawasan yang memiliki ancaman bencana utamanya banjir, longsor dan kekeringan yang sangat tinggi maka perlu adanya upaya mitigasi bencana dalam setiap pembangunan. Selain itu perlu kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan daerah yang tercapainya target-target makro, maka dilakukan intervensi dalam mendorong tercapainya indikator makro tersebut di antaranya adalah:

1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;
 - b. Air minum;
 - c. Drainase.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui: pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
 - a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up digital* berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Jekuti untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.6.
Arah Pengembangan Wilayah Jekuti

5.4.3. Wilayah Pengembangan Banglor

Wilayah pengembangan yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora ini pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 tergabung dalam WP Jekutibanglor. Dalam perkembangannya, melihat pola interaksinya, WP Banglor berdiri sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh WP ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan capaian IPM yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Tabel 5.5.
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Banglor Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Rembang	5,20	14,17	3,10	70,63
2	Kab. Blora	3,10	11,49	2,60	71,89
Rata-Rata WP		4,15	12,83	2,85	71,26
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Banglor

Penilaian PDSD WP Banglor masih tergabung dalam penilaian WP Jekutibanglor. Penilaian tersebut mengidentifikasikan bahwa di wilayah ini masih terdapat gap dalam pilar akses keuangan karena persentase pertumbuhan kredit (perbankan, LKBB, LKM) kepada UMKM dan petani/nelayan dan modal ventura bagi struktur permodalan koperasi. Di sisi lain, interaksi antara Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora menunjukkan pola yang berbeda. Meskipun interaksi di antara keduanya cukup kuat, Kabupaten Blora lebih cenderung berinteraksi dengan wilayah Bojonegoro, Ngawi, dan Tuban. Sementara itu,

Kabupaten Rembang tetap memiliki interaksi yang cukup kuat dengan Kabupaten Jepara, khususnya dalam konteks industri mebel.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Banglor

Pengembangan wilayah Banglor untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.6.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Banglor Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Rembang	5,20 – 6,00	12,68-13,10	2,53 – 2,23	72,47
2	Kab. Blora	3,40 – 4,10	9,97-10,57	3,00 – 2,70	71,80

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah,2024

Dalam upaya mendorong pencapaian indikator tersebut, maka arah pengembangan wilayah WP Banglor diarahkan dengan:

1. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
2. mendorong kawasan perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala internasional;
3. mengembangkan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Rembang;
4. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
5. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan
6. menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan upaya untuk mendorong beberapa hal seperti: 1) kawasan perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi berskala Internasional, 2) pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Blora, 3) pengembangan kawasan riset dan pengolahan air laut di Kabupaten Rembang, 4) pengembangan Bandara Nggloram, serta 5) mengembangkan pelabuhan umum dan perikanan di Kabupaten Rembang. Pada sektor pertanian perlu upaya peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka untuk peningkatan produktivitas pertanian tanaman di Kawasan WP Banglor.

Intervensi perlu dilakukan dalam mendorong terlaksananya pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu upaya yang dilakukan di antaranya adalah:

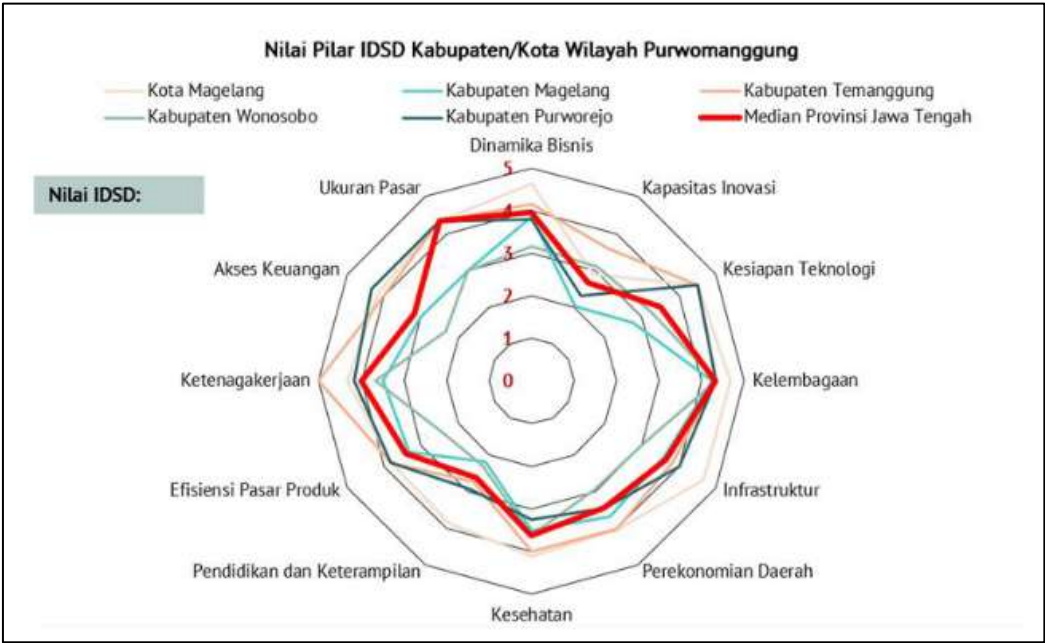
1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;
 - b. Air minum;
 - c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:

- a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up digital* berbasis komunitas; dan
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Banglor untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Penilaian PDSD tahun 2023 yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah terhadap WP Gelangmanggung masih disatukan penilaiannya dengan WP Purwomanggung. persentase pertumbuhan kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada UMKM untuk pengembangan usaha, persentase pertumbuhan kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada petani dan/atau nelayan, serta pertumbuhan nilai ekspor. Pada pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi, pilar pendidikan dan keterampilan, pilar efisiensi pasar produk terdapat 3 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.8.

Nilai PDSD Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung Tahun 2023

Potensi komoditas utama pada WP Gelangmanggung dioptimalkan guna pelaksanaan pembangunan wilayah. Komoditas utama masing-masing daerah sebagai berikut:

1. Komoditas utama di Kabupaten Magelang berasal dari:
 - a) sektor industri meliputi industri makanan dan minuman;
 - b) sektor pertanian meliputi tanaman hortikultura tahunan dan lainnya;
 - c) sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.
2. Komoditas utama di Kabupaten Temanggung berasal dari:
 - a) Sektor pengolahan meliputi Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau;
 - b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, produk perikanan dan penebangan kayu hutan;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor.
3. Komoditas utama di Kota Magelang berasal dari:
 - a) sektor konstruksi;
 - b) industri;
 - c) pengolahan;

- d) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berupa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Gelangmanggung

Pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.8.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Gelangmanggung Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Magelang	5,20 – 5,90	9,67-10,55	4,25 – 3,89	71,90 – 72,89
2	Kab. Temanggung	5,28	8,70 - 9,00	2,30 – 2,17	72,76
3	Kota Magelang	5,50 – 6,20	5,00 - 5,7	5,02 – 4,72	82,05 – 82,23

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

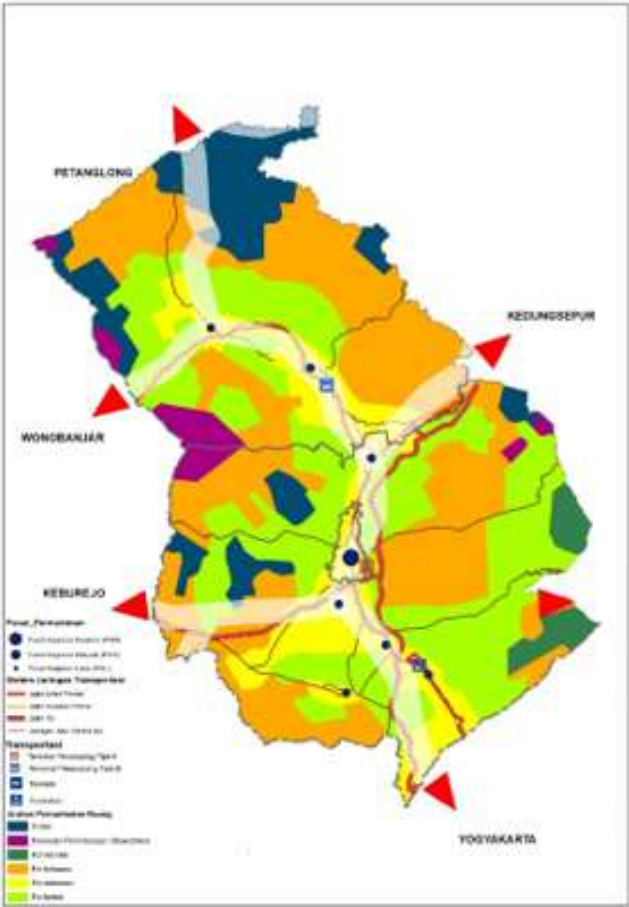
Pengembangan WP Gelangmanggung antara lain untuk melestarikan kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi – Merbabu - Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing yang terintegrasi dengan destinasi wisata unggulan Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan kelestarian budaya, kelestarian alam, penggunaan energi terbarukan, dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan perkotaan didorong pengembangannya pada koridor Muntilan – Mungkid - Kota Magelang – Secang - Temanggung disertai dengan pengembangan wilayah yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana alam seperti erupsi gunung api dan gempa bumi. Selain itu dilakukan upaya untuk peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan wilayah sekitarnya, pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dan dengan tetap memperhatikan kelestasian alam. Pada kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah – DIY dilakukan penyelarasan pembangunan serta mendorong kerjasama kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan.

Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan daerah yang tercapainya target-target makro, maka dilakukan intervensi dalam mendorong tercapainya indikator makro tersebut di antaranya adalah:

1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, dan kinerja simpul transportasi;
 - b. Air minum;
 - c. Persampahan;
 - d. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri

- dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
- b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.9.
Arah Pengembangan Wilayah Gelangmanggung

5.4.5. Wilayah Pengembangan Wonobanjar

RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 belum memuat WP Wonobanjar yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kedua kabupaten ini sebelumnya tergabung dalam WP lainnya, Kabupaten Wonosobo berada pada WP Puwomanggung dan Kabupaten Banjarnegara tergabung dalam WP Barlingmascakeb. Pada perkembangannya kedua kabupaten ini disatukan dalam WP tersendiri sesuai karakteristik dan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Capaian indikator makro WP Wonobanjar memerlukan upaya kuat untuk ditingkatkan mengingat semua indikator dibawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi angka kemiskinan yang menunjukan gap yang cukup jauh dari capaian rata-rata nasional dan provinsi yaitu 15,58 untuk Kabupaten Wonosobo dan 17,90 untuk Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 5.9.
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Wonobanjar Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Wonosobo	5,04	10,96	4,42	71,56
2	Kab. Banjarnegara	5,00	9,26	2,32	71,33
Rata-Rata WP		4,68	15,24	5.60	69,63
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Wonobanjar

Angka kemiskinan, angka pengangguran, dan IPM Kabupaten Banjarnegara masih berada dibawah rata-rata provinsi, meskipun demikian terdapat berbagai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan. Ekosistem inovasi dapat dimanfaatkan sebagai *leading actor* dalam inovasi daerah sehingga mendorong pengembangan kolaborasi eksternal melalui interaksi wilayah untuk menciptakan iklim inovasi. Sedangkan komoditas utama di Kabupaten Wonosobo berasal dari sektor pertanian meliputi hortikultura dan olahan kayu, sektor industri pengolahan meliputi makanan olahan dan kerajinan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Wonobanjar

Pengembangan wilayah Wonobanjar pada tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.10.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Wonobanjar Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Wonosobo	4,30 – 5,10	13,45-14,20	4,00 – 3,00	71,37
2	Kab. Banjarnegara	4,80 – 5,70	12,46-13,64	6,10 – 5,72	70,55

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2024

Arah pengembangan wilayah Wonobanjar diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu serta sebagai kawasan penyangga di sekitarnya. Dalam rangka mendorong pengembangan KSPN Dieng dan *Geopark* Dieng perlu dikakukan peningkatan akses kawasan serta kualitas destinasi wisata dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah. Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian diarahkan melalui pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek – Wonosobo – Banjarnegara - Klampok dengan memperhatikan fungsi antar kawasan serta upaya mitigasi bencana alam seperti erupsi gunung api dan gerakan tanah. Peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan terus dilakukan pada wilayah ini karena berfungsi sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya serta mengembangkan sektor industri hasil pertanian, kehutanan di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara bagian selatan serta Pengadaan Listrik dan Gas dari energi terbarukan antara lain air, panas bumi dan gas rawa.

Dalam rangka tercapainya target-target makro pembangunan daerah, maka WP Wonobanjar perlu melakukan intervensi dalam mendorong ketercapaian tersebut di antaranya melalui:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;
 - b. Air minum;
 - c. Drainase.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
 - a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

5.4.6. Wilayah Pengembangan Keburejo

Selain WP Wonobanjar, WP Keburejo juga merupakan pembentukan baru dari WP yang semula berasal dari WP Barlingmascakeb dan Purwomanggung. Pada wilayah ini permasalahan utama yang dihadapi masih terkait kemiskinan. Capaian angka kemiskinan pada wilayah ini lebih tinggi daripada nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 16,34 untuk Kabupaten Kebumen dan 11,33 untuk Kabupaten Purworejo. Capaian IPM kedua kabupaten lebih baik daripada capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.11.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Keburejo Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%) ^{a)}	TPT (%)	IPM
1	Kab. Kebumen	5,66	16,34	5,11	71,88
2	Kab. Purworejo	5,07	11,33	4,02	74,35
Rata-Rata WP		5,37	13,83	4,56	73,92
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Keburejo

Pada tahun 2023, penilaian PDSD Kabupaten Kebumen masih tergabung dalam WP Barlingmascakeb sedangkan Kabupaten Purworejo masih dinilai bersama dengan WP Purwomanggung. Potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kebumen yaitu pilar kesiapan teknologi karena proporsi rumah tangga yang mengakses internet dan produk inovasi teknologi sudah dikomersialisasikan. Sedangkan Kabupaten Purworejo memiliki peran dalam membentuk daya saing daerah yaitu pada faktor market/pasar.

Interaksi ekonomi di wilayah terpusat pada interaksi dengan Provinsi DI. Yogyakarta karena kedekatan geografis. Komoditas utama di Kabupaten Purworejo berasal dari (1) sektor pertanian meliputi padi, ubi kayu, dan kelapa; (2) sektor industri meliputi olahan kayu, gula kelapa, makanan dan minuman, VCO, kecap, keripik, dan klanting; (3) sektor perdagangan meliputi beras, kelapa, dan pisang.

Kondisi daya saing wilayah Keburejo ini memiliki kelemahan pada beberapa indikator, antara lain:

- 1) rendahnya komersialisasi terhadap inovasi teknologi;
- 2) kurangnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi; serta
- 3) rendahnya pendapatan daerah.

Di samping itu, masyarakat Keburejo memiliki ciri tingkat pendidikan yang rendah, namun berkeahlian (*skilled*). Dukungan Pemerintah untuk peningkatan *skill* melalui sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja sangat tinggi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, maka diperlukan program yang mampu mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK. Di samping itu, perlu program peningkatan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta riset dan inovasi teknologi juga perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi. Selain itu juga perlu penguatan kolaborasi, khususnya dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Keburejo

Pengembangan wilayah Keburejo untuk tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.12.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Keburejo Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Kebumen	5,40 – 6,30	13,90-14,71	4,98 – 4,55	72,45
2	Kab. Purworejo	5,16 – 6,16	9,04-10,22	3,11	75,04

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

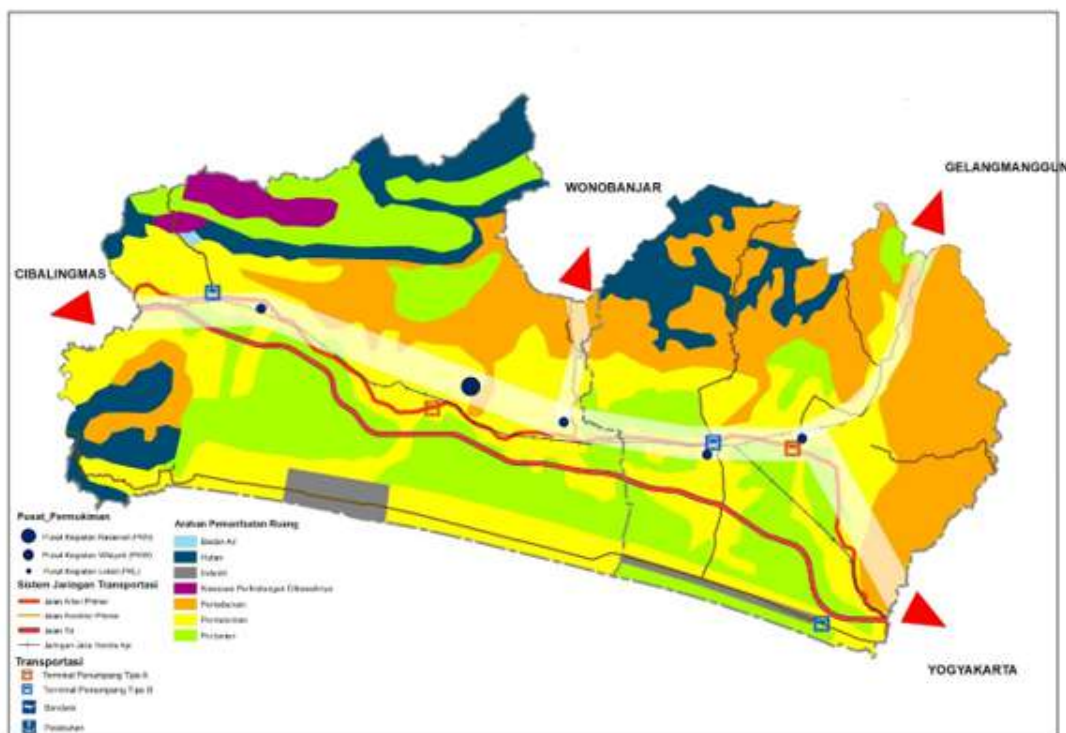
Arah pengembangan wilayah Keburejo diarahkan kepada perwujudan perkotaan Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo - Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang dan koridor wisata pantai - *geopark* Karangsambung Karangbolong - KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, sehingga diperlukan beberapa upaya penanganan terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Berikut upaya yang dapat dilakukan sebagai strategi dalam mendorong tercapainya indikator makro di antaranya adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi (pembangunan terminal) dan integrasi antar moda transportasi (terminal dan stasiun);
 - b. Air minum;
 - c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - a. Meningkatkan enciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;

- d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantaranya dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan start up digital berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Keburejo untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.10.
Arah Pengembangan Wilayah Keburejo

5.4.7. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

WP Subosukowonosraten sebagai salah satu lokus penompang *global city* di Jawa Tengah selain WP Kedungsepur. Dalam pengembangannya difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi pada RPJPN 2025 – 2045 dengan Kota Surakarta sebagai pusatnya. Secara umum, capaian IPM pada WP

Subosukawonosraten telah melampaui capaian nasional dan provinsi Jawa Tengah, untuk Kabupaten Wonogiri masih perlu upaya lebih dengan IPM berada pada capaian 71,97. Tingkat Pengangguran Terbuka keseluruhan kabupaten/kotanya sudah lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Beberapa kabupaten tercatat masih memerlukan upaya serius untuk mengurangi kemiskinan karena capaian persentase angka kemiskinan masih di atas provinsi terutama di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Tabel 5.13.

**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Subosukawonosraten Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Boyolali	5,63	9,81	4,05	75,41
2	Kab. Sukoharjo	5,06	7,58	3,40	78,65
3	Kab. Karanganyar	5,53	9,79	4,35	77,31
4	Kab. Wonogiri	4,98	10,94	1,92	71,97
5	Kab. Sragen	5,23	12,87	3,87	75,10
6	Kab. Klaten	5,70	12,28	4,20	77,59
7	Kota Surakarta	5,57	8,44	4,58	83,54
Rata-Rata WP		5,36	10,24	3,76	76,58
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

Kabupaten/kota di WP Subosukawonosraten menunjukkan kenaikan indeks daya saing daerah yang cukup positif dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di WP lainnya. Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Subosukawonosraten di posisi tertinggi dengan nilai rata-rata 3,818. Terdapat gap sebesar 3,48 antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar pada pilar kapasitas inovasi, sehingga diperlukan kolaborasi pengembangan teknologi dan inovasi, serta produk penelitian dan pengembangan (jumlah penelitian, intelektual, dan paten). Pada pilar akses keuangan terdapat 5 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah (3,17) di antaranya Kabupaten Wonogiri (3,00), Kabupaten Boyolali (2,50), Kabupaten Sukoharjo (2,33), Kabupaten Klaten (1,00), Kabupaten Karanganyar (2,83).



Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.11.

Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di WP Subosukawonosraten

Interaksi ekonomi wilayah yang terdapat di Subosukawonosraten, dengan interaksi kuat terjadi pada Pusat Perkotaan Surakarta. Namun, interaksi kolaborasi sektor yang tertinggi PDRB juga terjadi dengan daerah lainnya pada sistem perwilayahan. Contohnya pada industri kayu sebagai unggulan di Kabupaten Sukoharjo dipasok dari kayu di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar, dan pemasarannya oleh Kota Surakarta. Selain itu, Kota Surakarta juga memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan wilayah lain yang berada di Utara dan Selatan. Keterkaitan Kota Surakarta di wilayah Utara yaitu dengan Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Sedangkan keterkaitan di wilayah Selatan yaitu dengan Yogyakarta dan Ponorogo. Interaksi pelayanan umum di wilayah Subosukawonosraten secara umum berada di Kota Surakarta. Selain itu interaksi dengan wilayah sekitar seperti Yogyakarta, juga terjadi pada Kabupaten Wonogiri yang berinteraksi pelayanan umum dengan Kota Yogyakarta dan Ponorogo. Berikut penjabaran komoditas utama di Wilayah Subosukawonosraten:

1. Komoditas utama di Kota Surakarta berasal dari:
 - a) sektor konstruksi berupa pembangunan gedung untuk sektor pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*);
 - b) sektor perdagangan besar dan eceran meliputi reparasi mobil dan sepeda motor, serta tekstil (batik);
 - c) sektor informasi dan komunikasi berupa jasa sistem komunikasi data.
2. Komoditas utama di Kabupaten Boyolali berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan meliputi tekstil dan *garment*, kertas, logam, makanan;
 - b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi sayur mayur, tanaman Perkebunan, sapi, kayu putih, ikan kolam dan tambak;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meliputi produk sayur mayur, tanaman perkebunan, produk sapi dan olahannya.

- 3. Komoditas utama di Kabupaten Sukoharjo berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan meliputi industri makanan dan minuman;
 - b) sektor perdagangan besar dan kecil, meliputi industri reparasi mobil dan sepeda motor; dan
 - c) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berupa tanaman pangan.
- 4. Komoditas utama di Kabupaten Wonogiri berasal dari:
 - a) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi padi dan palawija;
 - b) sektor industri pengolahan berupa meliputi industri makanan dan minuman;
 - c) sektor perdagangan besar dan kecil, meliputi industri reparasi mobil dan sepeda motor.
- 5. Komoditas utama di Kabupaten Sragen berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan berupa industri mebel;
 - b) sektor perdagangan besar dan eceran berupa batik;
 - c) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berupa padi.
- 6. Komoditas utama di Kabupaten Karanganyar berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan berupa agroindustri;
 - b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi tanaman pangan dan produk olahan ikan;
 - c) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meliputi industri perdagangan, pertokoan modern, reparasi mobil dan sepeda motor.
- 7. Komoditas utama di Kabupaten Klaten berasal dari:
 - a) sektor industri pengolahan meliputi olahan makanan, penenunan, *handycraft*, cor logam;
 - b) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meliputi mebel, jasa bengkel;
 - c) pertanian, kehutanan, dan perikanan berupa padi.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.14.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Subosukawonosraten Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Boyolali	5,70 – 6,40	8,58-9,08	3,92 – 3,62	76,67
2	Kab. Sukoharjo	5,30 – 5,94	7,10-7,30	4,00 – 3,40	79,00
3	Kab. Karanganyar	6,15	8,96	4,07	78,19
4	Kab. Wonogiri	5,00 – 6,00	9,51-9,93	1,82 – 1,52	73,60
5	Kab. Sragen	5,86	11,65-12,07	3,55 – 3,17	76,00
6	Kab. Klaten	5,70 – 6,00	10,61-11,24	4,00 – 3,68	77,90 – 78,80
7	Kota Surakarta	5,90	7,18-7,61	4,35 – 4,05	84,48

Sumber: Bappeda Provnsi Jawa Tengah, 2024

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten diarahkan untuk mendorong pengembangan permukiman perkotaan Surakarta dan kabupaten disekitarnya secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing.

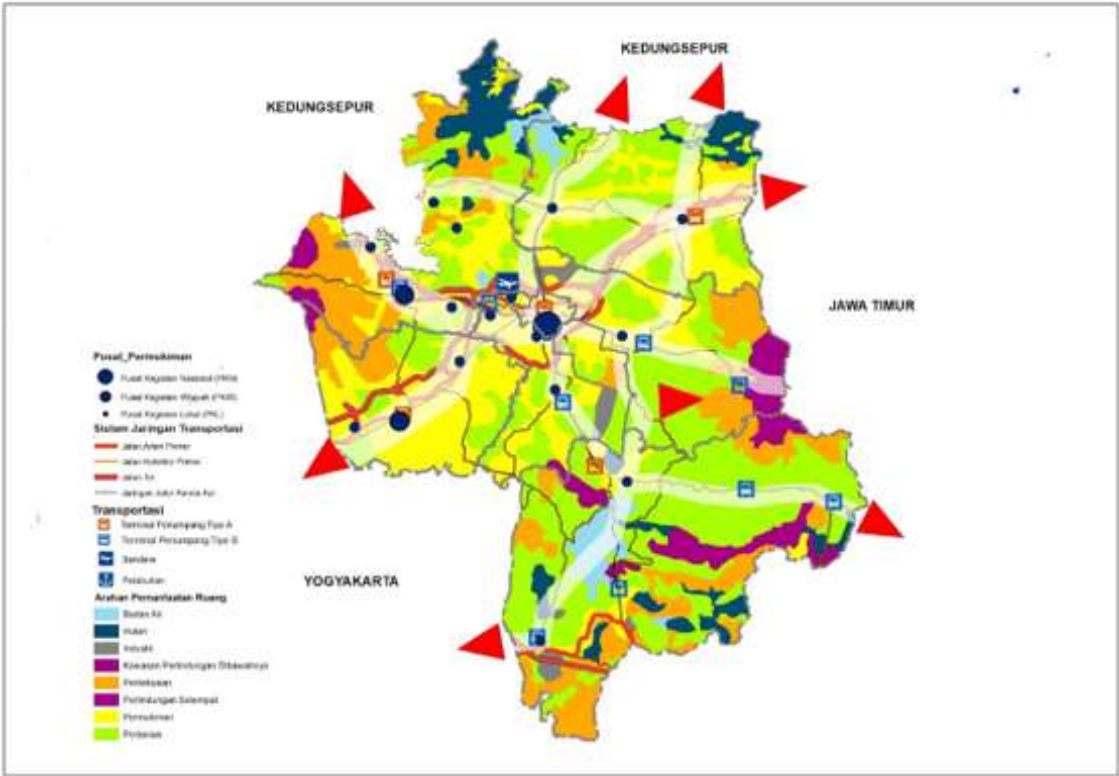
Kawasan ini didorong untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, industri, dan pertanian dengan memperhatikan kesesuaian peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah. Selain itu sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah maka perlu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian serta menjaga alih fungsi lahan sawah. Dalam mendukung kemudahan pergerakan barang hasil produksi dari sektor industri dan pertanian maka perlu pengembangan fasilitas logistik di dalam wilayah pengembangan. Selain itu perlu adanya kerja sama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah juga diperlukan kolaborasi antardaerah di WP Subosukawonosraten.

Dalam rangka pencapaian target-target makro pembangunan daerah di WP Subosukawonosraten, maka perlu dilakukan intervensi seperti:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi (revitalisasi terminal) dan integrasi antar moda transportasi;
 - b. Air minum;
 - c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
 - a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up digital* berbasis komunitas;
- e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Subosukawonosraten untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.12.
Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten

5.4.8. Wilayah Pengembangan Bregasmalang

Wilayah Pengembangan Bregasmalang berpusat di kawasan perkotaan Tegal meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi angka kemiskinan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang perlu dilakukan upaya lebih untuk penurunannya. Sementara Kota Tegal untuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan IPM sudah berada diatas rata-rata provinsi. Tingkat pengangguran terbuka di WP Bregasmalang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, sehingga perlu strategi dan upaya untuk menurunkannya. Secara lebih lengkap kondisi empat indikator utama di WP Bregasmalang yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut.

Tabel 5.15.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Bregasmalang Tahun 2023

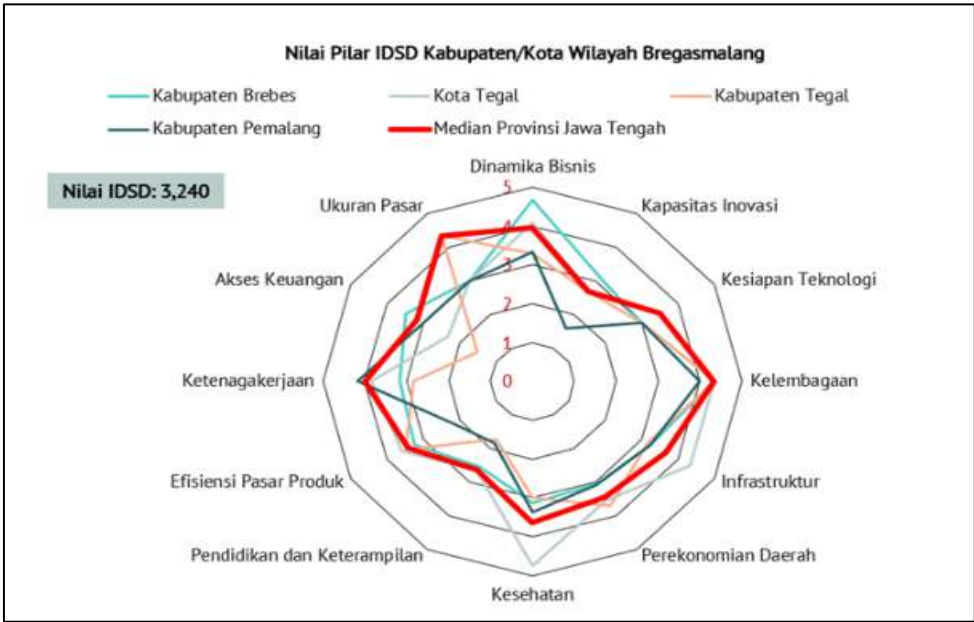
No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%) ^{a)}	TPT (%) ^{**)}	IPM
1	Kab. Brebes	3,74	15,78	8,98	69,71
2	Kab. Tegal	4,93	7,30	8,60	71,12
3	Kab. Pemalang	4,14	15,03	6,55	68,08
4	Kota Tegal	5,01	7,68	6,05	77,06
Rata-Rata WP		4,46	11,44	7.55	70,06
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

WP Bregasmalang berlokasi di utara jawa dengan wilayah perairan pantai yang cukup panjang. Potensi kewilayahan yang dapat dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja pembangunan yaitu industri, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Kawasan strategis di WP Bregasmalang yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Industri Brebes (KSP), Kawasan Agropolitan MANGGAMAS (KSP), Kawasan Perkotaan Bregasmalang (KSP).

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Bregasmalang

Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, WP Bregasmalang memiliki nilai rata-rata 3,240. Terdapat gap sebesar 2,00 antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal pada pilar akses keuangan disebabkan karena persentase jumlah bank dan LKBB yang memberikan pelayanan pinjaman dan persentase pertumbuhan LKBB dan kredit perbankan kepada UMKM. Unsur pendukung IDSD pada Kabupaten Pemalang terdapat 11 pilar, Kabupaten Tegal 9 pilar, Kabupaten Brebes 8 pilar yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 5.13.
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Bregasmalang Tahun 2023

Kondisi daya saing wilayah Bregasmalang masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain masih relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, lemahnya investasi nasional, dan geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Dalam pengembangan potensi industri serta perdagangan dan jasa di WP Bregasmalang, diperlukan program yang mampu mengungkit secara optimal tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan tinggi maupun vokasi, di samping mendorong investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Bregasmalang

Pengembangan wilayah Bregasmalang untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.16.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Bregasmalang Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Brebes	4,70 – 5,25	13.96-14.34	8,59 – 8,14	70,54
2	Kab. Tegal	5,0 – 5,6	6,40-6,70	8,30 – 7,75	71,78
3	Kab. Pemalang	4,14 – 4,90	13.64-14.31	6,19 – 5,89	69,75
4	Kota Tegal	5,03 – 5,10	6.83-7.24	6,03 – 5,84	77,80

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

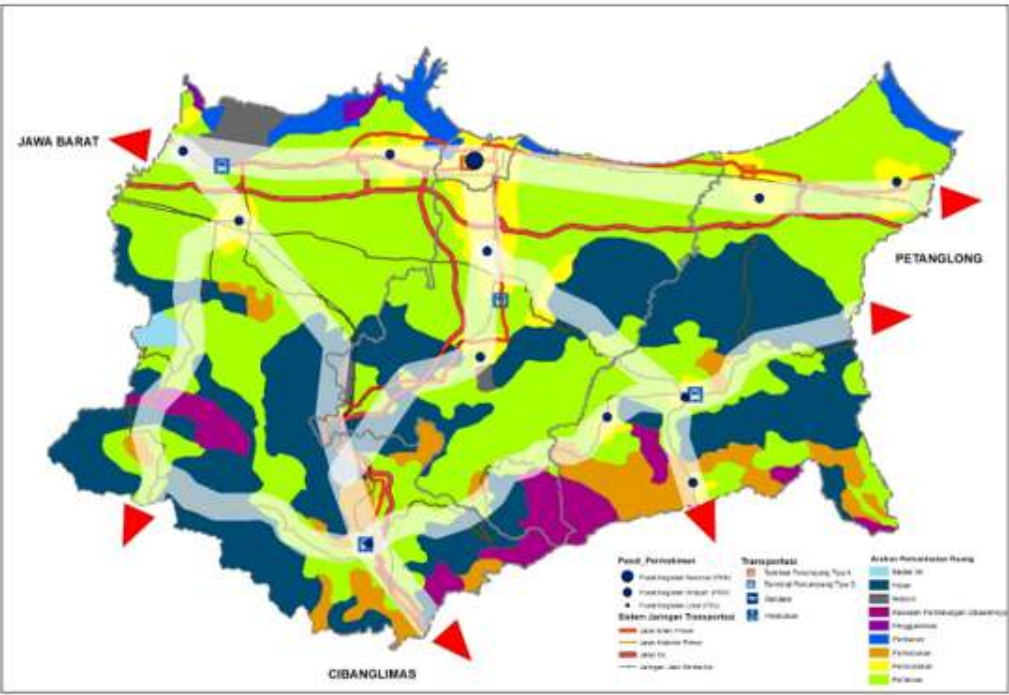
Pengembangan wilayah Bregasmalang diarahkan dengan memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dengan kabupaten disekitarnya sebagai satu kesatuan sistem permukiman yang saling menunjang secara fungsi dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan serta penanganan bencana dan kawasan terdampak rob. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Brebes sebagai salah satu kawasan indutri strategis di bagian barat Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian akan dikembangkan disertai dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selain itu, sebagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat maka akan dilakukan upaya untuk memadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat dan mendorong kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Sebagai upaya untuk mencapai indikator makro tersebut diantaranya melalui:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran serta keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;

- b. Air minum;
 - c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
- a. Meningkatkan Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan start up digital berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Bregasmalang untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 5.14.
Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang

5.4.9. Wilayah Pengembangan Petanglong

WP Petanglong berada di sisi utara Jawa Tengah dengan batas bagian utara adalah Laut Jawa. WP Petanglong memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Wilayah Pengembangan Petanglong berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.17.
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Petanglong Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Pekalongan	5,14	9,67	3,25	71,45
2	Kab. Batang	5,53	8,92	6,06	70,20
3	Kota Pekalongan	5,44	6,81	45,02	76,71
Rata-Rata WP		5,37	8,55	44,78	71,74
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

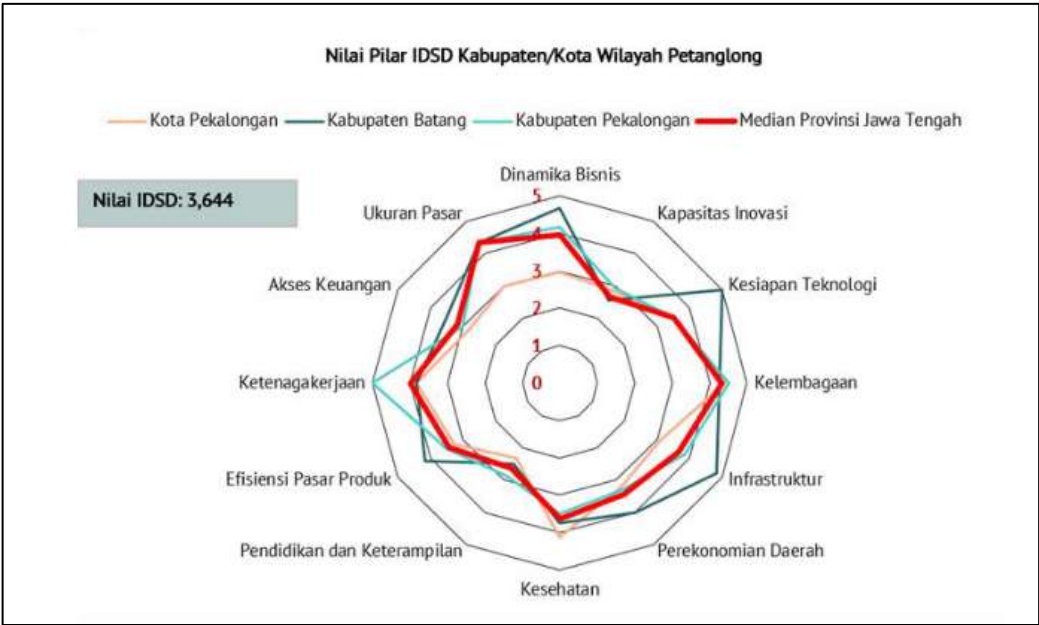
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Di Wilayah Pengembangan Petanglong terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi dan *real estate*. Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan

yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain: Kawasan Industri Terpadu Batang (KSP) dan Kawasan Perkotaan Petanglong (KSP).

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Petanglong

Berdasarkan nilai total PDSO tahun 2023, sistem perwilayahan Petanglong berada di posisi ke-3 dengan nilai rata-rata 3,644. Terdapat gap sebesar 1,75 antara Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan pada pilar infrastruktur karena rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor, rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan, dan persentase RTH. Pada analisis daya saing Kota Pekalongan terdapat 8 pilar yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah diantaranya pilar dinamika bisnis, pilar infrastruktur, pilar perekonomian daerah, pilar pendidikan dan keterampilan, pilar efisiensi pasar dan produk, pilar ketenagakerjaan, pilar akses keuangan, pilar ukuran pasar.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.15.
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Petanglong Tahun 2023

Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan membentuk suatu hubungan kewilayahan yang kompleks, mewakili berbagai aspek ekonomi dan pelayanan umum. Kabupaten Pekalongan, dalam konteks ekonomi, berperan sebagai pemasok bahan baku, pasar, dan asal modal bagi Kota Pekalongan. Di sisi lain, Kabupaten Batang berperan sebagai penyedia tenaga kerja bagi Kabupaten Pekalongan, utamanya di sektor konstruksi. Selain interaksi regional, Kabupaten Batang menjalankan interaksi wilayah yang lebih luas, terutama dengan negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan Eropa. Hubungan ini bersifat ekspor dan mencakup hasil pengolahan teh yang menunjukkan orientasi global dalam kegiatan ekonominya. Hubungan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan utamanya pada sektor industri dan perkebunan. Keterkaitan ini menciptakan dinamika ekonomi yang saling melengkapi, dengan masing-masing wilayah memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

Interaksi pelayanan umum antara Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan terbukti cukup kuat, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan jasa. Kota Pekalongan sebagai pusatnya, menjadi fokus utama dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat

kualitas hidup di kedua kabupaten tersebut. Keseluruhan interaksi ekonomi dan pelayanan umum ini menciptakan kerangka kerjasama yang saling menguntungkan, menggambarkan hubungan yang kompleks dan terintegrasi antarwilayah.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Petanglong

Pengembangan wilayah Petanglong untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.18.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Petanglong Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Pekalongan	5,60 - 5,85	8,00 - 9,15	3,10 – 2,78	72,70
2	Kab. Batang	5,50 - 6,10	8,27 - 8,34	5,80 – 5,27	70,75
3	Kota Pekalongan	5,44 - 6,00	6,23 - 6,70	5,05 – 4,47	77,39

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

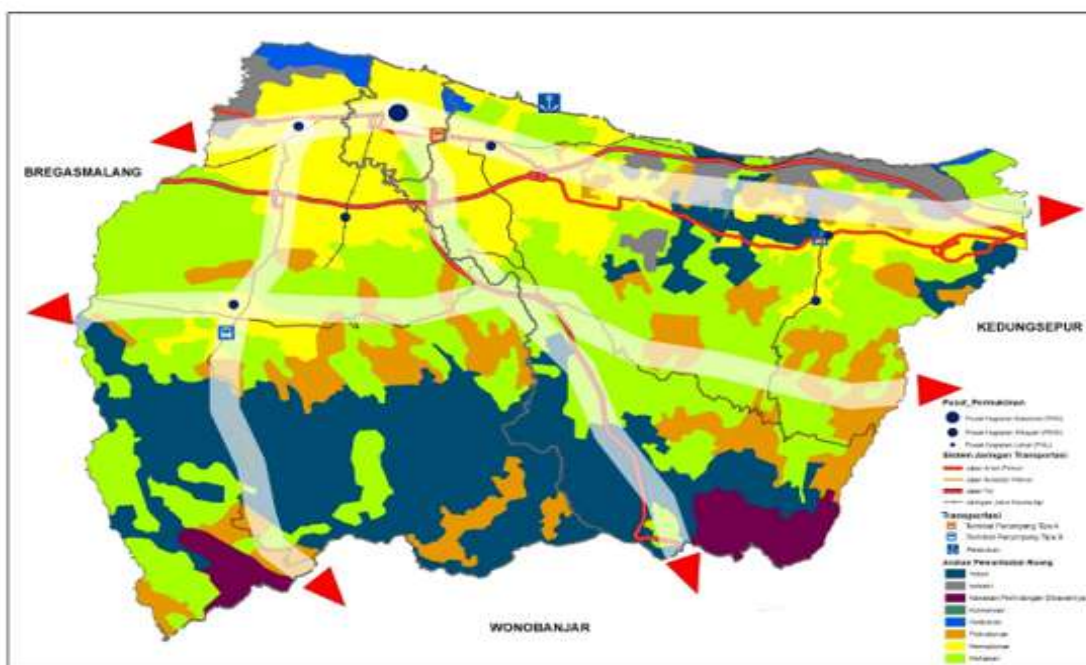
Pengembangan WP Petanglong diarahkan untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten disekitarnya sebagai salah satu aglomerasi perkotaan yang saling menunjang dengan penyediaan sarana prasarana perkotaannya dengan mempertimbangkan upaya mitigasi dan penanganan bencana. Pada kawasan ini juga dikembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah. Sektor pertanian juga didorong sebagai salah satu sektor unggulan disertai dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah serta peningkatan berbagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil pertanian. Pengembangan fasilitas logistik perlu didorong dalam rangka untuk kemudahan pergerakan barang hasil produksi sektor industri maupun sektor pertanian. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan industri kreatif sebagai salah satu ciri khas kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam.

Dalam rangka pencapaian target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Berikut upaya untuk mendorong tercapainya indikator makro di WP Petanglong diantaranya adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan, dan kinerja simpul transportasi;
 - b. Air minum;
 - c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
 - a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri

- dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
- b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing*, *Social Media Specialist*, *Digital Art/Animasi*, *Multimedia*, *Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas; dan
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Petanglong untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.16.
Arah Pengembangan Wilayah Petanglong

5.4.10. Wilayah Pengembangan Cibalingmas

WP Cibalingmas merupakan gabungan dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Wilayah Pengembangan ini merupakan WP baru dimana sebelumnya pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 termasuk dalam WP Barlingmascakeb. Namun, Kabupaten Kebumen bergabung dengan Kabupaten Purworejo menjadi WP Keburejo, dan Kabupaten Banjarnegara tergabung dalam WP Wonobanjar, maka penyebutannya menjadi WP Cibalingmas.

Pada capaian indikator makro tahun 2023, angka kemiskinan pada WP Cibalingmas masih berada di atas nasional dan provinsi sehingga memerlukan upaya khusus untuk menekan angka kemiskinan. Begitu pula dengan IPM di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga yang masih di bawah angka provinsi, sedangkan Kabupaten Banyumas sudah pada capaian sebesar 73,96.

Tabel 5.19.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Cibalingmas Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2023	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Cilacap	5,34	10,99	8,74	72,04
2	Kab. Purbalingga	4,51	14,99	5,61	70,51
3	Kab. Banyumas	5,40	12,53	6,35	73,96
Rata-Rata WP		5,08	12,83	6,90	72,44
Jawa Tengah		4,98	10,77	5,13	73,39
Nasional		5,05	9,36	5,32	74,39

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Cibalingmas

Pada tahun 2023, PDSD WP Cibalingmas masih tergabung dalam WP Barlingmascakeb. Ketimpangan nilai PDSD pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Cibalingmas menonjol sebagai kewilayahan ketimpangan terendah, dengan nilai 0,0039. Jika dilihat dari tingkat interaksi wilayahnya, perwilayahan Barlingmascakeb memiliki kegiatan ekonomi antar wilayahnya saling mendukung satu sama lain, sehingga interaksi yang terjadi lebih seimbang dengan wilayah lainnya. Performa yang dimiliki Kabupaten Purbalingga (3,861) dan Kabupaten Cilacap (3,511) optimal pada ekosistem inovasi dapat dimanfaatkan sebagai *leading actor* dalam inovasi daerah sehingga mendorong pengembangan kolaborasi eksternal melalui interaksi wilayah untuk menciptakan iklim inovasi.

Interaksi ekonomi wilayah di Cibalingmas menunjukkan kecenderungan terpusat pada beberapa lokasi kunci, yaitu Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, serta wilayah sekitar seperti Kabupaten Wonosobo, Pemalang, dan Temanggung. Wilayah ini menjadi pusat interaksi ekonomi yang signifikan dalam konteks perdagangan, jasa, dan industri pengolahan.

Dalam konteks ekonomi wilayah, Kabupaten Purbalingga memainkan peran penting sebagai pemasok bahan baku pada tingkat regional bahkan negara tujuan ekspor. Interaksi ekonomi wilayahnya tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, melainkan melibatkan keterlibatan yang lebih luas hingga ke pasar internasional.

Kabupaten Purbalingga juga menjadi bagian integral dari rantai pasok global dengan peran kunci dalam penyediaan bahan baku dan ekspor produk.

Sementara itu, Kabupaten Cilacap terlibat dalam interaksi ekonomi yang berfokus pada sektor perminyakan. Hubungan ekonomi wilayahnya melibatkan Provinsi Kepulauan Riau, Maluku Tengah, Kota Bitung, Sukabumi, dan Kota Medan. Kerjasama dalam sektor perminyakan menjadi faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Cilacap.

b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Cibalingmas

Pengembangan wilayah Cibalingmas untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.20.

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Cibalingmas Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Cilacap	5,40 – 6,10	10,14	8,84 – 7,82	72,91
2	Kab. Purbalingga	5,00 – 6,00	12,50-13,50	5,40 – 4,90	71,64
3.	Kab. Banyumas	5,50 – 6,45	9,93-11,00	6,82 – 5,56	75,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.,2024

Arah pengembangan WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap – Purwokerto - Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas. WP Cibalingmas merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat maka perlu dilakukan pengembangan kawasan perbatasan secara sinergis dengan pusat pengembangan di kawasan Perkotaan Majenang.

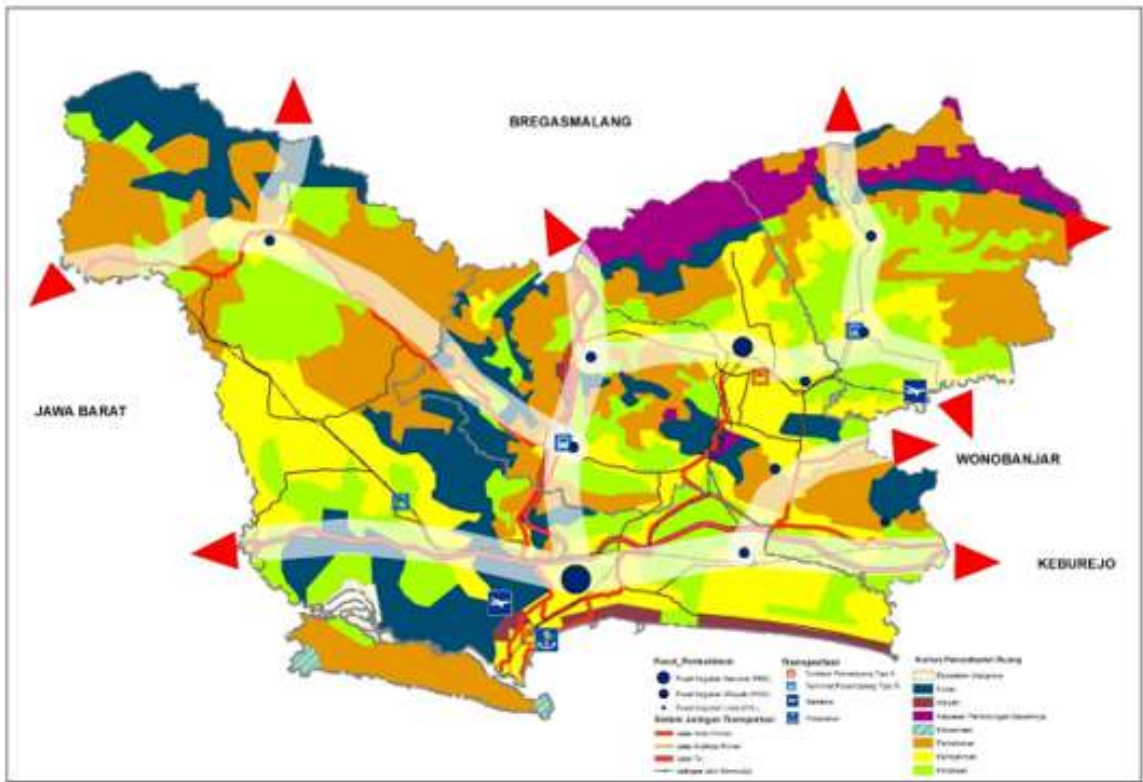
Dalam upaya peningkatkan pergerakan distribusi wilayah, maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan Darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain: industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam sedangkan pengembangan potensi wisata unggulan dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan khususnya kawasan ekosistem mangrove Segara Anakan dan kawasan pariwisata Baturaden.

Berikut upaya untuk mencapai target makro Pembangunan daerah di WP Cibalingmas diantaranya adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang, meliputi:
 - a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi dan integrasi antar moda transportasi;

- b. Air minum;
 - c. Persampahan;
 - d. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
- a. Meningkatkan Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
 - b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
 - c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
- a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
 - b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
 - e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayah dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Petanglong untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5.17.
Arah Pengembangan Wilayah Petanglong

5.5. Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antarprovinsi

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik seringkali terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain, wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai *etalase* gambaran daerah/ wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif dan intensif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI. Yogyakarta. Sinergi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan 5 (lima) konsep pengembangan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumber daya untuk menserasikan pembangunan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/ potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan;
5. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua kebijakan RPD Tahun 2024-2026. Kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 diarahkan pada tema **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”** dengan prioritas daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pada tahun 2025, kerangka pendanaan daerah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Penurunan pendapatan berdampak pada penurunan belanja daerah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,549 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 23,911 triliun rupiah, dan pembiayaan netto sebesar 362,3 miliar rupiah. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Tabel 6.1.

Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		15.519.788.406.000
1	Pajak Daerah	12.650.725.636.000
2	Retribusi Daerah	1.805.361.743.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	707.349.144.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	356.351.883.000
PENDAPATAN TRANSFER		8.006.377.888.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.006.377.888.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		23.476.500.000
JUMLAH PENDAPATAN		23.549.642.794.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		15.389.713.402.000
1	Belanja Pegawai	7.582.145.530.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.560.651.000

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
3	Belanja Subsidi	9.274.000.000
4	Belanja Hibah	2.428.133.221.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		1.253.873.852.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000
BELANJA TRANSFER		7.243.355.540.000
1	Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.046.794.308.000
JUMLAH BELANJA		23.911.942.794.000
SURPLUS/DEFISIT		(362.300.000.000)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		432.300.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000
2	Pencairan dana cadangan	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		70.000.000.000
1	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		362.300.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi perluasan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan berorientasi kebutuhan dan relevansi dunia usaha dunia industri (DUDI); peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara adaptif; percepatan implementasi kurikulum adaptif; perbaikan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi; peningkatan pembinaan potensi siswa; penguatan pengelolaan *boarding* dan semi *boarding* dengan sasaran siswa dari keluarga kurang mampu; penyediaan layanan pendidikan jarak jauh (sekolah virtual dan kelas jarak jauh); dan pembiayaan operasional

sekolah melalui BOSDa dan BOP serta siswa melalui BSM (Beasiswa Siswa Miskin) dan seragam miskin.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan *softskill* melalui internalisasi kurikulum, muatan lokal dan ekstra kurikuler.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan usia produktif, kesehatan lansia, melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP), peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar, pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; peningkatan kesehatan lingkungan melalui pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota, pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi, penyusunan rencana epidemiologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan, penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; pemenuhan fasilitas dan peningkatan layanan primer dan rujukan melalui fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota, peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) serta pemenuhan layanan unggulan KJSU (kanker, jantung, *stroke* dan urologi), pendampingan institusi layanan primer, pelayanan pengujian kalibrasi; pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD; pengelolaan sistem informasi kesehatan melalui implementasi sistem analisis kesehatan berbasis *Big Data* dan *AI* (kecerdasan buatan); distribusi dan pengadaan alat kesehatan, obat bahan habis pakai, vaksin, makan dan minuman di fasilitas kesehatan melalui pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat provinsi; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui fasilitasi proses pembangunan Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Purbalingga-Banjarnegara, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi melalui pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan kajian pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin melalui pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery*, *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun

purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), fasilitasi

dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota, serta fasilitasi perdes tentang pelestarian lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain fasilitasi persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek)

peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng di 7 koridor); pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap V dan peningkatan Terminal Sukoharjo; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diantaranya pada jalan akses menuju kawasan pariwisata dan *Geopark* Dieng, serta perlengkapan jalan lainnya (rambu pendahulu penunjuk jurusan/RPPJ, *warning light*, *guardrail*, marka dan rambu) di ruas jalan provinsi strategis.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antarkabupaten di Desa Yosorejo Kabupaten Batang (Sungai Kalikutho); penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan

koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan (rambu dan marka) perlintasan kereta api di Kabupaten Cilacap serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center*, pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website*, dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake*, serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan monev keterbukaan informasi badan publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*, mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III*, layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, peningkatan penyediaan prasarana sarana olahraga yang memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta pembinaan SDM/lembaga/pranata kebudayaan; dan penyusunan serta evaluasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisional.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan; pendaftaran dan penetapan cagar budaya; serta pengembangan kerjasama multipihak dan lintas sektor.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, peningkatan pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK, peningkatan pemanfaatan arsip oleh masyarakat melalui digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui digitalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

6.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan

kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (*supra*).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi lahan; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdiri dari pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun melalui perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun melalui sistem pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan yang meliputi penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, dan pembangunan sumber benih.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi melalui pengamanan kawasan TAHURA provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi, pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi, kerja sama penyelenggaraan TAHURA provinsi, perencanaan pengelolaan TAHURA; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan daerah provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; penyusunan studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; penyusunan regulasi pengelolaan air tanah di Jawa Tengah; pengembangan Sistem Aplikasi Geologi dan Air Tanah. Program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2025 akan dilaksanakan jelajah *Geopark/ Geoheritage* beserta pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark* serta perkuatan mitra dan kolaboratif ke jaringan *geopark* global. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal

mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui penyusunan regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan minerba melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumihan dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, *biogenic shallow gas* (gas rawa), dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi dan perhitungan Indeks Ketahanan Energi Jawa Tengah, penyusunan kajian potensi EBT untuk mendukung evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED); meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi, pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum

berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis

daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada lampiran Buku III. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 6.2.
Rekapitulasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan Urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		10.195.506.393.000
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.195.506.393.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		3.487.532.030.000
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.484.266.030.000
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	896.000.000
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.250.000.000
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.120.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		409.338.725.000
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	404.763.705.000
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.151.000.000
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	300.394.000
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.123.626.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		280.107.972.000
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.151.387.000
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.919.053.000
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	674.105.000
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	38.166.603.000
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	129.159.390.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.335.641.000
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.701.793.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		29.735.000.000
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.290.000.000
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.765.000.000
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	480.000.000
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		6.038.000.000
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.090.000.000
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.850.000.000
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	98.000.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		158.281.087.000
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.721.000.000
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	72.868.427.000
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.447.160.000
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.584.500.000
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	460.000.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		11.639.281.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	246.740.000
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.664.754.000
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.319.000.000
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.908.787.000
2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.500.000.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.701.060.000
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000.000.000
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	977.550.000
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	135.000.000
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	185.000.000
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	253.510.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		20.853.888.000
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.623.888.000
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.930.000.000
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.300.000.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.475.000.000
2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	380.000.000
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	570.000.000
2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	525.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		6.040.501.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	434.000.000
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.353.388.000
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	745.000.000
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564.000.000
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.305.113.000
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	389.000.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		624.000.000
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.000.000
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	210.000.000
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	194.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		4.868.170.000
2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	20.850.000
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	602.000.000
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.540.320.000
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.705.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		965.000.000
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	195.000.000
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	450.000.000
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	320.000.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		132.525.554.000
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	130.646.680.000
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	779.100.000
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.099.774.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		44.567.195.000
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.459.750.000
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	20.107.445.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		9.913.542.000
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.499.384.000
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	734.908.000
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.606.604.000
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.494.064.000
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.578.582.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.939.212.000
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	560.640.000
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.612.500.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.654.602.000
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	561.470.000
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	550.000.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		400.011.000.000
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.225.000.000
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	388.786.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		1.210.829.000
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.210.829.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		3.000.000.000
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.000.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		36.306.000.000
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.580.000.000
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.696.000.000
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	955.000.000
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.325.000.000
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.750.000.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		1.640.000.000
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.400.000.000
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	240.000.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		771.598.000
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	701.598.000
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	70.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN		30.967.567.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.106.110.000
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.581.928.000
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.581.048.000
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.756.361.000
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.942.120.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		15.785.000.000
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.200.000.000
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.660.000.000
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	550.000.000
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.375.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		126.730.189.000
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	66.224.053.000
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.160.000.000
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	38.283.154.000
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	745.000.000
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	14.317.982.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		8.012.689.000
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.854.089.000
3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	824.768.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.005.832.000
3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	328.000.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		10.204.421.000
3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.178.750.000
3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.503.054.000
3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.381.039.000
3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.141.578.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		40.338.845.000
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	633.633.000
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	238.250.000
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.895.000.000
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.334.967.000
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.786.815.000
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.450.180.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		10.525.859.000
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.029.492.000
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	245.681.000
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	250.686.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		261.000.000
3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	261.000.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		419.633.425.000
4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.780.528.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.478.000.000
4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	402.293.148.000
4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.918.000.000
4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	4.775.260.000
4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.348.489.000
4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.040.000.000
4.02	SEKRETARIAT DPRD		380.153.260.000
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	380.153.260.000
5.01	PERENCANAAN		12.980.000.000
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.900.000.000
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.080.000.000
5.02	KEUANGAN		7.328.971.600.000
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.285.455.540.000
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.365.000.000
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	38.151.060.000
5.03	KEPEGAWAIAN		10.157.000.000
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.157.000.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		15.836.640.000
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.836.640.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		4.675.000.000
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.675.000.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		3.992.880.000
5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.992.880.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		8.903.799.000
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.830.072.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		233.222.583.000
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.865.113.000
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.923.529.000
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	127.445.543.000
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.844.451.000
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	48.118.947.000
TOTAL			23.911.942.794.000

Tabel 6.3.
Rekapitulasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		8.813.491.843.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.484.266.030.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	896.000.000
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.250.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.120.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.580.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.696.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	955.000.000
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.325.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.750.000.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.289.653.813.000
Dinas Kesehatan		3.122.982.828.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	404.763.705.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.151.000.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	300.394.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.123.626.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.713.644.103.000
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		185.598.594.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85.151.387.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.701.793.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.745.414.000
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya		297.519.957.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.919.053.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	674.105.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	38.166.603.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	129.159.390.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.335.641.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	107.265.165.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		52.534.033.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	25.290.000.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.765.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	480.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	380.000.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	570.000.000
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	525.000.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.324.033.000
Satuan Polisi Pamong Praja		20.726.991.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.090.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	98.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.538.991.000
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		18.223.940.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.850.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.373.940.000
Dinas Sosial		305.418.176.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.721.000.000
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	72.868.427.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.447.160.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.584.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	460.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	147.137.089.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		99.455.101.000
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	246.740.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.664.754.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.319.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.908.787.000
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.500.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	261.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.554.820.000
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		20.162.302.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	977.550.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	135.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	185.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	253.510.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	195.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	450.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	320.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.496.242.000
Dinas Ketahanan Pangan		42.108.917.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	14.623.888.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.930.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.300.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.255.029.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		157.218.385.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	434.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.353.388.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	745.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.305.113.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	389.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.854.089.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	824.768.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.005.832.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	328.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	143.165.195.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.355.375.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.000.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	210.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	194.000.000
	PROGRAM PENATAAN DESA	20.850.000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	602.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.540.320.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.705.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.863.205.000
Dinas Perhubungan		200.748.075.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	130.646.680.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	779.100.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.099.774.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.222.521.000
Dinas Komunikasi dan Informatika		78.415.153.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.459.750.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	20.107.445.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.210.829.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.000.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.637.129.000
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		35.821.452.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.499.384.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	734.908.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.606.604.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.494.064.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.578.582.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.907.910.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		25.125.018.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	560.640.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.612.500.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.654.602.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	561.470.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	550.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.185.806.000
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		465.772.367.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.225.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	388.786.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.200.000.000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.660.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	550.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.375.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.976.367.000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		35.800.957.000
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.400.000.000
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	240.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	701.598.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	70.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.389.359.000
Dinas Kelautan dan Perikanan		86.630.448.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.106.110.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.581.928.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.581.048.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.756.361.000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.942.120.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.662.881.000
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		143.277.041.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	37.133.500.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.200.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	38.283.154.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	12.107.700.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.552.687.000
Dinas Pertanian dan Perkebunan		149.815.487.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	29.090.553.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.960.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	745.000.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.210.282.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.809.652.000
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		63.838.104.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.178.750.000
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.503.054.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.381.039.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.141.578.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.633.683.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		100.389.322.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	633.633.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	238.250.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	32.895.000.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.334.967.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.786.815.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.450.180.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.029.492.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	245.681.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	250.686.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.524.618.000
Sekretariat Daerah		645.806.071.000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.780.528.000
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.478.000.000
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	402.293.148.000
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.918.000.000
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	4.775.260.000
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.348.489.000
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.040.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.172.646.000
Sekretariat DPRD		599.025.008.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	380.153.260.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	218.871.748.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		48.421.011.000
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.900.000.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.080.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.441.011.000
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		7.338.445.947.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.285.455.540.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.365.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.625.407.000
Badan Pengelola Pendapatan Daerah		295.488.152.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	38.151.060.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.337.092.000
Badan Kepegawaian Daerah		42.970.136.000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.157.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.813.136.000
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		59.710.905.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.836.640.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.874.265.000
Badan Riset dan Inovasi Daerah		20.455.100.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.675.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.780.100.000
Badan Penghubung		24.261.771.000
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.992.880.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.268.891.000
Inspektorat		39.637.631.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.830.072.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.733.832.000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		251.291.196.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.865.113.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.923.529.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	127.445.543.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.844.451.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	48.143.947.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.068.613.000
	TOTAL	23.911.942.794.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target Capaian 2024	Target Capaian 2025	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,20	45,82	49,30 - 49,73	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	10,77	9,76-8,96	9,66 – 9,00	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,369	0,364	0,362-0,367	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,98	4,70 - 5,50	4,90 - 5,60	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	2,89	2,5 ± 1	1,5 - 3,5	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,00 – 4,30	4,81-4,42	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	117,11	107,45	107,52	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,39	73,43	73,99	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,89	61,13	62,24-62,31	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,83	93,03	93,13	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	63,07	58,20	64,07	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,59	67,55	75,68	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	-	4,00	4,00	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,13	81,50	83,50	Sekretariat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,20	45,82	49,30 - 49,73
2	Angka Kemiskinan	%	10,77	9,76-8,96	9,66 – 9,00
3	Rasio Gini	Angka	0,369	0,364	0,362 – 0,367
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,98	4,70 - 5,50	4,90 - 5,60
5	Inflasi	%	2,89	2,5 ± 1	1,5 – 3,5
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,00 – 4,30	4,81-4,42
7	Nilai Tukar Petani	Angka	117,11	107,45	107,52
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,39	73,43	73,99
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,89	61,13	62,24-62.31
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,83	93,03	93,13
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	63,07	58,20	64,07
B	Aspek Pelayanan Umum				
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
	Pendidikan				
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,85	12,94	13,07
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,01	8,08	8,14
	Kesehatan				
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,69	74,74	74,65
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	-	2,00	2,00
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	-	60,00	74,28
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan <i>stunting</i>	%	-	80,00	85,00
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	-	78,00	82,00
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00	100,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	%	-	49,89	51,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar				
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	88,97	87,00	88,97
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	94,15	90,00	90,50
10	Persentase capaian SPM di RSUD dr. Adhyatma MPH	%	91,11	91,11	91,11
11	Persentase capaian SPM di RSUD dr. Rehatta	%	88,49	88,00	89,00
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,75	98,00	98,75
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,08	98,17	98,20
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	97,9	98,00	100,00
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	0	0	100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	-	91,29	89,46
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	45,03	44,48	46,55
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	-	83,38	83,38
4	Persentase akses air minum aman	%	-	40,43	42,93
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	-	10,97	12,50
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	-	49,42	61,65
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	-	61,78	62,08
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	-	61,57	64,07
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	-	14,29	41,57
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	-	0,04	20,22
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	-	55,21	39,78
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	-	82,00	85,00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	-	0,74	0,75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Sosial				
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	-	2,46	3,1
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
	Tenaga Kerja				
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	-	28,60	28,64
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	65,71	62,85	68,57
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	-	56,00	56,50
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	8,26	9,24	10,15
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	64,24	71,04	71,06
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	92,04	91,07	91,58
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81,58	81,53	80,96
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	-	40,00	35,00
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	-	4,25	4,20
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	-	66,00	67,00
	Pangan				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,8	83,00	83,05
	Pertanahan				
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	-	100,00	100,00
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian	%	216,06	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Air	Angka	51,14	50,66	68,71
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	100	85,01	84,91
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,39	3,37	3,35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,2	0,37	0,3696
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	-	4,00	4,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	-	0,7318	0,7618
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,04	2,13	2,12
	Perhubungan				
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	5.997	6,05	6,274
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,373	0,38	0,411
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16,698	16,098	15,333
4	<i>On time performance</i> layanan transportasi	%	84,19	83,22	85,05
	Komunikasi dan Informatika				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,98	4,27	4,50
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	-	12,53	12,99
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	-	0,29	0,38
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	-	7,16	7,39
	Penanaman Modal				
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	0,22	4,00	4,25
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	117,23	100,00	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94,14	90,00	91,00
	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,37	0,42	0,45
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,5	56,85	58,25
	Statistik				
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	-	32,00	64,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Persandian				
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	-	636,00	638,00
	Kebudayaan				
1	Angka Melek Budaya	%	-	52,32	53,82
	Perpustakaan				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	13,67	14,08	15,62
	Kearsipan				
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	93,99	94,00	95,00
	Urusan Pilihan				
	Kelautan dan Perikanan				
1	Produksi perikanan	Ton	855.734,92	927.350	952.718
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	-	105,00	105,50
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	-	110,00	110,50
	Pariwisata				
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	11,24	8,01	8,26
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	-	1.686.000.000.000	1.737.000.000.000
	Pertanian				
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	-	3,00	3,10
2	Nilai Tukar Petani Pternakan	Angka	-	100,50	100,80
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	-	0,58	0,16
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	122,97	105,19	105,57
5	NTP Hortikultura	Angka	120,62	108,11	108,49
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	110,04	100,59	100,97
	Kehutanan				
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	46,22	42,45	59,46
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457
	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15,98	18,41	21,32
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	-	768,10	807
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,76	3,60	3,63
4	Persentase penerapan <i>Good Mining Practice</i>	%	-	53,00	57,00
	Perdagangan				
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-	4,51	4,83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Perindustrian				
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	-	3,25	3,9
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
	Sekretariat Daerah				
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	-	36,10	37,10
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	-	80,00	80,00
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	-	90,00	90,00
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	-	90,00	90,00
	Sekretariat DPRD				
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	-	90,00	91,00
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	-	75,00	76,00
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	-	75,00	76,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Perencanaan				
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	-	100,00	100,00
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	-	100,00	100,00
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	-	100,00	100,00
	Kuangan				
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-	13,09	-6,19
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-	-7,67	3,19
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	-	97,75	97,91

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	-	84,02	89,86
	Kepegawaian				
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,83	0,86	0,87
	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	-	3,07	3,08
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	-	8,67	17,34
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	71,32	100,00	100,00
	Penelitian dan Pengembangan				
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	71,32	72,50	73,00
	Pengelolaan Penghubung				
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	-	85,00	85,00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan				
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	-	3,00	3,00
2	Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	-	3,00	3,00
	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	-	2,745	2,905
C	Aspek Daya Saing				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,59	67,55	75,68
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	-	4,00	4,00
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,13	81,50	83,50

*) Keterangan:
Tanda strip ‘-‘ menandakan indikator baru pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sehingga Tahun 2023 data belum tersedia.

7.3. Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Rakortek Tahun 2024 dan RKP Tahun 2025

Berdasarkan hasil koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Forum Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan telah disepakati besaran target sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025. Kesepakatan tersebut merupakan wujud sinergi dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 7.3.
Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Berdasarkan Hasil Rakortek Pembangunan Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Sasaran Awal RKPD Tahun 2025
1	2	3
1	PDRB per kapita	49,30 - 49,73 Juta Rupiah
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	33,88-34,06 %
3	Tingkat Kemiskinan	9,66 – 9,00%
4	Rasio Gini	0,362-0,367
5	Kontribusi PDRB Provinsi	8,25%
6	Indeks Modal Manusia	0,58
7	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI)	65,3
8	Penurunan intensitas emisi GRK	0,32
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	39,97 %
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,90-5,60 %
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	20 %
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,81 – 4,42%
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,80 %
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	3,50%
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	0
16	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	1 %
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6
18	Ekspor Barang dan Jasa	10,97 %
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,38
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,19%
21	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	79,1
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,18
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,39 4,50
24	Indeks Integritas Nasional	79,68 - 80
25	Indeks Demokrasi Indonesia	85,81 – 89,07
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,38
27	Tingkat Inflasi	1,5-3,5 %
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	73,81 – 73,82
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34
30	Konsumsi Listrik per Kapita	807
31	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	9,72

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024

Selanjutnya indikator sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025, dan selaras dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 tertuang dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7.4.
Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Yang Selaras Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69 – 85,23	Indeks Demokrasi Indonesia	85,81 – 89,07
2	Asia Power Index (<i>Millitary Capability</i>)	20	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Cukup Tangguh
3	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	61,54	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	67,5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	74,56
5	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%)	9,37
6	Indeks Ketahanan Energi	6,77	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	92,20
			Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	806,76
7	Kapasitas tampungan air (m³/kapita)	65,18	Kapasitas Air Baku (m³/detik)	5,20
			Persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi (%)	64,31
8	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,46
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,50
10	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00
11	Indeks Ekonomi Hijau	70,80	Indeks Ekonomi Hijau	62,23
12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20,00	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	21,32
13	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	17,00
14	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,482
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,68
16	Persentase Penurunan Emisi GRK		Persentase Penurunan Emisi GRK	

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
	- Tahunan (%)	32,65	Tahunan (%)	5,65
	- Kumulatif (%)	28,12	Kumulatif (%)	12,35
17	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah nonpertanian pada level provinsi (%)	10,39
18	Rasio kewirausahaan (%)	3,14	Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,21
19	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,00
20	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,50
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)	66,81
21	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10		
22	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	12,61
23	Aset Perbankan /PDB (%)	59,50	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	25,29
24	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,10	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43
25	Aset Asuransi/PDB (%)	8,78		
26	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	56,7	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	3.700.540,29
27	Total Kredit/PDB (%)	36,1	Total Kredit/PDB (%)	23,20
28	Inklusi Keuangan (%)	90,6	Inklusi Keuangan (%)	92,07
29	Hasil Pembelajaran			
	a. Rata-rata nilai PISA		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i. Membaca	396	- Literasi Membaca (%)	78,31 – 78,49
	ii. Matematika	404	- Numerasi (%)	37,28 – 37,46

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
	iii. Sains	416	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
			- Literasi Membaca (%)	66,28 – 66,46
			- Numerasi (%)	49,76 – 49,95
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,46	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,73 – 8,74
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,37	Harapan lama sekolah (tahun)	13,07
30	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,18
31	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,89
32	Tingkat Penguatan Iptek:			
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB)	0,30	Kapabilitas Inovasi	4,80
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global	60		
33	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,81 – 4,42
34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,80
35	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,65
36	Kesehatan Ibu dan Anak			
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	111
	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,00
37	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	92,00
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,00

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96,36
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	73,81 – 73,82
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34
41	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,9 - 20,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,88 – 34,06
42	Pembentukan Modal Total Bruto (%PDB)	30,1 - 30,2	Pembentukan Modal Total Bruto (% PDRB)	30,19
43	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	21,0 – 21,6	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	10,97
44	Biaya Logistik (%PDB)	13,50		
45	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15		
46	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	39,97
47	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	20,00
48	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,41
49	Persentase desa mandiri (%)	4	Persentase desa mandiri (%)	9,10
50	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	72,80
51	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN (%)	3,45	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN (%)	1,44
52	Indeks Integritas Nasional	74,52	Indeks Integritas Nasional	80,97
53	Indeks Materi Hukum	0,51	Indeks Reformasi Hukum	79,10
54	Indeks Pelayanan Publik	3,68	Indeks Pelayanan Publik	4,28
55	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,28
56	Indeks Persepsi Korupsi	38		
57	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65,00
58	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70 – 11,20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,38
59	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	Tingkat Inflasi (%)	1,50 – 3,50

	Nasional (RKP Tahun 2025)		Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025)	
No	Sasaran Pembangunan	Target Nasional Dalam RKP 2025	Sasaran Pembangunan Daerah	Target RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
60	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,24 – 62,31
61	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,65 – 79,20
62	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137		

Sumber: RKP Tahun 2025; Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045; Hasil Rakortekbang Tahun 2024

7.4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	%	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%	Seluruh Perangkat Daerah
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	82	%	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	83	%	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	49,91	%	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	40	%	RSUD dr. REHATTA
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43	%	RSJD Dr. Amino Gondohutomo

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	33	%	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	45,6	%	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	75	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	36,86	Angka	
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,8	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	56	%	
	Persentase angka putus sekolah SMA	2,28	%	
	Persentase angka putus sekolah SMK	0,024	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	65	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,6	Angka	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	58,82	%	
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	53,49	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	13,16	%	
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	15	Angka	
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase angka putus sekolah SLB	3,2	%	
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	84,1	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	20	%	
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	20	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,7	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,95	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,9	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,84	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	40,41	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,89	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,9	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	76,06	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,85	%	
	Persentase capaian prestasi peserta	1,5	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV			
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	71,25	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,93	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,9	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	94,23	%	
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	80,17	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	93	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	93	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,75	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,6	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,84	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,25	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,3	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,13	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,24	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79,2	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	54,6	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	78,06	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	32,14	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	85,17	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	88,14	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,84	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	48,73	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	2,08	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	83	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81,4	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,26	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,53	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79,5	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,56	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,72	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,77	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	82,27	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,84	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,99	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	89,33	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,53	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	86,35	Angka	
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,71	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,77	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,8	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,56	Angka	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	78,2	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	16	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	94,29	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan	3	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I			
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	15	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	25	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	50	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	35	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA,	4,76	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	SMK dan SLB CABDIN XI			
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	40	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	57,14	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	74,28	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	74,3	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	74,3	%	
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	68,5	%	
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	85	%	
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	71,42	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	100	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	85,71	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang	57,14	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	melaksanakan skrining kesehatan remaja			
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	71,42	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	42,86	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	42,86	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	85	%	
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	100	%	
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	masyarakat RSUD Kelet Donorejo			
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85	%	
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	35	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	70	%	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Dinas Kesehatan
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	80	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	85,71	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	%	
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86	%	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	
	Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	62,5	%	
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	64,31	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi	69,11	Angka	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,41	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	62,68	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	34,78	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah	53,26	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	BPSDA Pemali Comal			
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,54	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	63,64	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,08	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	62,85	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,36	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,35	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	60	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,23	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	76,5	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air minum layak	93,94	%	
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82	%	
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air limbah domestik layak	95,18	%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	%	
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	12,23	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase panjang jalan yang dileger	77,26	%	
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	%	
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,91	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	45,07	%	
	Persentase panjang jalan provinsi	91,57	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal			
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	77,37	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	89,44	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	86,19	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	90,1	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	87,57	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	91,47	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,47	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	90,2	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	71,44	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	90,92	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	92,66	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	86,43	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi	87,66	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	kondisi baik di BPJ Wilayah Pati			
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	87,39	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	67,34	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	89,45	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	91,47	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	18,07	%	
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	73,04	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	66,67	%	
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,42	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	76	%	
	Persentase tertib ruang	48	%	
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	68,21	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	0,73	%	
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	6,64	%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	13,9	%	
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	bidang perumahan dan kawasan permukiman			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	60	%	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	56,07	%	
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	65,69	%	
	Persentase penegakan produk hukum daerah	86,67	%	
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	64,54	%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12	%	
	Persentase penanganan darurat bencana	100	%	
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	2	%	
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	2,86	%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,41	%	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Dinas Sosial
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan	3,84	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	pelayanan di dalam panti			
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	0,14	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,15	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,16	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,21	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan	0,17	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Sosial Pangrukti Mulyo			
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,15	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,17	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,22	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,16	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	0,13	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam	0,24	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Panti Pelayanan Sosial Dewanata			
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,25	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,22	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	0,13	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,21	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam	0,12	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Panti Pelayanan Sosial Penganthi			
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,22	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,1	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	2,26	%	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,04	%	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Dinas Sosial
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Dinas Sosial
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	68,57	%	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	30,59	%	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,6	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,35	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis	3,2	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	kompetensi di bidang industri			
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,5	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,22	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,9801	%	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	71,05	%	
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,3	%	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,2	%	
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,77	%	
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	45,54	%	
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69	%	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,59	%	
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	65	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	22	%	
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
				Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30	%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,86	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,8	per 100.000 penduduk	
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan
	Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	Angka	
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,38	Angka	
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	55	%	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,7	kg/kapita/tahun	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,7	kg/kapita/tahun	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01	%	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	92	%	
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	80	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100	%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Dinas Perumahan Rakyat dan

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
				Kawasan Permukiman
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	%	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	%	
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	2,85	%	
	Persentase pengujian kualitas air	100	%	
	Persentase pemantauan kualitas udara	100	%	
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	0,4	%	
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,6	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase limbah B3 yang terkelola	80	%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100	%	
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	%	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	10,5	%	
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	33	%	
	Persentase lembaga/keompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25	%	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pengaduan yang ditangani	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sampah yang tertangani	43	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	98	%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	99	%	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	66,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENATAAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	59,32	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100	%	
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	100	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	13,24	%	
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100	%	
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
				Keluarga Berencana
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57	%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	65,99	%	
	Unmetneed	9,9	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Perhubungan
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,39	Angka	
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,985	Angka	
	Rasio trayek angkutan jalan	0,56	Angka	
	Persentase penumpang pada masa angkutan	67,34	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	lebaran, nataru menggunakan angkutan umum			
	Rasio pemanfaatan terminal	0,229	Angka	
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,52	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,25	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,02	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,94	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,21	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,24	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,94	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,84	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,18	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana	0,84	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,22	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,95	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,84	Angka	
	Rasio konektivitas perkotaan	0,483	Angka	
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	53	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,378	Angka	
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,4	Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				Dinas Perhubungan
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,08	Angka	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	81	Angka	
	Nilai keterbukaan informasi publik	33	Angka	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	74	%	
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	47	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi berkualitas	26,74	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	11,5	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi provinsi produktif	48,53	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase usaha mikro mandiri	82,3	%	
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	25	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase UMKM siap bermitra	23,08	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50	%	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
				Terpadu Satu Pintu
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	67	%	
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50	%	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	91	%	
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	%	
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	22	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah wirausaha muda mandiri	10	Orang	
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	75	Orang	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase peningkatan perolehan medali	31,25	%	
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	105	Orang	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	48	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	50	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	20,78	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	26,16	%	
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	52,38	%	
	Persentase cakupan pelestarian seni	100	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi seni tradisi	11,1	%	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase akses literasi sejarah	53,1	%	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	13,15	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	26,73	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,9	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	88,89	%	
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	61,54	%	
	Nilai survey kepuasan masyarakat	80	Nilai	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	92,25	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten /kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	30,26	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100	%	
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	79	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	20	%	
	Persentase arsip yang diselamatkan	65,92	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi garam	2	%	
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	4	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2,93	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	7,8	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi perikanan tangkap	5	%	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,54	Angka	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	50	%	
	Persentase ketercapaian	72	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari			
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	72,72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	70	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	71,72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	72,27	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	%	
	Produksi perikanan budidaya	609.000	Ton	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,55	Angka	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di	2	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61	%	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan ikan	160.800	Ton	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	26,67	%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan	54.069.703	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	8	Kabupaten /Kota	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki	33,87	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	sertifikasi kompetensi			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,5	%	
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	93	%	
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,5	%	
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100	%	
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3	%	
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7420274	m	
	Produksi kedelai	52762	Ton	
	Produksi jagung	3583730	Ton	
	Produksi padi	9613469	Ton	
	Produksi bawang merah	527875	Ton	
	Produksi cabai	346115	Ton	
	Produksi durian	153410	Ton	
	Produksi jahe	35908	Ton	
	Produksi melati	25120	Ton	
	Produksi kopi	26005	Ton	
	Produksi tebu	2562216	Ton	
	Produksi kelapa	167187	Ton	
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	2	%	
	Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	1,5	%	
	Persentase peningkatan nilai	1,5	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	tambah produk tanaman pangan			
	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	1,5	%	
	Persentase layanan sertifikasi benih	100	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85	%	
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3	%	
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	12	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang	12	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	terfasilitasi peningkatan skala usaha			
	Jumlah populasi ternak potong	3.745.066	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak perah	113.440	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak petelur	247.848	(ST)/(AU)	
	Persentase fasilitasi obat hewan	1	%	
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4	Dokumen	
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	1	%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7.420.274	m	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	12	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan	12	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur			
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	12	%	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4	Dokumen	
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	7	%	
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	3,5	%	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4	Dokumen	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4	Dokumen	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	10	%	
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15	%	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,08	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,62	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,29	%	
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,5	%	
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	45,99	%	
	Persentase lahan kritis tertangani	0,22	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,01	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,01	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,01	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,02	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,02	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,03	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,03	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,02	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	0	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,01	%	
	Persentase peningkatan produksi bibit	-90	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,02	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,03	%	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	60	%	
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	71	Angka	
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok	0,3	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	masyarakat di wilayah CDK 1			
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,3	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,6	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,7	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,5	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,3	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,2	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,5	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,7	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,8	%	
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	3	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,9	%	
	Persentase pengambilan air	1,7	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	tanah Wilayah Serayu Tengah			
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	45	%	
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan	45	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Wilayah Semarang Demak			
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	45	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	45	%	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	91370,61	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	30,58	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	18,35	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	39241,43	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	61,17	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	61,17	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	45,88	SBM	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	61,17	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	61,17	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	39259,78	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	30,58	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	61,17	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	30,58	SBM	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	65,04	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	49,77	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan	51,27	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	(K2) Wilayah Kendeng Muria			
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	50,08	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,42	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	50,05	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	50,05	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,74	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,64	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,66	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	52,13	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,72	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,12	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10	%	
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8,6	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	10	%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	15	%	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	9	%	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	91	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	10	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	4,05	%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1,05	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	0,1	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	10	%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	15	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,5	%	
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,5	%	
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	6,67	%	
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri	85	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	produk tekstil dan alas kaki			
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,39	%	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	9	%	
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	5	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	10	%	
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	6,95	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,71	%	
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,71	%	
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang skor	70	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	kematangan organisasinya dalam kategori tinggi			
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	88,57	%	
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	90	%	
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	36,59	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	48,57	%	
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	69,05	%	
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	92	%	
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	91,01	%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				Sekretariat Daerah
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	%	
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95	%	
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	%	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	83	%	
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	84	%	
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	60	%	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	97	%	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	97	%	
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	%	
PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan	79	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan			
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	86	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	82	%	
	Persentase nilai kemandirian BLUD	56	%	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	91	%	
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	82	%	
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	82	%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,8	%	
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,5	%	
	Persentase realisasi bantuan keuangan	85	%	
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	86	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100	%	
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Sekretariat DPRD

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase layanan bagian humas	95	%	
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95	%	
PERENCANAAN				
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100	%	
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100	%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	%	
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100	%	
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	pengembangan wilayah			
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	%	
KEUANGAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	%	
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	%	
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	%	
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	%	
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	89,86	%	
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	100	%	
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100	%	
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	73	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	3,19	%	
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	-17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	4,34	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	13,17	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	14,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	-29,99	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	-12,96	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	-0,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	18,67	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	13,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	-19,28	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	-21,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	19,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	17,95	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	13,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	-26,14	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	-13,7	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	-11,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	21,18	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	13,33	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	-31,07	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	-6,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	2,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	12,37	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset	12,67	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	daerah UPPD Kota Salatiga			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	-8,84	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	-6,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	32,23	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	11,16	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	13,45	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	-15,64	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	-12,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	5,28	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset	14,09	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	daerah UPPD Kabupaten Demak			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	13,67	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-15,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-9,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	-11,08	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	15,03	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	13,66	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	-32,48	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	-10,64	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	0,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	13,93	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	13,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	-15,94	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	-16,34	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	-1,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	7,6	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	13,67	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	-19,81	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	-22,66	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	-4,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	6,99	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	13,54	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-17,6	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-14,9	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-16,09	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	10,38	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset	13,62	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-22,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-7,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KABUPATEN Wonogiri	-21,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	15,75	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	13,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-10,91	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-22,6	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	-0,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi	23,37	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	13,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-16,92	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-13,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	14,18	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	6,13	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	13,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	-19,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	-15,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	-6,74	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati			
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	20,59	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	13,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	-22,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	-13,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	14,7	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	21,32	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	13,64	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	-23,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor	-9,37	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	(BBNKB) UPPD kabupaten Rembang			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	7,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	27,65	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	14,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	-22,3	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	-17,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	-11,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	12,52	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	13,63	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	-15,04	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	-18,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	-4,88	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-35,43	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	13,32	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	-50,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	-21,25	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	18,98	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	13,51	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-4,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-14,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	-14,86	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	17,76	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	12,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	-3,73	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	-19,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	4,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset	9,37	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	daerah UPPD Kabupaten Batang			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	15,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-10,34	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-8,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	7,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	9,48	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	13,37	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-50,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	3,51	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	78,96	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,19	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	13,68	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	2,02	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	12,3	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	13,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	11,08	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	2,01	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	9,72	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	13,3	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	12,68	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	13,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-15,84	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-11,67	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	-10,17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	9,36	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	13,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor	-17,17	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	(PKB) UPPD Kabupaten Cilacap			
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-10,5	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	2,39	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	31,53	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	13,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-21,96	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-17,71	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	4,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	22,05	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	13,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-0,46	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-14,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	4,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	6,97	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	13,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-67,77	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	-24,5	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	-4,53	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang			
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	21,75	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	13,43	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	-5,76	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	-11,38	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	19,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	11,24	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	13,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-13,87	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-7,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	-6	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	20,73	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	13,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-27,79	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-7,4	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	-2,81	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	32,02	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	13,71	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-9,56	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-13,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	11,47	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	19,39	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	13,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-15	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-24,1	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	-3,04	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	5,55	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	13,46	%	
KEPEGAWAIAN				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100	%	
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	%	
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100	%	
	Persentase layanan sistem informasi	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	kepegawaian yang dikembangkan			
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	100	%	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100	%	
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100	%	
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,5	Angka	
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100	%	
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100	%	
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100	%	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				Badan Penghubung
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100	%	
INSPEKTORAT DAERAH				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	84	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	86	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	86	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	86	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	86	%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Inspektorat
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	12,24	%	
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	12,24	%	

URUSAN	PROGRAM	TARGET	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ideologi Pancasila	3,1	Nilai	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	76	Nilai	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kinerja ormas	77,87	Nilai	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks toleransi	74,3	%	
	Indeks penguatan dampak ekonomi	3,1	%	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kewaspadaan Nasional	73,5	Angka	

BAB VIII PENUTUP

RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahun kedua RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2025 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2025 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk di dalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

Dengan membangun sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**



bappeda.jatengprov.go.id



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**



Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2024
Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

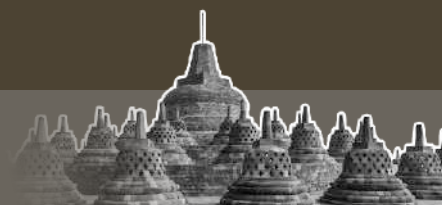


BUKU 2

**“Jawa Tengah
yang Semakin Sejahtera
dan Lestari”**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	III
BUKU II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023.....	1
2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama	1
2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah	2
2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program.....	19
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	19
1. Urusan Pendidikan	19
2. Kesehatan	37
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	58
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat..	60
6. Sosial.....	62
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	69
1. Tenaga Kerja	69
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	72
3. Pangan.....	75
4. Pertanahan	76
5. Lingkungan Hidup	78
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	82
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85
9. Perhubungan	87
10. Komunikasi dan Informatika	91
11. Koperasi dan UKM	92
12. Penanaman Modal	94
13. Kepemudaan dan Olahraga	96
14. Statistik	98
15. Persandian.....	98
16. Kebudayaan	99
17. Perpustakaan.....	101
18. Kearsipan	102

C.	Urusan Pilihan.....	103
1.	Perikanan dan Kelautan.....	103
2.	Pariwisata	108
3.	Pertanian	110
4.	Kehutanan	114
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	125
6.	Perdagangan	132
7.	Perindustrian.....	134
8.	Transmigrasi.....	136
D.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	137
1.	Sekretariat Daerah.....	137
2.	Sekretariat DPRD.....	143
E.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	145
1.	Perencanaan	145
2.	Keuangan	146
3.	Kepegawaian.....	169
4.	Pendidikan dan Pelatihan.....	171
5.	Penelitian dan Pengembangan.....	172
6.	Penghubung.....	174
F.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	175
G.	Unsur Pemerintahan Umum	177

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	1
Tabel 2. 2	Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	2
Tabel 2. 3	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan.....	19
Tabel 2. 4	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	37
Tabel 2. 5	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	48
Tabel 2. 6	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	58
Tabel 2. 7	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60
Tabel 2. 8	Capaian Kinerja Urusan Sosial.....	62
Tabel 2. 9	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	69
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72
Tabel 2. 11	Capaian Kinerja Urusan Pangan	75
Tabel 2. 12	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	76
Tabel 2. 13	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	78
Tabel 2. 14	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82
Tabel 2. 15	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	83
Tabel 2. 16	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	85
Tabel 2. 17	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	87
Tabel 2. 18	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	91
Tabel 2. 19	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM	92
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	94
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	96
Tabel 2. 22	Capaian Kinerja Urusan Statistik	98
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja Urusan Persandian.....	98
Tabel 2. 24	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	99
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	101
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	102
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan	103
Tabel 2. 28	Capaian Kinerja Pariwisata	108
Tabel 2. 29	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	110
Tabel 2. 30	Capaian Kinerja Kehutanan	114
Tabel 2. 31	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	125
Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	132
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	134
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi.....	136
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah	137
Tabel 2. 36	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	143

Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Perencanaan	145
Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Keuangan	146
Tabel 2. 39	Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan	171
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan	172
Tabel 2. 41	Capaian Kinerja Penghubung	174
Tabel 2. 42	Capaian Kinerja Pengawasan	175
Tabel 2. 43	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	177

BUKU II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Koordinator
			Target Perubahan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	15,38	102,53	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80	83,13	83,13	102,57	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Angka Kemiskinan	%	9,86-9,05	10,77	10,77	91,55	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Indeks Gini	Angka	0,34	0,369	0,369	92,14	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48-4,80	5,13	5,13	106,82	Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20-5,60	4,98	4,98	95,77	Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,89	2,89	103,81	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	43,11	45,20	45,20	104,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Williamson	Angka	0,56	0,6325**)	0,6325**)	88,54	Tinggi	Sekretariat Daerah
10	Nilai Tukar Petani	Angka	104,05	117,11	117,11	112,55	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,88	73,39	73,39	100,70	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,93	92,83	92,83	99,89	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,57	68,59	68,59	101,51	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Sampai dengan tahun 2023, dari 13 (tiga belas) IKU Daerah dari 13 indikator tersebut yang berstatus sangat tinggi sebanyak 11 indikator dan 2 indikator berstatus tinggi.

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Angka Kemiskinan	%	9,86-9,05	10,77	10,77	91,55	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Indeks Gini	Angka	0,34	0,369	0,369	92,14	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	8,82-8,09	9,78	9,78	95,91	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	10,96- 10,05	11,87	11,87	92,33	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	450,72	420,42	420,42	93,28	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,75	62,59	62,59	101,36	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	29,75	33	33	110,92	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48-4,80	5,13	5,13	106,82	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,26	6,03	6,03	83,06	Tinggi	Sekretariat Daerah
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20-5,60	4,98	4,98	95,77	Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,89	2,89	103,81	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	43,11	45,20	45,20	104,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
13	Indeks Williamson	Angka	0,56	0,6325**)	0,6325**)	88,54	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,1	2,11	2,11	68,06	Sedang	Sekretariat Daerah
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	5,65	4,35	4,35	76,99	Tinggi	Sekretariat Daerah
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,9	6,35	6,35	107,63	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
17	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,2	9,63	9,63	300,94	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
18	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	9,00-10,00	0,22	0,22	2,20	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah
19	Nilai Tukar Petani	Angka	104,05	117,11	117,11	112,55	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,88	73,39	73,39	100,70	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,9	8,01	8,01	101,39	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	12,85	12,85	99,30	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
23	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,73	74,69	74,69	99,95	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,93	92,83	92,83	99,89	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum							
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8,75	9,95	9,95	87,94	Tinggi	Disdikbud
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,95	92,78	92,78	110,52	Sangat Tinggi	Disdikbud
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	99,5	99,5	99,5	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
	KESEHATAN							
5	Angka Kematian Ibu	100.000 /KH	100	84,6	84,6	118,20	Sangat Tinggi	Dinkes
6	Angka Kematian Balita	1.000/K H	9,2	8,2	8,2	112,20	Sangat Tinggi	Dinkes
7	Angka Kematian Bayi	1.000/K H	7,8	7,02	7,02	111,11	Sangat Tinggi	Dinkes
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,21	0,32	0,32	152,38	Sangat Tinggi	Dinkes
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	69	69,47	69,47	100,68	Sangat Tinggi	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinkes
11	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	60	91,71	91,71	152,85	Sangat Tinggi	Dinkes
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	85,71	92,14	92,14	107,50	Sangat Tinggi	Dinkes
13	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	84	88,97	88,97	105,92	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
14	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno	%	90	94,15	94,15	104,61	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno
15	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	91,11	91,11	101,23	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
16	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	87	88,49	88,49	101,71	Sangat Tinggi	RSUD Kelet Donorejo
17	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	98,75	98,75	98,75	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
18	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	97,33	98,08	98,08	100,77	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
19	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	97	97,9	97,9	100,93	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
20	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	15,23	15,23	15,23	100,00	Sangat Tinggi	BMCK
21	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	44,24	45,03	45,03	101,79	Sangat Tinggi	BMCK
22	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	89,65	90,17	90,17	100,58	Sangat Tinggi	BMCK
23	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	92,35	90,32	90,32	97,80	Sangat Tinggi	BMCK
24	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	66,85	66,45	66,45	99,40	Sangat Tinggi	Pusdataru
25	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,95	66,45	66,45	120,93	Sangat Tinggi	Pusdataru
26	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	78,75	80,27	80,27	101,93	Sangat Tinggi	Pusdataru
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
27	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	46,7	67,7	67,7	144,97	Sangat Tinggi	Disperakim

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
28	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	8,1	7,92	7,92	102,27	Sangat Tinggi	Disperakim
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							Perakim
29	Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP
30	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP
31	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
32	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	12	39,77	39,77	331,42	Sangat Tinggi	BPBD
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	5	49,08	49,08	981,60	Sangat Tinggi	BPBD
34	Persentase pemulihan pasca bencana yang terrealisasi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
	SOSIAL							
35	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	2,37	8,03	8,03	338,82	Sangat Tinggi	Dinsos

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
36	Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	34,38	36,59	36,59	106,43	Sangat Tinggi	Dinsos
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	TENAGA KERJA							
37	Persentase pengangguran yang ditangani	%	28,55	8,61	8,61	30,16	Sangat Rendah	Disnakertrans
38	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,01	64,24	64,24	90,47	Sangat Tinggi	Disnakertrans
39	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,67	92,04	92,04	100,40	Sangat Tinggi	Disnakertrans
40	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	54,62	13,92	13,92	25,49	Sangat Rendah	Disnakertrans
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	8,19	8,26	8,26	100,85	Sangat Tinggi	Disnakertrans
42	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	82,97	81,58	81,58	98,32	Sangat Tinggi	Disnakertrans
43	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	57,14	65,71	65,71	115,00	Sangat Tinggi	Disnakertrans
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	PERLINDUNGAN ANAK							
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,07	8,02	8,02	100,62	Sangat Tinggi	DP3AKB
45	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DP3AKB
46	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	38,88	51,42	51,42	132,25	Sangat Tinggi	DP3AKB
47	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	82,85	82,86	82,86	100,01	Sangat Tinggi	DP3AKB
48	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	90	90	90	100,00	Sangat Tinggi	DP3AKB
49	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,02	5,49	5,49	146,08	Sangat Tinggi	DP3AKB
50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,9	73,78	73,78	101,49	Sangat Tinggi	DP3AKB
	PANGAN							
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,8	94,2	94,2	106,08	Sangat Tinggi	Dishanpan
52	Angka Konsumsi Energi	Kkal/ka pita/hari	2100	2025	2025	96,43	Sangat Tinggi	Dishanpan
	PERTANAHAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
53	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	155,16	155,16	155,16	Sangat Tinggi	Disperakim
	LINGKUNGAN HIDUP							
54	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,39	3,39	98,26	Sangat Tinggi	DISLHK
55	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	DISLHK
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							
56	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dispermasdesd ukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
57	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	68	91,27	91,27	134,22	Sangat Tinggi	Dispermasdesd ukcapil
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
58	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,19	2,04	2,04	93,15	Sangat Tinggi	DP3AKB
59	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	65,17	68,98	68,98	105,85	Sangat Tinggi	DP3AKB
60	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29	63,07	63,07	112,04	Sangat Tinggi	DP3AKB
	PERHUBUNGAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
61	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	73,89	73,89	122,37	Sangat Tinggi	Dishub
62	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	49,81	49,81	96,81	Sangat Tinggi	Dishub
63	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	66,67	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
64	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,95	2,6	2,6	65,82	Sedang	Diskominfo
65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,65	3,3	3,3	90,41	Sangat Tinggi	Diskominfo
66	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,3	3,94	3,94	91,63	Sangat Tinggi	Diskominfo
	KOPERASI DAN UKM							
67	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,68	23,28	23,28	78,44	Tinggi	Dinkop UKM
68	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	29,95	27,96	27,96	93,36	Sangat Tinggi	Dinkop UKM
	PENANAMAN MODAL							
69	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	117,23	117,23	117,23	Sangat Tinggi	DPMPTSP
70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	94,14	94,14	104,60	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
71	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15	54,5	54,5	98,82	Sangat Tinggi	Disporapar
72	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,65	0,37	0,37	56,92	Rendah	Disporapar
	STATISTIK							
73	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	95,65	95,65	95,65	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
	PERSANDIAN							
74	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
	KEBUDAYAAN							
75	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,82	6,82	6,82	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN							
76	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100	108,67	108,67	108,67	Sangat Tinggi	Disarpus
	KEARSIPAN							
77	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	90	95,07	95,07	105,63	Sangat Tinggi	Disarpus
	URUSAN PILIHAN							
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
78	Produksi Perikanan	Ton	1023928,09	855734,92	855734,92	83,57	Tinggi	Dislutkan
79	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	37,07	38,83	38,83	104,75	Sangat Tinggi	Dislutkan
	PARIWISATA							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
80	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,25	3,57	3,57	109,85	Sangat Tinggi	Disporapar
	PERTANIAN							
81	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6	10,58	10,58	91,21	Sangat Tinggi	Distanbun
82	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	4,06	6,46	6,46	159,11	Sangat Tinggi	Disnakeswan
	KEHUTANAN							
83	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43	0,42	0,42	97,67	Sangat Tinggi	DISLHK
84	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km ²	10224,57	10224,57	10224,57	100,00	Sangat Tinggi	DISLHK
85	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	4,15	4,15	882,98	Sangat Tinggi	DISLHK
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
86	Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan <i>good mining practice</i> (GMP)	%	67	89,79	89,79	134,01	Sangat Tinggi	DISESDM
87	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	2,99	3,76	3,76	125,75	Sangat Tinggi	DISESDM
88	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	1,52	1,52	152,00	Sangat Tinggi	DISESDM
89	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15,96	15,98	15,98	100,13	Sangat Tinggi	DISESDM
	PERDAGANGAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
90	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	5,9	5,9	5,9	100,00	Sangat Tinggi	Disperindag
	PERINDUSTRIAN							
91	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5,65	4,35	4,35	76,99	Tinggi	Disperindag
	TRANSMIGRASI							
92	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,45	4,96	4,96	143,77	Sangat Tinggi	Disnakertrans
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH							
93	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	63,57	63,57	74,79	Sedang	Sekretariat Daerah
94	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	76,54	76,54	95,68	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
95	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	78,57	78,57	100,73	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
96	Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	96	100	100	104,17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
97	Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	96	100	100	104,17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
98	Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	45	45	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
99	Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90	100	100	111,11	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
100	Ketercapaian laba BUMD	%	75	98,17	98,17	130,89	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
101	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	82	84	84	102,44	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
102	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
103	Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	89	93,7	93,7	105,28	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
104	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	90	92,53	92,53	102,81	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
105	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	90,24	90,24	105,70	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
106	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	87,76	91,83	91,83	104,64	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
107	Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37	100	100	117,14	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
108	Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78,5	82,75	82,75	105,41	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD							
109	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	89	91,23	91,23	102,51	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	PERENCANAAN							
110	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	%	90	90	90	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA
	KEUANGAN							
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,58	3,45	3,45	96,37	Sangat Tinggi	BAPENDA
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	6,79	8,14	8,14	119,88	Sangat Tinggi	BAPENDA
113	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
114	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	72,5	68	68	93,79	Sangat Tinggi	BPKAD
	KEPEGAWAIAN							
115	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BKD
116	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BKD
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	36,26	71,32	71,32	196,69	Sangat Tinggi	BPSDMD
118	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	30	4,23	4,23	14,10	Sangat Rendah	BPSDMD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
119	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	71	71,32	71,32	100,45	Sangat Tinggi	BAPPEDA
120	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,2	4,23	4,23	100,71	Sangat Tinggi	BAPPEDA
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							
121	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	85,75	85,75	100,88	Sangat Tinggi	BANHUB
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
122	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
123	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,19	3,46	3,46	108,46	Sangat Tinggi	Inspektorat
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
124	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,15	3,45	3,45	109,52	Sangat Tinggi	BAKESBANGP OLINMAS
125	Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,35	3,85	3,85	114,93	Sangat Tinggi	BAKESBANGP OLINMAS
C	Aspek Daya Saing							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	15,38	102,53	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Indeks Toleransi	Angka	76,6	73,68	73,68	96,19	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	90	92,15	92,15	102,39	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80	83,13	83,13	102,57	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	87,25	87,25	99,15	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,33	3,98	3,98	119,52	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai SAKIP	Angka	85	81,92	81,92	96,38	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,5	3,4	3,4	97,14	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
10	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	39	40,68	40,68	104,31	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Sistem Merit	Angka	0,82	0,83	0,83	101,22	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,57	68,59	68,59	101,51	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
13	Indeks Kualitas Air	Angka	50,65	51,14	51,14	100,97	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
14	Indeks Kualitas Udara	Angka	85	100	100	117,65	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	42,45	46,22	46,22	108,88	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,6	3,65	3,65	101,39	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Capaian indikator kinerja daerah ditunjukkan dengan indikator yang berjumlah 165 indikator yang terbagi dalam 3 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Tingkat ketercapaian pada 3 Aspek diatas sebanyak 165 indikator dengan status capaian Sangat Tinggi sebanyak 151 indikator, Tinggi sebanyak 6 indikator, Sedang sebanyak 3 indikator, Rendah sebanyak 2 indikator dan Sangat Rendah 3 indikator.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
	APK SMA	%	28,36	29,89	29,89	105,39	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	73,61	99,24	99,24	134,82	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	10,42	10,42	10,42	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	APK SMK	%	49,46	53,51	53,51	108,19	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	88,98	89,25	89,25	100,30	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	23,47	20,73	20,73	88,33	Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	APK SLB	%	70	91,73	91,73	131,04	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87,87	87,93	87,93	100,07	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	26,15	38,03	38,03	145,43	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	99,99	99,99	99,99	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	99,96	99,96	99,96	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	86	100,00	100,00	116,28	Sangat Tinggi	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	76,64	99,62	99,62	129,98	Sangat Tinggi	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	APK SMA Cabdin I	%	39,46	38,44	38,44	97,42	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SMK Cabdin I	%	49,88	50,14	50,14	100,52	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SLB Cabdin I	%	170,1	156,47	156,47	91,99	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I	%	81,39	99,64	99,64	122,42	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I	%	77,06	89,10	89,10	115,62	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I	%	81,42	90,40	90,40	111,03	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	1,15	90,40	90,40	7860,87	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	4,2	89,1	89,1	2121,43	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	3,36	9,23	9,23	274,70	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar	%	75,15	99,33	99,33	132,18	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar	%	88,5	88,50	88,50	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar	%	98,65	98,65	98,65	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SMA Cabdin II	%	31,93	31,98	31,98	100,16	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SMK Cabdin II	%	39,51	40,30	40,30	102,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	APK SLB Cabdin II	%	60	114,94	114,94	191,57	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,95	0,95	0,95	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	1,54	3,7	3,7	240,26	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang	%	0,86	3,85	3,85	447,67	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	berjenjang Cabdin II							
	APK SMA Cabdin III	%	31,62	30,65	30,65	96,93	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMK Cabdin III	%	44,91	46,56	46,56	103,67	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SLB Cabdin III	%	72,33	143,67	143,67	198,63	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III	%	67,48	98,46	98,46	145,91	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III	%	90,19	88,50	88,50	98,13	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III	%	87,3	87,50	87,50	100,23	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	3,24	8,46	8,46	261,11	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0,26	3,85	3,85	1480,77	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	1,92	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SMA Cabdin IV	%	25,72	27,61	27,61	107,35	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	APK SMK Cabdin IV	%	44,88	47,65	47,65	106,17	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	APK SLB Cabdin IV	%	64,11	182,45	182,45	284,59	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV	%	71,45	98,54	98,54	137,91	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV	%	85,87	86,43	86,43	100,65	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV	%	80,94	99,40	99,40	122,81	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,57	0	0	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,34	0,43	0,43	126,47	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	1,15	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMA Cabdin V	%	35,36	35,79	35,79	101,22	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	APK SMK Cabdin V	%	59,24	73,41	73,41	123,92	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SLB Cabdin V	%	120,1	172,19	172,19	143,37	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V	%	50,21	99,51	99,51	198,19	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V	%	77,27	89,72	89,72	116,11	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V	%	94,6	94,67	94,67	100,07	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1,72	3,43	3,43	199,42	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0,52	1,11	1,11	213,46	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1,54	5,00	5,00	324,68	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SMA Cabdin VI	%	26,04	26,35	26,35	101,19	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	APK SMK Cabdin VI	%	56,24	52,25	52,25	92,91	Sangat Tinggi	CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								PENDIDIKAN VI
	APK SLB Cabdin VI	%	112,01	132,65	132,65	118,43	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI	%	77	99,71	99,71	129,49	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI	%	90,09	90,09	90,09	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI	%	85,5	90,33	90,33	105,65	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	1,34	1,92	1,92	143,28	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,34	1,15	1,15	338,24	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	1,54	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SMA Cabdin VII	%	51,79	51,45	51,45	99,34	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SMK Cabdin VII	%	66,71	62,25	62,25	93,31	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SLB Cabdin VII	%	190,2	289,93	289,93	152,43	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII	%	76,74	99,95	99,95	130,24	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII	%	92,31	86,10	86,10	93,27	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII	%	87,51	81,05	81,05	92,62	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	2,48	4,61	4,61	185,89	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	1,12	12,31	12,31	1099,11	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	4,62	1,15	1,15	24,89	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SMA Cabdin VIII	%	30,82	30,28	30,28	98,25	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SMK Cabdin VIII	%	52,33	52,35	52,35	100,04	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	APK SLB Cabdin VIII	%	70,09	70,00	70,00	99,87	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai	%	78,25	76,12	76,12	97,28	Sangat Tinggi	CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	standar Cabdin VIII							PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII	%	89,1	89,9	89,9	100,90	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII	%	81,02	81,05	81,05	100,04	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	2,48	1,15	1,15	46,37	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	0,86	11,15	11,15	1296,51	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	3,85	0,8	0,8	20,78	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMA Cabdin IX	%	23,17	25,73	25,73	111,05	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMK Cabdin IX	%	50,25	55,12	55,12	109,69	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SLB Cabdin IX	%	66,26	62,31	62,31	94,04	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX	%	78,72	99,61	99,61	126,54	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana	%	90,76	89,9	89,9	99,05	Sangat Tinggi	CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	SMK sesuai standar Cabdin IX							PENDIDIKAN IX
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX	%	81,65	82,95	82,95	101,59	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	1,53	1,53	1,53	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	0,6	1,92	1,92	320,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	3,08	5,00	5,00	162,34	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMA Cabdin X	%	24,83	26,22	26,22	105,60	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMK Cabdin X	%	56,97	60,12	60,12	105,53	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SLB Cabdin X	%	50,11	77,72	77,72	155,10	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X	%	99,73	68,71	68,71	68,90	Sedang	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X	%	98	89,39	89,39	91,21	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X	%	89,35	87,97	87,97	98,46	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1,34	4,00	4,00	298,51	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	0,6	5,00	5,00	833,33	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1,54	1,00	1,00	64,94	Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SMA Cabdin XI	%	30,71	32,89	32,89	107,10	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SMK Cabdin XI	%	54,12	57,13	57,13	105,56	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	APK SLB Cabdin XI	%	30,21	56,70	56,70	187,69	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI	%	83,68	77,34	77,34	92,42	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI	%	90,02	89,68	89,68	99,62	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI	%	97,18	87,14	87,14	89,67	Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,53	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,03	1,92	1,92	186,41	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,54	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMA Cabdin XII	%	22,59	22,13	22,13	97,96	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMK Cabdin XII	%	59,02	60,61	60,61	102,69	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SLB Cabdin XII	%	49,88	68,03	68,03	136,39	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII	%	73,45	99,57	99,57	135,56	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII	%	90,66	90,91	90,91	100,28	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII	%	92,2	88,94	88,94	96,46	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK	%	1,53	0,77	0,77	50,33	Rendah	CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII							PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	0,6	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,54	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SMA Cabdin XIII	%	29,87	29,58	29,58	99,03	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SMK Cabdin XIII	%	55,18	55,29	55,29	100,20	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	APK SLB Cabdin XIII	%	83,23	111,37	111,37	133,81	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII	%	75,35	81,06	81,06	107,58	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII	%	84,95	86,93	86,93	102,33	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII	%	81,11	81,60	81,60	100,60	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang	%	0,57	1,15	1,15	201,75	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	berjenjang Cabdin XIII							
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,34	2,21	2,21	650,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	1,15	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								Bidang Pembinaan SMA
	Prersentase serapan kurikulum SMA	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Prsentase serapan kurikulum SMK	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase serapan kurikulum SLB	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN II

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV	%	100	99,89	99,89	99,89	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V	%	100	99,86	99,86	99,86	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase serapan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	kurikulum SLB Cabdin VI							PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII	%	100	99,99	99,99	99,99	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII	%	100	99,78	99,78	99,78	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X	%	100	99,99	99,99	99,99	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X	%	100	99,52	99,52	99,52	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII	%	100	99,96	99,96	99,96	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII	%	100	99,96	99,96	99,96	Sangat Tinggi	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		%						Bidang Ketenagaan Dikbud
	Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,08	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,08	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB		0,5	0,50	0,50	100,00	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		%						Bidang Pembinaan SMA
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan	%	96	100,00	100,00	104,17	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMA

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 179 indikator kinerja dengan 162 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, 2 indikator berstatus rendah dan 12 indikator berstatus sangat rendah dikarenakan kegiatan tersebut sudah tidak dilaksanakan pada triwulan 3.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	40	40	40	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	60	60	60	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	%	60	60	60	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik	%	94	100	100	106,38	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular	%	68,57	74	74	107,92	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	77	83,81	83,81	108,84	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam							Pengendalian Penyakit
	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	74,28	74,28	74,28	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	75	75	75	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang	%	91,3	93,75	93,75	102,68	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	KLB/Bencana < 24 Jam							
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	52	52	52	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	74,3	74,3	74,3	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa	%	91	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	%	57,14	57,14	57,14	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian	%	71,42	71,42	71,42	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang							Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang	%	91	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten	%	91	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati							
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati	%	91	91	91	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66,7	66,7	66,7	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	Sertifikat	4	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan	Kabupaten/Kota	35	38	38	108,57	Sangat Tinggi	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100,00	100,00	NA	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
	Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Kelet Donorejo
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	95	100	100	105,26	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
	Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
MANUSIA KESEHATAN								
	Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70	90,1	90,1	128,71	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	92	99,86	99,86	108,54	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100	90,73	90,73	90,73	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	89	94	94	105,62	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
	Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	71	71	71	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	94,29	100	100	106,06	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Prosentase Kabupaten/Kota	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang							Masyarakat Wilayah Semarang
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	86	86	86	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	%	85,71	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase Organisasi kemasyarakatan	%	55	55	55	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Indera

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran							Masyarakat Kelas A
	Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK	%	60	60	60	100,00	Sangat Tinggi	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90	100	100	111,11	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
	Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	40	105,3	105,3	263,25	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	139,78	139,78	698,90	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	937	937	937,00	Sangat Tinggi	RSUD Kelet Donorejo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	110,8	110,8	110,80	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan	%	95	90,16	90,16	94,91	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	masyarakat tingkat provinsi							
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	20,35	167,15	167,15	821,38	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	82,5	79,45	79,45	96,30	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	81	83,3	83,3	102,84	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	50,85	59,32	59,32	116,66	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	35	75	75	214,29	Sangat Tinggi	RSUD Kelet Donorejo
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	45	37,99	37,99	84,42	Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	35	34,46	34,46	98,46	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	37,39	42,95	42,95	114,87	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 67 indikator kinerja dengan 66 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
	Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	60,38	60,38	60,38	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	62,5	62,5	62,5	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	83	83	83	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	22,04	22,04	22,04	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,27	52,36	52,36	100,17	Sangat Tinggi	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	PSDA Pemali Comal							
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	PSDA Serang Lusi Juana							
	Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy.
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy.
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
	Persentase akses layak air minum perkotaan	%	94,15	94,15	94,15	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase akses layak air minum perdesaan	%	83,3	84,22	84,22	101,10	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota							Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	91,5	91,75	91,75	100,27	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	15,23	15,23	15,23	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik	%	15,23	15,23	15,23	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Daerah yang diperiksa keandalannya							dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN								
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	42,42	42,55	42,55	100,31	Sangat Tinggi	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	48,01	48,01	48,01	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik	%	95,73	90,7	90,7	94,75	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	BPJ Wilayah Tegal							Wilayah Tegal
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	86,09	86,09	86,09	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	85,27	89,02	89,02	104,40	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,44	88,44	88,44	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	95,02	92	92	96,82	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	83,6	83,6	83,6	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	99,99	92,9	92,9	92,91	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	85,46	85,46	85,46	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik	%	97,16	90,68	90,68	93,33	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	BPJ Wilayah Magelang							Wilayah Magelang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	93,6	93,6	93,6	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	90,16	90,53	90,53	100,41	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,85	94,85	94,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	91,32	90,04	90,04	98,60	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	93,77	93,77	93,77	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,57	88,67	88,67	100,11	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,13	91,13	91,13	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik	%	91,83	90,09	90,09	98,11	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	BPJ Wilayah Surakarta							
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	94,73	94,73	94,73	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Peralatan
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100	117,79	117,79	117,79	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	19,09	19,09	19,09	100,00	Sangat Tinggi	Balai Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
	Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	21,99	45,00	45,00	204,64	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%	77,29	107,22	107,22	138,72	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Ruang
	Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	%	80	81,64	81,64	102,05	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Ruang
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	77,5	78,90	78,90	101,81	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Ruang
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase pengawasan ruang di wilayah	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Balai PSDA Serayu Citanduy							

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 68 indikator kinerja dengan indikator berstatus sangat tinggi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	15,08	15,36	15,36	101,86	Sangat Tinggi	Bidang Perumahan
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	13,45	15,11	15,11	112,34	Sangat Tinggi	Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	37,50	100	100	266,67	Sangat Tinggi	Bidang Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	32,95	93,12	93,12	282,61	Sangat Tinggi	Bidang Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan indikator berstatus sangat tinggi dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Persentase rumah layak huni yang disediakan dikarenakan adanya integrasi program pemenuhan kebutuhan backlog rumah antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, serta adanya antusiasme dari masyarakat penerima bantuan dalam menyediakan dana swadaya untuk mendukung melaksanakan program tersebut;

- b. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dikarenakan adanya integrasi program penanganan RTLH antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, serta adanya antusiasme dari masyarakat penerima bantuan dalam menyediakan dana swadaya untuk mendukung melaksanakan program tersebut;
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani dikarenakan adanya kolaborasi penanganan antara Pemerintah Pusat - Pemerintah kabupaten/kota - Pemerintah Provinsi, kombinasi beberapa mekanisme pembiayaan melalui mata anggaran hibah, hadiah, serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh. Selain itu, terdapat beberapa lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah tuntas RTLH melalui proses verifikasi dan validasi lapangan;
- d. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani dikarenakan dalam Pencapaian ini diperhitungkan secara agregat melalui integrasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman meliputi permukiman kumuh yang diintervensi melalui sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan CSR serta adanya percepatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten PKE dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi capaian penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah
- e. Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman dikarenakan seluruh target kinerja kegiatan dapat direalisasikan secara tepat waktu.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum	%	13,51	17,23	17,23	127,54	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Masyarakat
	Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
	Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	%	2,82	6,77	6,77	240,07	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
	Persentase penurunan risiko bencana	%	3	15	15	500,00	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penanganan Darurat
	Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Logistik dan Peralatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan indikator berstatus sangat tinggi.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	34,38	36,59	36,59	106,43	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant	%	4,1	4,1	4,1	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant Pelayanan Sosial Mardi utomo	%	0,15	0,15	0,15	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,16	0,16	0,16	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Mandiri
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant Pant Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,18	0,18	0,18	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,22	0,22	0,22	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,13	0,13	0,13	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Cepiring

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,13	0,13	0,13	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,16	0,16	0,16	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,11	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,15	0,15	0,15	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,21	0,21	0,21	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,23	0,23	0,23	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,17	0,17	0,17	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,14	0,14	0,14	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,21	0,21	0,21	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,09	0,09	0,09	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pantii Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,28	0,28	0,28	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pantii Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,07	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pantii Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,18	0,18	0,18	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pantii Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,14	0,14	0,14	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pantii Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,22	0,22	0,22	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pantii	%	0,16	0,16	0,16	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Penganthi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Pelayanan Sosial Penganthi							
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,23	0,23	0,23	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,07	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,07	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,08	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,12	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan	%	0,11	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri							Kumuda Putera Puteri
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1,82	8,21	8,21	451,10	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,44	0,44	0,44	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penanganan Fakir Miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	57,14	65,71	65,71	115,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8,19	8,26	8,26	100,85	Sangat Tinggi	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,5	38,5	38,5	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,25	2,27	2,27	100,89	Sangat Tinggi	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan	%	4,2	4,2	4,2	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelatihan Kerja dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	peningkatan produktivitas							Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2,9	6,16	6,16	212,41	Sangat Tinggi	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,38	11,96	11,96	127,51	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	13,04	24,16	24,16	185,28	Sangat Tinggi	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46,75	65,37	65,37	139,83	Sangat Tinggi	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	71,01	64,11	64,11	90,28	Sangat Tinggi	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga	%	68	68,19	68,19	100,28	Sangat Tinggi	Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	kerja baru disektor Informal							dan Transmigrasi PENTA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	97,8	98,5	98,5	100,72	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43	43	43	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,72	49,72	49,72	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96	98,41	98,41	102,51	Sangat Tinggi	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,57	89,99	89,99	100,47	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori	%	26,14	28,86	28,86	110,41	Sangat Tinggi	Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	baik dalam penerapan K3							

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja dengan dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	6,84	23,62	23,62	345,32	Sangat Tinggi	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,64	4,75	4,75	118,74	Sangat Tinggi	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejing	%	20	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%	40	63,88	63,88	159,70	Sangat Tinggi	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	40	63,88	63,88	159,70	Sangat Tinggi	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	20	20	20	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemenuhan Hak dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Anak Minimal Tingkat Pratama							Perlindungan Anak
	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	25	25	25	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	12,36	10,47	10,47	118,05	Sangat Tinggi	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	20	20	20	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	kkal/ka pita/hari	4.020	4.021,00	4.021,00	99,98	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	CV harga pangan strategis (beras)	%	2	0,58	0,58	344,83	Sangat Tinggi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	1	1,03	1,03	103,00	Sangat Tinggi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
	Angka Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	91,4	88,60	88,60	96,94	Sangat Tinggi	Bidang Konsumsi dan Penganekara gaman Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
	Prosentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	52,56	52,56	5256,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	96,83	96,83	121,04	Sangat Tinggi	Bidang Keamanan Pangan
	Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	%	80	100,00	100,00	125,00	Sangat Tinggi	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

4. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								
	Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	149,28	149,28	149,28	Sangat Tinggi	Bidang Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	100,14	100,14	100,14	Sangat Tinggi	Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
	Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	100	216,06	216,06	216,06	Sangat Tinggi	Bidang Pertanahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, dengan seluruh dengan indikator berstatus sangat tinggi. Pencapaian masing-masing indikator kinerja dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dikarenakan realisasi yang menyesuaikan dengan pemenuhan permintaan pengadaan tanah oleh instansi pemohon dalam dukungan percepatan terhadap pelaksanaan PSN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani dikarenakan pada fasilitasi permasalahan pertanahan yang dapat terfasilitasi sebanyak 4

permasalahan yang melebihi dari target yakni 3 permasalahan, serta pada sertifikasi tanah kas desa pelaksanaannya fokus pada peningkatan kesadaran Pemerintah Desa dan peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten;

- c. Persentase pelaksanaan reforma agraria dikarenakan terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang terkait pemantauan penetapan lokasi dan bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria realisasi menyesuaikan dengan pengajuan izin panlok T-1 dan T. Selain itu juga Sub kegiatan ini merupakan dukungan terhadap Pelaksanaan PSN, Gugus Tugas dan Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8,57	8,57	8,57	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	112,17	112,17	112,17	Sangat Tinggi	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100	100,26	100,26	100,26	Sangat Tinggi	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	3,83	3,83	7,65	199,74	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di	%	0,14	0,14	0,28	200,00	Sangat Tinggi	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Kebun Raya Baturraden							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan	%	75	76,92	76,92	102,56	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya	%	17,14	17,14	17,14	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga/kelembagaan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	50	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
	Persentase sampah yang dikelola	%	63	54,66	54,66	86,76	Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja. Terdapat 13 Indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
	Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el	%	97	100,00	100,00	103,09	Sangat Tinggi	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
	Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95%	%	92	100,00	100,00	108,70	Sangat Tinggi	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
	Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	152,00	152,00	152,00	Sangat Tinggi	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENATAAN DESA								
	Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	100	232,21	232,21	232,21	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	100	146	146	146,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
	Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Desa
	Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	desa untuk kepentingan umum							
	Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa	%	16,84	64,37	64,37	382,24	Sangat Tinggi	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	4,34	32,34	32,34	745,16	Sangat Tinggi	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
	Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa	%	91	93,84	93,84	103,12	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	3,55	3,55	3,55	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%	27,7	61,11	61,11	220,61	Sangat Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	35	35	35	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	30	30,38	30,38	101,27	Sangat Tinggi	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
	Unmetneed KB	%	12,76	11,74	11,74	108,69	Sangat Tinggi	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96,3	96,6	96,6	100,31	Sangat Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	91	92,07	92,07	101,18	Sangat Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	30	30	30	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	52,34	38,66	38,66	73,86	Sedang	Bidang Lalu Lintas
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	18,52	12,99	12,99	70,14	Sedang	Bidang Lalu Lintas
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,68	5,68	5,68	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	94,45	193,89	193,89	205,28	Sangat Tinggi	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	42,86	42,86	42,86	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	43,75	43,75	43,75	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Jaringan Transportasi dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								Perkeretaapi an
	Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapi an
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31,25	37,50	37,50	120,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,51	52,72	52,72	100,40	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	50	60,00	60,00	120,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	43,21	43,50	43,50	100,67	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana	%	62,5	68,75	68,75	110,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A							Wilayah III Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	52,03	52,21	52,21	100,35	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38,46	42,31	42,31	110,01	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	79,53	79,89	79,89	100,45	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	76,92	84,62	84,62	110,01	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan	%	66,43	66,59	66,59	100,24	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B							Wilayah V Kelas B
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	34,48	44,83	44,83	130,02	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	84,23	84,23	84,23	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	34,85	34,85	34,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	75	75,00	75,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelayaran
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	51,12	51,12	51,12	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelayaran

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	87,79	88,28	88,28	100,56	Sangat Tinggi	Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	45,45	45,45	45,45	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 indikator kinerja. Terdapat 22 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sedang.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	%	85	87,54	87,54	102,99	Sangat Tinggi	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Persentase badan publik yang terbuka	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	80	85	85	106,25	Sangat Tinggi	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	85	82	82	96,47	Sangat Tinggi	Bidang E-Government

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGAWASAN DAN								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PEMERIKSAAN KOPERASI								
	Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi	%	85,19	85,41	85,41	100,26	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
	Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat	%	27,15	27,18	27,18	100,11	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
	Persentase SDM KUMKM yang terampil	%	83	99,53	99,53	119,92	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
	Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas	%	76,5	25,13	25,13	32,85	Sangat Rendah	Bidang Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Persentase Koperasi Provinsi yang berkua	Persentase Usaha Mikro menuju kecil	%	12,77	12,78	12,78	100,08	Sangat Tinggi	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
	Persentase Usaha Kecil menuju Menengah	%	25	39,10	39,10	156,40	Sangat Tinggi	Bidang Bina Usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Terdapat 5 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sangat rendah, yaitu persentase koperasi provinsi yang berkualitas dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi mengakibatkan perubahan formulasi perhitungan.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
	Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	%	24	32,43	32,43	135,13	Sangat Tinggi	Bidang Promosi PM
	Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha	%	26	25	25	96,15	Sangat Tinggi	Bidang Promosi PM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	95	99,74	99,74	104,99	Sangat Tinggi	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	93	93	93	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelayanan Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
	Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	20,56	20,56	137,07	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PENANAMAN MODAL								
	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	90	70,68	70,68	78,53	Tinggi	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Terdapat 7 indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus Tinggi

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kepemudaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	16,3	16,3	16,3	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kepemudaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN								
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	45	45	45	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	15	15	15	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Keolahragaan
	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	97	97	97,00	Sangat Tinggi	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL								
	Persentase Ketersediaan data sektoral	%	100	100,74	100,74	100,74	Sangat Tinggi	Bidang Statistik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus sangat tinggi.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus sangat tinggi

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
	Presentase ragam budaya terlayani	%	3,1	3,10	3,10	100,00	Sangat Tinggi	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
	Presentase jenis seni tradisi terlayani	%	6,82	6,82	6,82	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
	Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0,42	0,42	0,42	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
	Persentase status cagar budaya	%	23,62	23,62	23,62	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								
	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	Angka	89,8	89,84	89,84	100,04	Sangat Tinggi	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%	100	106,88	106,88	106,88	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%	100	120	120	500,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%	100	101,36	101,36	101,36	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	100	109,75	109,75	109,75	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator. Kinerja seluruh indikator program urusan perpustakaan sangat tinggi

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	%	100	104,07	104,07	104,07	Sangat Tinggi	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	%	100	111,11	111,11	111,11	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator yang seluruhnya berstatus sangat tinggi

C. Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	25	37,99	37,99	151,96	Sangat Tinggi	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	30	30,00	30,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	17,6	17,60	17,60	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25	30,72	47,30	189,20	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25	38,63	47,30	189,20	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	25	38,99	46,90	187,61	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	1,08	1,08	108,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	1,00	1,08	108,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,1	0	0,04	40,00	Sangat Rendah	Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian	%	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	pelayanan kepelabuhanan							Asemdayong Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	81,82	90,91	90,91	111,11	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	81,82	81,82	81,82	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	63,64	63,64	63,64	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	25	25,00	80,63	322,52	Sangat Tinggi	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0,2	0,40	0,20	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan	%	72	72,00	72,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat	%	45	45,00	45,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan Sumberdaya

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	pengawas dalam pengawasan sdcp							Kelautan dan Perikanan
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	1,00	1,00	50,00	Sangat Rendah	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan	%	25	37,61	71,82	287,28	Sangat Tinggi	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	50	72,90	72,90	145,80	Sangat Tinggi	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 31 target indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan. Terdapat 29 indikator berstatus sangat tinggi, dan 2 indikator berstatus sangat rendah.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	78,26	82,61	82,61	105,56	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	70	83,18	83,18	118,83	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	17.295.375	50.204.376	50.204.376	290,28	Sangat Tinggi	Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK								Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
KEKAYAAN INTELEKTUAL								
	Persentase Kota Kreatif	%	5,71	5,71	5,71	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	59,72	102,49	102,49	171,62	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 5 target indikator kinerja Urusan Pariwisata. Dengan keseluruhan indikator status sangat tinggi.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	##### #	4.421.140	4.421.140	110,17	Sangat Tinggi	Bidang Budidaya
	Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan	%	1	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Veteriner
	Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	0,70	0,70	70,00	Sedang	Balai Inseminasi Buatan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak	%	2	24,97	24,97	1248,50	Sangat Tinggi	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase Penambahan Jumlah Alsintan	%	4	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan	%	5	4,50	4,50	90,00	Tinggi	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	usaha tani di Jawa Tengah							
	Persentase penyaluran pupuk subsidi	%	100	86,70	86,70	86,70	Tinggi	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%	2,9	2,78	2,78	95,86	Sangat Tinggi	Bidang Tanaman Pangan
	Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%	10,8	10,80	10,80	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Hortikultura
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%	3,1	3,17	3,17	102,26	Sangat Tinggi	Bidang Perkebunan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil	%	2,5	2,50	2,50	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	3	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	3	2,37	2,37	79,00	Tinggi	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	3	4,59	4,59	153,00	Sangat Tinggi	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	17,22	3,00	3,00	17,42	Sangat Rendah	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	1	310,00	310,00	31000,00	Sangat Tinggi	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	%	18,88	25,98	25,98	137,61	Sangat Tinggi	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10	5,59	5,59	55,90	Rendah	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN								Dinas Peternakan dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								Kesehatan Hewan
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	31,25	31,25	625,00	Sangat Tinggi	Bidang Veteriner
	Persentase penurunan pemotongan betina produktif	%	10	43,67	43,67	436,70	Sangat Tinggi	Bidang Veteriner
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	31,25	31,25	625,00	Sangat Tinggi	Balai veteriner semarang
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	31,25	31,25	625,00	Sangat Tinggi	Balai veteriner boyolali
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
	Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	2,1	4,46	4,46	212,38	Sangat Tinggi	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
	Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	15,62	384,00	384,00	2458,39	Sangat Tinggi	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10	10,58	10,58	105,80	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								dan Bina Usaha
	Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BALAI PELATIHAN PERTANIAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 27 target indikator kinerja Urusan Pertanian Terdapat 21 indikator berstatus sangat tinggi, 3 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, 1 indikator berstatus rendah dan 1 indikator berstatus sangat rendah

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35,38	35,38	35,38	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								Perlindungan Hutan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I	%	0,72	0,72	0,72	100,00	Sangat Tinggi	CDK 1
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 1
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I	%	1,63	1,73	1,73	106,13	Sangat Tinggi	CDK 1
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II	%	0,72	0,72	0,72	100,00	Sangat Tinggi	CDK 2
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 2
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II	%	1,63	1,71	1,71	104,91	Sangat Rendah	CDK 2
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III	%	0,62	0,62	0,62	100,00	Sangat Tinggi	CDK 3

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPd - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 3
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III	%	1,69	1,98	1,98	117,16	Sangat Tinggi	CDK 3
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV	%	0,72	0,72	0,72	100,00	Sangat Tinggi	CDK 4
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 4
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV	%	1,81	1,83	1,83	101,10	Sangat Tinggi	CDK 4
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V	%	0,82	2,46	2,46	300,00	Sangat Tinggi	CDK 5
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 5
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V	%	2	1,77	1,77	88,50	Tinggi	CDK 5

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI	%	0,82	0,82	0,82	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI	%	3,25	2,39	2,39	73,54	Sedang	CDK 6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII	%	0,82	0,00	0,72	87,80	Tinggi	CDK 7
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 7
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII	%	3,13	3,67	3,67	117,25	Sangat Tinggi	CDK 7
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII	%	0,62	0,62	0,62	100,00	Sangat Tinggi	CDK 8
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 8

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPDP Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	ditangani di CDK Wil VIII							
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII	%	2,06	2,17	2,17	105,34	Sangat Tinggi	CDK 8
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX	%	0,72	0,72	0,72	100,00	Sangat Tinggi	CDK 9
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 9
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX	%	2,63	2,31	2,31	87,83	Tinggi	CDK 9
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X	%	0,62	0,62	0,62	100,00	Sangat Tinggi	CDK 10
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 10
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X	%	2,06	2,45	2,45	118,93	Sangat Tinggi	CDK 10
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang	%	0,62	0,62	0,62	100,00	Sangat Tinggi	CDK 11

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPd - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	berkelanjutan di CDK Wil XI							
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 11
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI	%	3,13	2,70	2,70	86,26	Tinggi	CDK 11
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPH	%	0,91	0,65	0,65	71,43	Sedang	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMN YA								
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 1
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 1
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 2
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 2
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 3
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 3
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	100,00	100,00	100	Sangat Tinggi	CDK 4
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 4
	Persentase konservasi ekosistem yang	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 5

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	dikelola secara efektif di CDK Wil V							
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 8
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 8
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 9
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 9
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X	%	100	25,00	25,00	25,00	Sangat Rendah	CDK 10
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 11

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPd - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	ditangani di CDK Wil XI							
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPA Mangkunagoro I	%	0,14	0,14	0,14	100,00	Sangat Tinggi	Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I Kelas A
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,09	0,09	0,09	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	25	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I	%	3	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 1
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 2
	Presentase peningkatan kelas kelompok	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 3

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	masyarakat di CDK Wil III							
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 4
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V	%	3	0,75	0,75	25,00	Sangat Renda h	CDK 5
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII	%	3	2,40	2,40	80,00	Tinggi	CDK 7
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII	%	2	3,00	3,00	150,00	Sangat Tinggi	CDK 8
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 9
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 10
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI	%	2	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	CDK 11

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
	Persentase jumlah DAS yang tertangani	%	5	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	25	26,97	26,97	107,88	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 71 target indikator kinerja Urusan Kehutanan Terdapat 61 indikator berstatus sangat tinggi, 5 indikator berstatus tinggi, 2 indikator berstatus sedang, dan 3 indikator berstatus sangat rendah.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pengambilan air tanah	%	55,76	43,64	43,64	127,77	Sangat Tinggi	Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4,2	4,09	4,09	102,69	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12,6	10,46	10,46	120,46	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,91	1,92	1,92	151,56	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,17	1	1	117,00	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,97	0,83	0,83	116,87	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8,47	7,14	7,14	118,63	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pengambilan air	%	0,61	0,57	0,57	107,02	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	tanah Wilayah Kendeng Selatan							Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3,31	1,57	2,60	127,31	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,1	1,02	1,02	107,84	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14,81	9,67	9,67	153,15	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5,36	4,05	4,05	132,35	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,25	0,22	0,22	113,64	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								
	Persentase Good Mining Practice	%	90,7	96,53	96,53	106,43	Sangat Tinggi	Bidang Mineral dan Batubara
	Persentase good mining practice Wilayah Solo	%	6,76	7,89	7,89	116,72	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase good mining practice	%	4,23	4,42	4,42	104,49	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Wilayah Kendeng Muria							Kendeng Muria
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara	%	6,48	7,57	7,57	116,82	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan	%	4,51	4,73	4,73	104,88	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara	%	12,11	12,93	12,93	106,77	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	3,1	3,47	3,47	111,94	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan	%	11,55	11,67	11,67	101,04	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu	%	5,63	5,99	5,99	106,39	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan	%	14,37	14,51	14,51	100,97	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak	%	4,79	5,99	5,99	125,05	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase good mining practice Wilayah Merapi	%	13,24	13,25	13,25	100,08	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah	%	3,94	4,10	4,10	104,06	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	124.224	133.288,05	133.288,05	107,30	Sangat Tinggi	Bidang Energi Baru Terbarukan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e	366,15	646,37	646,37	176,53	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e	1.738	1.762,64	1.762,64	101,42	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e	811,99	1.034,47	1.034,47	127,40	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e	739,00	756,42	756,42	102,36	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e	408	424,73	424,73	104,10	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	462,07	577,59	577,59	125,00	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	wilayah Ungaran Telomoyo							Ungaran - Telomoyo
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	505	506,34	506,34	100,27	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e	417,85	489,42	489,42	117,13	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e	95.701,00	96.653,92	96.653,92	101,00	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e	20.288	24.741,22	24.741,22	121,95	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e	1.856	3.676,39	3.676,39	198,07	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e	732,2	927,25	927,25	126,64	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	37,13	50,89	50,89	137,06	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagalistrikan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah	%	1,92	2,34	2,34	121,88	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	tangga miskin Wilayah Solo							
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2,53	3,82	3,82	150,99	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	1,95	4,01	4,01	205,64	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	4,15	5,23	5,23	126,02	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	5,06	6,55	6,55	129,45	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,62	2,19	2,19	135,19	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	4,8	5,38	5,38	112,08	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1,82	2,49	2,49	136,81	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	5,01	7,93	7,93	158,28	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1,82	1,96	1,96	107,69	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	3,73	3,83	3,83	102,68	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2,73	5,17	5,17	189,38	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator dengan keseluruhan indikator sangat tinggi.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	7	8,03	8,03	114,71	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	0,21	0,60	0,60	285,71	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
	Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	11,5	9,04	9,04	127,21	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
	Nilai ekspor non migas	Juta US\$	7.430	9.013,66	9.013,66	121,31	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PERLINDUNGAN KONSUMEN								
	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	3	2,64	2,64	113,64	Sangat Tinggi	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	5	10,89	10,89	217,80	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	4	5,00	5,00	125,00	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	10	10,50	10,50	105,00	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan keseluruhan indikator sangat tinggi

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	6	4,73	4,73	78,83	Tinggi	Bidang Industri Agro
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3	0,18	0,18	6,00	Sangat Rendah	Bidang Industri Non Agro
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,17	13,70	13,70	432,18	Sangat Tinggi	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	85,00	85,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,35	4,35	4,35	100,00	Sangat Tinggi	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2023				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
INDUSTRI NASIONAL								
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	11,58	11,58	1158,00	Sangat Tinggi	Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	9,94	9,94	497,00	Sangat Tinggi	Bidang Industri Non Agro

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Terdapat 5 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus Tinggi dan 1 indikator berstatus Sangat rendah. Indikator status sangat rendah yaitu Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,45	4,96	4,96	143,77	Sangat Tinggi	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,45	3,97	3,97	115,07	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM								Sekretariat Daerah
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO HUKUM
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	70	70	70	Sedang	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO PEREKONOMIAN
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO UMUM
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO UMUM
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO UMUM
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Keuangan Biro APBJ							
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34,15	155,37	155,37	454,96	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80	80,00	80,00	100,00	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87,8	87,8	87,8	100,00	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42	94,28	94,28	103,13	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37	85,37	85,37	100,00	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63	100,83	100,83	117,75	Sangat Tinggi	BIRO ORGANISASI
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92	14,63	14,63	15,25	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								
	Efektivitas kerjasama daerah	%	95	100	100	105,26	Sangat Tinggi	BIRO PEMERINTAHAN, OTONO

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								MI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	100	100	111,11	Sangat Tinggi	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	100	100	105,26	Sangat Tinggi	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42	42	42	100,00	Sangat Tinggi	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BIRO HUKUM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BIRO HUKUM
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BIRO HUKUM
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	100	100	104,17	Sangat Tinggi	BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90	90	90	100,00	Sangat Tinggi	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96	96	96	100,00	Sangat Tinggi	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	77	77	93,90	Sangat Tinggi	BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77	86	86	111,69	Sangat Tinggi	BIRO PEREKONOMIAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85	87	87	102,35	Sangat Tinggi	BIRO PEREKONOMIAN
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	83,33	83,33	104,16	Sangat Tinggi	BIRO PEREKONOMIAN
	Nilai kemandirian BLUD	%	55	55	55	100,00	Sangat Tinggi	BIRO PEREKONOMIAN
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90	90	90	100,00	Sangat Tinggi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	92	92	92	100,00	Sangat Tinggi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,5	99,45	99,45	100,96	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5	99,32	99,32	104,00	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	96,07	96,07	113,02	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Capaian Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								PEMBANGUNAN
	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85	85	85	100,00	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 47 indikator kinerja. Terdapat 45 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sedang dan 3 indikator berstatus rendah.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI								Sekretariat DPRD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Umum
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Persidangan
	Persentase Layanan Bagian Humas	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Humas

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja dengan sangat tinggi.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
	Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan	%	90	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
	Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	90	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kajian dan Pengembangan
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	90	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian	%	90	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perekonomian
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	99,05	99,05	99,05	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Anggaran
	Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Akuntansi
	Persentase realisasi serapan APBD	%	95	93,85	93,85	98,79	Sangat Tinggi	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	72,5	68	68	93,79	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
	Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%	95	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%	7,08	6,6	6,6	93,22	Sangat Tinggi	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%	7,35	5,86	5,86	79,73	Tinggi	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	%	12	28,38	28,38	236,50	Sangat Tinggi	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	%	13,08	13,24	13,24	101,22	Sangat Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah	%	4,32	5,51	5,51	127,55	Sangat Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	%	12,5	12,92	12,92	103,36	Sangat Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	%	14,33	12,39	12,39	86,46	Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	%	2,03	2,46	2,46	121,18	Sangat Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	%	-6,73	-6,29	-6,29	93,46	Sangat Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	%	90	99,89	99,89	110,99	Sangat Tinggi	Bidang Evaluasi dan Pembinaan
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	%	8,37	8,31	8,31	99,28	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	%	4,3	4,04	4,04	93,95	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	%	10,26	9,92	9,92	96,69	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	%	12	31,32	31,32	261,00	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	%	4,97	4,68	4,68	94,16	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	%	9,49	8,7	8,7	91,68	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	%	16,38	13,02	13,02	79,49	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	%	-5,55	-5,21	-5,21	93,87	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	%	12	26,81	26,81	223,42	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	%	5,34	5,09	5,09	95,32	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	%	11,24	9,78	9,78	87,01	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	%	16,16	22,61	22,61	139,91	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	%	12	28,12	28,12	234,33	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	%	7,76	7,27	7,27	93,69	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	%	9,31	7,29	7,29	78,30	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	%	7,88	7,06	7,06	89,59	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	%	-0,87	-0,46	-0,46	52,87	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	%	12	28,41	28,41	236,75	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB	%	5,68	5,38	5,38	94,72	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kota Salatiga							Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	%	6,28	4,75	4,75	75,64	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	%	25	20,97	20,97	83,88	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	%	2,52	2,69	2,69	106,75	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	%	12	32,58	32,58	271,50	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	%	8	7,35	7,35	91,88	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	%	9,13	7,93	7,93	86,86	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	%	19,61	31,52	31,52	160,73	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	%	10,22	10,33	10,33	101,08	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	%	12	27,14	27,14	226,17	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	%	10,35	9,18	9,18	88,70	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	%	7,59	5,73	5,73	75,49	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	%	16,47	14,4	14,4	87,43	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	%	1,95	2,22	2,22	113,85	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	%	12	30,58	30,58	254,83	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	8,35	7,65	7,65	91,62	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	3,45	2,73	2,73	79,13	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	%	12,04	12,59	12,59	104,57	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	%	5,74	6,29	6,29	109,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	%	12	28,84	28,84	240,33	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	%	4,16	3,92	3,92	94,23	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	%	10,26	8,85	8,85	86,26	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	%	16,91	12,88	12,88	76,17	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	%	5,94	6,35	6,35	106,90	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	%	12	26,95	26,95	224,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	%	5,69	5,44	5,44	95,61	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	%	9,07	6,85	6,85	75,52	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	%	16,22	13,96	13,96	86,07	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	%	0,52	0,55	0,55	105,77	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	%	12	26,19	26,19	218,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	%	6,18	5,84	5,84	94,50	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	%	21,95	35,32	35,32	160,91	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	%	7,01	4,86	4,86	69,33	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	4,58	4,8	4,8	104,80	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Sragen							Kabupaten Sragen
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	%	12	32,07	32,07	267,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5,04	4,88	4,88	96,83	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8,39	6,36	6,36	75,80	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	16,4	9,51	9,51	57,99	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	6,85	6,91	6,91	100,88	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	12	30,22	30,22	251,83	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	5,83	5,58	5,58	95,71	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD	%	8,82	6,91	6,91	78,34	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Kabupaten Wonogiri							Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	%	5,41	4,79	4,79	88,54	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	%	1,06			0,00	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	%	12	34,22	34,22	285,17	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	5,01	4,88	4,88	97,41	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9,65	6,71	6,71	69,53	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	%	16,22	13,66	13,66	84,22	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	%	5,05	5,62	5,62	111,29	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani	%	12	26,95	26,95	224,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Karanganyar							Kabupaten Karanganyar
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	6,91	6,49	6,49	93,92	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	5,74	4,25	4,25	74,04	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	%	16,26	17,39	17,39	106,95	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	%	-4,84	-4,22	-4,22	87,19	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	%	12	27,91	27,91	232,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	%	6,23	6,05	6,05	97,11	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	%	16,1	13,62	13,62	84,60	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	3,47	3,91	3,91	112,68	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Pati							Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	%	3,47			0,00	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	%	12	20,21	20,21	168,42	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	%	6,27	5,87	5,87	93,62	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	%	11,18	8,66	8,66	77,46	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	%	16,7	15,6	15,6	93,41	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	%	5,15	5,4	5,4	104,85	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	%	12	26,84	26,84	223,67	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase peningkatan penerimaan PKB	%	8,09	7,49	7,49	92,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Rembang							Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	%	6,66	4,97	4,97	74,62	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	%	16,36	15,4	15,4	94,13	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	%	6,04	6,34	6,34	104,97	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	%	12	26,62	26,62	221,83	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	%	4,95	4,83	4,83	97,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	%	5,33	3,94	3,94	73,92	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	%	-9,09	49,3	49,3	-542,35	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	5,04	5,76	5,76	114,29	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Kudus							Kabupaten Kudus
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	%	12	27,24	27,24	227,00	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	%	10,07	9,07	9,07	90,07	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	%	3,98	2,86	2,86	71,86	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	%	13,04	12,94	12,94	99,23	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	%	12,74	7,99	7,99	62,72	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	%	12	31,57	31,57	263,08	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	%	7,2	6,43	6,43	89,31	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	%	9,36	6,75	6,75	72,12	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	%	6,87	7,54	7,54	109,75	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	%	12	27,79	27,79	231,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10,73	9,64	9,64	89,84	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	5,25	4,14	4,14	78,86	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	%	76,74	43,81	43,81	57,09	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	%	10,85	12,48	12,48	115,02	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	%	12	28,81	28,81	240,08	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	%	11,44	10,18	10,18	88,99	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	%	6,53	5,34	5,34	81,78	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	%	49,42	37,28	37,28	75,44	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	%	7,36	7,48	7,48	101,63	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	%	12	27,38	27,38	228,17	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	10,09	8,89	8,89	88,11	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	7,15	8,89	8,89	124,34	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	%	16,53	16,36	16,36	98,97	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	%	5,02	5,2	5,2	103,59	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	%	12	28,83	28,83	240,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	%	8,21	7,38	7,38	89,89	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	%	8,09	7,49	7,49	92,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	%	-48,69	-2,35	-2,35	4,83	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	%	12	26,17	26,17	218,08	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	%	10,99	9,72	9,72	88,44	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	%	6,32	5,55	5,55	87,82	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	%	16,19	18,07	18,07	111,61	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	7,34	8,33	8,33	113,49	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Tegal							Kabupaten Tegal
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	%	12	33,05	33,05	275,42	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	%	11,42	10,07	10,07	88,18	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	%	6,91	6,66	6,66	96,38	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	%	16,32	17,24	17,24	105,64	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	%	2,47	2,85	2,85	115,38	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	%	12	27,34	27,34	227,83	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	8,02	7,24	7,24	90,27	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD	%	6,69	5,16	5,16	77,13	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Kabupaten Banyumas							Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	%	10,92	9,66	9,66	88,46	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	%	0,67	0,77	0,77	114,93	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	%	12	27,78	27,78	231,50	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	8,21	7,49	7,49	91,23	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	5,05	4,09	4,09	80,99	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	%	17,58	12,47	12,47	70,93	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	%	5,01	6,29	6,29	125,55	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani	%	12	27	27	225,00	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Cilacap							Kabupaten Cilacap
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	9,43	8,35	8,35	88,55	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	8,61	5,67	5,67	65,85	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	%	16,35	16,36	16,36	100,06	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	%	5,75	6,44	6,44	112,00	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	%	12	28,83	28,83	240,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	9,92	8,72	8,72	87,90	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	7,65	5,53	5,53	72,29	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	3,5	9,66	9,66	276,00	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	UPPD Kabupaten Banjarnegara							Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	2,2	2,47	2,47	112,27	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	12	27,42	27,42	228,50	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	%	3,16	3,11	3,11	98,42	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	%	3,61	2,66	2,66	73,68	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	%	15,97	13,92	13,92	87,16	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	%	3,52	4,38	4,38	124,43	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	%	12	31,39	31,39	261,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6,03	5,93	5,93	98,34	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6,72	4,85	4,85	72,17	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	%	16,36	17,73	17,73	108,37	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	%	26,54	28,1	28,1	105,88	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	%	12	27,99	27,99	233,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	7,68	7,29	7,29	94,92	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	6,1	4,61	4,61	75,57	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	%	3,32	3,1	3,1	93,37	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	%	3,21	3,69	3,69	114,95	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	%	12	27	27	225,00	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	5,69	5,56	5,56	97,72	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Keuangan ditunjukan dengan 198 indikator kinerja, Terdapat 130 indikator berstatus sangat tinggi, 45 indikator berstatus tinggi, 13 indikator berstatus sedang, 5 indikator berstatus rendah dan 5 indikator berstatus sangat rendah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Kepegawaian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	terevaluasi kinerjanya							
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Presentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
	Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	80	80	80	Sangat Tinggi	Bidang Informasi Kepegawaian
	Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	82	86,84	86,84	105,90	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3,5	3,51	3,51	100,29	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
								Penjaminan Mutu
	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	93,17	93	93	99,82	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	100	100,00	100,00	100	Sangat Tinggi	UPT Brida

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri	%	20	20,00	20,00	100	Sangat Tinggi	UPT Brida
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100	100,00	100,00	100	Sangat Tinggi	UPT Brida
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	100	84,00	84,00	84,00	Tinggi	UPT Brida
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	20	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	UPT Brida
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	20	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	UPT Brida

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Terdapat 5 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaraan unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Penghubung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								Badan Penghubung
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Badan Penghubung

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN								INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	87,06	87,06	102,42	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	137,50	137,50	161,76	Sangat Tinggi	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	%	85	101,27	101,27	119,14	Sangat Tinggi	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAERAH
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	85	75,47	75,47	88,79	Tinggi	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILIT AS KEUANGAN DAERAH

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	186,36	186,36	219,25	Sangat Tinggi	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
	Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	Persentase Penerapan MR di OPD	%	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	86	88,38	88,38	102,77	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	Persentase Nilai MCP korsupgah	%	85	53,43	53,43	62,86	Rendah	INSPEKTORAT
	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	90	3,03	3,03	3,37	Sangat Rendah	INSPEKTORAT

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja. Terdapat 7 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus rendah dan 1 indikator berstatus sangat rendah.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,4	3,87	3,87	113,82	Sangat Tinggi	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,3	3,8	3,8	115,15	Sangat Tinggi	Bidang Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,11	3,4	3,4	109,32	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Indikator Kinerja				Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%)		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,39	3,25	3,25	95,87	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,9	3,4	3,4	117,24	Sangat Tinggi	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**



bappeda.jatengprov.go.id



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**



Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2024
Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025



BUKU 3

**“Jawa Tengah
yang Semakin Sejahtera
dan Lestari”**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									5.289.653.813.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75.07		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								5.131.111.958.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.25	5.131.111.958.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.131.111.958.000		
						Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.089.781.258.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.041.376.458.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	5.041.376.458.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.038.626.458.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32844	5.038.626.458.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.750.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.750.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					490.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	490.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				240.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	5	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					475.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				250.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	3	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	3	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	3	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.040.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.040.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				160.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				280.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				750.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				120.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	2	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.280.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	60	4.280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				250.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.030.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	40	3.030.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.109.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	38.109.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.889.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	35.889.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.010.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	2.010.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	200	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bulan	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				60.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	220	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	250	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.908.100.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					65.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				65.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					482.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	482.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					206.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	206.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	106.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					667.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	667.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				365.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	365.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					488.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	539	488.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				22.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	369	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	493	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				175.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.369.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					446.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	446.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					428.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	428.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				248.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	248.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					415.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	415.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	33	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.580.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					376.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	376.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					125.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	17	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	7	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	436.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					623.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	105	623.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	22	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	70	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				125.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				245.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	245.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				175.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.133.100.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					470.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	470.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					46.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	31	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					463.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	463.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				255.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	143.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.300.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	Unit	24	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	10	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.251.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					497.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	497.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					392.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	392.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.366.500.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					428.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	2	428.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	8	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Paket	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Paket	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.270.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	3.270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				220.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	13	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					883.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	883.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					785.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	280	785.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				48.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	210	127.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				60.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				240.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.795.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					471.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	471.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					204.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	24	204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				61.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				143.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	11	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	600.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				364.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	364.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					470.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	470.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.302.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					448.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	448.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.130.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	2.130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000.000		
					Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					434.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3		434.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4		240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				188.000.000		
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2		188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					265.000.000		
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5		265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
					Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	40		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2		150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		1.772.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
					Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	100		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
					Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					686.000.000		
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	1		686.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					521.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	521.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				265.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	335.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Unit	3	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.617.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					490.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	490.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					585.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	585.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				220.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				325.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.950.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				660.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	660.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.552.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	28	1.552.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.686.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					451.500.000		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	451.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				200.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	40	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				270.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					472.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	472.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	308.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.336.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					582.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	582.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					409.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	409.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.038.200.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					545.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	545.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	85	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				650.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	10	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.028.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.028.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				632.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	632.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.381.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.381.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.770.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	22	2.770.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.769.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					465.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	465.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					500.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					504.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	504.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				294.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	294.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.405.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					355.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					190.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					480.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	480.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				285.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	285.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.000.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					567.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	567.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.210.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	16	3.210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				70.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				340.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	2.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					603.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	21	603.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				258.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	258.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					620.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	146	620.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	22	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								158.541.855.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.28	158.541.855.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						158.541.855.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	158.541.855.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					158.541.855.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Angka	100	158.541.855.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				157.441.855.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	157.441.855.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	1.100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif									3.487.532.030.000		
						Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.96		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.14		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan								573.915.203.000		
						APK SMA, SMK dan SLB	%	83.29	573.915.203.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						571.545.203.000		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90.9	2.720.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	76.68	1.400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				1.200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	1.200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				200.000.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					700.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	91	700.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					620.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	90.08	620.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				420.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	420.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76.84	2.350.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					2.000.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	30.572	2.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				850.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	850.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				750.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				100.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					350.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	41.111	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	76.06	1.100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	72.4	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	90.15	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				100.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	86.69	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	25.85	5.902.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.307.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	73.7	1.307.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				679.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	679.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				216.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	108	216.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				212.000.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	212.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					4.287.500.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	0	4.287.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				660.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	240	660.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.000.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	2.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.627.500.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	1.627.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					308.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	0	308.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				208.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	208.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54.6	5.500.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					800.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	24.83	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				800.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					4.550.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	88.43	4.550.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	1.200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				500.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				450.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				800.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				1.600.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	8	1.600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	83.07	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	94.23	3.400.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					2.500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	69.37	2.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				1.400.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	1.400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					700.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	88.09	700.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				600.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	92.52	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	80.17	550.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	85	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					350.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	89	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72.84	1.100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					600.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	50.28	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				600.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	64.18	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				400.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	188.45	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77.25	4.050.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					2.400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	78.4	2.400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.250.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	1.250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labororium Fisika				300.000.000		
						Jumlah Labororium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labororium Kimia				300.000.000		
						Jumlah Labororium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	89.6	1.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				150.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				150.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				150.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				150.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				300.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	81.07	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				150.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	78.06	640.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					310.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	66.9	310.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				260.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				50.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					260.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	88.98	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				260.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					70.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	89.99	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				70.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	88.14	6.360.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					2.200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	82.96	2.200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				560.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	560.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				900.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				80.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				500.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				160.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	160.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					3.400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	84.96	3.400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				900.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				2.500.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	12	2.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					760.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	83.96	760.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				160.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	160.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				600.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	6	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81.4	3.625.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.525.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	75.3	1.525.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				875.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	875.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				400.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				250.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.000.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	91.5	2.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				400.000.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				250.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				400.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				800.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	93.5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				100.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88.26	400.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	75.26	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	84.77	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	13.16	18.950.881.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					18.950.881.000		
						Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	20	18.950.881.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.000.346.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	8	1.000.346.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.199.915.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.199.915.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				8.506.665.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	39	8.506.665.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.320.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	18	1.320.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.160.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	8	1.160.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0077			Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah				326.000.000		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	326.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				4.786.955.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	41	4.786.955.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				651.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	7	651.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	75	118.613.545.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					118.613.545.000		
						Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	570	118.613.545.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				909.610.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	909.610.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				6.369.910.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	51	6.369.910.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				34.352.680.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	189	34.352.680.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				5.728.642.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	23	5.728.642.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				248.667.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	248.667.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0028			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				2.642.788.000		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	11	2.642.788.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				17.820.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1203	17.820.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				30.600.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	175	30.600.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.319.664.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	23	2.319.664.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				3.325.740.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	11	3.325.740.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				14.295.844.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	12	14.295.844.000	Bidang Pembinaan SMA	
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	65	309.447.666.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					309.447.666.000		
						Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan	Angka	213	309.447.666.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				18.745.500.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	15	18.745.500.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				7.873.300.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	21	7.873.300.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				2.203.000.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	14	2.203.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0007			Pembangunan Perpustakaan Sekolah				1.177.200.000		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	1.177.200.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				6.269.500.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	68	6.269.500.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium				113.400.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	113.400.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				12.703.643.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1002	12.703.643.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				255.650.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	229	255.650.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				962.120.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	962.120.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				3.750.003.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	29	3.750.003.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	15	17.590.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB	Angka	15	13.090.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0070			Pembangunan Ruang Kelas Baru				13.090.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	77	13.090.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB	Angka	2	4.500.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0001			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				4.500.000.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	4.500.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	36.86	29.616.861.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					29.616.861.000		
						Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru	Angka	27	9.616.861.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0072			Pembangunan Ruang Kelas Baru				9.616.861.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	27	9.616.861.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan	Angka	5	20.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				20.000.000.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	20.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0.6	39.628.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					39.628.750.000		
						Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK	Angka	71	25.056.750.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0064			Pembangunan Ruang Kelas Baru				25.056.750.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	71	25.056.750.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK	Angka	3	14.572.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				14.572.000.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3	14.572.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						1.250.000.000		
						Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	78.2	1.250.000.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					1.250.000.000		
						Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Orang	24132	1.250.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.04.1.01.0001			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1.250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	4	1.250.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						1.120.000.000		
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	70.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					70.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	70.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.05.1.02.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	6	70.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	16	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					200.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	15	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	15	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	94.29	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					200.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen	75	200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	75	200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN I	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN II	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN II	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN II	Angka	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	55.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					45.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN III	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN III	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN III	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN IV	Dokumen		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN IV	Dokumen		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN IV	Dokumen		10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	50	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN IX	Dokumen	66	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX	Dokumen	154	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN IX	Dokumen	14	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3		10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	25		55.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						45.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN V	Dokumen	1		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN V	Dokumen	1		25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1		25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1		10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN V	Dokumen	1		10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100		50.000.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VI	Dokumen	1		20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen	Dokumen	1		20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VI	Dokumen	1		20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1		20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VI	Dokumen	1	10.000.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000		
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	50.000.000		
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VII	Dokumen	2	20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	20.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VII	Dokumen	2	20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	20.000.000		OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VII	Dokumen	2	10.000.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	10.000.000		OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VIII	Dokumen	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	35	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN X	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN X	Dokumen	0	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN X	Dokumen	0	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4.76	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XI	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	40.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XIII	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XIII	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XIII	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
	Meningkatnya mutu pendidikan								2.876.929.997.000		
						Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka	85.94	896.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						896.000.000		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89.56	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	45	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	126	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	8	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81.72	40.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					30.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	55	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	107	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					10.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				10.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	%	100	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83.77	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	45	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	0	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	70	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	7	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	0	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	82.27	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	0	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	86.35	95.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					80.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	66	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				40.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	154	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				40.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	14	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88.84	75.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					60.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	66	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	116	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				35.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	108	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Angka	32	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	29	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86.99	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	33	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	26	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejururan Yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	4	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	89.33	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	45	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	70	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	8	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89.53	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	33	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	20	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	14	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82.71	85.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					70.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	61	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				35.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	20	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	146	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				35.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	8	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83.77	96.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					81.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	41	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	112	56.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				56.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	56.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	4	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85.8	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	50	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	110	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	4	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86.56	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					40.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	56	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	80	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					10.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	8	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				10.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka	67.25	2.876.033.997.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.876.033.997.000		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68.18	1.750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.750.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional	Angka	15	1.750.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.750.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	1.750.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	56	3.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					3.000.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional	Angka	93	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				3.000.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	93	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1.7	350.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					150.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	9	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	50	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	17	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	340.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					150.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	3	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	150	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					150.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	150	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					40.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				40.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2.89	370.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					115.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	7	115.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				115.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	115.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					170.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	15	170.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				170.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	170.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					85.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	2	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				85.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1.5	375.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	3	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				200.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	134	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	0	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	87	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	28	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3.24	510.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	0.53	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				200.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					250.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	5.7	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				250.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					60.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	2.82	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				60.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	10	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1.93	475.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	9	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				200.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					200.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	3	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				200.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	6	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Unit	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	93	250.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	21	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	132	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	21	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	7	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	35	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2.75	180.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	22	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	8	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					30.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	7	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				30.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2.3	190.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	8	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					40.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	6	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				40.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	32.14	250.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	146	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					50.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4.84	505.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					180.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	7	180.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				180.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	35	180.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					250.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	6	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	40	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	16	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	2.08	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA	Siswa	32	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	22	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2.53	420.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					110.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	12	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				110.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	5	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					200.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				200.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	3	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					110.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				110.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	3	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	58.82	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.300.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional	Angka	2256	2.300.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				2.300.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2420	2.300.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	20	1.300.000.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					575.000.000		
						Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	5000	575.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0057			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				575.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	5000	575.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					575.000.000		
						Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	9000	575.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0050			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				575.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	9000	575.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	550	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0056			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	550	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	84.1	4.599.716.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.000.000.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi	Angka	13996	1.000.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
		1.01.02.1.01.0051			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.000.000.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	13996	1.000.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					3.399.716.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi	Angka	955	3.399.716.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0043			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.200.000.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	955	3.200.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				199.716.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	105	199.716.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					200.000.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi	Angka	725	200.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0050			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				200.000.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	725	200.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%	0.95	80.089.269.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					30.522.003.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	6	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				200.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	44120	30.247.003.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				30.247.003.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	27	30.247.003.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	14158	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	98	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					45.741.241.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	681200	45.666.241.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				45.666.241.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	134	45.666.241.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	681200	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	125	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.826.025.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	1930	3.791.025.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.791.025.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	25	3.791.025.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	4704	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	27	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40.41	42.701.729.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					20.161.989.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	22	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	344	20.031.989.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				20.031.989.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	20.031.989.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	8932	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				100.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					20.493.122.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	456	20.363.122.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.363.122.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	20.363.122.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	11634	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				100.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.046.618.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	2	10.000.000		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	10.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	52	2.001.618.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.001.618.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	2.001.618.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	136	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69.9	56.181.839.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.543.169.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	24	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				85.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	35163	22.383.169.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.383.169.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	56	22.383.169.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III	Siswa	10945	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					30.523.049.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	104	125.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				125.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	125.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	54427	30.323.049.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				30.323.049.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	101	30.323.049.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	9079	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.115.621.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	11	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	1749	3.050.621.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.050.621.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	3.050.621.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	375	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	71.25	34.474.832.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					12.552.268.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	3	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	27337	12.442.268.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				12.442.268.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	58	12.442.268.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	8556	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				95.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	58	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					20.591.348.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	111	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	0	20.501.348.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.501.348.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	111	20.501.348.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	0	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	111	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.331.216.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	1013	1.271.216.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.271.216.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	1.271.216.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	177	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	11	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79.2	83.874.532.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					27.021.815.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	68	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				40.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	13.227	26.831.815.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				26.831.815.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	26.831.815.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	13.227	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				150.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					54.046.637.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	154	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				40.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	91.092	53.806.637.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				53.806.637.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	53.806.637.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	91.092	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				200.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.806.080.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	14	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	2.009	2.761.080.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.761.080.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	2.761.080.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	2.009	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78.9	48.872.998.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.452.738.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	62	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				75.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30217	19.302.738.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.302.738.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	19.302.738.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	11531	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					27.877.648.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	109	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				75.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30843	27.727.648.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				27.727.648.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	27.727.648.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	10645	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.542.612.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	32	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	314	1.457.612.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.457.612.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	1.457.612.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	100	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	93	51.681.533.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.983.999.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	15	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	27992	16.878.999.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.878.999.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	33	16.878.999.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	11853	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	33	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					31.909.968.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	15	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	29182	31.804.968.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				31.804.968.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	27	31.804.968.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	22630	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	27	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.787.566.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	5	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	886	2.732.566.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.732.566.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	2.732.566.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	175	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85.6	32.958.252.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.628.667.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	30638	13.553.667.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.553.667.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	13.553.667.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10507	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					17.353.021.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	41457	17.278.021.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				17.278.021.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	17.278.021.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10507	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.976.564.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	518	1.941.564.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.941.564.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	1.941.564.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	448	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76.13	47.098.071.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					21.918.245.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Siswa	36385	21.843.245.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				21.843.245.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	21.843.245.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	11520	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					23.959.389.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	60855	23.884.389.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				23.884.389.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	23.884.389.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	19630	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.220.437.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	1505	1.185.437.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.185.437.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	1.185.437.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	446	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	85.17	58.916.701.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					25.246.549.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	80	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	39788	25.096.549.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				25.096.549.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	79	25.096.549.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	40580	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				100.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	79	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					32.093.597.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	147	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	90481	31.943.597.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				31.943.597.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	31.943.597.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	92137	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				100.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.576.555.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	11	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	1622	1.529.055.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.529.055.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	8	1.529.055.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	1721	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				40.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	8	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	48.73	31.928.968.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.903.618.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	28183	13.778.618.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.778.618.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	42	13.778.618.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	9099	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	42	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					16.968.621.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	8	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				100.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	54637	16.718.621.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				16.718.621.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	111	16.718.621.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	16406	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				150.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	111	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.056.729.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				25.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	644	991.729.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				991.729.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	991.729.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	165	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				40.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	83	56.377.959.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.957.047.000		
						Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	65	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	34989	19.840.047.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.840.047.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	65	19.840.047.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	11663	67.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				67.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	65	67.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					34.125.815.000		
						Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	146	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	93058	34.008.815.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.008.815.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	34.008.815.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	31020	67.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				67.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	67.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.295.097.000		
						Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	Unit	5	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	1700	2.272.597.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.272.597.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	5	2.272.597.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	566	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	5	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79.5	43.211.837.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					17.819.076.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	24800	17.744.076.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				17.744.076.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	57	17.744.076.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	8050	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	57	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					23.420.312.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	46700	23.345.312.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				23.345.312.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	89	23.345.312.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	14040	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	89	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.972.449.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	1410	1.922.449.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.922.449.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	9	1.922.449.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	325	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	9	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	20	1.200.000.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					400.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	171	400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0058			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				400.000.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Paket	11	400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					500.000.000		
						Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	319	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0051			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				500.000.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Paket	20	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					300.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	38	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0057			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				300.000.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Paket	9	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	85.675.947.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					85.675.947.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SLB	Angka	21733	83.429.585.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				83.429.585.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Siswa	188	83.429.585.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	5	2.246.362.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.076.362.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	30	2.076.362.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				170.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	190	170.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67.8	731.070.509.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					731.070.509.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SMA	Siswa	426470	706.100.384.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				706.100.384.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Siswa	876	706.100.384.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	2	24.970.125.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				24.570.125.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	876	24.570.125.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				400.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	5	400.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	53.49	1.372.279.305.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.372.279.305.000		
						Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK	Siswa	1276225	1.318.196.111.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.318.196.111.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Unit	1547	1.318.196.111.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	Angka	1547	54.083.194.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				53.333.194.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1547	53.333.194.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0072			Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				750.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1593	750.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun								36.686.830.000		
						Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka	70.97	36.686.830.000		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						36.686.830.000		
						Persentase angka putus sekolah SLB	%	3.2	3.181.880.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.181.880.000		
						Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB	Kegiatan	6	776.880.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0059			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				776.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	10	776.880.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	0	2.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				2.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	2000	2.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
						Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	4481	405.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0038			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				405.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2700	405.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMA	%	2.28	13.667.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.667.000.000		
						Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA	Kegiatan	1	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0060			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin	Siswa	38995	13.467.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0039			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				4.947.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	32985	4.947.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				8.520.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	6010	8.520.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMK	%	0.024	19.837.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					19.837.950.000		
						Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK	Kegiatan	4	200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0053			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi
						Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	57257	19.637.950.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0031			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.537.950.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	50253	7.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				7.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	7000	7.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0060			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				5.100.000.000		
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	225	5.100.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi
Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat									36.306.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Angka Melek Budaya	%	53.82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan								23.196.000.000		
						Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31.7	23.196.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						500.000.000		
						Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	52.38	500.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		
						Persentase SDM Kebudayaan berkompeten	%	6.46	500.000.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	2134	500.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						22.696.000.000		
						Tingkat partisipasi seni tradisi	%	11.1	22.696.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					22.696.000.000		
						Persentase Lembaga Seni aktif berkarya	%	26.74	22.696.000.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.03.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				22.696.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	814	22.696.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
	Meningkatnya pelestarian budaya								9.130.000.000		
						Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16.89	9.130.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						4.380.000.000		
						Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	2.750.000.000		
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					2.750.000.000		
						Jumlah kelompok seni yang difasilitasi	Kelompok	275	2.750.000.000		
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				2.750.000.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jenis	22	2.750.000.000		OPD Provinsi
						Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	20.78	1.630.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.630.000.000		
						Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional	%	69.05	1.630.000.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.630.000.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan	Buah	29	1.630.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1.000.000.000		
						Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	13.15	1.000.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					300.000.000		
						Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi	%	8.77	300.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.01.000			Penetapan Cagar Budaya				300.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Buah	249	300.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					700.000.000		
						Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya	%	93.23	700.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.000			Pemanfaatan Cagar Budaya				700.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Buah	27	700.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						3.750.000.000		
						Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89.9	3.750.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				Pengelolaan Museum Provinsi					3.750.000.000		
						Jumlah pengunjung museum	Orang	57500	3.750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				1.200.000.000		
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Buah	2000	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				2.000.000.000		
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan	7	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				550.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	4	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan								3.980.000.000		
						Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	23.44	3.980.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.700.000.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	26.16	2.700.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.700.000.000		
						Persentase OPK yang Berdaya	%	25.35	2.700.000.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2.700.000.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Buah	159	2.700.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						955.000.000		
						Persentase akses literasi sejarah	%	53.1	955.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					955.000.000		
						Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia)	%	53.1	955.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.04.1.01.0003			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				605.000.000		
						Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat	Dokumen	540	605.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				350.000.000		
						Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	173	350.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						325.000.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	26.73	325.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					325.000.000		
						Persentase cagar budaya layak uji peringkat	%	8.55	325.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.05.1.02.0001			Pelindungan Cagar Budaya				160.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Buah	281	160.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya				165.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Buah	13	165.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
JUMLAH									8.813.491.843.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									382.717.069.000	Dinas Kesehatan	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN.								372.491.402.000		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	51.69	372.491.402.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						371.241.008.000		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	68.5	349.792.253.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000		
						Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100	700.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				700.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	1	700.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					348.592.253.000		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar	%	99.49	347.877.080.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				347.877.080.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20	347.877.080.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	%	67.61	221.410.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				21.410.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	21.410.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0020			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	25	200.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan	%	68.5	493.763.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				493.763.000		
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	27	493.763.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		
						Prosentase RS kelas B dan fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar	%	100	500.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				200.000.000		
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	5	200.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				300.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	250	300.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	85	8.989.130.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					8.989.130.000		
						Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin	%	85	8.989.130.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.0025			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				50.000.000		
						Jumlah dokumen distribusi alkes, obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	Dokumen	2	50.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				8.939.130.000		
						Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan	Paket	8	8.939.130.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	703.316.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					703.316.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	703.316.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				25.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	25.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				678.316.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	678.316.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	1.533.140.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					885.400.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	885.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				273.000.000		
						Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	2	273.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				62.400.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	62.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				550.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	550.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					647.740.000		
						Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas	Angka	87	647.740.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				647.740.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	4	647.740.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	1.435.890.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					884.800.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	884.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				144.800.000		
						Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	1	144.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				40.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	40.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				700.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	700.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					551.090.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	88	551.090.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				551.090.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	551.090.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	1.788.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					851.410.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	851.410.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				147.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	4	147.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				704.410.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	704.410.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					936.590.000		
						Angka Kepuasan Pasien di balkesmas	Angka	84.5	936.590.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				936.590.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	936.590.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	739.690.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					565.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	565.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				65.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	65.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				500.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	500.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					174.690.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	88	174.690.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				174.690.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	174.690.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	85	2.207.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.000.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM	%	85	2.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				100.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	100.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.900.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	1.900.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					207.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di BKIM	%	86	207.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				207.000.000		
						Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM	Angka	3	207.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	100	3.652.589.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.124.150.000		
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi	%	100	3.124.150.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				624.150.000		
						Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara	Unit	6	624.150.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.500.000.000		
						Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	15	2.500.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					528.439.000		
						angka kepuasan pelanggan	Angka	91	528.439.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				528.439.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	5	528.439.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	85	400.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					400.000.000		
						Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	%	100	400.000.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				400.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	8	400.000.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						950.000.000		
						Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	500.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		
						Persentase SDMk yang kompeten dan bermutu	%	90	500.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK	Dokumen	6	500.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	450.000.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					450.000.000		
						Persentase pelatihan yang sesuai standart	%	98	450.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				450.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	690	450.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						300.394.000		
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	80	300.394.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					300.394.000		
						Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	%	85	300.394.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				300.394.000		
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Angka	95	300.394.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP								3.634.742.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	74.28	50.242.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						50.242.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	74.28	50.242.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					50.242.000		
						Prosentase Kab Kota Dengan pelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70%	%	74.27	50.242.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				50.242.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	2	50.242.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	3.584.500.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.252.530.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	40	1.252.530.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.252.530.000		
						Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik	%	57.14	200.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Dokumen	4	200.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase kab kota dengan kesling yang baik	%	62.86	500.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				500.000.000		
						Jumlah dokumen has?l pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	4	500.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70%	%	60	75.645.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				75.645.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2	75.645.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70%	%	71.42	476.885.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				476.885.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	476.885.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.331.970.000		
						Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	85.71	668.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					400.000.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas	%	85.71	400.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				400.000.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	400.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					268.000.000		
						Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah	%	25.71	268.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				268.000.000		
						Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Dokumen	12	268.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.85	332.744.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					332.744.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	Kabupaten/Kota	3	332.744.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				332.744.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	3	332.744.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.86	324.794.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					324.794.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	42.86	324.794.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				324.794.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	324.794.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57.14	336.344.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					336.344.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	6	336.344.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				336.344.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	336.344.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.86	324.344.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					324.344.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	42.86	324.344.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				324.344.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	324.344.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57.14	345.744.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					345.744.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	42.86	345.744.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				345.744.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	345.744.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA								4.378.375.000		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	1.210.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.210.000.000		
						Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	1.210.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.210.000.000		
						Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	%	99	666.450.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				666.450.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	4	666.450.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan	%	100	543.550.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				265.000.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	Orang	30000	265.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				278.550.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar	Orang	1882	278.550.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	82	3.168.375.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						3.168.375.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	74.3	695.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					695.000.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB	%	40	695.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				695.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	9	695.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	74.3	600.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					600.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa	%	74.3	600.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				400.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	5	400.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				200.000.000		
						Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2	200.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	85.71	901.185.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					243.495.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	243.495.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				50.080.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	500	50.080.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				193.415.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	193.415.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					657.690.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	86.75	657.690.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				657.690.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	657.690.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	42.86	227.275.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					227.275.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	227.275.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				43.080.000		

					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	500		43.080.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				184.195.000		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4		184.195.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	71.42		242.385.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					242.385.000		
					Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100		242.385.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				50.080.000		
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	500		50.080.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				192.305.000		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2		192.305.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	42.86		234.635.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					234.635.000		
					Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100		234.635.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				44.830.000		
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	500		44.830.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				189.805.000		
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4		189.805.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
					Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	71.42		267.895.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					267.895.000		
					Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100		267.895.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				64.080.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	500	64.080.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				203.815.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	203.815.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
	MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI								2.212.550.000		
						Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	85	2.212.550.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.212.550.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	57.14	1.888.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.888.000.000		
						Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30%	%	85.71	1.888.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.888.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	1.888.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.85	64.630.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					64.630.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/ Kota	3	64.630.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				64.630.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	64.630.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.86	62.530.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					62.530.000		
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/ Kota	3	62.530.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				62.530.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	62.530.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57.14	64.630.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					64.630.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/ Kota	3	64.630.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				64.630.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	64.630.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.86	62.530.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					62.530.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/Kota	3	62.530.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				62.530.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	62.530.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	57.14	70.230.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					70.230.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	3	70.230.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				70.230.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	70.230.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									146.239.428.000	Dinas Kesehatan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								145.449.986.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	145.449.986.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						145.449.986.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.822.642.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.330.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	3.330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.330.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	3.330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					318.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	318.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan	Unit	4	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.678.842.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.678.842.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.272.642.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	1.272.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.404.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.404.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					375.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						JUmlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.376.923.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					750.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				750.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					202.893.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	202.893.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.093.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	113.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.239.044.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.239.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					310.544.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		310.544.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					927.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12		927.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.986.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4		159.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					41.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11		41.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					15.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					73.086.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		73.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		6.359.200.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.560.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4		2.560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.560.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4		2.560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						349.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		349.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					85.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4		85.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					90.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4		90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				120.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.550.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.550.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				112.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	112.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.062.870.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	1.062.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.374.830.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.374.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	699.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		
						Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	Unit	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				224.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	224.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.456.610.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					398.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	398.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.292.810.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.292.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				784.110.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	784.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.507.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.507.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	765.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	75.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	7	70.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	120.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	100.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.592.244.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.000.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					223.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	223.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					978.444.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	978.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				309.444.000		
						Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun	Laporan	4	309.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				668.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	668.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					340.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	148	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	16	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	114.976.924.000	SEKRETARIAT	
									101.599.797.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	101.599.797.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.801.797.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	540	100.801.797.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				700.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	700.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				48.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	4	48.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					417.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	417.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				167.200.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	6	167.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.346.293.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.346.293.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	24.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				91.443.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	91.443.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.575.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	2.575.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	18	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.525.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	2.525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.578.934.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	6.578.934.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.850.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	1.850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	91.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.622.234.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4.622.234.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.359.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	2.359.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				517.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	517.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	250.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.342.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1.342.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.650.492.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					960.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	960.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				960.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	960.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					280.350.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	280.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	26.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.107.542.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.107.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				332.192.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	332.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				774.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	774.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	252.600.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	70.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	93	62.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.308.426.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.500.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					206.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	206.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> DESA BEJALEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					78.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	78.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.400.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	38.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.315.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.315.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				444.476.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	444.476.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				869.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	869.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					208.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	208.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	64.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	170	36.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.906.525.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					900.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				900.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Dokumen	4	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	261.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	93.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.800.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.534.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.534.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				420.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	420.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.112.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.112.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.425.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	170.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.625.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	35.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.800.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								789.442.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.95	789.442.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						789.442.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	75	789.442.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					789.442.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	95	789.442.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				616.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	616.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				173.442.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	173.442.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									528.956.497.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									1.063.695.115.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								1.063.695.115.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	1.063.695.115.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.063.695.115.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	930.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					930.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				930.000.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	930.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	133.695.115.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					133.695.115.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	133.695.115.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				133.695.115.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	1450	133.695.115.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									1.063.695.115.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									720.008.305.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								720.008.305.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	720.008.305.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						720.008.305.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	83	636.800.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					636.800.000.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	97	636.800.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				636.800.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	636.800.000.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	83.208.305.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					83.208.305.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	83.208.305.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				83.208.305.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	823	83.208.305.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi
JUMLAH									720.008.305.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									308.639.199.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								308.639.199.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	308.639.199.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						308.639.199.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	49.91	201.500.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					201.500.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	71.6	201.500.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				201.500.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	6	201.500.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	107.139.199.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					107.139.199.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	107.139.199.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				107.139.199.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	873	107.139.199.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									308.639.199.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									1.300.000.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO								1.300.000.000		
						Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	89	1.300.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						959.000.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	959.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					959.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	959.000.000		
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				959.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	959.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						101.000.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	%	35	101.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					101.000.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5	101.000.000		
		1.02.03.1.02.000 1			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				101.000.000		
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	100	101.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						240.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	240.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					240.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	12	240.000.000		
		1.02.05.1.01.000 1			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				240.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4		240.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										105.744.642.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90				
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									105.744.642.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91		105.744.642.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							105.744.642.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	40		59.950.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD						59.950.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89		59.950.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					59.950.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	4		59.950.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		45.794.642.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.794.642.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14		45.794.642.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					45.794.642.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	302		45.794.642.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH									107.044.642.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									24.371.656.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO								24.371.656.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	24.371.656.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						24.200.000.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	200.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	200.000.000		
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				200.000.000		
						Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Dokumen	12	200.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	24.000.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					24.000.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	24.000.000.000		
		1.02.02.1.01.001 0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				24.000.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	24.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						171.656.000		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	171.656.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					171.656.000		
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping	Kegiatan	3	84.456.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				84.456.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	84.456.000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD	Kegiatan	1	87.200.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				87.200.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	87.200.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									135.157.078.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								135.157.078.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	135.157.078.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						135.157.078.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	57.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					57.000.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	65.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				65.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	56.935.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				56.935.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	56.880.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	78.157.078.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.157.078.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	78.157.078.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				78.157.078.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	520	78.157.078.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									159.528.734.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									470.000.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA								470.000.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	96.58	470.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						470.000.000		
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	470.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					470.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	470.000.000		
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				470.000.000		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	470.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									128.093.962.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								128.093.962.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	128.093.962.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						128.093.962.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	54.500.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					54.500.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95	54.500.000.000		
		X.XX.01.1.10.000 1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				54.500.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	54.500.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	73.593.962.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					73.593.962.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	73.593.962.000		
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				73.593.962.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	449	73.593.962.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									128.563.962.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									480.000.000		
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.92			
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. SOEDJARWADI								480.000.000		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	98	480.000.000		
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						100.000.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	70	100.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		
						Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	Kegiatan	10	100.000.000		
		1.02.03.1.02.000 1			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				100.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	300	100.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						380.000.000		
						Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	148.920.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					148.920.000		
						Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	2	148.920.000		
		1.02.05.1.01.000 1			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				148.920.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2	148.920.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	231.080.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					231.080.000		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	7	231.080.000		
		1.02.05.1.01.000 1			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				231.080.000		

						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	7	231.080.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									106.066.374.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								106.066.374.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	106.066.374.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						106.066.374.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	45.6	50.500.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					50.500.000.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	97	50.500.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				50.500.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	50.500.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	55.566.374.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					55.566.374.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	55.566.374.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				55.566.374.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	365	55.566.374.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH									106.546.374.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi									129.159.390.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap	%	68.01		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor								36.751.133.000		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	46.55	36.751.133.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						36.751.133.000		
						Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	3.124.106.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.124.106.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	5	3.124.106.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.0041			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.049.553.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Dokumen	1	2.049.553.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.074.553.000		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	3	1.074.553.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	45.07	6.134.770.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.134.770.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Km	0.5	6.134.770.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				6.134.770.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat	Km	0.5	6.134.770.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	47.91	11.651.615.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					11.651.615.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Km	1.5	11.651.615.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				11.651.615.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur	Km	1.5	11.651.615.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase panjang jalan yang dileger	%	77.26	109.835.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					109.835.000		
		1.03.10.1.01.004			Pengelolaan Leger Jalan				109.835.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	109.835.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	18.07	4.807.161.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.807.161.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Unit	45	4.807.161.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				4.807.161.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	9	135.000.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	36	1.872.441.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Unit	3550	2.799.720.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	9.140.955.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					9.140.955.000		
						Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	Dokumen	2	5.750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				5.750.000.000		
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	100	5.750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
						Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan	Dokumen	13	3.390.955.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
		1.03.10.1.01.0024			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				347.760.000		
						Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	Dokumen	1	347.760.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				780.165.000		
						Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	m	35	780.165.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				2.263.030.000		
						Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Km	0.45	2.263.030.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	73.04	1.782.691.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.782.691.000		
						Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	Sertifikat	1420	1.782.691.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
		1.03.10.1.01.0028			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1.782.691.000		
						Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2	452.325.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah pemeliharaan alat uji	Unit	116	215.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	65	680.628.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Sertifikat	1420	434.738.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap								92.408.257.000		
						Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	83.38	15.103.848.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						15.103.848.000		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	87.57	1.473.535.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.473.535.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	m	2562.67	1.473.535.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.473.535.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap	m	2562.67	1.473.535.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	71.44	1.411.740.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.411.740.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	m	2455.2	1.411.740.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.411.740.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang	m	2455.2	1.411.740.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	87.66	1.565.725.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.565.725.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	m	2723	1.565.725.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.565.725.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati	m	2723	1.565.725.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	86.19	1.922.633.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.922.633.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	m	3343.71	1.922.633.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.922.633.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan	m	3343.71	1.922.633.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	67.34	2.074.025.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.074.025.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	m	3607	2.074.025.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.074.025.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi	m	3607	2.074.025.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85.47	1.421.175.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.421.175.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	m	2471.61	1.421.175.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.421.175.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang	m	2471.61	1.421.175.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	91.47	2.755.351.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.755.351.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	m	4791.92	2.755.351.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.755.351.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta	m	4791.915	2.755.351.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	77.37	1.245.076.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.245.076.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	m	2165.35	1.245.076.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.245.076.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal	m	2165.35	1.245.076.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	92.66	1.234.588.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.234.588.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	m	2147.11	1.234.588.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.234.588.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo	m	2147.11	1.234.588.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	89.46	77.304.409.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						77.304.409.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	90.1	6.469.435.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.469.435.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	205.75	6.469.435.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.469.435.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	Km	205.75	6.469.435.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	90.2	8.604.006.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					8.604.006.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	259.58	8.604.006.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.604.006.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Km	259.58	8.604.006.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	86.43	7.633.415.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.633.415.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	247.82	7.633.415.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.633.415.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	Km	247.82	7.633.415.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	89.44	9.091.504.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					9.091.504.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	255.46	9.091.504.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.091.504.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	255.46	9.091.504.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	87.39	8.478.269.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					8.478.269.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	384.14	8.478.269.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				1.745.000.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km	1	1.745.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.733.269.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	383.14	6.733.269.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	91.47	6.002.205.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.002.205.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	224.91	6.002.205.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.002.205.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	Km	224.91	6.002.205.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	89.45	14.428.510.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.428.510.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	415.98	14.428.510.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				14.428.510.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Km	415.981	14.428.510.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	91.57	5.983.333.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.983.333.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	197.56	5.983.333.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				5.983.333.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	Km	197.56	5.983.333.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	90.92	10.613.732.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.613.732.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	246.92	10.613.732.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				1.745.000.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	1	1.745.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.868.732.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	245.92	8.868.732.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									107.265.165.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	61		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								106.425.165.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92.25	106.425.165.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						106.425.165.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.571.277.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					335.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	335.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	720	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	190.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					835.577.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	835.577.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	126.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.000 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				702.517.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	702.517.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				160.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	39	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	89.838.538.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.368.668.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	45	77.368.668.000	SUBBAG KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				74.915.428.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	440	74.915.428.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.013.240.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.013.240.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				440.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	19	440.000.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					350.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	350.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				350.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	350.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					193.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	193.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				193.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	440	193.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.788.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.788.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	116.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				361.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	361.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				84.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	84.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				21.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2172	21.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.037.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.037.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				77.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	77.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				72.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	72.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.371.613.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	298	1.371.613.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				378.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	9	378.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				240.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	240	240.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				753.613.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	49	753.613.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.318.157.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	50	5.318.157.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	24.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.800.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.800.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.494.157.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	26	3.494.157.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.448.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	155	2.448.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.233.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	1.233.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	600.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				615.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	124	615.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.234.042.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					249.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	249.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					589.542.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	589.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				464.042.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	464.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					395.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	74	395.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				195.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	18	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.943.773.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					327.188.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	327.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.025.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.255.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				166.208.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	166.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.310.325.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.310.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.940.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	248.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.059.385.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	1.059.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					306.260.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	65	306.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.480.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	117.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.780.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	88.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.248.811.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					355.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	355.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.331.165.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.331.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				242.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	242.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.083.165.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	1.083.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562.146.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	562.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				137.830.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	137.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				74.316.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	36	74.316.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.091.326.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					247.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	247.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				36.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					490.716.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	490.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				411.216.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	411.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.110.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	35	353.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.660.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	165.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.450.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	26	37.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	877.790.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	153.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.300.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.600.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	38.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.300.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89.700.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	89.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					542.490.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	542.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	94.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				446.890.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	446.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	182.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	41	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.021.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					373.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	373.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				48.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				231.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	231.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.187.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.187.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				992.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	992.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					461.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	132	461.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	118	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.523.028.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					235.330.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	235.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.680.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.550.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.150.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	30.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	384	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.700.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	106.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					723.663.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	723.663.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	173.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				541.863.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	541.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					564.035.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	58	564.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.885.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	165.885.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.150.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	48.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.217.270.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					314.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	314.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				41.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				188.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					524.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	524.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	102.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.970.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	414.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					378.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	378.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	24	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.491.250.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					349.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	349.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	702	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					686.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	686.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				573.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	573.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					455.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	70	455.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	118.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				87.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	87.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.366.860.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					274.181.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	274.181.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.699.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.159.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	36.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.664.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	11.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				36.159.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	36.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					610.288.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	610.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.832.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				112.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.456.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	492.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					482.391.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	98	482.391.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				139.968.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	139.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.423.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	91	42.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								840.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.11	840.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						840.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	840.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					840.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	840.000.000	SUBBAG PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				520.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	21	520.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	45	320.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (IRB)									43.502.244.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	39.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah								43.502.244.000		
						Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	61.65	43.502.244.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						38.166.603.000		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5.83	37.917.050.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					37.917.050.000		
						Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	Lokasi	60	37.917.050.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.0012			Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				150.000.000		
						Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat	Orang	160	100.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	Orang	80	50.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.0018			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				180.000.000		
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	180.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				37.587.050.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	4	37.587.050.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
						Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	12.23	249.553.000		
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					249.553.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n	Lokasi	126	249.553.000		
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				249.553.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	Dokumen	1	249.553.000		OPD Provinsi
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						5.335.641.000		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	66.67	200.000.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					200.000.000		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.11.1.01.0012			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200.000.000		
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	320	200.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	48.42	5.135.641.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					3.842.143.000		
						Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	Orang	11779	3.842.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.01.0011			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				2.065.143.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Orang	2000	2.065.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0014			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.777.000.000		
						Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	1200	1.777.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					807.500.000		
						Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan	5	807.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.02.0008			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				682.500.000		
						Jumlah Data Dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	2	247.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	125	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	4	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				125.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	80	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					485.998.000		
						Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	1	485.998.000		
		1.03.11.1.03.0006			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				485.998.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	4	485.998.000		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (LH)									10.461.088.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	39.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								10.461.088.000		
						Persentase akses air minum aman	%	42.93	10.461.088.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						10.461.088.000		
						Persentase akses air minum layak	%	93.94	2.095.657.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					2.095.657.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	Orang	34502341	2.095.657.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.453.657.000		
						Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	Dokumen	6	1.453.657.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.03.1.01.0016			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				642.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	15	642.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	8.365.431.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					8.365.431.000		
						Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Liter	3.5	8.365.431.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				8.365.431.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	3.5	8.365.431.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)									7.132.070.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	39.03		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman								674.105.000		
						Persentase akses air limbah domestik aman	%	12.5	674.105.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						674.105.000		
						Persentase akses air limbah domestik layak	%	95.18	674.105.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					674.105.000		
						Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	Orang	35500068	674.105.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
		1.03.05.1.01.0014			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				674.105.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	12	674.105.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								6.457.965.000		
						Persentase akses air minum aman	%	42.93	6.457.965.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						6.457.965.000		
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	57.82	6.457.965.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					6.457.965.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Orang	21236165	6.457.965.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				6.457.965.000		
						Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	Lokasi	12	6.457.965.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
JUMLAH									297.519.957.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									95.745.414.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
						Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	31.5		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								94.845.414.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	94.845.414.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						94.845.414.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	644.542.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.698.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.514.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	23.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.584.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.584.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					278.249.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	278.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				849.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	169.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					295.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	295.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.752.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	24	142.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.493.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	106.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	46.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	695.522.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	68.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.128.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	19.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.041.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.061.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.130.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	6	11.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.790.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	19.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					253.665.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	253.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				912.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				166.425.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	166.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.328.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	86.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					373.707.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	90	373.707.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	146.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	127.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.257.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	67	100.257.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	445.053.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.266.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.575.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	17.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.825.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	14	13.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.353.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3	6.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.313.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	37.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.138.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	15	175.138.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				838.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				104.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	104.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					192.649.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	32	192.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	74.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.349.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	48.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	601.087.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.672.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.392.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	10	8.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.179.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	25	203.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.179.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				142.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	142.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					325.236.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	325.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.026.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	106.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.210.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	31	54.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	557.083.000	Balai PSDA Serayu Citanduy	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.561.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.672.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	19.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.809.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.380.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	8.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	46.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					253.558.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	253.558.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				958.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	135.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.964.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	210.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.580.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	117.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.668.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	22.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.716.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	70.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal	%	100	944.695.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.900.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	34.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					433.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	433.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				257.780.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	257.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					405.815.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	83	405.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				223.420.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	223.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.395.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	62.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	90.957.432.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					81.478.881.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	81.478.881.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				80.011.809.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	500	80.011.809.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.467.072.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	1.467.072.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					383.500.000		
						Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	383.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				383.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	383.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					461.632.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	461.632.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				269.292.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	269.292.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				92.340.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	350	92.340.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	90	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.609.339.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	77	1.609.339.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				495.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	495.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.944.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	133.944.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				47.350.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	47.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	8.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				72.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	72.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184.080.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	184.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				608.065.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	3	608.065.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.817.239.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	3.817.239.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				68.874.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	68.874.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				683.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	683.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.619.595.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.619.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				444.790.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	444.790.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.206.841.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	422	3.206.841.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.064.031.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	62	1.064.031.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.650.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				492.810.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	241	492.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								900.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	3.16	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						900.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	900.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					900.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah									89.853.180.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
						Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang	Angka	63.08		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang								4.701.793.000		
						Persentase keterwujudan penataan ruang	%	64.07	4.701.793.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						4.701.793.000		
						Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	76	888.000.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					888.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	6	888.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0004			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				709.696.000		
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	4	709.696.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.03.0006			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				178.304.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	2	178.304.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	68.21	1.963.564.000	Bidang Penataan Ruang	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					1.295.711.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	3	1.295.711.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.0006			Penetapan RTRW Provinsi				1.133.211.000		
						Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Dokumen	2	1.133.211.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.01.0009			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				162.500.000		
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	300	162.500.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					667.853.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	16	667.853.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.0008			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota				467.853.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	15	467.853.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.02.0013			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72.097.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					72.097.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.097.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96.321.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					96.321.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				96.321.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	97.638.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					97.638.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				97.638.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	72.961.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.961.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.961.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	76.171.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					76.171.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				76.171.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	67.200.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					67.200.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Dokumen	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				67.200.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib ruang	%	48	1.367.841.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					1.367.841.000		
						Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	505.874.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0006			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				231.848.000		
						Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	231.848.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.04.0007			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				274.026.000		
						Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	274.026.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	5	861.967.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				861.967.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	3	861.967.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air								85.151.387.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	62.08	85.151.387.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						85.151.387.000		
						Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69.11	5.766.639.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.766.639.000		
						Jumlah DI yang direhab	Unit	17	5.066.639.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.0014			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				5.066.639.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	1.7	5.066.639.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	3	700.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0037			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi				700.000.000		
						Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Unit	3	560.040.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	139.960.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67.36	8.596.296.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.596.296.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	73.01	8.596.296.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				8.596.296.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo	Km	14.66	8.596.296.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71.54	6.860.354.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.860.354.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	70.26	6.860.354.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.860.354.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	21.7	6.860.354.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62.68	7.631.399.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.631.399.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	60.33	7.631.399.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.631.399.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Km	202.39	7.631.399.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	60	4.478.486.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.478.486.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	60	4.478.486.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.478.486.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Km	134.51	4.478.486.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62.85	4.541.435.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.541.435.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	59.54	4.541.435.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.541.435.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Km	156.787	4.541.435.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72.65	5.580.793.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.580.793.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	72.65	5.580.793.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.580.793.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	Km	1.7	5.580.793.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64.31	1.634.241.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.634.241.000		
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Dokumen	2	134.241.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				134.241.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	134.241.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Dokumen	4	1.500.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	
		1.03.02.1.01.0075			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				1.500.000.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	381.363.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Laporan	2	1.118.637.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	1.615.000.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.615.000.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.615.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.615.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	1.615.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	1.536.532.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.536.532.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.536.532.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.536.532.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	5	1.536.532.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	2.587.324.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.587.324.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.587.324.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.587.324.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	5	2.587.324.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	1.150.000.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.150.000.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.150.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.150.000.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	5	1.150.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	1.370.663.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.370.663.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.370.663.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.370.663.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	5	1.370.663.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	1.144.140.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.144.140.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.144.140.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.144.140.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy	Dokumen	5	1.144.140.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	67.35	1.335.881.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.335.881.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	27.78	1.335.881.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.335.881.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Unit	13	1.335.881.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	63.64	649.991.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					649.991.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	9.09	649.991.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				649.991.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Unit	10	649.991.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34.78	1.530.000.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.530.000.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	1.530.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.530.000.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Unit	2	1.530.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92.23	332.993.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					332.993.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	332.993.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				332.993.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Unit	2	332.993.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	1.018.029.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.018.029.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	15	1.018.029.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.018.029.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Unit	3	1.018.029.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76.5	540.110.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					540.110.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	10	540.110.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				540.110.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Unit	3	540.110.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52.41	14.242.510.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					14.242.510.000		
						akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Km	1.8	4.000.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0079			Normalisasi/Restorasi Sungai				1.450.000.000		
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Km	1.1	1.450.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0118			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				2.550.000.000		
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0.7	2.550.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	742.510.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				742.510.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	4	742.510.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	2	9.500.000.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				9.500.000.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2	9.500.000.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50.08	2.719.855.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.719.855.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	2.719.855.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.719.855.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	1.2	2.719.855.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53.26	4.327.142.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.327.142.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	4.327.142.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.327.142.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	5	4.327.142.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	62.5	3.961.574.000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.396.574.000		
						Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	3	1.100.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				900.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	900.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0104			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				200.000.000		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	2	200.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	19	1.488.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0087			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				638.574.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	11	638.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0117			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				850.000.000		
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	850.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	9	808.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.0122			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				808.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen	1	808.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					565.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	5	565.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.0032			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				565.000.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	1	565.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									185.598.594.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat									29.735.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	60.22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	%	74.85		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat								25.490.000.000		
						Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	41.57	10.020.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						10.020.000.000		
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	6.64	10.020.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					70.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	2	70.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0011			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					70.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0001			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				70.000.000		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	200	70.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					4.380.000.000		
						Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Unit	170	4.380.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				3.200.000.000		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit	150	3.200.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				1.180.000.000		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit	20	1.180.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.500.000.000		
						Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	17000	5.500.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.0006			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				5.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	1	5.500.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	20.22	15.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						15.270.000.000		
						Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0.73	15.270.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					150.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0010			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	2	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					70.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	70.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0009			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				70.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	300	70.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					15.050.000.000		
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	340	15.050.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				15.050.000.000		
						Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	Unit	240	10.600.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	Unit	100	4.450.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						200.000.000		
						Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	200.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					200.000.000		
						Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				200.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1	200.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman								4.245.000.000		
						Persentase penurunan kawasan kumuh	%	39.78	4.245.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						3.765.000.000		
						Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	960.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					960.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				100.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	100.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	460.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.03.1.01.0008			Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP				310.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	310.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				150.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	150.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	400.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				400.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan	2	400.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	13.9	2.805.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					75.000.000		
						Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	75.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0018			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				75.000.000		
						Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	3	75.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					2.730.000.000		
						Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	690.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/						

		1.04.03.1.02.000 2			Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				690.000.000			
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3		690.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	Ha	50		2.040.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.000 3			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					140.000.000		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	584		140.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02.001 4			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.900.000.000		
						Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	50		1.900.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							480.000.000		
						Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	60		480.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						480.000.000		
						Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	2		480.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.000 2			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman					400.000.000		
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	1		400.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05.1.01.000 3			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman					80.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	2		80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										21.324.033.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									20.173.577.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83		20.173.577.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							20.173.577.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		20.173.577.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.229.577.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	15.229.577.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.724.577.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	77	14.724.577.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				420.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	420.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					175.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				155.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					110.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.020.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.020.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.120.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				370.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	370.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	84	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.829.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.829.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				479.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	479.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					720.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	267	720.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	25	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	135	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				340.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75	340.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								1.150.456.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.5	1.150.456.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.150.456.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.150.456.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.150.456.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.150.456.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				750.456.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	11	750.456.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan									1.475.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase reforma agraria yang difasilitasi	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum								380.000.000		
						Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	380.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						380.000.000		
						Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	380.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					380.000.000		
						Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	1	380.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
		2.10.03.1.01.000 1			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				380.000.000		
						Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	5	380.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
	Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah								1.095.000.000		
						Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	1.095.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						570.000.000		
						Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	570.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					570.000.000		
						Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	Dokumen	3	570.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.000 1			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				330.000.000		
						Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	Dokumen	1	280.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.04.1.01.000 2			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				240.000.000		
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	10	240.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						525.000.000		
						Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	525.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					525.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Lokasi	10	525.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.0002			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22	130.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah				395.000.000		
						Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Dokumen	2	5.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen	7	390.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									52.534.033.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE)									570.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	85		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah								570.000.000		
						Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka	6.2	570.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						570.000.000		
						Persentase penegakan produk hukum daerah	%	86.67	570.000.000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000		
						Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	%	100	100.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.01.001 5			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100.000		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100	100.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					481.400.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	Orang	200	151.700.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1.05.02.1.02.000 2			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				41.000.000		
						Jumlah pelanggar yang diawasi	Orang	100	41.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.000 3			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				110.700.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina	Orang	100	41.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub	Dokumen	4	69.700.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	%	100	329.700.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.02.000 1			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				2.000.000		
						jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	Orang	40	2.000.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.000 3			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				327.700.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak	Orang	50	327.700.000	SEKSI PENINDAKAN	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					88.500.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS	Dokumen	2	88.500.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.03.000 1			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				88.500.000		
						Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	80	88.500.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (RB)									1.618.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	85		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat								1.618.000.000		
						Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)	Angka	12.6	1.618.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.520.000.000		
						Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	56.07	500.000.000	Bidang Pembinaan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan	Kelompok	130	143.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				143.100.000		
						Jumlah Mitra trantib yang dibina	Kelompok	35	21.782.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina	Kelompok	95	121.318.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum	Kabupaten/ Kota	35	356.900.000	SEKSI KEWASPADAAN	
		1.05.02.1.01.0014			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				260.163.000		
						Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum	Orang	140	260.163.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				96.737.000		
						Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib	Dokumen	1	47.593.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini	Kasus	10	49.144.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	65.69	570.000.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					570.000.000		
						Jumlah penanganan gangguan tramtibum	Kegiatan	74	405.000.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				236.090.000		

						Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	Kegiatan	25	89.280.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP	Kegiatan	15	52.980.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah patroli pengendalian tramtibus	Kegiatan	24	93.830.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0019			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				168.910.000		
						Jumlah operasi penertiban trantibus (pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.)	Kegiatan	10	138.530.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unjuk rasa yang tertangani	%	100	30.380.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibus di Jawa Tengah	Kegiatan	16	165.000.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				125.020.000		
						Jumlah kawasan tertib yang dibina	Lokasi	7	73.750.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan trantibus	Orang	120	51.270.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0019			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				39.980.000		
						Jumlah penertiban PNS	Kegiatan	9	39.980.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	64.54	450.000.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					450.000.000		
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan	Kelompok	150	125.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.0016			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.000.000		
						Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas	Dokumen	2	125.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya	Kelompok	185	325.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.0018			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				325.000.000		
						Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	400	325.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						98.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	98.000.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					98.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	Kabupaten/Kota	35	98.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.04.1.01.0022			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				98.000.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1	98.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									18.538.991.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								18.381.991.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	18.381.991.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.381.991.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.381.991.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.450.444.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	13.450.444.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.158.444.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	73	13.158.444.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				282.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	282.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					180.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					795.647.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	795.647.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.147.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	125.147.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				430.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	430.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					654.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	654.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				639.500.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	639.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.520.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.520.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	305.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.212.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.212.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					681.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	681.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				370.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	370.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				196.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	196.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								157.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	157.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						157.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	157.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					157.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	157.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				98.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	98.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.500.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	58.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									20.726.991.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana									3.850.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.75		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan								1.425.000.000		
						Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka	0.54	1.425.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.425.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%	2.86	1.025.000.000	Bidang Logistik dan Peralatan	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					275.000.000		
						Persentase sarpras PB yang terpenuhi	%	100	275.000.000	SEKSI PERALATAN	
		1.05.03.1.02.0014			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				275.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	275.000.000	SEKSI PERALATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					750.000.000		
						Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi	%	100	750.000.000	SEKSI LOGISTIK	
		1.05.03.1.03.0004			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				750.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5000	750.000.000	SEKSI LOGISTIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan darurat bencana	%	100	400.000.000	Bidang Penanganan Darurat	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					75.000.000		
						Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya	%	100	75.000.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	
		1.05.03.1.02.0015			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				75.000.000		
						Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	50	75.000.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					225.000.000		
						Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	%	100	100.000.000		
		1.05.03.1.03.0002			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				100.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	35	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	125.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.03.0003			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	50.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03.0005			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	75.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100.000.000		
						Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah	%	100	100.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.04.0017			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	35	100.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan								2.225.000.000		
						Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	4.02	2.225.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.225.000.000		
						Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0.12	2.225.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					1.100.000.000		
						Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.01	1.100.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.01.0002			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				1.100.000.000		
						Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000	1.100.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					1.125.000.000		
						Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.23	450.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				300.000.000		
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Desa	15	300.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0016			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150.000.000		
						Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	150.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	5	675.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.0017			Penyusunan Rencana Kontijensi				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	75.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0019			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan	Laporan	1	100.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0021			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				500.000.000		
						Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana	Unit	77	500.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana								200.000.000		
						Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	100	200.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	200.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					200.000.000		
						Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana	%	100	50.000.000	SEKSI REHABILITASI	
		1.05.03.1.04.0019			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana	%	100	150.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.04.0020			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	50.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									14.373.940.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74.08			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								14.123.940.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	14.123.940.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.123.940.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	14.123.940.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.813.463.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	7.813.463.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.513.463.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	38	7.513.463.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	300.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	38	2.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	38	3.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					926.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	926.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	25.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	35.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	800.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.182.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	1.182.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.100.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1.100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disedikan	Unit	1	82.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.362.477.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	3.362.477.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.500.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	450.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.910.977.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.910.977.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					785.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	139	785.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	56	500.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	200.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75	35.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								250.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.13	250.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						250.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	250.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	250.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	150.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									18.223.940.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									158.281.087.000	Dinas Sosial	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	3.1		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan								12.800.000.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	%	0.34	12.800.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						12.800.000.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0.04	12.800.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					12.800.000.000		
						Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	Orang	400	1.800.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.000 2			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	400	1.800.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	Orang	800	5.540.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.000 3			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				5.540.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	10000	5.540.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	Orang	800	5.460.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.000 3			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				5.460.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	10000	5.460.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								11.181.000.000		
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15.41	11.181.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						10.721.000.000		
						Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15.41	10.721.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					250.000.000		
						Jumlah penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Dokumen	200	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	200	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					10.471.000.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	1552	9.171.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				250.000.000		
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	200	250.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				7.112.000.000		
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	1152	7.112.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.809.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.809.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
						Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Orang	2000	1.300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				1.300.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	2000	1.300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						460.000.000		
						Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	460.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					460.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	400	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				300.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	200	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	Unit	1	160.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				60.000.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	60.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran								57.297.160.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	2.26	57.297.160.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						57.297.160.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	2.26	57.297.160.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					57.297.160.000		
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	103528	57.297.160.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.0001			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				57.297.160.000		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	103528	57.297.160.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial								3.784.500.000		
						Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.11	3.784.500.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						200.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	200.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					200.000.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	200	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.0001			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				200.000.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						3.584.500.000		
						Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	3.584.500.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					3.584.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	2000	2.513.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.383.280.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	2000	1.383.280.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				300.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	2000	300.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				150.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	2000	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				379.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	2000	379.720.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				300.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	20000	300.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	2900	1.071.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				184.000.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	500	184.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				87.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	500	87.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				50.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	500	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				600.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	2900	600.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				150.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	500	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial								73.218.427.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.4	73.218.427.000	Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						72.868.427.000		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	3.84	9.010.490.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.589.900.000		
						Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	4200	2.589.900.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Permakanan				2.019.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	4200	2.019.900.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				200.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				370.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	370.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					5.213.240.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	3400	5.213.240.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.692.300.000		
						Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3400	1.692.300.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3.520.940.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	3.520.940.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					577.600.000		
						Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	800	577.600.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				577.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	800	577.600.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					629.750.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	500	629.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				354.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	500	354.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				275.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Dokumen	8	275.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0.13	2.015.400.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.345.270.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	200	159.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				64.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	64.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	32.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				25.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	25.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				37.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	200	1.186.070.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				959.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	959.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				199.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	199.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				27.120.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.120.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					670.130.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	124.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				81.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	81.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				12.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	545.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				68.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	68.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				9.880.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0.13	2.052.205.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.463.445.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	220	167.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				67.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	67.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	32.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				40.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	40.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	220	1.295.745.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.055.945.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.055.945.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				213.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	213.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				26.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	26.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					588.760.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	80	111.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				77.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	77.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				12.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				12.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	80	476.960.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				373.760.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	373.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				96.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	96.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0.21	3.219.478.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					653.400.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	100	91.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	100	562.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				86.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	86.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.566.078.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	390	269.075.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				92.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	380	92.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	390	54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				48.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	390	48.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				73.125.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	78	73.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	390	2.297.003.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.871.903.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	390	1.871.903.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				378.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	390	378.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				46.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	390	46.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.12	1.857.230.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.857.230.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	280	216.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				76.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	280	76.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				51.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	280	51.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				35.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	280	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				52.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	14	52.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	280	1.641.230.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.336.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	1.336.030.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				271.600.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	280	271.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				33.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	280	33.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.24	2.961.520.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.643.370.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	360	174.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				75.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	260	75.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				45.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	260	45.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				32.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	32.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				19.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	19.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	360	1.469.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.214.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	260	1.214.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				223.450.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	260	223.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				31.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	260	31.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.318.150.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	200	150.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				64.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	64.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	21.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				37.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	200	1.167.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				959.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	959.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				183.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	183.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.16	2.583.151.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					535.260.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	100	83.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	53.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	13.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	100	451.960.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				373.760.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	373.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				71.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	71.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.223.121.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	150	322.656.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				258.131.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	258.131.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				20.545.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	20.545.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				18.780.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	18.780.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	150	900.465.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				700.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	700.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				190.165.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	190.165.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	9.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					824.770.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	120	114.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	52.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				24.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	24.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				22.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	120	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	120	710.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				575.970.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	575.970.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				120.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	120.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	14.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.07	1.439.960.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.439.960.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	160	465.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				384.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	384.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				44.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	44.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	160	974.560.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				753.260.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	753.260.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				208.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	208.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	13.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0.1	2.142.980.000	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.142.980.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	240	719.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				32.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	32.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				603.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	603.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				66.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	66.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	240	1.423.380.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.121.280.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.121.280.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				286.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	286.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	16.100.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.15	2.503.140.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					895.400.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	100	306.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				50.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	50.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				221.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	221.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	100	588.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				115.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	115.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				6.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.607.740.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	240	190.600.000		
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				70.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	70.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	35.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				30.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	48	54.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	240	1.417.140.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.151.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.151.940.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				240.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	240.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				25.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	25.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0.14	2.062.390.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					666.900.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	100	98.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	100	568.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				89.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	89.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.395.490.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	220	190.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				105.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	220	105.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	220	25.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				33.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	220	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				27.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	220	1.204.640.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				1.027.840.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	220	1.027.840.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				157.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	220	157.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				19.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	220	19.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.22	3.349.390.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.115.520.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	Orang	170	121.150.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				64.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	64.450.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	22.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				21.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	21.250.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	8	12.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	994.370.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				794.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	794.240.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				154.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	154.500.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				45.630.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	45.630.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					2.233.870.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	340	213.950.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				125.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	340	125.950.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	340	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				25.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	340	25.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	42.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	340	2.019.920.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.588.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	340	1.588.450.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				352.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	340	352.000.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				79.470.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	340	79.470.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0.21	2.948.200.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.948.200.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	480	283.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				103.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	480	103.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				83.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	480	83.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				60.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	480	60.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				36.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	480	2.664.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.242.560.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	480	2.242.560.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				319.950.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	480	319.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				102.390.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	480	102.390.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarntar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.07	1.420.020.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di Dalam Panti					1.420.020.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	160	483.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				401.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	401.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				44.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	44.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di dalam Panti	Dokumen	8	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah PPKS Anak Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	160	937.020.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				747.520.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	747.520.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				179.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	179.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				10.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	10.100.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarntar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.17	2.341.150.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarntar di dalam Panti					2.341.150.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	400	235.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				93.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	400	93.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				55.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	400	55.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				50.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	400	50.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				36.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	400	2.106.050.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.863.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.863.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				194.750.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	400	194.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	400	48.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0.11	1.572.526.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.572.526.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	250	219.901.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				117.650.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	250	117.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				44.751.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	250	44.751.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				31.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	125	31.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				18.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	18.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	250	1.352.625.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.168.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	1.168.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				159.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	250	159.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				25.625.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	250	25.625.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarntar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.12	2.864.020.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarntar di dalam Panti					946.200.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	150	110.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				61.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	61.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	18.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.170.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	14.170.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarntar				15.830.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	8	15.830.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	150	835.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				700.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	700.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				120.950.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	150	120.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarntar di Dalam Panti					1.216.870.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlarntar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	140	382.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				323.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	323.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				23.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	23.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	140	834.470.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				654.080.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	654.080.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				171.490.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	171.490.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				8.900.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	8.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					700.950.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi	Orang	100	135.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				92.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	92.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	20	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				12.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	100	565.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				78.550.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	78.550.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				19.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	19.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.15	2.195.278.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.064.580.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	1.064.580.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				794.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	794.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				118.480.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	118.480.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				64.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	64.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	32.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	21.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	12.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.130.698.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	142.395.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				59.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	59.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				29.070.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	29.070.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	21.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				31.875.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	34	31.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	988.303.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				811.503.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	811.503.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				156.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	156.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.25	4.108.995.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.742.480.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	280	189.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				78.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	280	78.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	280	54.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				35.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				21.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	8	21.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	280	1.553.180.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.308.060.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	1.308.060.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				212.220.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	280	212.220.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				32.900.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	280	32.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.681.340.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	200	540.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				447.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	447.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				53.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	53.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	200	1.140.940.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				934.140.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	934.140.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				194.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	194.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					685.175.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	102.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				49.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	49.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	22.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	582.725.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				478.575.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	478.575.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				92.150.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	92.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.22	3.524.290.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.632.140.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	420	255.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				95.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	420	95.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				74.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	420	74.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				52.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	52.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				31.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	31.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	42030	2.377.040.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.962.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	420	1.962.240.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				364.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	420	364.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				50.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Unit	420	50.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					892.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	100	301.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				241.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	241.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	100	590.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				116.750.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	116.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				6.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.08	1.220.005.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.220.005.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	180	154.450.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				68.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	68.400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				30.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	30.050.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				22.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	22.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	36	33.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	180	1.065.555.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				863.955.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	863.955.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				180.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	180.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	180	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.08	1.621.910.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.621.910.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	180	524.350.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				426.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	426.150.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				59.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	59.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				13.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	13.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	180	1.097.560.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				840.960.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	840.960.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				248.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	248.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				8.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	180	8.600.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.22	3.299.222.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.144.602.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	350	157.982.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				67.582.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	350	67.582.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	350	27.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				36.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	175	36.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				26.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	26.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	Orang	350	1.986.620.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.635.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	350	1.635.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				312.920.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	350	312.920.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				38.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	350	38.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.154.620.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	160	147.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				83.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	83.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				44.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	44.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				13.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	13.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	160	1.007.620.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				747.520.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	747.520.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				212.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	212.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	48.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.06	1.260.550.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.260.550.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	150	360.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				30.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	30.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				286.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	286.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				32.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	32.550.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				11.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	11.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	150	900.300.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				700.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	700.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				190.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	190.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	9.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.12	1.908.953.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.908.953.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	290	192.225.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				45.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins	Orang	290	45.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				55.775.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	290	55.775.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				36.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	290	36.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	56	54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	290	1.716.728.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.391.928.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	290	1.391.928.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				290.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	290	290.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				34.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	290	34.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.17	2.594.450.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					659.400.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	100	91.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	100	568.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				91.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	91.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.935.050.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	300	212.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				120.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	300	120.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				31.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	300	31.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				22.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	300	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				37.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	300	1.722.850.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.401.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	300	1.401.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				292.650.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	300	292.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				28.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	300	28.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0.16	2.599.924.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.394.669.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	200	183.947.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				75.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	75.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.947.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	17.947.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				55.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	55.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				35.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	35.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	200	1.210.722.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				969.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	969.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				221.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	221.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.002.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	20.002.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.205.255.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	Orang	180	149.367.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	52.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.607.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	35.607.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.360.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	27.360.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	36	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkn pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	180	1.055.888.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				854.288.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	854.288.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				180.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	180.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	180	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0.11	2.191.600.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.191.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	260	716.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	260	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				600.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	260	600.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				38.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	260	38.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				52.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	52.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	260	1.475.100.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.214.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	260	1.214.720.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				244.280.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	260	244.280.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	260	16.100.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						350.000.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	350.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					350.000.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	400	350.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				350.000.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	400	350.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									147.137.089.000	Dinas Sosial	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82.5		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								146.137.089.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.5	146.137.089.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						146.137.089.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	340.156.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.656.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100	133.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.346.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	13.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	58.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	83.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Unit	4	113.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	226.200.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.600.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	72.700.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	70.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	55.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	8.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	399.810.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					129.060.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	129.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.050.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	13.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.730.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Laporan	4	144.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	4	117.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.300.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	583.980.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					240.820.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	240.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.650.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	18.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.230.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	46.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.660.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				27.750.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.610.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	123.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.610.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	5.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				118.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	118.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	8	197.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				138.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	138.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	542.780.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					202.170.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	202.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.650.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.910.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Laporan	4	160.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.910.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	159.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					152.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	6	152.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	379.435.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.685.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	141.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.825.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	120.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	115.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	4	107.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.250.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	7.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.100.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	10.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	407.480.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	156.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	132.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	4	109.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	523.620.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.560.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	204.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.040.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	5.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	147.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	140.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	157.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	13.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	533.220.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.220.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	221.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					142.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	142.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	135.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	155.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	243.900.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	100	106.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Laporan	4	80.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	77.900.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	2	52.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	387.960.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.360.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	100	162.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	84.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Laporan	4	112.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	107.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	4	103.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	347.030.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					143.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	143.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				15.510.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	15.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Laporan	4	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	4	111.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	643.070.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					297.440.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	297.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.750.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.250.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	46.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				27.750.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	149.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					18.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					121.380.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	121.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.380.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	7.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	205.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				138.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	138.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	327.385.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					124.995.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	124.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	11.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				540.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.690.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	112.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.840.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	12.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	289.700.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	119.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	100.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	97.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	65.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	488.900.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					211.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	211.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.280.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	144.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	335.925.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.775.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	149.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Laporan	4	62.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	114.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	581.827.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					216.797.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	216.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	18.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.420.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.195.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	18.195.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				16.332.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	16.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	102.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Laporan	4	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	140.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.530.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Unit	6	197.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.530.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	39.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				130.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	135.451.361.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					105.627.096.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	105.627.096.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				103.727.096.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	599	103.727.096.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.350.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4	300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				250.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					225.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	225.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					325.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				200.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				125.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.691.050.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.691.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.050.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	250.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.800.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					362.515.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	362.515.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				362.515.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	362.515.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.991.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	17.991.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				710.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				444.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	444.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.787.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	16.787.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.229.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	8.229.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				180.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				380.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.329.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	7.329.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				240.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	572.860.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					186.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	186.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.240.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	24.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					191.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Laporan	4	191.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	188.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Unit	6	180.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	51.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	422.785.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	172.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.875.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	1	11.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.875.000		
						Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	Unit	1	11.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	107.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	344.650.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.640.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	83.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	82.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	4	102.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	393.130.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.780.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	123.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.500.000		
						umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Laporan	4	149.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	148.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	4	110.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	236.890.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					117.890.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	117.890.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.360.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	6.360.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2.850.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.480.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.480.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	56.900.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				54.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	54.400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	57.100.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	9.600.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	218.600.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					94.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	94.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	4.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
		X.XX.01.1.06.0008				Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
					Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	64.900.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	62.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	54.700.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	261.700.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	100	144.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Laporan	4	45.400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	42.900.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	2	66.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	253.395.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					117.195.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	100	117.195.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.495.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.495.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	1	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Laporan	4	65.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	63.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	2	60.700.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	399.340.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.090.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	175.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.490.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	11.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.975.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	9.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	110.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	4	104.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.8	1.000.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.000.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									305.418.176.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									87.554.820.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	91		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								86.851.560.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.2	86.851.560.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						86.851.560.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.397.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.600.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	57.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.920.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	169.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.560.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.360.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	10.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					752.030.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	752.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.030.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	149.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				598.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	598.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					397.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	397.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				70.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.450.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	32.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	741.213.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.800.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.861.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	78.861.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.101.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1.101.000		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	14.000.000		
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				11.700.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	11.700.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	5.300.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.760.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	42.760.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					496.508.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	496.508.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.508.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	423.508.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					124.044.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	124.044.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	6	35.000.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.044.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	39.044.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.000.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				2.500.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					933.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	933.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.026.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	273.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				660.374.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	660.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	849.571.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.811.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	67.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.165.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	7.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.845.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	4.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				9.796.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	12	9.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.085.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	4.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.120.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	37.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					702.228.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	702.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				211.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	211.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				489.528.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	489.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.732.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	44.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.087.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	25.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.645.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11	15.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.350.000.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.100.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.400.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	111.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.100.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.340.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	13.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.450.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.310.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	63.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					350.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					619.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	619.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.862.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.862.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	202.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				408.488.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	408.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					207.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	207.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	116.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	80.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	79.705.101.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.634.927.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	70.634.927.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69.592.599.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	450	69.592.599.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				776.620.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	776.620.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				194.266.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	194.266.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				71.442.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	71.442.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	11	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					44.220.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	44.220.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				44.220.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	44.220.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					102.220.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	102.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				36.300.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	36.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				33.920.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	33.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.899.312.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.899.312.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.780.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	135.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				73.240.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	73.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				41.562.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	41.562.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.713.730.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.713.730.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				600.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					236.713.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	236.713.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				206.713.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	206.713.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.399.915.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.399.915.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.765.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	21.765.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.183.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.183.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	177.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.017.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.017.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.337.794.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.337.794.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				440.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	20	440.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				42.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	122.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				85.600.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	85.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				488.804.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	488.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.740.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	91.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.808.675.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					355.305.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	355.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.700.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	38.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				990.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.273.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	11.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.585.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	2.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				25.881.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	2	25.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	6.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				227.096.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	227.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					86.875.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	86.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.875.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	86.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.041.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.041.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				264.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	264.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				774.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	774.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	270.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.150.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	53.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				65.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	4	65.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.695.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	66.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								703.260.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.02	703.260.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						703.260.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	703.260.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					703.260.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	703.260.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				459.605.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	459.605.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				243.655.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	243.655.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pengurangan Pengangguran									11.900.281.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28.64		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)								3.500.000.000		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80.96	3.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						3.500.000.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26.67	700.000.000		
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					700.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	60	700.000.000		
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				700.000.000		
						Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	60	700.000.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.59	2.800.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					2.800.000.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	56.43	536.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				536.000.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	260	536.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	30	723.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				723.000.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	581	723.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.21	1.541.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				1.541.000.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1190	1.541.000.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja								3.664.754.000		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10.15	2.514.325.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.514.325.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	30.59	176.875.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					176.875.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	26.67	176.875.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				176.875.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Unit	30	176.875.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	3.2	541.325.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					541.325.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	100	9.410.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				9.410.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	100	4.150.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	10	5.260.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	%	30	41.325.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				41.325.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	2	41.325.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	10.2	140.590.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				140.590.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	40	140.590.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				350.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46.9801	800.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					800.000.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	33.33	46.005.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				46.005.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	380	18.160.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	1	27.845.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	%	0.67	363.995.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				363.995.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	48	363.995.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%	20	10.000.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				10.000.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				380.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9.5	373.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					373.000.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	66.67	5.000.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				5.000.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	200	1.550.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment)	Dokumen	2	3.450.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%	40	8.000.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				8.000.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	3	8.000.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	64	60.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				60.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	20	60.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	300.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				300.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	99	300.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2.35	623.125.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					623.125.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	50	623.125.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				518.313.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	200	518.313.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				104.812.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	5	104.812.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rupiah	56.5	1.150.429.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.150.429.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4.6	200.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					200.000.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	20.67	200.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				200.000.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas	Unit	145	200.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13.22	950.429.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					925.000.000		
						Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Unit	19	51.665.000		
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				51.665.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	1	51.665.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	3.42	523.335.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				523.335.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	205	523.335.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				350.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					19.429.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	8	19.429.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				19.429.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit	5	19.429.000	SEKSI PELATIHAN	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					6.000.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%	4	6.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	6.000.000	SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah								246.740.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	68.57	246.740.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						246.740.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	68.57	246.740.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					246.740.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	31.43	246.740.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				80.850.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	80.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				77.370.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	77.370.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				88.520.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	88.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja								2.580.000.000		
						Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71.06	2.580.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						2.319.000.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	71.05	526.500.000		
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		
						Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan	%	20	10.000.000		
		2.07.04.1.02.0002			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	4	10.000.000		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					516.500.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19.41	516.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				116.500.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	116.500.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.0003			Job Fair /Bursa Kerja				400.000.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	400.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68.3	1.792.500.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.490.153.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	57.14	840.191.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				159.581.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	70	159.581.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0002			Pelayanan Antar Kerja				601.830.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	80	601.830.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				19.310.000		
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	19.310.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				59.470.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50	59.470.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	47.5	649.962.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja				649.962.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	230	649.962.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					289.307.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	50	229.667.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik				40.200.000		
						Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	15	40.200.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				189.467.000		
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80	189.467.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	1.51	59.640.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				50.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60	50.600.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				9.040.000		
						Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	2	9.040.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					13.040.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100	13.040.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				13.040.000		
						Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	150	13.040.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						261.000.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.71	30.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					30.000.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	80	30.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi				30.000.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	10	30.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.71	231.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					231.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	8.57	231.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				231.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	231.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	OPD Provinsi
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial								1.908.787.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91.58	1.908.787.000		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.908.787.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98.2	349.824.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					349.824.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	26.97	349.824.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				125.380.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Unit	105	125.380.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				28.881.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Unit	105	28.881.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				195.563.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Biparti) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	140	195.563.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.77	793.936.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					793.936.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.79	521.753.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				241.997.000		
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	241.997.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				26.963.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Unit	1000	26.963.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				252.793.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Unit	36	252.793.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	80	272.183.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				272.183.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Unit	50	272.183.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.69	308.787.000		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					308.787.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	96.69	95.422.000		
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				95.422.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseseaikan	Kasus	125	95.422.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	%	36	213.365.000		
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				213.365.000		
						Jumlah perselisihan yang dicegah	Kasus	222	213.365.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	45.54	456.240.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					456.240.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2.16	456.240.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				278.055.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Laporan	1	278.055.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				54.291.000		
						Jumlah penetapan UMK	Laporan	1	54.291.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				123.894.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	180	123.894.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
JUMLAH									99.455.101.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas									965.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								320.000.000		
						Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100	320.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						320.000.000		
						Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	320.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					100.000.000		
						ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	18.7	100.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				40.000.000		
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kelompok	1	40.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				60.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kabupaten/ Kota	3	60.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					220.000.000		
						Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	220.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				40.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/ Kota	2	40.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				40.000.000		
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	40.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui						

		2.14.04.1.02.000 8			Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				140.000.000		
					Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok	2		140.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terkendalinya Jumlah Penduduk								645.000.000		
					Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.12		645.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						195.000.000		
					Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	57		195.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					190.000.000		
					Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kabupaten/ Kota	20		190.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.000 2			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				35.000.000		
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2		35.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.000 7			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				50.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	2		50.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.001 5			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				15.000.000		
					Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten/ Kota	1		15.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.001 7			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga				90.000.000		

					Kencana)						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	90.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					5.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						450.000.000		
						Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	65.99	380.000.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					380.000.000		
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	31	380.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.01.0007			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				180.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	20	180.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0012			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kabupaten/ Kota	7	200.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Unmetneed	%	9.9	70.000.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB					70.000.000		
						Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	15	70.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.02.0002			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				70.000.000		
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kelompok	3	70.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan									1.060.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	9950		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan								1.060.000.000		
						Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	35	1.060.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						1.000.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	65	1.000.000.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					80.000.000		
						Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10	80.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				25.000.000		
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	2	25.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0007			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	50	30.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0008			Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				25.000.000		
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	25	25.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					920.000.000		
						Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	75	920.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.02.0003			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				880.000.000		
						Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	1280	880.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0004			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kelompok	3	40.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						60.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	60.000.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					60.000.000		
						Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	60.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.04.1.01.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				60.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	10	60.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									16.646.242.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								16.421.242.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	16.421.242.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.271.242.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	608.960.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					255.960.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	255.960.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				255.960.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	255.960.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	57.500.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	1.500.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	280.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		14.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	15.662.282.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.926.902.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	12.926.902.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.508.502.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	60	12.508.502.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				368.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	368.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					67.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	67.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				65.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	65.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					35.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					587.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	587.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				55.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	55.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.742.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.742.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.242.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.242.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	291.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				160.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						150.000.000		
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	30	150.000.000	SEKRETARIAT	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	12	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	6	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								225.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.8	225.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						225.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	50	225.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					225.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	50	225.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				110.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	115.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak									513.510.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak								260.000.000		
						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	73	260.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						75.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	20	75.000.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000		
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	75.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.04.1.03.0001			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	75.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						185.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82.86	185.000.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					150.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kabupaten/ Kota	4	150.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	60.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.06.1.01.0003			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				90.000.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	OPD	10	90.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					35.000.000		
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	35.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				20.000.000		
						Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	20.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				15.000.000		
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak								253.510.000		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	76	253.510.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						253.510.000		
						Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	70.000.000		
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					70.000.000		
						Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	70.000.000		
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	50	20.000.000		
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	35	50.000.000		
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11.8	183.510.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	34.2	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0005			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					133.510.000		
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	133.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	2.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0004			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi				2.500.000		
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	2.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0006			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				15.000.000		
						Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0007			Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi				15.000.000		
						Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	20	15.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0008			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan				98.510.000		
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	25	98.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan									977.550.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5.5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan								977.550.000		
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4.2	977.550.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						977.550.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	22	927.510.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					80.000.000		
						Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	52	80.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0002			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	1	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					847.510.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	12	847.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.03.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				34.510.000		
						Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	34.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0003			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	25	20.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				743.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	743.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	50.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					50.040.000		
						Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	50.040.000		
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	50	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				30.040.000		
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	5	30.040.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									20.162.302.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									21.255.029.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								20.505.029.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	20.505.029.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.505.029.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.872.529.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.104.222.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	16.104.222.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.316.222.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	15.316.222.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				378.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	378.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				410.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	410.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					118.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	118.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.000 5			Pengolahan Data Retribusi Daerah				6.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					197.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	197.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				197.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	197.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.038.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.038.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				78.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	78.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				95.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					671.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	671.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				671.600.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	671.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.344.062.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.344.062.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				414.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	414.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				930.062.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	930.062.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					393.645.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	393.645.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				163.645.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	163.645.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	632.500.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	%	100	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	15	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					348.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	26	348.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				162.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	162.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	17	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								750.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.97	750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						750.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	750.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					750.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	750.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				380.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	380.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				370.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	370.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)									12.873.888.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85.34		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								7.440.000.000		
						Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	10	7.440.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						7.440.000.000		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	55	7.440.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					7.440.000.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	%	4	1.500.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1.500.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen	12	500.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	700	1.000.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	%	100	5.940.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				5.940.000.000		
						JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen	12	190.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
						JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	Paket	3	5.750.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan								5.433.888.000		
						Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/h	3801	5.433.888.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						5.433.888.000		
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0.38	5.333.888.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					5.333.888.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	%	10	5.333.888.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				5.333.888.000		
						JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	350	5.333.888.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1.25	100.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					100.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				100.000.000		
						JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	Dokumen	12	100.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)									7.980.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	85.34		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								4.055.000.000		
						Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	6	4.055.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						125.000.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87.7	125.000.000	Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					125.000.000		
						PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Angka	34	125.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				125.000.000		
						JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	5	125.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						3.930.000.000		
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0.01	3.930.000.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					3.930.000.000		
						PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	5.5	3.930.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				3.930.000.000		
						JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	12	3.360.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	Desa	24	50.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	Dokumen	1	400.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dokumen	12	50.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan								3.925.000.000		
						Skor PPH provinsi	Skor	95.2	3.925.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.625.000.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/ta hun	87.7	1.625.000.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					750.000.000		
						REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	Dokumen	1	750.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2.09.03.1.01.0002			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				750.000.000		
						JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	750.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					875.000.000		
						PPH Kab / Kota > 87	Angka	34	875.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				510.000.000		
						Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	6	410.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	650	100.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				365.000.000		
						JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	Desa	5	125.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	Dokumen	1	240.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						2.300.000.000		
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	92	1.000.000.000	Bidang Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	Dokumen	1	280.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				280.000.000		
						JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Orang	200	280.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	Dokumen	1	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				300.000.000		
						JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	sampel	160	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	67	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				50.000.000		
						JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	Lokasi	42	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	%	20	370.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				370.000.000		
						Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	4	165.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	Kelompok	20	205.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	1.300.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.300.000.000		
						Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	2	1.300.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0006			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				650.000.000		
						Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	35	650.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				650.000.000		
						Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	90	650.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
JUMLAH									42.108.917.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas air									1.906.015.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Air	Angka	68.71		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran air permukaan								1.906.015.000		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.35	1.906.015.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						434.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	434.000.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					200.000.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	3	200.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.000 2			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				200.000.000		
						Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	3	200.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					234.000.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Dokumen	10	234.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.02.000 5			Pembinaan Penyelenggaraan KLHS				234.000.000		
						Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	10	234.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						658.015.000		
						Persentase pengujian kualitas air	%	100	458.015.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					458.015.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	Dokumen	1	458.015.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				458.015.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas air	sampel	380	458.015.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4.76	200.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					200.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Unit	105	200.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				200.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	Unit	140	200.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN						50.000.000		

			BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
						Persentase limbah B3 yang dikelola	%	80	50.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Ton	1476440	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.05.1.01.000 2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						564.000.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	230.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					230.000.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Unit	15	230.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.000 6			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				230.000.000		
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kegiatan	30	230.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	334.000.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					334.000.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Dokumen	10	334.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.1.01.000 1			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				334.000.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi	Dokumen	10	334.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						200.000.000		
						Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	200.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					200.000.000		
						Jumlah laporan aduan yang ditangani	Laporan	12	200.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.0007			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				200.000.000		
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Laporan	12	200.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									143.165.195.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								142.615.195.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	142.615.195.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						142.615.195.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	134.576.707.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					130.520.707.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	130.520.707.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				130.370.707.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	677	130.370.707.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				61.400.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	1	61.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				88.600.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	88.600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					190.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				190.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					95.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				70.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	5	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					801.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	801.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				81.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	81.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				410.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.318.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.318.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				728.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	728.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					651.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	651.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				491.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19	491.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	778.840.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					37.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden	Dokumen	1	37.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.800.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	37.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden	%	100	140.400.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	5.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	4.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	8.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.600.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	9.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				48.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	48.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	15.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					443.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden	Laporan	1	443.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	1.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden	Laporan	1	85.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	5.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				351.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	351.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.640.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden	Unit	1	157.640.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	3	80.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	3.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	17	21.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.640.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	33.640.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden	Unit	3	20.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura	%	100	783.532.000	Balai Taman Hutan Raya KGPA A Mangkunagoro I Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA	%	100	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					497.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA	Laporan		497.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				414.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	414.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					179.232.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA	Unit		179.232.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				155.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura	Unit	3	155.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura	Unit	7	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.982.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	4	13.982.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H	%	100	518.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					24.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				24.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H	Dokumen	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					121.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H	Laporan	1	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					181.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	181.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				140.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H	Unit	3	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH	%	100	481.992.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.652.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH	%	100	81.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH	Paket	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.152.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH	Laporan	1	39.152.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					357.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH	Laporan	1	357.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH	Laporan	1	135.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				222.240.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH	Laporan	1	222.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH	Unit	1	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH	Unit	3	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH	Unit	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1	%	100	603.000.000	CDK 1	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	%	100	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					357.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	Laporan	1	357.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1	Laporan	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				270.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1	Laporan	1	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1	Unit	1	146.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				116.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1	Unit	3	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10	%	100	494.500.000	CDK 10	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10	%	100	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan CDK 10	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					288.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10	Laporan	1	288.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10	Laporan	1	117.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				170.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10	Laporan	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				85.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10	Unit	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10	Unit	38	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11	%	100	432.000.000	CDK 11	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11	%	100	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11	Laporan	1	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11	Laporan	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	Unit	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11	Unit	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2	%	100	490.000.000	CDK 2	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2	%	100	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					304.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2	Laporan	1	304.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				243.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2	Laporan	1	243.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2	Unit	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2	Unit	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3	%	100	537.800.000	CDK 3	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3	%	100	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3	Laporan	1	326.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3	Laporan	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				235.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3	Laporan	1	235.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3	Unit	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3	Unit	2	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3	Unit	0	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4	%	100	572.750.000	CDK 4	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4	Dokumen	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				14.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	Dokumen	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4	%	100	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					377.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4	Laporan	1	377.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4	Laporan	1	81.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	1	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4	Unit	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5	%	100	479.300.000	CDK 5	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5	%	100	80.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.700.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	3.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.600.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5	Laporan	1	309.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5	Laporan	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5	Laporan	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6	%	100	552.000.000	CDK 6	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 6	%	100	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6	Laporan	1	331.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6	Laporan	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6	Unit	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				105.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6	Unit	2	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7	%	100	445.591.000	CDK 7	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					91.191.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 7	%	100	91.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.710.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	7.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59.281.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7	Laporan	1	59.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					249.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7	Laporan	1	249.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7	Laporan	1	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				202.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7	Laporan	1	202.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7	Unit	1	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				82.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7	Unit	2	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8	%	100	461.183.000	CDK 8	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8	Dokumen	1	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8	Dokumen	1	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8	%	100	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.483.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8	Laporan	1	284.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8	Laporan	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.983.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	231.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8	Unit	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8	Unit	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8	Unit	40	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9	%	100	408.000.000	CDK 9	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.440.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9	%	100	88.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.690.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9	Paket	1	8.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	8.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					213.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9	Laporan	1	213.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				162.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9	Laporan	1	162.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9	Unit	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								550.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						550.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	550.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					550.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	550.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tutupan lahan									8.012.689.000		
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	59.46			
	Meningkatnya luasan tutupan lahan								8.012.689.000		
						Luas tutupan lahan	Ha	1022457	8.012.689.000		
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						5.854.089.000		
						Persentase lahan kritis tertangani	%	0.22	105.000.000		
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					105.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Ha	811	105.000.000		
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	1	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				75.000.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Dokumen	3	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0.01	426.800.000	CDK 1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					426.800.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1	Ha	43	426.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				188.400.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	25	188.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				238.400.000		
						Luas lahan yang dihilangkan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	18	238.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0.01	379.832.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					379.832.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10	Ha	29	379.832.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	13	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				179.832.000		
						Luas lahan yang dihilangkan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	16	179.832.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0.02	350.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					350.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11	Ha	65	350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	42	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang dihilangkan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	23	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0.01	350.000.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					350.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2	Ha	56	350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	30	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang dihilangkan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	26	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0.01	438.000.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					438.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3	Ha	52	438.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				244.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	32	244.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				194.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	20	194.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0.02	350.000.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					350.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4	Ha	83	350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	60	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	23	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0.02	350.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					350.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5	Ha	60	350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	40	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	20	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0.03	386.000.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					386.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6	Ha	124	386.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	70	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				186.000.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	54	186.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0.03	371.149.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					371.149.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7	Ha	121	371.149.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				245.029.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	80	245.029.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				126.120.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	41	126.120.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0.03	377.000.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					377.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8	Ha	94	377.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				227.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	75	227.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	19	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0.02	387.440.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					387.440.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9	Ha	84	387.440.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				237.440.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	60	237.440.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		
						Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	24	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	142.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					142.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Dokumen	1	142.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				142.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Dokumen	1	142.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi bibit	%	-90	836.428.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Perbenihan Tanaman Hutan					836.428.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Bibit	1300000	749.678.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
		3.28.03.1.09.0006			Pembangunan Sumber Benih				749.678.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	Bibit	100000	653.088.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Luas sumber benih yang dibangun	Ha	0.5	96.590.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Sertifikat	75	86.750.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	
		3.28.03.1.09.0001			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar				6.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Dokumen	3	6.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0002			Sertifikasi Sumber Benih				6.000.000		
						Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	3	6.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0003			Sertifikasi Mutu Benih				10.000.000		
						Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	3	10.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0004			Sertifikasi Mutu Bibit				15.000.000		
						Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	Sertifikat	10	15.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				49.750.000		
						Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar	Dokumen	2	49.750.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	45.99	567.000.000		
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					192.000.000		
						Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	Unit	82	192.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				50.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	Dokumen	4	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				142.000.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Dokumen	12	142.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					150.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	8	150.000.000		
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000		
						Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	8	100.000.000		
		3.28.03.1.06.0004			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu				50.000.000		
						Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib	Unit	2	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					225.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	183	225.000.000		
		3.28.03.1.07.0001			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				75.000.000		
						Jumlah unit managemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah	Unit	12	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				75.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun	Unit	12	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0003			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				75.000.000		
						Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit	12	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	0	37.440.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					37.440.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9	Unit	0	37.440.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				37.440.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9	Unit	6	37.440.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						824.768.000		
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	71	475.968.000	Balai Taman Hutan Raya KGPA A Mangkunagoro I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					475.968.000		
						Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Dokumen	2	152.400.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				30.000.000		
						Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti	Dokumen	55	30.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi				22.400.000		
						Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan	Dokumen	3	22.400.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA				100.000.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	323.568.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.0002			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				158.736.000		
						Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi	Bulan	12	158.736.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0003			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi				72.600.000		
						Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	20	72.600.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0005			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi				92.232.000		
						Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha	10	92.232.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	50.000.000		
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Dokumen	2	50.000.000		
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				50.000.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Laporan	2	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	60	160.800.000		
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					160.800.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	Dokumen	3	160.800.000		
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				160.800.000		
						Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dokumen	3	160.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	138.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					138.000.000		
						Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	Jenis	705	138.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				138.000.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Dokumen	1	138.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						1.005.832.000		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2.5	217.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					217.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	217.000.000	SEKSI PENYULUHAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				50.000.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	Orang	90	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				107.000.000		
						Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	Dokumen	2	107.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				60.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	Dokumen	2	60.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0.3	193.600.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					193.600.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1	Kelompok	3	193.600.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				193.600.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1	Kelompok	130	193.600.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0.2	69.832.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					69.832.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10	Kelompok	2	69.832.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				29.832.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10	Orang	60	29.832.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10	Kelompok	105	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0.2	80.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					80.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11	Kelompok	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				40.000.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11	Orang	40	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11	Kelompok	57	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0.2	40.000.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2	Kelompok	2	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2	Kelompok	101	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0.2	129.400.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					129.400.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3	Kelompok	2	129.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				84.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3	Kelompok	109	84.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				45.400.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3	Unit	1	45.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0.2	40.000.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4	Kelompok	2	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4	Kelompok	54	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0.3	40.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5	Kelompok	3	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5	Kelompok	75	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0.2	76.000.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					76.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6	Kelompok	2	76.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				76.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6	Kelompok	107	76.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0.3	40.000.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7	Kelompok	3	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7	Kelompok	121	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0.2	40.000.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8	Kelompok	2	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8	Kelompok	72	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0.2	40.000.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9	Kelompok	2	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				40.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9	Kelompok	69	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						328.000.000		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	328.000.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					328.000.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	2	298.000.000		
		3.28.06.1.01.0002			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				114.000.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	5	114.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				184.000.000		
						Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS	Kelompok	2	184.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	Dokumen	2	30.000.000		
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				30.000.000		
						Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Unit	2	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas udara									4.134.486.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Udara	Angka	84.91		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran udara								4.134.486.000		
						Indeks SO2 dan NO2	Angka	0.3696	4.134.486.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.695.373.000		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2.85	943.388.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					943.388.000		
						Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak	tCO2e	20000	759.388.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				759.388.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	78.345.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	Lokasi	100	681.043.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi	Unit	105	184.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				184.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara	Unit	140	184.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	401.985.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					401.985.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	Dokumen	1	401.985.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				401.985.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	sampel	130	401.985.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	350.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					350.000.000		
						Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	1	350.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				350.000.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	72	170.750.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi	Unit	28	179.250.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						745.000.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0.4	210.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					210.000.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	10	210.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				30.000.000		
						Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				100.000.000		
						Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	10	100.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0006			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				80.000.000		
						Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati	Orang	60	80.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2.6	535.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					535.000.000		
						Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Unit	2	535.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.0003			Pengelolaan Kebun Raya				535.000.000		
						Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	143.5	535.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						1.305.113.000		
						Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	33	350.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah	Kabupaten/Kota	2	350.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				350.000.000		
						Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah	Kelompok	2	350.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
						Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	50.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	Unit	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN	
		2.11.08.1.01.0003			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Orang	400	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10.5	905.113.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					905.113.000		
						Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	Unit	128	905.113.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.0002			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				655.113.000		
						Jumlah sekolah peduli lingkungan	Unit	125	655.113.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				250.000.000		
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Unit	3	250.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						389.000.000		
						Persentase sampah yang tertangani	%	43	389.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					389.000.000		
						Jumlah sampah tertangani	Ton	2650000	389.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				389.000.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan	Dokumen	1	389.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									157.218.385.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Desa Mandiri									4.868.170.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0.7618		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah								4.868.170.000		
						Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah	%	7.12	4.868.170.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						20.850.000		
						Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100	20.850.000	Bidang Penataan Desa	
				Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					20.850.000		
						Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa	Desa	70	20.850.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.02.1.01.0003			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				20.850.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1	20.850.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						602.000.000		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	59.32	602.000.000	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					602.000.000		
						Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	Buah	3	190.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	
		2.13.03.1.01.0002			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				190.000.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	Dokumen	1	190.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi
						Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kws	1	412.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	
		2.13.03.1.01.0003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				412.000.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	412.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	OPD Provinsi
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.540.320.000		
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	627.320.000	Bidang Penataan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					627.320.000		
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kabupaten/ Kota	35	313.170.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				313.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	313.170.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa	Desa	50	4.150.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0016			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				4.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	4.150.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan	Dokumen	55	310.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				310.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	Dokumen	1	310.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	913.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					913.000.000		
						Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi	Dokumen	60	200.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0006			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				200.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitas pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa	Orang	58	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0005			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa	Kabupaten/Kota	29	478.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0012			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				478.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	Dokumen	1	478.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik	Desa	58	185.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	
		2.13.04.1.01.0018			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				185.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitas pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	Dokumen	1	185.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	OPD Provinsi
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.705.000.000		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	13.24	500.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					500.000.000		
						Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya	Unit	350	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.13.05.1.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	Dokumen	1	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	1.980.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.980.000.000		
						Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat	Orang	150	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				200.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Dokumen	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	70	30.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				30.000.000		
						Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	35	1.750.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.750.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	1.750.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	225.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat					225.000.000		

				Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah	Kali	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				100.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Dokumen	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah	Unit	35	125.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				125.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dokumen	1	125.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									19.863.205.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								19.408.205.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades	Angka	85	19.408.205.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.408.205.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.408.205.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.625.428.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	15.625.428.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.250.428.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	78	15.250.428.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				375.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	375.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					769.722.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	769.722.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.000.000		
						Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Bulan	12	82.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.722.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12.722.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.283.055.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.283.055.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				565.055.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	565.055.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.688.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.688.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					580.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabiliitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								455.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Dispermades	Nilai	3	455.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						455.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	95	455.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					455.000.000		
						Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun	%	100	455.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				325.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	325.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									624.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan								624.000.000		
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah	%	89	624.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						220.000.000		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	98	220.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					220.000.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	99	220.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.02.1.01.0003			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				220.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	Dokumen	1	220.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						210.000.000		
						Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	99	210.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pencatatan Sipil					210.000.000		
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran	%	98	210.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	
		2.12.03.1.01.0002			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				210.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	210.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	OPD Provinsi
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						194.000.000		
						Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	66.67	194.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					194.000.000		
						Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	194.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.04.1.03.0001			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				194.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	194.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
JUMLAH									25.355.375.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									68.222.521.000	Dinas Perhubungan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78.48		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								67.875.921.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80.5	67.875.921.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						67.875.921.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100	237.600.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100	114.112.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.112.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	64.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.612.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100	148.340.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.340.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	82.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.340.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100	155.200.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					84.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	84.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100	161.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	13	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100	142.275.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	82.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	15.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	13.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	306.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100	66.610.494.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					51.028.889.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	51.028.889.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				50.238.689.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	300	50.238.689.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				720.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	720.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				70.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.155.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.155.000.000		
						Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					125.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.855.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.855.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				82.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	82.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.108.705.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	11.108.705.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.589.225.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.589.225.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.515.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	9.515.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.337.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	1.337.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				857.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	73	857.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	93	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								346.600.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.3	346.600.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						346.600.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	346.600.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					346.600.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	346.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				261.600.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	261.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	85.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi									132.525.554.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6.274		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah								6.993.452.000		
						Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	15.333	6.993.452.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						5.853.678.000		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.84	404.650.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					404.650.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	22676	404.650.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				363.800.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	363.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				40.850.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.84	115.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					115.950.000		
						Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Unit	1038	115.950.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				95.950.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	95.950.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.84	210.625.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					210.625.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2340	210.625.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				185.625.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	185.625.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				25.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.84	197.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					197.800.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	7071	197.800.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				167.800.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	167.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.84	251.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					251.990.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3659	251.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				221.990.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	221.990.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.84	195.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					195.500.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Unit	4198	195.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				165.500.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	165.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.95	518.940.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					518.940.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.33	518.940.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				198.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	198.480.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				320.460.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	320.460.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.94	469.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					469.700.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.19	469.700.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				121.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	121.680.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				348.020.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	348.020.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.95	413.953.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					413.953.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.11	413.953.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				145.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				268.273.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	268.273.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.94	489.740.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					489.740.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.14	489.740.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				145.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				344.060.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	344.060.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.95	479.540.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					479.540.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.24	479.540.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				136.080.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	136.080.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				343.460.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	343.460.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.95	414.270.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					414.270.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.5	414.270.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				150.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	58	150.480.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				263.790.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	263.790.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0.985	235.000.000	Bidang Lalu Lintas	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					235.000.000		
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	439863	235.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	200.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				35.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.39	1.456.020.000	Bidang Lalu Lintas	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.264.700.000		
						Rasio perlengkapan jalan terpasang	Angka	0.63	1.264.700.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				1.264.700.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	159	1.264.700.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					116.320.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/Kota	17	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				46.320.000		
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokumen	12	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				70.000.000		
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					75.000.000		
						Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	Dokumen	390	75.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.06.0006			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				75.000.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	61	75.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						40.000.000		
						Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0.4	40.000.000	Bidang Pelayaran	
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
						Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Angka	0.18	40.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi	Unit	25	40.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.099.774.000		
						Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.08	1.099.774.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.099.774.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Angka	0.36	1.099.774.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.099.774.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	3	1.099.774.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya konektivitas provinsi								7.709.578.000		
						Rasio konektivitas provinsi	Angka	0.411	7.709.578.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						6.970.478.000		
						Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0.52	380.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					380.000.000		
						Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	Angka	0.5	380.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	
		2.15.02.1.01.0007			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				380.000.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan	2	380.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.21	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.5	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.02	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.5	50.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.25	200.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					200.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.5	200.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				200.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	200.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.24	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.5	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.22	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.5	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.18	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.5	50.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0.483	874.690.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					874.690.000		
						Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Angka	0.622	874.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				874.690.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6	874.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0.229	4.705.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					4.705.000.000		
						Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik	Angka	0.41	4.705.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				105.000.000		
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	105.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.100.000.000		
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.100.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.03.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				3.500.000.000		
						Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	3.500.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; PURWOREJO --> KUTOARJO --> KELURAHAN KUTOARJO
						Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0.56	560.788.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
						Rasio angkutan barang yang berijin	Angka	0.32	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D	Unit	216	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					360.788.000		
						Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Angka	0.86	360.788.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				290.500.000		
						Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	3	290.500.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.09.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				70.288.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	7	70.288.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					35.000.000		
						Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Angka	0.09	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
						Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Angka	0.62	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000		
						Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	464	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio angkutan taksi terpenuhi	Angka	0.44	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				35.000.000		
						Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	76	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		
						Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif	Angka	1	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						739.100.000		
						Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0.378	739.100.000	Bidang Pelayaran	
				Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					60.000.000		
						Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya	Angka	0.4	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				60.000.000		
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	4	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					70.000.000		
						Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Angka	0.13	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi,						

		2.15.03.1.06.0001			Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				70.000.000		
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO :	Dokumen	10	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					79.100.000		
						Berth occupancy ratio	Angka	0.45	79.100.000	SEKSI KEPELABUHANAN	
		2.15.03.1.09.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				79.100.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan	Unit	8	79.100.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					530.000.000		
						Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Angka	0.53	530.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				130.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1	130.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.03.1.10.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				400.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	1	400.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum								117.822.524.000		
						On Time Performance layanan transportasi	%	85.05	117.822.524.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						117.822.524.000		
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	67.34	924.955.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					924.955.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	27824836	924.955.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				924.955.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	924.955.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	53	116.897.569.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					116.897.569.000		
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	6944462	116.897.569.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				116.897.569.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	116.897.569.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									200.748.075.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan									48.778.024.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4.5		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah								3.000.000.000		
						Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	638	3.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						3.000.000.000		
						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	50	3.000.000.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.341.640.000		
						Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	%	50	1.341.640.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.000 1			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				240.520.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	240.520.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.000 2			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				145.000.000		
						Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	145.000.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.000 3			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				370.600.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Laporan	50	370.600.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.000 4			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				585.520.000		
						80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	50	585.520.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					1.658.360.000		
						Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	%	50	1.658.360.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
		2.21.02.1.02.000 1			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				1.658.360.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi	%	60	1.658.360.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	OPD Provinsi
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah								44.567.195.000		
						Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3.81	17.107.445.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						17.107.445.000		
						Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	74	17.107.445.000	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					17.107.445.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	OPD	41	15.226.645.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.0029			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				15.226.645.000		
						Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Buah	25	15.226.645.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif	Angka		1.880.800.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.02.0026			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE				1.880.800.000		
						Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps)	Angka	15	1.880.800.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3.2	3.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						3.000.000.000		
						Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	47	3.000.000.000	Bidang E-Government	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					3.000.000.000		
						Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola	%	100	2.817.254.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.0017			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2.817.254.000		
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola	Angka	12	2.817.254.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
						Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan	%	65	102.664.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0028			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				102.664.000		
						Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan	Angka	10	102.664.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
						Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi	%	50	80.082.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0018			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas				80.082.000		
						Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas	Angka	25	80.082.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
						Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100	24.459.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						24.459.750.000		
						Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	33	2.359.750.000	Bidang Statistik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					2.359.750.000		
						Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	%	80	2.359.750.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0006			Pelayanan Informasi Publik				559.750.000		
						Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	Dokumen	83	559.750.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.16.02.1.01.0020			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				1.800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	%	87	1.800.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	81	22.100.000.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					22.100.000.000		
						Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	91	5.753.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0010			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				400.000.000		
						Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Kelompok	30	400.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0012			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				5.353.000.000		
						Jumlah komunitas yang dikoordinasikan	Kelompok	30	5.353.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	260	5.478.800.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0004			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1.368.209.000		
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	10	1.368.209.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0005			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.700.000.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Konten	10	1.700.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0007			Layanan Hubungan Media				505.841.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Konten	3	505.841.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0008			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1.904.750.000		
						Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Konten	10	1.904.750.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Dokumen	260	10.868.200.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0017			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				334.027.000		
						Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum	Dokumen	35	334.027.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0019			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				9.437.881.000		
						Jumlah rekomendasi analisis agenda publik	Dokumen	80	9.437.881.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0023			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				1.096.292.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Dokumen	129	1.096.292.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial								1.210.829.000		
						Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	64	1.210.829.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						1.210.829.000		
						Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	48	1.210.829.000	Bidang Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					1.210.829.000		
						Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	%	60	378.750.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.0002			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				378.750.000		
						Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	250	378.750.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi
						Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	%	48	832.079.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	70	100.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.0008			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				260.000.000		
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun	Angka	80	260.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0009			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				304.370.000		
						Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial	Angka	8	304.370.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0011			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				167.709.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data	Angka	100	167.709.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									29.637.129.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								29.027.129.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	29.027.129.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.027.129.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	79	29.027.129.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.173.911.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	21.173.911.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.589.686.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	125	20.589.686.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				352.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	352.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				75.150.000		
						Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	75.150.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 6			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				83.225.000		
						Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	2	83.225.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				73.850.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	18	73.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					270.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				36.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				34.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					450.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				80.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				320.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.854.875.000		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	1.854.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				431.875.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	431.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.000.000		
						jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	100	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				135.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	15	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				185.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	50	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					160.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	Unit	3	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				80.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	8	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.241.343.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	Laporan	4	4.241.343.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.343.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.343.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					877.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	Unit	239	877.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	100	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				22.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	100	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								610.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	610.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						610.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3.01	610.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					610.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	610.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				411.510.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	411.510.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				198.490.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	198.490.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									78.415.153.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB									9.913.542.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12.99		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah								1.499.384.000		
						Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0.38	1.499.384.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						1.499.384.000		
						Persentase koperasi berkualitas	%	26.74	1.499.384.000	Bidang Pengawasan	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					645.052.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	645.052.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				645.052.000		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit	120	645.052.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					854.332.000		
						Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	854.332.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	
		2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				854.332.000		
						Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit	280	854.332.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
	Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah								8.414.158.000		
						Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7.39	8.414.158.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						734.908.000		
						Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	11.5	734.908.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					734.908.000		
						Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	%	90	734.908.000	SEKSI PENYELENGGARA	
		2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				734.908.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	125	734.908.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						1.606.604.000		
						Persentase koperasi provinsi produktif	%	48.53	1.606.604.000	Bidang Kelembagaan	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.606.604.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya	%	42.93	705.776.000	SEKSI TATALAKSANA	
		2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				705.776.000		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit	145	705.776.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya	%	33.56	900.828.000	SEKSI ORGANISASI	
		2.17.06.1.01.0009			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				900.828.000		
						Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit	150	900.828.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						3.494.064.000		
						Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	25	865.220.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					865.220.000		
						Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya	%	95.86	865.220.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				865.220.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	2075	865.220.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi
						Persentase usaha mikro mandiri	%	82.3	2.628.844.000		
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					2.628.844.000		
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya	%	94.14	2.080.904.000		
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit	240	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				650.000.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit	100	650.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				1.130.904.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	800	1.130.904.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya	%	94.44	547.940.000		
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				547.940.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	300	547.940.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						2.578.582.000		
						Persentase UMKM siap bermitra	%	23.08	2.578.582.000	Bidang Bina Usaha	
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					2.578.582.000		
						Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya	%	30	2.578.582.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				554.320.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi	Unit	280	554.320.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.08.1.01.0003			Pengembangan Usaha Kecil				2.024.262.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	250	2.024.262.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									25.907.910.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	88		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								25.421.466.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95	25.421.466.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25.421.466.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.270.288.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.680.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	325.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.400.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	41.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124.280.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	124.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					97.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	52	97.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.700.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	47	22.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.520.908.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	38	3.520.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				883.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	883.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.606.308.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.606.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	161	326.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	22	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	131	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	21.151.178.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.483.160.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	38	16.483.160.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.933.826.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	7	15.933.826.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				421.590.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	421.590.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				127.744.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	127.744.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					26.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	26.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.398.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.398.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				115.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.000.000		
						Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	44	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	35	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.758.018.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	2.758.018.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.058.018.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.058.018.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	133	286.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	16.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	25	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								486.444.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	486.444.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						486.444.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	486.444.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					486.444.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	486.444.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				311.444.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	311.444.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				175.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	175.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									35.821.452.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah									20.185.806.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	84		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								19.881.459.000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80.5	19.881.459.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.881.459.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.881.459.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.263.466.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	16.263.466.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.933.466.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	86	15.933.466.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				330.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	330.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					54.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	54.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				24.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					680.674.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	680.674.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	87.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				68.854.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	68.854.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				279.820.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	279.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					370.173.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	27	370.173.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				370.173.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	27	370.173.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.099.646.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.099.646.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	600.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.467.146.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.467.146.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					333.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	187	333.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	24	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	4.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	150	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				109.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	109.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah								304.347.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.1	304.347.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						304.347.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	304.347.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					304.347.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	304.347.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				158.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	158.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				146.347.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	146.347.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal									4.939.212.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4.25		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan								2.204.602.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	2.204.602.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.654.602.000		
						Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	532.852.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					532.852.000		
						Persentase standar pelayanan sesuai ISO	%	90	274.344.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				274.344.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	154.344.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	1	120.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan	%	100	258.508.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				258.508.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun	Orang	1	228.508.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	317.148.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
					Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				317.148.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	317.148.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				317.148.000		
						Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan	Kali	60	56.480.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat	Kali	600	260.668.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91	804.602.000	Bidang Pelayanan Perizinan	
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				804.602.000		
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Dokumen	800	245.060.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				216.860.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Unit	900	216.860.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				28.200.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Kali	2	28.200.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Dokumen	700	357.142.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				328.940.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Unit	900	328.940.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				28.202.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Kali	2	28.202.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Dokumen	500	202.400.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				174.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Unit	1000	174.200.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				28.200.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian	Kali	2	28.200.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						550.000.000		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	550.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					550.000.000		
						Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	343.936.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				343.936.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	1	343.936.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
						Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	%	100	206.064.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				206.064.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	Dokumen	4	206.064.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN								2.734.610.000		
						Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	2.734.610.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						560.640.000		
						Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	560.640.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					310.640.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	310.640.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				310.640.000		
						Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	310.640.000	SEKSI PERENCANAAN	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					250.000.000		
						Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Wilayahahan Penanaman Modal yang dipromosikan	Dokumen	1	250.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	250.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.612.500.000		
						Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	230.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					230.000.000		
						Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan	Dokumen	8	230.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				230.000.000		
						Jumlah fasilitasi kemitraan usaha	Kali	16	230.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
						Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	67	1.382.500.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.382.500.000		
						Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	Dokumen	35	1.157.500.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1.127.500.000		
						Jumlah promosi penanaman modal	Kali	1	1.127.500.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				30.000.000		
						Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PROMOSI	
						Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan	Dokumen	35	225.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				225.000.000		
						Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN	Kali	24	225.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						561.470.000		
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	22	561.470.000	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					561.470.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui	Unit	20500	161.470.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
		2.18.05.1.01.0005			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				161.470.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal	Unit	2100	161.470.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
						Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	Orang	100	156.440.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				156.440.000		
						Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	2	156.440.000	SEKSI PENGENDALIAN	
						Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Unit	200	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal				200.000.000		
						Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal	Kali	80	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	%	80	43.560.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				43.560.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Dokumen	11	43.560.000	SEKSI PENGENDALIAN	
JUMLAH									25.125.018.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									49.976.367.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80.41			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								49.426.337.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	49.426.337.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						49.426.337.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	45.926.337.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.526.337.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	27.526.337.000		
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.066.337.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	170	27.066.337.000		
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				460.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	460.000.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000		
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					250.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	250.000.000		
		X.XX.01.1.05.001 1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				250.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Orang	50	250.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.930.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.930.000.000		
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	130.000.000		
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	300.000.000		
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				270.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	270.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.000.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					600.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	600.000.000		
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	600.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.580.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	13.580.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.700.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11.700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	11.700.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.640.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.640.000.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	100.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				290.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	290.000.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	250.000.000		
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	12	100.000.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	800.000.000		
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	100.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%		3.500.000.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	100	150.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					184.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		184.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	100.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.055.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		2.055.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	2.000.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	50.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.111.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		1.111.000.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				111.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	111.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.000.000.000		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								550.030.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.02	550.030.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						550.030.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	550.030.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					550.030.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	550.030.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.030.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	300.030.000		
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	250.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Olahraga									388.786.000.000		
						Sport Development Index (SDI)	%	0.45			
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent								388.786.000.000		
						Peringkat nasional pada kejuaraan multievent	Peringkat	3	388.786.000.000		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						388.786.000.000		
						Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	105	23.086.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					9.000.000.000		
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Orang	105	9.000.000.000		
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				9.000.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Orang	2	9.000.000.000		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					600.000.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	190	600.000.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				600.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	10	600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					13.486.000.000		
						Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	Orang	284	13.486.000.000		
		2.19.03.1.03.0001			Seleksi Atlet Daerah				300.000.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	300	300.000.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				13.186.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	215	13.186.000.000		OPD Provinsi
						Persentase peningkatan perolehan medali	%	31.25	365.700.000.000		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					17.320.000.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	250	17.320.000.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				3.800.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	50	3.800.000.000		
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	150.000.000		
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				13.370.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	9	13.370.000.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					348.380.000.000		
						Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	125	348.380.000.000		
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				70.055.000.000		
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	200	70.055.000.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				550.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	500	550.000.000		
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				150.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	150.000.000		
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				277.625.000.000		
						Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	700	277.625.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									15.785.000.000		
						Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1737000000000			
						Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8.26			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif								550.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota kreatif	Kabupaten/	1	550.000.000		
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						550.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/ Kota	8	550.000.000		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					450.000.000		
						Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kabupaten/	2	450.000.000		
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				450.000.000		
						Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	Unit	3	450.000.000		
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					100.000.000		
						Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Orang	80	100.000.000		
		3.26.04.1.02.0008			Perlindungan Hasil Kreativitas				100.000.000		
						Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	50	100.000.000		
	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan								15.235.000.000		
						Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	15073629	15.235.000.000		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						6.200.000.000		
						Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	26.67	6.200.000.000		
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					5.200.000.000		
						Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	2	5.200.000.000		
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				5.200.000.000		
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	5.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					500.000.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola	Lokasi	2	500.000.000		
		3.26.02.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				500.000.000		
						Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan	Orang	50	500.000.000		
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		
						Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Dokumen	110	500.000.000		
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				118.000.000		
						Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	1	118.000.000		
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata				382.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Unit	200	382.000.000		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						5.660.000.000		
						Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	54069703	5.660.000.000		
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					5.660.000.000		
						Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Orang	450000	5.010.000.000		
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				350.000.000		
						Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	350.000.000		
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4.660.000.000		
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	30	4.660.000.000		
						Tujuan Pasar Wisata Potensial	Lokasi	3	650.000.000		
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				650.000.000		
						Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	650.000.000		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						3.375.000.000		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	33.87	3.375.000.000		
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					2.675.000.000		
						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	831	2.675.000.000		
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				350.000.000		
						Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	3	350.000.000		
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				1.275.000.000		
						orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	400	1.275.000.000		
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				1.050.000.000		
						SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	180	1.050.000.000		
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					700.000.000		
						Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Orang	240	700.000.000		
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				200.000.000		
						Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	Orang	0	200.000.000		
		3.26.05.1.02.0003			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				500.000.000		
						SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	80	500.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Pemuda									11.225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	58.25			
	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda								3.250.000.000		
						Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	11.5	3.250.000.000		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						3.250.000.000		
						Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	10	3.250.000.000		
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					3.250.000.000		
						Jumlah wirausaha muda	Orang	100	300.000.000		
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				300.000.000		
						Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	85	300.000.000		
						Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	Lokasi	100	1.350.000.000		
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				700.000.000		
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	500	700.000.000		
		2.19.02.1.01.0012			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi				650.000.000		
						Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	Orang	200	650.000.000		
						Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	Dokumen	4	1.600.000.000		
		2.19.02.1.01.0014			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi				1.600.000.000		
						Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	300	1.600.000.000		
	Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda								7.975.000.000		
						Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	38.75	7.975.000.000		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						7.975.000.000		
						Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	75	7.975.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					7.975.000.000		
						Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	250	7.975.000.000		
		2.19.02.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				225.000.000		
						Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Orang	100	225.000.000		
		2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				7.750.000.000		
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	Dokumen	2	7.750.000.000		
JUMLAH									465.772.367.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									33.389.359.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								33.214.359.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	33.214.359.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						33.214.359.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	33.214.359.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.887.910.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	27.887.910.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.637.910.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	145	27.637.910.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					95.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 7			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					61.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	61.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				46.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	46.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.074.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.074.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				75.000.000		
						jumlah paket bahan/material	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				175.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	38	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.661.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	8	3.661.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.300.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	86.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.265.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	2.265.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.449.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	235.449.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.449.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	100.449.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								175.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.02	175.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						175.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	175.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					175.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	175.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				135.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	135.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	40.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan									771.598.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	95		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi								771.598.000		
						Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi	Nilai	95.57	771.598.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						701.598.000		
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	30.26	220.000.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					120.000.000		
						Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	Unit	23	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					100.000.000		
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	85.36	100.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	41	100.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
						Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	245.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					25.000.000		
						Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	1500	25.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.02.1.01.0004			Penyusutan Arsip Dinamis				25.000.000		
						Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	Arsip	1750	25.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					220.000.000		
						Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	12000	220.000.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis				220.000.000		
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1250	50.000.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	70.000.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	11500	100.000.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	79	236.598.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					236.598.000		
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	1000	75.000.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				75.000.000		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	1 petak /tahun	3250	75.000.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	161.598.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				161.598.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	4	161.598.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						70.000.000		
						Persentase arsip yang diselamatkan	%	65.92	45.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					25.000.000		
						Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	500	25.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				25.000.000		
						Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	600	25.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					20.000.000		
						Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	272000	20.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Arsip	12000	20.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
						Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	20	25.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					25.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	8	25.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.03.1.01.0001			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				25.000.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun	Arsip	10000	25.000.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
Meningkatkan Literasi Masyarakat									1.640.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15.62		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat								1.640.000.000		
						Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	74	1.640.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.400.000.000		
						Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	1.105.000.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					640.000.000		
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis	10	90.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0007			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				40.000.000		
						Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jenis	5	40.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				50.000.000		
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	Unit	1	50.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	5	550.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				550.000.000		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eks	9500	550.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					465.000.000		
						Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	20	30.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				30.000.000		
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Unit	1	30.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	2657000	435.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0002			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				435.000.000		
						Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Unit	7	435.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	88.89	180.000.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					180.000.000		
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	8	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Unit	3	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				30.000.000		
						Jumlah data dan informasi perpustakaan	Dokumen	1	30.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
						Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	20	100.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				25.000.000		
						Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Unit	5	25.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				75.000.000		
						Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Orang	30	75.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
						Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	61.54	115.000.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					115.000.000		
						Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	3	115.000.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				60.000.000		
						Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus	Lokasi	5	60.000.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				30.400.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Orang	12	30.400.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				24.600.000		
						Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	24.600.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						240.000.000		
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	92.25	240.000.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					80.000.000		
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	Unit	194	80.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				20.000.000		
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eks	2700	20.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				60.000.000		
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Unit	3	60.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					50.000.000		
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	50.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah				35.000.000		
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	Dokumen	4450	35.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah				15.000.000		
						Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					40.000.000		
						Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan	Eks	32	40.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.03.0002			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				40.000.000		
						Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eks	7	40.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					70.000.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Eks	593	70.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				40.000.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	5	40.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				30.000.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	225	30.000.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
JUMLAH									35.800.957.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									2.914.380.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108.05		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)								1.942.120.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	40.92	1.942.120.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.942.120.000		
						Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160800	801.310.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					99.500.000		
						Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	99.500.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				95.500.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	Kabupaten/ Kota	35	95.500.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				4.000.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan	Orang	30	4.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					697.810.000		
						Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Jenis	2	282.940.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				282.940.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilanny	Orang	70	282.940.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahnya	Unit	5	130.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				130.000.000		
						Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	Paket	0	130.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Unit	35	284.870.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				284.870.000		
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	900	235.750.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	Orang	30	49.120.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					4.000.000		
						Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Dokumen	1	4.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.03.0001			Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	Orang	25	4.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	1.140.810.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.140.810.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Sertifikat	425	950.122.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				950.122.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	Dokumen	1	708.432.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memada	Paket	2	140.690.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	Unit	2	101.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Sertifikat	100	87.980.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				87.980.000		
						Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	Unit	80	87.980.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Dokumen	1	102.708.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				102.708.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	Dokumen	2	73.552.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						JUmlah DOKumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifikasi	Dokumen	2	13.336.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	Orang	20	15.820.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan								575.760.000		
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Nilai Tukar Nelayan	Angka	105.5	575.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
									575.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108.54	575.760.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					558.510.000		
						Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	5050	558.510.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				558.510.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	Dokumen	1	7.000.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	Orang	5000	528.760.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan	Orang	25	13.250.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	Kelompok	25	9.500.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.250.000		
						Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	Orang	60	17.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				17.250.000		
						Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	17.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan								396.500.000		
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110.5	396.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						396.500.000		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111.55	396.500.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					396.500.000		
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	60	396.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				396.500.000		
						Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan	Kelompok	20	12.120.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
						Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	Orang	40	384.380.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan									3.569.784.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0.79		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif								3.569.784.000		
						Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	63	3.569.784.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						1.586.048.000		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	382.824.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					382.824.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	155.813.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				155.813.000		
						Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	Dokumen	1	155.813.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Orang	4	227.011.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				227.011.000		
						Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	Orang	200	155.786.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	Lokasi	4	71.225.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4	386.389.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					362.219.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	53.360.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				53.360.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	9.160.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	10.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	34.200.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Ha	2.2	308.859.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				308.859.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	308.859.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					24.170.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	24.170.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				24.170.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	24.170.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2.93	282.954.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					266.514.000		
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2.2	266.514.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				266.514.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	266.514.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					16.440.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	16.440.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				16.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	16.440.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	7.8	533.881.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					506.881.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	138.140.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				138.140.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	65.440.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	57.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	14.900.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2.2	368.741.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				368.741.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	249.370.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	4	119.371.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					27.000.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	27.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				27.000.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	27.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						227.375.000		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	50	227.375.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					227.375.000		
						Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	227.375.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				227.375.000		
						Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	Orang	30	227.375.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.756.361.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	109.162.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					109.162.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	7	109.162.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				109.162.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	109.162.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	151.676.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					151.676.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	10	151.676.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				151.676.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	151.676.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	83.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					83.000.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	8	83.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				83.000.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	10	83.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	606.023.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					494.123.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	50.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0004			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				50.000.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana	Kelompok	3	50.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	81.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan				27.300.000		

					sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	362.223.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				71.071.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	%	100	71.071.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				278.452.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	%	100	278.452.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				12.700.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	%	100	12.700.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					111.900.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	81.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	30.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15.000.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	15.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				7.500.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	7.500.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				7.500.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	7.500.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	293.075.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					251.735.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	251.735.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				10.390.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	10.390.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				230.955.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	12	230.955.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				10.390.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	10.390.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					41.340.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	41.340.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15.820.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	15.820.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				15.130.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	10	15.130.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				10.390.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	10	10.390.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	240.505.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					73.826.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	73.826.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				9.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	12	9.350.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				8.468.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	12	8.468.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				56.008.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	10	56.008.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					166.679.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	166.679.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				55.898.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Orang	12	55.898.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				56.263.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Orang	10	56.263.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				54.518.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Orang	12	54.518.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	272.920.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					119.322.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	119.322.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				56.048.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	56.048.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				5.909.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	24	5.909.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				57.365.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	57.365.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					153.598.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	153.598.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.086.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	57.086.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				46.216.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	46.216.000	SEKSI PENGAWASAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				50.296.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	50.296.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									55.662.881.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								54.921.136.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	54.921.136.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.921.136.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	248.690.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.960.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	88.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.690.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.230.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	52.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.040.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	33.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	68.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.330.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	91.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.000 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	24.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.450.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	97.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	21.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	46.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.500.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	33.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	48.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	17.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	18	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	253.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	202.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	164.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					11.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	98.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	54.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				41.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	117.590.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					31.120.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	31.120.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.820.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.820.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	18.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	11.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	32.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.470.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	54.470.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.220.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	16.220.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.250.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	64.300.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					12.660.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	12.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.160.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.140.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	17.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.140.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	51.272.346.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.061.846.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.061.846.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.991.846.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	327	46.991.846.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				920.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	920.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					220.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					756.250.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	756.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				462.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	462.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					507.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	507.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				507.250.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	507.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.437.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.437.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				430.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	115.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	53.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.000.000		
						Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Unit	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	116.052.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	55.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	53.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.652.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	15.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.652.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	416.480.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					189.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	189.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.540.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.950.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.740.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.850.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.460.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.510.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.950.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	148.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	34.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	12.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	42.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	56.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	188.254.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.254.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.754.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	32.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	73.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	608.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					460.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	460.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				455.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	455.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	174.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	119.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	117.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	35.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	513.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	284.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				282.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	282.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	229.724.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.324.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	81.324.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.324.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	73.324.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					82.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	66.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.400.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	31.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								741.745.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.6	741.745.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						741.745.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	741.745.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					741.745.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	741.745.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				359.445.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	359.445.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				382.300.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	382.300.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan									24.483.403.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1.1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Garam								520.062.000		
						Produksi garam	Ton	134640	520.062.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						520.062.000		
						Persentase produksi garam	%	2	520.062.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					520.062.000		
						Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	42.880.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				42.880.000		
						Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	Orang	100	42.880.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	13.645.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				13.645.000		
						Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	Orang	25	13.645.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	452.737.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				452.737.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	Jenis	1	207.300.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	Ha	10	245.437.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Lokasi	5	10.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				10.800.000		
						Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	Kabupaten/ Kota	9	10.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Perikanan								23.963.341.000		
						Produksi perikanan	Ton	952718	23.963.341.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						9.778.793.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72.72	583.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					583.640.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	120.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				120.980.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	10	52.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	70	6.150.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.480.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	44.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah fungsi pengusaha yang dilaksanakan	Jenis	5	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				9.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	80	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	75	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	2.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				2.300.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	2.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	66.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				66.500.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	66.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	3	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				4.500.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	4	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	380.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				380.360.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	380.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	635.108.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					635.108.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	416.888.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				416.888.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2800	349.168.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	27.870.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	320	23.850.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	87.665.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				87.665.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	100	87.665.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	43	123.355.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				123.355.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	123.355.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	90	7.200.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	40000	7.200.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	72.27	584.829.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					584.829.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	31.887.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.887.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	5.887.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	45	16.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	18.327.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				18.327.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40	5.025.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	60	13.302.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	50	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				60.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	98.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				98.215.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	98.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	60	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				50.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	70	326.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				326.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	10	326.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	1.104.456.000			
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.104.456.000			
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	46.000.000			
									46.000.000			
							Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2800	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	1100	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG	
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG	
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	110	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG	
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	3.000.000			
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				3.000.000			
							Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1200	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
							Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	3	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	10	100.000.000			
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				100.000.000			
							Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
							Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	400.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				400.000.000			
							Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
							Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	10	31.656.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.656.000			
							Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3500	31.656.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
							Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	10	523.800.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				523.800.000			
							Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	523.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
							Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	537.390.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					537.390.000			
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	64.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				64.060.000			
							Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	140	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	15	9.472.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	6.148.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL	
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	8.440.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL	
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	11.585.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				11.585.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	120	9.895.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	41	1.690.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	45	115.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				115.500.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	115.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	9	2.885.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				2.885.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	15	2.885.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	32	303.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				303.360.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	303.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhananan PPP Lohgending	%	63	592.038.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					592.038.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	165.275.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				165.275.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	36	8.700.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	118	70.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	80.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	120	6.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	17.500.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				17.500.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	165	10.925.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	10	6.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	50	14.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				14.575.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	14.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	54	383.538.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				383.538.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	383.538.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	60	4.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				4.575.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	90	4.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	6.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				6.575.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	6.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	834.694.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					834.694.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	100.592.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				100.592.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	20.402.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	55	10.440.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	61.250.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	8.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	23.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				23.275.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	150	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	13.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	57	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				8.775.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	66	310.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				310.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	310.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	20	7.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				7.500.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	150	7.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	14	384.552.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				384.552.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	384.552.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	1.259.793.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.259.793.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	93.153.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				93.153.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	6500	9.830.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	6500	20.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	30.443.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	32.880.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	94.410.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				94.410.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	6500	43.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	75	51.210.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	57.14	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				60.960.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	100	215.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				215.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	215.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	35	63.550.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				63.550.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	20000	63.550.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	7.4	732.720.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				732.720.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	732.720.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	71.72	614.684.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					614.684.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	78.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				78.000.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	50	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	5	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2000	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	43	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	55.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				55.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	55.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				100.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	7	26.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				26.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	60	26.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	25	315.684.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				315.684.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	315.684.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhananan PPP Tegalsari	%	72	1.197.023.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.197.023.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	885.329.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				885.329.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	3000	785.424.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	200	23.760.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	69.240.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	350	6.905.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	41.189.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				41.189.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1300	15.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	26.189.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	33	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	70	183.853.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				183.853.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	183.853.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	90	24.465.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				24.465.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10000	24.465.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	54.987.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				54.987.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	54.987.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhananan PPP Wonokerto	%	81.82	554.947.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					554.947.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	16.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				16.200.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	1050	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	60	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	9.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	119.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				119.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	120	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	40	113.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	28	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	42	408.447.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				408.447.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	408.447.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	16.22	1.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.300.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	1.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	25	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				3.000.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	1.280.191.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					238.216.000		
						Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Dokumen	4	180.931.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				180.931.000		
						Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	Kelompok	1	9.500.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya	Lokasi	1	171.431.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	343717.5	57.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				57.285.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	Kabupaten/Kota	34	57.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.041.975.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	280	150.100.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				150.100.000		
						Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	Unit	160	82.650.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	Unit	40	67.450.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0.25	891.875.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				490.000.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	0	490.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				401.875.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	15	376.875.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Lokasi	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						14.184.548.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	808.192.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					808.192.000		
						Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	452.707.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.0006			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				452.707.000		
						Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	Kabupaten/Kota	35	44.932.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Lokasi	35	396.675.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Orang	350	11.100.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	340.485.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				340.485.000		
						Jumlah Parameter Pengujian	Unit	1	171.500.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	400	20.660.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	Sertifikat	2	148.325.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	%	29	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				15.000.000		
						Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	Jenis	5	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	11.274.856.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					622.000.000		
						Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	5	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	602.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				250.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangun	Unit	1	250.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				352.000.000		
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	1575	352.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									10.652.856.000		
						Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	10.652.856.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.652.856.000		
						Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	Ekor	200000	38.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	Unit	9	4.611.566.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi/Dibangun	Kg	10500	2.755.546.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	31500000	351.712.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	Ekor	5250	2.896.032.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi perikanan budidaya	Ton	609000	2.101.500.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					203.500.000		
						Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	127	203.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.0002			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				110.000.000		
						Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	Unit	3	64.040.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	Unit	5	37.420.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	1	8.540.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				93.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	Kabupaten/Ko	35	93.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1.898.000.000		
						Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	1.898.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.898.000.000		
						Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	0	1.898.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									86.630.448.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kesejahteraan peternak									691.550.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100.8		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak								691.550.000		
						Persentase nilai tambah produk hasil ternak	%	5	691.550.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						350.000.000		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	12	350.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					350.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	Unit	2	350.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.03.1.01.0019			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				350.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	Kelompok	3	151.320.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan	Kelompok	1	22.100.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran	Kelompok	1	119.180.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran	Orang	10	57.400.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						341.550.000		
						Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	3.5	341.550.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					341.550.000		
						Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	Buah	15	341.550.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				341.550.000		
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	Unit	40	96.500.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
						jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	Unit	6	245.050.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									54.552.687.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								53.086.159.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	53.086.159.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.086.159.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.190.746.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.746.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	194.746.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	2.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				81.616.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	81.616.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.880.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	23.880.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	20.300.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.950.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	53.950.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	500.000	Balai veteriner semarang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	305.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	230.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	75.000.000	Balai veteriner semarang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					685.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	685.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	11.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	53.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				605.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	605.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	11.000.000	Balai veteriner semarang	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.118.889.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					665.489.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	665.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				207.185.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	207.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				66.880.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	66.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				232.424.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	232.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					888.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	888.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				288.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	288.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	329.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				329.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	329.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.236.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.236.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.040.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.040.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	589.267.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					159.267.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	159.267.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.250.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	11.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1.800.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.202.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	31.202.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.900.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.480.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	23.480.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.460.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	68.460.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				675.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	675.000	Balai veteriner boyolali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					352.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	352.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				310.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	310.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	41.000.000	Balai veteriner boyolali	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	78.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	11.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	19.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	18.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	9.500.000	Balai veteriner boyolali	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.073.900.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					442.380.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	442.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				189.375.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	189.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.202.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.068.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	43.068.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				194.735.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	194.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					176.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	176.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	172.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.455.320.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.455.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.900.000		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	49.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.420.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	155.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				200.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.050.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.050.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	46.113.357.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					33.862.915.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	33.862.915.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				33.546.515.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	205	33.546.515.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				266.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	266.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					178.740.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	178.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				8.740.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	8.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				30.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					108.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	0	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				108.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					555.316.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	555.316.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.106.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.106.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.614.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	78.614.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.246.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	27.246.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				96.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	96.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				87.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	87.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.550.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.173.386.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	10.173.386.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				630.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	630.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.537.386.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	9.537.386.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.040.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.040.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				360.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	360.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				178.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	178.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				183.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	183.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								1.466.528.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.4	1.466.528.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.466.528.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.466.528.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.466.528.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.466.528.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				349.768.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	349.768.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.116.760.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1.116.760.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan									88.032.804.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
						Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3.1		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Tercapainya Produksi Daging								80.168.175.000		
						Produksi daging	Kg	457959903	80.168.175.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						33.336.929.000		
						Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	9.763.031.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					9.763.031.000		
						Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Laporan	4	9.763.031.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				9.763.031.000		
						Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	Unit	3	99.891.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	Unit	12	9.663.140.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3745066	15.628.020.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					2.250.000.000		
						Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	0	2.100.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				2.100.000.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	6	2.100.000.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	1	150.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				150.000.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	1	100.000.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong	Orang	20	50.000.000	SEKSI PRODUKSI	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					13.378.020.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	1	12.164.910.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan				12.164.910.000		

					Kewenangan Provinsi						
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong	Orang	40	30.000.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong	Unit	1	12.134.910.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	1	1.213.110.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.000 4			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.213.110.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	323.000.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong	Orang	20	70.110.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong	Unit	4	820.000.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	166.969.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					166.969.000		
						Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan	Ekor	10000	166.969.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.000 1			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				166.969.000		
						Jumlah obat hewan yang di fasilitasi	Unit	10000	166.969.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	4.280.409.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					4.280.409.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	1.483.440.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.000 1			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.483.440.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia potong	Ekor	20414	1.483.440.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	2.796.969.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.000 1			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.796.969.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB	Ekor	61	608.000.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Jumlah produksi ternak ruminansia potong	Ekor	144	2.188.969.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	3.498.500.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.498.500.000		
						Jumlah Produksi semen segar	Angka	27000	1.874.200.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.874.200.000		
						Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	Ekor	27	1.874.200.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
						Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi	%	80	1.624.300.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.624.300.000		
						Jumlah semen beku yang terdistribusi	Dosis	432000	1.624.300.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						124.710.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	12	124.710.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					124.710.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong	Kelompok	3	26.060.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				26.060.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	1	26.060.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong	Unit	2	11.420.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				11.420.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong	Orang	60	11.420.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong	Kelompok	2	87.230.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				87.230.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong	Unit	2	87.230.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						37.941.604.000		
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	4	34.235.350.000	Bidang Veteriner	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					34.235.350.000		
						Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS)	Laporan	4	34.235.350.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.1.01.0007			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				34.235.350.000		
						Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS	Ekor	2000	34.075.350.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
						Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi	Ekor	14000	160.000.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	1.425.733.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					1.425.733.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	897.873.000	Balai veteriner boyolali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				897.873.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	sampel	26400	897.873.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	188.800.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				188.800.000		
						Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan	Ekor	1750000	188.800.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	339.060.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				339.060.000		
						Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan	Ekor	13950	339.060.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	1.483.571.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					1.483.571.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	711.300.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				711.300.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	sampel	25750	711.300.000	Balai veteriner semarang	
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	290.100.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				290.100.000		
						Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara	Ekor	1750000	290.100.000	Balai veteriner semarang	
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	482.171.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				482.171.000		
						Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara	Ekor	14750	482.171.000	Balai veteriner semarang	
						Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	7	796.950.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					796.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif	Unit	6	796.950.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				796.950.000		
						Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif	Unit	6	796.950.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						8.764.932.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1.08	8.764.932.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					8.764.932.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk	Kelompok	3	8.764.932.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				8.764.932.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong	Kelompok	4	8.640.390.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong	Orang	250	124.542.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
	Tercapainya Produksi Susu								1.378.683.000		
						Produksi susu	Kg	94005743	1.378.683.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.140.706.000		
						Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	113440	437.675.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					150.000.000		
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	1	150.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				150.000.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	1	100.000.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah	Orang	20	50.000.000	SEKSI PRODUKSI	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					287.675.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	1	130.785.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				130.785.000		
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah	Orang	40	30.000.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah	Unit	1	100.785.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	1	156.890.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan				156.890.000		

					Kewenangan Provinsi						
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	89.260.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah	Orang	20	67.630.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	703.031.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					703.031.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu	%	1	703.031.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.000 1			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				703.031.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB	Ekor	3	81.296.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Jumlah produksi ternak ruminansia perah	Ekor	10	621.735.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						156.772.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	12	156.772.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					156.772.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah	Kelompok	1	7.332.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.000 9			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				7.332.000		
						Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	1	7.332.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah	Unit	1	15.085.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.000 9			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				15.085.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah	Orang	30	15.085.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah	Kelompok	2	134.355.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.000 9			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				134.355.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah	Unit	2	134.355.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						81.205.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3.62	81.205.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					81.205.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk	Unit	1	81.205.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.000 6			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				81.205.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah	Kelompok	4	33.340.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah	Orang	180	47.865.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
	Tercapainya Produksi Telur								6.485.946.000		
						Produksi telur	Kg	345079651	6.485.946.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.655.865.000		
						Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	247848	22.305.000	Bidang Budidaya	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					22.305.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	0	22.305.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				22.305.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur	Unit	1	22.305.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	2.633.560.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					2.633.560.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur	%	1	2.633.560.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.633.560.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	Ekor	27060	2.633.560.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						568.518.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	12	568.518.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					568.518.000		
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur	Unit	2	10.110.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				10.110.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur	Orang	60	10.110.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur	Kelompok	2	558.408.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				558.408.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur	Unit	2	558.408.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						3.261.563.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2.29	3.261.563.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					3.261.563.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk	Kelompok	1	3.261.563.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				3.261.563.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur	Kelompok	4	3.229.630.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur	Orang	120	31.933.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
JUMLAH									143.277.041.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah									37.915.835.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
						Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0.16		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura								6.332.000.000		
						Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	2.5	1.070.945.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.070.945.000		
						Produksi bawang merah	Ton	527875	1.070.945.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.070.945.000		
						Jumlah Luas Panen Bawang Merah	Ha	52776	1.070.945.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.070.945.000		
						Jumlah Luas Tanam Bawang Merah	Ha	55	1.070.945.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Persentase peningkatan produksi cabe	%	1.5	4.078.055.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.078.055.000		
						Produksi cabai	Ton	346115	4.078.055.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					4.078.055.000		
						Jumlah Luas Panen Cabai	Ha	44364	4.078.055.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				4.078.055.000		
						Jumlah Luas Tanam Cabai	Ha	300	4.078.055.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Persentase peningkatan produksi durian	%	2.5	550.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						550.000.000		
						Produksi durian	Ton	153410	550.000.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					550.000.000		
						Jumlah Luas Panen Alpukat	Ha	15	390.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				390.000.000		
						Jumlah Luas Tanam Alpukat	Ha	20	390.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Jumlah Luas Panen Durian	Ha	28	160.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				160.000.000		
						Jumlah Luas Tanam Durian	Ha	10	160.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Persentase peningkatan produksi jahe	%	3	98.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						98.000.000		
						Produksi jahe	Ton	35908	98.000.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					98.000.000		
						Jumlah Luas Panen Jahe	Ha	1647	98.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				98.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Luas Tanam Jahe	Ha	1	63.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Jumlah Luas Tanam Kencur	Ha	1	35.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Persentase peningkatan produksi melati	%	2	535.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						535.000.000		
						Produksi melati	Ton	25120	535.000.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					535.000.000		
						Jumlah Luas Panen Melati	Ha	2	535.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				535.000.000		
						Jumlah Luas Tanam Melati	Ha	3	535.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan								26.486.627.000		
						Persentase peningkatan produksi jagung	%	0.2	749.745.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						749.745.000		
						Produksi jagung	Ton	3583730	749.745.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					749.745.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung)	Ha	584552	749.745.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				749.745.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya	Ha	700	749.745.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
						Persentase peningkatan produksi kedelai	%	0.2	361.269.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						361.269.000		
						Produksi kedelai	Ton	52762	361.269.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					361.269.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai)	Ha	31303	361.269.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				361.269.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih kedelai	Ha	200	361.269.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
						Persentase peningkatan produksi padi	%	0.2	25.375.613.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						16.460.331.000		
						Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	2.724.901.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.724.901.000		
						Jumlah kelembagaan pengelola alsintan	Unit	1133	2.724.901.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2.724.901.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan	Kelompok	110	2.724.901.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
						Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	1.180.950.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.180.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan	Komoditi	6	85.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				85.000.000		
						Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar	Kabupaten/Kota	35	85.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	105	1.065.950.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.065.950.000		
						Angka persentase susut hasil padi	%	10.15	100.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Unit	5	965.950.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	35	30.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				30.000.000		
						Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Paket	7	30.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiyah Surakarta	%	85	2.603.073.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.603.073.000		
						Jumlah produksi benih Buah	Batang	15000	834.124.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				834.124.000		
						Jumlah Produksi benih Tanaman Buah	Batang	20000	834.124.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Kedelai	Ton	1.6	18.867.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				18.867.000		
						Jumlah Produksi benih Palawija	Ton	0.8	18.867.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Kentang	Ton	8	368.675.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				368.675.000		
						Jumlah Produksi benih Sayur	Ton	8	368.675.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Padi	Ton	49	1.236.833.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.236.833.000		
						Jumlah Produksi benih Padi	Ton	91	1.236.833.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Planlet	Batang	17000	144.574.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				144.574.000		
						Jumlah Produksi Planlet benih	Batang	22000	144.574.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	2.483.517.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.483.517.000		
						Jumlah pengembangan tanaman hias	Batang	525	147.556.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				147.556.000		
						Jumlah pengembangan Tanaman Hias	Batang	12000	147.556.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih bawang merah	Ton	4.25	82.245.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				82.245.000		
						Jumlah luas Perbanyakkan Benih Bawang Merah	Ha	0.5	82.245.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	77.35	1.350.324.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.350.324.000		
						Jumlah luas Perbanyakkan Benih Padi	Ha	36	1.350.324.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	5.44	7.910.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				7.910.000		
						Jumlah luas Perbanyakkan Benih Palawija	Ha	0.5	7.910.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah Produksi benih tanaman buah	Batang	1000	895.482.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				895.482.000		
						Jumlah perbanyakkan benih Tanaman Buah	Batang	1000	895.482.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	2.670.893.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.670.893.000		
						Jumlah perbanyakkan benih tanaman buah	Batang	2000	813.278.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				813.278.000		
						Jumlah perbanyakkan benih tanaman buah	Batang	1000	813.278.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	35	1.832.615.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.832.615.000		
						Luas perbanyakkan benih padi	Ha	47	1.832.615.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	0.1	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				25.000.000		
						Luas perbanyakkan benih sayuran	Ha	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	1.079.747.000		
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.079.747.000		
						Pengawasan peredaran benih perkebunan	Bulan	12	36.208.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				36.208.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	Bulan	12	36.208.000		
						Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan	Bulan	12	228.142.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				228.142.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	Bulan	12	228.142.000		
						Pengujian laboratorium hortikultura	Lembar	122	27.140.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				27.140.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	Lembar	1075	27.140.000		
						Pengujian laboratorium tanaman pangan	Lembar	1.075	40.283.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				40.283.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	Lembar	122	40.283.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Sertifikasi benih hortikultura buah	Batang	518175	138.351.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				138.351.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	Batang	518175	138.351.000		
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ha	110	159.390.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				159.390.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	Bulan	12	123.390.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	Ton	110	36.000.000		
						Sertifikasi benih padi	Ha	5454	376.028.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				376.028.000		
						Tersedianya benih padi bersertifikat	Ton	5454	376.028.000		
						Sertifikasi benih palawija	Ha	1111	51.705.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				51.705.000		
						Tersedianya benih palawija bersertifikat	Ton	1111	51.705.000		
						Sertifikasi benih tanaman perkebunan	Batang	848720	22.500.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				22.500.000		
						Tersedianya benih tanaman perkebunan	Batang	848720	22.500.000		
						Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	350.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					350.000.000		
						jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Unit	20	350.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				350.000.000		
						Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan	Orang	300	350.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2.5	656.900.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					656.900.000		
						luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani	Ha	16550	656.900.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				656.900.000		
						Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi	Ha	15500	656.900.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2.5	312.657.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					312.657.000		
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi	Ha	200	312.657.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				312.657.000		
						jumlah benih mendukung optimasi lahan	Kg	500	10.500.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan	Ton	30	302.157.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	93	236.757.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					236.757.000		
						jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi	Kabupaten/Kota	35	236.757.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				236.757.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk	Orang	350	236.757.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Produksi padi	Ton	9613469	2.160.936.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.160.936.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi)	Ha	1689538	2.160.936.000	SEKSI PADI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2.160.936.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Padi	Ha	5100	2.160.936.000	SEKSI PADI	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						5.960.000.000		
						Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7420274	5.960.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Penataan Prasarana Pertanian					5.960.000.000		
						Persentase Jaringan irigasi alternatif	%	5	4.880.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4.880.000.000		
						Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit)	Unit	40	4.880.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	1.88	1.080.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1.080.000.000		
						jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m)	m	900	1.080.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						745.000.000		
						Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	10	100.000.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					100.000.000		
						Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani	%	10	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000		
						Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani	Ha	40	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	645.000.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					645.000.000		
						Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman	%	15	645.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				645.000.000		
						Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Liter	285	25.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe)	Ha	20	165.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai)	Ha	300	410.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi)	Ha	20	45.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						2.210.282.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	1.440.282.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					256.970.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	256.970.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.01.0004			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				256.970.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	237	256.970.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					560.000.000		
						Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	%	0.2	560.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				560.000.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran	Kelompok	60	425.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	127	135.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					623.312.000		
						Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	%	60	623.312.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				623.312.000		
						Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	Unit	6	623.312.000	SEKSI BINA USAHA	
						Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	770.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					770.000.000		
						Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Orang	5250	770.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0001			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				400.000.000		
						Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian	Orang	3476	400.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				370.000.000		
						Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian	Orang	1200	370.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan								5.097.208.000		
						Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0.009	2.118.573.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.118.573.000		
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	1.418.573.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.418.573.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar	%	1	581.451.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				581.451.000		
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	50000	415.363.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	29500	166.088.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim	%	1	594.106.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				594.106.000		
						Produksi tanaman semusim	Ton	1050	594.106.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan	%	1	243.016.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				243.016.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Produksi tanaman tahunan	Butir	40000	243.016.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi kelapa	Ton	167187	700.000.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					700.000.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa	Ha	50	700.000.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				700.000.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	7700	700.000.000		
						Persentase peningkatan produksi kopi	%	0.009	967.157.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						967.157.000		
						Produksi kopi	Ton	26005	967.157.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					967.157.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi	Ha	50	967.157.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				967.157.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	68000	967.157.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Persentase peningkatan produksi tebu	%	0.009	2.011.478.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.011.478.000		
						Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	1.311.478.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.311.478.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur	%	1	552.527.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				552.527.000		
						Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam	Batang	40000	552.527.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur	%	3	600.000.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				600.000.000		
						Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam	Batang	45000	600.000.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur	%	1	158.951.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				158.951.000		
						Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam	Batang	2500	158.951.000	SEKSI BENIH	
						Produksi tebu	Ton	2562216	700.000.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					700.000.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu	Ha	300	700.000.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				700.000.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	0	200.000.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	53000	500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Petani									90.000.000		
						NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka	105.17			
	Meningkatnya NTP Hortikultura								30.000.000		
						NTP Hortikultura	Angka	108.49	30.000.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						30.000.000		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1.5	30.000.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					30.000.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	5	30.000.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				30.000.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	4	30.000.000		
	Meningkatnya NTP Perkebunan								30.000.000		
						NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100.97	30.000.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						30.000.000		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1.5	30.000.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					30.000.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2	30.000.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				30.000.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	4	30.000.000		
	Meningkatnya NTP Tanaman Pangan								30.000.000		
						NTP Tanaman Pangan	Angka	105.57	30.000.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						30.000.000		
						Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	%	1.5	30.000.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					30.000.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	3	30.000.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				30.000.000		
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	4	30.000.000		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									111.809.652.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	100		Dinas Pertanian dan Perkebunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								110.909.652.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	110.909.652.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						110.909.652.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	805.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					188.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.001 0			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	252.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	978.227.000	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					63.227.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	63.227.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.227.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	13.227.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					365.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	365.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				365.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	365.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					530.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	530.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				425.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	425.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	101.161.313.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					92.950.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	92.950.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				87.963.499.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	618	87.963.499.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.986.901.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	4.986.901.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					184.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	184.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				180.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	2	4.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				65.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	40	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.386.713.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.386.713.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				75.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				176.713.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	176.713.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				975.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.485.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	1.485.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				975.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	3	975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				65.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				347.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	21	347.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				98.100.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	15	98.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.399.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.399.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				965.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	965.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	116.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.305.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	2.305.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.675.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	1.675.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				665.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	665.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				135.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				460.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	460.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.373.220.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					406.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	406.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				406.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	406.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	205.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					636.720.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	636.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.720.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	36.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				550.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	683.020.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					27.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				27.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.070.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	179.070.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.070.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	14.070.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	135.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	239.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	18.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	237.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				157.200.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	157.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.776.872.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				42.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					117.382.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	117.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.521.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	11.521.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.361.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	93.361.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					407.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	407.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	179.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				226.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	226.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.210.090.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.210.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.340.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	52.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.130.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.249.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					386.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	386.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				285.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	223.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	205.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					637.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	637.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				543.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	543.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.883.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	156.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					560.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				560.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					362.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	362.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.800.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				192.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	192.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.498.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	1.498.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								900.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.85	900.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						900.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	900.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					900.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				400.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									149.815.487.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketahanan energi									5.522.617.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Ketahanan Energi	Angka	4.6		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi								2.381.039.000		
						Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21.32	2.381.039.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						2.381.039.000		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	91370.61	881.955.000		
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi					881.955.000		
						Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah	%	28.8	881.955.000		
		3.29.05.1.10.0002			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				881.955.000		
						Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah	Dokumen	1	688.581.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Orang	904	193.374.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	18.35	55.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					55.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	6	55.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				55.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria	Unit	2	55.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	61.17	137.360.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					137.360.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	30	137.360.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				137.360.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan	Unit	2	137.360.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	61.17	139.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					139.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Orang	30	139.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				139.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi	Unit	2	139.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	30.58	99.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					99.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak	Orang	18	99.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				99.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak	Unit	2	99.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	61.17	139.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					139.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	30	139.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				139.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan	Unit	2	139.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	30.58	99.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					99.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	18	99.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				99.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah	Unit	2	99.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	39241.43	151.320.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					151.320.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	150	151.320.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				151.320.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara	Unit	2	151.320.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	61.17	137.360.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					137.360.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu	Orang	45	137.360.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				137.360.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu	Unit	2	137.360.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	39259.78	190.562.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					190.562.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	156	190.562.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				190.562.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan	Unit	3	190.562.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	61.17	139.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					139.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	30	139.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				139.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara	Unit	2	139.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	30.58	99.560.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					99.560.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Orang	18	99.560.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				99.560.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo	Unit	2	99.560.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	45.88	109.562.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					109.562.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	Orang	15	109.562.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				109.562.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	Unit	5	109.562.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat								3.141.578.000		
						Tingkat konsumsi tenaga listrik	KWh/Kapita	807	3.141.578.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						3.141.578.000		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	65.04	916.018.000		
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					916.018.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	32.6	916.018.000		
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				916.018.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah	Laporan	24	916.018.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51.27	158.025.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					33.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	%	100	33.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				33.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	30	33.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					33.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	5.16	33.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				33.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	30	33.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					92.025.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	%	97.39	92.025.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.080.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria	Dokumen	1	2.080.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				89.945.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria	RT/KK	50	89.945.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49.74	194.790.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					16.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	%	100	16.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				16.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	15	16.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					22.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	2.08	22.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				22.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	20	22.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49.72	211.290.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					33.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi	%	100	33.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				33.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi	Dokumen	30	33.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					22.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	2.04	22.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				22.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	20	22.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	52.13	182.165.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					56.100.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	%	100	56.100.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				56.100.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak	Dokumen	51	56.100.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					33.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	6.86	33.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				33.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	30	33.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					93.065.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak	%	97.39	93.065.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				89.945.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak	RT/KK	50	89.945.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49.42	188.190.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					19.800.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	%	100	19.800.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				19.800.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	18	19.800.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					12.100.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	1.45	12.100.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				12.100.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	10	12.100.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49.12	180.490.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					13.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	%	100	13.200.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				13.200.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	12	13.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					11.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	0.85	11.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				11.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	10	11.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	%	97.4	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	50.08	210.190.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					26.400.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	%	100	26.400.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				26.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara	Dokumen	24	26.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					27.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	2.78	27.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				27.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	25	27.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49.64	138.225.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					26.400.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	%	100	26.400.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				26.400.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	24	26.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					19.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	1.89	19.800.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				19.800.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	18	19.800.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					92.025.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu	%	97.39	92.025.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.080.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu	Dokumen	1	2.080.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				89.945.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu	RT/KK	50	89.945.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49.66	210.190.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					26.400.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	%	100	26.400.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				26.400.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	24	26.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					27.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	1.93	27.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				27.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	25	27.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	50.05	201.390.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					19.800.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	%	100	19.800.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				19.800.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara	Dokumen	18	19.800.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					25.300.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	2.71	25.300.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				25.300.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	23	25.300.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49.77	207.990.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					26.400.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo	%	100	26.400.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				26.400.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo	Dokumen	24	26.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					25.300.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	2.15	25.300.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				25.300.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo	Laporan	23	25.300.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					156.290.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	%	97.39	156.290.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				3.120.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo	Dokumen	1	3.120.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				153.170.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo	RT/KK	100	153.170.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	50.05	142.625.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					39.600.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	39.600.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				39.600.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	36	39.600.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					11.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	2.71	11.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				11.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	10	11.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					92.025.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	97.39	92.025.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.080.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	1	2.080.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				89.945.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo	RT/KK	50	89.945.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB									2.503.054.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.15		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan								2.503.054.000		
						Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	57	2.503.054.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						2.503.054.000		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	186.250.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					186.250.000		
						Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	186.250.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.01.0006			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut				186.250.000		
						Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah	Laporan	264	186.250.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	45	1.000.984.000		
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					850.984.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	60	850.984.000		
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				850.984.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah	Laporan	5	850.984.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	10	150.000.000		
		3.29.03.1.07.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				150.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam	Laporan	1	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	45	98.180.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					98.180.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	60	98.180.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				16.660.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	8	16.660.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				81.520.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	20	81.520.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	45	123.380.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					123.380.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	60	123.380.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				26.560.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	17	26.560.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				96.820.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	32	96.820.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	45	191.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					191.500.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	60	191.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				36.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Dokumen	30	36.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut				155.500.000		

					sampai dengan 12 Mil Laut						
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Laporan	35	155.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	45	106.380.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					106.380.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	60	106.380.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				29.860.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	20	29.860.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				76.520.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Laporan	25	76.520.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	45	86.480.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					86.480.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	60	86.480.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin				13.360.000		

					Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	5		13.360.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					73.120.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	20		73.120.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	45		79.780.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						79.780.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	60		79.780.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					13.360.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	5		13.360.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					66.420.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	12		66.420.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	45	91.880.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					91.880.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	60	91.880.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				18.860.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	10	18.860.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				73.020.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Laporan	18	73.020.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	45	103.680.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					103.680.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	%	60	103.680.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				25.460.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	16	25.460.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				78.220.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	17	78.220.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	45	137.880.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					137.880.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	60	137.880.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				24.360.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	21	24.360.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				113.520.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	33	113.520.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	45	119.480.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					119.480.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	60	119.480.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				29.860.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	20	29.860.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				89.620.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Laporan	35	89.620.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	45	110.480.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					110.480.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	60	110.480.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				35.360.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Dokumen	25	35.360.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha				75.120.000		

					Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Laporan	18	75.120.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	45	66.720.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					66.720.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	66.720.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				8.800.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	8	8.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				57.920.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	10	57.920.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									53.633.683.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	56		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								52.702.647.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90.5	52.702.647.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						52.702.647.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	646.141.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					151.361.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	151.361.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.061.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	21.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	82.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					359.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	359.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				266.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	266.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	39	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	677.680.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	115.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					445.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	445.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	345.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	43	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	626.630.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	47.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	7	15.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				2.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.950.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	13.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					402.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	402.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				330.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	699.687.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	112.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	73	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	73	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					456.507.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	456.507.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				96.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	96.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				357.207.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	357.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	617.960.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.180.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	114.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.780.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	68.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					376.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	376.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	73.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	657.180.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					120.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	120.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	69.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					425.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	425.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				340.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	608.228.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	122.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.960.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	69.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					377.588.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	377.588.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	65.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				309.688.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	309.688.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	659.735.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	114.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					437.055.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	437.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	91.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				343.355.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	343.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	685.473.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					97.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	97.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					16.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	16.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.650.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					463.143.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	463.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				93.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	93.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				367.143.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	367.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	38	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	44.317.326.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.242.266.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	40.242.266.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				39.704.620.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	194	39.704.620.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				355.740.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	355.740.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				87.566.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	87.566.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				52.500.000		
						Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	12	52.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				41.840.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	41.840.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					157.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	157.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				144.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	144.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.500.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	12.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					140.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	36	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					664.910.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	664.910.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	12.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.250.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	56.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				357.760.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	357.760.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				115.400.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	115.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.729.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.729.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	13.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.058.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.058.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					383.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	383.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.560.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	136.560.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				81.640.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	81.640.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	635.966.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	115.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					412.786.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	412.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				320.286.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	320.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	620.680.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	115.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					397.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	397.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				310.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	548.281.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					113.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	113.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.950.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	11.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.050.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				6.750.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					320.351.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	320.351.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				242.851.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	242.851.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	20	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	701.680.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	57.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					106.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	38	106.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				106.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	106.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	346.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				344.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	344.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					121.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	205	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				109.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	109.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								931.036.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	931.036.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						931.036.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	931.036.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					931.036.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	931.036.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				632.512.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	632.512.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				298.524.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	298.524.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan									2.178.750.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	351		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya konservasi air tanah								2.178.750.000		
						Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3.63	2.178.750.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						2.178.750.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	563.700.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					563.700.000		
						Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	563.700.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.03.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				563.700.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah	Dokumen	1500	563.700.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27.6	800.000.000		
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					605.000.000		
						Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	605.000.000		
		3.29.02.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				605.000.000		
						Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah	Dokumen	2	605.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					195.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	%	100	195.000.000		
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				195.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah	Laporan	4	195.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3.5	100.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					100.400.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	%	100	100.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				100.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	20	100.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2.5	92.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					92.700.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	92.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				92.700.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	13	92.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2.9	39.850.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					39.850.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	%	100	39.850.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				39.850.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	20	39.850.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	3	87.950.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					87.950.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	%	100	55.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				55.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	33	55.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	%	100	32.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				32.700.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	23	32.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2.3	33.800.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					33.800.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	%	100	33.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				33.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	13	33.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1.7	33.800.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					33.800.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	%	100	33.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				33.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	13	33.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1.9	163.100.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					163.100.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	%	100	123.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				123.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	40	123.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	%	100	39.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				39.600.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	23	39.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1.7	39.850.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					39.850.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu	%	100	39.850.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				39.850.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	20	39.850.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2.8	40.950.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					40.950.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	%	100	40.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				40.950.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	20	40.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4.2	102.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					102.400.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	%	100	61.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				61.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	39	61.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	%	100	41.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				41.100.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	30	41.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1.7	39.300.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					39.300.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	%	100	39.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				39.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo	Laporan	19	39.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1.9	40.950.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					40.950.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	40.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				40.950.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	20	40.950.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
JUMLAH									63.838.104.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									49.524.618.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								48.975.876.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86.2	48.975.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						48.975.876.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.252.480.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					84.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	84.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				84.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	84.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					380.080.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	380.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.080.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	155.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					568.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	568.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				380.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	380.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	7	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.202.280.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19.625.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	19.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				19.625.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	19.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					212.375.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	212.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.075.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	38.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	39.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	24.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					730.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	730.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				213.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	213.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				516.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	516.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	164.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	45	59.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				43.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.377.666.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.880.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.960.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.960.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.958.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	278.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.158.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	48	117.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.315.868.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.315.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				373.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	373.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				939.468.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	939.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					674.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	674.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				221.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	221.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				354.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	354.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	13	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.800.880.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93.480.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				93.480.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					246.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	246.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	11	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.262.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	1.262.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				375.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				887.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	887.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	164.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.582.180.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.120.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				78.120.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					424.660.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	424.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				199.660.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	199.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					849.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	849.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	564.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	90	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	80	40.760.390.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					33.973.064.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	33.973.064.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				32.808.304.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	200	32.808.304.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.099.760.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.099.760.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	65.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					117.677.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	2	117.677.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				42.677.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	42.677.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.385.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.385.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.077.323.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	4.077.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.675.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.675.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.402.323.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	2.402.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.057.326.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	102	1.057.326.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				242.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	242.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				214.926.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	214.926.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				280.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								548.742.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.1	548.742.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						548.742.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80	548.742.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					548.742.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	548.742.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				248.742.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8	248.742.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan									10.525.859.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3.5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB								10.525.859.000		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	3.9	10.525.859.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						10.029.492.000		
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.39	877.000.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					877.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Orang	30	877.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				877.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	877.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	6.67	2.083.961.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.083.961.000		
						Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Orang	160	2.083.961.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.083.961.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	2.083.961.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
						Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2.5	1.460.072.000	Bidang Industri Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.460.072.000		
						Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	22	1.088.172.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.088.172.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3	1.088.172.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih	Orang	40	371.900.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				371.900.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	371.900.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2.5	3.379.302.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					3.379.302.000		
						Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	112	3.126.291.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3.126.291.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	3.126.291.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih	Orang	40	253.011.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				253.011.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	253.011.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	2.229.157.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.229.157.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki	Orang	500	2.229.157.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.229.157.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	2.229.157.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						245.681.000		
						Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	9	220.681.000	Bidang Industri Agro	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					220.681.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	1	220.681.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				220.681.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	1	220.681.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	5	25.000.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					25.000.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	47	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				25.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						250.686.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	20.000.000	Bidang Industri Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					20.000.000		
						Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS	Unit	25	20.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				20.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	6.95	230.686.000	Bidang Industri Non Agro	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					230.686.000		
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	Unit	200	230.686.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				30.175.000		
						Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	Dokumen	1	30.175.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				200.511.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	200.511.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (Inf)									32.840.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.59		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak								32.840.000.000		
						Inflasi pangan bergejolak	%	4	32.840.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						32.840.000.000		
						Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	9	32.840.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					40.000.000		
						Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya	Komoditi	3	40.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				40.000.000		
						Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor	Laporan	2	40.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					32.800.000.000		
						Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya	Unit	12	20.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.0001			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				20.000.000		
						Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	20.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Lokasi	12	32.780.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.0002			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				32.780.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi	Laporan	5	32.780.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)									7.498.845.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.59		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB								7.498.845.000		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	4.83	7.498.845.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						633.633.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8.6	438.712.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					438.712.000		
						Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	%	4.6	438.712.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.02.1.04.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				438.712.000		
						Jumlah dokumen penerbitan SKA	Dokumen	105000	438.712.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	168.621.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					168.621.000		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Unit	2	168.621.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				168.621.000		
						Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Dokumen	2	168.621.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	10	26.300.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					26.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi	Orang	5	26.300.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.02.1.03.0003			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				26.300.000		
						Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Laporan	1	26.300.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						238.250.000		
						Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	15	238.250.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					238.250.000		
						Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih	Orang	25	238.250.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.0002			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				238.250.000		
						Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	238.250.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						55.000.000		
						Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91	20.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					20.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan	Orang	4	20.000.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0003			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				20.000.000		
						Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	Laporan	1	20.000.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	10	35.000.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					35.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi	Orang	30	35.000.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.04.1.03.0005			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi				35.000.000		
						Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	Laporan	1	35.000.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						1.334.967.000		
						Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	4.05	1.334.967.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					1.334.967.000		
						Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	Dokumen	2	140.950.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.30.05.1.01.0004			Peningkatan Citra Produk Ekspor				140.950.000		
						Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Komoditi	4	140.950.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor	Orang	1430	72.650.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.05.1.01.0002			Pameran Dagang Lokal				72.650.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Orang	30	72.650.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	2	1.121.367.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0001			Pameran Dagang Internasional/Nasional				1.071.367.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasiliitasi dalam pameran dagang	Orang	8	1.071.367.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0003			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	Orang	50	50.000.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						2.786.815.000		
						Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1.05	906.893.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					518.012.000		
						Jumlah Laporan Aduan Masyarakat	Laporan	3	188.512.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				188.512.000		
						Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Dokumen	3	188.512.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi	Orang	150	329.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0001			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				329.500.000		
						Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	Kelompok	1	329.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					211.560.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Standarisasi Industri	Orang	31	211.560.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				211.560.000		
						Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan	Sertifikat	1	211.560.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					177.321.000		
						Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang)	Unit	30	177.321.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.06.1.03.0003			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				177.321.000		
						Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	1	177.321.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	610.054.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					610.054.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	1711	610.054.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				100.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	1650	100.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				510.054.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	61	510.054.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	0.1	1.269.868.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					1.269.868.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	2400	1.269.868.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				210.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	980	210.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				181.172.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	1400	181.172.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				878.696.000		
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	20	878.696.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						2.450.180.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	15	2.450.180.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					325.180.000		
						Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Orang	2	325.180.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				325.180.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Unit	1	325.180.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					2.110.000.000		
						Jumlah Fasilitasi kemitraan	Dokumen	1	2.110.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.02.0002			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				2.110.000.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi	Kelompok	3	2.110.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					15.000.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Orang	50	15.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03.0005			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				15.000.000		
						Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat	Laporan	1	15.000.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
JUMLAH									100.389.322.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									419.633.425.000		
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil					Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
									419.633.425.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	3.820.528.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.780.528.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48.57	104.660.000		
				Fasiliitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					104.660.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	104.660.000		
		4.01.02.1.02.000 1			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				104.660.000		
						Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	104.660.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88.57	212.400.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					212.400.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	212.400.000		
		4.01.02.1.01.000 2			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				212.400.000		
						Jumlah Fasilitas Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4	212.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69.05	240.160.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					240.160.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	240.160.000		
		4.01.02.1.02.000 2			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				240.160.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	4	240.160.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92	276.640.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					276.640.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	276.640.000		
		4.01.02.1.02.000 4			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				276.640.000		
						Jumlah Fasilitas Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	8	276.640.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90	212.800.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					212.800.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	212.800.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				212.800.000		
						Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	4	212.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36.59	196.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					196.700.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	196.700.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				196.700.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4	196.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	70	262.352.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					262.352.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	1	262.352.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				262.352.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	3	167.352.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	1	95.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91.01	274.816.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					274.816.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	274.816.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				274.816.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	6	274.816.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						2.040.000.000		
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98.8	465.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					465.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	225.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				225.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	12	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	240.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				240.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	12	240.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95.5	285.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					285.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	285.000.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				285.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	4	285.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	86	467.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					467.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	120.000.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				120.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	92	347.000.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				347.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	347.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	720.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					720.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	254.309.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				254.309.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	9	254.309.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	325.691.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				325.691.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	325.691.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	140.000.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				140.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	140.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	103.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					103.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000		
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				103.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	408.689.148.000		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.478.000.000		
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	1.005.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					1.005.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	1.005.000.000		
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				550.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				230.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum	Dokumen	4	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.0003			Fasilitasi Penataan Wilayah				225.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.330.000.000		
				Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.330.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	225.000.000		
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				225.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	4	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	800.000.000		
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				800.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45	800.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	305.000.000		
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				305.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	305.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.143.000.000		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.143.000.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	593.000.000		
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				593.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	10	463.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	6	130.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	200.000.000		
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				200.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	350.000.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				350.000.000		
						Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	150.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	100.000.000		OPD Provinsi
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	100.000.000		OPD Provinsi
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						402.293.148.000		
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	83	643.908.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					643.908.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	200.000.000		
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	243.908.000		
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				243.908.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8	243.908.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	84	727.816.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					727.816.000		
						Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	200.000.000		
		4.01.04.1.03.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	327.816.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				327.816.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	8	327.816.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4	200.000.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60	400.921.424.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					400.921.424.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4	396.380.724.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				396.380.724.000		
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	800	396.380.724.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	4.540.700.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				4.540.700.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	2.550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	8	1.990.700.000		OPD Provinsi
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.918.000.000		
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	1.000.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	1.000.000.000		
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.000.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	12	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	236.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					236.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	236.000.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				236.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	35	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	12	116.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97	1.030.000.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					1.030.000.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	465.000.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				465.000.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	276.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	188.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	65.000.000		
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				65.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	65.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	500.000.000		
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				500.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	192.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	12	308.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	97	652.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					652.000.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	652.000.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				652.000.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	115	215.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	120	218.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	120	219.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	7.123.749.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN						4.775.260.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	514.086.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					514.086.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	267.043.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				267.043.000		
						Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	267.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	247.043.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				247.043.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	247.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	521.683.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					521.683.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	264.640.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				264.640.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	264.640.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	257.043.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				257.043.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	257.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	577.043.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					577.043.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	175.000.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	175.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	180.000.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				180.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	222.043.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				222.043.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	222.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82	390.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					390.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	390.000.000		
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				390.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	390.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86	960.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					960.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	810.000.000		
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				810.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	810.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	150.000.000		
		4.01.06.1.03.0003			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan				150.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	4	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	50.000.000		
									50.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	25.000.000		
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLU dan Evaluasi Kebijakan				25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	462.448.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					462.448.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	220.000.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				220.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	8	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	242.448.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				242.448.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	8	242.448.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	1.300.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					1.300.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	315.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				315.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	8	315.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	985.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				985.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	985.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						2.348.489.000		
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	1.270.335.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.270.335.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	1.270.335.000		
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				262.535.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	4	180.475.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	82.060.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				799.800.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	12	655.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	144.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				208.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	208.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	474.434.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					474.434.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	474.434.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				147.204.000		
						Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	147.204.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				162.210.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	162.210.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				165.020.000		
						Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	165.020.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	603.720.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					603.720.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	603.720.000		
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				190.230.000		
						Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	4	190.230.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				295.350.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	295.350.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				118.140.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	118.140.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									226.172.646.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								225.982.646.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	225.982.646.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						225.982.646.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	6.410.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	50.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	210.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				160.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	4	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	4	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					6.120.000.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	6.120.000.000		
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.950.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	12	2.950.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.770.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	1.770.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.400.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	12	1.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	445.524.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					445.524.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	445.524.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				370.195.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	24	370.195.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.329.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	16	75.329.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	245.740.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					245.740.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	245.740.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				222.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	222.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.440.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	23.440.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	154.092.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.092.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	154.092.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	144.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.092.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	10.092.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	700.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					700.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	700.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				660.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	480.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	343.736.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					343.736.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	343.736.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	275.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				68.736.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	68.736.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	820.541.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					145.312.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	145.312.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				104.574.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	104.574.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.738.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	40.738.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					675.229.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	675.229.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				634.968.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	470.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	164.968.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.261.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	10.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	909.526.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					909.526.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	909.526.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				872.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	422.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				37.526.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	13.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	24.526.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	307.952.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					307.952.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	307.952.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				287.952.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	287.952.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	18.409.450.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					195.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	195.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				45.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	45.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					15.334.203.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	15.334.203.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				350.000.000		
						Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	12	350.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				11.484.203.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	11.484.203.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				3.500.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	3.500.000.000		
				Fasilitasi Keprotokolan					2.880.247.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	2.880.247.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2.580.247.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	12	2.580.247.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	12	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				50.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	197.236.085.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					115.305.142.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	115.305.142.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				113.340.142.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	113.340.142.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.540.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.540.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	125.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					792.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	792.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				442.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	442.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				350.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	350.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				30.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.604.954.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	10.604.954.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				400.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.718.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	500.718.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				425.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.500.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	5.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.429.236.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	3.429.236.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.700.000.000		
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	10.700.000.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.500.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	1.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	50	9.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.481.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	25.481.213.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	7.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				631.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	631.213.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.350.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	16.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.300.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	8.300.000.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.250.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	182	2.250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				87.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30	87.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.400.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	300	1.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	17	4.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				312.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	300	312.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					26.022.776.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.022.776.000		
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.743.094.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2.743.094.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				23.279.682.000		
						Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	23.279.682.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah								190.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	190.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						190.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	190.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					190.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	190.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				110.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	4	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	6	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									645.806.071.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									1.612.812.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								1.612.812.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	1.612.812.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						1.612.812.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	514.086.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					514.086.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	267.043.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				267.043.000		
						Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	267.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	247.043.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				247.043.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	247.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	521.683.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					521.683.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	264.640.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				264.640.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	264.640.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	257.043.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				257.043.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	257.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	577.043.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					577.043.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	175.000.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	175.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	180.000.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				180.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	222.043.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				222.043.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	222.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									700.000.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								700.000.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	700.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						700.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	700.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					700.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	700.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				660.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	480.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.312.812.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

BIRO HUKUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									2.918.000.000		
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil					Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
									2.918.000.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	2.918.000.000		
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.918.000.000		
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	1.000.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	1.000.000.000		
		4.01.05.1.02.000 1			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.000.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	12	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	236.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					236.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	236.000.000		
		4.01.05.1.02.000 2			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				236.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/ Kota	35	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	12	116.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97	1.030.000.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					1.030.000.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	465.000.000		
		4.01.05.1.01.000 3			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				465.000.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	276.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	188.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	65.000.000		
		4.01.05.1.01.000 2			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				65.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	65.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	500.000.000		
		4.01.05.1.01.000 1			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				500.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	192.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	12	308.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	97	652.000.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					652.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	652.000.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				652.000.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	115	215.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	120	218.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	120	219.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									154.092.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								154.092.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	154.092.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						154.092.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	154.092.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.092.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	154.092.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	144.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.092.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	10.092.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									3.072.092.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									2.040.000.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								2.040.000.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	2.040.000.000		
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						2.040.000.000		
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98.8	465.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					465.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	225.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				225.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	12	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	240.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				240.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	12	240.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95.5	285.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					285.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	285.000.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				285.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	4	285.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	86	467.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					467.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	120.000.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				120.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	92	347.000.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				347.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	347.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	720.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					720.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	254.309.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				254.309.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	9	254.309.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	325.691.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				325.691.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	325.691.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	140.000.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				140.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	140.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	103.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					103.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000		
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				103.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									635.524.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								445.524.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	445.524.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						445.524.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	445.524.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					445.524.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	445.524.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				370.195.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	24	370.195.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.329.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	16	75.329.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah								190.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	190.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						190.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	190.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					190.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	190.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				110.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	4	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	6	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.675.524.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									3.162.448.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								3.162.448.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	3.162.448.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						3.162.448.000		
						Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82	390.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					390.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	390.000.000		
		4.01.06.1.03.000 2			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				390.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	390.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86	960.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					960.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	810.000.000		
		4.01.06.1.03.000 1			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				810.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	810.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	150.000.000		
		4.01.06.1.03.000 3			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan				150.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	4	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	50.000.000		
									50.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	25.000.000		
		4.01.06.1.03.000 4			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan				25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	462.448.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					462.448.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	220.000.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				220.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	8	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	242.448.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				242.448.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	8	242.448.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	1.300.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					1.300.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	315.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				315.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	8	315.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	985.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				985.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	985.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									307.952.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								307.952.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	307.952.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						307.952.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	307.952.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					307.952.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	307.952.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				287.952.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	287.952.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									3.470.400.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									402.293.148.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								402.293.148.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	402.293.148.000		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						402.293.148.000		
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	83	643.908.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					643.908.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	200.000.000		
		4.01.04.1.02.000 2			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	200.000.000		
		4.01.04.1.02.000 1			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	243.908.000		
		4.01.04.1.02.000 3			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				243.908.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8	243.908.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	84	727.816.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					727.816.000		
						Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	200.000.000		
		4.01.04.1.03.000 1			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				200.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	8	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4		327.816.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					327.816.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	8		327.816.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4		200.000.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					200.000.000		
						Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8		200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	60		400.921.424.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						400.921.424.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4		396.380.724.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual					396.380.724.000		
						Jumlah fasilitas pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	800		396.380.724.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4		4.540.700.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					4.540.700.000		
						Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1		2.550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	8		1.990.700.000		OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah										343.736.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5				
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									343.736.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5		343.736.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							343.736.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	343.736.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					343.736.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	343.736.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	275.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				68.736.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	68.736.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									402.636.884.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

BIRO ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									1.780.528.000		
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil					Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
									1.780.528.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	1.780.528.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.780.528.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	48.57	104.660.000		
				Fasiliitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					104.660.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	104.660.000		
		4.01.02.1.02.000 1			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				104.660.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	104.660.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	88.57	212.400.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					212.400.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	212.400.000		
		4.01.02.1.01.000 2			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				212.400.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4	212.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	69.05	240.160.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					240.160.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	240.160.000		
		4.01.02.1.02.000 2			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				240.160.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	4	240.160.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	92	276.640.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					276.640.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	276.640.000		
		4.01.02.1.02.000 4			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				276.640.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	8	276.640.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	90	212.800.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					212.800.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	212.800.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				212.800.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	4	212.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	36.59	196.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					196.700.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	196.700.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				196.700.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4	196.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	70	262.352.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					262.352.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	1	262.352.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				262.352.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	3	167.352.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	1	95.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	91.01	274.816.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					274.816.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	274.816.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				274.816.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	6	274.816.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									820.541.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								820.541.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	820.541.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						820.541.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	820.541.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					145.312.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	145.312.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				104.574.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	104.574.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.738.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	40.738.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					675.229.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	675.229.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				634.968.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	470.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	164.968.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.261.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	10.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.601.069.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

BIRO UMUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									222.055.535.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								222.055.535.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	222.055.535.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						222.055.535.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	6.410.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	50.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					210.000.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	210.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				160.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	4	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	4	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasiliitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					6.120.000.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	6.120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.950.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	12	2.950.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.770.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	1.770.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.400.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	12	1.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	18.409.450.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					195.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	195.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				45.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	45.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					15.334.203.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	15.334.203.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				350.000.000		
						Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	12	350.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				11.484.203.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	11.484.203.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				3.500.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	3.500.000.000		
				Fasilitasi Keprotokolan					2.880.247.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	2.880.247.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2.580.247.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	12	2.580.247.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	12	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				50.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	197.236.085.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					115.305.142.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	115.305.142.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				113.340.142.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	113.340.142.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.540.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.540.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				125.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	125.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					792.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	792.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				442.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	442.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				350.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	350.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				30.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.604.954.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	10.604.954.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				400.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.718.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	500.718.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				425.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.500.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	5.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.429.236.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	3.429.236.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.700.000.000		
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	10.700.000.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.500.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	1.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	50	9.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.481.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	25.481.213.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	7.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				631.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	631.213.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.350.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	16.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.300.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	8.300.000.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.250.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	182	2.250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				87.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30	87.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.400.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	300	1.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.000.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	17	4.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				312.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	300	312.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					26.022.776.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.022.776.000		
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.743.094.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2.743.094.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				23.279.682.000		
						Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	23.279.682.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									222.055.535.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									3.478.000.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								3.478.000.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	3.478.000.000		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.478.000.000		
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	1.005.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					1.005.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	1.005.000.000		
		4.01.03.1.01.000 1			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				550.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.000 2			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				230.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum	Dokumen	4	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.000			Fasilitasi Penataan Wilayah				225.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.330.000.000		
				Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.330.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	225.000.000		
		4.01.03.1.02.000 2			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				225.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	4	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	800.000.000		
		4.01.03.1.02.000 1			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				800.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45	800.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	305.000.000		
		4.01.03.1.02.000 3			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				305.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	305.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.143.000.000		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.143.000.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	593.000.000		
		4.01.03.1.03.000 1			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				593.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	10	463.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	6	130.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				200.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	350.000.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				350.000.000		
						Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	150.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	100.000.000		OPD Provinsi
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	100.000.000		OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									909.526.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								909.526.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	909.526.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						909.526.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	909.526.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					909.526.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	909.526.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				872.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	422.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				37.526.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	13.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	24.526.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									4.387.526.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									2.348.489.000		
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	37.1			
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								2.348.489.000		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	2.348.489.000		
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						2.348.489.000		
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	91	1.270.335.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.270.335.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	1.270.335.000		
		4.01.07.1.01.000 1			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				262.535.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	4	180.475.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	82.060.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.000 2			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				799.800.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	12	655.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	144.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.000 3			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				208.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	208.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	82	474.434.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					474.434.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	474.434.000		
		4.01.07.1.03.000 1			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				147.204.000		
						Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	147.204.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.000 2			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				162.210.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	162.210.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.000 3			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				165.020.000		
						Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	165.020.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	82	603.720.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					603.720.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	603.720.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				190.230.000		
						Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	4	190.230.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				295.350.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	295.350.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				118.140.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	118.140.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									245.740.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								245.740.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.5	245.740.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						245.740.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	245.740.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					245.740.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	245.740.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				222.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	222.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.440.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	23.440.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									2.594.229.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									218.871.748.000	Sekretariat DPRD	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								39.746.542.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	39.746.542.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						39.746.542.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	39.746.542.000	Bagian Umum	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.055.674.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.055.674.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					600.101.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	600.101.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				206.808.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	206.808.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				393.293.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	75	393.293.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.256.952.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.256.952.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				435.701.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	435.701.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				182.189.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	182.189.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				480.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	480.500.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.000.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				980.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	980.400.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				178.162.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	178.162.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.762.981.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	141	5.762.981.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				639.680.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	639.680.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.163.948.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	10	2.163.948.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				276.640.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	276.640.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				381.288.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	20	381.288.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.301.425.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	108	2.301.425.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.393.158.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	19.393.158.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				196.957.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	196.957.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.439.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	3.439.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.031.086.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	1.031.086.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.726.115.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	14.726.115.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.718.675.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	160	7.718.675.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				502.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	502.800.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.027.582.000		
						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	72	3.027.582.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				57.475.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	57.475.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.699.503.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1.699.503.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.431.315.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	63	2.431.315.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.001.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	1.959.001.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.15.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.392.880.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Paket	4	1.392.880.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15.0003			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								179.125.206.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	179.125.206.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						179.125.206.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	179.125.206.000	BAGIAN KEUANGAN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.112.567.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.112.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				812.567.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	812.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	300.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.665.764.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	20.665.764.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.560.764.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	124	19.560.764.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.105.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24	1.105.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					157.346.875.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	157.346.875.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.15.0001			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				157.346.875.000		
						Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	120	157.346.875.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan									380.153.260.000	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	91		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia								195.305.169.000		
						Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	76	195.305.169.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						195.305.169.000		
						Persentase layanan bagian humas	%	95	195.305.169.000	Bagian Humas	
				Peningkatan Kapasitas DPRD					78.981.307.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	78.981.307.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.04.000 4			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2.173.208.000		
						jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	42	2.173.208.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.000 5			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				454.190.000		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	454.190.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.000 6			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				10.849.896.000		
						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	Dokumen	6	10.849.896.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.000 7			Penyusunan Program Kerja DPRD				65.504.013.000		
						Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	7	65.504.013.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kerja Sama Daerah					116.323.862.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama	Dokumen	12	116.323.862.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.07.000 2			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				116.323.862.000		
						jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Dokumen	12	116.323.862.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik								184.848.091.000		
						Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	76	184.848.091.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						184.848.091.000		
						Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	184.848.091.000	Bagian Persidangan	
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					8.483.926.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA	Dokumen	23	8.483.926.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.01.000 1			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8.483.926.000		
						jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	Dokumen	23	8.483.926.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					2.102.662.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	2	2.102.662.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.02.000			Pembahasan APBD				2.102.662.000		
						jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	2	2.102.662.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					21.819.030.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	21.819.030.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.000 1			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3.814.668.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	3.814.668.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3.814.668.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	3.814.668.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3.814.668.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	3.814.668.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3.814.668.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	3.814.668.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0005			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3.814.668.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48	3.814.668.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0006			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.149.830.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2	1.149.830.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0007			Pengawasan Penggunaan Anggaran				1.595.860.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	25	1.595.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Peningkatan Kapasitas DPRD					4.380.000.000		
						Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	6	4.380.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD				4.380.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	4.380.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					70.153.805.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	70.153.805.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah				25.263.680.000		
						Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	25.263.680.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0002			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				175.000.000		
						Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	175.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0003			Pelaksanaan Reses				44.715.125.000		
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	24	44.715.125.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					552.860.000		
						Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	21	552.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.06.0001			Penyusunan Kode Etik DPRD				552.860.000		
						Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	21	552.860.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Tugas DPRD					77.355.808.000		
						Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	33	77.355.808.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				77.355.808.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	33	77.355.808.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									599.025.008.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									35.441.011.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72.5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								34.781.011.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84.25	34.781.011.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34.781.011.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	34.781.011.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.081.232.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	22.081.232.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.406.192.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	119	21.406.192.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.040.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	350.040.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	75.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					260.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					390.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	390.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				190.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	45	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	125	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.871.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.871.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				52.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				220.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				39.000.000		
						Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	39.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				180.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	180.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				90.000.000		
						Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.000.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.250.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	40	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	10	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				950.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	24	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.275.418.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	4.275.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.045.418.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.045.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.653.161.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1475	3.653.161.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				650.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	46	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	425	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	440	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				340.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	215	340.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	5	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.809.161.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.809.161.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	125	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv	Unit	92	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								660.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	%	2.92	660.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						660.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	660.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					660.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	660.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				360.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	360.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas									12.980.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Terwujudnya keselerasan dokumen perencanaan								3.003.000.000		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	3.003.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						943.000.000		
						Persentase dokumen evaluasi yang diamankan regulasi	%	100	943.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					943.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi	Dokumen	4	943.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				678.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	678.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi	Dokumen	105	265.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						2.060.000.000		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	550.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					550.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	1	150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan	OPD	3		150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Laporan	1		150.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					150.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanian	OPD	1		150.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH	Laporan	1		250.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					250.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH	OPD	3		250.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100		490.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						490.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes	Laporan	1		140.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					140.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes	OPD	13		140.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos	Laporan	1		80.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					80.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial	OPD	11		80.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS	Laporan	1		270.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					270.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual	OPD	5		270.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100		1.020.000.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.020.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker	Laporan	1	420.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				420.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	OPD	6	420.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI	Laporan	1	260.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				260.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	OPD	3	260.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut	Laporan	1	340.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				340.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut	OPD	4	340.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan								9.977.000.000		
						Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	9.977.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.957.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	4.957.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					4.216.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi	Dokumen	3	4.216.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				4.216.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	3	4.216.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					741.000.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	741.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				601.000.000		
						Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	601.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				140.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	Buku	1	140.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						5.020.000.000		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	1.600.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.600.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Dokumen	1	500.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				500.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	4	500.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Dokumen	1	550.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				550.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	Laporan	4	550.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH	Dokumen	1	550.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				550.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH	Laporan	4	550.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	2.210.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					2.210.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos	Dokumen	1	813.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				813.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial	Laporan	4	813.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes	Dokumen	1	984.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				984.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes	Laporan	4	984.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS	Dokumen	1	413.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				413.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual	Laporan	4	413.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	1.210.000.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.210.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker	Dokumen	1	340.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				340.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	Laporan	4	340.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI	Dokumen	1	520.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				520.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	Laporan	4	520.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut	Dokumen	1	350.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				350.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut	Laporan	4	350.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									48.421.011.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									257.337.092.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80			Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								256.732.092.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	256.732.092.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						256.732.092.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	95	192.538.297.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					158.279.449.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	158.279.449.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				157.386.249.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	605	157.386.249.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				665.640.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	665.640.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				227.560.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	227.560.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					355.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	355.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				355.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	355.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					207.550.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	207.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				157.550.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	157.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					8.115.694.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	8.115.694.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				125.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.012.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.012.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.801.860.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.801.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				350.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				789.834.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	789.834.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.392.128.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	7.392.128.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.200.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	5.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.192.128.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	2.192.128.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.332.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	14.332.260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.667.710.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	2.667.710.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.684.828.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	9.684.828.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.969.722.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.969.722.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.856.216.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.856.216.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.010.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.000.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				95.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.111.206.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.111.206.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	95	1.524.864.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.092.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	100	278.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.270.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.540.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	43.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				96.114.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	96.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.753.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	14.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.315.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	91.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					863.085.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4	863.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	186.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.585.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	670.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.187.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	331.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.850.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	14.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.587.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	159.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	95	2.140.132.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.632.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas	%	100	282.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.480.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				131.797.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	131.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.655.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.456.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	1.456.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				345.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	345.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.081.340.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.081.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.460.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	338.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				132.960.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	132.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	%	95	1.644.534.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					272.109.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang	%	100	272.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	28.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	21.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.694.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	102.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.375.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	32.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.240.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	75.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					960.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	960.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				716.875.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	716.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	364.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				145.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	145.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	75.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	%	95	1.835.312.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.821.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora	%	100	257.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.900.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	36.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				108.828.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora	Paket	1	108.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.960.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	15.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.133.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	70.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.215.261.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Laporan	4	1.215.261.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	254.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				953.661.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	953.661.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.730.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora	Unit	1	309.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.400.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.630.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	99.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	95	1.587.726.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	44.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.250.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	44.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					277.886.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali	%	100	277.886.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.380.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	23.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				101.123.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	101.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.278.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.278.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.805.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					945.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Laporan	4	945.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	204.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				738.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	738.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.690.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	1	319.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.900.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				161.040.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	161.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	21.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	95	2.284.995.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					287.915.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes	%	100	287.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.250.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.765.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	97.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.850.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	22.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108.050.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	108.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.577.370.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.577.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				405.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	405.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.169.370.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.169.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					367.210.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	367.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.712.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	19.712.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	120.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.080.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	77.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				107.518.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	107.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	95	2.145.337.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					311.362.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap	%	100	311.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	38.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.850.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				151.756.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	151.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.512.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.244.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	61.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.317.376.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	1.317.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				283.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	283.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.029.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.029.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					459.599.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	459.599.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	39.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				221.999.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	221.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	51.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	%	95	1.575.255.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					303.090.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak	%	100	303.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				49.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	49.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				115.312.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	115.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.230.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	20.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.298.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	70.298.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					849.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	849.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				196.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	196.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				650.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	650.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					374.825.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	374.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.375.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	27.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				166.850.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	166.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.100.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	43.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	95	1.598.624.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					289.095.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan	%	100	289.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	41.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.320.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	19.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.900.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	100.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.625.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	24.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	88.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					976.679.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	976.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.540.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	254.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				720.639.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	720.639.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	285.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	109.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	95	1.707.173.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.028.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara	%	100	257.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.154.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.505.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.633.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.920.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	5.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.196.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	97.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	17.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.720.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.074.775.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	1.074.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				331.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	331.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				741.375.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	741.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					332.870.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1	332.870.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.950.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.320.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	156.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	54.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	46.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	95	1.637.557.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					273.582.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar	%	100	273.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.100.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.610.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.730.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	100.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.580.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.212.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	99.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.023.765.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	1.023.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				196.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	196.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				823.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	823.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					296.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	296.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	143.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				76.350.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	76.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.900.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	95	1.461.127.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.450.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.450.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	8.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					227.369.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	227.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.490.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.700.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.609.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				84.654.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	84.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.260.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.656.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	55.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					877.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	877.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				659.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	659.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					306.038.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	306.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				112.288.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	112.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	95	1.604.072.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					328.902.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal	%	100	328.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.300.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				149.350.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	149.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.252.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	74.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					941.675.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	4	941.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				269.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	269.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.425.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	670.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.995.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal	Unit	1	290.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.270.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	26.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.775.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	97.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	52.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	36.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	95	2.571.808.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	42.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.300.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					354.029.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten	%	100	354.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.204.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				151.260.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	151.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.696.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	52.696.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.369.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	125.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.776.435.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	1.776.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				348.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	348.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.426.015.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.426.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					389.044.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten	Unit	1	389.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.009.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	135.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.705.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	75.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.900.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.680.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	31.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	95	1.597.894.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.724.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus	%	100	250.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	6.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.204.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	12.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				95.055.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	95.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	18.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.965.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	83.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					976.120.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	976.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	324.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				648.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	648.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					321.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	321.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	12.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	109.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	39.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				103.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	95	1.802.587.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					297.999.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang	%	100	297.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.600.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.080.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	30.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				99.330.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	99.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.078.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	36.078.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.711.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	77.711.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.080.145.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	4	1.080.145.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				212.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	212.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				862.545.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	862.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.943.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	371.943.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.488.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	21.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.455.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	146.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	87.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	%	95	1.657.594.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.889.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati	%	100	220.889.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				76.252.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	76.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.090.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	19.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.847.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	68.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.064.205.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.064.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.080.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				315.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				748.125.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	748.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					310.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				138.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	138.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				84.900.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	84.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	9.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	95	1.581.106.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.059.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan	%	100	286.059.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	6.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.380.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	51.380.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	19.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	6.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				113.804.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KABUPATEN Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	113.804.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.125.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	22.125.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	64.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					898.965.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	898.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				679.765.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	679.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.582.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	338.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.182.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	24.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	127.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	95	1.732.604.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	10.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					271.366.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang	%	100	271.366.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	24.250.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	5.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	7.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				118.579.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	118.579.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.650.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	13.650.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.437.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	87.437.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					995.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	995.100.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				246.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	246.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				745.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	745.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					413.638.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	413.638.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.438.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	20.438.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				179.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	179.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	44.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	39.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	95	1.505.419.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					276.084.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga	%	100	276.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	4.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	38.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				110.329.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	110.329.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.920.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	24.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.720.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	70.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.865.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	1.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					837.955.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	837.955.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				231.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	231.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				594.955.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	594.955.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					339.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	339.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	25.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	135.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.510.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	71.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.170.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	74.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	95	1.800.454.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.890.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	286.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				52.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				108.560.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	108.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	23.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	67.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.184.064.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.184.064.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.475.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	193.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				988.089.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	988.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	114.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.900.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	28.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	95	1.239.915.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.350.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					231.885.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang	%	100	231.885.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.560.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.280.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				74.360.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	74.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.460.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.425.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	84.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					658.383.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	658.383.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	151.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				483.883.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	483.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297.297.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	297.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	17.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.497.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	159.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	95	2.415.395.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	42.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.250.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					291.482.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang	%	100	291.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.875.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				750.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				121.863.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	121.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.875.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	29.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.769.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	61.769.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.699.905.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	4	1.699.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				498.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	498.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.183.905.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.183.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.758.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1	381.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.038.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	32.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				193.220.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	193.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	95	1.400.639.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.720.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	42.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.720.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					260.233.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen	%	100	260.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.750.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.840.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				91.888.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	91.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.475.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	34.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.880.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	81.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					799.096.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	799.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				597.596.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	597.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.590.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	298.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.167.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	36.167.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.693.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	119.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.570.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	34.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.460.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	95	1.713.741.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.050.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.050.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					260.580.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	100	260.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.570.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	8.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.975.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	41.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.020.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	18.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.627.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	100.627.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.950.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	19.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.438.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	62.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.084.246.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	1.084.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				279.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	279.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				711.846.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	711.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.865.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	326.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				34.875.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	34.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	91.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.715.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	78.715.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.325.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	6.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	95	1.622.489.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					249.985.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal	%	100	249.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	29.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.017.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	97.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.075.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	11.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.593.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	83.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					948.429.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	948.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	187.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				757.229.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	757.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					361.575.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	361.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.325.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	32.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	156.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	44.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	90.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	95	1.550.156.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					275.634.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung	%	100	275.634.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				57.424.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	57.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.050.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				80.454.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	80.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.410.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.796.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	85.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					958.797.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	4	958.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.410.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	181.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				774.187.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	774.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					273.225.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	273.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.275.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	107.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.550.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				84.300.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	84.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	95	2.275.042.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.350.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.122.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri	%	100	282.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				114.932.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	114.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.390.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	75.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.551.525.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	1.551.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				399.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	399.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.149.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.149.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					399.045.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	399.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151.045.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	151.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	95	1.412.429.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.600.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.019.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo	%	100	283.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.794.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				88.950.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	88.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.575.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	93.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					752.310.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	4	752.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				579.310.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	579.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	322.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	%	95	1.218.356.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.321.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang	%	100	282.321.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.884.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.142.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	109.142.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.435.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	36.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.060.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	85.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					675.003.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Laporan	4	675.003.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	174.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				498.903.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	498.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					212.532.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang	Unit	1	212.532.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.192.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	19.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.340.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	90.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.150.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	28.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	%	95	1.540.255.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.081.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan	%	100	220.081.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.175.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	26.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.953.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	102.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.403.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	54.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					956.584.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	956.584.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				714.084.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	714.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.090.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	311.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.190.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	21.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				161.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	161.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	20.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	%	95	1.347.469.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.550.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.044.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga	%	100	294.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				87.017.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	87.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.527.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.527.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.900.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	68.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					674.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Laporan	4	674.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	175.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				497.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	497.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.975.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga	Unit	1	335.975.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.625.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	20.625.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	113.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	52.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	98.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	%	95	2.296.528.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.258.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1	%	100	269.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.025.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				128.384.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	128.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.949.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	67.949.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.715.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Laporan	4	1.715.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				438.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	438.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				994.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	994.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.910.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1	Unit	1	262.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.110.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	102.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	38.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	54.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	%	95	1.732.086.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.939.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II	%	100	309.939.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.340.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	38.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.874.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	109.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.240.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	30.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.485.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	62.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.087.935.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Laporan	4	1.087.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				370.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	370.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	14.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				701.835.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	701.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.712.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II	Unit	1	291.712.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.312.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.312.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	95.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	57.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.850.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.850.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	%	95	1.987.121.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					285.526.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III	%	100	285.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	54.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				112.876.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	112.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.850.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	24.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	64.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.330.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	1.330.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				439.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	439.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				867.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	867.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					328.195.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III	Unit	1	328.195.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.375.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	18.375.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.050.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	91.050.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	87.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.370.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.370.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	48.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	%	95	1.707.896.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					267.038.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta	%	100	267.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.150.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	1.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.950.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	12.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				138.890.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	138.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.565.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	26.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.833.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	70.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.119.375.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.119.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				799.375.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	799.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					278.983.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta	Unit	1	278.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.613.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	13.613.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	96.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.550.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit	1	52.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.520.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	47.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	%	95	1.738.104.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.774.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal	%	100	286.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				86.742.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal	Paket	1	86.742.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.650.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	Laporan	4	17.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.382.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Laporan	4	78.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.143.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Laporan	4	1.143.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				342.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	342.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				796.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	796.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					244.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal	Unit	1	244.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal	Unit	1	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal	Unit	1	78.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								605.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.72	605.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						605.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	605.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					605.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	605.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.000 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				345.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	345.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.000 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	260.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah									38.151.060.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah	%	-4.58		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah								22.749.109.000		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-6.19	22.749.109.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						22.749.109.000		
						Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	800.000.000	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					800.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	Laporan	37	290.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.001 2			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				290.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	37	290.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	Laporan	37	260.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	
		5.02.04.1.01.001 3			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				260.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah	Laporan	37	260.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	Laporan	37	250.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	
		5.02.04.1.01.000 3			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				250.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	37	250.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	10.142.674.000	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.142.674.000		
						Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun	Dokumen	4	225.209.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0009			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				225.209.000		
						Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	225.209.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan	Dokumen	1	860.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				860.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	860.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	9.057.465.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				9.057.465.000		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	9.057.465.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-14.93	62.515.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					62.515.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	39565884	62.515.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				62.515.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	62.515.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-11.67	10.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	95377608	10.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	10.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-19.2	19.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	46287644	19.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	19.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-13.35	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora	Ribu Rupiah	38499895	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-13.53	10.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.850.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	62048864	10.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	10.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	9.72	8.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.060.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	112261562	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.060.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-10.5	20.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	100784103	20.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	20.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-12.89	5.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.625.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	96532791	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.625.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-9.14	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	80075218	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-18.29	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	79897306	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-22.6	1.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.300.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	64035615	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-7.41	47.080.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					47.080.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	54408329	47.080.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				47.080.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	47.080.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-6.82	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	77308709	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-16.34	4.830.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.830.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	89407036	4.830.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.830.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	4.830.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-17.98	3.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.150.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	74564278	3.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	3.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-11.38	32.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	67984364	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-15.98	4.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	93008431	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-14.89	7.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.650.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	52058877	7.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	7.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-8.82	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	70805035	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-17.71	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	42262590	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-7.4	14.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	38951486	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo	Dokumen	4	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-9.37	31.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					31.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	40742878	31.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				31.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	31.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-13.7	9.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.750.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	83062163	9.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	9.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-22.66	3.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	62139620	3.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	3.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-14.9	11.340.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.340.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	82192398	11.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.340.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	11.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	2.02	9.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.225.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	93656565	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.225.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-13.52	1.575.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.575.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	33421502	1.575.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.575.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	1.575.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-7.55	20.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	44130893	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-24.1	1.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	32265389	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	-24.5	900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					900.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	13412432	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-21.25	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	27752323	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	-6.82	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	25246360	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	4.34	7.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	174716311	7.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	7.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	-12.96	2.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	125774625	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	-21.14	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	105715002	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	-10.64	20.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	97613482	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	3.51	11.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	31465237	11.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	11.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-0.46	143.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					143.650.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	79430909	143.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				143.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara	Dokumen	4	143.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-15.84	234.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					234.750.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	182892682	234.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				234.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	234.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	-3.73	174.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					174.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	79989403	174.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				174.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	174.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	-22.72	171.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					171.650.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	71306856	171.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				171.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	171.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	-16.92	128.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					128.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	122893737	128.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				128.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	128.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	2.01	174.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					174.450.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	131289711	174.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				174.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	174.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	-17.17	161.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					161.500.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	176500170	161.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				161.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	161.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	-15.64	268.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					268.800.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	134528768	268.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				268.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	268.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-15.78	130.120.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					130.120.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	126126565	130.120.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				130.120.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	130.120.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	-15.04	198.275.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					198.275.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	142051610	198.275.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				198.275.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	198.275.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-10.91	176.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					176.500.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	136635766	176.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				176.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	176.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-13.87	175.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	102864247	175.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	175.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	-8.84	221.435.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					221.435.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	115552981	221.435.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				221.435.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	221.435.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	-15.94	218.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					218.450.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	170559812	218.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				218.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	218.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	-22.3	166.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					166.150.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	134194641	166.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				166.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	166.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	-5.76	171.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					171.500.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	127389286	171.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				171.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	171.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	-19.95	161.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					161.150.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	169139692	161.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				161.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	161.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	-10.34	243.030.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					243.030.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	115832343	243.030.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				243.030.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	243.030.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-21.96	194.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					194.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	81271448	194.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				194.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	194.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-27.79	165.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					165.200.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	68238499	165.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				165.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	165.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	-23.29	254.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					254.200.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	63811883	254.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				254.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	254.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	-26.14	207.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					207.450.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	141520544	207.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				207.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	207.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	-19.81	246.940.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					246.940.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	132649504	246.940.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				246.940.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	246.940.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-17.6	171.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					171.150.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	145801529	171.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				171.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	171.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	13.68	156.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					156.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	133010753	156.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				156.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	156.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	-9.56	145.525.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					145.525.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	70016434	145.525.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				145.525.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	145.525.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-22.78	145.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					145.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	94785629	145.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				145.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	145.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-15	190.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					190.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	71037885	190.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				190.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	190.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-67.77	216.397.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					216.397.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	33142524	216.397.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				216.397.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	216.397.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-50.2	188.469.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					188.469.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	46977430	188.469.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				188.469.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	188.469.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	-31.07	144.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					144.500.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	45368560	144.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				144.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	144.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	-17	244.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					244.300.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	234884528	244.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				244.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	244.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	-29.99	290.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					290.850.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	194972389	290.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				290.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	290.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	-19.28	245.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					245.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	176507301	245.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				245.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	245.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	-32.48	218.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					218.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	170779171	218.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				218.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	218.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-50.2	191.594.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					191.594.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	44665201	191.594.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				191.594.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	191.594.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-4.14	153.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					153.500.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	84738032	153.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				153.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	153.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	73	4.300.000.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.300.000.000		
						Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB	Dokumen	1	1.850.000.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				1.850.000.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1.850.000.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana	Laporan	2	1.300.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.300.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	1.300.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB	Laporan	1	1.000.000.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.000.000.000		
						Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak	Dokumen	12	1.000.000.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan	%	100	150.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0011			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen	1	150.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain								15.401.951.000		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	3.19	15.401.951.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						15.401.951.000		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13.21	246.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					246.225.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	14730	246.225.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				246.225.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	246.225.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	13.46	332.941.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					332.941.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	28340	332.941.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				332.941.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	332.941.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	15.87	276.640.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					276.640.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Unit	17280	276.640.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				276.640.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	276.640.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	13.64	348.430.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					348.430.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Unit	11720	348.430.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				348.430.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	348.430.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	13.53	314.190.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					314.190.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	17540	314.190.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				314.190.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	314.190.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	13.72	507.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					507.540.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Unit	28500	507.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				507.540.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	507.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	13.57	351.839.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					351.839.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	29420	351.839.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				351.839.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	351.839.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	13.67	327.670.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					327.670.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Unit	22400	327.670.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				327.670.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	327.670.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	13.66	445.905.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					445.905.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	21950	445.905.000		
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				445.905.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	445.905.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	13.32	389.790.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					389.790.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Unit	23230	389.790.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				389.790.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	389.790.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	13.52	352.640.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					352.640.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	17050	352.640.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				352.640.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	352.640.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	13.59	316.020.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					316.020.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	17530	316.020.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				316.020.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	316.020.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	13.45	305.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					305.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Unit	19400	305.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				305.000.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	305.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	13.67	400.220.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					400.220.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Unit	26000	400.220.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				400.220.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	400.220.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	13.63	307.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					307.900.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Unit	15730	307.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				307.900.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	307.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	13.58	322.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					322.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Unit	17000	322.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				322.250.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	322.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	13.46	451.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					451.900.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Unit	21220	451.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				451.900.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	451.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	12.72	302.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					302.700.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	14700	302.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				302.700.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	302.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	13.37	421.520.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					421.520.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	23000	421.520.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				421.520.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	421.520.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13.41	389.405.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					389.405.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	16210	389.405.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				389.405.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	389.405.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	13.71	207.158.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					207.158.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	9900	207.158.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				207.158.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	207.158.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	14.95	230.330.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					230.330.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Unit	10670	230.330.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				230.330.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	230.330.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	13.33	339.527.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					339.527.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Unit	19740	339.527.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				339.527.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	339.527.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	13.54	363.840.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					363.840.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Unit	17890	363.840.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				363.840.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	363.840.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	13.62	322.140.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					322.140.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	17880	322.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				322.140.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	322.140.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	13.63	455.663.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					455.663.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Unit	25820	455.663.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				455.663.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	455.663.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	13.36	231.430.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					231.430.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	9140	231.430.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				231.430.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	231.430.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	13.46	369.780.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					369.780.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	14250	369.780.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				369.780.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	369.780.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13.46	203.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					203.050.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	9740	203.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				203.050.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	203.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	13.43	312.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					312.050.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Unit	3240	312.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				312.050.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	312.050.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	13.51	190.020.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					190.020.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Unit	6900	190.020.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				190.020.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	190.020.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	12.67	97.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					97.400.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Unit	4430	97.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				97.400.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	97.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	14.69	344.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					344.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1	Unit	23740	344.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				344.200.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	344.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	13.55	308.248.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					308.248.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Unit	18120	308.248.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				308.248.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	308.248.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	13.55	197.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					197.750.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Unit	16400	197.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				197.750.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	197.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	13.57	407.260.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					407.260.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Unit	16810	407.260.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				407.260.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	407.260.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19.19	250.160.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					250.160.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Unit	9890	250.160.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				250.160.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	250.160.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	4.31	18.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.900.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	3895000	18.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	18.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	-10.17	41.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.550.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	740000	41.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	41.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	4.69	48.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					48.750.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	395000	48.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				48.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	48.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	14.7	18.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	100000	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	14.18	16.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.950.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	200000	16.950.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	16.950.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	13.3	16.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	266000	16.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	16.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	2.39	18.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	3925000	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	5.28	18.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.900.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	230000	18.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	18.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	-11.08	18.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	900000	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	-4.88	16.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	12000	16.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	16.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-0.41	16.725.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.725.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	408000	16.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.725.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	16.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	-6	19.125.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.125.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	736000	19.125.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				19.125.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	19.125.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	32.23	31.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					31.350.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	96000	31.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				31.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	31.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	-1.14	19.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	550000	19.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				19.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	19.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	-11.69	15.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	7000	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				15.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	19.12	23.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					23.550.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	905000	23.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				23.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	23.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	-6.74	18.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	78000	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-14.86	35.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					35.700.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	291000	35.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				35.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	35.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	7.36	17.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.250.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	247000	17.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				17.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	17.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	4.55	26.355.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					26.355.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	454000	26.355.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				26.355.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	26.355.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	-2.81	16.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	110000	16.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	16.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	7.95	25.815.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.815.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	96000	25.815.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				25.815.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	25.815.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	-11.35	22.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					22.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	1260000	22.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				22.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	22.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	-4.52	16.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	7500	16.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	16.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-16.09	19.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	235000	19.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				19.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	19.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	11.08	20.025.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.025.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	406000	20.025.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				20.025.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.025.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	11.47	27.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.450.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	316000	27.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				27.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	27.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KABUPATEN Wonogiri	%	-21.29	19.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	255500	19.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				19.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	19.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-3.04	28.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					28.900.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	567000	28.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				28.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	28.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	-4.53	19.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	105000	19.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				19.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	19.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	2.58	18.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	50000	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	18.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	-0.21	16.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	572000	16.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	16.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	19.63	15.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	435000	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	0.55	15.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	50000	15.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				15.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	15.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	3.19	1.098.000.000	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.098.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah	Dokumen	4	399.000.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				399.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	399.000.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana	Laporan	4	347.000.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				347.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	347.000.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain	Laporan	4	352.000.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				352.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	352.000.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	6.97	28.584.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					28.584.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	87928	28.584.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				28.584.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	28.584.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	9.36	73.980.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.980.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	234072	73.980.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				73.980.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	73.980.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	9.37	60.555.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					60.555.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	73960	60.555.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				60.555.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	60.555.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	21.32	37.895.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					37.895.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	124083	37.895.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				37.895.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	37.895.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	6.13	29.811.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					29.811.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	103130	29.811.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				29.811.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	29.811.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	12.68	80.439.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					80.439.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	138458	80.439.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				80.439.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	80.439.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	31.53	47.401.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					47.401.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	162735	47.401.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				47.401.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	47.401.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	14.09	24.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					24.900.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	96369	24.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				24.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	24.900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	15.03	55.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					55.600.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	164364	55.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				55.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	55.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-35.43	27.657.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.657.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	158559	27.657.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				27.657.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	27.657.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	23.37	27.813.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.813.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	95327	27.813.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				27.813.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	27.813.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	20.73	54.017.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					54.017.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	134169	54.017.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				54.017.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	54.017.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	11.16	41.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.550.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	86779	41.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	41.550.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	7.6	51.055.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.055.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	177532	51.055.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				51.055.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	51.055.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	12.52	29.357.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					29.357.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	124200	29.357.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				29.357.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	29.357.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	11.24	71.568.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					71.568.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	220382	71.568.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				71.568.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	71.568.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	20.59	32.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	132609	32.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				32.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	32.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	17.76	41.011.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.011.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	80275	41.011.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.011.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	41.011.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	9.48	35.570.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					35.570.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	121007	35.570.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				35.570.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	35.570.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	22.05	30.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					30.100.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	89068	30.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				30.100.000		
						Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	30.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	32.02	56.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					56.400.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	88320	56.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				56.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	56.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	27.65	27.921.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.921.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	99233	27.921.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				27.921.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	27.921.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	21.18	33.598.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					33.598.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	169815	33.598.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				33.598.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	33.598.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	6.99	24.348.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					24.348.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	72080	24.348.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				24.348.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	24.348.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	10.38	37.424.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					37.424.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	118348	37.424.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				37.424.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	37.424.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	12.3	52.212.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					52.212.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	90995	52.212.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				52.212.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	52.212.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	19.39	28.680.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					28.680.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	93957	28.680.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				28.680.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	28.680.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	15.75	41.757.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.757.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	160359	41.757.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.757.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	41.757.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	5.55	34.611.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					34.611.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	109617	34.611.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				34.611.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	34.611.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21.75	18.192.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.192.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	74732	18.192.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				18.192.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	18.192.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	18.98	17.068.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.068.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	73637	17.068.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				17.068.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	17.068.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	12.37	25.253.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.253.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	78150	25.253.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				25.253.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	25.253.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	13.17	150.620.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					150.620.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	365453	150.620.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				150.620.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	150.620.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	18.67	53.008.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					53.008.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	243079	53.008.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				53.008.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	53.008.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	17.95	65.411.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					65.411.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	308090	65.411.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				65.411.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	65.411.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	13.93	54.559.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					54.559.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	198818	54.559.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				54.559.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	54.559.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	78.96	22.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					22.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	311023	22.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				22.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	22.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
JUMLAH									295.488.152.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									47.625.407.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								47.118.312.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81.1	47.118.312.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						47.118.312.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	39.860.980.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.434.373.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	31.434.373.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.576.252.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	29.576.252.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.661.421.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.661.421.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				56.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	56.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				140.700.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	140.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.066.707.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.066.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				565.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	565.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				150.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				300.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				601.707.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	601.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	5	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					95.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	521	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				35.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	60	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.664.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	4.664.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.804.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.804.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.500.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	326	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	66	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	7.257.332.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					534.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	534.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				204.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	204.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	60.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	170.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.551.454.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.551.454.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.170.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.170.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.380.254.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.380.254.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.171.378.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	730	3.171.378.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				132.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	132.600.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				70.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	350	70.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.268.778.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	350	1.268.778.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.700.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.700.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								507.095.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target (9)	Rp (000) (10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	1.29	507.095.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						507.095.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	507.095.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					507.095.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	507.095.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				256.300.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	256.300.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.795.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	250.795.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah									7.285.455.540.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97.91		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan								7.285.455.540.000		
						Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	7.278.155.540.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						7.278.155.540.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	7.268.355.540.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					7.268.355.540.000		
						Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dokumen	1	7.268.355.540.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				3.046.794.308.000		
						Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	1	3.046.794.308.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.000.000.000		
						Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	25.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				4.196.561.232.000		
						Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	Dokumen	1	4.196.561.232.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	1.200.000.000	SEKRETARIAT	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					1.200.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105	1.200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				498.400.000		
						Terlaksananya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	498.400.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				44.900.000		
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	44.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	8.600.000.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					8.600.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	4.757.137.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				160.000.000		
						Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4.597.137.000		
						Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Dokumen	2	4.597.137.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	2.884.546.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				160.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.724.546.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Dokumen	2	2.724.546.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusnya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	Dokumen	35	958.317.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				958.317.000		
						Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35	958.317.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	4.150.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						4.150.000.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	4.150.000.000	Bidang Akuntansi	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					4.150.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Dokumen	1	1.199.137.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				408.927.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan	1	408.927.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				790.210.000		
						Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	790.210.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Dokumen	1	1.066.096.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				746.868.000		
						Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	746.868.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				319.228.000		
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	319.228.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Dokumen	1	1.884.767.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				220.530.000		
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	220.530.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.664.237.000		
						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1	1.664.237.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi APBD	%	93.75	3.150.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						3.150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	3.150.000.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.200.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	2	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				600.000.000		
						Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Dokumen	1	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				600.000.000		
						Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Dokumen	1	1.000.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				400.000.000		
						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	49	400.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				600.000.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49	600.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					950.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Dokumen	2	950.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				950.000.000		
						Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	950.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah									5.365.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	89.86		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan								5.365.000.000		
						Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	5.365.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						5.365.000.000		
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	1.837.000.000	Bidang Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.837.000.000		
						Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Angka	72.46	1.705.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.705.000.000		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.705.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	%	100	132.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				132.000.000		
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	42	132.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	89.86	1.180.000.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.180.000.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Dokumen	1	1.180.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah				352.000.000		
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	352.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah				400.000.000		
						Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	42	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				428.000.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	84	428.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMd) tepat waktu	%	100	2.348.000.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.348.000.000		
						Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	2.348.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				698.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	698.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				189.000.000		
						Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	189.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah				193.000.000		
						Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	193.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.268.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	1.268.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									7.338.445.947.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									32.813.136.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								32.313.136.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	32.313.136.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						32.313.136.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	92	32.253.136.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.720.170.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	27.720.170.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.602.950.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	26.602.950.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.022.220.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.022.220.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.000 7			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2		20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						170.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					140.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30		140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					30.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.195.966.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		1.195.966.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12		20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2		140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.966.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		25.966.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					150.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu					150.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					500.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					110.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12		110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5		175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud					75.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.112.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12		2.112.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.350.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	1.350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; ACEH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	92	60.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								500.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.22	500.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						500.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3.222	500.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	18	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	23	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN									10.157.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Indeks Sistem Merit	Angka	0.87		Badan Kepegawaian Daerah	
	Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel								6.711.000.000		
						Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja	Angka	357.5	6.711.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						6.711.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	3.501.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Mutasi dan Promosi ASN					600.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%	100	600.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Promosi ASN				600.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan	Orang	148	600.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					2.626.000.000		
						Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	%	100	2.626.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2.256.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan	Orang	1000	100.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	Orang	66	2.156.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				50.000.000		
						Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan	%	100	50.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				320.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	1000	20.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	Dokumen	1800	300.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					275.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	275.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				275.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	Orang	38000	275.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	140.000.000	Bidang Mutasi	
				Mutasi dan Promosi ASN					140.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	140.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Mutasi ASN				140.000.000		
						Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi	Dokumen	350	140.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	3.070.000.000	Bidang Mutasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					3.070.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	3.070.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				110.000.000		
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Dokumen	1	110.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2.960.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	Orang	400	60.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Kegiatan	1	2.900.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi								3.446.000.000		
						Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi	Angka	75.5	3.446.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.446.000.000		
						Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	315.000.000	Bidang Mutasi	
				Mutasi dan Promosi ASN					315.000.000		
						Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	%	100	315.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				315.000.000		
						Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1000	315.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	710.000.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					710.000.000		
						Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	60	710.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				385.000.000		
						Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	%	60	385.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian				325.000.000		
						Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola	Dokumen	150000	313.850.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang dikelola	Dokumen	16900	11.150.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	1.021.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Pengembangan Kompetensi ASN					1.021.000.000		
						Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	%	100	1.021.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				1.021.000.000		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	300	606.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	400	200.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	Orang	15000	215.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	280.000.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					280.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	280.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				280.000.000		
						Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	2100	280.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	1.120.000.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					275.000.000		
						Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	275.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				275.000.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	Orang	300	175.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	%	100	100.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					845.000.000		
						Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	100	845.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				292.800.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	Orang	300	292.800.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				92.200.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa	Orang	2000	92.200.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				180.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin	Orang	550	180.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				280.000.000		
						Persentase Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	280.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									42.970.136.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN									15.836.640.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3.08		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN								15.436.640.000		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	17.34	15.436.640.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						15.436.640.000		
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3.5	416.885.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					26.700.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	26.700.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				2.924.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	2.924.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.0004			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				23.776.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	15	4.224.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	18	19.552.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					390.185.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	390.185.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				70.000.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	10	70.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan				320.185.000		

					Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	16		41.631.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1		48.739.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	3		167.267.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	26		62.548.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100		1.300.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.300.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1150		1.300.000.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.04.02.1.02.000 7			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					1.300.000.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	660		547.220.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	250		448.644.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	240		304.136.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100		12.336.640.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						12.336.640.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	1320		12.336.640.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	
		5.04.02.1.02.000 7			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					12.336.640.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	624		2.859.440.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	240		3.768.900.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	200		2.749.600.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120		2.559.600.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	200		399.100.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100		1.200.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Pengembangan Kompetensi Teknis						1.200.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	17320		1.200.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	
		5.04.02.1.01.000 3			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah					1.200.000.000		

					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	5760	381.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	5760	384.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	5800	435.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	183.115.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					121.250.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	121.250.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.01.000 1			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				21.250.000		
						Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi	Dokumen	2	19.750.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.000 2			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				100.000.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	18	100.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					61.865.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	61.865.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.000 1			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				58.750.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	17.250.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	20	40.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				3.115.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	3.115.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN								400.000.000		
						Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	400.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						400.000.000		
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	400.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					400.000.000		
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	400.000.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.000 2			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				25.437.000		
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	2	10.459.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	3	14.978.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.000 3			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				374.563.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	150	374.563.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH									43.874.265.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								43.524.265.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	43.524.265.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						43.524.265.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	43.524.265.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.413.493.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	29.413.493.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.693.553.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	27.693.553.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.499.930.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.499.930.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				82.174.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	82.174.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				78.868.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	Laporan	1	78.868.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				58.968.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	58.968.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					234.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				234.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					79.990.000		
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	79.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				79.990.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	79.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					198.400.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	198.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				48.400.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	48.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.088.982.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.088.982.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				178.093.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	178.093.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				188.916.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	188.916.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				343.025.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	343.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				305.260.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	305.260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	76.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				105.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	105.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.693.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	280.693.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	8.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				566.890.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	566.890.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					297.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	297.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				218.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	11	218.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				69.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	69.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.725.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.725.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.252.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.252.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.469.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	7.469.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.486.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	1.486.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	117.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				21.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	21.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				760.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	760.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				588.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	588.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								350.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						350.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	350.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					350.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									59.710.905.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung									20.268.891.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71.6			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								20.140.824.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	20.140.824.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.140.824.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	20.140.824.000	Badan Penghubung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.898.194.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.898.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.840.414.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	52	9.840.414.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	37.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					251.580.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	251.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				251.580.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	35	251.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	65	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.757.213.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.757.213.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.941.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				204.372.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	204.372.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				630.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	630.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.500.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	198	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.239.837.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.239.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				950.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.188.837.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	4.188.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.404.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.404.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				762.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	31	762.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	13	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				86.100.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	6	86.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				380.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung								128.067.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	128.067.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						128.067.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	128.067.000	Badan Penghubung	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					128.067.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	128.067.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				68.067.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	68.067.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	9	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung									3.992.880.000		
						Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85			
	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								3.992.880.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	3.992.880.000		
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						3.992.880.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	3.992.880.000	Badan Penghubung	
				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					3.992.880.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	%	100	1.050.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1.050.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	520.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	530.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	100	2.792.880.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	
		5.07.02.1.01.0001			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				2.792.880.000		
						Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi	Laporan	12	500.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung	Orang	3742	2.292.880.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Terpenuhihinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah	%	100	150.000.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				150.000.000		
						Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah	Kegiatan	6	150.000.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
JUMLAH									24.261.771.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									30.733.832.000	INSPEKTORAT	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								30.628.832.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83.7	30.628.832.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.628.832.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	30.628.832.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.827.954.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	24.827.954.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.812.954.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	131	24.812.954.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					587.889.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	587.889.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				567.889.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	567.889.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					820.434.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	820.434.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.214.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.214.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				300.220.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	300.220.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				480.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	480.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					70.012.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	70.012.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				17.400.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	17.400.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.612.000		
						umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	52.612.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.782.015.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.782.015.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				229.940.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	229.940.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				707.074.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	707.074.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.581.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	40.581.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.804.420.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.804.420.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.340.028.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	152	1.340.028.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.953.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11	37.953.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				553.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	23	553.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	7	20.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	108	160.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				419.075.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	419.075.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								105.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	105.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						105.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	105.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	60.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	45.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi									8.903.799.000		
						Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3			
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah								2.830.072.000		
						Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	2.830.072.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.830.072.000		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	%	12.24	1.858.725.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					1.858.725.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	5	1.858.725.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.858.725.000		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	1.858.725.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	12.24	971.347.000	SEKRETARIAT	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					198.940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan	1	198.940.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0001			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				198.940.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	198.940.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendampingan dan Asistensi					772.407.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	5	772.407.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.0002			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				772.407.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	49	772.407.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal								6.073.727.000		
						Level Kapabilitas APIP	Level	3	6.073.727.000		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						6.073.727.000		
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	84	579.243.000	SEKRETARIAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					579.243.000		
						Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Dokumen	2	579.243.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindakTindakLanjut LanjutHasil Hasil				579.243.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	70	579.243.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	86	1.474.400.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.474.400.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	1.474.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.126.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	1.126.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.000			Reviu Laporan Keuangan				348.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	348.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	86	1.279.300.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.279.300.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	1.279.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0001			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	200.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1.079.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20	1.079.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	86	1.420.914.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.420.914.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.420.914.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	86	1.319.870.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.319.870.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	1.319.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0003			Reviu Laporan Kinerja				484.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	60	484.250.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				835.620.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	835.620.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									39.637.631.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik									233.222.583.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.905		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa								134.155.107.000		
						Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	3.01	134.155.107.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						3.865.113.000		
						Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3.1	3.865.113.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					3.865.113.000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	85	1.096.000.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				35.210.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	35.210.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0007			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				9.590.000		
						Jumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	35	9.590.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		8.01.02.1.01.0008			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				44.611.000		
						Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Dokumen	4	44.611.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		8.01.02.1.01.0009			Pelaksanaan tugas Paskibraka				11.042.000		
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka	Dokumen	4	11.042.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		8.01.02.1.01.001			Pembentukan Paskibraka				995.547.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka	Orang	70	995.547.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	%	85	2.769.113.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				2.715.113.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3200	2.715.113.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka				54.000.000		

					Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	54.000.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						127.445.543.000		
						Indeks kinerja ormas	Nilai	77.87	127.445.543.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					127.445.543.000		
						Skor variabel program dan kegiatan ormas	Skor	37.31	124.715.000.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.000 5			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				124.715.000.000		
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	124.715.000.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Skor variabel sumber daya ormas	Skor	40.56	2.730.543.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.000 3			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2.550.543.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	3200	2.550.543.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.04.1.01.000 4			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				180.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	200	180.000.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						2.844.451.000		
						Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3.1	2.044.959.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					2.044.959.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	87	2.044.959.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2.044.959.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2400	2.044.959.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Indeks toleransi	%	74.3	799.492.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					799.492.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	87	799.492.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				593.400.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	800	593.400.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				206.092.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	206.092.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> CILACAP
	Meningkatnya Stabillitas Politik								99.067.476.000		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.8	99.067.476.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						50.923.529.000		
						IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	76	50.923.529.000	Bidang Politik Dalam Negri	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					50.923.529.000		

						Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik	%	89.5	2.462.040.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 3			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.462.040.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	3055	2.462.040.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89.5	48.091.944.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 5			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				48.091.944.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	48.091.944.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89.5	369.545.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 2			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				29.660.000		
						Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	4	29.660.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.000 4			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				339.885.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	120	339.885.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						48.143.947.000		
						Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73.5	48.143.947.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					48.143.947.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	%	77	2.701.086.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2.701.086.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3200	2.701.086.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan konflik sosial	%	100	45.442.861.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5000	200.000.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				43.742.861.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	8	43.742.861.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.500.000.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	5	1.500.000.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									18.068.613.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74.5		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								15.766.496.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.15	15.766.496.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.766.496.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	15.766.496.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.195.687.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	10.195.687.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.822.687.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	62	9.822.687.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	14	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					370.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	370.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	80	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				260.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	110	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.516.629.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.516.629.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	50	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				731.629.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	731.629.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	8	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					400.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	41	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000		
						Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	27	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.591.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.591.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.134.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	2.134.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					613.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	613.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				225.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	21	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				205.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	200	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								2.302.117.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.6	2.302.117.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
									2.302.117.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	2.302.117.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.302.117.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	2.302.117.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.350.280.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	1.350.280.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				951.837.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	951.837.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA	
JUMLAH									251.291.196.000			

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									15.780.100.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70.2			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								15.440.100.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84.25	15.440.100.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.440.100.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	15.440.100.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.928.099.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	19	10.928.099.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.484.539.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	67	10.484.539.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				223.560.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	223.560.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				110.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				110.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	125.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					340.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	340.000.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				280.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	280.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	45.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	45	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.014.435.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.014.435.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.374.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	112.374.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				65.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	65.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				94.561.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	94.561.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	40	150.000.000		
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				150.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	10	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.676.766.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.676.766.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				570.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	570.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				305.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	305.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				796.766.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	796.766.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.205.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	700	1.205.800.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				375.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	375.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				12.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	12.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				58.800.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	56	58.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				90.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	90.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				305.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	305.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				235.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	235.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	130.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								340.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.92	340.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						340.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	340.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					340.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	340.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				240.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	240.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah									4.675.000.000		
						Indeks Inovasi Daerah	Angka	73			
	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah								4.675.000.000		
						Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan	%	100	4.675.000.000		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.675.000.000		
						Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	1.225.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					342.872.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi	Dokumen	1	342.872.000		
		5.05.02.1.01.001 2			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.001 4			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				317.872.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	317.872.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					882.128.000		
						Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi	Dokumen	1	882.128.000		
		5.05.02.1.04.000 4			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				690.846.000		
						Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	Laporan	1	690.846.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04.000 5			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				191.282.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	Laporan	1	191.282.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	900.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					900.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur	Dokumen	1	900.000.000		
		5.05.02.1.01.000 3			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				552.000.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	552.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.000 4			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				348.000.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	348.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	1.350.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					218.000.000		
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	1	218.000.000		
		5.05.02.1.02.0001			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				218.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Dokumen	1	218.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					218.000.000		
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	1	218.000.000		
		5.05.02.1.03.0005			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				218.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	218.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					914.000.000		
						Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Dokumen	1	914.000.000		
		5.05.02.1.04.0002			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				914.000.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1	914.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	1.200.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					675.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	1	675.000.000		
		5.05.02.1.01.0002			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				250.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	1	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0013			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				425.000.000		
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan	Dokumen	1	425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					525.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	525.000.000		
		5.05.02.1.04.0001			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				525.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	525.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									20.455.100.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

 bappeda.jatengprov.go.id



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024